



FUNCTIONAL VALUE CHAIN

PENGUATAN END TO END BUSINESS

LAPORAN TAHUNAN **2023** ANNUAL REPORT



FUNCTIONAL VALUE CHAIN

PENGUATAN *END TO END BUSINESS*

Perhutani berfokus pada memanfaatkan peluang bisnis dan pengembangan produk baru, meningkatkan efisiensi pada aspek operasional dan bisnis, memperkuat infrastruktur dan penggunaan teknologi, serta menciptakan nilai tambah melalui kerjasama dan kemitraan dengan Klaster BUMN maupun perusahaan swasta lainnya. Yang terpenting, tujuan utama perusahaan adalah untuk terus memperkuat *end to end* bisnis dalam rangka pengelolaan bisnis kehutanan yang berkelanjutan dengan tetap turut serta dalam kontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perhutani focuses on exploiting business opportunities and developing new products, increasing efficiency in operational and business aspects, strengthening infrastructure and the use of technology, and creating added value through collaboration and partnerships with State-owned enterprises Clusters and other private companies. The company's main objective is to continue to strengthen end-to-end business in the context of sustainable forestry business management while continuing to participate in contributing to improving the welfare of communities around the forest, both directly and indirectly.



Functional Value Chain: Penguatan *End to End Business*

Perhutani berfokus pada memanfaatkan peluang bisnis dan pengembangan produk baru, meningkatkan efisiensi pada aspek operasional dan bisnis, memperkuat infrastruktur dan penggunaan teknologi, serta menciptakan nilai tambah melalui kerjasama dan kemitraan dengan Kluster BUMN maupun perusahaan swasta lainnya. Yang terpenting, tujuan utama perusahaan adalah untuk terus memperkuat end to end bisnis dalam rangka pengelolaan bisnis kehutanan yang berkelanjutan dengan tetap turut serta dalam kontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan baik secara langsung maupun tidak langsung., baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perhutani focuses on exploiting business opportunities and developing new products, increasing efficiency in operational and business aspects, strengthening infrastructure and use of technology, as well as creating added value through collaboration and partnerships with BUMN Clusters and private companies. Most importantly, The company's main objective is to continue to strengthen end-to-end business in the context of sustainable forestry business management while continuing to participate in contributing to improving the welfare of communities around the forest, both directly and indirectly.

Tema ini mencerminkan komitmen Perhutani dalam mengoptimalkan setiap proses dalam rantai nilai perusahaan, mulai dari tahap awal hingga akhir, untuk menciptakan efisiensi dan nilai tambah yang maksimal:

1. Presisi Planning

Perbaikan proses perencanaan di Perum Perhutani yang diawali dengan Rebranding yang sudah dilakukan pada tahun 2020, implementasi corporate plan RJPP 2020 - 2024, sampai dengan Perbaikan perencanaan sektor kehutanan pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

2. Operasional Excellence melalui Peningkatan efisiensi pada aspek operasional dan bisnis

Peningkatan efisiensi operasional menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam rantai nilai berjalan lancar dan efisien. Ini dapat mencakup penerapan praktik terbaik dalam manajemen sumber daya, optimalisasi proses produksi, dan pola distribusi yang efektif.

This theme reflects Perhutani's commitment to optimizing every process in the company's value chain, from the initial to the final stages, to create maximum efficiency and added value.

1. Precision Planning

Improvement of the planning process at Perum Perhutani, which began with rebranding, which was carried out in 2020, implementation of the 2020-2024 RJPP corporate plan, and improvement of forestry sector planning after the issuance of the Job Creation Law (UUCK), Government Regulation (PP) Number 23 of 2021 concerning Forestry Implementation and Forest Area Policy with Special Management (KHDPK).

2. Operational Excellence through Increasing Efficiency in Operational and Business Aspects

Increasing operational efficiency is the main focus to ensure that every step in the value chain runs smoothly and efficiently. This can include implementing best practices in resource management, optimizing production processes, and creating effective distribution patterns.

3. Memanfaatkan Peluang Bisnis dan Pengembangan Produk baru.

Perhutani terus mencari dan memanfaatkan peluang bisnis yang dapat memperkuat posisi Perusahaan, termasuk inovasi dan diversifikasi produk, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan serta market trend yang terus berkembang.

3. Utilizing Business Opportunities and New Product Development.

Perhutani continues to seek and utilize business opportunities that can strengthen the company's position, including product innovation and diversification, which aim to meet customer needs and expectations as well as evolving market trends.

4. Menciptakan Nilai Tambah Melalui Kerjasama dan Kemitraan

Kerjasama strategis sebagai salah satu kunci untuk menciptakan nilai tambah. Kolaborasi semacam ini memungkinkan pertukaran pengetahuan, pengembangan sinergi bisnis, dan memperluas jangkauan pasar, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing perusahaan.

4. Creating Added Value Through Collaboration and Partnerships

Strategic cooperation is one of the keys to creating added value. This kind of collaboration enables the exchange of knowledge, the development of business synergies, and expanding market reach, ultimately increasing the company's competitiveness.

5. Kontribusi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Perhutani tidak hanya berfokus pada keuntungan bisnis, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan dampak positif pada masyarakat. Melalui berbagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan inisiatif pembangunan komunitas, Perhutani berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Contribution to Improving Community Welfare

Perhutani not only focuses on business profits but is also committed to providing a positive impact on society. Through various social and environmental responsibility (TJSL) and community development initiatives, Perhutani seeks to improve community welfare both directly and indirectly.

DAFTAR ISI

Table of Contents

Penjelasan Tema Laporan Tahunan 2023 Annual Report 2023 Theme Description	1
Daftar Isi Table of Contents	6
Kesinambungan Tema Theme Continuity	8

IKHTISAR 2023

2023 Highlights

IKHTISAR 2023	11
Ikhtisar Kinerja Keuangan Financial Performance Highlights	12
Ikhtisar Kinerja Operasional Operational Performance Overview	15
Informasi Harga Saham Stock Price Information	19
Informasi Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi Information on Bonds, Sukuk, or Convertible Bonds	19
Ikhtisar Kinerja 2023 2023 Performance Highlights	20

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

LAPORAN MANAJEMEN	23
Laporan Dewan Pengawas Supervisory Board Report	25
Profil Dewan Pengawas Profile of the Supervisory Board	30
Laporan Direksi Board of Directors Report	37
Profil Direksi Board of Directors Profile	45
Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Pengawas untuk Laporan Tahunan 2023 Supervisory Board Statements of Responsibility on 2023 Annual Report	52
Pernyataan Tanggung Jawab Direksi untuk Laporan Tahunan 2023 Board of Directors Statements of Responsibility on 2023 Annual Report	53

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

PROFIL PERUSAHAAN	55
Identitas Perusahaan Corporate Identity	56
Jejak Langkah Perusahaan Company Milestone	58
Logo Perusahaan Company Logo	59
Riwayat Singkat Perusahaan Company Brief History	60
Bidang Usaha Perum Perhutani Perum Perhutani Line of Business	62
Visi dan Misi Perusahaan Company Vision and Mission	64
Tata Nilai Perusahaan Company Core Value	65
Sumber Daya Manusia Human Resources	67
Komposisi Pemilik Modal Shareholder Composition	79

Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	79
Struktur Organisasi Perusahaan Company Organization Structure	80
Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi List of Subsidiaries and/or Associated Entities	83
Wilayah Operasional Perum Perhutani Perum Perhutani Operational Area	84
Nama dan Alamat Entitas dan/atau Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Kantor Pusat Name and Address of Subsidiary and/or Branch Office or Head Office Representative Office	84
Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Name and Address of Institution and/or Supporting Profession	86
Kronologis Pencatatan Saham Share Listing Chronology	86
Kronologis Pencatatan Efek Lainnya Other Securities Listing Chronology	86
Informasi Pada Website Perusahaan Information on Company Website	87
Penghargaan Awards	90
Sertifikasi Certification	92
Peristiwa Penting 2022 Events Highlights	93
Teknologi Informasi Perusahaan Company Information Technology	102

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion & Analysis

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN	109
Tinjauan Ekonomi Makro Macroeconomic Overview	110
Tinjauan Industri Industry Overview	113
Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Overview of Operations Per Business Segment	124
Prospek Pengembangan Usaha Business Development Prospect	143
Tinjauan Kinerja Keuangan Review of Financial Performance	148
Analisis Rasio Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Ratio Analysis	165
Tinjauan Keuangan Lainnya Other Financial Overview	168
Struktur Modal Capital Structure	170
Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal Material Ties for Capital Investment	171
Investasi Barang Modal Investment in Capital Goods	172
Perbandingan Antara Target Pada Awal Tahun Buku Dengan Hasil Yang Dicapai (Realisasi), dan Target atau Proyeksi Yang Ingin Dicapai Untuk Satu Tahun Mendatang Comparison between the Target at the Beginning of the Financial Year and the Results Achieved (Realization), and Targets or Projections to be Achieved for the Next Year	173

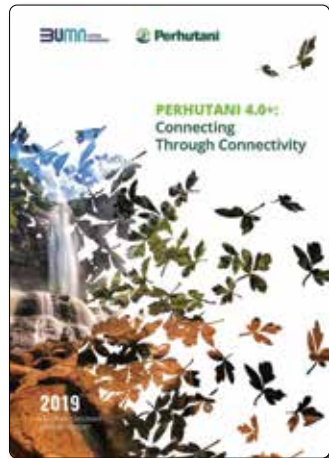


Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts that Occurred After the Accountant's Report Date	177	Sekretaris Dewan Pengawas Secretary of the Supervisory Board	276
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen yang Dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP) Employee and/or Management Share Ownership Program Implemented by the Company (ESOP/MSOP)	177	Komite Dewan Pengawas Supervisory Board Committee	279
Dividen Dividend	178	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	297
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering	178	Satuan Pengawasan Intern Internal Audit Unit	305
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties	179	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	314
Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan Changes in Laws and Regulations that Significantly Affect the Company	183	Manajemen Risiko Risk Management	319
Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir Changes in Accounting Policies Applied by the Company in the Last Financial Year	184	Akuntan Publik Public Accountant	335
Informasi Kelangsungan Usaha Business Continuity Information	185	Akses Informasi dan Data Perusahaan Access on Company Information and Data	337
Kontribusi Kepada Negara Contribution to the Country	186	Permasalahan Hukum Litigation	340
TATA KELOLA PERUSAHAAN	189	Pedoman Etika Perusahaan Code of Conduct	348
Good Corporate Governance		Gratifikasi Gratification	354
Laporan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Report	190	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) State Officials' Wealth Report (LHKPN)	356
Pemilik Modal dan Rapat Pembahasan Bersama Capital Owners and Joint Discussion Meetings	216	Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services	358
Dewan Pengawas Supervisory Board	221	Whistleblowing System	365
Direksi Board of Directors	240	Kebijakan Insider Trading Perhutani Perhutani Insider Trading Policy	374
Penilaian Dewan Pengawas dan Direksi Assessment of the Supervisory Board and Directors	268	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	377
Pengungkapan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Disclosure of Remuneration for the Supervisory Board and Directors	271	Corporate Social Responsibility	
		REFERENSI PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN	380
		Referensi Penyusunan Laporan Tahunan	
		LAMPIRAN FITCH RATINGS	393
		Fitch Ratings Attachment	
		LAPORAN KEUANGAN AUDIT	397
		Audited Financial Report	

Kesinambungan Tema

Theme Continuity

2019



2020



Perhutani 4.0: Connecting Through Connectivity

Tahun 2019 Perum Perhutani mengambil langkah eksekusi besar dengan mencanangkan "Perhutani 4.0: Connecting Through Connectivity" sebagai semangat perusahaan menyambut dunia baru dengan optimis.

In 2019, Perum Perhutani took a big step in executing by launching "Perhutani 4.0: Connecting Through Connectivity" as the company's spirit to welcome the new world with optimism.

Serving People, Taking Care Planet for Sustainability

Serving People, Taking Care The Planet for Sustainability, menopang dari kinerja keuangan (*Profit*) sampai saat ini, aktivitas kita ke depannya akan berfokus kepada peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat (*People*) dan kelestarian lingkungan (*Planet*).

Serving People, Taking Care of the Planet for Sustainability, supports financial performance (*Profit*) to date, our future activities will focus on improving the quality of community empowerment (*People*) and environmental sustainability (*Planet*).

Sanggahan & Batasan Tanggung Jawab

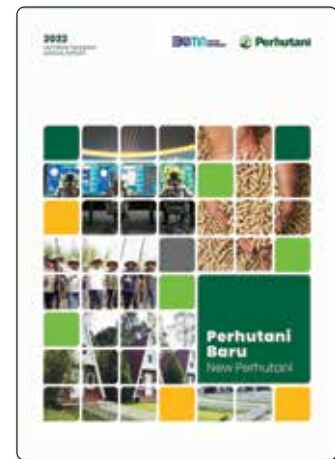
Disclaimer and Limitation of Liability

Laporan Tahunan ini memuat berbagai pernyataan terkait kondisi keuangan, operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko serta ketidakpastian, hingga kemungkinan perbedaan dengan perkembangan yang aktual. Berbagai pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi mengenai kondisi terkini, serta proyeksi atas situasi mendatang terkait lingkungan bisnis Perusahaan. Perum Perhutani tidak dapat menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil yang pasti. Laporan Tahunan ini memuat kata "Perusahaan", atau "Perum Perhutani" yang mengacu pada Perum Perhutani. Selain itu, kata "Kami" juga digunakan pada beberapa kesempatan dengan fungsi yang sama, atas pertimbangan kemudahan penyebutan Perum Perhutani. Laporan Tahunan Perum Perhutani tahun 2023 bisa dilihat dan di unduh di website resmi Perum Perhutani www.perhutani.co.id.

2021



2022



Rise and Growth

"RISE" merupakan refleksi upaya Perhutani untuk senantiasa menguatkan posisinya melalui peningkatan kompetensi dan kapabilitas sumber daya, peningkatan kinerja dan pengembangan inovasi berkelanjutan agar mampu bertumbuh ("GROWTH") dan menjadi perusahaan pengelola hutan yang terkemuka.

"RISE" is a reflection of Perhutani's efforts to continually strengthen its position by increasing competency and resource capability, improving performance, and developing sustainable innovation in order to be able to grow and become a leading forest management company.

Perhutani Baru

Untuk mencapai second curve bisnis perusahaan, Perhutani perlu melakukan cara-cara baru. Dimulai dari kelola kawasan baru, model bisnis baru, pengaturan ulang tata cara menjalankan usaha, mempertajam pusat pendapatan eksisting dan menggali sumber pendapatan baru. Salah satu upaya mewujudkan #PerhutaniBaru dalam RKAP 2022 Perhutani mengedepankan DIGITALISASI melalui pemanfaatan IT untuk otomasi proses bisnis dan HILIRISASI melalui sinergi bisnis, revitalisasi, dan pembangunan industri baru. Perhutani Baru siap bergerak maju dan bertransformasi menuju kinerja terbaik Perusahaan.

To achieve the second curve of the company's business, Perhutani needs to use new methods. Starting from managing new areas, new business models, reorganizing how to run a business, sharpening existing revenue centers and exploring new sources of income. One of the efforts to realize #PerhutaniBaru in Perhutani's 2022 RKAP is prioritizing DIGITALIZATION through the use of IT to automate business process and HILIRIZATION through business synergy, revitalization and development of new industries. Perhutani Baru is ready to move forward and transform towards the Company's best performance.

This Annual Report contains various statements regarding the Company's financial condition, operations, policies, projections, plans, strategies and objectives, which are classified as forward-looking statements in the implementation of applicable laws. These statements have the prospect of risk and uncertainty, and the possibility of differences with actual developments. Various prospective statements in this Annual Report are prepared based on assumptions regarding current conditions, as well as projections of future situations related to the Company's business environment. Perum Perhutani cannot guarantee that documents whose validity has been confirmed will bring certain results. This Annual Report contains the words "Company", or "Perum Perhutani" which refers to Perum Perhutani. Apart from that, the word "We" is also used on several occasions with the same function, considering the convenience of referring to Perum Perhutani. Perum Perhutani's 2023 Annual Report can be viewed and downloaded on the official Perum Perhutani website www.perhutani.co.id.



1

IKHTISAR **2023**

2023 HIGHLIGHTS



Ikhtisar Kinerja Keuangan

Financial Performance Highlights

Labarugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Rp juta / Rp million		2023	2022	2021	2020	2019
Pendapatan	Revenue	4.776.816	4.812.351	4.596.534	3.927.388	4.137.919
Kayu	Wood	2.282.164	2.220.873	2.197.090	1.966.455	1.824.401
Non kayu	Non-wood	1.900.504	1.998.553	1.931.784	1.531.152	1.669.732
Lainnya	Other	594.148	592.925	467.660	429.781	643.786
Beban Pokok Penjualan	Cost of Goods Sold	(3.817.558)	(3.719.282)	(3.419.213)	(3.452.685)	(3.387.596)
Labaruto	Gross Profit	959.258	1.093.069	1.177.321	474.703	750.323
Perubahan nilai wajar aset biologis	Changes in the fair value of biological assets	759.251	625.720	568.585	596.902	489.868
Beban Usaha	Operating Expenses	(1.103.528)	(1.207.522)	(978.073)	(824.438)	(1.025.000)
(Rugi)/Labarusa	Operating Profit/(Loss)	614.981	511.267	767.833	247.167	215.191
Pendapatan Lain-lain	Other Income	211.397	386.683	263.325	91.925	89.803
Beban Lain-lain	Other Expenses	(163.829)	(182.447)	(106.351)	(32.209)	(9.864)
Labasebelum Pajak	Profit Before Tax	662.549	715.503	924.807	306.883	295.130
Beban Pajak Penghasilan	Income Tax Expense	(160.623)	(165.232)	496.933	(441.588)	16.213
Labatahun Berjalan	Profit for the year	501.926	550.271	427.874	748.471	205.030
Pengukuran kembali atas imbalan paska kerja	Remeasurement of post-employment benefits	(228.745)	(89.955)	(244.531)	(446.609)	(315.236)
Beban Pajak Terkait	Related Tax Burden	50.324	19.790	54.254	20.043	78.809
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	Total Comprehensive Profit for the year	323.505	480.106	237.414	321.905	(31.397)
Labayang diatribusikan kepada/Total Comprehensive Profit Attributable to:						
Pemilik entitas induk	Owner of parent entity	501.473	549.897	427.346	748.452	205.940
Kepentingan non pengendali	Non-controlling interests	453	374	528	19	(910)
Penghasilan Komprehensif yang Diatribusikan kepada/ Total Comprehensive Profit Attributable to:						
Pemilik entitas induk	Owner of parent entity	323.052	479.732	236.886	321.969	(30.299)
Kepentingan non pengendali	Non-controlling interests	453	374	528	(64)	(1.098)



Arus Kas

Cash Flow

Rp juta / Rp million		2023	2022	2021	2020	2019
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	Cash Flow from Operating Activities	48.916	527.662	616.388	546.462	102.172
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	Cash Flow from Investment Activities	(425.752)	(514.121)	(726.827)	(708.089)	(489.683)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	Cash Flow from Funding Activities	78.549	(74.389)	26.708	(153.791)	45.834
Kenaikan/ (Penurunan) Bersih - Kas dan Setara Kas	Net Increase/ (Decrease) - Cash and Cash Equivalents	(298.287)	(60.848)	(84.069)	(317.130)	(341.677)
Kas dan Setara Kas pada awal tahun	Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	558.460	623.753	707.822	1.024.952	1.366.629
Kas dan Setara Kas pada akhir tahun	Cash and Cash Equivalents at the end of the year	259.453	558.460	623.753	707.822	1.024.952

Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Position

Rp juta / Rp million		2023	2022	2021	2020	2019
Aset Lancar	Current Assets	2.106.655	2.360.790	2.698.839	2.515.230	2.856.797
Aset Tidak Lancar	Non-Current Assets	15.859.800	14.959.113	14.345.894	14.080.137	583.060
Total Aset	Total Assets	17.966.455	17.319.903	17.044.733	16.595.367	16.439.857
Liabilitas Jangka Pendek	Short-Term Liabilities	1.653.902	1.391.085	1.533.169	1.173.624	1.283.161
Liabilitas Jangka Panjang	Long-Term Liabilities	4.168.223	4.007.993	4.020.845	4.168.438	4.204.702
Total Liabilitas	Total Liabilities	5.822.125	5.399.078	5.554.014	5.342.062	5.487.863
Ekuitas	Equity	12.144.330	11.920.825	11.490.719	11.253.305	10.951.994
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	Total Liabilities and Equity	17.966.455	17.319.903	17.044.733	16.595.367	16.439.857

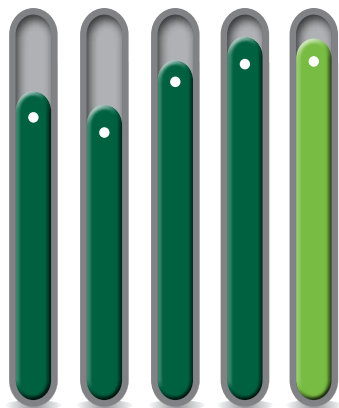
Rasio Keuangan

Financial Ratios

	%	2023	2022	2021	2020	2019
Rasio Kas	Cash Ratio	15,69	40,15	40,68	60,31	79,88
Rasio Lancar	Current Ratio	127,37	169,71	176,04	214,31	222,64
Rasio Utang terhadap Aktiva	Debt to Assets Ratio	32,41	31,17	32,58	32,19	33,38
Rasio Utang terhadap Ekuitas	Debt to Equity Ratio	47,94	45,29	48,33	47,47	50,11
Rasio Pendapatan Operasional	Operating Income Ratio	12,87	10,62	16,70	6,29	5,20
Rasio Laba Bersih terhadap Aset	Net Profit to Asset Ratio	2,79	3,18	2,51	4,51	1,25
Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas	Net Income to Equity Ratio	4,13	4,62	3,72	6,65	1,87
Rasio Laba Bersih terhadap Investasi	Net Profit to Investment Ratio	3,21	3,71	2,98	5,42	2,41
Margin Laba Bersih	Net Profit Margin	10,51	11,43	9,31	19,06	4,95

Pendapatan Revenue

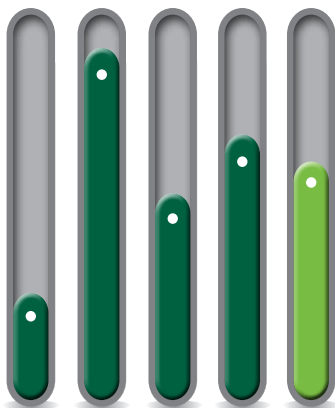
4.137.919 3.927.388 4.596.534 4.812.351 **4.776.816**



2019 2020 2021 2022 2023

Labar Tahun Berjalan Profit for the Year

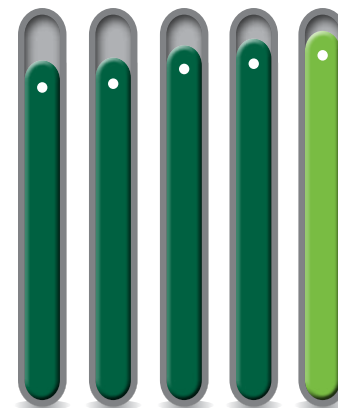
205.030 748.471 427.874 550.271 **501.926**



2019 2020 2021 2022 2023

Total Aset Total Assets

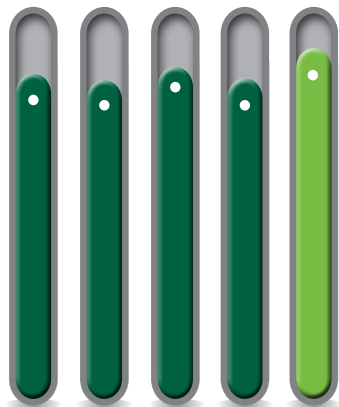
16.439.857 16.595.367 17.044.733 17.319.903 **17.966.455**



2019 2020 2021 2022 2023

Liabilitas Liabilities

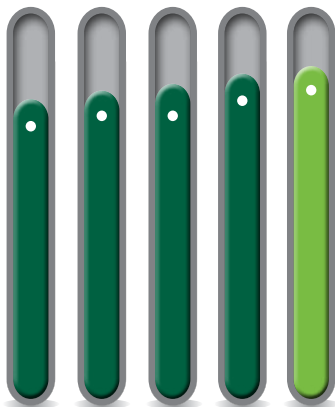
5.487.863 5.342.062 5.554.014 5.399.078 **5.822.125**



2019 2020 2021 2022 2023

Ekuitas Equity

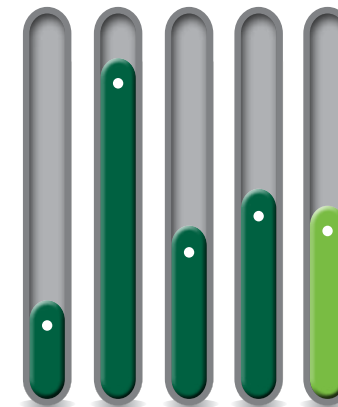
10.951.994 11.253.305 11.490.719 11.920.825 **12.144.330**



2019 2020 2021 2022 2023

Margin Laba Bersih Net Profit Margin

4,95 19,06 9,31 11,43 **10,51**



2019 2020 2021 2022 2023

Ikhtisar Kinerja Operasional

Operational Performance Overview

Ikhtisar Operasional Tanaman

Plant Operations Overview

Uraian Description		Satuan Unit	2023	2022	2021	2020	2019
Penanaman/ Planting							
Penanaman Rutin	Routine Planting	Ha	5.305	5.145	5.632	6.060	4.847
Penanaman Pembangunan	Development Planting	Ha	20.764	19.989	35.819	28.989	26.058
Rehabilitasi Hutan Lindung	Protected Forest Rehabilitation	Ha	3.054	3.394	3.518	1.686	43.215
Penanaman Lainnya	Other Planting	Ha	3.574	5.931	8.447	15.745	21.486
Karet/Biomassa	Rubber/Biomass	Ha	-	2.497	7.378	13.664	19.336
Pengkayaan Tanaman	Plant Enrichment	Ha	3.574	3.434	1.069	2.081	2.150
Jumlah	Total	Ha	32.697	34.458	53.416	52.480	95.606
Pemeliharaan Tanaman Tahun II dan III/ Plant Maintenance Year II and III							
Tanaman Rutin	Routine Plants	Ha	9.758	10.165	10.167	9.302	6.896
Jati	Teak	Ha	5.819	6.285	6.588	6.777	5.312
Rimba	Non Teak	Ha	3.939	3.879	3.579	2.525	1.584
Tanaman Pembangunan	Development Plants	Ha	43.282	55.847	55.802	42.304	26.894
Jati	Teak	Ha	23.336	27.932	27.721	25.748	15.725
Rimba	Non Teak	Ha	19.946	27.915	28.081	16.555	11.169
Jumlah Rutin + Pembangunan	Total Routine + Development	Ha	53.040	66.012	65.970	51.605	33.790
RHL	RHL	Ha	115	10	1.006	33	2.024
HAS/KPS	HAS/KPS	Ha	4.559	3.695	4.242	5.367	-
Opslag culture jati	Opslag culture teak	Ha	323	118	138	287	129
Penunggalan tunas	Bud singles	Ha	337	512	400	200	-
KRT/Pengkayaan	KRT/Enrichment	Ha	1.918	3.217	38	2.185	-
Tanaman lain	Other Plants	Ha	224	2.694	371	17.252	-
Kayu Energi	Energy Wood	Ha	5.787	16.707	24.742	14.976	15.715
Jumlah pemeliharaan tanaman II dan III	Total of plant maintenance II and III	Ha	66.302	92.965	96.907	91.906	51.658
Pemeliharaan Tanaman Tahun IV dan V/ Plant Maintenance in Years IV and V							
Babat Jalur Tumbuhan Bawah	Undergrowth Path Cut	Ha	40.813	33.325	18.599	20.283	32.929
Jati	Teak	Ha	17.552	17.254	9.791	12.148	18.826
Rimba	Non Teak	Ha	23.261	16.071	8.808	8.135	14.103
Prunning	Prunning	Ha	22.148	16.116	15.370	12.129	21.272
Jati	Teak	Ha	20.686	15.427	14.339	9.829	18.348
Rimba	Non Teak	Ha	1.462	689	1.031	2.300	2.925
Jumlah pemeliharaan tanaman IV dan V	Total of maintenance plants IV and V	Ha	62.961	49.441	33.969	32.412	54.201
Perawatan Hutan / Forest Care							
Pembuatan PCP T-2	PCP T-2 Creation	Ha	18.973	30.122	24.879	35.265	28.327
Tunjuk Toilet T-2	Point Toilet T-2	Ha	62.901	98.864	84.272	115.494	92.708

Ikhtisar Operasional Produksi

Production Operational Overview

Uraian Description		Satuan Unit	2023	2022	2021	2020	2019
Produksi Kayu Bundar/ Round Wood Production							
Kayu Jati	Teak Wood	m ³	462.955	500.476	494.760	432.817	407.003
Kayu Rimba	Non-Teak Wood	m ³	453.153	425.291	491.423	413.688	389.328
Jumlah Produksi Kayu Bundar	Total Round Wood Production	m ³	916.108	925.767	986.183	846.506	796.331
Produksi Kayu Olahan/ Processed Wood Production							
Kayu Gergajian Jati	Sawn Teak Wood	m ³	2.796	2.938	4.867	3.332	4.150
Kayu Gergajian Rimba	Sawn Non-Teak Wood	m ³	10.755	12.570	29.628	13.889	9.312
Jumlah Produksi Kayu Olahan	Total Processed Wood Production	m ³	13.551	15.508	34.495	17.221	13.462
Produksi Finished Product/ Finished Product Production							
Finished Products Jati	Finished Products Jati	m ³	457	346	747	2.183	2.128
FP Garden Furniture	FP Garden Furniture	m ³	129	154	29	239	125
FP Housing Component	FP Housing Component	m ³	7	3	6	8	5
FP Decking	FP Decking	m ³	27	35	32	2	16
FP Solid Flooring	FP Solid Flooring	m ³	43	59	282	407	1.278
FP FJL Board	FP FJL Board	m ³	159	84	328	256	519
FP Lamela	FP Lamela	m ³	22	8	38	57	41
FP Lainnya	FP Lainnya	m ³	69	3	33	1.215	143
Finished Products Rimba	Finished Products Rimba	m ³	10.000	8.023	11.472	4.519	11.048
Plywood Sengon	Plywood Sengon	m ³	5.272	3.049	1.751	-	6.631
Barecore	Barecore	m ³	3.937	2.327	2.955	1.598	2.866
Lainnya	Other	m ³	791	2.647	6.766	2.921	1.551
Produksi Hasil Hutan Non Kayu/ Non-Timber Forest Product Production							
Getah Pinus	Pine Sap	ton	104.067	86.907	85.063	80.284	90.123
Getah Damar/Kopal	Damar/Copal Sap	ton	285	353	381	384	410
Daun Kayu Putih	Eucalyptus Leaves	ton	27.059	49.257	47.953	44.700	41.645
Lak Cabang	Branch Lacquer	ton	17	33	11	7	7
Produksi Olahan Non Kayu/ Non-Wood Processing Production							
Gondorukem	Gum Rosin	ton	73.249	61.192	59.451	61.241	65.170
Terpentin	Turpentine	ton	16.107	12.899	12.628	12.846	14.293
Derivat Gondorekum dan Terpentin	Gum Rosin and Turpentine Derivatives	ton	1.869	2.171	2.171	2.447	582
Jumlah GDT	Total GDT	ton	91.225	76.262	74.526	74.669	81.144
Minyak Kayu Putih	Cajuput Oil	ton	181	327	346	309	325

Ikhtisar Operasional Pemasaran

Marketing Operational Overview

Uraian Description		Satuan Unit	2023	2022	2021	2020	2019
Penjualan Dalam Negeri/ Domestic Sales Volume							
Kayu Bundar Jati	Teak Wood	m ³	431.517	471.027	474.554	423.437	407.900
Kayu Bundar Rimba	Non-Teak Wood	m ³	414.842	388.663	461.843	388.150	343.919
Jumlah Kayu Bundar	Total Round Wood	m ³	846.359	859.689	936.397	811.587	751.819
Kayu Gergajian Jati	Sawn Teak Wood	m ³	1.993	2.674	4.393	3.632	2.789
Kayu Gergajian Rimba	Sawn Non-Teak Wood	m ³	2.165	3.325	3.797	8.792	5.285
Veneer Sayat Jati	Veneer Teak Slice	m ³	22	60	13	35	0
FJL Jati	FJL Teak	m ³	0	0	31	59	43
House Componen Jati	Teak House Component	m ³	7	2	8	17	13
Penjualan Non Kayu	Non-Timber Sales	ton	6.808	5.222	12.018	8.698	7.061
Gondorukem	Gum Rosin	ton	2.697	3.782	8.504	5.950	5.018
Terpentin	Turpentine	ton	3.811	1.088	2.746	2.237	1.532
Derivat Gondorukem dan Terpentin	Gum Rosin and Turpentine Derivatives	ton	267	289	445	202	189
Jumlah GTD	Total GTD	ton	6.775	5.159	11.695	8.389	6.739
Minyak Kayu Putih	Cajuput Oil	ton	33	63	323	309	322
Penjualan Luar Negeri/ Overseas Sales Volume							
Veneer Sayat Jati	Teak Slice	m ³	0	0	7	21	36
Garden Furniture Jati	Teak Garden Furniture	m ³	124	154	26	237	129
Finish Flooring Jati	Teak Finish Flooring	m ³	29	34	255	1.204	942
Parket Blok Jati	Teak Block Parquet	m ³	0	0	-	78	41
Penjualan Non Kayu	Non-Wood Sales	ton	85.526	65.005	57.353	71.583	72.041
Gondorukem	Gum Rosin	ton	74.346	53.325	49.133	59.084	60.799
Terpentin	Turpentine	ton	9.840	9.740	6.460	11.840	9.842
Derivat Gondorekum dan Terpentin	Gum Rosin and Turpentine Derivatives	ton	1.340	1.940	1.760	659	1.400

Skor Kinerja, GCG, KPI dan Opini Auditor

Performance Score, GCG, KPI, and Auditor Opinion

Uraian Description		2023	2022	2021	2020	2019
Tingkat Kesehatan Perusahaan	Corporate Soundness Level	A-*	70,80 Sehat A	71,00 Sehat A	70,30 Sehat A	60,80 Sehat A
Key Performance Indicator (%)	Key Performance Indicator (%)	87,24	82,23	97,18	101,90	96,00
GCG	GCG	91,17	86,54	84,71	84,78	84,49
Kualitas Opini Auditor	Quality of Auditor Opinion	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

* Hasil Rating dari Pemeringkat Kesehatan/ Rating Results from Health Ratings





Informasi Harga Saham

Stock Price Information

Hingga 31 Desember 2023, Perhutani adalah perusahaan Non-Tbk dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, Perusahaan tidak memiliki informasi tentang jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, terendah dan harga penutupan saham, dan volume perdagangan saham.

As of December 31, 2023, Perhutani is a non-Tbk company and is not divided into shares. As such, the Company has no information on the number of shares outstanding, market capitalization, the highest, lowest, and closing share prices, and the trading volume of shares.

Informasi Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi

Information on Bonds, Sukuk, or Convertible Bonds

Hingga 31 Desember 2023, Perhutani belum menerbitkan obligasi, sukuk, atau obligasi konversi sehingga informasi mengenai jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk belum dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2023, Perhutani has not issued bonds, sukuk, or convertible bonds, so information on the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest/reward rates, maturity dates, and bond/sukuk ratings cannot be presented in this Annual Report.

Ikhtisar Kinerja 2023 2023 Performance Highlights

Rp17,96 triliun

Total aset perusahaan mencapai Rp17,96 triliun, atau sebesar 98,1% dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023. Ini merupakan kenaikan sebesar 3,7% dibandingkan dengan tahun 2022, meningkat Rp646,55 miliar.

The company's total assets reached IDR17.96 trillion, or 98.1% of the 2023 Company Work Plan and Budget (RKAP). This is an increase of 3.7% compared to 2022, an increase of IDR 646.55 billion.

Rp4,78 triliun

Pendapatan usaha Rp4,78 triliun pada tahun 2023, atau 93,3% dari target RKAP sebesar Rp5,12 triliun.

Operating income of IDR4.78 trillion in 2023, or 93.3% of the RKAP target of IDR5.12 trillion.

Rp5,82 triliun

Total liabilitas pada akhir tahun 2023 tercatat sebesar Rp5,82 triliun, atau 101,1% dari target RKAP 2023, mengalami kenaikan sebesar 7,8% atau Rp423,05 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Total liabilities at the end of 2023 were recorded at IDR5.82 trillion, or 101.1% of the 2023 RKAP target, an increase of 7.8% or IDR423.05 billion compared to the previous year.

Rp501,93 miliar

Laba bersih konsolidasian perusahaan pada tahun 2023 tercatat Rp501,93 miliar, mencapai 87,5% dari target RKAP sebesar Rp573,36 miliar.

The company's consolidated net profit in 2023 was recorded at IDR501.93 billion, reaching 87.5% of the RKAP target of IDR573.36 billion.



MELESTARIKAN HUTAN MENGUATKAN MASA DEPAN

Preserving Forest, Cultivating Tomorrow

Mengelola Sumberdaya
Hutan Secara Lestari

PLANET



Peduli Kepada Kepentingan
Masyarakat dan Lingkungan

PEOPLE



Mengoptimalkan Bisnis
Kehutanan dengan Prinsip
Good Corporate Governance

PROFIT







2

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

**BAMBANG
HENDROYONO**

Ketua
Dewan Pengawas
Supervisory Board
Chairman



Laporan Dewan Pengawas

Supervisory Board Report

Pemilik Modal dan Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena di tahun 2023, Perum Perhutani dapat melalui tahun yang penuh dengan tantangan dengan kinerja yang baik.

Our Respected Capital Owners and Stakeholders, Praise be to God Almighty that in 2023, Perum Perhutani was able to go through a year full of challenges with good performance.

Pada kesempatan ini, izinkan kami mewakili jajaran Dewan Pengawas untuk menyampaikan laporan pengawasan di sepanjang tahun 2023. Seluruh tugas dan tanggung jawab telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perhutani dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Pengawas telah memastikan bahwa kegiatan operasional Perhutani telah mengacu kepada rencana bisnis yang telah ditetapkan, dikelola secara profesional, sesuai dengan kepentingan pemilik modal dan pemangku kepentingan lainnya, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi

Kondisi perekonomian baik global maupun nasional di sepanjang tahun 2023 berhadapan dengan dinamika yang penuh tantangan, yang disebabkan oleh fragmentasi politik dan ekonomi yang mendorong suku bunga inflasi global meningkat tajam. Banyak negara, terutama negara maju, merespon situasi ini dengan mengetatkan kebijakan moneter secara agresif. Kondisi ini berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang melambat menjadi 5,05% *year on year* (yoy) di tahun 2023, sedikit lebih rendah dari tahun 2022 yang mencapai 5,31% (yoy). Namun, di tengah badai ekonomi global dan inflasi yang tinggi, Indonesia masih menunjukkan ketangguhan.

Kami mengapresiasi langkah yang ditempuh Direksi Perhutani untuk tetap fokus pada strategi meningkatkan keunggulan operasional dan efisiensi biaya, pengembangan SDM, penambahan portofolio baru, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam mendukung pertumbuhan Perhutani. Dewan Pengawas menilai positif strategi yang diterapkan Direksi untuk menerapkan keunggulan operasional yang didukung oleh peningkatan produktivitas. Demikian pula dengan strategi efisiensi yang dijalankan.

On this occasion, allow us to represent the Board of Supervisors to submit a supervisory report throughout 2023. All duties and responsibilities have been carried out according to Perhutani's Articles of Association and applicable legislation. The Supervisory Board has ensured that Perhutani's operational activities have referred to the established business plan, managed professionally, according to the interests of the owners of capital and other stakeholders, and ensured compliance with all applicable laws and regulations.

Supervision of Strategy Implementation

Both global and national economic conditions throughout 2023 faced challenging dynamics caused by the emergence of political and economic fragmentation that pushed global inflation rates to rise sharply. Many countries, especially developed countries, responded to this situation by tightening monetary policy aggressively. This condition impacted Indonesia's economic growth rate, which slowed to 5.05% *year on year* (yoy) in 2023, slightly lower than in 2022, which reached 5.31% (yoy). However, amidst global economic storms and high inflation, Indonesia is still showing resilience.

We appreciate the steps taken by the Board of Directors to remain focused on the strategy of improving operational excellence and cost efficiency, developing human resources, adding new portfolios, and implementing good corporate governance in supporting Perhutani's growth. The Supervisory Board positively assesses the strategy implemented by the Board of Directors to implement operational excellence supported by increased productivity. Similarly, the efficiency strategy has been implemented.

Dewan Pengawas juga menilai bahwa strategi Direksi untuk menambah portofolio bisnis Perhutani dengan secara aktif mengembangkan potensi di luar industri kayu akan semakin memperkuat struktur bisnis perusahaan. Kami bersyukur bahwa dengan bauran strategi tersebut, disertai dengan fungsi pengawasan yang baik, Perhutani telah mampu melewati tahun 2023 dengan baik.

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

Mencermati tantangan yang diakibatkan oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global dan cuaca, Direksi telah mengambil sejumlah inisiatif strategis yang sejalan dengan target dan rencana bisnis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023. Dewan Pengawas menyampaikan apresiasi atas kinerja Direksi yang mampu menghadapi tantangan makro dengan baik. Dewan Pengawas menilai bahwa Direksi telah berupaya mengelola Perhutani secara baik, terencana, dan selalu menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Indikator utama yang digunakan oleh Dewan Pengawas dalam melakukan penilaian kinerja Direksi adalah melalui *Key Performance Indicator* (KPI) yang disepakati bersama antara Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dan tercantum dalam RKAP Perhutani.

Dari sisi keuangan, pada tahun 2023 Perhutani berhasil mencatatkan jumlah aset perusahaan sebesar Rp17,96 triliun, meningkat Rp646,55 miliar atau 3,7% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp17,32 triliun. Pendapatan usaha pokok tahun 2023 tercatat sebesar Rp4,78 triliun, yang mencapai 93,3% dari target RKAP tahun 2023 sebesar Rp5,12 triliun. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar 0,7% dibandingkan dengan tahun 2022. Laba bersih konsolidasi perusahaan tahun 2023 mencapai Rp501,93 miliar atau 87,5% dari target RKAP tahun 2023 sebesar Rp573,36 miliar. Laba ini mengalami penurunan sebesar 8,8% atau Rp48,34 miliar dibandingkan dengan tahun 2022.

Mekanisme Pengawasan Implementasi Strategi

Dewan Pengawas senantiasa memastikan bahwa strategi Perhutani telah dijalankan dengan efektif. Dewan Pengawas melakukan pengawasan khusus terhadap penerapan strategi melalui rapat gabungan dan rapat pembahasan strategis, serta berbagai evaluasi dan arahan, khususnya terkait dengan penyusunan dan monitoring pelaksanaan RKAP.

The Supervisory Board also considered that the Board of Directors' strategy to increase Perhutani's business portfolio by actively developing potential outside the wood industry would further strengthen the company's business structure. We are grateful that with this strategy mix, accompanied by supervisory function, Perhutani has passed 2023 well.

Assessment of the Board of Directors' Performance

Observing the challenges caused by external factors such as global economic conditions and weather, the Board of Directors has taken several strategic initiatives that are in line with the targets and business plans set out in the 2023 Corporate Work Plan and Budget (RKAP). The Supervisory Board expressed its appreciation for the performance of the Board of Directors, which was able to face macro challenges well. The Supervisory Board considers that the Board of Directors has tried to manage Perhutani in a good, planned manner and always applies the principles of prudence.

The indicator used by Supervisory Board in assessing the performance of Board of Directors is the Key Performance Indicator (KPI) which is mutually agreed upon between the Supervisory Board and the Board of Directors and stated in the Perhutani RKAP.

From the financial side, in 2023, Perhutani managed to record total company assets of IDR17.96 trillion, an increase of IDR646.55 billion or 3.7% compared to 2022 IDR17.32 trillion. The operating income in 2023 was IDR4.78 trillion, which reached 93.3% of the 2023 RKAP target of IDR5.12 trillion. This revenue decreased by 0.7% compared to 2022. The company's consolidated net profit in 2023 reached IDR501.93 billion or 87.5% of the 2023 RKAP target of IDR573.36 billion. This profit decreased by 8.8% or IDR48.34 billion compared to 2022.

Strategy Implementation Monitoring Mechanism

The Supervisory Board always ensures that Perhutani's strategy has been implemented effectively. The Supervisory Board conducts special supervision of strategy implementation through joint meetings and strategic discussion meetings, as well as various evaluations and directives, especially related to the preparation and monitoring of RKAP implementation.

Selain melakukan rapat, Dewan Pengawas juga melakukan kunjungan kerja ke lapangan untuk memastikan bahwa strategi yang telah disusun direksi telah dijalankan sebagaimana mestinya. Kunjungan lapangan juga menjadi sarana bagi Dewan Pengawas untuk mendapatkan gambaran dan fakta terkait bisnis yang dijalankan oleh Perhutani.

Dalam rangka pengawasan penerapan strategi, Dewan Pengawas juga memberikan penugasan kepada Komite Audit untuk bekerja sama dengan Satuan Pengawasan Internal dalam memonitoring penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tingkat internal. Dewan Pengawas menilai bahwa secara umum, strategi Perhutani telah disusun dan dilaksanakan dengan baik dan telah mendorong pencapaian kinerja Perhutani di tahun 2023. Dewan Pengawas akan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap implementasi strategi Perhutani, khususnya dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang berdampak terhadap kinerja Perhutani.

Mekanisme dan Frekuensi Pemberian Nasihat kepada Direksi

Hubungan kerja Dewan Pengawas dengan Direksi telah terjalin dengan baik dengan mengedepankan prinsip saling menghormati wewenang masing-masing pihak. Dewan Pengawas secara rutin mengadakan pertemuan dengan Direksi untuk membahas berbagai hal terkait pengelolaan Perhutani yang dijalankan oleh Direksi dalam forum rapat gabungan. Di tahun 2023, rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi telah dilakukan sebanyak 15 kali, yang merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya dan melebihi ketentuan minimum dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Selain forum rapat gabungan, organ Dewan Pengawas, yaitu Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, mengadakan rapat dengan mengundang Direktorat dan Divisi terkait untuk membahas bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing Komite.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Tahun 2024 akan menjadi tahun yang sangat menantang. Direksi telah menyusun target dan

In addition to meetings, the Supervisory Board also conducts field visits to ensure that the strategies prepared by the directors have been implemented. Field visits are also a means for the Supervisory Board to get an overview and facts related to the business run by Perhutani.

To supervise the implementation of the strategy, the Supervisory Board also assigned the Audit Committee to work with the Internal Supervisory Unit in monitoring deviations that occurred at the internal level. The Supervisory Board considers that, in general, Perhutani's strategy has been well prepared and implemented and has encouraged the achievement of Perhutani's performance in 2023. The Supervisory Board will continue to strive to improve the effectiveness of supervision of Perhutani's strategy implementation, especially in anticipating changes in the business environment that impact Perhutani's performance.

Mechanism and Frequency of Providing Advice to the Board of Directors

The working relation between the Supervisory Board and the Board of Directors has been well established by prioritizing the principle of mutual respect for the authority of each party. The Supervisory Board regularly meets with the Board of Directors to discuss various matters related to the management of Perhutani carried out by the Board of Directors in a joint meeting forum. In 2023, joint meetings of the Supervisory Board and the Board of Directors were held 15 times, which is an increase from the previous year and exceeds the minimum requirement in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

In addition to the joint meeting forum, the organs of the Supervisory Board, namely the Audit Committee and Risk Management Committee, held meetings by inviting the relevant Directorates and Divisions to discuss the areas of responsibility of each Committee.

Outlook on Business Prospects Prepared by the Board of Directors

The year 2024 will be very challenging. The Board of Directors has developed Perhutani's targets

rencana Perhutani yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024. Terkait dengan target dan rencana Perhutani, Dewan Pengawas menyarankan Direksi untuk lebih giat dalam mengembangkan lini usaha baru dan pasar untuk produk yang sudah ada, mengoptimalkan investasi yang telah dilakukan agar produktif, mengoptimalkan pemanfaatan *idle asset*, mengevaluasi anak perusahaan yang mengalami kerugian, serta meningkatkan efisiensi dan manajemen risiko perusahaan.

Dewan Pengawas menyambut baik optimisme Manajemen terkait prospek usaha Perusahaan di tahun 2024, di tengah proyeksi dari beberapa lembaga, yang sebagian besar memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 masih tetap stabil di kisaran 5% (yoy). Beberapa lembaga yang telah memproyeksikan besaran pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2024 antara lain World Bank sebesar 4,9%, ADB dan IMF sebesar 5,0%, serta OECD sebesar 5,2%. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,2%.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dalam melakukan kegiatan usaha diperlukan mekanisme tata kelola yang baik, karena akan mendorong terpenuhinya hak pemilik modal dan pemangku kepentingan lainnya yang tercermin dari semakin meningkatnya kinerja perusahaan. Oleh karena itu, Dewan Pengawas menekankan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik harus terus diterapkan secara efektif di Perhutani. Dewan Pengawas menilai pencapaian penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Perhutani pada tahun 2023 sudah sangat baik, namun terdapat ruang peningkatan yang bisa dilakukan dengan mengembangkan lebih lanjut nilai-nilai budaya inovasi di setiap pegawai Perhutani.

Penilaian Kinerja Organ Dewan Pengawas

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Pengawas dibantu oleh organ Dewan Pengawas, yaitu Sekretaris Dewan Pengawas dan Komite di bawah Dewan Pengawas, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Manajemen Risiko.

Dewan Pengawas menilai kinerja Komite di bawah Dewan Pengawas melalui KPI masing-masing Organ Dewan Pengawas yang tercantum dalam

and plans in the 2024 Corporate Work Plan and Budget (RKAP). Regarding Perhutani's targets and plans, the Supervisory Board advises the Board of Directors to be more active in developing new business lines and markets for existing products, optimizing investments that have been made to be productive, optimizing the utilization of idle assets, evaluating subsidiaries that have suffered losses, and improving efficiency and corporate risk management.

The Supervisory Board welcomes the Management's optimism regarding the Company's business prospects in 2024 amid projections from several institutions, most of which predict that Indonesia's economic growth in 2024 will remain stable at around 5% (yoy). Some institutions that have projected the amount of Indonesia's economic growth in 2024 include the World Bank at 4.9%, ADB and IMF at 5.0%, and OECD at 5.2%. The Indonesian government has set a 2024 economic growth target of 5.2%.

Views on the Implementation of Corporate Governance

In conducting business activities, a governance mechanism is required because it will encourage the fulfillment of the rights of shareholders and other stakeholders, which is reflected in the increasing performance of the company. Therefore, the Supervisory Board emphasizes that the principles of good corporate governance must continue to be effectively implemented in Perhutani. The Supervisory Board assessed that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in Perhutani in 2023 was very good, but there was room for improvement that could be done by further developing the values of innovation culture in every Perhutani employee.

Performance Assessment of Supervisory Board Organs

The Supervisory Board's Committees, which include the Audit Committee and the Risk Management Committee, Nomination and Remuneration Committee and the Secretary of the Supervisory Board both support the Board in performing its supervisory tasks.

The Supervisory Board assesses the performance of the Committees under the Supervisory Board through the KPIs of each Supervisory Board

RKAP Dewan Pengawas. Penilaian dilakukan secara triwulanan melalui laporan triwulanan Organ Dewan Pengawas. Penilaian utama adalah menilai sejauh mana efisiensi dan efektivitas dukungan organ Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Pengawas.

Melalui Komite Audit, Dewan Pengawas melakukan penelaahan atas informasi dan laporan keuangan Perhutani, penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berhubungan dengan kegiatan Perhutani, pengawasan terhadap aktivitas audit internal maupun eksternal, serta pemberian rekomendasi atas penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perhutani untuk tahun buku 2023. Sedangkan Komite Manajemen Risiko membantu Dewan Pengawas dalam mengkaji sistem manajemen risiko dan pelaksanaannya yang disusun oleh Direksi dan menilai toleransi risiko yang diambil oleh Perhutani. Pada tahun 2023, Selain sistem nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah membantu Dewan Pengawas dalam mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi dan berupa sistem penggajian/honorarium, fasilitas/ tunjangan, tantiem untuk tahun 2023.

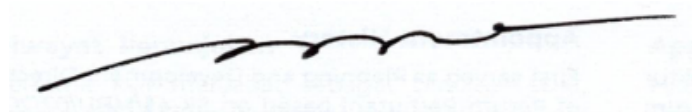
Perubahan Komposisi Dewan Pengawas

Pada tahun 2023, komposisi Dewan Pengawas Perhutani tidak mengalami perubahan.

Apresiasi

Mewakili Dewan Pengawas, kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Direksi, Manajemen, dan seluruh jajaran karyawan Perhutani atas kerja keras, dedikasi, dan inovasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023. Kami juga berterima kasih kepada pemilik modal serta semua pemangku kepentingan atas kepercayaan, dukungan, dan kerja sama yang terus diberikan kepada Perhutani dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan.

Jakarta, 5 Juli 2024



BAMBANG HENDROYONO

Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Supervisory Board

Organ listed in the Supervisory Board's RKAP. The assessment is conducted quarterly through the quarterly reports of the Supervisory Board Organs. The assessment is to assess the extent to which the efficiency and effectiveness of the Supervisory Board's organ support the Supervisory Board's supervisory duties implementation.

Through the Audit Committee, the Supervisory Board reviews Perhutani's financial information and reports, reviews compliance with laws and regulations related to Perhutani's activities, oversees internal and external audit activities, and provides recommendations on the appointment of a public accountant who will audit Perhutani's financial statements for the 2023 fiscal year. Meanwhile, the Risk Management Committee assists the Supervisory Board in reviewing the risk management system and its implementation prepared by the Board of Directors and assessing the risk tolerance taken by Perhutani. In addition to the nomination system, the Nomination and Remuneration Committee has also assisted the Supervisory Boards in proposing an appropriate remuneration system for the Board of Directors in the form of a payroll/honorarium system, facilities/allowances, tantiem for 2023.

Changes in the Composition of the Supervisory Board

In 2023, the composition of the Perhutani Supervisory Board has not changed.

Appreciation

On behalf of the Supervisory Board, we would like to express our highest appreciation to the Board of Directors, Management, and all Perhutani employees for their hard work, dedication, and innovation throughout 2023. We also thank the owners of capital and all stakeholders for the trust, support, and cooperation that continues to be given to Perhutani in realizing the company's vision and mission.

Jakarta, July 5, 2024

Profil Dewan Pengawas

Profile of the Supervisory Board



BAMBANG HENDROYONO

Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Supervisory Board

Periode Jabatan: 12 Februari 2020-saat ini.
Term of Office: 12 February 2020-present.

Warga Negara Indonesia; Usia 59 Tahun;
Kelahiran Tanjung Pinang, 30 September 1964.
Domisili Bogor.

Indonesian Citizen; 59 Years old; Born in Tanjung
Pinang, on September 30, 1964. Domicile Bogor.

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Ketua Dewan
Pengawas Perum Perhutani berdasarkan SK-47/
MBU/02/2020 tanggal 12 Februari 2020.

Appointment History

First served as Chairman of the Supervisory Board
of Perum Perhutani based on SK-47/MBU/02/2020
dated February 12, 2020.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Kehutanan di Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1987.
- Magister Manajemen STIE-IPWI Jakarta tahun 1997.
- Doktor Ilmu Administrasi Publik di Universitas Brawijaya tahun 2016.

Educational History

- Bachelor of Forestry at Institut Pertanian Bogor (IPB) in 1987.
- Master of Management STIE-IPWI Jakarta in 1997.
- Doctor of Public Administration at Universitas Brawijaya in 2016.

Pengalaman Kerja

- Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015).
- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan (2012).
- Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan (2012).
- Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jendral Departemen Kehutanan (2008).
- Kepala bagian rumah tangga pada Biro Umum Sekretariat Jendral Departemen Kehutanan (2006).

Work Experience

- Secretary General of the Ministry of Environment and Forestry (2015).
- Director General of Forestry Business Development Ministry of Forestry (2012).
- Secretary of Directorate of Forestry Business Development, Ministry of Forestry (2012).
- Head of the General Bureau of the General Secretariat of the Ministry of Forestry (2008).
- Head of Household section of the General Bureau of the General Secretariat of the Ministry of Forestry (2006).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan.

Concurrent Positions

Does not have concurrent positions.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan
Pengawas lainnya, Direksi maupun dengan Pemilik
Modal.

Affiliate Relations

Has no affiliation with other Supervisory Board,
Board of Directors, or with Capital Owners.

Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Perum Perhutani tidak ada.

Share Ownership

Share ownership of Perum Perhutani does not exist.



KOMARUDDIN SIMANJUNTAK

Dewan Pengawas
Supervisory Board

Periode Jabatan: 19 Maret 2020-saat ini.
Term of Office: March 19, 2020-present.

Warga Negara Indonesia; Usia 63 Tahun; Kelahiran Pematang Siantar, 10 Januari 1960. Domisili Jakarta.

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Dewan Pengawas Perum Perhutani berdasarkan SK-83/MBU/03/2020 tanggal 19 Maret 2020.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Sosial Politik di Universitas Jenderal Achmad Yani tahun 2010.
- Pasca Sarjana Manajemen Pertahanan di Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2015.
- Doktor Manajemen SDM di Universitas Negeri Jakarta tahun 2016.

Pengalaman Kerja

- Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (2019-2021).
- Panglima Daerah Militer 9/ Udayana TNI Angkatan Darat (2017-2018).
- Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat (2016-2017).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas lainnya, Direksi maupun dengan Pemilik Modal.

Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Perum Perhutani tidak ada.

Indonesian Citizen; 63 Years Old; Born in Pematang Siantar, on January 10, 1960. Domicile Jakarta.

Appointment History

First served on the Supervisory Board of Perum Perhutani based on SK-83/MBU/03/2020 dated March 19, 2020.

Educational History

- Bachelor of Social and Political Studies at Universitas Jenderal Achmad Yani in 2010.
- Postgraduate in Defense Management at Universitas Gajah Mada Yogyakarta in 2015.
- Doctor of HR Management at Universitas Negeri Jakarta in 2016.

Work Experience

- Expert Head of the National Disaster Management Agency (BNPB) (2019-2021).
- Commander of Military Region 9/ Udayana TNI Army (2017-2018).
- Territorial Assistant to the Chief of Staff of the Indonesian Army (2016-2017).

Concurrent Positions

Does not have concurrent positions.

Affiliate Relations

Has no affiliation with other Supervisory Board, Board of Directors, or with Capital Owners.

Share Ownership

Share ownership of Perum Perhutani does not exist.



CHALID MUHAMMAD

Dewan Pengawas Independen
Independent Supervisory Board

Periode Jabatan: 19 Maret 2020-saat ini.
Term of Office: March 19, 2020-present

Warga Negara Indonesia; Usia 58 Tahun; Kelahiran Parigi, 10 Desember 1965. Domisili Jakarta.

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Dewan Pengawas Independen Perum Perhutani berdasarkan SK-83/MBU/03/2020 tanggal 19 Maret 2020.

Riwayat Pendidikan

Sarjana Hukum dari Universitas Taduloko, Palu tahun 1991.

Pengalaman Kerja

- Anggota Komite Pesisir Pemprov DKI (2018-2020).
- Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kebijakan Pengelolaan Persampahan Dewan Pengarah dan Pertimbangan Pengelolaan Sampah Indonesia (2016-sekarang).
- Penasihat Senior Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015-sekarang).
- Anggota Tim Dewan Pertimbangan Adipura Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015-sekarang).
- Anggota Dewan Pengarah Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2014-sekarang).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas lainnya, Direksi maupun dengan Pemilik Modal.

Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Perum Perhutani tidak ada.

Indonesian Citizen; 58 Years old; Born in Parigi, on December 10, 1965. Domicile Jakarta.

Appointment History

First served on the Independent Supervisory Board of Perum Perhutani based on SK-83/MBU/03/2020 dated March 19, 2020.

Educational History

Bachelor of Law from Universitas Taduloko, Palu in 1991.

Work Experience

- Member of the DKI Provincial Government Coastal Committee (2018-2020).
- Chairman of the Working Group on Waste Management Policy of the Indonesian Waste Management Steering and Advisory Board (2016-present).
- Senior Advisor to the Minister of the Ministry of Environment and Forestry (2015-present).
- Team Member of the Adipura Advisory Council of the Ministry of Environment and Forestry (2015-present).
- Member of Climate Change Steering Board of the Ministry of Environment and Forestry (2014-present).

Concurrent Positions

Does not have concurrent positions.

Affiliate Relations

Has no affiliation with other Supervisory Board, Board of Directors, or with Capital Owners.

Share Ownership

Share ownership of Perum Perhutani does not exist.



NOER FAUZI RACHMAN

Dewan Pengawas Independen
Independent Supervisory Board

Periode Jabatan: 22 April 2020-saat ini.
Term of Office: April 22, 2020-present

Warga Negara Indonesia; Usia 58 Tahun; Kelahiran Jakarta, 7 Juni 1965. Domisili Bandung.

Indonesian Citizen; 58 Years old; Born in Jakarta, on June 7, 1965. Domicile Bandung.

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Dewan Pengawas Independen Perum Perhutani berdasarkan SK-126/MBU/04/2020 tanggal 22 April 2020.

Appointment History

He first served on the Independent Supervisory Board of Perum Perhutani based on SK-126/MBU/04/2020 dated April 22, 2020.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Psikologi di Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1990.
- PhD in Environmental Science, Policy and Management di University of California at Berkeley (UCB), USA tahun 2011.

Educational History

- Bachelor of Psychology at Universitas Padjadjaran Bandung in 1990.
- PhD in Environmental Science, Policy and Management at the University of California at Berkeley (UCB), USA in 2011.

Pengalaman Kerja

- Dosen Luar Biasa pada Fakultas Psikologi, Universitas Padjadjaran-Bandung (2019-sekarang).
- Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan (2015-2018)
- Ketua Pokja Petani, Pertanian dan Kehutanan, Rumah Transisi Jokowi-JK (2018).

Work Experience

- Extraordinary Lecturer at the Faculty of Psychology, Universitas Padjadjaran-Bandung (2019-present).
- Special Staff to the Presidential Chief of Staff (2015- 2018).
- Chairman of the Working Group on Farmers, Agriculture, and Forestry, Jokowi-JK Transition House (2018).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan.

Concurrent Positions

Does not have concurrent positions.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas lainnya, Direksi maupun dengan Pemilik Modal.

Affiliate Relations

Has no affiliation with other Supervisory Board, Board of Directors, or with Capital Owners.

Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Perum Perhutani tidak ada.

Share Ownership

Share ownership of Perum Perhutani does not exist.



BAMBANG RISYANTO

Dewan Pengawas Independen
Independent Supervisory Board

Periode Jabatan: 19 Maret 2020-saat ini.
Term of Office: March 19, 2020-present

Warga Negara Indonesia; Usia 73 Tahun; Kelahiran Pekalongan, 27 Desember 1950. Domisili Surabaya.

Indonesian Citizen; 73 Years old; Born in Pekalongan, on December 27, 1950. Domicile Surabaya.

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Dewan Pengawas Independen Perum Perhutani berdasarkan SK-83/ MBU/03/2020 tanggal 19 Maret 2020.

Appointment History

First served on the Independent Supervisory Board of Perum Perhutani based on SK-83/MBU/03/2020 dated March 19, 2020.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Kehutanan di Universitas Gadjah Mada tahun 1978.
- Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Satyagama tahun 2002.

Educational History

- Bachelor of Forestry at Universitas Gadjah Mada in 1978.
- Postgraduate Master of Management at Universitas Satyagama in 2002.

Pengalaman Kerja

- Anggota Dewan Pengawas Perum Perhutani (2020-sekarang).
- Anggota Komisaris Independen PTPN IX Semarang (2015-2020).
- Pelaksana PT ORI (2012-2015).
- Pelaksana Tugas PT APU (2008-2012).

Work Experience

- Member of the Supervisory Board of Perum Perhutani (2020-present).
- Member of Independent Commissioner of PTPN IX Semarang (2015-2020).
- Executive of PT ORI (2012-2015).
- Acting PT APU (2008-2012).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan.

Concurrent Positions

Does not have concurrent positions.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas lainnya, Direksi maupun dengan Pemilik Modal.

Affiliate Relations

Has no affiliation with other Supervisory Board, Board of Directors, or with Capital Owners.

Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Perum Perhutani tidak ada.

Share Ownership

Share ownership of Perum Perhutani does not exist.



YOHANES BABTISTA PRIYATMO HADI

Dewan Pengawas
Supervisory Board

Periode Jabatan 14 Juli 2020-saat ini.
Term of Office July 14, 2020-present

Warga Negara Indonesia; Usia 51 Tahun; Kelahiran Boyolali, 16 Januari 1972. Domisili Depok.

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Dewan Pengawas Perum Perhutani berdasarkan SK-238/MBU/07/2020 tanggal 14 Juli 2020.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Manajemen di Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 1995.
- Pasca Sarjana MPKP Universitas Indonesia tahun 2007.

Pengalaman Kerja

- Asisten Deputy Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media (2021-sekarang).
- Asisten Deputy Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan (2020-2021).
- Asisten Deputy Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan I (2019-2020).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas lainnya, Direksi maupun dengan Pemilik Modal.

Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Perum Perhutani tidak ada.

Indonesian Citizen; 51 Years Old; Born in Boyolali, on January 16, 1972. Domicile Depok.

Appointment History

He first served on the Supervisory Board of Perum Perhutani based on SK-238/MBU/07/2020 dated July 14, 2020.

Educational History

- Bachelor of Management Economics at Universitas Atmajaya Yogyakarta in 1995.
- Postgraduate MPKP Universitas Indonesia in 2007.

Work Experience

- Assistant Deputy for Telecommunications and Media Services, Ministry of BUMN (2021 - present).
- Assistant Deputy for Transportation Facilities and Infrastructure (2020-2021).
- Assistant Deputy for Transportation Facilities and Infrastructure I (2019-2020).

Concurrent Positions

Does not have concurrent positions.

Affiliate Relations

Has no affiliation with other Supervisory Board, Board of Directors, or with Capital Owners.

Share Ownership

Share ownership of Perum Perhutani does not exist.



**WAHYU
KUNCORO**

Direktur Utama
President Director



Laporan Direksi

Board of Directors Report

Pemilik Modal dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga Perum Perhutani dapat melalui tahun 2023 yang penuh tantangan dengan capaian kinerja yang cukup baik. Selanjutnya, izinkan kami atas nama Direksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, beserta Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material, sebagai bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Dear Capital Owners and Stakeholders,

Praise and thanks be to God Almighty for His abundance of favors and gifts so that Perum Perhutani can go through the challenging year of 2023 with quite good performance achievements. Furthermore, allow us, on behalf of the Board of Directors to submit an accountability report on the management of the Company for the financial year ended December 31, 2023, along with the Financial Statements that have been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja and obtained a fair opinion in all material respects, as part of the implementation of Good Corporate Governance principles.

Analisis Ekonomi

Dalam kondisi makro ekonomi tahun 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini bahwa perekonomian Indonesia tumbuh di kisaran 5 persen. Hal ini didukung oleh realisasi berbagai indikator ekonomi yang lebih baik dari perkiraan dan sesuai dengan prediksi lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan konsensus Bloomberg. Hingga triwulan ketiga tahun 2023, ekonomi nasional tumbuh 5,05 persen dengan konsumsi rumah tangga meningkat 4,9 persen dan investasi 4,2 persen. Meskipun ekspor hanya tumbuh tipis 1,1 persen, impor justru melemah sebesar -2,0 persen akibat pelemahan ekonomi global.

Strategi dan Kebijakan Strategis Perusahaan

Perhutani menerapkan kebijakan strategis selama tahun 2023 dengan fokus pada sinergi antara kebijakan perusahaan dan kinerja di tahun-tahun sebelumnya. Arah kebijakan ini bertujuan untuk mengakselerasi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi perusahaan melalui berbagai program dan kegiatan yang inovatif dan efektif.

Economic Analysis

In the macroeconomic conditions of 2023, Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati believes the Indonesian economy will grow at around 5 percent. It is supported by various economic indicators realization that are better than expected and according to the predictions of international institutions such as the IMF, World Bank, and Bloomberg Consensus. Until the third quarter of 2023, the national economy grew by 5.05 percent, with household consumption increasing by 4.9 percent and investment by 4.2 percent. Although exports only grew by 1.1 percent, imports weakened by -2.0 percent due to the global economic downturn.

Company Strategy and Strategic Policy

Perhutani implemented a strategic policy for 2023 focusing on synergy between company policies and performance in previous years. This policy aims to accelerate the company's economic recovery and growth through various innovative and effective programs and activities.

Pada tahun 2023, Departemen Perencanaan Strategis terfokus pada penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk periode 2023-2027. RJPP ini mencakup Perum Perhutani dan anak perusahaannya, yaitu PT Inhutani I, PT Inhutani V, dan PT Palawi Risorsis. Penyusunan RJPP ini adalah tindak lanjut dari penggabungan (merger) PT Inhutani I dengan PT Inhutani V, serta kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). RJPP yang sedang disusun bertujuan untuk mengatur kembali strategi bisnis Perhutani agar dapat menghadapi dinamika ekonomi yang mempengaruhi pengurangan wilayah kelola.

Selain itu, RKAP tahun 2023 telah disusun dan disampaikan kepada Kementerian BUMN RI. RKAP ini dibuat berdasarkan berbagai arahan dan aspirasi dari Menteri BUMN selaku kuasa Pemilik Modal. Menyelaraskan dengan RPJMN 2020-2024 dan prioritas BUMN, RKAP tahun 2023 telah mendapatkan pengesahan dari Menteri BUMN RI pada Januari 2023, menjadi panduan strategis yang penting bagi Perum Perhutani untuk mencapai target tahun 2023.

Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Direksi Perhutani memastikan bahwa implementasi strategi berjalan dengan baik melalui serangkaian proses yang ketat, termasuk monitoring di setiap tahap pekerjaan untuk memastikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Peranan Direksi dalam Perumusan dan Implementasi Strategi serta Kebijakan Strategis

Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi tersebut mencakup pengembangan sistem manajemen perusahaan melalui Departemen Pengembangan Sistem. Beberapa capaian signifikan di bidang pengembangan sistem pada tahun 2023 termasuk perolehan Sertifikat FSC *Chain of Custody* untuk Product Gumrosin dan Turpentine Oil, menjadikan Perhutani yang pertama di Asia yang menerima sertifikat tersebut. Selain itu, Perhutani juga memperoleh Sertifikat FSC *Forest Management* untuk Produk Kayu Energi, menjadi yang pertama di Asia Tenggara. Kedua sertifikasi tersebut didapatkan untuk meningkatkan peluang pasar dan memperkuat posisi Perhutani di industri.

In 2023, the Strategic Planning Department focused on preparing the Company's Long-Term Plan (RJPP) for 2023-2027. This RJPP covers Perum Perhutani and its subsidiaries, namely PT Inhutani I, PT Inhutani V, and PT Palawi Risorsis. The preparation of this RJPP is a follow-up to the merger of PT Inhutani I with PT Inhutani V, as well as policies from the Ministry of Environment and Forestry related to Forest Areas management with Special Management (KHDPK). The RJPP being developed aims to reorganize Perhutani's business strategy to deal with economic dynamics that affect the reduction of management areas.

In addition, the 2023 RKAP has been prepared and submitted to the Ministry of SOE RI. This RKAP was made based on various directions and aspirations from the Minister of SOE as the authority of the Capital Owner. Aligning with the 2020-2024 RPJMN and SOE priorities, the 2023 RKAP was approved by the Minister of SOE RI in January 2023, becoming a strategic guide for Perum Perhutani to achieve the 2023 target.

In carrying out the policy, Perhutani's Board of Directors ensures that the implementation of the strategy goes well through a series of rigorous processes, including monitoring at every stage of work to ensure it is in line with the set targets.

Role of the Board of Directors in the Formulation and Implementation of Strategies and Strategic Policies

The process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the strategy includes the company's management system development through the System Development Department. Some of the significant achievements in system development in 2023 included the acquisition of FSC *Chain of Custody* Certificates for Gumrosin and Turpentine Oil Products, making Perhutani the first in Asia to receive such certificates. In addition, Perhutani also obtained the FSC *Forest Management* Certificate for Energy Wood Products, becoming the first in Southeast Asia. Both certifications were obtained to increase market opportunities and strengthen Perhutani's position in the industry.

Perhutani juga mendapatkan Skor B untuk ESG Rating dari CDP, sebagai pengakuan atas upaya perusahaan dalam bidang *Environmental*, *Social*, dan *Governance*. Meski Perhutani sebagai badan usaha perum tidak memiliki kewajiban keterbukaan informasi ESG kepada publik, perusahaan tetap melaksanakan pengungkapan ESG untuk pertama kalinya dan berhasil mendapatkan skor yang baik. Pengungkapan ini menunjukkan komitmen Perhutani untuk menjadi perusahaan pengelola hutan berkelanjutan yang bertaraf internasional.

Dengan capaian ini, Perhutani menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan strategi bisnis yang lebih responsif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Implementasi kebijakan strategis ini memastikan bahwa rencana dan kinerja yang ditargetkan tidak hanya tercapai tetapi juga memposisikan Perhutani sebagai pemain utama dalam industri pengelolaan hutan.

Kendala dan Tantangan yang Dihadapi

Perhutani dihadapkan pada beberapa tantangan dan permasalahan dalam operasional tahun 2023. Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan menghadapi kendala terkait terbatasnya pemahaman beberapa pemangku kepentingan Perusahaan mengenai kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus, yang menghambat pelaksanaan kegiatan kehutanan sesuai rencana dan memerlukan relokasi tanaman. Untuk mengatasi ini, dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi antar divisi. Tantangan dalam keterbatasan tenaga kerja diselesaikan dengan pelatihan, penambahan tenaga kerja, dan pemberian insentif.

Kendala lainnya adalah penurunan permintaan ekspor akibat resesi global dan perang Rusia-Ukraina, serta adanya pesaing dan perubahan dinamika pasar. Untuk menanggulangi tantangan-tantangan ini, langkah Perhutani diiringi dengan perencanaan produksi sesuai permintaan pasar, kecepatan pengambilan keputusan, dan komunikasi rutin dengan pembeli.

Dalam Perencanaan Sumber Daya Hutan, kecepatan dan akurasi data ditingkatkan melalui digitalisasi menggunakan teknologi LiDAR, meskipun memerlukan investasi besar dan peningkatan kompetensi SDM. Sinkronisasi data diatasi dengan pengembangan platform SISDH *online* yang mempermudah *monitoring* dan evaluasi.

Perhutani also received a B Score for ESG Rating from CDP, recognizing the company's efforts in Environmental, Social, and Governance. Although Perhutani, as a public company, has no obligation to disclose ESG information to the public, the company still carried out ESG disclosure for the first time and got a good score. This disclosure shows Perhutani's commitment to becoming an international standard sustainable forest management company.

With this achievement, Perhutani demonstrated a commitment to developing a more responsive, sustainable, and highly competitive business strategy. The implementation of this strategic policy ensures that targeted plans and performance are not only achieved but also Perhutani position as a player in the forest management industry.

Obstacles and Challenges Faced

Perhutani is faced with several challenges and problems in its 2023 operations. Forest Resource Management faces obstacles related to the limited understanding of some of the Company's stakeholders regarding the Forest Areas with Special Management, which hinders the implementation of forestry activities according to plan and requires plant relocation. To overcome this, socialization in companies and coordination between divisions was carried out. The challenge of limited employees was resolved with training, additional employees, and incentives provision.

Other constraints included a decline in export demand due to the global recession and the Russia-Ukraine war, as well as competitors and changing market dynamics. To overcome these challenges, Perhutani's efforts are accompanied by production planning according to market demand, speed of business decision-making, and regular communication with buyers.

In Forest Resource Planning, the speed and accuracy of data are improved through digitization using LiDAR technology, although it requires investments and increased human resource competencies. Data synchronization was addressed with an online SISDH development that facilitates monitoring and evaluation.

Melalui langkah-langkah strategis dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan tersebut, Perhutani berupaya mengatasi tantangan yang ada dan memastikan efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan dan operasional.

Kinerja Perusahaan Tahun 2023

Kinerja operasional perusahaan pada tahun 2023 mengalami beberapa kendala yang menyebabkan pencapaian tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Di bidang perencanaan, beberapa lokasi hanya dilakukan pencermatan menggunakan peta citra satelit yang mengurangi pelaksanaan risalah. Di bidang pembinaan hutan, realisasi pemeliharaan tanaman mencapai 93% dari RKAP karena terdapat lokasi yang terkena dampak akses proyek bendungan Cipanas. Produksi non kayu juga tidak tercapai, dengan produksi Kopal mencapai 78% dan daun Kayu Putih 51% dari target akibat pembatasan produksi. Di bidang industri kayu, kinerja tidak mencapai target karena penyesuaian dan penataan industri untuk menghindari kerugian.

Secara keuangan, Kinerja Perhutani tahun 2023 menunjukkan berbagai pencapaian dan tantangan yang dialami selama tahun tersebut. Realisasi total aset tahun 2023 mencapai Rp17,96 triliun, yang merupakan 98,1% dari RKAP 2023. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, total aset naik sebesar Rp646,55 miliar atau meningkat 3,7%.

Total liabilitas tahun 2023 tercatat sebesar Rp5,82 triliun, yang merupakan 101,1% dari RKAP tahun 2023, dan mengalami kenaikan 7,8% atau sebesar Rp423,05 miliar dibandingkan dengan total liabilitas tahun 2022.

Namun, ekuitas juga mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar Rp12,14 triliun atau mencapai 96,7% dari target RKAP 2023 yang sebesar Rp12,55 triliun. Ekuitas naik 1,9% atau senilai Rp223,51 miliar dibandingkan dengan akhir tahun 2022, terutama disebabkan oleh kenaikan Cadangan Umum sebesar 14,2% senilai Rp449,9 miliar atas laba tahun 2023.

Pendapatan usaha pokok tahun 2023 tercatat sebesar Rp4,78 triliun, yang merupakan 93,3% dari target RKAP tahun 2023 sebesar Rp5,12 triliun. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar 0,7% dibandingkan dengan tahun 2022, yang

Through these strategic steps in dealing with various obstacles and challenges, Perhutani seeks to overcome existing challenges and ensure efficiency, accountability, and sustainability in management and operations.

Company Performance in 2023

The company's operational performance in 2023 experienced several obstacles that caused the achievement not according to the Company's Work Plan and Budget (RKAP). In the planning field, some locations are only examined using satellite image maps which reduces the risk of implementation. In the field of forest management, the realization of plant maintenance reached 93% of the RKAP because there were locations affected by access to the Cipanas dam project. Non-wood production was also not achieved, with Copal production reaching 78% and Cajuput leaves 51% of the target due to production restrictions. In the wood business, performance did not reach the target due to adjustments and business structuring to avoid losses.

Financially, Perhutani's performance in 2023 showed various achievements and challenges experienced during the year. The realization of total assets in 2023 reached IDR17.96 trillion, which represents 98.1% of the 2023 RKAP. Compared to 2022, total assets increased by IDR 646.55 billion or an increase of 3.7%.

Total liabilities in 2023 were recorded at IDR5.82 trillion, 101.1% of the 2023 RKAP, and increased by 7.8% or IDR423.05 billion compared to total liabilities in 2022.

However, equity also increased with a realization of IDR12.14 trillion, or 96.7% of the 2023 RKAP target of IDR12.55 trillion. Equity increased by 1.9% or IDR223.51 billion compared to the end of 2022, mainly due to a 14.2% increase in the General Reserve worth IDR449.9 billion on profit in 2023.

The operating revenue 2023 was IDR4.78 trillion, 93.3% of the 2023 RKAP target of IDR5.12 trillion. This revenue decreased by 0.7% compared to 2022, which was due to the absorption of felled wood product volume and GTD product market prices,

disebabkan oleh serapan volume produk kayu tebangan dan harga pasar produk GTD yang dipengaruhi oleh volatilitas pasar global.

Laba Bersih Konsolidasian Perusahaan tahun 2023 mencapai Rp501,93 miliar atau 87,5% dari target RKAP tahun 2023 sebesar Rp573,36 miliar. Laba ini mengalami penurunan sebesar 8,8% atau Rp48,34 miliar dibandingkan dengan tahun 2022, yang disebabkan oleh varians pendapatan akibat volatilitas pasar global yang berdampak pada pendapatan ekspor dan pasar dalam negeri.

Sehingga kinerja Perhutani pada tahun 2023 mencerminkan peningkatan dalam beberapa area kunci, seperti total aset dan ekuitas, meskipun pendapatan usaha pokok dan laba bersih mengalami tekanan akibat kondisi pasar global yang volatil.

Implementasi GCG

Perhutani menegaskan komitmennya untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam semua aspek operasional dan manajemen. Komitmen ini merefleksikan tanggung jawab perusahaan untuk memastikan praktik bisnis yang transparan, akuntabel, responsif, independen, dan adil. Transparansi adalah prioritas, dengan penyediaan informasi yang jelas dan akurat kepada para pemangku kepentingan. Akuntabilitas diwujudkan melalui sistem pelaporan dan evaluasi yang memungkinkan setiap individu di perusahaan bertanggung jawab atas kinerjanya.

Perhutani juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam aktivitas bisnisnya. Independensi dalam pengambilan keputusan dijaga ketat tanpa tekanan eksternal, sementara keadilan diterapkan dengan memberikan perlakuan yang setara bagi semua pihak yang berkepentingan. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip ini, Perhutani yakin bahwa reputasi perusahaan akan terjaga dan terus berkontribusi positif bagi masyarakat, karyawan, Pemilik Modal, dan mitra usaha.

Pada tahun 2023, Perhutani melaksanakan evaluasi penerapan GCG yang mengacu pada indikator/parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN, meliputi enam aspek pokok pengukuran. Hasil penilaian menunjukkan bahwa Perhutani memperoleh skor total 91,17, yang dikategorikan sebagai "Sangat Baik." Meskipun

which were affected by global market volatility.

The Company's Consolidated Net Income in 2023 reached IDR501.93 billion or 87.5% of the 2023 RKAP target of IDR573.36 billion. This profit decreased by 8.8% or IDR48.34 billion compared to 2022, which was due to variances in revenue due to global market volatility, which impacted export revenue and domestic markets.

Perhutani's performance in 2023 reflects improvements in several key areas, such as total assets and equity, although underlying operating income and net profit are under pressure due to a volatile global market conditions.

GCG Implementation

Perhutani affirms its commitment to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG) in all aspects of operations and management. This commitment reflects the company's responsibility to ensure transparent, accountable, responsive, independent, and fair business practices. Transparency is a priority, with clear and accurate information provision to stakeholders. Accountability is realized through reporting and evaluation system that allows each individual in the company to be held accountable for their performance.

Perhutani also emphasizes the importance of social and environmental responsibility in its business activities. Independence in business decision-making is strictly maintained without external pressure, while fairness is applied by providing equal treatment for all interested parties. By upholding these principles, Perhutani is confident that the company's reputation will be maintained and will continue to contribute positively to the public, employees, Capital Owners, and business partners.

In 2023, Perhutani conducted a GCG implementation evaluation, which refers to the parameters set by the Secretary of the Ministry of SOEs, covering six main aspects of measurement. The assessment results showed that Perhutani obtained a total score of 91.17, which was categorized as "Very Good." Although all aspects

hampir semua aspek menunjukkan hasil yang sangat baik, terdapat ruang untuk peningkatan dalam beberapa aspek lain yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Rekomendasi mencakup upaya untuk mendalami dan memperbaiki aspek yang memperoleh skor rendah, terus memperkuat komitmen terhadap GCG melalui pelatihan dan audit berkala, serta melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memastikan dukungan berkelanjutan dalam penerapan GCG yang efektif.

Prospek Usaha Perusahaan

Meskipun kondisi geopolitik global masih belum stabil dan terdapat ketidakpastian dari berbagai faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia tetap optimis terhadap perekonomian Indonesia. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 4,7%-5,5% dengan laju inflasi yang terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1%, didukung oleh kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan meningkatkan daya beli dan permintaan untuk berbagai produk kehutanan, seperti kayu olahan, produk non-kayu, dan hasil hutan lainnya. Selain itu, laju inflasi yang terkendali dapat menjaga biaya operasional industri kehutanan tetap pada level yang dapat dikendalikan, sehingga keuntungan operasional dapat dimaksimalkan.

Kebijakan moneter yang konsisten dan kebijakan fiskal yang mendukung juga akan memberikan stabilitas bagi pelaku usaha di sektor kehutanan. Misalnya, adanya insentif dari pemerintah untuk konservasi dan upaya reboisasi akan membantu untuk terus berkembang sambil menjaga kelestarian lingkungan. Di samping itu, dukungan kebijakan pemerintah yang mengarah pada pengelolaan hutan yang berkelanjutan akan memperkuat posisi industri kehutanan di pasar global yang semakin menuntut praktik-praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Secara keseluruhan, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai proyeksi Bank Indonesia dengan laju inflasi yang terkendali, industri kehutanan akan diuntungkan oleh peningkatan permintaan pasar, stabilitas biaya operasional, dan dukungan kebijakan pemerintah yang

showed excellent results, there is room for improvement in several other aspects that require further attention.

Recommendations include continuing to explore and improve low-scoring aspects, continuing to strengthen commitment to GCG through regular training and audits, and engaging all stakeholders to ensure continued support for effective GCG implementation.

Company Business Outlook

Although global geopolitical conditions are still unstable and there are uncertainties from various factor that affect economic growth, Bank Indonesia remains optimistic about the Indonesian economy. BI projects Indonesia's economic growth in the range of 4.7%-5.5% with a controlled inflation rate within the target range of 2.5±1%, supported by monetary policy, Fiscal policy, and the National Movement for Food Inflation Control (GNPIP).

Stable economic growth will increase purchasing power and demand for various forestry products, such as processed wood, non-wood, and other forest products. In addition, a controlled inflation rate can keep forestry business operational costs at a manageable level so that operational profits can be maximized.

Consistent monetary policy and supportive erusa policies will also stabilize businesses in the forestry sector. For example, government incentives for conservation and reforestation will help businesses grow while preserving the environment. In addition, government policy support that leads to sustainable forest management will strengthen the position of forestry businesses in a global market that increasingly demands environmentally responsible business practices.

Overall, if Indonesia's economic growth reaches Bank Indonesia's projection with a manageable inflation rate, forestry businesses will benefit from increased market demand, stable operating costs, and continued government policy support. These projected conditions will create a conducive

berkelanjutan. Kondisi ekonomi yang diproyeksikan kuat ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan inovasi di sektor kehutanan, membantu perusahaan dalam meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga kelestarian hutan untuk masa depan.

Perubahan Komposisi Direksi

Pada tahun 2023, terdapat perubahan susunan keanggotaan Direksi berdasarkan Keputusan Pemilik Modal pada tanggal 30 Januari 2023, Pemilik Modal memutuskan memberhentikan dengan hormat Kemal Sudiro dari jabatan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, dan mengangkat Dewi Fitrianingrum dan Ahmad Ibrahim dari jabatan Direktur Komersial digantikan oleh Anggar Widiyatmoko.

Berdasarkan perubahan yang dilakukan, maka komposisi Direksi hingga 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	
Wahyu Kuncoro	Direktur Utama	President Director
Dewi Fitrianingrum	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Director of Finance and Risk Management
Anggar Widiyatmoko	Direktur Komersial	Director of Commercial
Natalas Anis Harjanto	Direktur Operasi	Director of Operations
Muhammad Denny Ermansyah	Direktur SDM, Umum & IT	Director of HR, General & IT
Endung Trihartaka	Direktur Perencanaan & Pengembangan	Director of Planning & Development

Adapun pergantian komposisi Direksi berdasarkan keputusan Pemilik Modal Perusahaan yang menyatakan alasannya guna mempercepat transformasi bisnis Perusahaan.

Perusahaan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya atas kontribusinya selama bergabung dengan Perhutani. Sedangkan kepada anggota Direksi yang baru bergabung, Perhutani menyampaikan selamat datang untuk bersama-sama mendukung pencapaian target Perusahaan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

environment for investment and innovation in the forestry sector, helping companies to increase production capacity and preserve forests for the future.

Changes in the Composition of the Board of Directors

In 2023, there was a change in the membership composition of the Board of Directors based on the Capital Owner's Decree on January 30 2023, the Capital Owner decided to respectfully dismiss Kemal Sudiro from the position of Director of Finance and Risk Management, and appoint Dewi Fitrianingrum and Ahmad Ibrahim was replaced from the position of Commercial Director by Anggar Widiyatmoko.

Based on the changes made, the composition of the Board of Directors until 31 December 2023 is as follows:

The change in the composition of the Board of Directors is based on the decision of the company's capital owner to accelerate the company's business transformation.

The company expresses its appreciation and thanks to members of the Board of Directors whose terms of office have ended for their contributions while joining Perhutani. Meanwhile, to the members of the Board of Directors who have just joined, Perhutani welcomes them to jointly support the achievement of the company's targets, both in the short, medium, and long term.

Apresiasi

Perhutani telah berhasil melalui tahun 2023 yang penuh tantangan dengan kinerja yang cukup baik. Atas nama Direksi, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Pengawas atas arahan dan kemitraan strategis dalam pengelolaan operasi dan bisnis Perusahaan. Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada Pemilik Modal. Demikian pula kepada pelanggan, pemasok, dan mitra usaha, Direksi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah tercipta.

Kepada seluruh pegawai, Direksi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi yang telah diberikan. Seluruh pencapaian ini akan menjadi dasar bagi Perusahaan untuk dapat mengoptimalkan potensinya dan meraih kinerja terbaiknya di masa yang akan datang.

Jakarta, 5 Juli 2024


WAHYU KUNCORO
Direktur Utama
President Director

Appreciation

Perhutani has made it through the challenging year of 2023 with a good performance. On behalf of the Board of Directors, we extend our respect and gratitude to the Supervisory Board for their direction and strategic partnership in the Company's operations and business management. The Board of Directors would also like to thank the Capital Owners. Likewise, to our customers, suppliers, and business partners, the Board of Directors would like to thank them for their cooperation.

To all employees, the Board of Directors expresses its highest appreciation for their dedication. All these achievements will serve as the basis for the Company to optimize its potential and achieve its best performance in the future.

Jakarta, July 5, 2024

Profil Direksi

Profile of The Board of Directors



WAHYU KUNCORO

Direktur Utama
President Director

Periode Jabatan: 26 Februari 2020-saat ini.
Term of Office: February 26, 2020-present

Warga Negara Indonesia; Usia 54 Tahun; Kelahiran Surakarta, 31 Oktober 1969. Domisili Jakarta.

Indonesian Citizen; 54 Years old; Born in Surakarta, on October 31, 1969. Domicile Jakarta.

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Direktur Utama Perum Perhutani berdasarkan SK-55/MBU/02/2020 tanggal 26 Februari 2020.

Appointment History

First served as President Director of Perum Perhutani based on SK-55/MBU/02/2020 dated February 26, 2020.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Pertanian Universitas Sebelas Maret tahun 1993.
- Magister Management Universitas Gadjah Mada tahun 2005.

Educational History

- Agriculture graduate from Universitas Sebelas Maret (1993).
- Master of Management from Universitas Gadjah Mada (2005).

Pengalaman Kerja

- Wakil Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) tahun 2019-Februari 2020.
- Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk tahun 2019.
- Wakil Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk tahun 2016-2018.
- Deputy Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi pada Kementerian BUMN tahun 2016-2019.

Work Experience

- Vice President Director of PT Pegadaian (Persero) in 2019-February 2020.
- Vice President Commissioner of PT Bank Rakyat Indonesia Tbk in 2019.
- Vice President Commissioner of PT Bank Negara Indonesia Tbk in 2016-2018.
- Deputy for Agro and Pharmaceutical Industry at the Ministry of SOEs in 2016-2019.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan.

Concurrent Positions

Does not have concurrent positions.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas, Direksi maupun dengan Pemilik Modal.

Affiliate Relationship

Has no affiliation with Supervisory Board, Board of Directors, or with Capital Owners.

Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Perum Perhutani tidak ada.

Share Ownership

Share ownership of Perum Perhutani does not exist.



DEWI FITRIANINGRUM

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management

Periode Jabatan: 30 Januari 2023
Term of Office: January 30, 2023.

Warga Negara Indonesia; Usia 56 Tahun; Kelahiran Bogor, 13 Januari 1967. Domisili Jakarta.

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perum Perhutani berdasarkan SK.17/MBU/01/2023 tanggal 30 Januari 2023.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi di Universitas Kristen Indonesia tahun 1989.
- Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada tahun 1998.

Pengalaman Kerja

- Sebelumnya Pernah berkarir di PT Bank Tabungan Negara (Persero) tahun 1990-2022
- Kepala Kantor Wilayah Jakarta Banten di PT Bank Tabungan Negara (Persero) tahun 2017-2022
- Kepala Divisi Commercial Funding & Services di PT Bank Tabungan Negara (Persero) tahun 2015-2017
- Kepala Divisi Wealth Management di di PT Bank Tabungan Negara (Persero) tahun 2014-2015
- Kepala Divisi Priority Banking & Bancassurance di PT Bank Tabungan Negara (Persero) tahun 2013-2014.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas, Direksi maupun dengan Pemilik Modal.

Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Perum Perhutani tidak ada.

Indonesian Citizen; 56 Years old; Born in Bogor, on January 13, 1967. Domicile Jakarta

Appointment History

First served as Finance and Risk Management Director of Perum Perhutani based on SK.17/MBU/01/2023 dated January 30, 2023.

Educational History

- Bachelor of Economics at Universitas Kristen Indonesia in 1989.
- Master of Management at Universitas Gadjah Mada in 1998.

Work Experience

- Previously had a career at PT Bank Tabungan Negara (Persero) from 1990-2022
- Head of Jakarta Banten Regional Office at PT Bank Tabungan Negara (Persero) in 2017-2022
- Head of Commercial Funding & Services Division at PT Bank Tabungan Negara (Persero) in 2015-2017
- Head of Wealth Management Division at PT Bank Tabungan Negara (Persero) in 2014-2015
- Head of Priority Banking & Bancassurance Division at PT Bank Tabungan Negara (Persero) in 2013-2014.

Concurrent Positions

Does not have concurrent positions.

Affiliate Relationship

Has no affiliation with Supervisory Board, Board of Directors, or with Capital Owners.

Share Ownership

Share ownership of Perum Perhutani does not exist.



SANDY MUKHLISIN

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management

Periode Jabatan: 2 Juli 2024 - sekarang
Term of Office: July 2, 2024 - present.

Warga Negara Indonesia; Usia 52 Tahun; Kelahiran Tanjung Karang, 10 Oktober 1971. Domisili Jakarta.

Indonesian citizens; Age 52 years old; Born in Tanjung Karang, October 10, 1971. Domicile Jakarta

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perum Perhutani berdasarkan SK-157/MBU/07/2024 tanggal 2 Juli 2024.

Appointment History

First served as Director of Finance and Risk Management of Perum Perhutani based on SK-157/MBU/07/2024 dated July 2 2024.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Indonesia tahun 1996.
- MBA - Entrepreneurial Leadership Program dari Portland State University and Mercy Corps Portland, Oregon USA tahun 2010.

Educational History

- Bachelor of Economics in Accounting at the University of Indonesia in 1996.
- Entrepreneurial Leadership Program at Portland State University and Mercy Corps Portland, Oregon USA

Pengalaman Kerja

- Direktur Operasi - Konservasi Indonesia (2021-2024)
- Regional Finance & Corporate Services Manager Southeast Asia (SEA) and East & Central Asia (ECA) - The World Agroforestry (ICRAF) (2018-2021)
- Director Finance and Operations Indonesian International Education Foundation (IIEF) (2017)
- Director Finance - Mercy Corps Indonesia (2004-2016)
- Finance & Administration Manager - Pasminco Australia (2001-2004)
- Senior Management Accountant, Asia Financial Centre - Schlumberger Oilfield Services (1999-2001)

Work Experience

- Direktur Operasi - Konservasi Indonesia (2021-2024)
- Regional Finance & Corporate Services Manager Southeast Asia (SEA) and East & Central Asia (ECA) - The World Agroforestry (ICRAF) (2018-2021)
- Director Finance and Operations Indonesian International Education Foundation (IIEF) (2017)
- Director Finance - Mercy Corps Indonesia (2004-2016)
- Finance & Administration Manager - Pasminco Australia (2001-2004)
- Senior Management Accountant, Asia Financial Centre - Schlumberger Oilfield Services (1999-2001)

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan.

Concurrent Positions

Does not have concurrent positions.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas, Direksi maupun dengan Pemilik Modal.

Affiliate Relationship

Has no affiliation with Supervisory Board, Board of Directors, or with Capital Owners.

Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Perum Perhutani tidak ada.

Share Ownership

Share ownership of Perum Perhutani does not exist.



ANGGAR WIDIYATMOKO

Direktur Komersial
Director of Commercial

Periode Jabatan: 30 Januari 2023
Term of Office: January 30, 2023

Warga Negara Indonesia; Usia 52 Tahun; Semarang, 23 Februari 1971. Domisili Jakarta.

Indonesian Citizen; 52 Years Old; Born in Semarang February 23, 1971. Domicile Jakarta

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Direktur Komersial Perum Perhutani berdasarkan SK.17/MBU/01/2023 tanggal 30 Januari 2023.

Appointment History

First served as Commercial Director of Perum Perhutani based on SK.17/MBU/01/2023 dated January 30, 2023.

Riwayat Pendidikan

Sarjana Kehutanan di Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1995.

Educational History

Bachelor of Forestry at Institut Pertanian Bogor (IPB) in 1995.

Pengalaman Kerja

- Wakil Kepala Divisi Regional Jawa Tengah Perum Perhutani 18 Oktober 2022.
- Kepala Divisi Komersial Hutan Kayu dan Biomassa Perum Perhutani 07 Januari 2022.
- Kepala Divisi Komersial Hasil Hutan Bukan Kayu Perum Perhutani 26 Oktober 2021.
- Kepala Divisi Pemasaran Perum Perhutani 21 Agustus 2022.

Work Experience

- Deputy Head of Central Java Regional Division of Perum Perhutani October 18, 2022.
- Head of Commercial Division of Wood Forest and Biomass of Perum Perhutani January 7, 2022.
- Head of Commercial Division of Non-Wood Forest Products Perum Perhutani October 26, 2021.
- Head of Marketing Division of Perum Perhutani August 21, 2022.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan.

Concurrent Positions

Does not have concurrent positions.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas, Direksi maupun dengan Pemilik Modal.

Affiliate Relationship

Has no affiliation with Supervisory Board, Board of Directors, or with Capital Owners.

Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Perum Perhutani tidak ada.

Share Ownership

Share ownership of Perum Perhutani does not exist.



NATALAS ANIS HARJANTO

Direktur Operasi
Director of Operation

Periode Jabatan: 26 Februari 2020 - saat ini.
Term of Office: February 26, 2020-present

Warga Negara Indonesia; Usia 59 Tahun; Kelahiran Banyumas, 15 Oktober 1964. Domisili Jakarta.

Indonesian Citizen; 59 Years old; Born in Banyumas, on October 15, 1964. Domicile Jakarta.

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Direktur Operasi & Perhutanan Sosial Perum Perhutani berdasarkan SK-55/ MBU/02/2020 tanggal 26 Februari 2020, kemudian berdasarkan SK-69/MBU/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 menjadi Direktur Operasi.

Appointment History

First served as Operations & Social Forestry Director of Perum Perhutani based on SK-55/MBU/02/2020 dated February 26, 2020, then based on SK-69/MBU/03/2022 dated March 8, 2022 he became Director of Operations.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Kehutanan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1989.
- Meraih gelar Magister di Northern Arizona University (NAU) Flagstaff, Arizona, USA tahun 2000.

Educational History

- Bachelor of Forestry at Universitas Gadjah Mada Yogyakarta in 1989.
- Earned his Master's degree at Northern Arizona University (NAU) Flagstaff, Arizona, USA in 2000.

Pengalaman Kerja

- Direktur Perhutanan Sosial di Perum Perhutani tahun 2020.
- Direktur Operasional PT Palawi Risorsis tahun 2012.
- Kepala Biro Ekowisata, Jasa Lingkungan, Usaha lain dan Optimalisasi Aset Perum Perhutani tahun 2012.
- Kepala Biro Industri Pemasaran Unit II Jawa Timur Perum Perhutani tahun 2011.

Work Experience

- Social Forestry Director at Perum Perhutani in 2020.
- Operational Director of PT Palawi Risorsis in 2012.
- Head of Bureau of Ecotourism, Environmental Services, Other Business, and Asset Optimization of Perum Perhutani in 2012.
- Head of Marketing Industry Unit II East Java Perum Perhutani in 2011.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan.

Concurrent Positions

Does not have concurrent positions.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas, Direksi maupun dengan Pemilik Modal.

Affiliate Relationship

Has no affiliation with Supervisory Board, Board of Directors, or with Capital Owners.

Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Perum Perhutani tidak ada.

Share Ownership

Share ownership of Perum Perhutani does not exist.



MUHAMMAD DENNY ERMANSYAH

Direktur SDM, Umum & TI
Director of HR, General Affair and IT

Periode Jabatan: 9 Februari 2021 - saat ini
Term of Office: February 9, 2021 - present

Warga Negara Indonesia; Usia 52 Tahun; Kelahiran Sukabumi, 22 Agustus 1971. Domisili Jakarta.

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Direktur SDM, Umum & IT Perum Perhutani berdasarkan SK-45/MBU/02/2021 tanggal 9 Februari 2021.

Riwayat Pendidikan

Sarjana Kehutanan di Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1995.

Pengalaman Kerja

- Kepala Divisi Perencanaan Perhutanan Sosial Perum Perhutani tahun 2021.
- Kepala Seksi Reboisasi, Rehabilitasi & Konservasi Hutan Perum Perhutani tahun 2007.
- Wakil Kepala Seksi Perencanaan Hutan Perum Perhutani tahun 2005.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas, Direksi maupun dengan Pemilik Modal.

Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Perum Perhutani tidak ada.

Indonesian Citizen; 52 years old; Born in Sukabumi, on August 22, 1971. Domicile Jakarta.

Appointment History

First served as HR, General Affairs & IT Director of Perum Perhutani based on SK-45/MBU/02/2021 dated February 9, 2021.

Educational History

Bachelor of Forestry at Institut Pertanian Bogor (IPB) in 1995.

Work Experience

- Head of Social Forestry Planning Division of Perum Perhutani in 2021.
- Head of Reforestation, Rehabilitation & Conservation Section of Perum Perhutani Forest in 2007.
- Deputy Head of Forest Planning Section of Perum Perhutani in 2005.

Concurrent Positions

Does not have concurrent positions.

Affiliate Relationship

Has no affiliation with Supervisory Board, Board of Directors, or with Capital Owners.

Share Ownership

Share ownership of Perum Perhutani does not exist.



ENDUNG TRIHARTAKA

Direktur Perencanaan dan Pengembangan
Director of Planning and Development

Periode Jabatan 9 Februari 2021 - saat ini.
Term of Office February 9, 2021 - present

Warga Negara Indonesia; Usia 54 Tahun; Kelahiran Rembang, 2 Maret 1969. Domisili Jakarta.

Riwayat Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perum Perhutani berdasarkan SK-45/MBU/02/2021 tanggal 9 Februari 2021.

Riwayat Pendidikan

Sarjana Kehutanan di Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 1993.

Pengalaman Kerja

- Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah tahun 2018-2021.
- Wakil Kepala Divisi Regional Bidang Sumber Daya Hutan Perum Perhutani tahun 2017.
- General Manager Komersial Kayu di KBM Komersial Kayu Jawa Timur Perum Perhutani tahun 2015.
- General Manager Komersial Kayu III Jawa Barat dan Banten Perum Perhutani tahun 2014.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas, Direksi maupun dengan Pemilik Modal.

Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Perum Perhutani tidak ada.

Indonesian Citizen; 54 years old; Born in Rembang, on March 2, 1969. Domicile Jakarta.

Appointment History

First served as Planning and Development Director of Perum Perhutani based on SK-45/MBU/02/2021 dated February 9, 2021.

Educational History

Bachelor of Forestry at Universitas Gajah Mada Yogyakarta in 1993.

Work Experience

- Head of Perum Perhutani Central Java Regional Division in 2018-2021.
- Deputy Head of Regional Division for Forest Resources of Perum Perhutani in 2017.
- General Manager of Wood Commercial at KBM East Java Wood Commercial Perum Perhutani in 2015.
- General Manager of Commercial Wood III West Java and Banten Perum Perhutani in 2014.

Concurrent Positions

Does not have concurrent positions.

Affiliate Relationship

Has no affiliation with Supervisory Board, Board of Directors, or with Capital Owners.

Share Ownership

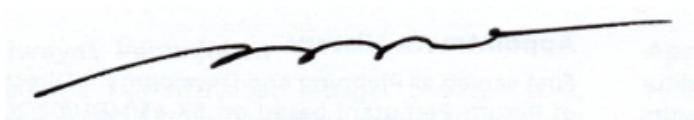
Share ownership of Perum Perhutani does not exist.

Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Pengawas untuk Laporan Tahunan 2023

Supervisory Board Statements of Responsibility on 2023 Annual Report

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

Jakarta, 5 Juli 2024

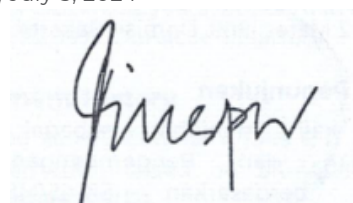


BAMBANG HENDROYONO

Ketua Dewan Pengawas
Periode Jabatan 12 Februari 2020 - saat ini.
Supervisory Board Chairman
Term of Office February 12, 2020 - present

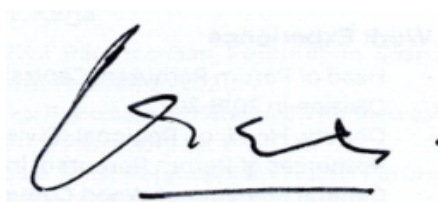
We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report 2023 have been fully disclosed and being solely responsible upon the accountability of the Annual Report Contents altogether with the Financial Statements

Jakarta, July 5, 2024



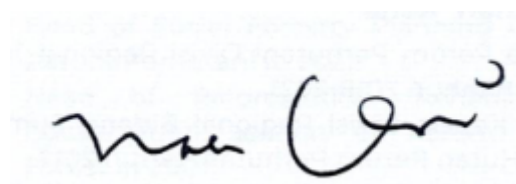
KOMARUDDIN SIMANJUNTAK

Dewan Pengawas
Periode Jabatan 12 Februari 2020 - saat ini.
Supervisory Board
Term of Office February 12, 2020 - present



CHALID MUHAMMAD

Dewan Pengawas Independen
Periode Jabatan 19 Maret 2020 - saat ini.
Independent Supervisory Board
Term of Office March 19, 2020 - present



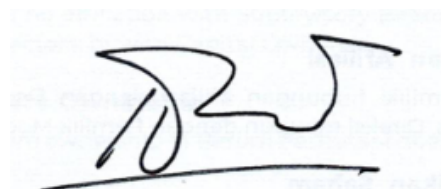
NOER FAUZI RACHMAN

Dewan Pengawas Independen
Periode Jabatan 22 April 2020 - saat ini.
Independent Supervisory Board
Term of Office April 22, 2020 - present



BAMBANG RISYANTO

Dewan Pengawas Independen
Periode Jabatan 19 Maret 2020 - saat ini.
Independent Supervisory Board
Term of Office March 19, 2020 - present



YOHANES BAPTISTA PRIYATMO HADI

Dewan Pengawas
Periode Jabatan 14 Juli 2020 - saat ini.
Supervisory Board
Term of Office July 14, 2020 - present

Pernyataan Tanggung Jawab Direksi untuk Laporan Tahunan 2023

Board of Directors Statements of Responsibility on 2023 Annual Report

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

Jakarta, 5 Juli 2024



WAHYU KUNCORO

Direktur Utama
Periode Jabatan 26 Februari 2020 - saat ini.

President Director
Term of Office February 26, 2020 - present



ANGGAR WIDIYATMOKO

Direktur Komersial
Periode Jabatan 30 Januari 2023

Director of Commercial
Term of Office January 30, 2020 - present



MUHAMMAD DENNY ERMANSYAH

Direktur SDM, Umum & TI
Periode Jabatan 9 Februari 2021 - saat ini

Director of HR, General Affair and IT
Term of Office February 9, 2021 - present

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report 2023 have been fully disclosed and being solely responsible upon the accountability of the Annual Report Contents altogether with the Financial Statements

Jakarta, July 5, 2024



SANDY MUKHLISIN

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Periode Jabatan 2 Juli 2024 - saat ini

Director of Finance and Risk Management
Term of Office July 2, 2024 - present



NATALAS ANIS HARJANTO

Direktur Operasi
Periode Jabatan 26 Februari 2020 - saat ini.

Director of Operation
Term of Office February 26, 2020 - present



ENDUNG TRIHARTAKA

Direktur Perencanaan dan Pengembangan
Periode Jabatan 9 Februari 2021 - saat ini.

Director of Planning and Development
Term of Office February 9, 2021 - present



3

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE



Identitas Perusahaan

Corporate Identity

Dengan tonggak utama dalam pengelolaan hutan negara, Perum Perhutani terus berkomitmen menjaga dan mengelola sumber daya hutan Indonesia demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

With major milestones in state forest management, Perum Perhutani continues to be committed to protecting and managing Indonesia's forest resources for environmental sustainability and community welfare.

	Nama Perusahaan: Perusahaan Umum Kehutanan Negara disingkat Perum Perhutani	Company Name State Forestry Public Company abbreviated Perum Perhutani
	Status Perusahaan: Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).	Company Status State Owned Enterprises
	Modal Dasar: Perum Perhutani memiliki modal dasar sebesar Rp2,59 triliun.	Authorized Capital Perum Perhutani has authorized capital of Rp2.59 trillion.
	Tanggal Pembentukan: Perum Perhutani resmi dibentuk pada tanggal 29 Maret 1961.	Date of Establishment Perum Perhutani was officially formed on March 29 1961.
	Kepemilikan: Perusahaan ini dimiliki sepenuhnya (100%) oleh Negara Republik Indonesia.	Ownership 100% owned by the Republic of Indonesia Government
	Pencatatan Saham: Sebagai badan hukum yang berbentuk Perum, perusahaan ini tidak terbagi atas saham.	Stock Listing A legal entity in the form of a Public Corporation which is not divided into shares.



Dasar Hukum

Perum Perhutani beroperasi berdasarkan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

Legal Basis

Perum Perhutani operates based on the following legal provisions:

1. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 2010 concerning State Forestry Public Company (Perum).
2. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 73 of 2014 concerning Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Capital of a State Forestry Public Company (Perum).



Alamat Kantor Pusat

Kantor Pusat Perum Perhutani beralamat di: Graha Perhutani, Jl. TB Simatupang No.22, RT.1/RW.8, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540.

Head Office Address

Perum Perhutani Head Office is located at: Graha Perhutani, Jl. TB Simatupang No.22, RT.1/RW.8, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540.



Kontak

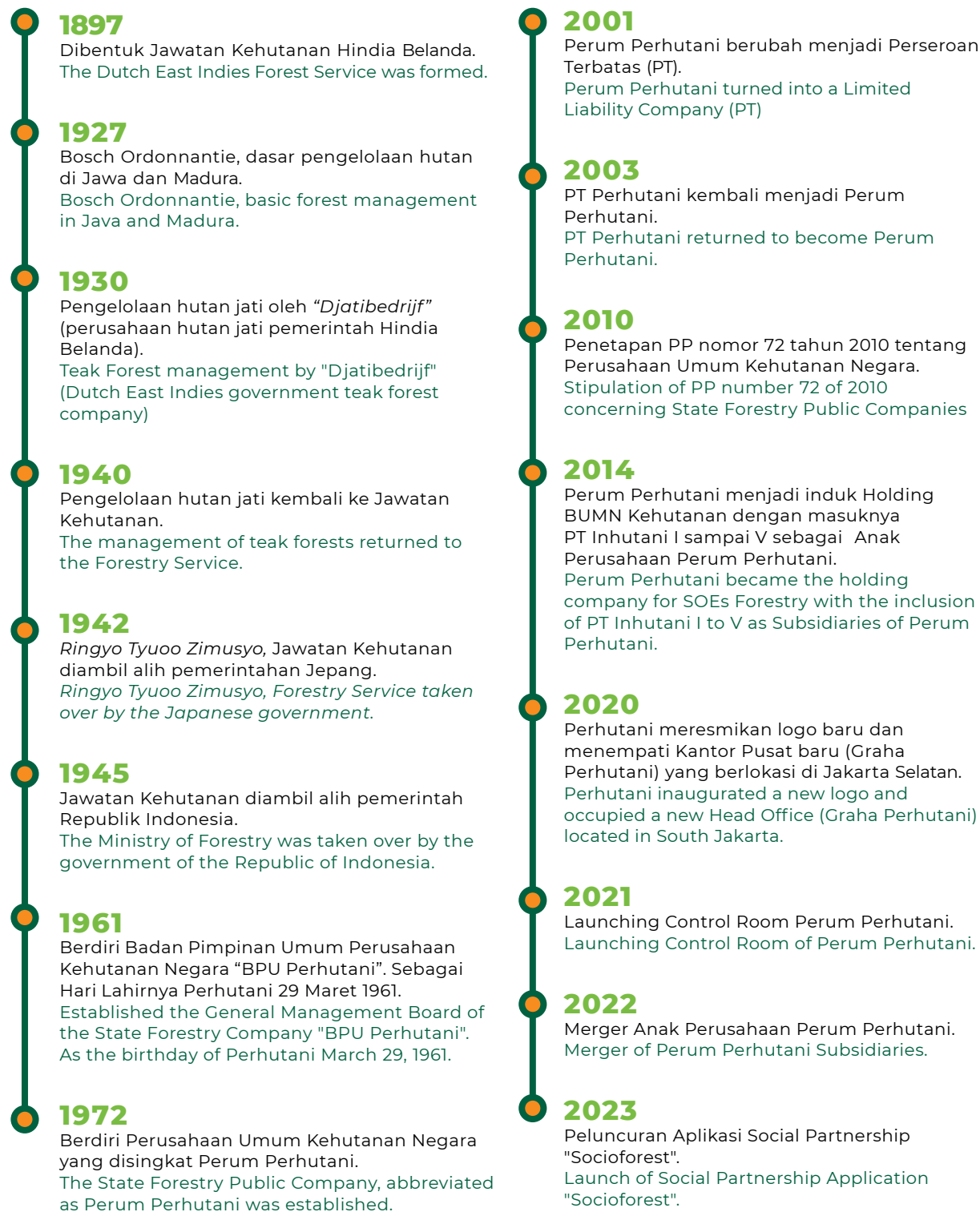
Telepon: (021) 7805730 (hunting)
Email: humas@perhutani.co.id
Website: www.perhutani.co.id

Contact

Telephone: (021) 7805730 (hunting)
Email: humas@perhutani.co.id
Website: www.perhutani.co.id

Jejak Langkah Perusahaan

Company Milestone

- 
- 1897**
Dibentuk Jawatan Kehutanan Hindia Belanda.
The Dutch East Indies Forest Service was formed.
 - 1927**
Bosch Ordonnantie, dasar pengelolaan hutan di Jawa dan Madura.
Bosch Ordonnantie, basic forest management in Java and Madura.
 - 1930**
Pengelolaan hutan jati oleh "Djatibedrijf" (perusahaan hutan jati pemerintah Hindia Belanda).
Teak Forest management by "Djatibedrijf" (Dutch East Indies government teak forest company)
 - 1940**
Pengelolaan hutan jati kembali ke Jawatan Kehutanan.
The management of teak forests returned to the Forestry Service.
 - 1942**
Ringyo Tyuoo Zimusyo, Jawatan Kehutanan diambil alih pemerintahan Jepang.
Ringyo Tyuoo Zimusyo, Forestry Service taken over by the Japanese government.
 - 1945**
Jawatan Kehutanan diambil alih pemerintah Republik Indonesia.
The Ministry of Forestry was taken over by the government of the Republic of Indonesia.
 - 1961**
Berdiri Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara "BPU Perhutani". Sebagai Hari Lahirnya Perhutani 29 Maret 1961.
Established the General Management Board of the State Forestry Company "BPU Perhutani". As the birthday of Perhutani March 29, 1961.
 - 1972**
Berdiri Perusahaan Umum Kehutanan Negara yang disingkat Perum Perhutani.
The State Forestry Public Company, abbreviated as Perum Perhutani was established.
 - 2001**
Perum Perhutani berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).
Perum Perhutani turned into a Limited Liability Company (PT)
 - 2003**
PT Perhutani kembali menjadi Perum Perhutani.
PT Perhutani returned to become Perum Perhutani.
 - 2010**
Penetapan PP nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara.
Stipulation of PP number 72 of 2010 concerning State Forestry Public Companies
 - 2014**
Perum Perhutani menjadi induk Holding BUMN Kehutanan dengan masuknya PT Inhutani I sampai V sebagai Anak Perusahaan Perum Perhutani.
Perum Perhutani became the holding company for SOEs Forestry with the inclusion of PT Inhutani I to V as Subsidiaries of Perum Perhutani.
 - 2020**
Perhutani meresmikan logo baru dan menempati Kantor Pusat baru (Graha Perhutani) yang berlokasi di Jakarta Selatan.
Perhutani inaugurated a new logo and occupied a new Head Office (Graha Perhutani) located in South Jakarta.
 - 2021**
Launching Control Room Perum Perhutani.
Launching Control Room of Perum Perhutani.
 - 2022**
Merger Anak Perusahaan Perum Perhutani.
Merger of Perum Perhutani Subsidiaries.
 - 2023**
Peluncuran Aplikasi Social Partnership "Socioforest".
Launch of Social Partnership Application "Socioforest".

Logo Perusahaan

Company Logo



Perhutani

Logo Perusahaan terinspirasi dari perjalanan PERUM PERHUTANI untuk mengeksplorasi lebih jauh di luar pengelolaan kehutanan yang ada saat ini untuk senantiasa meningkatkan nilai kehutanan di Indonesia.

Warna Hijau Hutan

melambangkan subur, alam, kekayaan, berkelanjutan, damai, dan permulaan yang baru.

Warna Hijau Limau

melambangkan penuh semangat, energi tinggi, kreativitas, kesegaran, dan keyakinan.

Pohon

kaya akan ragam daun mewakili kekayaan, mimpi, hutan, produk alami dan manusia.

Manusia dan Pohon

melambangkan hubungan kuat yang membawa harmoni.

Tangan

melambangkan pemeliharaan Ibu Pertiwi.

Gaya Tulisan

Perhutani melambangkan pondasi yang kuat untuk pertumbuhan.

The company logo is inspired by PERUM PERHUTANI's journey to explore beyond current forestry management to continuously increase the value of forestry in Indonesia.

The Forest Green color

represents fertility, nature, wealth, sustainability, peace, and new beginnings.

The Lime Green color

symbolizes enthusiasm, high energy, creativity, freshness, and confidence.

Trees

with a rich variety of leaves represent wealth, dreams, forests, natural products, and people.

Human and Tree

symbolize a strong relationship that brings harmony.

Hands

symbolize the care of Mother Earth.

Perhutani's style of writing

symbolizes a strong foundation for growth.

Riwayat Singkat Perusahaan

Company Brief History

Sejarah Perhutani dimulai ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan Kehutanan berdasarkan Government Besluit No. 21 tanggal 9 Februari 1897.

The history of Perhutani began when the Dutch East Indies Government formed the Forestry Bureau based on Government Besluit No. 21 of February 9, 1897.

Sejarah Perum Perhutani bermula pada era Pemerintah Hindia Belanda, dimana pada tanggal 9 Februari 1897, dibentuklah Jawatan Kehutanan berdasarkan Government Besluit No. 21. Institusi ini menjadi dasar pengelolaan hutan di Hindia Belanda.

Pada tahun 1927, melalui peraturan Bosch Ordonnantie, pengelolaan hutan di Jawa dan Madura diatur secara lebih resmi, namun tidak berlangsung lama. Pada tahun 1930, peraturan tersebut mengalami perubahan dengan penyerahan pengelolaan hutan kepada "*Djatibedrijf*," sebuah perusahaan hutan jati milik pemerintah Hindia Belanda. Sepuluh tahun kemudian, "*Djatibedrijf*" mengembalikan pengelolaan hutan jati di Jawa dan Madura kepada Jawatan Kehutanan.

Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942, Jawatan Kehutanan berubah nomenklatur menjadi *Ringyo Tyuoo Zimusyo*. Lalu, setelah kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura dilimpahkan kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia.

Pada tahun 1961, Pemerintah Indonesia mendirikan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara (BPU Perhutani), sebagai upaya memperbaiki manajemen dan pengelolaan sektor kehutanan negara. BPU Perhutani kemudian berubah menjadi Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) pada tahun 1972.

Selama periode 1972 hingga 2010, Perum Perhutani mengalami berbagai perubahan hukum yang menyesuaikan dengan dinamika lingkungan dan

The history of Perum Perhutani began in the era of the Dutch East Indies Government, where on February 9, 1897, the Forestry Bureau was formed based on Government Besluit No. 21. This institution became the basis for forest management in the Dutch East Indies.

In 1927, through the Bosch Ordonnantie regulations, forest management in Java and Madura was regulated officially, but this did not last long. In 1930, these regulations underwent changes with the handover of forest management to "*Djatibedrijf*," a teak forest company owned by the Dutch East Indies government. Ten years later, "*Djatibedrijf*" returned management of teak forests in Java and Madura to the Forestry Bureau.

During the Japanese occupation in 1942, the Forestry Bureau changed its nomenclature to *Ringyo Tyuoo Zimusyo*. Then, after the independence of the Republic of Indonesia was proclaimed on August 17, 1945, the rights, obligations, responsibilities, and authority for forest management in Java and Madura were delegated to the Forestry Bureau of the Republic of Indonesia.

In 1961, the Indonesian Government established the General Leadership Body for the State Forestry Company (BPU Perhutani) in an effort to improve the management of the state's forestry sector. BPU Perhutani then changed to the State Forestry Public Company (Perum Perhutani) in 1972.

During the period from 1972 to 2010, Perum Perhutani experienced various legal changes that adapted to environmental dynamics and existing



Perubahan Status dan Nama

Perusahaan Pada tahun 2001 Perum Perhutani berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT), kemudian pada tahun 2003 kembali menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Change of Status and Name

In 2001, Perum Perhutani changed to a Limited Liability Company (PT), and in 2003, it returned to being a Public Company (Perum)

kebutuhan pengelolaan hutan yang ada. Puncaknya adalah pada tahun 2010, dimana Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara sebagai landasan hukum baru bagi Perum Perhutani. Kemudian, pada tahun 2014, Peraturan Pemerintah No.73 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara menetapkan Perum Perhutani sebagai induk Holding BUMN Kehutanan dengan PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, dan PT Inhutani V sebagai anak perusahaan.

Modernisasi struktur perusahaan terus berlanjut, dan pada tanggal 31 Juli 2022, melalui Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beberapa penggabungan perusahaan telah ditetapkan. Penggabungan tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- PT Eksploitasi dan Industri Hutan II dan PT Eksploitasi dan Industri Hutan III digabung ke dalam PT Eksploitasi dan Industri Hutan I.
- PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV dan PT Perhutani Anugerah Kimia digabung ke dalam PT Eksploitasi dan Industri Hutan V.

Dengan penetapan penggabungan ini, anak perusahaan Perum Perhutani saat ini terdiri dari PT Inhutani I, PT Inhutani V, dan PT Palawi Risorsis. Perkembangan ini menandai babak baru dalam sejarah panjang Perum Perhutani, yang terus beradaptasi dan berkembang untuk menjaga dan mengelola sumber daya hutan Indonesia demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

forest management needs. The peak was in 2010, when the government established Government Regulation No. 72 of 2010 concerning State Forestry Public Companies (Perum) as a new legal basis for Perum Perhutani. Then, in 2014, Government Regulation No. 73 of 2014 concerning the addition of the state capital of the Republic of Indonesia into the capital of the state forestry public company (Perum) established Perum Perhutani as the holding company for Forestry BUMN, with PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, and PT Inhutani V as subsidiaries.

Modernization of the company structure continues, and on July 31, 2022, through a letter from the Director General of General Legal Administration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, several company mergers have been determined. The merger is effective as of August 1, 2022, with the following details:

- PT Eksploitasi dan Industri Hutan II and PT Eksploitasi dan Industri Hutan III merged into PT Eksploitasi dan Industri Hutan I.
- PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV and PT Perhutani Anugerah Kimia merged into PT Eksploitasi dan Industri Hutan V.

With the establishment of this merger, Perum Perhutani's subsidiaries currently consist of PT Inhutani I, PT Inhutani V, and PT Palawi Risorsis. This development marks a new chapter in the long history of Perum Perhutani, which continues to adapt and develop to protect and manage Indonesia's forest resources for environmental sustainability and community welfare.

Bidang Usaha Perum Perhutani

Perum Perhutani Line of Business

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, pasal 11 ayat (1), maksud dan tujuan usaha Perhutani adalah menyelenggarakan usaha untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa dari hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip Pengelolaan Hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Based on Government Regulation no. 72 of 2010 concerning State Forestry Public Companies (Perum), article 11 paragraph (1), the purpose and objective of Perhutani's business is to run a business for the public benefit in the form of providing goods and/or services from quality forests at prices that are affordable to the community based on the principles of forestry management. Sustainable forest and the principles of good corporate governance.

Pasal 11 Ayat (2) Kegiatan Usaha Utama

- Tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan;
- Pemanfaatan hutan, yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- Rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- Perlindungan hutan dan konservasi alam;
- Pengolahan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi;
- Pendidikan dan pelatihan di bidang kehutanan;
- Penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan;
- Pengembangan agroforestry;
- Membangun dan mengembangkan Hutan Rakyat dan/atau Hutan Tanaman Rakyat; dan
- Perdagangan hasil hutan dan hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain.

Pasal 11 Ayat (3) Kegiatan Usaha Lain

Selain kegiatan usaha utama, Perusahaan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain berupa:

- Usaha optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki untuk *trading house*, agro industrial complex;
- Agribisnis, properti, pergudangan, pariwisata, hotel, resort, *rest area*, rumah

Article 11 Paragraph (2) Main Business Activities

- Forest management and preparation of Forest Management plans;
- Forest utilization, which includes area utilization, environmental service utilization, timber, and non-timber forest product utilization, timber and non-timber forest product collection;
- Forest rehabilitation and reclamation;
- Forest protection and nature conservation;
- Processing of forest products into raw or finished materials;
- Education and training in forestry;
- Research and development in the forestry sector;
- Development of agroforestry;
- Building and developing Community Forests and/ or Community Plantation Forests; And
- Trade in forest products and their production as well as those of other parties.

Article 11 Paragraph (3) Other Business Activities

In addition to the main business activities, the Company may carry out other business activities in the form of:

- Efforts to optimize potential resources owned for trading houses, agro-industrial complex;
- Agribusiness, property, warehousing, tourism, hotels, resorts, rest areas, hospitals, C quarrying, telecommunications infrastructure, utilization



- sakit, pertambangan galian C, prasarana telekomunikasi, pemanfaatan sumber daya air, dan sumber daya alam lainnya; dan
- Kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Kegiatan yang diusahakan saat ini berupa produk dan layanan sebagai berikut:

- Kayu Bundar (log);
- Kayu olahan dan kayu olahan lanjutan;
- Produk kimia hutan: gondorukem, terpentin dan derivatifnya, minyak kayu putih, kopal, dan lak;
- Wisata alam;
- Produk pangan dan kesehatan: madu;
- Benih dan Bibit tanaman kehutanan;
- Penangkaran satwa untuk konservasi perlindungan.

- of water resources, and other natural resources; And
- Other business activities by the aims and objectives of the Company.

Currently, the activities undertaken are in the form of products and services as follows:

- Round Wood (logs);
- Processed wood and advanced processed wood;
- Forest chemical products: Gum Rosin, turpentine and its derivatives, cajuput oil, copal, and shellac;
- Natural tourism;
- Food and health products: honey;
- Forest plant seeds and seedlings;
- Animal captivity for conservation protection;

Visi dan Misi Perusahaan

Company Vision and Mission



Visi Vision

Menjadi Perusahaan Pengelola Hutan Berkelanjutan dan Bermanfaat bagi Masyarakat.

Become a Sustainable and Beneficial Forest Management Company for the Community.



Misi Mission

- Mengelola Sumber Daya Hutan secara Lestari.
- Peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan.
- Mengoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Visi Misi Perum Perhutani ditetapkan Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani nomor 182/Kpts/Dir/12/2020 tanggal 29 Desember 2020.

- *Managing Forest Resources in a Sustainable Way.*
- *Care for the interests of society and the environment.*
- *Optimizing the forestry business with the principles of Good Corporate Governance (GCG).*

The Vision and Mission of Perum Perhutani were determined based on the Decree of the Board of Directors of Perum Perhutani number 182/Kpts/Dir/12/2020 December 29, 2020.

Review dan Persetujuan Atas Penetapan Visi dan Misi

Pada tahun 2020, Manajemen Perhutani melakukan review atas Visi dan Misi Perusahaan. Hasil review tersebut menghasilkan visi dan misi baru Perusahaan yang di sahkan melalui Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani tanggal 29 Desember 2020 Nomor 182/KPTS/DIR/12/2020.

Review and Approval of Vision and Mission Determination

In 2020, Perhutani Management will review the Company's Vision and Mission. The results of this review resulted in a new vision and mission for the Company which was ratified through the Decree of the Board of Directors of Perum Perhutani dated December 29, 2020, Number 182/KPTS/DIR/12/2020.

Tata Nilai Perusahaan

Company Core Value

AKHLAK

Tata Nilai Perum Perhutani mengikuti kebijakan kementerian BUMN melalui Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (AKHLAK) dengan 18 Panduan Perilaku. Adapun definisi dan panduan perilakunya adalah:

The Values of Perum Perhutani follow the policies of the Ministry of SOEs through a Circular Letter Minister of State-Owned Enterprises No. 7/MBU/07/2020 dated July 1, 2020, concerning the Core Values of Human Resources for State-Owned Enterprises, namely Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, and Kolaboratif (AKHLAK) with 18 Code of Conduct. The definitions and behavioral guidelines are:

	AMANAH Definisi: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Panduan Perilaku: • Memenuhi janji dan komitmen. • Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dari tindakan yang dilakukan. • Berpegang teguh pada nilai moral dan etika.	TRUSTWORTHY Definition: Holding fast to the trust given. Code of Conduct: • Fulfill promises and commitments. • Responsible for the task, and the decision of the actions taken. • Stick to moral and ethical values.
	KOMPETEN Definisi: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas Panduan Perilaku: • Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. • Membantu orang lain belajar. • Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.	COMPETENT Definition: Keep learning and developing capabilities Code of Conduct: • Increase self-competence to respond to everchanging challenges. • Help others learn. • Completing tasks of the highest quality..
	HARMONIS Definisi: Saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan Perilaku: • Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya. • Suka menolong orang lain. • Membangun lingkungan kerja yang kondusif	HARMONIOUS Definition: Caring for each other and respecting differences. Code of Conduct: • Appreciate everyone regardless of background. • Likes helping others. • Build a conducive work environment

	LOYAL Definisi: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. Panduan Perilaku: • Menjaga nama baik sesama karyawan, Pimpinan, BUMN dan Negara. • Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. • Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.	LOYAL Definition: Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and Country. Code of Conduct: • Maintain the good name of fellow employees, Leaders, SOEs, and the Country. • Willing to make sacrifices to achieve a greater goal. • Obey the leadership as long as it does not conflict with law and ethics.
	ADAPTIF Definisi: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Panduan Perilaku: • Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. • Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. • Bertindak proaktif.	ADAPTIVE Definition: Continue to innovate and be enthusiastic in moving or dealing with change Code of Conduct: • Quickly adjust to get better. • Continuously make improvements following technological developments. • Act proactively.
	KOLABORATIF Definisi: Membangun kerja sama yang sinergis. Panduan Perilaku: • Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. • Terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.	COLLABORATIVE Definition: Building synergistic cooperation. Code of Conduct: • Provide opportunities for various parties to contribute. • Open to working together to generate added value. • Mobilizing the use of various resources for common goals.

Sumber Daya Manusia

Human Resources



Sub Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi adalah bagian integral dari struktur organisasi yang berfungsi sebagai kegiatan penunjang atau *enabler activity*. Bagian ini terbagi menjadi dua bidang utama, yaitu Bidang Pengembangan SDM dan Organisasi serta Bidang Pelayanan SDM dan Hubungan Industrial.

The Subdirectorate of Human Resources (HR) and Organization is an integral part of the organizational structure and functions as a supporting activity or enabler activity. This section is divided into two main areas, namely the Human Resources and Organizational Development Sector and the Human Resources Services and Industrial Relations Sector.

Bidang Pengembangan SDM dan Organisasi

Bidang ini bertugas untuk mengelola berbagai aspek pengembangan sumber daya manusia dan organisasi. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- **Pengadaan Pegawai atau Rekrutmen:**
Mengatur dan melaksanakan proses penerimaan pegawai baru, termasuk seleksi dan penempatan karyawan yang tepat guna.
- **Pengembangan SDM dan Organisasi:**
Membuat strategi dan program untuk

Human Resources and Organizational Development Sector

This field is tasked with managing various aspects of human resources and organizational development. Activities carried out include:

- **Employee procurement or recruitment:**
Organize and implement the process of recruiting new employees, including the selection and appropriate placement of employees.
- **HR and Organizational Development:**
Create strategies and programs to increase

meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas pegawai serta memperbaiki struktur dan efisiensi organisasi demi mencapai tujuan perusahaan secara optimal.

- **Penerapan Reward & Punishment:**
Menerapkan sistem penghargaan dan sanksi untuk mendorong kinerja pegawai dan memastikan kedisiplinan serta komitmen dalam melaksanakan tugas.

Bidang Pelayanan SDM dan Hubungan Industrial

Bidang ini fokus pada pelayanan kebutuhan pegawai dan hubungan industrial, meliputi berbagai aspek kesejahteraan serta manajemen hubungan kerja. Kegiatan utamanya adalah:

1. **Pengelolaan Pemberhentian Pegawai:**
Melaksanakan proses pemberhentian, termasuk pengurusan administrasi terkait dan memastikan hak-hak pegawai yang diberhentikan terpenuhi.
2. **Pemberian Gaji dan Tunjangan:**
Mengelola sistem penggajian serta pemberian tunjangan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan peraturan yang berlaku.
3. **Fasilitas Kesehatan dan Kerja:**
Menyediakan layanan kesehatan dan fasilitas kerja yang mendukung produktivitas serta kesejahteraan pegawai.
4. **Kebutuhan Perjalanan Dinas:**
Mengatur segala keperluan terkait perjalanan dinas pegawai untuk memastikan kelancaran tugas yang memerlukan mobilitas.
5. **Pengelolaan SIM SDM:**
Mengelola Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIM SDM) untuk mempermudah proses administrasi dan manajemen data pegawai secara efektif dan efisien.
6. **Hubungan Industrial:**
Menjaga hubungan baik antara perusahaan dan pegawai, serta menangani persoalan yang berkaitan dengan hubungan kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, Sub Direktorat SDM dan Organisasi memastikan bahwa seluruh aspek pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi berjalan dengan baik, mendukung operasional perusahaan secara keseluruhan, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pegawai.

employee skills, knowledge, and capacity, as well as improve organizational structure and efficiency, in order to achieve company goals optimally.

- **Application of Reward and Punishment:**
Implement a system of rewards and sanctions to encourage employee performance and ensure discipline and commitment in carrying out tasks.

Field of HR Services and Industrial Relations

This field focuses on serving employee needs and industrial relations, covering various aspects of welfare and work relations management. The main activities are:

1. **Management of Employee Dismissal:**
Carry out the dismissal process, including related administrative arrangements and ensure that the rights of dismissed employees are fulfilled.
2. **Providing Salaries and Benefits:**
Manage the payroll system and provide allowances in accordance with company policies and applicable regulations.
3. **Health and Work Facilities:**
Providing health services and work facilities that support employee productivity and welfare.
4. **Business Travel Needs:**
Arrange all needs related to employee official travel to ensure the smooth running of tasks that require mobility.
5. **HR MIS Management:**
Manage the Human Resources Management Information System (SIM HR) to facilitate the administration process and employee data management effectively and efficiently.
6. **Industrial Relations:**
Maintain good relations between the company and employees, and handle issues related to work relations to create a conducive work environment.

By carrying out these functions, the Sub Directorate of Human Resources and Organization ensures that all aspects of human resource and organizational management run well, support overall company operations, and improve employee welfare and productivity.

Penilaian Tingkat Kematangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perum Perhutani

Untuk mengetahui kondisi dan kematangan pengelolaan *Human Capital* (HC) di Perum Perhutani, Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) telah melakukan upaya pengukuran terhadap tingkat kematangan pengelolaan HC. Inisiatif ini diperkuat oleh instruksi Kementerian BUMN melalui surat nomor S-104/DSI.MBU/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023 tentang Pelaksanaan *Human Capital Maturity Assessment*.

Pelaksanaan *Human Capital Maturity Assessment*

Proses pengukuran ini diawali dengan persiapan melalui FGD (*Focus Group Discussion*) yang membahas alat ukur, metode, serta skema pelaporan hasil asesmen. FGD ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang standar serta praktik terbaik dalam pengelolaan HC yang nantinya akan diimplementasikan dalam pengukuran.

HC *Maturity Assessment* bertujuan untuk:

1. Menjadi *baseline* atau tolok ukur dalam melakukan perbaikan (*improvement*) yang diperlukan dalam pengelolaan HC berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
2. Mengetahui keunggulan bidang-bidang tertentu yang dapat menjadi rujukan (*benchmark*) dan pembelajaran bagi perusahaan lain.

Pengukuran HC *Maturity* ini mencakup beberapa aspek, yaitu:

- *Talent and Succession*
- *Reward and Recognition*
- *Learning and Development*
- *Performance and Goal*
- *Capacity and Strategy*
- *Behavior and Culture*
- *Leadership*

Pengukuran dilakukan pada rentang skala 1 hingga 4, dimana skala ini menunjukkan tingkat kematangan atau maturitas pengelolaan HC.

Proses dan Hasil Pengukuran

Pengukuran HC *Maturity* di Perum Perhutani dilakukan dengan metode *self-assessment* yang melibatkan seluruh anak perusahaan, yaitu PT Inhutani I, PT Inhutani V, dan Econique (PT Perhutani Alam Wisata). *Self-assessment* ini dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 28 Agustus 2023 dan

Assessment of Perum Perhutani's Human Resources (HR) Maturity Level

To determine the condition and maturity of human capital (HC) management at Perum Perhutani, the Human Resources (HR) Division has made efforts to measure the level of maturity of HC management. This initiative was strengthened by instructions from the Ministry of SoE through letter number S-104/DSI.MBU/08/2023 dated August 8, 2023, concerning the implementation of the Human Capital Maturity Assessment.

Implementation of Human Capital Maturity Assessment

This measurement process begins with preparation through FGD (*Focus Group Discussion*), which discusses measuring tools, methods, and reporting schemes for assessment results. This FGD aims to gain an in-depth understanding of standards and best practices in HC management, which will later be implemented in measurements.

The HC *Maturity Assessment* aims to:

1. Become a baseline or benchmark for making necessary improvements in HC management based on established standards.
2. Know the advantages of certain fields that can become references (*benchmarks*) and lessons for other companies.

This HC *Maturity* measurement includes several aspects, namely:

- *Talent and Succession*
- *Reward and Recognition*
- *Learning and Development*
- *Performance and Goal*
- *Capacity and Strategy*
- *Behavior and Culture*
- *Leadership*

Measurements are carried out on a scale ranging from 1 to 4, where this scale shows the level of maturity of HC management.

Measurement Process and Results

HC maturity measurement at Perum Perhutani is carried out using a *self-assessment* method involving all subsidiaries, namely PT Inhutani I, PT Inhutani V, and Econique (PT Perhutani Alam Wisata). This *self-assessment* was carried out from 15 to 28 August 2023 and then validated by



kemudian divalidasi oleh asesor yang ditunjuk oleh FHCI (Forum Human Capital Indonesia) pada tanggal 19 hingga 21 September 2023. Proses ini diakhiri dengan visitasi pada tanggal 25 September 2023 untuk pengecekan langsung di lapangan.

Hasil *self-assessment* menunjukkan bahwa tingkat maturitas HC Perum Perhutani (induk) berada di poin 3 dari skala 4. Hal ini menunjukkan bahwa Perum Perhutani telah berada pada level maturitas yang baik dalam pengelolaan HC. Meskipun demikian, hasil akhir yang menggabungkan *self-assessment* dengan validasi oleh asesor masih menunggu pengumuman resmi dari Kementerian BUMN.

Dengan dilakukannya pengukuran ini, Perum Perhutani tidak hanya mendapatkan cerminan tingkat kematangan pengelolaan HC saat ini, tetapi juga memperoleh rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan guna mencapai standar pengelolaan HC yang lebih tinggi. Hasil pengukuran ini menjadi dasar bagi Perum Perhutani dalam melakukan *continuous improvement* di berbagai aspek HC, sehingga dapat menjadi *benchmark* dan pembelajaran baik bagi perusahaan sendiri maupun bagi perusahaan lain di sektor yang sama.

assessors appointed by FHCI (Indonesian Human Capital Forum) on 19 to 21 September 2023. This process ended with a visitation on September 25, 2023, for direct checks in the field.

The results of the self-assessment show that the HC maturity level of Perum Perhutani (parent) is at point 3 on a scale of 4. This shows that Perum Perhutani is at a good level of maturity in HC management. However, the final results, which combine self-assessment with validation by assessors, are still waiting for an official announcement from the Ministry of SoE.

By carrying out this measurement, Perum Perhutani not only gets a reflection of the current level of HC management maturity, but also obtains recommendations for improvements needed to achieve higher HC management standards. The results of this measurement are the basis for Perum Perhutani in carrying out continuous improvement in various aspects of HC, so that it can become a benchmark and lesson for both the company itself and other companies in the same sector.

Demografi Pegawai

Perum Perhutani memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai tingkat jabatan, yaitu pejabat, staf pelaksana, dan mandor.

Penurunan Total Pegawai:

Secara keseluruhan, jumlah total pegawai menurun dari 16.597 pada tahun 2021 menjadi 14.215 pada tahun 2023. Ini mencerminkan adanya pengurangan jumlah pegawai sebesar 2.382 orang selama periode dua tahun.

Penurunan di Jabatan Staf Pelaksana:

Penurunan signifikan di jabatan staf pelaksana mencerminkan adanya reorganisasi atau peningkatan efisiensi kerja sehingga memerlukan lebih sedikit staf pelaksana.

Penurunan di Jabatan Mandor:

Penurunan jumlah mandor dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan adanya pergeseran strategi operasional perusahaan yang berfokus pada efisiensi dan penggunaan teknologi serta pengurangan biaya pengawasan langsung. Ini juga menunjukkan adaptasi perusahaan terhadap perubahan kebutuhan operasional dan penggunaan sumber daya manusia yang lebih optimal.

Komposisi SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

HR Composition Based on Employment Status

Uraian Description		Jumlah Karyawan Total Employee		
		2023	2022	2021
Pejabat	Officer	5.472	5.559	5.530
Staf Pelaksana	Executive Staff	3.236	3.707	4.096
Mandor	Foreman	5.507	6.330	6.971
Jumlah	Total	14.215	15.596	16.597

Pada tahun 2023, distribusi usia Sumber Daya Manusia (SDM) di Perum Perhutani menunjukkan bahwa perusahaan didominasi oleh pegawai yang berusia 45 tahun ke atas.

Secara keseluruhan, kelompok pegawai berusia 45 tahun ke atas memiliki proporsi yang dominan, mencapai 77% dari total pegawai. Sedangkan, pegawai di bawah usia 45 tahun memiliki proporsi sebesar 23%.

Jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022, terdapat perubahan kecil dalam distribusi usia pegawai. Pegawai yang berusia 40 tahun ke atas mengalami penurunan sebesar 1%, sementara

Employee Demographics

Perum Perhutani has an organizational structure consisting of various levels of positions, namely officials, executive staff, and foremen.

Total Employee Decrease:

Overall, the total number of employees decreased from 16,597 in 2021 to 14,215 in 2023. This reflects a reduction in the number of employees to 2,382 over the two-year period.

Decreases in Executive Staff Positions:

The significant reduction in executive staff positions reflects a reorganization or increase in work efficiency, resulting in the need for fewer executive staff.

Decreases in the Position of Foreman:

The decrease in the number of foremen from 2021 to 2023 shows a shift in the company's operational strategy which focuses on efficiency and the use of technology as well as reducing direct supervision costs. This also shows the company's adaptation to changing operational needs and more optimal use of human resources.

In 2023, the age distribution of Human Resources (HR) at Perum Perhutani shows that the company is dominated by employees aged 45 years and over.

Overall, the group of employees aged 45 years and over has a dominant proportion, reaching 77% of the total employees. Meanwhile, employees under the age of 45 have a proportion of 23%.

When compared with conditions in 2022, there are small changes in the age distribution of employees. Employees aged 40 and over experienced a decrease of 1%, while employees under the age of

pegawai di bawah usia 40 tahun mengalami peningkatan sebesar 1%. Perubahan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya usia pegawai yang mengakibatkan pergeseran proporsi tersebut.

Kondisi dominasi pegawai yang berusia 45 tahun ke atas ini menunjukkan bahwa Perum Perhutani memiliki banyak pegawai yang berpengalaman dan lama bekerja di perusahaan. Namun, peningkatan jumlah pegawai yang lebih muda juga menandakan adanya langkah untuk membawa inovasi dan energi baru ke dalam perusahaan.

Pergeseran ini, meskipun kecil, menunjukkan dinamika demografis di dalam organisasi yang perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan yang efektif harus mencakup strategi untuk mentransfer pengetahuan dari pegawai yang lebih senior kepada pegawai yang lebih muda, memastikan kontinuitas operasional, serta mendorong pengembangan karier bagi semua kelompok usia.

40 experienced an increase of 1%. This change was mainly caused by the increasing age of employees, which resulted in a shift in this proportion.

The condition of the dominance of employees aged 45 years and over shows that Perum Perhutani has many employees who are experienced and have worked for the company for a long time. However, the increase in the number of younger employees also signals a move to bring innovation and new energy to the company.

This shift, indicates demographic dynamics within the organization that need to be managed well. Effective management must include strategies for transferring knowledge from more senior employees to younger employees, ensuring operational continuity, and encouraging career development for all age groups.

Komposisi SDM Berdasarkan Usia

Human Resources Composition Based on Age

Uraian Description		Jumlah Karyawan Total Employee		
		2023	2022	2021
>50 tahun	>50 years	6.657	7.014	6.861
40 - 49 tahun	40 - 49 years	5.917	6.899	7.870
30 - 39 tahun	30 - 39 years	1.042	1.082	1.184
< 30 tahun	< 30 years	599	601	682
Jumlah	Total	14.215	15.596	16.597

Pada tahun 2023, komposisi pegawai Perum Perhutani jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka memiliki pendidikan menengah. Berikut adalah rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan:

- **Pegawai dengan pendidikan tinggi (S1 s/d S3):** 1.293 pegawai (9,10%)
- **Pegawai dengan pendidikan menengah (SMA & Diploma):** 12.267 pegawai (86,30%)
- **Pegawai dengan pendidikan rendah (SD & SMP):** 655 pegawai (4,61%)

Distribusi pegawai berdasarkan pendidikan di Perum Perhutani yang didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan menengah (86,30%) mencerminkan bahwa mayoritas tenaga kerja memiliki kualifikasi cukup untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari dengan efisien.

In 2023, the composition of Perum Perhutani employees based on education level shows that the majority of them have secondary education. The following is a breakdown of the number of employees based on education level:

- Employees with higher education (Bachelor Degree to Doctor Degree): 1,293 employees (9.10%)
- Employees with secondary education (high school and diploma): 12,267 employees (86.30%)
- Employees with low education (primary and middle school): 655 employees (4.61%)

The distribution of employees based on education at Perum Perhutani is dominated by employees with a secondary education level (86.30%), reflecting that the majority of the workforce has sufficient qualifications to support the company's daily operations efficiently.

Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

HR Composition Based on Education

Uraian Description		Jumlah Karyawan Total Employee		
		2023	2022	2021
Tinggi (S1 s/d S3)	High (Bachelor to Doctor Degree)	1.293	1.850	1.800
Menengah (SMA & Diploma)	Middle (Higschool & Diploma)	12.267	12.434	13.247
Rendah (SD & SMP)	Low (Elementary & Junior High School)	655	1.312	1.550
Jumlah	Total	14.215	15.596	16.597

Komposisi pegawai Perum Perhutani berdasarkan gender pada tahun 2023 menunjukkan dominasi laki-laki yang signifikan. Berikut adalah rincian jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin:

- Laki-laki: 13.072 pegawai (92%)
- Perempuan: 1.143 pegawai (8%)

Komposisi gender yang stabil di angka 92% laki-laki dan 8% perempuan menunjukkan dominasi tenaga kerja laki-laki di Perum Perhutani. Dominasi ini bisa jadi tercermin dari sifat pekerjaan yang lebih banyak memerlukan tenaga fisik dan keterlibatan di lapangan, yang secara tradisional lebih diminati oleh laki-laki.

The composition of Perum Perhutani employees based on gender in 2023 shows significant male dominance. The following is a breakdown of the number of employees by gender:

- Men: 13,072 employees (92%)
- Women: 1,143 employees (8%)

The stable gender composition of 92% men and 8% women shows the dominance of the male workforce in Perum Perhutani. This dominance may be reflected in the nature of work that requires more physical effort and involvement in the field, which is traditionally more attractive to men.

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Number of Employees Based on Gender

Uraian Description		2023	2022	2021
Laki-laki	Male	13.072	14.397	
Perempuan	Female	1.143	1.199	
Jumlah	Total	14.215	15.596	

Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan

HR Composition Based on Position

Uraian Description		Jumlah Karyawan Total Employee		
		2023	2022	2021
Kepala Divisi sederajat/ KSPI/ Sekper	Division Head equivalent/ KSPI/ Sekper	26	24	30
Kepala Departemen sederajat	Head of Department equivalent	44	58	70
Administratur/GM sederajat/ Administrator	Administrator/GM equivalent/Administrator	119	111	105
Kepala Seksi sederajat	Head of Section equivalent	196	230	240
Wakil Administratur sederajat	Deputy Administrator equivalent	398	397	388
Asper/Kepala Sub Seksi Sederajat	Asper/Head of Sub- Section equivalent	1.567	1.559	1.542
Mantri Sederajat	Officer equivalent	3.122	3.180	3.155
Staf	Staff	8,743	10.037	11.067
Jumlah	Total	14.215	15.596	16.597

Jumlah Pegawai

Dengan ditetapkannya Perhutani sebagai induk Holding Company bidang Kehutanan, jumlah pegawai Perhutani Group menjadi 15.245 orang yang terdiri dari Induk Perhutani Group 14.215 orang dan anak perusahaan sebanyak 1.030 orang. Rincian pegawai anak perusahaan adalah sebagai berikut:

Rincian Pegawai Anak Perusahaan

Subsidiary Employee Details

Uraian Description	Jumlah Karyawan Total Employee	
	2023	2022
PT INHUTANI I	612	774
PT INHUTANI V	191	225
PT PALAWI	227	67
Jumlah	1.030	1.066

Pengembangan Kompetensi

Perum Perhutani terus berkomitmen dalam meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pegawai melalui berbagai program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Hingga tahun 2023, Perum Perhutani telah menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi SDM sebanyak 42 jenis pelatihan dengan total peserta mencapai 71.630 orang, atau setara dengan satu orang pegawai rata-rata memperoleh 5 pelatihan pengembangan kompetensi. Program-program ini diselenggarakan dengan berbagai metode yang inovatif dan sesuai dengan kemajuan teknologi serta kebutuhan operasional perusahaan.

- 1. Tatap Muka Fisik:** Pelatihan yang dilakukan secara langsung untuk memastikan interaksi yang intensif dan mendalam antara *trainer* dengan peserta.
- 2. Virtual dan E-Learning:** Menggunakan aplikasi PIJAR Perhutani, yang memungkinkan pelatihan dilaksanakan secara *online*, memudahkan pegawai untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Ini juga mencakup pelatihan virtual yang interaktif.
- 3. Sharing Session:** Sesi berbagi pengalaman dan pengetahuan di antara pegawai, yang membantu menumbuhkan budaya pembelajaran kolaboratif di dalam perusahaan.
- 4. Pelatihan (Training):** Program pelatihan yang terstruktur dan terfokus pada peningkatan keterampilan spesifik yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Number of Employees

With the appointment of Perhutani as the parent Holding Company in the Forestry sector, the number of Perhutani Group employees has become 15,245 people, consisting of 14,215 Perhutani Group parent companies and 1,030 subsidiary companies. Details of subsidiary employees are as follows:

Competency Development

Perum Perhutani continues to be committed to improving employee competency and capability through various Human Resources (HR) development programs. Until 2023, Perum Perhutani has organized 42 types of HR competency development training activities with a total of 71,630 participants, or the equivalent of one employee receiving an average of 5 competency development training sessions. These programs are implemented using various innovative methods and in accordance with technological advances and company operational needs.

- 1. Physical face-to-face:** training that is conducted directly to ensure intensive and in-depth interaction between the trainer and participants.
- 2. Virtual and E-Learning:** Using the PIJAR Perhutani application, which allows training to be carried out online, makes it easier for employees to learn anywhere and at any time. It also includes interactive virtual training.
- 3. Sharing Session:** Sessions to share experiences and knowledge among employees, which helps foster a collaborative learning culture within the company.
- 4. Training:** structured training program focused on improving specific skills needed by the company.

5. Webinar: Seminar yang dilakukan secara online untuk memberikan wawasan baru dari para ahli di bidang terkait.

Kegiatan pengembangan kompetensi yang komprehensif dan berkesinambungan ini membawa berbagai manfaat bagi Perum Perhutani dan pegawai, antara lain:

- 1. Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan:**
Pelatihan yang diselenggarakan memastikan bahwa pegawai memiliki keterampilan dan pengetahuan terbaru untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan efektif.
- 2. Adaptasi Teknologi:**
Penggunaan aplikasi PIJAR Perhutani untuk *e-learning* menunjukkan adaptasi perusahaan terhadap teknologi digital dalam pengembangan SDM.
- 3. Kolaborasi dan Inovasi:**
Metode *sharing session* dan webinar mendorong kolaborasi antar pegawai dan memfasilitasi aliran ide-ide inovatif.
- 4. Pengembangan Karir:**
Program-program ini membantu pegawai dalam pengembangan karir lebih lanjut, mempersiapkan mereka untuk peran dan tanggung jawab yang lebih besar di masa depan.

Dengan program pengembangan kompetensi SDM yang terstruktur dan menggunakan metode yang bervariasi, Perum Perhutani tidak hanya meningkatkan kualitas tenaga kerja, tetapi juga memastikan adaptasi yang lebih baik terhadap tantangan masa depan. Komitmen Perum Perhutani dalam mengembangkan sumber daya manusianya mencerminkan visi perusahaan untuk menjadi organisasi yang inovatif, berkelanjutan, dan unggul di bidangnya.

Pada tahun 2023, dari 14,215 karyawan Perhutani, telah mengikuti berbagai program pelatihan pengembangan kompetensi. Dari beragam pelatihan yang diberikan, total keikutsertaan mencapai 71,630 peserta untuk 42 jenis pelatihan. Besaran investasi yang dikeluarkan Perhutani untuk program pendidikan dan pelatihan di tahun 2023 sebesar Rp3,35 miliar.

5. Webinars: Seminars conducted online to provide new insights from experts in related fields.

This comprehensive and continuous competency development activity brings various benefits to Perum Perhutani and its employees, including:

- 1. Skills and Knowledge Improvement:**
The training provided ensures that employees have the latest skills and knowledge to carry out their duties effectively.
- 2. Technology Adaptation:**
The use of the PIJAR Perhutani application for e-learning shows the company's adaptation to digital technology in human resource development.
- 3. Collaboration and Innovation:**
Sharing sessions and webinar methods encourage collaboration between employees and facilitate the flow of innovative ideas.
- 4. Career Development:**
These programs assist employees in further career development, preparing them for greater roles and responsibilities in the future.

With a structured HR competency development program and using varied methods, Perum Perhutani not only improves the quality of the workforce but also ensures better adaptation to future challenges. Perum Perhutani's commitment to developing its human resources reflects the company's vision to become an innovative, sustainable, and superior organization in its field.

In 2023, out of 14,215 Perhutani employees, they have participated in various competency development training programs. From the various training provided, the total participation reached 71,630 participants for 42 types of training. The amount of investment issued by Perhutani for education and training programs in 2023 is Rp3.35 billion.

No	Divisi Division	Departemen Department	Nama Pelatihan Training Title		Jumlah Peserta Total Participant
1	SDM	POB	Pelatihan SDM (CHRP Atmajaya)	HR Training (CHRP Atmajaya)	2
2	Renstra	Renstra	Pelatihan Audit VLK Industri	Industrial VLK Audit Training	4
3	SDM	HI	Uji Kompetensi HR FHCI Level Supervisor	HR FHCI Supervisor Level Competency Test	1

No	Divisi Division	Departemen Department	Nama Pelatihan Training Title		Jumlah Peserta Total Participant
4	PeFi	LSP	Pelatihan Asesor Kompetensi Khusus	Special Competency Assessor Training	1
5	PeFi	LSP	Uji Kompetensi Ganis PH	Ganis PH Competency Test	421
6	PeFi	<i>Learning Center</i>	Pelatihan Pensiun <i>Preneur</i>	Preneur Pension Training	60
7	SDM	Renbang SDM	Perpanjangan AK3U	Extension of AK3U	28
8	SDM	Renbang SDM	Pelatihan <i>Coaching for Unleash Potenti al to Increase Performance</i>	Coaching Training for Unleash Potential to Increase Performance	-
9	MR	MR	Pelatihan MR bagi OPR	MR Training for OPR	1.085
10	Janten	Legal	Pelatihan Advokat	Advocate Training	-
11	MUK	Agroforestry	Pelatihan Manajemen Agroforestry Tebu Mandiri	Independent Sugarcane Agroforestry Management Training	96
12	Renstra	Renstra	Pelatihan SVLK	SVLK Training	257
13	PeFi	<i>Learning Center</i>	<i>Cyber Security Part I</i>	Cyber Security Part I	12.768
14	PeFi	<i>Learning Center</i>	Diklat Pratugas Perhutani Group Tahun 2023	2023 Perhutani Group Pre-Assignment Training	65
15	PeFi	<i>Learning Center</i>	PHT Universitas Lambung Mangkurat	PHT Lambung Mangkurat University	180
16	PeFi	<i>Learning Center</i>	Diklat Dasar Teknik Kehutanan I	Basic Forestry Engineering Training I	69
17	PeFi	<i>Learning Center</i>	Diklat <i>Social Forest Management</i>	Social Forest Management Training	56
18	MR	MR	Pelatihan dan Sertifikasi Managemen Risiko bagi BOC dan BOD	Risk Management Training and Certification for BOC and BOD	17
19	PeFi	<i>Learning Center</i>	Pelatihan Sertifikasi MPOS Union Getah	MPOS Union Getah Certification Training	175
20	PeFi	<i>Learning Center</i>	Pelatihan Sertifikasi Aplikasi Siska	Siska Application Certification Training	105
21	PeFi	<i>Learning Center</i>	Pelatihan Pengelolaan 5R	5R Management Training	245
22	PeFi	<i>Learning Center</i>	Pelatihan <i>Service Excellence</i>	Service Excellence Training	183
23	PeFi	<i>Learning Center</i>	Pelatihan Union Wisata SMART KPH	SMART KPH Tourism Union Training	35
24	PeFi	<i>Learning Center</i>	Diklat <i>Marketing Online</i>	Online Marketing Training	75
25	PeFi	<i>Learning Center</i>	<i>E-Learning Risk Management Training</i>	E-Learning Risk Management Training	645
26	PeFi	<i>Learning Center</i>	<i>E-Learning WBS, Pengendalian Gratifikasi, & SMAP JJ 4</i>	E-Learning WBS, Gratification Control, & SMAP JJ 4	1.392
27	PeFi	<i>Learning Center</i>	<i>E-Learning WBS, Pengendalian Gratifikasi, & SMAP JJ 5</i>	E-Learning WBS, Gratification Control, & SMAP JJ 5	2.947
28	PeFi	<i>Learning Center</i>	<i>E-Learning WBS, Pengendalian Gratifikasi, & SMAP JJ 6</i>	E-Learning WBS, Gratification Control, & SMAP JJ 6	7.224
29	PeFi	<i>Learning Center</i>	Pelatihan Pengembangan Internal Pembuatan Animasi Pembelajaran	Internal Development Training for Making Learning Animations	9
30	Divisi Renstra	Bangsis	Pelatihan PIC ISO 9001 : 2015 Kantor Pusat	ISO 9001: 2015 PIC Training Head Office	26

No	Divisi Division	Departemen Department	Nama Pelatihan Training Title		Jumlah Peserta Total Participant
31	PeFi	Learning Center	E-Learning Cyber Security Part 2	E-Learning Cyber Security Part 2	13.665
32	PeFi	Learning Center	E-Learning Pengelolaan Kawasan Lindung Batch I	E-Learning Management of Protected Areas Batch I	6.732
33	PeFi	Learning Center	Diklat Forester I Bisnis	Forester I Business Training	33
34	PeFi	Learning Center	Diklat Forester II Perencanaan	Forester II Planning Training	53
35	PeFi	Learning Center	Diklat Dasar Sarpra	Basic Sarpra Training	36
36	PeFi	Learning Center	Diklat Pelatihan Aplikasi Digital SISDH Online	Online SISDH Digital Application Training	18
37	PeFi	Learning Center	Diklat Evaluasi Implementasi SMART KPH	SMART KPH Implementation Evaluation Training	18
38	PeFi	Learning Center	Diklat Perhutani START Program	Perhutani START Program Training	97
39	PeFi	Learning Center	Pelatihan Guru Kepala Sekolah dan Pengurus YTRP	YTRP Principal and Administrator Teacher Training	562
40	PeFi	Learning Center	E-Learning Cyber Security Awareness Part 3	E-Learning Cyber Security Awareness Part 3	11.484
41	PeFi	Learning Center	E-Learning PSDH	PSDH E-Learning	10.202
42	PeFi	Learning Center	Webinar Digitalisasi Teknologi	Technology Digitalization Webinar	559
Jumlah/ Total					71.630

Rencana Strategis Pengelolaan SDM tahun 2023

Perhutani menerapkan rencana strategis pengelolaan SDM yang berfungsi untuk memastikan pemanfaatan potensi karyawan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan strategis organisasi yang lebih difokuskan pada kebijakan, sistem, dan implementasinya. Di awal tahun 2023, Perhutani tengah gencar melakukan sistem pengelolaan SDM berbasis talent management program, untuk mengembangkan kemampuan SDM Perhutani, sehingga ke depan, SDM Perhutani akan menjadi lebih baik dan dapat memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas Perhutani. Harapannya, SDM Perhutani akan menjadi lebih berkompeten dan lebih produktif dalam rangka mendukung laju bisnis Perhutani.

Talent management program, merupakan strategi terpadu yang di rancang untuk mengelola kemampuan, kompetensi dan kekuatan sehingga akan terlihat *capacity* dan *performance* masing-masing SDM. Konsep *talent management program* ini tidak terbatas hanya pada merekrut kandidat yang tepat pada waktu yang tepat,

2023 Strategic HR Management Plan

Perhutani implements a strategic HR management plan that functions to ensure effective and efficient utilization of employee potential to achieve organizational strategic goals that are more focused on policies, systems, and implementation. At the beginning of 2023, Perhutani is incessantly implementing a talent management program-based HR management system, to develop Perhutani's HR capabilities, so that going forward, Perhutani's HR will be better and can have a positive influence on Perhutani's productivity. The hope is that Perhutani's human resources will become more competent and more productive to support Perhutani's business pace.

A talent management program is an integrated strategy designed to manage abilities, competencies, and strengths so that the capacity and performance of each HR will be seen. The concept of this talent management program is not limited to recruiting the right candidate at the right time but also extends to exploring hidden

tetapi juga meluas untuk mengeksplorasi kualitas tersembunyi yang mungkin tidak disadari oleh karyawan. Program ini mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN tentang *nine box*, dimana berdasarkan posisinya tersebut, akan dijadikan dasar untuk dikembangkan. Melalui sistem ini, setiap personal akan memiliki *individual development program*, yang merupakan pola pengembangan untuk masing-masing SDM Perhutani.

Selain itu, Perhutani juga mengembangkan proses sistem remunerasi berbasis kinerja, yang diharapkan akan menjadi motivasi bagi karyawan untuk terus memberikan yang terbaik bagi Perhutani. Melalui sistem ini, diharapkan akan tercipta keadilan dan tidak terdapat kesenjangan antar karyawan. Dalam implementasinya, Perhutani telah merekrut konsultan profesional untuk melakukan asistensi dalam mengembangkan sistem remunerasi berbasis kinerja ini. Hal tersebut sejalan dengan *key performance indicators* (KPI) SDM Perhutani, agar ke depannya SDM Perhutani dapat bersaing secara sehat.

qualities that employees may not be aware of. This program refers to the provisions set by the Ministry of SOEs regarding nine boxes, which based on this position, will be used as the basis for development. Through this system, each person will have an individual development program, which is a development pattern for each Perhutani HR.

In addition, Perhutani is also developing a performance based remuneration system process, which is expected to be a motivation for employees to continue to provide the best for Perhutani. Through this system, it is hoped that justice will be created and there will be no gaps between employees. In its implementation, Perhutani has recruited professional consultants to assist in developing this performance-based remuneration system. This is in line with Perhutani's HR key performance indicators (KPI) so that in the future Perhutani's HR can compete fairly.

Komposisi Pemilik Modal

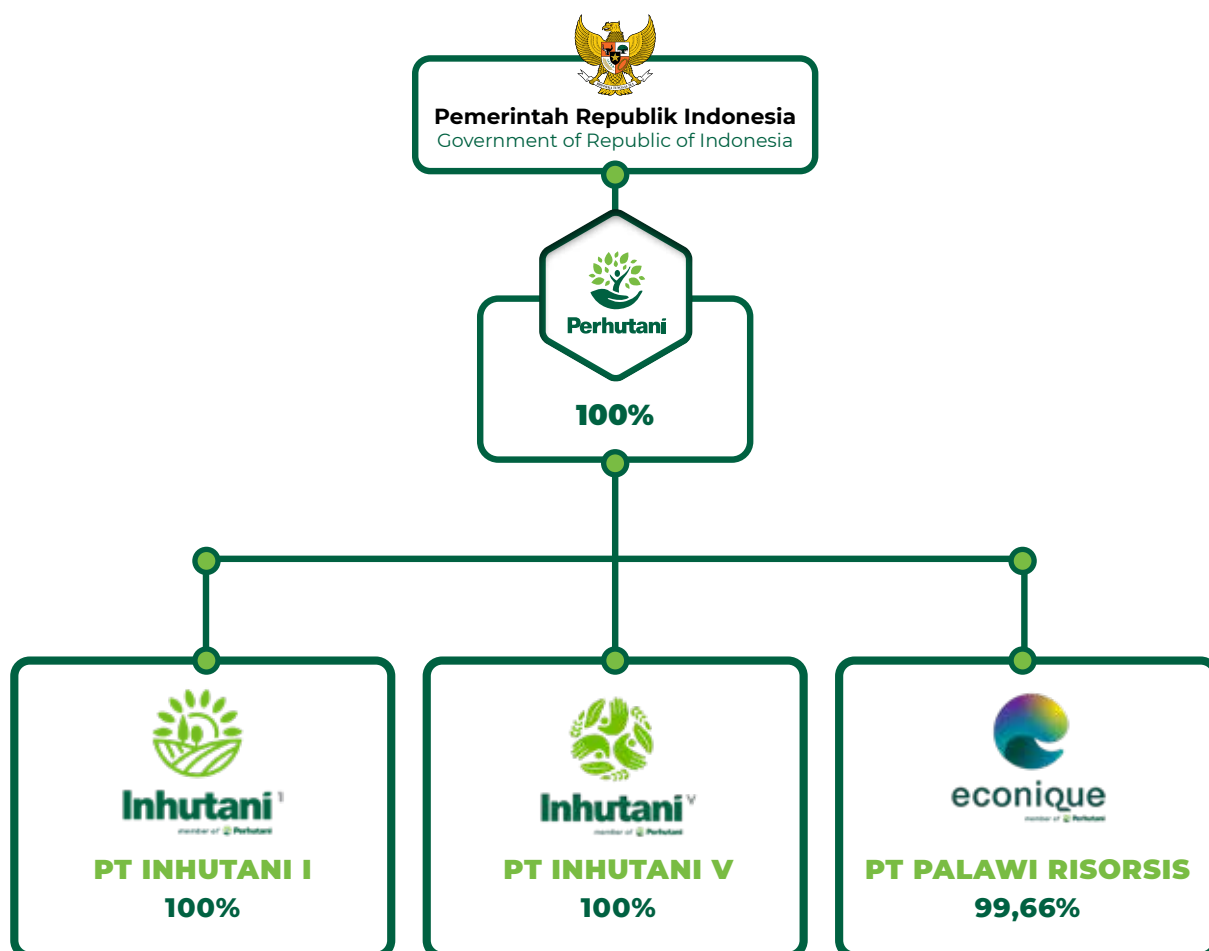
Shareholders Composition

Perum Perhutani merupakan BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum), dimana 100% modalnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Modal Perusahaan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Perum Perhutani is a SOE in the form of a Public Company (Perum), in which 100% of the capital is owned by the Government of the Republic of Indonesia. Company capital is state assets that are separated and not divided into shares.

Struktur Grup Perusahaan

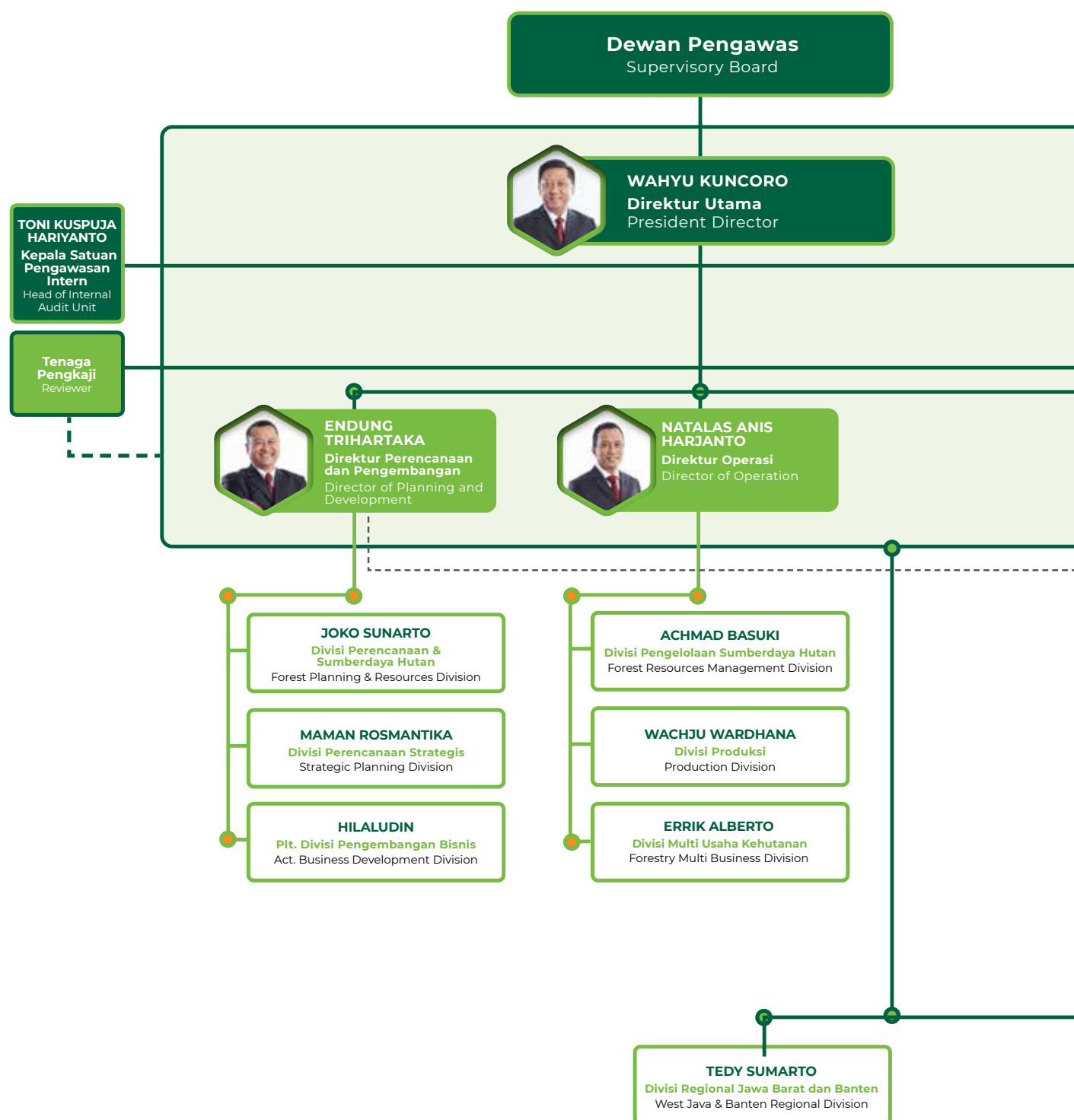
Company Group Structure



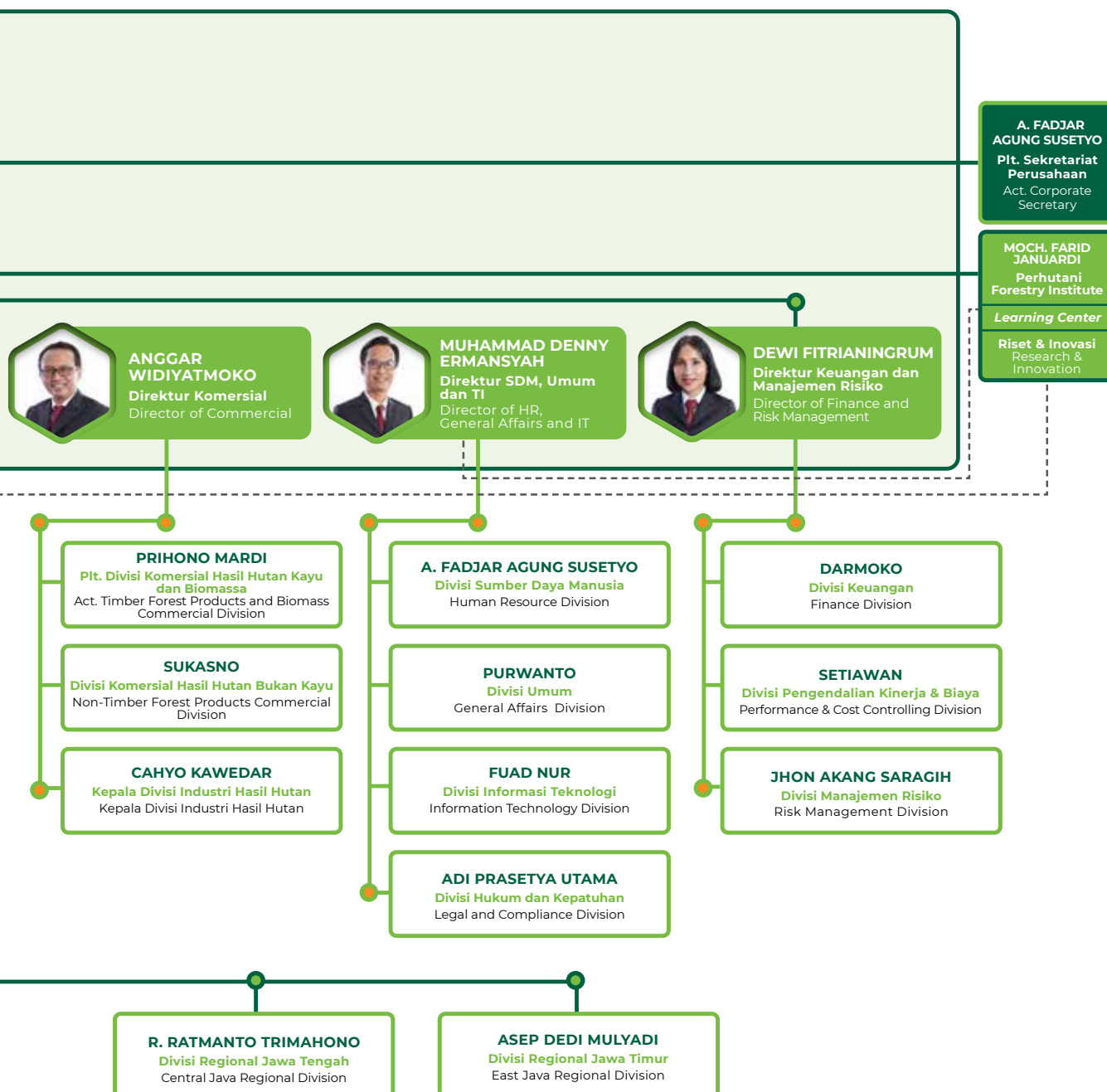
Struktur Organisasi Perusahaan

Company Organization Structure

Struktur Organisasi Perum Perhutani berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 06/PER/DIR/02/2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 31/KPTS/DIR/3/2021 Tentang Struktur Organisasi Perum Perhutani.



The Organizational Structure of Perum Perhutani is based on the Decree of the Board of Directors of Perum Perhutani Number: 06/PER/DIR/02/2021 concerning the Third Amendment to the Decree of the Board of Directors of Perum Perhutani Number 31/KPTS/DIR/3/2021 concerning the Organizational Structure of Perum Perhutani.



Daftar Nama Pejabat di bawah Direksi Tahun 2023

List of names for the Organizational Structure

Nama Name	Jabatan Position	
M. Yusuf Noorhajiyo	Direktur Produksi PT Ratah Timber	Production Director of PT Ratah Timber
A. Fadjar Agung Susetyo	Sekretaris Perusahaan	Corporate Secretary
Asep Dedi Mulyadi	Kepala Divisi Regional Jawa Timur	Head of East Java Regional Division
Wawan Triwibowo	Wakil Kepala Divisi Regional Jatim	Deputy Head of East Java Regional Division
Tedy Sumarto	Kepala Divisi Regional Jawa Barat & Banten	Head of West Java & Banten Regional Division
Yudha Suswardhono	Wakil Kepala Divisi Regional Jawa Barat & Banten	Deputy Head of West Java & Banten Regional Division
R. Ratmanto Trimahono	Kepala Divisi Regional Jawa Tengah	Head of Central Java Regional Division
Cucu Suparman	Wakil Kepala Divisi Regional Jawa Tengah	Deputy Head of Central Java Regional Division
Moch. Farid Januardi	Kepala Perhutani Forestry Institute	Head of the Perhutani Forestry Institute
Haris Tri Wahjunita	Wakil Kepala Perhutani Forestry Institute	Deputy Head of the Perhutani Forestry Institute
Darmoko	Kepala Divisi Keuangan	Head of Finance Division
Fuad Nur	Kepala Divisi Informasi Dan Teknologi	Head of Information and Technology Division
Hilaluddin	Kepala Divisi Pengembangan Bisnis	Head of Business Development Division
Adi Prasetya Utama	Kepala Divisi Hukum Dan Kepatuhan	Head of Legal and Compliance Division
Sukasno	Kepala Divisi Komersial Hasil Hutan Bukan Kayu	Head of Non-Timber Forest Products Commercial Division
Achmad Basuki	Kepala Divisi Pengelolaan Sumberdaya Hutan	Head of Forest Resources Management Division
Toni Kuspuja Hariyanto	Kepala Satuan Pengawasan Intern	Head of Internal Audit Unit
Setiawan	Kepala Divisi Pengendalian Kinerja dan Biaya	Head of Performance and Cost Control Division
Yopita Sari	Kepala Divisi Manajemen Risiko	Head of Risk Management Division
Anton Fadjar Agung Susetyo	Kepala Divisi Sumberdaya Manusia	Head of Human Resources Division
Tri Lastono	Kepala Divisi Ekowisata	Head of Ecotourism Division
Errik Alberto	Kepala Divisi Multi Usaha Kehutanan	Head of Multi-Business Forestry Division
Maman Rosmantika	Kepala Divisi Perencanaan Strategis	Head of Strategic Planning Division
Joko Sunarto	Kepala Divisi Perencanaan Sumberdaya Hutan	Head of Forest Resource Planning Division
Dadan Wachju Wardhana	Kepala Divisi Produksi	Head of Production Division
Purwanto	Kepala Divisi Umum	Head of General Division
Kuwat Agustyawan	Senior Executive Vice President (SEVP) Keuangan dan SDM	Senior Executive Vice President (SEVP) Finance and HR
Sudarwanto	Senior Executive Vice President (SEVP) Keuangan dan SDM	Senior Executive Vice President (SEVP) Finance and HR
Sarwono	Senior Executive Vice President (SEVP) Keuangan dan SDM	Senior Executive Vice President (SEVP) Finance and HR
Dadhut Sujanto	Senior Executive Vice President (SEVP) Perencanaan dan Pemasaran	Senior Executive Vice President (SEVP) Planning and Marketing
Karuniawan Purwanto Sanjaya	Senior Executive Vice President (SEVP) Perencanaan dan Pemasaran	Senior Executive Vice President (SEVP) Planning and Marketing
Djohan Surjoputro	Senior Executive Vice President (SEVP) Operasional	Senior Executive Vice President (SEVP) Operations
Budi Widodo	Senior Executive Vice President (SEVP) Operasional	Senior Executive Vice President (SEVP) Operations
Adrian Bestari	Ketua Tim Transformasi	Transformation Team Leader
Daniel Budi Cahyono	Tenaga Pengajar Utama	Main Teaching Staff
Yulistyo Ananta Soejoso	Staf Khusus	Special Staff
Ratna Erawati	Staf Khusus	Special Staff
Wahyu Agus Setiono	Staf Khusus	Special Staff

Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

List of Subsidiaries and/or Associated Entities



PT INHUTANI I

Tahun Beroperasi: 1973

Kepemilikan: Komposisi Pemegang Saham Pasca Penggabungan adalah Perum Perhutani 100% dengan 523.815 lembar saham.

Bidang Usaha: Pengelolaan hutan dan produksi hasil hutan baik berupa hutan alam maupun hutan tanaman dengan produk utama kayu bulat dan getah (Pinus dan Karet) serta Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) dengan produk utama berupa *woodworking*.

Year of Operation: 1973

Ownership: Post Merger Shareholder Composition is 100% Perum Perhutani with 523,815 shares.

Field of Business: Forest management and production of forest products in the form of natural and plantation forests with the main products of logs and latex or pine sap and the Upstream Wood Processing Industry (IPKH) with the main product is *woodworking*.



PT INHUTANI V

Tahun Beroperasi: 1974

Kepemilikan: Komposisi Pemegang Saham Pasca Penggabungan adalah Perum Perhutani 100% dengan 150.102 lembar saham.

Bidang Usaha: Pengelolaan hutan, perusahaan hutan, pengolahan dan industri hasil hutan serta hasil hutan ikutan, reboisasi dan rehabilitasi IPPKH, perbenihan. Pembibitan dan penanaman jenis tanaman baru, jasa bidang kehutanan dan jasa wisata hutan.

Year of Operation: 1974

Ownership: Post Merger Shareholder Composition is 100% Perum Perhutani with 150,102 shares.

Field of Business: Forest management, forest exploitation, processing and industry of forest products and associated forest products, reforestation and rehabilitation of IPPKH, seeding, nursery and planting of new types of plants, forestry sector services and forest tourism services.



PT PALAWI RISORSIS

Tahun Beroperasi: 2002

Kepemilikan: Perum Perhutani (99,66%)

Bidang Usaha: Jasa kegiatan wisata di alam terbuka, jasa pariwisata, jasa pelatihan dan keterampilan, jasa konfensi, perjalanan insentif dan pameran impresariat, jasa penambangan bahan galian pasir, batu-batuan, pasir, gamping, granit, tanah liat, pasir besi, mineral dan sumber alam lainnya, jasa pengolahan hasil tambang, jasa pengolahan limbah tambang dan kawasan, jasa pengadaan dan penyimpanan hasil tambang, jasa lingkungan dan pembangkit listrik tenaga air, jasa optimalisasi properti.

Year of Operation: 2002

Ownership: Perum Perhutani (99,66%)

Field of Business: Outdoor tourism activities, tourism services, training and skills services, conference services, incentive trips and impresario exhibitions, mining services for sand minerals, rocks, sand, limestone, granite, clay, iron sand, minerals and other natural resources, mining products processing services, mining and area waste treatment services, procurement and storage services for mining products, environmental services and hydroelectric power generation, property optimization services.

Wilayah Operasional Perum Perhutani

Perum Perhutani Operational Area



Nama dan Alamat Entitas dan/atau Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Kantor Pusat

Name and Address of Subsidiary and/or Branch Office or Head Office Representative Office

Kantor Pusat Perum Perhutani

Perum Perhutani Head Office

Graha Perhutani

Jl. TB Simatupang No.22, RT.1/RW.8
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
Telp. : (021) 7805730 (hunting)
Email : humas@perhutani.co.id
Website : www.perhutani.co.id

Divisi Regional Jawa Tengah

Jl. Pahlawan No. 15-17, Semarang 50243
Telp. : (024) 8413631 (hunting)
Fax. : (024) 8443142

Divisi Regional Jawa Timur

Jl. Genteng Kali No. 49
Tromol Pos 840, Surabaya 6008
Telp. : (031) 5343851 (hunting)
Fax. : (031) 5311784



Divisi Regional Jawa Barat & Banten

Jl. Soekarno Hatta No.628 KM 14 Bandung 40292

Telp. : (022) 7802871 (hunting)

Fax. : (022) 7802972

Kantor Anak Perusahaan Perum Perhutani

Perum Perhutani Subsidiaries Office

PT Inhutani I

Jl. KH Ahmad Dahlan 69, Kebayoran Baru

Jakarta Selatan

Telp. : +62-21 7200402

Fax. : +62-21 72795106

Website : www.inhutani1.co.id

PT Inhutani V

Graha Perhutani - Lantai 16

Jl. TB Simatupang, Jatipadang, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12540

PT Palawi Risorsis

Rukan Tanjung Mas Raya Blok B1/6

Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta 12530

Telp. : (021) 7810475

Fax. : (021) 78834061

Website : www.palawi.co.id

Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

Name and Address of Institution and/or Supporting Profession

KANTOR AKUNTAN PUBLIK PUBLIC ACCOUNTING FIRM

KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (EY)
Jl. Jenderal Sudirman No.5, RW.3, Senayan,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
DKI Jakarta 12190

NOTARIS NOTARY

Dewi Tenty Septy Artiany, SH, MH, MKn
Jl. Cempaka Putih Barat Raya No.11 D,
Jakarta Pusat. DKI Jakarta.

Kronologis Pencatatan Saham

Share Listing Chronology

Perum Perhutani per 31 Desember 2023 merupakan salah satu BUMN *Non-Listed* Non Keuangan atau belum mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, Perum Perhutani tidak dapat menyajikan informasi tentang kronologis pencatatan saham, jenis tindakan korporasi (*corporate action*) yang menyebabkan perubahan jumlah saham, perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku dan nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.

Perum Perhutani as of December 31, 2023, is a Non-Listed Non-Financial SOE or has not listed shares on the Indonesia Stock Exchange. Thus, Perum Perhutani cannot provide information about the chronology of the listing of shares, the types of corporate actions that cause changes in the number of shares, changes in the number of shares from the beginning of the listing to the end of the financial year and the name of the stock exchange where the company's shares are listed.

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya

Other Securities Listing Chronology

Perum Perhutani per 31 Desember 2023 tidak menerbitkan efek dalam bentuk apapun. Dengan demikian Perum Perhutani tidak dapat menyajikan informasi tentang kronologis pencatatan efek lainnya, jenis tindakan korporasi (*corporate action*) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya, perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku, nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan dan peringkat efek.

Perum Perhutani as of December 31, 2023, did not issue securities in any form. Thus Perum Perhutani cannot provide information about the chronology of other securities listings, types of corporate actions that cause changes in the number of other securities, changes in the number of other securities from the beginning of listing to the end of the financial year, the name of the stock exchange where other securities are listed and the rating of securities.

Keanggotaan Dalam Asosiasi

Membership in Associations

Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.

List of industry association memberships both nationally and internationally related to the implementation of sustainable finance.

Asosiasi/Organisasi Association/ Organization	Jabatan Position
Pine Chemical Association	Anggota/ Members
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)	Pengurus dan Anggota/ Administrators and Members

Informasi Pada Website Perusahaan

Information on Company Website

Perhutani memiliki website resmi yang dapat diakses melalui alamat: <https://www.perhutani.co.id>. Website ini dirancang untuk memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh stakeholders, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, website ini tersedia dalam dua versi bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, sehingga dapat menjangkau audiens yang lebih luas.

Perhutani has an official website, which can be accessed via the address: <https://www.perhutani.co.id>. This website is designed to provide complete, accurate, and easily accessible information for all stakeholders, both domestic and overseas. Therefore, this website is available in two language versions, namely Indonesian and English, so that it can reach a wider audience.

Website perusahaan diperbarui secara berkala untuk memastikan bahwa semua informasi yang disajikan selalu terkini dan relevan. Pembaruan rutin ini dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan memastikan keterbukaan informasi perusahaan.

The company website is updated regularly to ensure that all information presented is always current and relevant. These regular updates are carried out to improve the user experience and ensure the transparency of company information.

Salah satu fitur utama dari website Perhutani adalah penjelasan rinci mengenai praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) yang diterapkan oleh perusahaan. Informasi tersebut mencakup Struktur Organisasi dan Tim Manajemen, Pemilik Modal, Nilai-nilai Inti (*Core Values*), serta Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*). Berbagai dokumen terkait GCG, seperti Pedoman GCG, Kode Etik Perusahaan (*Code of Conduct*), Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Kebijakan *Whistleblowing System*, dan

One of the main features of the Perhutani website is a detailed explanation of the good corporate governance (GCG) practices implemented by the company. This information includes organizational structure and management team, capital owners, core values, and governance structure. Various documents related to GCG, such as the GCG Guidelines, Company Code of Ethics (Code of Conduct), Gratification Control Guidelines, Whistleblowing System Policy Guidelines, and other policy documents, are also available for

dokumen kebijakan lainnya, juga tersedia untuk diakses oleh publik. Ini menunjukkan komitmen Perhutani terhadap transparansi dan akuntabilitas di setiap lini operasionalnya.

Bagian "Tentang Kami" di website ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai Perhutani, yang meliputi Visi, Misi, dan Tata Nilai perusahaan, Kepemilikan Saham, Tugas dan Fungsi, Sejarah Perusahaan, serta Profil Perusahaan. Informasi ini membantu para pengunjung memahami tujuan, arah, dan sejarah perjalanan Perhutani.

Selain itu, website Perhutani juga memuat informasi penting terkait Tata Kelola Perusahaan, termasuk regulasi yang relevan dan struktur organisasi. Bagian ini sangat penting bagi investor dan pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi rinci tentang bagaimana Perhutani mengelola bisnisnya.

Tanggung jawab sosial perusahaan juga menjadi sorotan, dengan bagian khusus yang mengulas Penghargaan yang telah diraih, Visi, Misi, dan Tata Nilai perusahaan. Berbagai pengumuman, *press release*, publikasi media, serta artikel dari Suara Rimba dan Duta Rimba juga tersedia untuk memberikan berita dan perkembangan terbaru mengenai Perhutani.

Website ini menampilkan informasi mengenai berbagai lini bisnis Perhutani, termasuk Agroforestri, Ekowisata, Biomassa, Kayu, Non Kayu, Herbal, dan Solusi Berbasis Alam. Ini memungkinkan para pengunjung untuk memahami lebih dalam tentang berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perhutani.

Dokumen-dokumen penting seperti Laporan Tahunan, Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dan Laporan Kinerja Keuangan juga tersedia di website ini. Transparansi ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memantau kinerja dan tanggung jawab perusahaan secara menyeluruh.

Terakhir, informasi mengenai Rekrutmen Karyawan juga diunggah di website ini, memberikan kesempatan bagi para pencari kerja untuk bergabung dengan tim Perhutani.

Dengan berbagai informasi yang komprehensif dan mudah diakses, website Perhutani memainkan peran penting dalam komunikasi perusahaan dengan para pemangku kepentingan dan

public access. This shows Perhutani's commitment to transparency and accountability in every line of its operations.

The "About Us" section on this website provides a comprehensive overview of Perhutani, which includes the company's vision, mission, and values; share ownership; duties and functions; company history; and company profile. This information helps visitors understand the purpose, direction, and history of Perhutani's journey.

Apart from that, the Perhutani website also contains important information related to corporate governance, including relevant regulations and organizational structure. This section is very important for investors and stakeholders who need detailed information about how Perhutani manages its business.

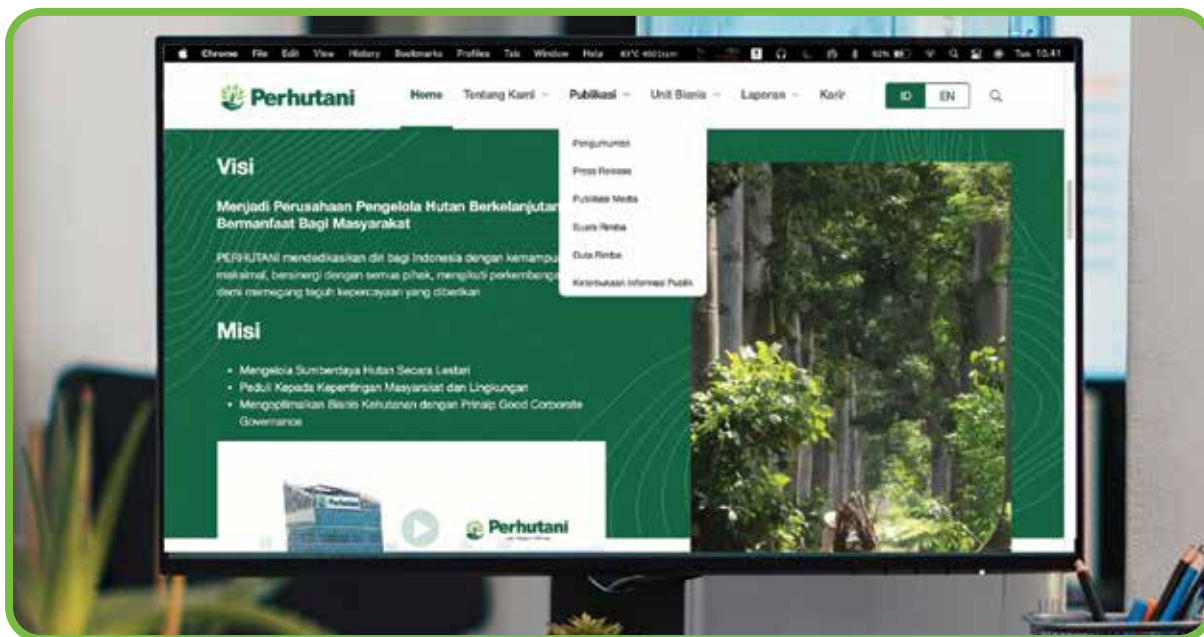
Corporate social responsibility is also in the spotlight, with a special section reviewing the awards that have been achieved and the company's vision, mission, and values. Various announcements, press releases, media publications, and articles from Suara Rimba and Duta Rimba are also available to provide the latest news and developments regarding Perhutani.

This website displays information about various Perhutani business lines, including agroforestry, ecotourism, biomass, wood, non-wood, herbal, and nature-based solutions. This allows visitors to understand more deeply about the various products and services offered by Perhutani.

Important documents such as annual reports, social and environmental responsibility reports (TJSL), and financial performance reports are also available on this website. This transparency allows stakeholders to monitor the company's overall performance and responsibilities.

Lastly, information regarding employee recruitment is also uploaded on this website, providing opportunities for job seekers to join the Perhutani team.

With a variety of comprehensive and easily accessible information, the Perhutani website plays an important role in the company's communication with stakeholders and provides a clear and



memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang kegiatan dan kinerja Perhutani.

transparent picture of Perhutani's activities and performance.

Isi Website Perusahaan

- **Tentang Kami**
 - Visi, Misi dan Tata Nilai
 - Kepemilikan Saham
 - Tugas dan Fungsi
 - Sejarah Perusahaan
 - Profil Perusahaan
- **Tata Kelola Perusahaan**
 - Regulasi
 - Struktur Organisasi
 - Tanggung Jawab
 - Penghargaan
 - Visi, Misi dan Tata Nilai
- **Pengumuman**
 - Press Release
 - Publikasi Media
 - Suara Rimba
 - Duta Rimba
- **Agroforestry**
- **Ekowisata**
- **Biomassa**
- **Kayu**
- **Non Kayu**
- **Herbal**
- **Solusi Berbasis Alam**
- **Berisi Laporan Tahunan, Laporan TJSL, Laporan Kinerja Keuangan**
- **Informasi Mengenai Rekrutmen Karyawan**

Contents of the Company Website

- **About Us**
 - Vision, Mission and Values
 - Shareholding
 - Job and function
 - Company history
 - Company profile
- **Corporate Governance**
 - Regulations
 - Organizational structure
 - Responsibility
 - Award
 - Vision, Mission and Values
- **Announcement**
 - Press Release
 - Media Publications
 - Suara Rimba
 - Duta Rimba
- **Agroforestry**
- **Ecotourism**
- **Biomass**
- **Wood**
- **Non Wood**
- **Herbal**
- **Nature Based Solutions**
- **Contains Annual Report, TJSL Report, Financial Performance Report**
- **Information Regarding Employee Recruitment**

Penghargaan Awards



Gold Winner Annual Report Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2023 (17-03-2023)

Gold Winner Annual Report
Public Relations Indonesia
Awards (PRIA) 2023 (17-03-2023)



Silver Winner E-Magazine Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2023 (17-03-2023)

Silver Winner E-Magazine Public
Relations Indonesia Awards
(PRIA) 2023 (17-03-2023)



Digittech Award 2023 - The Best Digital Technology Development Team 2023 (30-03-2023)

Digittech Award 2023 - The Best
Digital Technology Development
Team 2023 (30-03-2023)



4. Digitech Award 2023 - The Best IT Planning & Project Portfolio 2023 (30-03-2023)

4. Digitech Award 2023 - The
Best IT Planning & Project
Portfolio 2023 (30-03-2023)



5. Digitech Award 2023 - The Best IT Technology Development 2023 (30-03-2023)

5. Digitech Award 2023 - The
Best IT Technology Development
2023 (30-03-2023)



6. Digitech Award 2023 - The Best IT The Best IT Planning & Project Portfolio 2023 (30-03-2023)

6. Digitech Award 2023 - The
Best IT The Best IT Planning &
Project Portfolio 2023
(30-03-2023)



Silver Winner The Most Promising Company in Marketing 3.0 BUMN Entrepreneurial Marking Awards 2023 (14-06-2023)

Silver Winner The Most Promising Company in Marketing 3.0 BUMN Entrepreneurial Marking Awards 2023 (14-06-2023)



BUMN Peringkat 1 (Satu) dengan Frekuensi Transaksi Terbanyak untuk BUMN Tipe B - Pasar Digital (PaDi) UMKM Hybrid Expo 2023 (13-07-2023)

BUMN Ranked 1 (One) with the Highest Transaction Frequency for Type B BUMN - Digital Market (PaDi) UMKM Hybrid Expo 2023 (13-07-2023)



The Greatest Champions Of GRC Excellence Performance GRC Award 2023 (30-8-2023)

The Greatest Champions Of GRC Excellence Performance GRC Award 2023 (30-8-2023)



KIP Award BUMN Track 2023 (29-10-2023)

KIP Award BUMN Track 2023 (29-10-2023)



Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2023 (19-12-2023)

Public Information Transparency Award (KIP) 2023 (12-19-2023)

Sertifikasi

Certification

Sertifikasi Mandatory

Perhutani telah mematuhi kewajiban sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian. Implementasi Sertifikat PHL telah dilaksanakan sejak tahun 2016 dengan PT Equality Indonesia sebagai Lembaga penilai independen.

Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Industri, diterapkan pada 3 (tiga) industri kayu yaitu Perhutani Plywood Industri, Industri kayu Jawa Timur dan Industri Kayu Jawa Tengah. Lembaga sertifikasi yang melaksanakan penilaian adalah PT BRIK Quality Services.

Perhutani, sebagai salah satu perusahaan yang berkomitmen terhadap integritas dan transparansi, Perhutani telah berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 37000:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Sertifikasi ini merupakan pengakuan atas komitmen Perhutani dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik penyuapan dan korupsi.

Sertifikasi Voluntary

Untuk memastikan rantai pasok berkelanjutan, Perhutani telah menerapkan Sertifikasi Pengelolaan Hutan skema FSC *Forest Management* (FSC 100%) pada 11 KPH, serta FSC *Controlled Wood* (FSC-CW) pada 46 KPH. Sertifikat diterbitkan oleh PT SGS Indonesia yang menjamin kepatuhan Perhutani terhadap prinsip dan kriteria standard internasional FSC.

Sertifikasi CoC-FSC (*Chain Of Custody*) pada Industri Hasil Hutan Perhutani meliputi 3 Industri Kayu: Industri Kayu Gresik, Cepu, dan Brumbung, dan 2 Industri gondorukem dan terpine: PGT Sukun dan PGT Cimanggu. Lembaga Sertifikasi yang melaksanakan penilaian adalah PT Mutu Agung Lestari.

Sertifikasi ISO 9001:2015 pada 30 (tiga puluh) area terapan untuk 8 ruang lingkup usaha yang dilakukan perhutani. Lembaga sertifikasi yang melaksanakan penilaian adalah PT Mutu Agung Lestari.

Mandatory Certification

Perhutani has complied with the Sustainable Forest Management (PHL) certification obligation based on the Decree of the Minister of Environment and Forestry Number SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 concerning Standards and Guidelines for the Implementation of the Verification and Sustainability System. The implementation of the PHL Certificate has been carried out since 2016 with PT Equality Indonesia as an independent assessment institution.

Forest Product Legality Verification (VLHH) Industry Certification is applied to 3 (three) wood industries, namely Perhutani Plywood Industry, East Java Wood Industry, and Central Java Wood Industry. The certification institution that carries out the assessment is PT BRIK Quality Services.

Perhutani, as one of the companies committed to integrity and transparency, has successfully obtained ISO 37000:2016 certification regarding the Anti-Bribery Management System. This certification is an acknowledgment of Perhutani's commitment to creating a work environment free from bribery and corruption practices.

Voluntary Certification

To ensure a sustainable supply chain, Perhutani has implemented the Forest Management Certification scheme FSC *Forest Management* (FSC 100%) in 11 KPH, as well as FSC *Controlled Wood* (FSC-CW) in 46 KPH. The certificates are issued by PT SGS Indonesia which guarantees Perhutani's compliance with the principles and criteria of the FSC international standard.

CoC-FSC (*Chain Of Custody*) Certification in Perhutani's Forest Product Industry includes 3 Wood Industries: Gresik, Cepu, and Brumbung Wood Industries, and 2 gondorukem and terpine Industries: Sukun PGT and Cimanggu PGT. The Certification Institution that carried out the assessment was PT Mutu Agung Lestari.

ISO 9001:2015 Certification in 30 (thirty) applied areas for 8 business scopes carried out by Perhutani. The Certification Institution that carried out the assessment was PT Mutu Agung Lestari.

Peristiwa Penting

Events Highlights



12 | JANUARI / JANUARY | 2023

Perkuat Bisnis Biomassa dan NBS, Perhutani Gelar Kick Off RKAP 2023

Strengthening Biomass and NBS Business,
Perhutani Holds 2023 RKAP Kick Off



18 | JANUARI / JANUARY | 2023

Perhutani Hadirkan Virtual Forest di Indonesia Metaverse Show 2023

Perhutani Presents Virtual Forest at Indonesia
Metaverse Show 2023



19 | JANUARI / JANUARY | 2023

Perhutani Raih Penghargaan dalam Kick Off Bussiness Matching Pasar Digital UMKM 2023

Perhutani Wins Award in the 2023 MSME Digital
Market Kick Off Business Matching



30 | JANUARI / JANUARY | 2023

Menteri BUMN Lakukan Pergantian Direksi Perum Perhutani.

Minister of State-Owned Enterprises Changes
Board of Directors of Perum Perhutani.



13 | FEBRUARI / FEBRUARY | 2023

Tingkatkan Bisnis Wisata, Perhutani Gandeng PT Sanraya Adi Nattaya dalam Pengembangan Sistem Digitalisasi Pengelolaan Tiket.

Increasing Tourism Business, Perhutani Collaborates with PT Sanraya Adi Nattaya in Developing a Digitalization Ticket Management System.



02 | MARET / MARCH | 2023

Dukung Rehabilitasi Hutan, Perhutani Bersama United Tractors Tandatangani Nota Kesepahaman.

Supporting Forest Rehabilitation, Perhutani and United Tractors Sign a Memorandum of Understanding.



05 | MARET / MARCH | 2023

Perhutani Ramaikan Jalan Sehat Kementerian BUMN di 12 Kabupaten Kota.

Perhutani enlivens the BUMN Ministry's Healthy Walks in 12 City Districts.



07 | MARET / MARCH | 2023

Perhutani Raih Sertifikat Ekolabel Industri Gum Rosin Pertama di Asia Tenggara.

Perhutani Receives the First Gum Rosin Industry Ecolabel Certificate in Southeast Asia.



13 | MARET / MARCH | 2023

Perhutani Terima Audiensi Aliansi Pecinta Alam Jawa Barat.

Perhutani Receives Audience from West Java Nature Lovers Alliance.



14 | MARET / MARCH | 2023

Tingkatkan Kenirsangkalan Dokumen Elektronik, Perhutani Gandeng BSSN.

Increasing the irrefutability of electronic documents, Perhutani collaborates with BSSN.



15 | MARET / MARCH | 2023

Perhutani Raih 2 Penghargaan di Ajang Anugerah BUMN 2023.

Perhutani Wins 2 Awards at the 2023 BUMN Awards Event.



30 | MARET / MARCH | 2023

Perhutani Terima 4 Penghargaan Bidang Teknologi dan Inovasi.

Perhutani Receives 4 Awards in the Field of Technology and Innovation.



30 | MARET / MARCH | 2023

Meriahkan Bulan Suci Ramadan Perhutani Gelar Bazar Sembako Murah di Bogor.

Celebrating the Holy Month of Ramadan, Perhutani Holds Basic Food Bazaar in Bogor.



18 | APRIL / APRIL | 2023

Sambut Lebaran, Perhutani Lepas 8 Bus Mudik Bersama BUMN.

Welcoming Eid, Perhutani Releases 8 Homecoming Buses Together with SoE..



15 | JUNI / JUNE | 2023

Perhutani Raih Penghargaan dalam BUMN Entrepreneurial Marketing Award 2023.

Perhutani Wins Award in BUMN Entrepreneurial Marketing Award 2023.



16 | JUNI / JUNE | 2023

Perkuat Digitalisasi, Perhutani Luncurkan Aplikasi SocioForest.

Strengthening Digitalization, Perhutani Launches SocioForest Application.



27 | JUNI / JUNE | 2023

Tingkatkan Mutu Pelayanan, Perhutani Launching Digitalisasi Modernisasi TPK.

Improving Service Quality, Perhutani Launches Digitalization of TPK Modernization.



29 | JUNI / JUNE | 2023

Sambut Idul Adha 1444 H, Perhutani Salurkan Bantuan Hewan Kurban ke Seluruh Wilayah Kerja.

Welcoming Eid al-Adha 1444 H, Perhutani Distributes Qurban Animal Assistance to All Work Areas.



05 | JULI / JULY | 2023

Sinergi Multi-Stakeholders, BUMN Genjot Produksi Kopi Rakyat di Jawa Tengah.

Multi-Stakeholder Synergy, BUMN Boosts People's Coffee Production in Central Java.



12 | JULI / JULY | 2023

Perhutani Raih Penghargaan pada PaDi UMKM Hybrid Expo 2023

Perhutani Wins Award at PaDi UMKM Hybrid Expo 2023



Perhutani dan Telkom Gelar Srikandi BUMN Goes to Campus di Universitas Gadjah Mada.

Perhutani and Telkom Hold Srikandi BUMN Goes to Campus at Gadjah Mada University.



Perhutani Gandeng Damri dan AirNav Program Relawan Bakti BUMN Batch IV di Malang.

Perhutani Collaborates with Damri and AirNav Batch IV BUMN Volunteer Program in Malang.



Perhutani Gandeng IOF Atur Regulasi Off Road di Area Perhutani.

Perhutani Collaborates with IOF to Arrange Off Road Regulations in Perhutani Areas.



Perhutani Raih 4 Penghargaan GRC & Performance Excellence Award 2023.

Perhutani Wins 4 GRC Awards & Performance Excellence Award 2023.



31 | AGUSTUS / AUGUST | 2023

Dorong Transformasi Digital, Perhutani Luncurkan PIJAR dan CERDAS serta Kick Off SMART KPH.

Encouraging Digital Transformation, Perhutani Launches PIJAR and CERDAS and SMART KPH Kick Off.



06 | SEPTEMBER / SEPTEMBER | 2023

Perhutani Kembali Terima Sertifikat ISO 37001:2016.

Perhutani Again Receives ISO 37001:2016 Certificate.



18 | SEPTEMBER / SEPTEMBER | 2023

Presiden Jokowi Serahkan Legalitas Kerjasama Kemitraan Perhutani

President Jokowi Submits Legality of Perhutani Partnership Cooperation



26 | OKTOBER / OCTOBER | 2023

4 Tahun Tranformasi BUMN untuk Indonesia Maju, Perhutani Sukses Lakukan Transformasi Digital.

4 Years of BUMN Transformation for Advanced Indonesia, Perhutani Successfully Carries Out Digital Transformation.



30 | OKTOBER / OCTOBER | 2023

Perhutani dan BPOB Tandatangani PKS Wisata Alam Menoreh View Borobudur.

Perhutani and BPOB Sign Menoreh View Borobudur Nature Tourism PKS.



17 | NOVEMBER / NOVEMBER | 2023

Perhutani Dukung Lahirnya Generasi Hijau Cinta Lingkungan melalui Green Youth Movement.

Perhutani Supports the Birth of a Green Generation that Loves the Environment through the Green Youth Movement.



18 | NOVEMBER / NOVEMBER | 2023

17 BUMN Resmikan Program BUMN TEMAN BERSENYUM di Temanggung.

17 BUMNs Launch BUMN TEMAN BERSIUM Program in Temanggung.



28 | NOVEMBER / NOVEMBER | 2023

Perkokoh Kerja Sama, Perhutani Gelar Apresiasi untuk Mitra.

Strengthening Cooperation, Perhutani Shows Appreciation to Partners.



Sinergi BUMN, Perhutani Bersama ID Survey Peringati HMPI Di Bogor.

Synergy between BUMN, Perhutani together with ID Survey to commemorate HMPI in Bogor.



Lakukan Mitigasi Perubahan Iklim dan Offset Emisi Gas Rumah Kaca di Kawasan Hutan, Perhutani Gandeng United Tractors.

Mitigating Climate Change and Offsetting Greenhouse Gas Emissions in Forest Areas, Perhutani Collaborates with United Tractors.



Perhutani Dorong Kerja Sama Proyek NEBS Antara Inhutani I dan Pertamina NRE.

Perhutani Encourages NEBS Project Cooperation Between Inhutani I and Pertamina NRE.



Perhutani Pertahankan Predikat Badan Publik Informatif.

Perhutani Maintains Predicate of Informative Public Agency.



Teknologi Informasi Perusahaan

Company Information Technology

Divisi Teknologi Informasi Perum Perhutani telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan TI. Dengan penyusunan kebijakan yang mendukung keamanan dan tata kelola data, struktur organisasi yang efisien, pengembangan aplikasi yang signifikan, serta pencapaian IT Maturity Level yang tinggi, Perum Perhutani siap untuk menangani tantangan teknologi di masa depan. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar untuk mencapai tujuan strategis dan operasional perusahaan secara keseluruhan.

Perum Perhutani's Information Technology Division has demonstrated a strong commitment to improving the quality and effectiveness of IT management. By formulating policies that support data security and governance, an efficient organizational structure, significant application development, and achieving a high IT maturity level, Perum Perhutani is ready to handle future technological challenges. This effort is expected to make a major contribution to achieving the company's overall strategic and operational goals.

Kebijakan Teknologi Informasi

Berdasarkan Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor: 06/PER/DIR/02/2022 tanggal 14 Februari 2022, Divisi Teknologi Informasi berada di bawah Direktorat SDM, Umum dan IT. Divisi Teknologi Informasi bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, dan integrasi pengelolaan kegiatan teknologi informasi perusahaan secara efektif dan efisien. Kebijakan ini bertujuan untuk

Information Technology Policy

Based on the Regulation of the Directors of Perum Perhutani Number: 06/PER/DIR/02/2022 dated February 14, 2022, the Information Technology Division is under the Directorate of Human Resources, General Affairs, and IT. The Information Technology Division is responsible for planning, developing, and integrating the management of company information technology activities



memberikan nilai tambah bagi perusahaan melalui pemanfaatan teknologi yang optimal.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Tata kelola TI di Perum Perhutani melibatkan penyusunan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mendukung regulasi dan standar keamanan informasi. Pada tahun 2023, berbagai kebijakan diperbaharui dan disusun, antara lain:

- **Tata Kelola TI dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI):**
 - Penyusunan draf kebijakan dan Pengesahan Pedoman SMKI pada 27 Juli 2023.
 - Penyampaian Pedoman SMKI kepada seluruh karyawan pada 14 Agustus 2023.
 - Pengesahan Pedoman PDP pada 30 Oktober 2023.
 - *Workshop* dan penyusunan draf dilakukan pada September 2023, dengan pengesahan pada 30 Oktober 2023.
 - Penyampaian Pedoman PDP kepada seluruh karyawan pada 7 November 2023
- **Kebijakan Klasifikasi Informasi:**
 - Pengesahan Pedoman Klasifikasi Informasi pada 22 November 2023.

effectively and efficiently. This policy aims to provide added value to the company through optimal use of technology.

Information Technology Governance

IT governance at Perum Perhutani involves the preparation of various policies aimed at supporting information security regulations and standards. In 2023, various policies will be updated and prepared, including:

- **IT Governance and Information Security Management System (ISMS):**
 - Preparation of the policy draft and ratification of the ISMS policy on July 27, 2023.
 - Submission of the SMKI Guidelines to all employees on August 14, 2023.
 - Ratification of PDP Guidelines on October 30, 2023.
 - The workshop and drafting will be carried out in September 2023, with approval on October 30, 2023.
 - Submission of PDP Guidelines to all employees on November 7, 2023
- **Information Classification Policy:**
 - Ratification of the Information Classification Guidelines on November 22, 2023.

- **Disaster Recovery Plan (DRP) dan Desain Recovery Center (DRC):**
 - Pengesahan Dokumen DRP pada tanggal 5 Oktober 2023
 - Penyusunan Pedoman DRP pada bulan Desember 2023

Struktur Organisasi

Pada April 2023, terjadi penyesuaian dalam divisi Teknologi Informasi dengan pengisian pejabat baru di Departemen Teknologi. Departemen Teknologi membawahi dua seksi yaitu Seksi Operasi Teknologi dan Seksi Pengembangan Teknologi. Perubahan organisasi ini diatur dalam Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor: 004/PER/DIR/03/2023 tentang Perubahan ke Lima atas Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 31/KPTS/DIR/3/2021 tentang Struktur Organisasi Perum Perhutani.

Pengembangan TI Tahun 2023

Pada tahun 2023, Divisi Teknologi Informasi telah berhasil menyelesaikan beberapa pengembangan aplikasi untuk mendukung operasional perusahaan, antara lain:

- **Disaster Recovery Plan (DRP) and Recovery Center Design (DRC):**
 - Ratification of DRP Documents on October 5, 2023
 - Preparation of DRP Guidelines in December 2023

Organizational structure

In April 2023, there will be adjustments in the information technology division with the hiring of new officials in the technology department. The Technology Department oversees two sections, namely the Technology Operations Section and the Technology Development Section. This organizational change is regulated in the Regulation of the Directors of Perum Perhutani Number:004/PER/DIR/03/2023 concerning the Fifth Amendment to the Decree of the Directors of Perum Perhutani Number: 31/KPTS/DIR/3/2021 concerning the Organizational Structure of Perum Perhutani.

IT Development in 2023

In 2023, the Information Technology Division successfully completed several application developments to support company operations, including:

No	Sistem System	Keterangan Description	
1	SMPHT (Sistem Manajemen Perhutani)	Pada aplikasi ini telah dikembangkan fitur Dokumen Eksternal yang membantu mengelola dokumen operasional perusahaan secara efisien.	In this application, an External Document feature has been developed, which helps in managing company operational documents efficiently.
2	INTAN (Inventarisasi Hutan) v1	Aplikasi pengelolaan inventarisasi hutan. Pengembangan fitur mencakup Input Petak Ukur, Sosialisasi dan Implementasi, serta penambahan form keterangan pada menu input pohon, untuk memantau dan mengendalikan pengelolaan hutan secara real-time.	Forest inventory management application. Feature development includes measuring plot input, socialization, and implementation, as well as adding information forms to the tree input menu to monitor and control forest management in real-time.
3	SIMAKO (Sistem Informasi Manajemen Kontrak) V.1	Aplikasi untuk menampilkan daftar kontrak socio partnership di Perusahaan. Pengembangan fitur meliputi Pengelolaan Data Kontrak dan Analisa Kegiatan Pra Kontrak (di dalam progress), yang membantu dalam mengatur dan menganalisa data kontrak secara efektif.	Application to display a list of socio partnership contracts in the Company. Feature development includes contract data management and pre-contract activity analysis (in progress), which help in managing and analyzing contract data effectively.

No	Sistem System	Keterangan Description	
4	SISKA (Sistem Informasi Keamanan Hutan)	Mengembangkan fitur-fitur seperti penambahan Kolom Nomor INCIDEMA, Ujicoba Internal, Implementasi Nomor INCIDEMA, Fitur Suggestion Nomor INCIDEMA pada Form HA, dan Notifikasi Email untuk Proses Approval, guna meningkatkan keamanan dan manajemen hutan.	Developing features such as adding the INCIDEMA Number Column, internal testing, implementing the INCIDEMA Number, INCIDEMA Number Suggestion Feature on the HA Form, and email notification for the approval process to improve security and forest management.
5	Aplikasi Survei	Aplikasi pendukung pengisian kuesioner secara online sesuai kepentingan perusahaan. Mengembangkan fitur <i>Grab Raw Data</i> Survei dan <i>Setting</i> Pertanyaan Survei, untuk memudahkan pelaksanaan survei dan analisis data.	Supporting application for filling out questionnaires online according to company interests. Developing the <i>Grab Raw Survey Data</i> feature and <i>Survey Question Settings</i> to facilitate survey implementation and data analysis.
6	SocioForest V2 (Pengembangan app untuk offtaker SocioTrade)	Platform digital berbasis mobile yang dikembangkan sebagai sarana untuk membangun kolaborasi antara pesanggem, pendamping serta offtaker UAT di KPH Bondowoso, pendampingan persiapan launching, dan melengkapi data penggarap.	A mobile-based digital platform developed as a means to build collaboration between messengers, assistants and offtakers UAT at KPH Bondowoso, assistance with launching preparations, and completing cultivator data.
7	Union Wisata	Mengembangkan fitur <i>Re-check Patch Vulnerabilities</i> Kuliner Apps, <i>Synchronize Data</i> Transaksi ke Database Warehouse, dan Konfigurasi Pentaho	Developing the Culinary Apps <i>Re-check Patch Vulnerabilities</i> feature, <i>Synchronizing Transaction Data</i> to the Warehouse Database, and <i>Pentaho Configuration</i>
8	COMBHUCA V1 (Competence-Based Human Capital)	Aplikasi untuk pengukuran kompetensi karyawan. Mengembangkan fitur Kamus <i>Hard Competency</i> , <i>Profil Hard Competency</i> dengan Jabatan, Pengisian <i>Hard Competency</i> , Monitoring Pengisian <i>Hard Competency</i> , Perhitungan Nilai <i>Hard Competency</i> , dan UAT Fitur <i>Hard Competency</i> , untuk mengukur kompetensi pegawai.	Application for employee competency measurement. Developing the <i>Hard Competency Dictionary</i> feature, <i>Hard Competency Profile</i> with Position, <i>Hard Competency Filling</i> , <i>Monitoring Hard Competency Filling</i> , <i>Hard Competency Value Calculation</i> , and <i>UAT Hard Competency Feature</i> to measure employee competency.
9	Smart KPH	Mengembangkan infrastruktur KPH yang berbasis teknologi digitalisasi, meliputi aspek redesain RPKH, sistem insentif, transformasi PHBM, dan peningkatan nilai tambah.	Develop KPH infrastructure based on digitalization technology, including aspects of RPKH design, incentive systems, PHBM transformation, and increasing added value.
10	SSO (Single Sign On)	Pengembangan yang memungkinkan pegawai menggunakan satu akun untuk mengakses berbagai aplikasi Perhutani.	Development that allows employees to use one account to access various forestry applications.
11	Portal Knowledge Management	Mengembangkan fitur <i>SSO Login</i> dan <i>Zip (Solved)</i> untuk manajemen pengetahuan lebih baik.	Developed SSO login and zip (solved) features for better knowledge management.
12	Tracking Logistic (v.1)	Mengembangkan fitur untuk <i>Mobile App Tracking</i> Angkutan Getah dan Kayu, serta Sosialisasi di Smart KPH.	Developing features for mobile app tracking of rubber and wood transport, as well as socialization at Smart KPH.
13	MAYA (Manajemen Budaya)	Aplikasi untuk monitoring dan pelaporan kegiatan korporasi yang sesuai dengan budaya AKHLAK Kementerian BUMN.	Application for monitoring and reporting corporate activities in accordance with the AKHLAK culture of the Ministry of SOEs.
14	SISDH (Sistem Informasi Sumber Daya Hutan) V2	Aplikasi pengelolaan sistem perencanaan sumber daya hutan khususnya pada inventarisasi & kajian kelestarian hutan.	Application of forest resource planning system management, especially in forest inventory & sustainability studies.

No	Sistem System	Keterangan Description	
15	Aplikasi Dashboard SDM	Dikembangkan untuk memfasilitasi pengukuran SDM Maturity.	Developed to facilitate HR maturity measurement.
16	REKAN PERHUTANI (Rekrutmen Karyawan Perhutani)	Mengembangkan berbagai fitur untuk rekrutmen karyawan termasuk Register, Biodata, <i>Upload</i> dokumen, Lowongan pekerjaan, dan teknis kesiapan sistem rekrutmen.	Developing various features for employee recruitment, including Register, Biodata, Document Upload, Job Vacancies, and technical recruitment system readiness.
17	SIPURNA (Sistem Informasi Persiapan Pensiun Perhutani)	Aplikasi ini digunakan untuk manajemen pesangon pensiun karyawan dengan fitur-fitur seperti Perhitungan Pesangon BUP, <i>Flow</i> pengajuan usulan pensiun, pembaruan <i>form</i> di pembayaran, dan <i>User Guide</i> .	This application is used for employee retirement severance pay management and has features such as BUP Severance Pay Calculation, the flow of submitting pension proposals, payment form updates, and a user guide.
18	E-PPID Web	Mengembangkan fitur seperti Penambahan <i>Sound</i> pada halaman <i>home</i> dan Perubahan warna <i>font</i> untuk pengelolaan informasi publik.	Developing features such as adding sound to the home page and changing font colors for public information management.
19	SIMAKO (Sistem Informasi Manajemen Kontrak) V2	Fitur yang dikembangkan termasuk <i>Use case</i> dan <i>flowchart</i> , <i>Project Charter</i> , Pra Kontrak, Halaman MoU, <i>Upload</i> dokumen, Edit dan Hapus MoU.	Features developed include use cases and flowcharts, a project charter, a pre-contract, a MoU page, uploading documents, and editing and deleting MoUs.
20	Web Corporate	Pengembangan ini mencakup Penambahan Submenu, <i>Update</i> menu karir, Desain footer, Penambahan <i>product</i> di menu Industri Kayu, <i>Upgrade</i> plugin, dan Penambahan menu penghargaan serta sertifikasi.	This development includes adding submenus, updating the career menu, footer design, adding products to the wood industry menu, upgrading plugins, and adding awards and certification menus.
21	E-PPID Mobile V1 (Elektronik-Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	Mengembangkan fitur UI/UX, Registrasi & Login, Permohonan, Keberatan, Informasi publik, Status permohonan, dan Regulasi.	Develop UI/UX features, registration and login, applications, objections, public information, application status, and regulations.
22	Tracking Logistic V.2	Meliputi fitur <i>Upload</i> Foto kendaraan dan UAT.	Includes vehicle photo upload and UAT features.
23	SISDH (Sistem Informasi Sumber Daya Hutan) V3	Mengembangkan fitur SPPK, Workorder, Integrasi dengan Eboni, dan UAT.	Developing SPPK, Workorder, Integration with Eboni, and UAT features.
24	INTAN (Inventarisasi Hutan) v2	Mengembangkan fitur Bugfix foto pohon, <i>Keyboard type form</i> peninggi, Library location, dan UAT.	Developed bugfix features for tree photos, keyboard type form enhancer, library location, and UAT.
25	COMBHUCA V2 (Competence Based Human Capital)	Pemetaan <i>user</i> , <i>position</i> , <i>department</i> , <i>division</i> , <i>site</i> , dan <i>Fixing</i> data untuk <i>Hard Competency</i> .	Mapping user, position, department, division, site, and fixing data for hard competency.
26	MAYA V1.4.2 (Manajemen Budaya) dan DatePicker	Pengembangan notifikasi hapus, <i>delete</i> kegiatan, <i>warning edit</i> bobot, <i>download evidence</i> , tombol <i>back</i> ,	Development of delete notification, delete activity, weight edit warning, download evidence, back button,
27	Integrasi INCIDEMA dan SISKAS	Integrasi untuk mendukung manajemen kejahatan hutan lebih baik.	Integration to support better forest crime management.
28	CERDAS (Cognition Expertise Database System)	Aplikasi <i>knowledge management</i> Perusahaan	Company knowledge management application

IT Maturity Level

Pada tahun 2023, Perum Perhutani telah melaksanakan *IT Maturity Assessment* dengan konsultan pendamping PT. Transforma Rekayasa dan Solusi. Proses ini dilakukan mulai tanggal 3 Oktober 2023 hingga 24 Desember 2023. Hasil *assessment* menunjukkan peningkatan dengan skor akhir *IT Maturity* mencapai 3,51 dari target 3,5 yang ditetapkan pada rencana pemenuhan gap INDI 4.0 tahun 2024. Laporan akhir *IT Maturity Assessment* telah disampaikan kepada Kementerian BUMN pada 29 Desember 2023.

IT Maturity Level

Perum Perhutani, in collaboration with PT Transforma Rekayasa and Solusi, carried out an *IT Maturity Assessment* in 2023. The period of this process was October 3, 2023, to December 24, 2023. The final *IT Maturity* score increased from the aim of 3.5 in the INDI 4.0 gap filling plan in 2024 to 3.51 as a result of the assessment results. December 29, 2023, saw the submission of the final *IT Maturity Assessment* report to the Ministry of SOEs.



4

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION &
ANALYSIS



Tinjauan Ekonomi Makro

Macroeconomic Overview

Perekonomian global sepanjang tahun 2023 terjaga stabil, meskipun sejumlah tantangan menghampiri seperti konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan konflik kawasan Timur Tengah, volatilitas harga energi, nilai tukar mata uang, pengetatan keuangan sejumlah negara dan tekanan inflasi global yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut *International Monetary Fund*, pertumbuhan PDB global tahun 2023 hanya mencapai 3.1%. Tekanan inflasi global tersebut berpotensi memicu ancaman resesi ekonomi dan mengakibatkan perlemahan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 dengan pertumbuhan PDB global sebesar 2.6%.

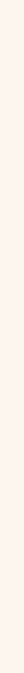
The global economy was stable throughout 2023, despite several challenges such as the Russia-Ukraine geopolitical conflict and the Middle East conflict, volatility in energy prices, currency exchange rates, financial tightening in several countries, and the highest global inflationary pressures compared to previous years. According to the International Monetary Fund, global GDP growth in 2023 will only reach 3.1%. These global inflationary pressures have the potential to trigger the threat of economic recession and result in weakening economic growth in 2024 with a global GDP growth of 2.6%.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%, sedikit melambat dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan sebesar 4,64%. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar dicapai oleh konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan sebesar 4,82%.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 didukung oleh pulihnya permintaan domestik pasca pandemi dan peningkatan aktivitas ekonomi pada hari besar keagamaan, liburan akhir tahun, serta aktivitas persiapan pemilu. Meskipun mengalami sedikit

Based on the Central Bureau of Statistics (Badan Pusat Statistik: BPS) report, national economic growth in 2023 grew by 5.05%, slightly slower than the achievement in 2022, which experienced growth of 5.31%. In terms of production, the highest growth occurred in the processing industry sector at 4.64%. Meanwhile, from the expenditure side, the largest contribution was achieved by household consumption, with a growth of 4.82%.

Economic growth in 2023 was supported by the recovery of domestic demand after the pandemic and increased economic activity on religious holidays, year-end holidays, and election preparation activities. Despite experiencing a slight



perlambatan, konsumsi rumah tangga tetap menunjukkan kinerja yang baik karena masih mampu menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih cukup terjaga di tengah tantangan ekonomi global dan inflasi yang tinggi.

Di tahun 2023, pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran kecuali komponen impor barang dan jasa yang berkontraksi sebesar 1,65%. Komponen pengeluaran yang tumbuh signifikan adalah komponen pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83%, diikuti komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) sebesar 4,82%, dan komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 4,40%, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 2,95%, komponen ekspor barang dan jasa sebesar 1,32%.

Mulai tanggal 21 Desember 2023, Bank Indonesia menggunakan nama BI-Rate sebagai suku bunga kebijakan menggantikan BI7DRR. Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 50bps menjadi 6,00%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 50 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 50 bps menjadi 6,75%.

Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah *front loaded, pre-emptive*, dan *forward looking* untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini masih tinggi dan memastikan inflasi inti ke depan kembali ke dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ lebih awal yaitu ke paruh pertama 2024. Keputusan ini juga memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya

slowdown, household consumption continues to perform well as it is still able to be the source of economic growth. It shows that people's purchasing power is still maintained amidst global economic challenges and high inflation.

In 2023, growth occurred in almost all expenditure components except the import of goods and services component, which contracted by 1.65%. The expenditure component that grew significantly was the consumption expenditure component of nonprofit institutions serving households (PK-LNPRT) by 9.83%, followed by the household consumption expenditure component (Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga: PK-RT) by 4.82%, and the gross fixed capital formation (PMTB) component by 4.40%, the Government Consumption Expenditure component by 2.95%, the export of goods and services component by 1.32%.

Starting December 21, 2023, Bank Indonesia used the name BI-Rate as the policy interest rate replacing BI7DRR. Bank Indonesia decided to raise BI-Rate by 50 bps to 6.00%, Deposit Facility rate by 50 bps to 5.25%, and Lending Facility rate by 50 bps to 6.75%.

The decision to raise interest rates is a front loaded, pre-emptive, and forward-looking move to lower inflation expectations, which are currently still high and ensure future core inflation returns to the target of $2.5 \pm 1\%$ earlier in the first half of 2024. This decision also strengthens the policy to stabilize Rupiah exchange rate to be in line with its fundamental value due to the strong US dollar and

akibat kuatnya mata uang dolar AS dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah peningkatan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat.

Kontribusi ekspor dari produk non-migas terhadap total ekspor nasional tahun 2023 mencapai 93,85% atau setara USD242,90 miliar. Sedangkan, kontribusi ekspor produk migas sebesar 6,15% dari total ekspor nasional atau setara USD15,92 miliar. Berdasarkan sektor, ekspor hasil tambang dan lainnya mencatatkan penurunan tertinggi sebesar 20,68%, diikuti turunnya ekspor nonmigas hasil industri pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 10,04%, dan ekspor industri pengolahan yang menurun sebesar 9,26% dibandingkan periode yang sama tahun 2022.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang 2023 sempat hampir menyentuh level psikologis Rp16.000/US\$ di bulan Oktober. Posisi terlemah rupiah tahun 2023 terjadi pada 27 Oktober 2023 di angka Rp15.935/USD yang juga merupakan posisi terparah sejak 3,5 tahun terakhir. Hal ini disebabkan inflasi di negara maju masih tetap tinggi karena berlanjutnya tekanan inflasi jasa, keketatan pasar tenaga kerja, dan meningkatnya harga minyak. Perkembangan tersebut mendorong tetap tingginya suku bunga kebijakan moneter di negara maju, terutama FFR Amerika Serikat, yang mengakibatkan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Akibatnya, tekanan aliran modal keluar dan pelemahan nilai tukar di negara berkembang semakin tinggi, sehingga memerlukan penguatan *respons* kebijakan termasuk di Indonesia.

Aliran modal asing ke pasar keuangan domestik dalam bentuk investasi portofolio pada kuartal-III 2023 mencatat *net outflow* sebesar USD2,1 miliar dipengaruhi oleh ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Rupiah pada penutupan tahun 2023 ditutup di angka Rp15.395/USD atau menguat 0,13% terhadap dolar AS. Sementara secara *year to date* (ytd) menguat sebesar 1,09%. Penguatan rupiah di akhir tahun 2023 ini juga sejalan dengan *respons* kebijakan Bank Indonesia (BI) menaikkan BI rate.

high uncertainty in global financial market, amidst strong domestic economic demand.

The export contribution of non-oil and gas products to total national exports in 2023 reached 93.85% or equivalent to USD242.90 billion. Meanwhile, the export contribution of oil and gas products amounted to 6.15% of total national exports or equivalent to USD15.92 billion. By sector, exports of mining and other products recorded the highest decline of 20.68%, followed by a decrease in non-oil and gas exports from the agriculture, forestry and fisheries industry by 10.04%, and exports of the processing industry which decreased by 9.26% compared to the same period in 2022.

The rupiah exchange rate against the US dollar throughout 2023 almost touched the psychological level of IDR16,000/USD in October. The weakest position of the rupiah in 2023 occurred on October 27, 2023, at IDR15,935/USD, which was also the worst position since the last 3.5 years. This is due to inflation in developed countries remaining high due to continued pressure on services inflation, labor market tightness, and rising oil prices. These developments led to the persistence of high monetary policy rates in developed countries, especially the US FFR, which resulted in increased uncertainty in global financial markets. As a result, the pressure of capital outflow and exchange rate depreciation in developing countries is getting higher, which requires strengthening policy responses, including in Indonesia.

The flow of foreign capital into the domestic financial market in the form of portfolio investment in the third quarter of 2023 recorded a net outflow of USD2.1 billion due to increased global financial market uncertainty. The rupiah at the close of 2023 closed at IDR15,395/USD or strengthened 0.13% against the US dollar. While on a year to date (ytd) basis it strengthened by 1.09%. The strengthening of the rupiah at the end of 2023 was also in line with the policy response of Bank Indonesia (BI) to raise the BI rate.

Tinjauan Industri

Industry Overview

Ekspor industri kehutanan Indonesia di tahun 2023 sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian ekspor tahun ini turun 9,30% secara *year on-year*. Kinerja ekspor industri kehutanan selaras dengan kinerja ekspor secara nasional yang juga mengalami penurunan 5,76% y-o-y. Pencapaian kinerja ekspor dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global seperti ketegangan Rusia-Ukraina serta kawasan Timur Tengah. Selain itu, beberapa negara pasar tujuan ekspor juga masih dalam pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19.

Indonesia's forestry industry exports in 2023 decreased slightly compared to the previous year. This year's export achievements fell 9.30% on a year-on-year basis. The export performance of the forestry industry was in line with the national export performance, which also experienced a 5.76% y-o-y decline. The achievement of export performance was affected by global geopolitical conditions such as Russia-Ukraine tensions and the Middle East region. In addition, several export destination market countries are also still in economic recovery after the COVID-19 Pandemic.

Jumlah ekspor hulu dan hilir industri kehutanan tahun ini mencapai USD13,16 miliar turun dari performa ekspor tahun lalu sebesar USD14,51 miliar. Kontributor terbesar dalam ekspor sektor kehutanan adalah industri kertas, yakni senilai USD4,32 miliar atau meningkat 0,07% secara tahunan. Capaian itu diikuti oleh industri bubur kayu (pulp) dan panel kayu dengan masing-masing nilai ekspor mencapai USD3,75 miliar dan USD2,21 miliar. Realisasi ekspor furnitur kayu berada di posisi selanjutnya dengan nilai USD1,49 miliar atau turun 24,59% secara tahunan.

Nilai transaksi ekspor untuk kayu dan barang dari kayu sampai dengan Desember tahun 2023 dibandingkan dengan Desember tahun 2022 mengalami penurunan 7,29%, hal ini berimbas

The total upstream and downstream exports of the forestry industry this year reached USD13.16 billion, down from last year's export performance of USD14.51 billion. The largest contributor to forestry sector exports is the paper industry, which is valued at USD4.32 billion or an increase of 0.07% on an annual basis. This achievement was followed by the pulp and wood panel industries with export values reaching USD3.75 billion and USD2.21 billion respectively. The realization of wood furniture exports was in the next position with a value of USD1.49 billion or decrease by 24.59% on an annual basis.

The value of export transactions for wood products until December 2023 compared to December 2022 decreased by 7.29%, this had an impact on the decline in demand for exports of wood products

pada penurunan permintaan ekspor produk kayu yang bersumber dari kayu log Perum Perhutani. Penyebabnya antara lain penurunan kinerja usaha dikarenakan lesunya permintaan pasar dunia juga terjadinya penurunan harga di tingkat internasional. Volume ekspor kayu olahan mengalami kenaikan pada tahun 2023, namun secara nilai mengalami penurunan. Implikasi kondisi tersebut terhadap bisnis Perhutani ditunjukkan dengan turunnya hasil penjualan produk Perhutani di tahun 2023 sebesar 0,74% dibandingkan pada tahun 2022.

Wilayah kerja Perum Perhutani meliputi sebagian besar kawasan hutan di Pulau Jawa dan Madura, mencakup hutan lindung dan hutan produksi. Luas kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani sebesar 2.440.043,2 ha. Berdasarkan fungsinya, terbagi menjadi Hutan Produksi seluas 1.424.724,8 ha (58,4%), Hutan Produksi Terbatas seluas 383.374,4 ha (15,7%) dan Hutan Lindung seluas 631.944,0 ha (25,9%).

Kayu Bulat

Produksi kayu bulat seluruh Indonesia sepanjang tahun 2023 mencapai 58,13 juta m³ terutama produksi kayu bulat yang berasal dari hutan tanaman. Sekitar 90% kayu yang diproduksi Perhutani dijual dalam bentuk kayu bulat. Pangsa pasar kayu bulat adalah 100% dalam negeri. Hal ini disebabkan diberlakukannya larangan ekspor kayu bulat.

Kegiatan produksi Perum Perhutani dibedakan berdasarkan jenis tebangannya, yaitu:

- Tebangan A: pemanenan kayu berdasarkan daur tegakan.
- Tebangan B: pemanenan kayu untuk rehabilitasi.
- Tebangan C: pemanenan kayu akibat perubahan kawasan hutan menjadi kawasan lain karena pinjam pakai atau tukar menukar.
- Tebangan D: pemanenan tak terduga, disebabkan karena bencana alam, kebakaran, hama penyakit, pinjam pakai kawasan dan lain-lain.
- Tebangan E: penjarangan atau pemanenan kayu untuk tindakan silvikultur guna mendapatkan tegakan yang baik pada akhir daur.

Perhutani membedakan kayu bulat menjadi dua yaitu Jati dan Rimba, dimana yang dinamakan kayu Rimba adalah kayu selain dari kayu Jati. Perhutani merupakan salah satu produsen kayu Jati terbesar di dunia dengan rata-rata produksi sebanyak 400 ribu m³ per tahun. Kayu bulat dijual dalam 3 ukuran yaitu:

sourced from Perum Perhutani logs. The causes include a decline in business performance due to sluggish world market demand as well as a decline in prices at the international level. The volume of processed wood exports increased in 2023, but the value decreased. The implication of these conditions on Perhutani's business is shown by the decrease in sales of Perhutani products in 2023 by 0.74% compared to 2022.

Perum Perhutani's working area covers most of the forest areas in Java and Madura Island, including protected forests and production forests. The total forest area managed by Perum Perhutani is 2,440,043.2 ha. Based on its function, it is divided into Production Forest covering 1,424,724.8 ha (58.4%), Limited Production Forest covering 383,374.4 ha (15.7%) and Protected Forest covering 631,944.0 ha (25.9%).

Log

Log production throughout Indonesia in 2023 reached 58.13 million m³, especially log production from plantation forests. About 90% of the wood produced by Perhutani is sold in the form of logs. The market share of logs is 100% domestic. This is due to the imposition of a log export ban.

Perum Perhutani's production activities are differentiated based on the type of logging, namely:

- Logging A: wood harvesting based on stand cycle.
- Logging B: wood harvesting for rehabilitation.
- Logging C: wood harvesting due to changes in forest area to other areas due to borrow and use or exchange.
- Logging D: unexpected harvesting, caused by natural disasters, fires, pests and diseases, borrowed use areas and others.
- Logging E: thinning or harvesting wood for silvicultural measures to obtain a good stand at the end of the cycle.

Perhutani distinguishes logs into two namely Teak and Non-Teak, where the so-called non-teak wood is wood other than Teak wood. Perhutani is one of the largest producers of Teak wood in the world with an average production of 400 thousand m³ per year. Logs are sold in 3 sizes, namely:



- A3 adalah kayu dengan diameter >30 cm.
- A2 adalah kayu dengan ukuran diameter >20 cm dan <30 cm.
- A1 adalah kayu dengan diameter <20 cm.

Perhutani mendominasi produksi kayu Jati A2 dan A3, karena sedikit sekali perorangan/swasta yang mampu memproduksi kayu Jati jenis ini. Hal ini dikarenakan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi kayu Jati A2 dan A3, bisa di atas 30 - 40 tahun, sehingga tidak menarik untuk dibudidayakan oleh perorangan/swasta. Oleh karenanya, untuk kayu-kayu ukuran ini, Perhutani berperan cukup besar dalam mengendalikan harga.

Persaingan cukup sengit ada di kayu sortimen A1. Dengan menjamurnya budidaya kayu rakyat 10 tahun terakhir, produksi kayu jati rakyat ukuran kecil terus meningkat. Apalagi dengan harga yang relatif lebih murah.

Pembeli kayu jati Perhutani umumnya perusahaan-perusahaan yang kemudian mengolahnya menjadi produk-produk jadi dan setengah jadi untuk diekspor. Oleh karena itu, pasar kayu jati Perhutani juga linier dengan kondisi perekonomian global. Di pasar global, Jati Perhutani bersaing dengan jati dari beberapa negara tetangga, seperti Myanmar, Thailand, Vietnam dan Malaysia.

Sementara untuk jenis kayu rimba, Perhutani rata-rata memproduksi sebanyak 400 ribu m³ dengan jenis: pinus, mahoni, agathis, sonokeling, puspa,

- A3 is wood with a diameter >30 cm.
- A2 is wood with diameter >20 cm and <30 cm.
- A1 is wood with a diameter of <20 cm.

Perhutani dominates the production of A2 and A3 Teak wood, because very few individuals/private companies are able to produce this type of Teak wood. It is because the time needed to produce A2 and A3 Teak wood, can be above 30 - 40 years, making it unattractive to be cultivated by individuals/privates. Therefore, for wood of this size, Perhutani plays a significant role in controlling prices.

Competition is quite fierce in A1 sortiment wood. With the proliferation of community wood cultivation in the last 10 years, the production of small-sized community teak has continued to increase. Moreover, the price is relatively cheaper.

Buyers of Perhutani teak wood are generally companies that then process it into finished and semi-finished products for export. Therefore, the Perhutani teak wood market is also linear with global economic conditions. In the global market, Perhutani teak competes with teak from several neighboring countries, such as Myanmar, Thailand, Vietnam and Malaysia.

As for the type of non-teak wood, Perhutani produces an average of 400 thousand m³ with types: pine, mahogany, agathis, rosewood,

rasamala, sono brit, sengon, jabon dan rimba campur. Kompetitor untuk jenis ini cukup banyak dan terus meningkat, yaitu dari hutan rakyat, perusahaan-perusahaan swasta dan beberapa PTPN di Jawa mulai juga terjun ke budidaya kayu, khususnya kayu-kayu jenis *fast growth species* seperti sengon dan jabon.

Secara total, produksi kayu tahun 2023 tercapai 916.108 m³ atau 98% dari RKAP tahun 2023. Pada RKAP tahun 2023 direncanakan produksi kayu sebanyak 931.737 m³ yang terdiri dari 519.005 m³ jenis Jati dan 412.732 m³ jenis Rimba. Ketidaktercapaian produksi kayu tahun 2023 karena adanya kebijakan pembatasan tebangan dengan mempertimbangkan daya serap pasar kayu yang rendah sebagai dampak lemahnya ekonomi global.

Sampai dengan akhir tahun 2023, Produksi kayu Jati terealisasi 462.955 m³ atau 89% dari target RKAP tahun 2023, turun 7% dari realisasi tahun 2022. Produksi kayu Jati tidak mencapai target dikarenakan tidak semua rencana tebangan dilaksanakan menyesuaikan permintaan pasar. Sementara realisasi produksi kayu Rimba sebesar 453.152 m³ atau 110% dari target RKAP tahun 2023, dan naik 7% dari realisasi tahun 2022.

Kayu Olahan

Total produksi kayu olahan seluruh Indonesia mencapai 45,20 juta m³. Kinerja positif di tengah kondisi pandemi ini tidak lepas dari intervensi kebijakan dan relaksasi yang didorong oleh Kementerian LHK dari hulu hingga hilir. Saat ini, Perhutani memiliki 4 (empat) pabrik Industri Kayu dengan kapasitas produksi sebagai berikut:

- Industri Kayu Brumbung yang berlokasi di Mranggen, Grobogan, Jawa Tengah. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi 22.100 m³ per tahun dengan produk-produk yang dihasilkan antara lain: kayu gergajian, FJL, *housing component*, *furniture* dan *finish flooring*.
- Industri Kayu Cepu yang berlokasi di Cepu, Jawa Tengah. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi 37.000m³ per tahun dengan produk-produk yang dihasilkan antara lain: *garden furniture*, *veneer* sayat, *lamella*, *RTS* dan *housing component*.
- Industri Kayu Gresik yang berlokasi di Gresik, Saradan dan Jatirogo Jawa Timur. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi 22.350m³ per tahun dengan produk-produk yang dihasilkan antara lain: *decking*, *flooring*, *lamela*, *garden furniture*, *parquet block* dan *veneer sayat*.

puspa, rasamala, sono brit, sengon, jabon and mixed jungle. Competitors for this type are quite numerous and continue to increase, namely from community forests, private companies and some PTPN in Java have also begun to engage in wood cultivation, especially fast growth species such as sengon and jabon.

In total, wood production in 2023 reached 916,108m³ or 98% of the 2023 RKAP. The 2023 RKAP planned wood production of 931,737 m³ consisting of 519,005m³ of Teak and 412,732 m³ of Jungle species. The non-achievement of wood production in 2023 was due to a policy of limiting logging by considering the low absorption of the wood market as a result of the weak global economy.

Until the end of 2023, Teak wood production was realized at 462,955 m³ or 89% of the 2023 RKAP target, down 7% from the 2022 realization. Teak wood production did not reach the target because not all felling plans were implemented to adjust market demand. While the realization of non-teak wood production was 453,152 m³ or 110% of the 2023 RKAP target, and increased 7% from the realization in 2022.

Processed Wood

Total processed wood production throughout Indonesia reached 45.20 million m³. This positive performance in the midst of pandemic conditions cannot be separated from the policy interventions and relaxation encouraged by the Ministry of Environment and Forestry from upstream to downstream. Currently, Perhutani has 4 (four) Wood Industry factories with the following production capacity:

- Brumbung Wood Industry located in Mranggen, Grobogan, Central Java. This factory has a production capacity of 22,100 m³ per year with products produced include: sawn wood, FJL, housing components, furniture and finish flooring.
- Cepu Wood Industry located in Cepu, Central Java. This factory has a production capacity of 37,000 m³ per year with products produced include: garden furniture, cut veneer, lamella, RTS and housing components.
- Gresik Wood Industry located in Gresik, Saradan and Jatirogo, East Java. This factory has a production capacity of 22,350 m³ per year with products produced include: decking, flooring, lamellas, garden furniture, parquet blocks and cut veneer.

- Perhutani Plywood Industry (PPI) di Kediri Jawa Timur yang dioperasikan pada tahun 2013. Pabrik ini mengolah sengon menjadi *plywood* dengan kapasitas produksi input 48.000m³ per tahun dan output 24.000m³ per tahun.

Perum Perhutani mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan, baik berupa kayu gergajian maupun *finished product*. Pengolahan tersebut dilakukan pada industri milik Perum Perhutani sendiri ataupun dengan melakukan kerja sama pengolahan dengan Pihak III. Produk-produk kayu olahan Perum Perhutani berupa kayu gergajian (RST) dan kayu olahan lanjutan, yaitu antara lain: *vineer sayat jati, lamela, garden furniture, indoor furniture, finished flooring, FJL, housing component, decking, parket block, lamparket, plywood* dan lainnya.

Pada tahun 2023, industri kayu Perhutani telah mengolah bahan baku Kayu Bulat sebanyak 40.519 m³ atau 80% dari target RKAP tahun 2023. Kayu Bulat Jati yang diolah sebanyak 11.507 m³ dan tercapai 66% dari target RKAP tahun 2023. Kayu Bulat Rimba yang diolah sebanyak 29.011 m³ atau tercapai 88% dari target RKAP 2023. Secara total, dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi pengolahan Kayu Bulat tahun 2023 menurun 2%. Dari kayu yang diolah sebesar tersebut dihasilkan kayu gergajian (RST) sebanyak 13.551 m³ atau 71% dari target RKAP tahun 2023.

Produk *finished* (FP) Perhutani terealisasi di atas target RKAP. Realisasi total FP tahun 2023 mencapai 10.457m³ atau 114% dari target RKAP tahun 2023. Realisasi tersebut lebih tinggi 25% dari pencapaian pada periode yang sama tahun 2022. Realisasi produk FP Jati tahun 2023 mencapai 457m³ atau 61% dari RKAP tahun 2023. Realisasi tersebut lebih tinggi 32% dari pencapaian pada periode yang sama tahun 2022. Sementara realisasi FP Rimba mencapai 10.000m³ atau 118% dari RKAP tahun 2023, lebih tinggi 25% dari pencapaian pada periode yang sama tahun 2022.

Produksi FP tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 karena meningkatnya permintaan meskipun pasokan BBI log jati yang masuk ke industri maupun mitra Kerjasama belum optimalnya. Untuk mengoptimalkan penjualan hasil produk strategi yang dilakukan di antaranya melalui kerjasama KSP dan meningkatkan jaringan pasar FP dalam negeri melalui penjualan *marketplace online* dan ikut serta dalam kegiatan pameran.

- Perhutani Plywood Industry (PPI) in Kediri, East Java, which was commissioned in 2013. This factory processes sengon into plywood with an input production capacity of 48,000 m³ per year and an output of 24,000 m³ per year.

Perum Perhutani processes logs into processed wood, both in the form of sawn wood and finished products. The processing is carried out in Perum Perhutani's own industry or by cooperating with third parties. Perum Perhutani's processed wood products are in the form of sawn wood (RST) and further processed wood, namely, among others: *teak cut vineer, lamellas, garden furniture, indoor furniture, finished flooring, FJL, housing components, decking, parquet block, lamparket, plywood* and others.

In 2023, Perhutani's wood industry has processed 40,519 m³ of Log raw materials or 80% of the 2023 RKAP target. Teak Log processed as much as 11,507m³ and achieved 66% of the 2023 RKAP target. The logs processed were 29,011 m³ or 88% of the 2023 RKAP target. In total, compared to 2022, the realization of Non-Teak Log processing in 2023 decreased by 2%. From the processed wood of this size, sawn wood (RST) was produced as much as 13,551 m³ or 71% of the 2023 RKAP target.

Perhutani's finished product (FP) was realized above the RKAP target. The total realization of FP in 2023 reached 10,457m³ or 114% of the 2023 RKAP target. The realization was 25% higher than the achievement in the same period in 2022. The realization of Teak FP products in 2023 reached 457m³ or 61% of the 2023 RKAP. The realization was 32% higher than the achievement in the same period in 2022. Meanwhile, the realization of FP Non-Teak reached 10,000m³ or 118% of the 2023 RKAP, 25% higher than the achievement in the same period in 2022.

FP production in 2023 increased compared to 2022 due to increased demand even though the supply of BBI teak logs entering the industry and Cooperation partners was not optimal. To optimize product sales, the strategy includes cooperation with KSP and increasing the domestic FP market network through online marketplace sales and participating in exhibition activities.

Industri Non Kayu

Produk-produk industri non kayu Perum Perhutani terdiri dari Gondorukem, Terpentin dan Derivat, Minyak Kayu Putih, Seedlak dan Kopal.

Gondorukem & Terpentin

Gondorukem dan terpentin merupakan produk olahan dari getah Pinus. Gondorukem banyak digunakan di bidang farmasi dan industri lain. Sedangkan minyak terpentin adalah pelarut yang kuat dan digunakan sebagai bahan baku pelarut cat, bahan baku parfum, desinfektan, dan campuran kimia lainnya. Kontribusi kedua produk ini terhadap total pendapatan Perhutani cukup besar, yakni mencapai sekitar 40%.

Perhutani memiliki delapan pabrik gondorukem dan terpentin (PGT) dengan total kapasitas produksi 141.150 ton yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Daftar PGT dan kapasitas produksinya dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

Daftar PGT dan Kapasitas Produksinya

List of PGTs and their Production Capacity

PGT		Kapasitas I (ton/tahun) Capacity I (ton/year)	Dibangun Tahun Built Year
Sapuran	Sapuran	17.100	1988
Cimanggu	Cimanggu	19.800	1989
Winduaji	Winduaji	17.550	1989
Sukun	Sukun	18.000	1976
Garahan	Garahan	18.000	1981
Rejo Winangun	Rejo Winangun	18.000	1994
Sindangwangi	Sindangwangi	16.200	1991
PPCI	PPCI	16.500	2016
Total	Total	141.150	-

Kopal

Kopal adalah hasil olahan getah (resin) yang disadap dari pohon damar. Kopal merupakan bahan dasar bagi cairan pelapis kertas supaya tinta tidak menyebar. Bahan ini juga dipakai sebagai campuran lak dan vernis.

Minyak Kayu Putih

Minyak kayu putih diperoleh dari proses ekstraksi atas daun pohon kayu putih. Produk ini banyak digunakan pada industri farmasi.

Lak

Lak adalah hasil sekresi kutu lak atau dalam bahasa latin disebut *Leccifer lacca* yang dibudidayakan di ranting pohon kesambi sebagai inang. Lak diolah menjadi bahan isolator alat-alat listrik, bahan

Non-Wood Industry

Perum Perhutani's non-wood industry products consist of Gum Rosin, Turpentine and Derivatives, Cajuput Oil, Seedlak and Copal.

Gum Rosin & Turpentine

Gum Rosin and turpentine are processed products from pine resin. Gum Rosin is widely used in pharmaceutical and other industries. While turpentine oil is a strong solvent and is used as a raw material for paint solvents, perfume raw materials, disinfectants, and other chemical mixtures. The contribution of these two products to Perhutani's total revenue is quite large, reaching around 40%.

Perhutani has eight gum rosin and turpentine (PGT) factories with a total production capacity of 141,150 tons spread across Central Java, East Java, and West Java. The list of PGTs and their production capacity can be seen in the following table:

Copal

Copal is a processed resin tapped from resin trees. Copal is the base material for paper coating liquid to prevent ink from spreading. It is also used as a lacquer and varnish mixture.

Cajuput Oil

Cajuput oil is obtained from the extraction process of cajuput tree leaves. This product is widely used in the pharmaceutical industry.

Shellac

Shellac is the secretion of shellac fleas or in Latin called *Leccifer lacca* which is cultivated on the branches of the porch tree as a host. Lak is processed into insulators for electrical appliances,

kosmetik, tinta dan pelitur.

Ekowisata

Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan karena baru di pertengahan tahun pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir dan masuk ke fase endemi. Pandemi juga telah memberikan dampak sangat signifikan sehingga setelah pandemi berakhir sektor pariwisata harus melakukan penyesuaian agar segera pulih. Berdasarkan data BPS (2023), terdapat peningkatan jumlah wisatawan yang signifikan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2023 sebesar 10,41 juta kunjungan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah wisatawan mancanegara meningkat sebesar 110,86 persen. Sedangkan pergerakan wisatawan nusantara mencapai 749,11 juta perjalanan atau hampir mencapai target yang sebesar 750 juta perjalanan.

Penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata meningkat signifikan pascapandemi. Penerimaan devisa dari pariwisata pada tahun 2023 mencapai USD14 miliar, mencapai 197,74% dari target yang hanya di kisaran angka USD7,08-9,99 miliar. Kontribusi *Product Domestic Bruto* (PDB) pariwisata pada tahun 2023 sebesar 3,9 persen. Kontribusi terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB) pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,5 persen pada tahun 2024. Proyeksi ini didasarkan pada kontribusi pariwisata terhadap PDB yang sudah mulai stabil. Pencapaian kinerja yang meningkat dua kali lipat ini juga memberikan dampak yang besar kepada masyarakat dengan keberadaan lapangan kerja sebesar 24,42 juta orang di sektor pariwisata, melampaui target sebesar 23 juta orang.

Pada tahun 2023, Perhutani mengelola total 685 lokasi wisata alam, yang terdiri dari berbagai jenis destinasi seperti air terjun, pegunungan, pendakian, sungai, telaga, waduk, air panas, bumi perkemahan, goa, kawah, hutan alam, pantai, taman rekreasi, situs sejarah, dan destinasi wisata minat khusus. Dari total 685 lokasi ini, 60 lokasi dikelola secara mandiri oleh Perhutani dan anak perusahaannya, Palawi, sedangkan 625 lokasi lainnya dikelola melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Lokasi-lokasi ini tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dengan menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan kepada masyarakat.

cosmetics, inks and varnishes.

Ecotourism

The year 2023 is a challenging year because only in the middle of the year the COVID-19 pandemic was declared over and entered the endemic phase. The pandemic has also had a very significant impact so that after the pandemic ends the tourism sector must make adjustments to recover immediately. Based on BPS data (2023), there has been a significant increase in the number of tourists, both local and foreign tourists. The total number of foreign tourist visits to Indonesia in 2023 amounted to 10.41 million visits. When compared to 2022, the number of foreign tourists increased by 110.86 percent. Meanwhile, the movement of domestic tourists reached 749.11 million trips or almost reached the target of 750 million trips.

Foreign exchange earnings from the tourism sector increased significantly after the pandemic. Foreign exchange earnings from tourism in 2023 reached USD14 billion, 197.74% of the target which was only in the range of USD7.08-9.99 billion. The contribution of tourism Gross Domestic Product (GDP) in 2023 amounted to 3.9 percent. The contribution to tourism Gross Domestic Product (GDP) is targeted to increase to 4.5 percent in 2024. This projection is based on the contribution of tourism to GDP which has begun to stabilize. The achievement of this doubled performance also has a major impact on society with the existence of employment of 24.42 million people in the tourism sector, exceeding the target of 23 million people.

In 2023, Perhutani managed a total of 685 natural tourist locations, consisting of various types of destinations such as waterfalls, mountains, hiking, rivers, lakes, reservoirs, hot springs, campgrounds, caves, craters, natural forests, beaches, recreational parks, historical sites, and special interest tourist destinations. Of the total 685 locations, 60 locations are managed independently by Perhutani and its subsidiary, Palawi, while the other 625 locations are managed through cooperation with third parties. These locations not only offer natural beauty, but also contribute significantly to the local economy by absorbing labor and providing income to the community.



Jumlah Pengunjung Wisata Alam Tahun 2023

Pada tahun 2023, total pengunjung objek wisata alam yang dikelola oleh Perhutani mencapai 17,3 juta orang, terdiri dari wisatawan domestik (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman). Wisatawan domestik mendominasi dengan 17,2 juta orang, sementara wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 97 ribu orang. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 7,9% dibandingkan tahun 2022 yang mencatat 18,9 juta pengunjung.

Number of Visitors to Natural Tourism in 2023

In 2023, the total number of visitors to natural tourism objects managed by Perhutani will reach 17.3 million people, consisting of domestic tourists (wisnus) and foreign tourists (wisman). Domestic tourists dominate with 17.2 million people, while foreign tourists are recorded at 97 thousand people. This number has decreased by 7.9% compared to 2022 which recorded 18.9 million visitors.

10 Lokasi Wisata Terbaik dengan Pengunjung dan Pendapatan Terbanyak

10 Best Tourist Locations with the Most Visitors and Revenue

Lokasi Wisata Tourist Locations	Pendapatan (Rp Miliar) Revenue (Rp Billion)	Pengunjung (ribu orang) Visitors (thousand people)
Wana Wisata Kawah Putih (Econique)	34.1	1022.0
Wana Wisata Grafika Cikole (Econique)	24.4	
Wana Wisata Coban Rondo (Econique)	22.4	385.0
Wana Wisata Orchid Forest (Econique)	20.9	
Wana Wisata Padusan (Econique)	15.8	818.0
Wana Wisata Ranca Upas (Econique)	15.7	650.0
Wana Wisata Kawah Sikidang (Econique)	12.9	638.0
Wana Wisata Baturraden (Econique)	12.8	
Wana Wisata Lawu Park (Econique)	12.1	
Wana Wisata Ranca Upas (Econique)	15.7	650.0

Dengan kondisi perubahan perilaku pascapandemi, tren wisata para turis akan lebih memperhatikan khususnya terkait kesehatan, keamanan dan kenyamanan. Kegiatan wisata berbasis alam atau *outdoor* diprediksikan akan paling cepat *rebound*. Ekowisata adalah salah satu favorit untuk wisatawan berwisata, karena ekowisata lebih banyak menyajikan petualangan ke alam bebas yang lebih sehat, sehingga wisatawan tidak perlu khawatir dalam sirkulasi udara tertutup.

Meskipun potensi pengembangan ekowisata di areal hutan produksi relatif besar, akan tetapi ekowisata merupakan usaha yang relatif baru dalam pengelolaan hutan produksi, infrastruktur bervariasi dan masih ada keterbatasan SDM, Meski demikian potensi wisatawan lokal sangat besar sehingga usaha ini tetap perlu didorong sebagai bagian dari upaya diversifikasi usaha dan optimalisasi pendapatan dari hutan produksi.

Agribisnis

Usaha agribisnis Perhutani saat ini adalah usaha produk madu yang terdiri madu murni dan derivat madu. Tingkat konsumsi madu negara-negara maju di dunia saat ini 1-1,6 kg per kapita per tahun, sedangkan di Indonesia masih cukup rendah yaitu baru 15-20 gr per kapita per tahun. Hal ini disebabkan persepsi konsumen terhadap madu yang dianggap sebagai kebutuhan sekunder yang dikonsumsi sebagai obat, harga madu asli relatif mahal, daya beli kurang dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang madu. Namun sejak kondisi pandemi melanda seluruh dunia, masyarakat berbondong-bondong mencari produk yang mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga permintaan madu di kalangan masyarakat meningkat.

Dengan meningkatnya jumlah konsumsi madu yang di asumsikan sebesar 60/gram/kapita, setidaknya Indonesia membutuhkan sekitar 16.000 ton madu setiap tahunnya. Dengan produksi madu di Indonesia saat ini adalah 4.000-5.000 ton per tahun, masih cukup rendah, dan belum mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (belum termasuk kebutuhan industri farmasi dan kosmetik sebesar 15.000 ton per tahun).

With post-pandemic behavioral changes, tourist trends will pay more attention, especially related to health, safety and comfort. Nature-based or outdoor tourism activities are predicted to rebound the fastest. Ecotourism is one of the favorites for tourists to travel, because ecotourism presents more adventures to the outdoors that are healthier, so tourists do not have to worry about closed air circulation.

Although the potential for ecotourism development in production forest areas is relatively large, ecotourism is a relatively new business in production forest management, infrastructure varies and there are still limited human resources, however the potential for local tourists is very large so this business still needs to be encouraged as part of efforts to diversify business and optimize revenue from production forests.

Agribusiness

Perhutani's current agribusiness is the honey product business consisting of pure honey and honey derivatives. The level of honey consumption in developed countries in the world is currently 1-1.6 kg per capita per year, while in Indonesia it is still quite low, which is only 15-20 gr per capita per year. This is due to consumers' perception of honey as a secondary need consumed as medicine, the relatively high price of real honey, lack of purchasing power and low public knowledge about honey. However, since the pandemic condition hit the whole world, people flocked to look for products that can boost the immune system so that the demand for honey among the public increased.

With the increase in honey consumption, which is assumed to be 60/gram/capita, Indonesia needs at least 16,000 tons of honey annually. With current honey production in Indonesia at 4,000-5,000 tons per year, it is still quite low, and unable to meet domestic needs (not including the needs of the pharmaceutical and cosmetics industry of 15,000 tons per year).



Kekurangan bahan baku untuk produksi madu domestik masih dicukupi dari impor. Melihat kondisi tersebut, industri madu di Indonesia memiliki pangsa pasar yang besar dan sangat prospektif. Perhutani sebagai salah satu produsen madu di Indonesia dengan merk dagang "Madu Perhutani" masih memiliki peluang untuk mengembangkan produk sekaligus memasok bahan baku madu nasional mengingat kawasan hutan potensial untuk budidaya lebah madu.

Agroforestry

Kegiatan *Agroforestry* Perum Perhutani hampir seluruhnya dikerjasamakan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dimana setiap LMDH memiliki anggota yang merupakan masyarakat sekitar hutan. Masyarakat penggarap tersebut biasa disebut pesanggem. Tanaman agro ditanam dalam kawasan hutan dengan dibuatnya Perjanjian Kerjasama antara LMDH dengan Administrasi selaku pimpinan di Kesatuan Pemangkuan Hutan.

Perhutani mengelola tanaman agro dengan menggunakan pola tanam *Agroforestry*, dimana tanaman agro/ pertanian ditanam bersamaan dengan tanaman kehutanan. Perhutani mendapatkan hasil dari kerjasama tersebut.

The shortage of raw materials for domestic honey production is still met by imports. Seeing these conditions, the honey industry in Indonesia has a large market share and is very prospective. Perhutani as one of the honey producers in Indonesia with the trademark "Perhutani Honey" still has the opportunity to develop products while supplying national honey raw materials given the potential forest area for honey bee cultivation.

Agroforestry

Perum Perhutani's *Agroforestry* activities are almost entirely cooperated with Forest Village Community Institutions (LMDH) where each LMDH has members who are forest communities. The tenant community is commonly called pesanggem. Agro plants are planted in the forest area with the establishment of a Cooperation Agreement between LMDH and Administrators as leaders in the Forest Management Unit.

Perhutani manages agro crops using the *Agroforestry* planting pattern, where agro/ agricultural crops are planted together with forestry plants. Perhutani gets the results of this collaboration. Perhutani gets profit sharing from

Perhutani mendapatkan bagi hasil dari kegiatan *Agroforestry* dengan besaran yang bervariasi sesuai dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani. Saat ini telah terdata lebih kurang 52 jenis komoditas tanaman pertanian yang diusahakan dengan sumber pendanaan dilakukan secara swadaya.

Agroforestry Tebu Mandiri (ATM) Perhutani direncanakan dalam RJPP tahun 2020 – 2024 adalah seluas 18.256 Ha dengan potensi tebu giling pada tahun 2025 sebesar 1,28 juta ton. Realisasi Plant Cane ATM 2023 dengan rincian pengembangan ATM seluas 1.124,06 Ha pada 17 KPH terdiri dari; 9 KPH di Divisi Regional Jawa Tengah dengan total luas tanam 71,88 Ha, 6 KPH di Divisi Regional Jawa Timur dengan tanaman seluas 947,34 Ha dan Divisi Regional Jawa Barat & Banten di KPH Indramayu seluas 104,84 Ha. Pada akhir 2023 total tanaman tebu Perhutani seluas 11.144,09 Ha dari total rencana pengembangan Tebu Kelola Mandiri, Kerjasama Operasional, Kerjasama Kemitraan dan Kerjasama dengan Inhutani V.

Agroforestry activities with varying amounts according to the signed cooperation agreement. Currently there are approximately 52 types of agricultural crop commodities that are cultivated with funding sources carried out independently.

Independent Sugarcane Agroforestry (ATM) Perhutani is planned in the 2020-2024 RJPP to cover an area of 18,256 Ha with a potential for milled sugarcane in 2025 of 1.28 million tons. Realization of Plant Cane ATM 2023 with details of ATM development covering an area of 1,124.06 Ha in 17 KPHs consisting of; 9 KPHs in the Central Java Regional Division with a total planting area of 71.88 Ha, 6 KPHs in the East Java Regional Division with plants covering an area of 947.34 Ha and the West Java & Banten Regional Division in the Indramayu KPH covering an area of 104.84 Ha. By the end of 2023, Perhutani's total sugarcane plants will cover an area of 11,144.09 Ha from the total development plan for Independent Sugarcane Management, Operational Cooperation, Partnership Cooperation and Cooperation with Inhutani V.

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Overview of Operations Per Business Segment

Pada tahun 2023, segmen Kayu Bulat dan Kayu Olahan memberikan kontribusi pendapatan sebesar 46,04% dari total pendapatan usaha atau menurun 3,25% dari tahun 2022. Segmen Non Kayu memberikan kontribusi 42,70% dari total pendapatan usaha atau menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 yang berkontribusi 41,53% dari total pendapatan. Sedangkan segmen Usaha Lainnya memberikan kontribusi sebesar 11,26% turun 1,06% dari tahun 2022 sebesar 12,32%. Ini berarti segmen Kayu Bulat dan Kayu Olahan masih menjadi tumpuan utama pendapatan Perhutani.

Produk non kayu yang menjadi unggulan Perhutani adalah gondorukem, terpentin, minyak kayu putih, dan berbagai produk hasil hutan non kayu lainnya. Produk gondorukem, terpentin dan minyak kayu putih mendominasi perolehan penjualan produk kelompok ini. Gondorukem dan terpentin dipasarkan sebagian besar (90%) untuk ekspor, sisanya (10%) untuk kebutuhan dalam negeri. Produk-produk lain seperti minyak kayu putih, lak, kopal, dan produk-produk *agroforestry* umumnya dijual di dalam negeri. Sementara untuk wisata dan jasa rehabilitasi, disesuaikan dengan karakteristik obyek masing-masing.

Secara garis besar, segmen usaha Perhutani dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Segmen Kayu (Kayu Bulat dan Kayu Olahan)
2. Segmen Non Kayu
3. Segmen Usaha Lainnya

In 2023, the Logs and Processed Wood segment contributed 46.04% of total business revenue, or decreased by 3.25% from 2022. The non-wood segment contributed 42.70% of total business revenue or showed an increase from 2022, which contributed 41.53% of total revenue. Meanwhile, the Other Business segment contributed 11.26%, down 1.06% from 2022, which was 12.32%. This means that the roundwood and processed wood segment is still the mainstay of Perhutani's income.

Perhutani's superior non-wood products are gum rosin, turpentine, Cajuput oil, and various other non-wood forest products. Gum Rosin, turpentine and Cajuput oil products dominate the sales of this group of products. Gum Rosin and turpentine are marketed mostly (90%) for export, the rest (10%) for domestic needs. Other products such as Cajuput oil, shellac, copal and agroforestry products are generally sold domestically. As for tourism and rehabilitation services, they are adjusted to the characteristics of each object.

In general, Perhutani's business segments can be divided into 3 (three), namely:

1. Wood Segment (Logs and Processed Wood)
2. Non-Wood Segment
3. Other Business Segment



Segmen Kayu (Kayu Bulat dan Olahan)

Wood Segment (Logs and Processed Wood)

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di tahun 2023, Divisi Komersial Hasil Hutan Kayu dan Biomassa Perhutani telah merumuskan beberapa strategi diantaranya:

1. Melakukan Analisis Pasar.
2. Menghubungi pembeli yang hilang dalam daftar pembeli.
3. *Customer Relationship Management*.
4. Survei harga kayu.
5. Survei kebutuhan kayu spesifik.
6. Survei kepuasan pelanggan.
7. Membangun jaringan dengan asosiasi industri perikanan (ASMINDO, APKINDO, HIMKI)
8. Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pemasaran kayu melalui website tokoperhutani.co.id

To overcome the various challenges that exist in 2023, Perhutani Commercial Division of Wood Forest Products and Biomass has formulated several strategies including:

1. Conduct Market Analysis.
2. Contacting buyers who are missing in the buyer list.
3. Customer Relationship Management.
4. Wood price survey.
5. Specific wood requirement survey.
6. Customer satisfaction survey.
7. Building networks with wood industry associations (ASMINDO, APKINDO, HIMKI)
8. Optimizing the use of technology in wood marketing through the website tokoperhutani.co.id

Produksi Kayu Bulat

Data Produksi Kayu

Wood Production Data

Tahun Year	Nilai Produksi Kayu Wood Production Value
2023	916.108
2022	925.767
2021	986.183
2020	846.505
2019	796.331

Log Production

Berdasarkan data produksi kayu Perhutani selama lima tahun terakhir, terlihat adanya fluktuasi dalam volume produksi. Setelah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 sebesar 796.331 meter kubik ke puncak produksi di tahun 2021 sebesar 986.183 meter kubik, terjadi penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, produksi kayu turun menjadi 925.767 meter kubik, dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 916.108 meter kubik.

Penurunan produksi kayu pada tahun 2022 dan 2023 ini dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan tebangan yang diterapkan untuk menyesuaikan dengan daya serap pasar yang rendah. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap melemahnya kondisi ekonomi global yang mengurangi permintaan kayu di pasar internasional. Kebijakan ini mencerminkan upaya Perhutani untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya hutan dan kondisi ekonomi yang dinamis, serta untuk meminimalisir dampak lingkungan dari kegiatan penebangan hutan.

Secara total, produksi kayu tahun 2023 tercapai 916.108 m³ atau 98% dari RKAP tahun 2023. Pada Revisi RKAP tahun 2023 direncanakan produksi kayu sebanyak 931.737 m³ terdiri dari 462.955 m³ jenis Jati dan 453.153 m³ jenis Rimba. Kinerja produksi pada tahun 2023 dibawah target RKAP karena kondisi cuaca di mana berdasarkan data BMKG, pada tahun 2023 mengalami kemarau basah dengan intensitas curah hujan masih di atas 150mm sejak bulan Mei..

Sampai dengan akhir tahun 2023, produksi kayu Jati hanya terealisasi 462.955 m³ atau 89% dari target RKAP tahun 2023 dan turun 7,50% dari realisasi tahun 2022 sebesar 500.476 m³. Produksi kayu Jati tidak mencapai target dikarenakan tidak semua rencana tebangan dilaksanakan menyesuaikan permintaan pasar. Sementara terealisasi produksi kayu Rimba sebesar 453.153 m³ atau 110% dari target RKAP tahun 2023 dan meningkat 6,55% dari realisasi tahun 2022 sebesar 425.291 m³.

Penjualan Kayu Bulat

Perhutani berhasil merealisasikan penjualan kayu bulat sebanyak 846.359 m³ atau 92,21% dari target RKAP tahun 2023. Dibandingkan realisasi penjualan periode yang sama tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 1,55%. Untuk jenis jati, realisasi volume penjualan sampai dengan tahun 2023 tercapai 80,34% dari target RKAP tahun 2023 dan menurun sekitar 8,39% bila dibandingkan dengan

Based on Perhutani's wood production data for the past five years, there has been a fluctuation in production volume. After experiencing a significant increase from 2019 of 796,331 cubic meters to peak production in 2021 of 986,183 cubic meters, there was a decline in the following years. In 2022, wood production fell to 925,767 cubic meters, and fell again in 2023 to 916,108 cubic meters.

The decline in wood production in 2022 and 2023 was influenced by the logging restriction policy implemented to adjust to low market absorption. This step was taken in response to the weakening global economic conditions which reduced demand for wood in the international market. This policy reflects Perhutani's efforts to maintain a balance between the sustainability of forest resources and dynamic economic conditions, as well as to minimize the environmental impact of logging activities.

In total, wood production in 2023 reached 916,108 m³, or 98% of the 2023 RKAP. In the Revised RKAP in 2023, it was planned to produce 931,737 m³ of wood consisting of 462,955 m³ of Teak and 453,153 m³ of Non-Teak. Production performance in 2023 was below the RKAP target due to weather conditions where based on BMKG data, in 2023 experienced a wet drought with rainfall intensity still above 150 mm since May.

Until the end of 2023, Teak wood production was realized at 462,955 m³ or 89% of the 2023 RKAP target, down 7.50% from the 2022 realization of 500,476 m³. Teak wood production did not reach the target because not all felling plans were implemented to adjust market demand. While the realization of non-teak wood production was 453,153 m³ or 110% of the 2023 RKAP target, and increased 6,55% from realization in 2022 amounted to 425,291 m³.

Log Sales

Perhutani managed to realize log sales of 846,359 m³ or 92.21% of the 2023 RKAP target. Compared to the realization of sales for the same period in 2022, there was a decrease of 1.55%. For teak, the realization of sales volume up to 2023 reached 80.34% of the 2023 RKAP target and decreased by around 8.39% when compared to 2022. As for the type of non-teak wood, the realization of sales

tahun 2022. Sedangkan untuk jenis rimba realisasi volume penjualan mencapai 108,96% dari target RKAP tahun 2023 dan meningkat sebesar 6,74% jika dibandingkan dengan penjualan tahun 2022.

Penurunan volume penjualan kayu bulat tahun 2023 disebabkan adanya inflasi karena adanya perang di kawasan Timur Tengah yang masih berlangsung mengakibatkan permintaan kayu mengalami penurunan dan adanya pesaing (Hutan Rakyat) dan perubahan dinamika pasar yang cepat.

volume reached 108.96% of the 2023 RKAP target and increased by 6.74% when compared to sales in 2022.

The decline in log sales volume in 2023 was due to inflation due to the ongoing war in the Middle East region resulting in decreased demand for wood and the presence of competitors (Community Forests) and rapid changes in market dynamics.

Peningkatan Volume Penjualan Kayu Bulat (m³)

Log Sales Volume Increase (m³)

Jenis Kayu Bulat Log Type		RKAP 2023 RKAP 2023	REAL 2023 REAL 2023	REAL 2022 REAL 2022	Pencapaian Achievement RKAP	Δ 2022-2023
Kayu Jati	Teak Wood	537.105	431.517	471.027	80,34%	(8,39%)
Kayu Rimba	Non-Teak Wood	380.730	414.842	388.663	108,96%	6,74%
Jumlah	Total	917.835	846.359	859.689	92,21%	(1,55%)
Kayu Bakar	Firewood	-	17.934	13.687	N/A	31,03%

Realisasi pendapatan kayu bulat secara total mencapai 93,72% dari target RKAP tahun 2023 atau menurun 3,98% dari realisasi tahun 2022. Pendapatan kayu jati terealisasi 89,04% dari target RKAP tahun 2023 atau turun sebesar 6,71% bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada periode yang sama di tahun 2022. Sementara untuk kayu rimba tercapai 114,72% dari target RKAP tahun 2023 dan meningkat sebesar 7,01% dari periode yang sama di tahun 2022. Penurunan pendapatan ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah adanya inflasi global akibat adanya ketegangan geopolitik di berbagai wilayah yang berdampak juga terhadap ekspor dan permintaan pasar produk olahan kayu khususnya jenis Sonokeling, Mahoni dan Akasia. Selain itu, kondisi cuaca yang memasuki masa penghujan sehingga permintaan pasar hanya dapat dipenuhi dari kayu sisa persediaan yang ada.

The realization of log revenue in total reached 93.72% of the 2023 RKAP target or decreased by 3.98% from the realization in 2022. Teak wood revenue was realized 89.04% of the 2023 RKAP target or decreased by 6.71% when compared to the realization of revenue in the same period in 2022. While for non-teak wood was achieved 114.72% of the 2023 RKAP target and increased by 7.01% from the same period in 2022. The decline in revenue was due to several factors including global inflation due to geopolitical tensions in various regions, which also had an impact on exports and market demand for processed wood products, especially Rosewood, Mahogany, and Acacia. In addition, weather conditions that entered the rainy period so that market demand can only be met from the remaining wood inventory.

Pendapatan Kayu Bulat (Rp juta)

Log Revenue (IDR million)

Jenis Kayu Bulat Log Type		RKAP 2023 RKAP 2023	REAL 2023 REAL 2023	REAL 2022 REAL 2022	Pencapaian Achievement RKAP	Δ 2022-2023
Kayu Jati	Teak Wood	1.492.884	1.329.328	1.424.969	89,04%	(6,71%)
Kayu Rimba	Non-Teak Wood	317.835	364.606	340.727	114,72%	7,01%
Kayu Bakar	Firewood	-	3.071	1.709	N/A	79,70%
Jumlah	Total	1.810.719	1.697.005	1.767.405	93,72%	(3,98%)

Harga Rata-rata Kayu Bulat

Realisasi harga jual rata-rata kayu jati dan rimba mengalami penurunan 2,54% dari realisasi tahun sebelumnya. Harga rata-rata penjualan kayu bundar jati dan rimba terealisasi sebesar Rp2.001.426, tercapai 101,45% dari RKAP tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan volume penjualan.

Harga Rata-rata Kayu Bulat (Rp/m³)

Average price of logs (IDR/m³)

Jenis Kayu Bulat Log Type		RKAP 2023 RKAP 2023	REAL 2023 REAL 2023	REAL 2022 REAL 2022	Pencapaian Achievement RKAP	Δ 2022-2023
Kayu Jati	Teak Wood	2.779.500	3.080.590	3.025.240	110,83%	1,83%
Kayu Rimba	Non-Teak Wood	834.805	878.904	875.969	105,28%	0,34%
Jumlah	Total	1.972.815	2.001.426	2.053.562	101,45%	(2,54%)

Profitabilitas Kayu Bulat

Dari segmen kayu bulat ini, pada tahun 2023, menghasilkan pendapatan total sebesar Rp1,69 triliun atau 93,72% dari RKAP 2023 sebesar Rp1,81 triliun dan menurun 3,98% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,77 triliun. Realisasi Biaya Pokok Penjualan sebesar Rp958,76 miliar atau 72,21% dari RKAP 2023 sebesar Rp1,33 triliun, menurun 26,29% dari tahun sebelumnya Rp1,30 triliun.

Tingkat *Gross Profit Margin* (GPM) tahun 2023 untuk segmen kayu bulat berada di angka 43,50% atau masuk dalam kategori profitabilitas tinggi, lebih tinggi dari pencapaian GPM tahun 2022 sebesar 26,41%.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Perhutani telah mengalami peningkatan kinerja dalam segmen kayu, baik dalam segi efektivitas maupun efisiensi.

Profitabilitas Kayu Bulat (Rp juta)

Profitability of Logs (IDR million)

Jenis Kayu Bulat Log Type		RKAP 2023 RKAP 2023	REAL 2023 REAL 2023	REAL 2022 REAL 2022	Pencapaian Achievement RKAP	Δ 2022-2023
Pendapatan	Revenue	1.810.719	1.697.005	1.767.405	93,72%	(3,98%)
HPP	Cost of Goods Sold (COGS)	1.327.745	958.763	1.300.645	72,21%	(26,29%)
Margin	Margin	482.974	738.242	466.760	152,85%	58,16%
GPM	GPM	26,67%	43,54%	26,41%	163,10%	64,72%

Average Selling Price of Logs

The average selling price realization of teak and non-teak wood decreased by 2.54% from the previous year's realization. The average selling price of teak and jungle roundwood was realized at IDR2,001,426, reaching 101.45% of the 2023 RKAP. This was due to a decrease in sales volume.

Profitability of Logs

The log segment, in 2023, generated total revenue of IDR1.69 trillion or 93.72% of the 2023 RKAP of IDR1.81 trillion and decreased 3.98% from the previous year of IDR1.77 trillion. Realization of Cost of Goods Sold amounted to IDR958.76 billion or 72.21% of the 2023 RKAP of IDR1.33 trillion, a decrease of 26.29% from the previous year of IDR1.30 trillion.

The *Gross Profit Margin* (GPM) level in 2023 for the log segment was at 43.50% or in the high profitability category, higher than the 2022 GPM achievement of 26.41%.

These figures show that Perhutani has improved performance in the wood segment, both in terms of effectiveness and efficiency.

Produksi Kayu Olahan

Guna meningkatkan nilai tambah dari produk kayu, Perhutani melakukan pengolahan lanjutan terhadap sebagian kayu gergajian (RST) yang dihasilkan. Produk-produk yang kayu lanjutan yang diproduksi antara lain: *vinir sayat jati, lamela, garden furniture, indoor furniture, finished flooring, FJL, housing component, decking, parket block, lamparket, plywood* dan lainnya.

Pada tahun 2023, Perhutani telah mengolah bahan baku Kayu Bulat sebanyak 40.519 m³ atau 80% dari target RKAP tahun 2023. Kayu Bulat Jati yang diolah sebanyak 11.507 m³ dan tercapai 66% dari target RKAP tahun 2023. Kayu Bulat Rimba yang diolah sebanyak 29.011 m³ atau tercapai 88% dari target RKAP 2023. Secara total, dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi pengolahan Kayu Bulat tahun 2023 menurun 2%.

Dari kayu yang diolah sebesar tersebut dihasilkan kayu gergajian (RST) sebanyak 13.551 m³ atau 71% dari target RKAP tahun 2023.

Untuk kayu gergajian Jati terealisasi sebanyak 2.796 m³ atau 50,62% dari RKAP tahun 2023 dan untuk kayu Rimba terealisasi 10.755 m³ atau 79,24% dari RKAP tahun 2023. Realisasi produksi RST di tahun 2023 ini lebih rendah 12,62% dari tahun 2022. Penurunan produksi RST tahun 2023 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 karena turunnya permintaan pasar terhadap produk RST tersebut.

Realisasi produk FP Jati tahun 2023 mencapai 457m³ atau 61,10% dari RKAP tahun 2023. Realisasi tersebut lebih tinggi 32,08% dari pencapaian pada periode yang sama tahun 2022. Realisasi FP Rimba mencapai 10.000m³ atau 118,34% dari RKAP tahun 2023, meningkat 24,64% dari pencapaian pada periode yang sama tahun 2022. Meningkatnya produksi FP dikarenakan permintaan atas produk tersebut sudah mulai membaik. Untuk mengoptimalkan penjualan hasil produk Perusahaan melakukan strategi pemasaran yaitu dengan kerjasama KSP dan penjualan *marketplace online* serta berpartisipasi dalam kegiatan pameran.

Processed Wood Production

To increase the added value of wood products, Perhutani conducts advanced processing of some of the Raw Sawn Timber (RST) produced. Advanced wood products produced include: teak veneer, lamellas, garden furniture, indoor furniture, finished flooring, FJL, housing components, decking, parquet block, lamparket, plywood, and others.

In 2023, Perhutani has processed 40,519 m³ of log raw materials or 80% of the 2023 RKAP target. Teak log processed as much as 11,507 m³ and achieved 66% of the 2023 RKAP target. The logs processed were 29,011 m³ or 88% of the 2023 RKAP target. In total, compared to 2022, the realization of log processing in 2023 decreased by 2%.

Of the wood processed at this amount, sawn wood (RST) was produced as much as 13,551 m³ or 71% of the 2023 RKAP target.

For Teak sawn wood realized as much as 2,796 m³ or 50.62% of the 2023 RKAP and for non-teak wood realized 10,755 m³ or 79.24% of the 2023 RKAP. The realization of RST production in 2023 was 12.62% lower than in 2022. The decrease in RST production in 2023 when compared to the realization in 2022 was due to a decrease in market demand for RST products.

The realization of FP teak products in 2023 reached 457m³ or 61.10% of the 2023 RKAP. The realization was 32.08% higher than the achievement in the same period in 2022. The realization of FP non-teak reached 10,000m³ or 118.34% of the 2023 RKAP, an increase of 24.64% from the achievement in the same period in 2022. The increase in FP production is due to the demand for these products has begun to improve. To optimize the sales of products, the Company carries out marketing strategies, namely by cooperating with KSP and online marketplace sales and participating in exhibition activities.

Volume Produksi Kayu Olahan (m³)

Processed Wood Production Volume (m³)

Jenis Kayu Olahan Type of Processed Wood		RKAP 2023 RKAP 2023	REAL 2023 REAL 2023	REAL 2022 REAL 2022	Pencapaian Achievement RKAP	Δ 2022-2023
RST Jati	RST Teak Wood	5.372	1.993	2.938	50,62%	(4,83%)
RST Rimba	RST Non-Teak Wood	4.172	2.165	12.570	79,24%	(14,44%)
Total RST	Total RST	9.543	4.159	15.508	70,96%	(12,62%)
Finished Product Jati	Teak Finished Product	748	482	346	61,10%	32,08%
Finished Product Rimba	Non-Teak Finished Product	8.450	10.913	8.023	118,34%	24,64%
Total Finished Product	Total Finished Product	9.198	11.395	8.369	113,69%	24,95%

Penjualan Kayu Olahan**Penjualan Dalam Negeri**

Penjualan kayu gergajian (RST) sebesar 4.159m³ atau tercapai 52% dari target RKAP 2023. Volume penjualan RST Jati tercapai 1.993m³, 37,10% dari target RKAP tahun 2023 dan RST Rimba 2.165m³, 51,89% dari target RKAP tahun 2023.

Volume penjualan dalam negeri untuk *Finished Product* (FP) tercapai 5.637m³, meningkat 17,31% dari tahun 2022. FP jati tercapai 76m³, turun 50,33% dari tahun 2022, sedangkan volume FP rimba tercapai 5.560m³, meningkat 41,15% dari tahun 2022. Volume penjualan log jati 89m³, turun 66,03% dari realisasi tahun 2022. Turunnya penjualan produk RST dan FP Jati terjadi karena kurangnya order yang didapat. Secara total, penjualan dalam negeri untuk produk kayu olahan adalah sebagai berikut:

Volume Penjualan Dalam Negeri Kayu Olahan (m³)

Domestic Sales Volume of Processed Wood (m³)

Jenis Kayu Olahan Type of Processed Wood		RKAP 2023 RKAP 2023	REAL 2023 REAL 2023	REAL 2022 REAL 2022	Pencapaian Achievement RKAP	Δ 2022-2023
RST Jati	RST Teak Wood	5.372	1.993	2.674	37,10%	(25,47%)
RST Rimba	RST Non-Teak Wood	4.172	2.165	3.325	51,89%	(34,89%)
Finished Product Jati	Teak Finished Product	-	76	153	N/A	(50,33%)
Finished Product Rimba	Non-Teak Finished Product	4.805	5.560	3.939	115,71%	41,15%
Log Jati	Teak Log	-	89	262	N/A	(66,03%)
Total	Total	14.349	9.885	10.353	68,89%	(4,52%)

Penjualan Luar Negeri

Realisasi volume penjualan *finished product* luar negeri tercapai 5.759m³ atau 131,09% dari target RKAP tahun 2023. Volume penjualan *Finished Products* Jati tercapai 406m³ atau 54,28% dari

Processed Wood Sales Domestic Sales**Domestic Sales**

Sales of sawn wood (RST) amounted to 4,159m³ or achieved 52% of the 2023 RKAP target. Sales volume of Teak RST reached 1,993m³, 37.10% of the 2023 RKAP target and non-teak RST 2,165m³, 51.89% of the 2023 RKAP target.

Domestic sales volume for Finished Product (FP) reached 5,637m³, an increase of 17.31% from 2022. Teak FP reached 76m³, a decrease of 50.33% from 2022, while non-teak FP volume reached 5,560m³, an increase of 41.15% from 2022. Teak log sales volume was 89m³, decrease by 66.03% from 2022 realization. The decline in sales of RST and FP Teak products occurred due to the lack of orders obtained. In total, domestic sales of processed wood products are as follows

Overseas Sales

The realization of overseas finished product sales volume reached 5,759m³ or 131.09% of the 2023 RKAP target. The sales volume of Teak Finished Products was achieved 406m³ or 54.28% of the

target RKAP tahun 2023 dan *Finished Products* Rimba tercapai 5.353m³ atau 146,86% dari target RKAP tahun 2023. Secara total, penjualan ekspor untuk kayu olahan adalah sebagai berikut:

2023 RKAP target and Non-Teak Finished Products was achieved 5,353m³ or 146.86% of the 2023 RKAP target. In total, export sales for processed wood are as follows:

Penjualan Luar Negeri Kayu Olahan (m³)

Overseas Sales of Processed Wood (m³)

Jenis Kayu Olahan Processed Wood		RKAP 2023 RKAP 2023	REAL 2023 REAL 2023	REAL 2022 REAL 2022	Pencapaian Achievement RKAP	Δ 2022-2023
Finished Product Jati	Teak Finished Product	748	406	342	54,28%	18,71%
Finished Product Rimba	Non-Teak Finished Product	3.645	5.353	1.088	146,86%	392,00%
Total	Total	4.393	5.759	1.430	131,09%	302,73%

Pendapatan yang diperoleh dari penjualan kayu olahan dalam negeri tercapai Rp58,97 miliar atau 84,42% dari target RKAP 2023. Realisasi ini sedikit dibawah tahun 2022 yang mencapai Rp60,04 miliar. Faktor penyebabnya adalah bahan baku yang kurang terpenuhi sesuai tata waktu sehingga mempengaruhi kepastian suplai dan situasi pasar dalam negeri yang masih kurang memungkinkan untuk menyerap produk dalam jumlah besar.

Revenue obtained from domestic processed wood sales reached IDR58.97 billion, or 84.42% of the 2023 RKAP target. This realization is slightly below 2022, which reached IDR60.04 billion. The causal factors are raw materials that are not met according to the timetable, which affects the certainty of supply, and the domestic market situation, which is still less likely to absorb products in large quantities.

Pendapatan dari hasil penjualan RST sebesar Rp41,43 miliar atau 75,52% dari target RKAP tahun 2023 dengan rincian RST Jati Rp36,95 miliar atau 78,45% dari target RKAP tahun 2023 dan RST Rimba Rp4,47 miliar atau 57,70% dari target RKAP tahun 2023. Penjualan Finished Product (FP) tercapai Rp17,21 miliar dengan rincian FP jati Rp1,06 miliar dan FP rimba Rp16,15 miliar. Sedangkan penjualan log jati tercapai sebesar Rp335 juta, namun tidak direncanakan dalam RKAP tahun 2023.

Revenue from RST sales amounted to IDR41.43 billion, or 75.52% of the 2023 RKAP target, with details of RST Jati at IDR36.95 billion, or 78.45% of the 2023 RKAP target, and RST Rimba at IDR4.47 billion, or 57.70% of the 2023 RKAP target. Sales of finished products (FP) reached IDR 17.21 billion, with details of FP teak at IDR 1.06 billion and FP rimba at IDR 16.15 billion. Meanwhile, teak log sales reached IDR 335 million but were not planned for the 2023 RKAP.

Pendapatan Dalam Negeri Kayu Olahan (Rp Juta)

Processed Wood Overseas Revenue (IDR million)

Jenis Kayu Olahan Type of Processed Wood		RKAP 2023 RKAP 2023	REAL 2023 REAL 2023	REAL 2022 REAL 2022	Pencapaian Achievement RKAP	Δ 2022-2023
RST Jati	RST Teak Wood	47.103	36.954	39.466	78,45%	(6,36%)
RST Rimba	RST Non-Teak Wood	7.749	4.471	5.230	57,70%	(14,51%)
Finished Product Jati	Finished Product Teak	-	1.064	1.308	N/A	(18,65%)
Finished Product Rimba	Finished Product Non-Teak	15.004	16.145	12.316	107,60%	31,09%
Log Jati	Teak Log	-	335	1.717	N/A	(80,49%)
Total	Total	69.856	58.969	60.038	84,42%	(1,78%)

Hasil penjualan industri kayu dalam negeri belum melampaui target RKAP tahun 2023. Hal ini dikarenakan minimnya order RST Jati dan Rimba dalam negeri. Kontribusi pendapatan dalam negeri didominasi oleh penjualan kayu gergajian (RST).

The sales results of the domestic wood industry have not exceeded the RKAP target in 2023. It is due to the lack of domestic RST Teak and Non-Teak orders. The contribution of domestic revenue is dominated by the sale of Raw Sawm Timber (RST).

Pendapatan dari pasar ekspor tahun 2023 hanya tercapai Rp31,53 miliar atau 64,98% dari target RKAP tahun 2023. *Finished Products* Jati tercapai Rp19,35 miliar atau 52,29% dari target RKAP tahun 2023, sedangkan *Finished Products* Rimba tercapai Rp12,18 miliar atau 105,71% dari target RKAP tahun 2023.

Revenue from the export market in 2023 only reached IDR31.53 billion or 64.98% of the 2023 RKAP target. *Finished Products* Teak achieved IDR19.35 billion or 52.29% of the 2023 RKAP target, while *Finished Products* Non-Teak achieved IDR12.18 billion or 105.71% of the 2023 RKAP target.

Pendapatan Luar Negeri Kayu Olahan (Rp Juta) Processed Wood Overseas Revenue (IDR million)

Jenis Kayu Olahan Type of Processed Wood		RKAP 2023 RKAP 2023	REAL 2023 REAL 2023	REAL 2022 REAL 2022	Pencapaian Achievement RKAP	Δ 2022-2023
Finished Product Jati	Teak Finished Product	36.996	19.347	16.836	52,29%	14,91%
Finished Product Rimba	Non-Teak Finished Product	11.524	12.182	3.355	105,71%	263,10%
Total	Total	48.520	31.529	20.191	64,98%	56,15%

Penjualan luar negeri secara total di bawah target RKAP tahun 2023. Ketidaktercapaian ini dikarenakan penjualan produk hasil kerjasama (KSP) jenis jati juga belum optimal.

Total overseas sales were below the 2023 RKAP target. This was due to the fact that sales of teak cooperative products (KSP) were also not optimal.

Profitabilitas Kayu Olahan

Dari segmen Kayu Olahan pada tahun 2023, menghasilkan pendapatan total sebesar Rp90,50 miliar atau 60,86% dari RKAP 2023 dan meningkat 12,80% dari tahun 2022. Realisasi Biaya Pokok Penjualan sebesar Rp53,16 miliar atau 70,23% dari RKAP 2023, menurun 10,77% dari tahun 2022.

Tingkat *Gross Profit Margin* (GPM) tahun 2023 untuk segmen industri kayu berada di angka 41,26% atau masuk dalam kategori profitabilitas tinggi, namun lebih rendah dari pencapaian GPM tahun 2022 sebesar 25,74%.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Perhutani telah mengalami penurunan kinerja pada segmen industri kayu, terutama dalam segi efisiensi dalam usaha industri kayu.

Processed Wood Profitability

From the Processed Wood segment in 2023, it generated total revenue of IDR90.50 billion or 76.45% of the 2023 RKAP and an increase of 12.80% from 2022. Realized Cost of Goods Sold amounted to IDR53.16 billion or 70.23% of the 2023 RKAP, a decrease of 10.77% from 2022.

The *Gross Profit Margin* (GPM) level in 2023 for the wood industry segment was at 41.26% or in the high profitability category, and higher than the 2022 GPM achievement of 25.74%.

These figures show that Perhutani has experienced a decline in performance in the wood industry segment, especially in terms of efficiency in the wood industry business.

Profitabilitas Kayu Olahan (Rp Juta) Processed Wood Profitability (IDR million)

Element Element		RKAP 2023 RKAP 2023	REAL 2023 REAL 2023	REAL 2022 REAL 2022	Pencapaian Achievement RKAP	Δ 2022-2023
Pendapatan	Revenue	118.376	90.498	80.229	76,45%	12,80%
HPP	Cost of Goods Sold (COGS)	75.697	53.160	59.577	70,23%	(10,77%)
Margin	Margin	42.679	37.338	20.653	87,49%	80,79%
GPM	GPM	36,05%	41,26%	25,74%	114,44%	60,29%



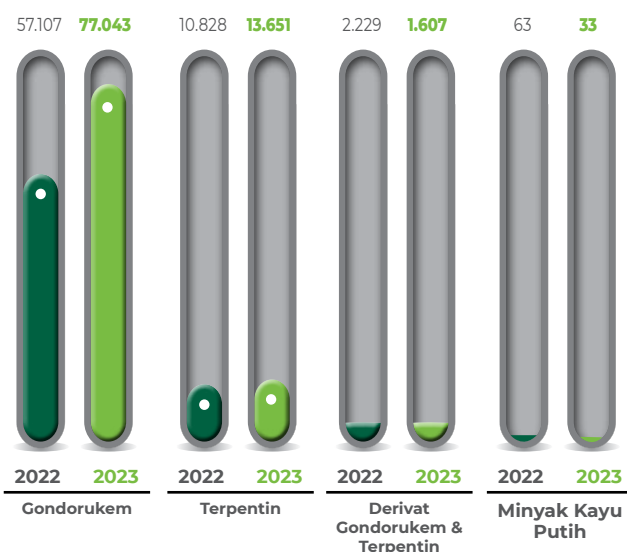
Segmen Non Kayu

Non-Wood Segment

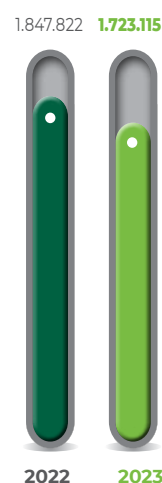
Segmen Hasil Hutan Lainnya meliputi produk-produk non kayu, baik yang diolah maupun tidak diolah. Produk-produk industri non kayu Perum Perhutani terdiri dari Gondorukem, Terpentin dan Derivat, Minyak Kayu Putih, Seedlak dan Kopal.

The Other Forest Products segment includes non-wood products, both processed and unprocessed. Perum Perhutani's non-wood industrial products consist of Gum Rosin, Turpentine and Derivatives, Cajuput Oil, Seedlak and Copal.

Volume Penjualan Hasil Hutan Non Kayu (ton)
Sales Volume of Non-Wood Forest Products (tons)



Pendapatan Hasil Hutan Non Kayu (Rp juta)
Non-Wood Forest Product Income (Rp million)



Gondorukem dan Terpentin

Gondorukem dan Terpentin merupakan produk olahan dari getah Pinus. Kontribusi kedua produk ini terhadap total pendapatan Perum Perhutani cukup besar, yakni mencapai sekitar 40%

Sampai dengan tahun 2023, pengolahan terhadap getah Pinus terealisasi 100,763 ton atau 112% dari RKAP tahun 2023. Angka ini meningkat 19% dari periode yang sama tahun 2022. Tercapainya realisasi pengolahan getah pinus tersebut dikarenakan pasokan Getah Pinus mampu memenuhi kebutuhan produksi. Dari rencana pemasakan getah 90,359 ton tersedia 100,763 ton (112%) dari total produksi / sadapan getah pinus 104,067 ton.

Gondorukem yang dihasilkan tercapai 73,249 ton atau 112% dari RKAP tahun 2023. Angka ini meningkat 20% dari periode yang sama tahun 2022. Rendemen pengolahan gondorukem tercapai 72,69% atau 101% dari target RKAP tahun 2023 dan meningkat 100% dari periode yang sama tahun 2022.

Untuk produksi terpentin tercapai 16,107 ton atau 114% dari RKAP tahun 2023. Angka ini meningkat

Gum Rosin and Turpentine

Gum Rosin and Turpentine are processed products from pine resin. The contribution of these two products to Perum Perhutani's total revenue is quite large, reaching around 40%.

Until 2023, the processing of Pine resin was realized at 100,763 tons or 112% of the 2023 RKAP. This figure increased by 19% from the same period in 2022. The realization of pine resin processing was achieved because the supply of pine resin was able to meet production needs. From the sap ripening plan of 90,359 tons, 100,763 tons were available (112%) of the total production / tapping of pine resin 104,067 tons.

Gum Rosin produced reached 73,249 tons or 112% of the 2023 RKAP. This figure increased by 20% from the same period in 2022. The processing yield of gum rosin reached 72.69% or 101% of the 2023 RKAP target and increased 100% from the same period in 2022.

Turpentine production reached 16,107 tons or 114% of the 2023 RKAP. This figure increased by 25% from

25% dari periode yang sama tahun 2022. Rendemen pengolahan terpentin tercapai 15,99% atau 102% dari RKAP tahun 2023 dan meningkat 5% dari periode yang sama tahun 2022.

Sementara untuk derivat yang sudah terealisasi pada tahun 2023 adalah A-Pinene sebesar 1.577 Ton, D-Carene 278 Ton, dan Red Oil 14 Ton dikarenakan derivat bukan bagian dari getah pinus melainkan turunan dari gondorukem dan terpentin.

Minyak Kayu Putih

Daun yang diolah sampai dengan tahun 2023 sebanyak 26.240 ton atau 49% dari RKAP tahun 2023. Angka ini turun 45% dari periode yang sama tahun 2022. Sedangkan Minyak Kayu Putih yang dihasilkan tercapai 181 ton atau 46% dari RKAP tahun 2023. Angka ini turun 45% dari realisasi periode yang sama tahun 2022.

Produksi Minyak Kayu Putih (MKP) belum tercapai sesuai target RKAP dikarenakan adanya kebijakan pembatasan produksi bahan baku (Daun Kayu Putih) menyesuaikan dengan kondisi pasar/permintaan MKP yang melemah dampak dari masuknya minyak eucalyptus impor ke Indonesia dengan harga yang lebih murah dan kadar cineol lebih tinggi.

Selain itu, aktivitas pemasakan belum optimal pada triwulan I tahun 2023 karena pada musim hujan daun kayu putih dalam kondisi basah cenderung menghasilkan rendemen MKP yang rendah. Pada saat itu dilakukan pemeliharaan mesin pabrik, yaitu berupa kegiatan *overhaul* yang dilakukan tiap tahun.

Kopal dan Lak Cabang

Kopal yang dihasilkan tercapai 285 ton atau 78% dari RKAP tahun 2023. Angka ini menurun 19% dari periode yang sama tahun 2022. Untuk produksi lak cabang tercapai 16,9 ton atau 469% dari RKAP tahun 2023. Angka ini menurun 49% dari periode yang sama tahun 2022.

Pendapatan Hasil Hutan Non-Kayu

Secara total, pendapatan dari penjualan produk industri non kayu di dalam negeri tercapai Rp178,20 miliar atau 59,20% dari target RKAP 2023, naik 10,96% dari tahun 2022. Sementara hasil penjualan luar negeri industri non kayu tercapai Rp1,54 triliun atau 94,89% dari RKAP 2022, menurun 8,43% dari tahun 2022.

the same period in 2022. The turpentine processing yield reached 15.99% or 102% of the 2023 RKAP and increased 5% from the same period in 2022.

Meanwhile, the derivatives that have been realized in 2023 are A-Pinene of 1,577 tons, D-Carene 278 tons, and Red Oil 14 tons because the derivatives are not part of pine resin but are derivatives of gondorukem and turpentine.

Cajuput Oil

Leaves processed up to 2023 were 26,240 tons or 49% of the 2023 RKAP. This figure is down 45% from the same period in 2022. Meanwhile, the Cajuput Oil produced reached 181 tons or 46% of the 2023 RKAP. This figure decreased 45% from the realization of the same period in 2022.

Cajuput Oil (MKP) production has not been achieved according to the RKAP target due to the policy of limiting the production of raw materials (Cajuput Leaves) to adjust to market conditions/demand for MKP which has weakened due to the impact of the entry of imported eucalyptus oil into Indonesia at a cheaper price and higher cineole content.

In addition, ripening activities were not optimal in the first quarter of 2023 because during the rainy season Cajuput leaves in wet conditions tend to produce low MKP yields. At that time, factory machinery maintenance was carried out, in the form of overhaul activities carried out annually.

Copal and Shellac Branches

Copal produced reached 285 tons or 78% of the 2023 RKAP. This figure decreased by 19% from the same period in 2022. Shellac branches production reached 16.9 tons or 469% of the 2023 Work Plan. This figure decreased by 49% from the same period in 2022.

Non-Wood Forest Products Revenue

In total, revenue from domestic sales of non-timber industry products reached IDR178.20 billion or 59.20% of the 2023 RKAP target, up 10.96% from 2022. Meanwhile, overseas sales results of the non-timber industry reached IDR1.54 trillion or 94.89% of the 2022 RKAP, down 8.43% from 2022.

Volume Penjualan Hasil Hutan Non Kayu 2023 (tons)

Sales Volume of Non-Wood Forest Products in 2023 (tons)

Element Element		Dalam Negeri Domestic	Luar Negeri Overseas
Gondorukem	Gum Rosin	2.697	74.346
Terpentin	Turpentine	3.811	9.840
Derivat Gondorukem dan Terpentin	Gum Rosin and Turpentine Derivative	267	1.340
Minyak Kayu Putih	Cajuput Oil	33	-

Penjualan Dalam Negeri

Penjualan domestik Gondorukem sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebanyak 2.697 ton atau 60% dari RKAP tahun 2023 dan volume penjualan turun 29% dibandingkan realisasi penjualan tahun 2022. Sementara untuk Terpentin, terjual sebanyak 3.811 ton atau 153% dari RKAP tahun 2023 dan volume penjualan tersebut naik 250,28% apabila dibandingkan realisasi penjualan tahun 2022.

Untuk derivat gondorukem dan terpentin, produk yang terjual sebanyak 267 ton atau 42,72% dari RKAP tahun 2023, bila dibandingkan dengan tahun 2022 maka penjualan derivat ini mengalami penurunan 7,61% dibandingkan realisasi tahun 2022.

Realisasi penjualan MKP sebanyak 33 ton atau 6,15% dari RKAP tahun 2023, jika dibandingkan realisasi penjualan periode yang sama tahun 2022 terjadi penurunan penjualan sebesar 47,62% Ketidaktercapaian volume penjualan MKP ini disebabkan antara lain:

- Pasokan Daun Kayu Putih yang kurang sehingga produksi Minyak Kayu Putih yang dihasilkan tidak sesuai dengan rencana.
- Masuknya minyak Eucalyptus import yang menjadi barang substitusi MKP dengan harga yang lebih murah menjadi pesaing pasar di tahun 2023.

Domestic Sales

Domestic sales of Gum Rosin until 2023 were realized at 2,697 tons or 60% of the 2023 RKAP and the sales volume decreased by 29% compared to the sales realization in 2022. While for turpentine, 3,811 tons or 153% of the 2023 RKAP were sold and the sales volume increased by 250.28% when compared to sales realization in 2022.

For gum rosin and turpentine derivatives, the products sold were 267 tons or 42.72% of the 2023 RKAP, when compared to 2022, the sales of these derivatives decreased by 7.61% compared to the realization in 2022.

MKP sales realization was 33 tons or 6,15% of the 2023 RKAP, when compared to the sales realization for the same period in 2022 there was a 47.62% decrease in sales. The non-achievement of MKP sales volume was due to, among others:

- Insufficient supply of Cajuput Leaves so that the production of Cajuput Oil produced is not according to the plan.
- The entry of imported Cajuput oil, which is a substitute for MKP at a lower price, will become a market competitor in 2023.

Volume Penjualan Dalam Negeri Hasil Hutan Non Kayu (ton)

Domestic Sales Volume of Non-Wood Forest Products (tons)

Elemen Element		RKAP 2023 RKAP 2023	REAL 2023 REAL 2023	REAL 2022 REAL 2022	Pencapaian Achievement RKAP	Δ 2022-2023
Gondorukem	Gum Rosin	4.477	2.697	3.782	60,24%	(28,69%)
Terpentin	Turpentine	2.497	3.811	1.088	152,62%	250,28%
Derivat Gondorukem dan Terpentin	Gum Rosin and Turpentine Derivative	625	267	289	42,72%	(7,61%)
Minyak Kayu Putih	Cajuput Oil	537	33	63	6,15%	(47,62%)

Produk Gondorukem untuk pasar domestik sampai dengan tahun 2023 menghasilkan pendapatan sebesar Rp47,00 miliar atau 54,56% dari RKAP tahun 2023, terjadi penurunan sebesar 41,16% dibandingkan dengan pendapatan pada periode yang sama tahun 2022. Sedangkan untuk produk Terpentin menghasilkan pendapatan sebesar Rp116,22 miliar atau 116,70% dari RKAP tahun 2023 dan apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada periode yang sama tahun 2022, maka terjadi kenaikan sebesar 114,71%.

Sementara dari pendapatan dalam negeri produk Derivat gondorukem dan terpentin tercapai sebesar Rp7,85 miliar atau 36,77% dari RKAP 2023, dan apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada periode yang sama tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 10,51%.

Realisasi pendapatan Produk Minyak Kayu Putih sebesar Rp7,13 miliar atau 7,59% dari RKAP tahun 2023, dan terjadi penurunan 60,02% dibandingkan pendapatan pada periode yang sama tahun 2022.

Gum Rosin products for the domestic market until 2023 generated revenue of IDR47.00 billion or 54.56% of the 2023 RKAP, a decrease of 41.16% compared to revenue in the same period in 2022. Meanwhile, turpentine products generated revenue of Rp116.22 billion or 116.70% of the 2023 RKAP and when compared to revenue realization in the same period in 2022, there was an increase of 114.71%.

Meanwhile, domestic revenue from gum rosin and turpentine derivatives products reached IDR7.85 billion or 36.77% of the 2023 RKAP, and when compared to the realization of revenue in the same period in 2022 there was a decrease of 10.51%.

Realization of Cajuput Oil Products revenue amounted to IDR7.13 billion or 7.59% of the 2023 RKAP, and a decrease of 60.02% compared to revenue in the same period in 2022.

Pendapatan Dalam Negeri Produk Hasil Hutan Non Kayu (Rp juta)

Domestic Revenue of Non-Wood Forest Products (Rp millions)

Element	Element	RKAP 2023 RKAP 2023	REAL 2023 REAL 2023	REAL 2022 REAL 2022	Pencapaian Achievement RKAP	Δ 2022-2023
Gondorukem	Gum Rosin	86.139	47.000	79.871	54,56%	(41,16%)
Terpentin	Turpentine	99.587	116.220	54.129	116,70%	114,71%
Derivat Gondorukem dan Terpentin	Gum Rosin and Turpentine Derivative	21.345	7.848	8.770	36,77%	(10,51%)
Minyak Kayu Putih	Cajuput Oil	93.931	7.129	17.831	7,59%	(60,02%)
Total	Total	301.002	178.197	160.601	59,20%	10,96%

Penjualan Luar Negeri

Penjualan ekspor Gondorukem sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebanyak 74.346 ton atau 124,99% dari RKAP tahun 2023, terjadi kenaikan sebesar 39,42% dibandingkan volume penjualan ekspor gondorukem pada tahun 2022.

Sementara untuk ekspor Terpentin, terealisasi sebanyak 9.840 ton atau 98,53% dari RKAP tahun 2023, terjadi kenaikan volume penjualan sebesar 1,03% dibandingkan dengan volume penjualan ekspor terpentin pada tahun 2022.

Untuk ekspor Derivat gondorukem dan terpentin, penjualan terealisasi sebanyak 1.340 ton di tahun 2023 atau 53,58% dari RKAP tahun 2023, terjadi

Overseas Sales

Gum Rosin export sales until 2023 were realized at 74,346 tons or 124.99% of the 2023 RKAP, an increase of 39.42% compared to the export sales volume of gum rosin in 2022.

While for turpentine exports, 9,840 tons or 98.53% of the 2023 RKAP was realized, an increase in sales volume of 1.03% compared to the sales volume of turpentine exports in 2022.

For exports of gum rosin and turpentine derivatives, sales were realized at 1,340 tons in 2023 or 53.58% of the 2023 RKAP, a decrease in sales volume of

penurunan volume penjualan sebesar 30,93% dibandingkan dengan volume penjualan ekspor derivat gondorukem dan terpentin pada tahun 2022. Penjualan ekspor derivat ini didominasi oleh produk *alpha pinene*.

30.93% compared to the sales volume of gum rosin and turpentine derivatives exports in 2022. Export sales of these derivatives are dominated by alpha pinene products.

Volume Penjualan Ekspor Hasil Hutan Non Kayu (ton)

Export Sales Volume of Non-Wood Forest Products (tons)

Element Element		RKAP 2023 RKAP 2023	REAL 2023 REAL 2023	REAL 2022 REAL 2022	Pencapaian Achievement RKAP	Δ 2022-2023
Gondorukem	Gum Rosin	59.481	74.346	53.325	124,99%	39,42%
Terpentin	Turpentine	9.987	9.840	9.740	98,53%	1,03%
Derivat Gondorukem dan Terpentin	Gum Rosin and Turpentine Derivative	2.501	1.340	1.940	53,58%	(30,93%)

Produk Gondorukem menghasilkan pendapatan ekspor sebesar Rp1,23 triliun atau 107,10% dari RKAP tahun 2022, dan bila dibandingkan pada periode yang sama tahun 2022 terjadi kenaikan pendapatan ekspor gondorukem sebesar 8,34%. Sedangkan untuk ekspor produk Terpentin menghasilkan pendapatan sebesar Rp273,27 miliar atau 68,60% dari RKAP tahun 2023, turun 39,84% dari realisasi pada periode yang sama tahun 2022.

Gum Rosin products generated export revenue of IDR1.23 trillion or 107.10% of the 2022 RKAP, and when compared to the same period in 2022 there was an increase in gum rosin export revenue of 8.34%. Meanwhile, the export of turpentine products generated revenue of IDR273.27 billion or 68.60% of the 2023 RKAP, down 39.84% from the realization in the same period in 2022.

Sementara dari pendapatan ekspor produk Derivat gondorukem dan terpentin tercapai sebesar Rp45,94 miliar atau 53,80% dari RKAP tahun 2023, apabila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2022, pendapatan produk derivate mengalami penurunan sebesar 54,79%.

While the export revenue of gum rosin and turpentine derivative products reached IDR45.94 billion or 53.80% of the 2023 RKAP, when compared to 2022 revenue, derivate product revenue decreased by 54.79%.

Pendapatan Ekspor Produk Hasil Hutan Non Kayu (Rp Juta)

Export Revenue of Non-Wood Forest Products (IDR Million)

Element Element		RKAP 2023 RKAP 2023	REAL 2023 REAL 2023	REAL 2022 REAL 2022	Pencapaian Achievement RKAP	Δ 2022-2023
Gondorukem	Gum Rosin	1.144.413	1.225.713	1.131.342	107,10%	8,34%
Terpentin	Turpentine	398.349	273.271	454.269	68,60%	(39,84%)
Derivat Gondorukem dan Terpentin	Gum Rosin and Turpentine Derivative	85.380	45.935	101.610	53,80%	(54,79%)
Total	Total	1.628.143	1.544.918	1.687.221	94,89%	(8,43%)

Profitabilitas Hasil Hutan Non Kayu

Pada tahun 2023, segmen hasil hutan non kayu mampu menghasilkan pendapatan total sebesar Rp1,72 triliun atau 89,32% dari RKAP 2023 sebesar Rp1,93 triliun dan menurun 6,75% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,85 triliun. Realisasi Biaya Pokok Penjualan sebesar Rp1,17 triliun atau 121,73%

Profitability of Non-Wood Forest Products

In 2023, the non-wood products segment was able to generate total revenue of IDR1.72 trillion or 89.32% of the 2023 RKAP of IDR1.93 trillion and decreased 6.75% from the previous year of IDR1.85 trillion. Realization of Cost of Goods Sold amounted to IDR1.17 trillion or 121.73% of the 2023

dari RKAP 2023 sebesar Rp958,55 miliar, meningkat 24,18% dari tahun sebelumnya sebesar Rp939,63 miliar.

Tingkat *Gross Profit Margin* (GPM) tahun 2023 untuk segmen hasil hutan lainnya berada di angka 32,28% atau masuk dalam kategori profitabilitas tinggi, namun lebih rendah dari pencapaian GPM tahun 2022 sebesar 49,27%.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa ada sedikit penurunan kinerja pada segmen hasil hutan lainnya.

RKAP of IDR958.55 billion, an increase of 24.18% from the previous year of IDR939.63 billion.

The *Gross Profit Margin* (GPM) level in 2023 for the other forest products segment was at 32.28% or in the high profitability category, but lower than the GPM achievement in 2022 of 49.27%.

These figures indicate that there is a slight decline in performance in the other forest products segment.

Profitabilitas Hasil Hutan Non Kayu (Rp juta)

Profitability of Non-Wood Forest Products (IDR million)

Element Element		RKAP 2023 RKAP 2023	REAL 2023 REAL 2023	REAL 2022 REAL 2022	Pencapaian Achievement RKAP	Δ 2022-2023
Pendapatan	Revenue	1.929.145	1.723.115	1.847.822	89,32%	(6,75%)
HPP	Cost of Goods Sold (COGS)	958.547	1.166.814	939.628	121,73%	24,18%
Margin	Margin	970.598	556.301	912.520	57,32%	(39,04%)
GPM	GPM	50,31%	32,28%	49,27%	64,17%	(34,47%)



Segmen Usaha Lainnya

Other Business Segments

Segmen Usaha Lainnya meliputi ekowisata dan agroforestry, dengan penjelasan sebagai berikut:

The Other Business segment includes ecotourism and agroforestry, with the following explanation:

Ekowisata

Ekowisata diartikan suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan menyejahterakan penduduk setempat serta mengikutsertakan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis.

Wisata Indonesia memiliki keunggulan daya tarik alam yang beragam, harga wisata yang kompetitif dan kebijakan prioritas untuk wisata. Perhutani sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai daya tarik alam yang beragam mulai dari pantai, hutan, pegunungan bergerak untuk mengambil peran dalam pembangunan pariwisata Nasional.

Ecotourism

Ecotourism is defined as a form of tourist travel to natural areas carried out with the aim of conserving the environment and preserving the lives and welfare of local residents and including aspects of education and interpretation of the natural environment and community culture with the management of ecological sustainability.

Indonesian tourism has the advantage of diverse natural attractions, competitive tourism prices and priority policies for tourism. Perhutani as one of the State-Owned Enterprises that has diverse natural attractions ranging from beaches, forests, mountains is moving to take a role in the development of National tourism.



Tahun 2023, Perhutani mengelola 633 lokasi wisata yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat & Banten. Bersama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan/LMDH dan Pemerintah Daerah, Perhutani secara bertahap membangun lokasi-lokasi wisata baru yang ke depan diharapkan dapat menjadi salah satu penyumbang pendapatan di Perhutani.

Sampai dengan tahun 2023 obyek wisata Perum Perhutani dikunjungi oleh sebanyak 8,3 juta orang wisatawan atau 111% dari target RKAP tahun 2023 dan mengalami penurunan 84% dibanding periode yang sama tahun 2022. Dari kunjungan tersebut, Perhutani mendapatkan pendapatan sebesar Rp166,41 miliar atau mencapai 135% dari target RKAP tahun 2023, namun menurun 93% dari periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp260,22 miliar.

Pada tahun 2023, terdapat kebijakan *spin off* lokasi wisata yang dikelola Perum Perhutani ke Anak Perusahaan (PT Palawi Risorsis). Adanya alih kelola berdampak pada pencatatan pengunjung dan pendapatan di bidang ekowisata sehingga menyebabkan penurunan pendapatan yang cukup signifikan.

Pencapaian pendapatan ekowisata merupakan hasil dari berbagai upaya telah dilakukan antara lain:

- a) Ekstensifikasi Program *Rebranding* Wisata Alam Perhutani dalam rangka kesiapan (readiness) untuk menangkap peluang

In 2023, Perhutani manages 633 tourist sites spread across Central Java, East Java, and West Java & Banten. Together with the Forest Village Community Organization (Lembaga Masyarakat Desa Hutan/LMDH) and the Regional Government, Perhutani is gradually building new tourist sites which in the future are expected to be one of the contributors to revenue in Perhutani.

Until 2023 Perum Perhutani's tourism objects were visited by 8.3 million tourists or 111% of the 2023 RKAP target and experienced an 84% decrease compared to the same period in 2022. From these visits, Perhutani received revenue of IDR166.41 billion or 135% of the 2023 RKAP target, but decreased 93% from the same period in 2022 amounting to IDR260.22 billion.

In 2023, there is a policy to spin off tourist sites managed by Perum Perhutani to a subsidiary (PT Palawi Risorsis). The transfer of management has an impact on visitor records and income in the field of ecotourism, causing a significant decrease in income.

The achievement of ecotourism revenue is the result of various efforts that have been made, among others:

- a) Extending the Perhutani Nature Tourism Rebranding Program in the context of readiness to capture the rebound opportunities of the

rebound industri pariwisata pasca pandemi COVID-19.

- b) Fokus kepada pengembangan obyek wisata melalui kemitraan strategis dan Capex Perhutani
- c) Pengembangan kemitraan strategis dengan calon mitra potensial untuk meningkatkan interkoneksi dalam rantai nilai (value chain) sehingga proses bisnis bisa lebih efektif dan efisien, segmen pasar lebih luas, daya saing produk wisata dan peluang pendapatan perusahaan meningkat, antara lain: *marketing* dan *cashless payment* dengan *On Line Travel Agent*, sinergi BUMN dan anak perusahaan, pengembangan produk wisata, *advertising*, dan sebagainya.
- d) Praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) untuk meminimalkan peluang-peluang terjadinya *fraud*.
- e) Peningkatan kompetensi SDM Wisata sesuai strategi pengembangan bidang wisata yang sudah tertuang dalam RJPP tahun 2020-2024 melalui pelatihan, program magang, rotasi penugasan karyawan.
- f) Pemenuhan aspek legal, pengurusan perijinan usaha wisata, dan pemenuhan kewajiban kepada negara (pajak-pajak, PNBP, dsb).

Agroforestry

Usaha *agroforestry* Perum Perhutani dilakukan dengan mengelola tanaman agro dengan menggunakan pola tanam *agroforestry*, dimana tanaman agro/pertanian ditanam bersamaan dengan tanaman kehutanan. Perum Perhutani mendapatkan bagi hasil (sharing) dari kegiatan *agroforestry* dengan besaran yang bervariasi sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ditandatangani.

Pendapatan tersebut dikelompokkan menjadi bidang kegiatan:

- Ketahanan Pangan; bagi hasil dari komoditas padi, jagung, tebu dan kedelai.
- Hasil Hutan Bukan Kayu; bagi hasil dari komoditas kopi, cengkeh, kelapa, kacang tanah, porang, salak, durian, mangga, pisang, bambu, air dan sebagainya.
- Pengembangan *agroforestry* tebu kelola mandiri maupun tebu kerja sama sesuai dengan inisiatif strategis Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perum Perhutani tahun 2020-2024, dimana sampai dengan tahun 2023 telah tertanam seluas 11.144,09

tourism industry after the COVID-19 pandemic.

- b) Focus on the development of tourism objects through strategic partnerships and Perhutani's CapEx.
- c) Development of strategic partnerships with potential partners to increase interconnectivity in the value chain so that business processes can be more effective and efficient, broader market segments, competitiveness of tourism products and increased company revenue opportunities, including: marketing and cashless payment with On Line Travel Agent, synergy between SOE and subsidiaries, tourism product development, advertising, and so on.
- d) Good Corporate Governance (GCG) practices to minimize opportunities for fraud.
- e) Increasing the competence of Tourism Human Resources according to the tourism development strategy that has been stated in the RJPP 2020-2024 through training, internship programs, employee assignment rotations.
- f) Fulfillment of legal aspects, management of tourism business licenses, and fulfillment of obligations to the country (taxes, PNBP, etc.).

Agroforestry

Perum Perhutani's *agroforestry* business is carried out by managing agro crops using *agroforestry* planting patterns, where agro/agricultural crops are planted together with forestry crops. Perum Perhutani gets profitsharing from *agroforestry* activities with varying amounts according to the signed Cooperation Agreement (PKS) between Perum Perhutani and Forest Village Community Institutions (LMDH).

The income is grouped into activity areas:

- Food Security; profit sharing from rice, corn, sugarcane and soybean commodities.
- Non-Wood Forest Products; profit sharing from coffee, cloves, coconut, peanuts, porang, salak, durian, mango, banana, bamboo, water and so on.
- The development of self-managed sugarcane *agroforestry* and cooperative sugarcane is in accordance with the strategic initiative of the Perum Perhutani Long-Term Company Plan (RJPP) for 2020-2024, where by 2023 an area of 11,144.09 Ha has been planted with a target according to the RJPP until 2024 of 18,256 Ha



Ha dengan target sesuai RJPP sampai tahun 2024 seluas 18.256 Ha setara dengan potensi dukungan terhadap produksi tebu giling pada tahun 2025 sebesar 1,28 juta ton.

- Industri Madu; pendapatan dari Madu Wanajava KPH Pati (Jawa Tengah).

Pendapatan *Agroforestry* Perhutani sampai dengan tahun 2023 tercatat sebesar Rp124,70 miliar. Pendapatan sampai dengan tahun 2023 sebesar 80,12% dari target pendapatan RKAP tahun 2023 dan meningkat 31,30% bila dibandingkan dengan target pendapatan *Agroforestry* pada tahun 2022 sebesar Rp94,98 miliar.

Penyebab tidak tercapainya pendapatan *agroforestry* antara lain karena adanya permintaan mitra (LMDH) untuk dilakukan pengurangan nilai sharing, penurunan produksi dan gagal panen pada beberapa komoditi, dan Beberapa harga komoditi mengalami penurunan.

Profitabilitas Segmen Usaha Lainnya

Pada tahun 2023, segmen usaha lainnya mampu menghasilkan pendapatan total sebesar Rp594,15 miliar atau 47,08% dari RKAP 2023 sebesar Rp1,26 triliun dan meningkat 65,14% dari tahun sebelumnya sebesar Rp359,79 miliar. Realisasi Biaya Pokok Penjualan sebesar Rp225,69 miliar atau 47,61% dari RKAP 2023 sebesar Rp474,02 miliar, menurun 7,16% dari tahun sebelumnya sebesar Rp243,09 miliar.

equivalent to the potential support for milled sugarcane production in 2025 of 1.28 million tons.

- Honey Industry; revenue from Honey Wanajava KPH Pati (Central Java).

Perhutani *Agroforestry* revenue up to 2023 was IDR124.70 billion. Revenues up to 2023 amounted to 80.12% of the 2023 RKAP revenue target and increased 31.30% when compared to the *Agroforestry* revenue target in 2022 of IDR94.98 billion.

The causes of non-achievement of agroforestry income include partner requests (LMDH) to reduce the value of sharing, decreased production and crop failure in several commodities, and several commodity prices have decreased.

Profitability of Other Business Segments

In 2023, the other business segment was able to generate total revenue of IDR594.15 billion or 47.08% of the 2023 RKAP of IDR1.26 trillion and an increase of 65.14% from the previous year of IDR359.79 billion. Realization of Cost of Goods Sold amounted to IDR225.69 billion or 47.61% of the 2023 RKAP of IDR474.02 billion, a decrease of 7.16% from the previous year of IDR243.09 billion.

Tingkat *Gross Profit Margin* (GPM) tahun 2023 untuk segmen hasil hutan lainnya berada di angka 62,01% atau masuk dalam kategori profitabilitas tinggi, lebih tinggi dari pencapaian GPM tahun 2022 sebesar 32,44%. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Perhutani telah mengalami peningkatan kinerja pada segmen hasil hutan lainnya.

The *Gross Profit Margin* (GPM) level in 2023 for the other forest products segment was at 62.01% or in the high profitability category, higher than the 2022 GPM achievement of 32.44%. These figures show that Perhutani has experienced improved performance in the other forest products segment.

Pendapatan Segmen Usaha Lainnya (Rp Juta)

Other Business Segment Revenue (IDR Million)

Uraian Description		RKAP 2023 RKAP 2023	REAL 2023 REAL 2023	REAL 2022 REAL 2022	Pencapaian Achievement RKAP	Δ 2022-2023
Pendapatan	Revenue	1.262.087	594.148	359.787	47,08%	65,14%
HPP	Cost of Goods Sold (COGS)	474.019	225.691	243.088	47,61%	(7,16%)
Margin	Margin	788.068	368.457	116.699	46,75%	215,73%
GPM	GPM	62,44%	62,01%	32,44%	99,32%	91,17%

Profitabilitas Perusahaan per segmen usaha/ lini bisnis pada tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

The Company's profitability per business segment/ business line in 2023 is presented in the following table:

Tabel Profitabilitas Perusahaan Per Segmen Tahun 2023

Table of Profitability by Segment in 2023

Lini Bisnis Business Segment		Realisasi Pendapatan (Rp Juta) Revenue Realization (IDR Million)	Profitabilitas Profitability	Kontribusi Terhadap Pendapatan Usaha (%) Contribution to Operating Income (%)
Segmen Kayu	Wood Segment	2.282.164	43,39%	47,78%
Segmen Non Kayu	Non-Wood Segment	1.900.504	32,28%	39,79%
Segmen Lainnya	Other Segment	594.148	62,01%	12,44%
Total	Total	4.776.816	20,08%	100,00%

Prospek Pengembangan Usaha

Business Development Prospect

Prospek Usaha

Kinerja perekonomian global tahun 2024 dibayangkan-risiko utama yang berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi global yaitu dikarenakan krisis sektor *real estate* di Tiongkok, gejolak harga komoditas terutama harga minyak bumi akibat ketegangan geopolitik dan kenaikan harga pangan akibat gangguan perubahan iklim.

Perekonomian nasional sendiri tetap optimis bertumbuh meski perkiraan lebih konservatif mengingat ketidakpastian global yang masih sangat tinggi. Aktivitas manufaktur yang dicerminkan oleh *Purchasing Managers Index* (PMI) mengindikasikan sektor tersebut terus berekspansi meski menunjukkan perlambatan. Kebijakan yang diberlakukan antara lain tetap mendorong pembangunan infrastruktur dan kemudahan iklim berinvestasi. Konsumsi domestik diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 seiring dengan telah dibuka kembali aktivitas seperti sebelum pandemi.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang dicapai melalui peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi diharapkan dapat berlanjut hingga tahun 2024. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 4.9-5.0% pada tahun 2024. Pasar Asia diperkirakan akan terus bertumbuh menjadi pusat ekonomi dunia.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan indeks harga konsumen (IHK) nasional pada 2024 mencapai 2,5±1%, lebih rendah dibandingkan dengan posisi 2023 yang sebesar 2,61%. Meski demikian, inflasi inti masih cukup terkendali. Pengendalian inflasi dilakukan dengan bauran kebijakan harga-harga dari sisi moneter juga kebijakan pemerintah dalam menahan harga energi. Di sisi lain perlu didukung ongkos pembiayaan yang murah untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.

Untuk meningkatkan kinerja industri kayu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan cara kerja baru dalam mengelola hutan produksi secara lestari. Pengelolaan hutan produksi dilakukan dengan pendekatan *landscape*, kemudian analisis spasial untuk melihat area rawan

Business Outlook

The performance of the global economy in 2024 is overshadowed by major risks that have the potential to suppress global economic growth, namely due to the crisis in the real estate sector in China, commodity price volatility, especially oil prices due to geopolitical tensions, and rising food prices due to climate change disruptions.

The national economy itself remains optimistic of growth despite more conservative estimates given the still very high global uncertainty. Manufacturing activity reflected by the *Purchasing Managers Index* (PMI) indicates that the sector continues to expand despite the slowdown. Policies enacted include continuing to encourage infrastructure development and ease of investment climate. Domestic consumption is expected to be the driving force of national economic growth in 2024 as pre-pandemic activities resume.

The economic growth in 2023 achieved through increased household consumption and investment is expected to continue into 2024. Bank Indonesia estimates Indonesia's GDP growth at 4.9-5.0% in 2024. Asian markets are expected to continue to grow into the center of the world economy.

Bank Indonesia (BI) estimates that the national consumer price index (CPI) in 2024 will reach 2.5±1%, lower than the 2023 position of 2.61%. However, core inflation is still under control. Inflation control is carried out with a mix of price policies from the monetary side as well as government policies in restraining energy prices. On the other hand, it is necessary to support cheap financing costs to increase economic productivity.

To improve the performance of the wood industry, the Ministry of Environment and Forestry has implemented a new way of working in managing production forests sustainably. Production forest management is carried out with a *landscape* approach, then spatial analysis to see areas prone to

karhutla, konflik tenurial, dan mengintegrasikan sektor hulu-hilir, dan pasar.

Perusahaan menyadari akan tantangan yang timbul dari kejadian ini dan dampak potensial untuk sektor bisnis. Perusahaan akan meninjau situasi secara berkelanjutan, berusaha untuk mengembalikan kondisi bisnis pascapandemi seperti saat prapandemi secepat mungkin, dan bekerja sama dengan pihak yang berwenang untuk meminimalkan dampak eksternal terhadap kinerja bisnis Perusahaan.

Aspek Pemasaran

Strategi Pemasaran Kayu

- Strategi penjualan kayu dilakukan berdasarkan "Market Driven", termasuk dengan mengakomodir permintaan pada kayu ukuran khusus yang memiliki nilai tinggi.
- Penyesuaian komposisi bundling kayu Jati dengan kayu Sonokeling atau pengenaan tambahan harga.
- Menetapkan kebijakan harga kayu persediaan produksi tahun 2022 dan sebelumnya sesuai dengan kondisi fisik kayu.
- Percepatan masa tayang kapling pada saluran kontrak khusus untuk kayu Jati.
- Melakukan perluasan pasar ke segmen pembeli Industri Kecil atau UMKM melalui kerjasama asosiasi industri per kayu (HIMKI).

Beberapa strategi intensif untuk dapat meningkatkan penjualan antara lain melakukan promosi secara intensif portal penjualan *online* tokoperhutani.com dalam kampanye POTP (Penjualan Online Toko Perhutani) melalui media sosial toko Perhutani (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp Message & E-Mail Blast) setiap hari 1 sampai dengan 2 postingan, mengikuti kegiatan FDN (Festival Diskon Nasional) setiap tahun satu kali, dan pameran Trade Expo Indonesia setiap tahun minimal satu kali.

Realisasi beban pemasaran sepanjang tahun 2023 sebesar Rp74,28 miliar atau 107,77% dari RKAP tahun 2023 sebesar Rp68,93 miliar dan bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp85,40 miliar, maka mengalami penurunan sebesar 13,01%. Penurunan ini terjadi seiring dengan turunnya pendapatan sehingga biaya agen atas kecepatan pembayaran oleh mitra dan biaya angkutan menurun.

forest and land fires, tenure conflicts, and integrate upstream-downstream sectors, and markets.

The Company is aware of the challenges arising from this incident and the potential impact to the business sector. The Company will review the situation on an ongoing basis, strive to restore post-pandemic business conditions to pre-pandemic levels as quickly as possible, and work closely with the authorities to minimize external impacts on the Company's business performance.

Marketing Aspect

Wood Marketing Strategy

- The wood sales strategy is carried out based on "market driven," including accommodating demand for special-sized wood that has high value.
- Adjustment of the composition of the teak wood bundling with Sonokeling wood or the imposition of additional prices.
- Determining the price policy for wood inventory production in 2022 and earlier according to the physical condition of the wood.
- Acceleration of the plot display period on special contract channels for teak wood.
- Expanding the market to the small industry, or MSME buyer segment, through cooperation with the wood industry association (HIMKI).

Some intensive strategies to increase sales include intensive promotion of the tokoperhutani.com online sales portal in the POTP (Perhutani Shop Online Sales) campaign through Perhutani shop social media (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp Message & E-Mail Blast) every day 1 to 2 posts, participating in FDN (National Discount Festival) activities once a year, and Trade Expo Indonesia exhibitions every year at least once.

The realization of marketing expenses throughout 2023 amounted to IDR74.28 billion or 107.77% of the 2023 RKAP of IDR68.93 billion and when compared to the same period in 2022 of IDR85.40 billion, it decreased by 13.01%. This decrease occurred in line with the decline in revenue so that agent fees for speed of payment by partners and transportation costs decreased.

Proyek Strategis 2024

Dalam upaya mendukung pembangunan nasional dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, Perhutani telah merumuskan rencana strategis untuk tahun 2024. Fokus utama dari rencana ini adalah pelaksanaan 10 proyek strategis, yang mana 9 di antaranya merupakan proyek lanjutan dari tahun sebelumnya. Tujuan dari proyek-proyek ini adalah untuk memperkuat tata kelola sumber daya hutan, memodernisasi operasi perusahaan, serta turut berkontribusi pada pencapaian target nasional dan global dalam bidang lingkungan dan keberlanjutan.

1. Pembangunan *Platform* Kemitraan Sosial (*Socio Forest*) Perhutani akan membangun platform kemitraan sosial untuk mendukung implementasi Program Nasional Perhutanan Sosial. Melalui program ini, Perhutani bermaksud melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan berbasis partisipasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan hutan.
2. Implementasi *Smart* KPH Sebagai bagian dari inisiatif transformasi perusahaan, Perhutani akan mengimplementasikan sistem *Smart* KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) di 11 KPH. Program ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya hutan dan tata kelola perusahaan melalui pemanfaatan teknologi.
3. *Empowering* Anak Perusahaan Perhutani akan meningkatkan kemandirian dan daya saing anak perusahaan melalui alih kelola beberapa bisnis utama. Bisnis wisata akan dialihkan ke PT Palawi Risorsis, bisnis industri kayu ke PT Inhutani I, dan bisnis industri hasil hutan bukan kayu ke PT Inhutani V. Ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan fokus operasional dari masing-masing entitas.
4. Modernisasi/Revitalisasi Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Perhutani berencana untuk memodernisasi dan mendigitalkan pengelolaan *warehouse* kayu di 6 TPK. Digitalisasi ini akan mencakup sistem manajemen inventori yang lebih efisien dan transparan, dengan harapan meningkatkan produktivitas dan akurasi operasional.
5. Pembangunan Pabrik dan Komersialisasi Produk Biomassa Sebagai bagian dari pengembangan sumber energi baru dan terbarukan, Perhutani akan membangun pabrik dan mulai mengkomersialkan produk

Strategic Projects 2024

To support national development and achieve sustainable growth, Perhutani has formulated a strategic plan for 2024. The main focus of this plan is the implementation of 10 strategic projects, of which 9 are continuation projects from the previous year. These projects aim to strengthen forest resource governance, modernize the company's operations, and contribute to national and global environmental and sustainability targets.

1. Social Partnership Platform Development (*Socio Forest*) Perhutani will build a social partnership platform to support the implementation of the National Social Forestry Program. Through this program, Perhutani intends to involve forest communities in participation-based forest management. It is expected to improve community welfare while maintaining forest sustainability.
2. Implementation of *Smart* KPH As part of the company's transformation initiative, Perhutani will implement the *Smart* KPH (Forest Management Unit) system in 11 FMUs. This program aims to improve the governance of forest resources and corporate governance through technology.
3. *Empowering* Subsidiaries Perhutani will increase the independence and competitiveness of its subsidiaries through the transfer of management of several key businesses. The tourism business will be transferred to PT Palawi Risorsis, the wood industry business to PT Inhutani I, and the non-wood forest products industry business to PT Inhutani V. It is expected to increase efficiency and focus on operations. It is expected to improve the efficiency and operational focus of each entity.
4. Modernization/Revitalization of Wood Stockpiles (Tempat Penimbunan Kayu: TPK) Perhutani plans to modernize and digitize the management of wood warehouses in 6 TPKs. This digitization will include a more efficient and transparent inventory management system with improving productivity and operational accuracy hope.
5. Factory Construction and Commercialization of Biomass Products As part of new and renewable energy sources development, Perhutani will build a factory and commercialize biomass



biomassa. Proyek ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk lebih berkelanjutan dan mendukung kebijakan energi hijau nasional.

6. Pengembangan Proyek *Nature Based Solutions* (NBS) Perhutani akan mengembangkan proyek *Nature Based Solutions* (NBS) sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Melalui proyek ini, Perhutani berkomitmen mendukung pencapaian target *net zero emission* pada tahun 2060 dengan berbagai inisiatif berbasis alam yang efisien dan berkelanjutan.
7. Pengembangan *Agroforestry* Tebu Kelola Mandiri Dalam mendukung ketahanan pangan nasional, Perhutani akan mengembangkan *agroforestry* tebu kelola mandiri. Proyek ini akan didanai melalui pembiayaan mandiri maupun melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain, dengan tujuan meningkatkan produksi tebu tanpa merusak ekosistem hutan.
8. Peningkatan Hilirisasi Industri Kayu Upaya hilirisasi industri kayu akan lebih ditingkatkan melalui pengolahan kayu AI dan revitalisasi PGT untuk industri HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil hutan dan mendukung diversifikasi produk.
9. Digitalisasi Inventarisasi Sumber Daya Hutan Perhutani akan memanfaatkan teknologi Lidar untuk digitalisasi inventarisasi sumber daya hutan. Teknologi ini memungkinkan pemetaan hutan yang lebih presisi dan efisien, serta membantu dalam pengelolaan sumber daya hutan yang lebih berbasis data.

products. This project aligns with the company's commitment to be more sustainable and support the national green energy policy.

6. Nature-Based Solutions (NBS) Project Development Perhutani will develop the Nature-Based Solutions (NBS) project to mitigate climate change. Through this project, Perhutani is committed to supporting the achievement of the net zero emission target by 2060 with various efficient and sustainable nature-based initiatives.
7. Development of Self-Managed Sugarcane Agroforestry In supporting national food security, Perhutani will develop self-managed sugarcane agroforestry. This project will be funded through self-financing as well as through cooperation mechanisms with other parties to increase sugarcane production without damaging the forest ecosystem.
8. Increased Downstreaming of the Wood Industry Efforts to downstream the wood industry will be further enhanced through AI wood processing and PGT revitalization for the HHBK (Non-Wood Forest Products) industry. This step is expected to increase the added value of forest products and support product diversification.
9. Digitization of Forest Resources Inventory Perhutani will utilize Lidar technology for the digitization of forest resources inventory. This technology enables more precise and efficient forest mapping and assists in more data-driven forest resource management.

10. Digitalisasi Proses Bisnis Dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional, Perhutani akan mengintegrasikan ERP (*Enterprise Resource Planning*) dengan modul-modul seperti FICO (*Finance and Controlling*), HCMS (*Human Capital Management System*), MM (*Materials Management*), SD (*Sales and Distribution*), PP (*Production Planning*), dan E-Procurement. Integrasi ini bertujuan untuk menyelaraskan proses bisnis, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan transparansi.

10. Digitalization of Business Processes To improve operational efficiency, Perhutani will integrate ERP (Enterprise Resource Planning) with modules such as FICO (Finance and Controlling), HCMS (Human Capital Management System), MM (Materials Management), SD (Sales and Distribution), PP (Production Planning), and E-Procurement. This integration aims to harmonize business processes, reduce operational costs, and increase transparency.

Tinjauan Kinerja Keuangan

Review of Financial Performance

Tinjauan mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan yang disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (PSAK) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bahasan kinerja keuangan Perhutani disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

This review of financial performance is prepared based on the Company's Financial Statements presented according to Indonesian generally accepted financial accounting principles (PSAK) for the year ended December 31, 2023. The financial statements have been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) with an unqualified opinion. The discussion of Perhutani's financial performance is presented with due regard to the explanations in the notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of this Annual Report.



Analisis Laporan Posisi Keuangan

Analysis of the Statement of Financial Position

Laporan Posisi Keuangan Tahun 2023 dan 2022 (dalam jutaan Rupiah)

Statement of Financial Position for 2023 and 2022 (in million IDR)

Keterangan Description	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) Increase/(Decrease)	
			Selisih Difference	%
Aset Lancar Current Assets	2.106.655	2.360.790	(254.135)	(10,76%)
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	15.859.800	14.959.113	900.687	6,02%
Jumlah Aset Total Assets	17.966.455	17.319.903	646.552	3,73%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	1.653.902	1.391.085	262.817	18,89%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	4.168.223	4.007.993	160.230	4,00%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	5.822.125	5.399.078	423.047	7,84%
Ekuitas Equity	12.144.330	11.920.825	223.505	1,87%
Jumlah Liabilitas + Ekuitas Total Liabilities + Equity	17.966.455	17.319.903	646.552	3,73%

ASET

Jumlah aset Perusahaan pada akhir 2023 tercatat Rp17,97 triliun, meningkat Rp646,55 miliar atau 3,73% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp17,32 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pada aset tidak lancar sebesar Rp900,69 miliar atau 6,02%.

ASSETS

The Company's total assets at the end of 2023 were IDR17.97 trillion, an increase of IDR646.55 billion or 3.73% compared to the year 2022 of IDR17.32 trillion. The increase was due to an increase in non-current assets of IDR900.69 billion or 6.02%.

Aset Perusahaan terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar sebagaimana dapat dilihat dalam uraian berikut ini

The Company's assets consist of current assets and non-current assets as can be seen in the following description

Tabel Aset Tahun 2023 dan 2022 (dalam jutaan Rupiah)

Table of Asset for 2023 and 2022 (in million IDR)

Keterangan Description		2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) Increase/(Decrease)	
				Selisih Difference	%
Aset Lancar	Current Assets				
Kas dan Setara Kas	Cash and Cash Equivalents	259.453	558.460	(299.007)	(53,54%)
Kas yang dibatasi penggunaannya	Restricted cash	101.143	111.000	(9.857)	(8,88%)
Piutang Usaha	Accounts Receivable	233.730	105.087	128.643	122,42%
Persediaan, neto	Inventory, Net	546.252	438.801	107.451	24,49%
Pajak dibayar dimuka	Prepaid tax	166	1.620	(1.454)	(89,75%)
Aset biologis	Biological Assets	845.284	1.072.388	(227.104)	(21,18%)
Aset lancar lainnya	Other current assets	120.627	73.434	47.193	64,27%
Jumlah Aset Lancar	Total Current Assets	2.106.655	2.360.790	(254.135)	(10,76%)
Aset Tidak Lancar	Non-current Assets				
Taksiran klaim pengembalian pajak	Estimated tax refund claim	36.841	8.818	28.023	317,79%
Investasi pada entitas asosiasi	Investment in associates	104.264	96.050	8.214	8,55%
Aset tetap	Fixed Assets	2.451.706	2.250.125	201.581	8,96%
Aset biologis	Biological Assets	13.081.836	12.487.746	594.090	4,76%
Aset pajak tangguhan	Deferred Tax Assets	10.697	17.405	(6.708)	(38,54%)
Aset hak guna	Right of Use Assets	53.060	7.566	45.494	601,30%
Aset tidak lancar lainnya	Other non-current assets	121.396	91.403	29.993	32,81%
Jumlah Aset Tidak Lancar	Total non-current assets	15.859.800	14.959.113	900.687	6,02%
JUMLAH ASET	TOTAL ASSETS	17.966.455	17.319.903	646.552	3,73%

Aset Lancar

Jumlah aset lancar pada 2023 sebesar Rp2,11 triliun, turun Rp254,14 miliar jika dibandingkan dengan periode 2022 sebesar Rp2,36 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya kas dan setara kas sebesar Rp299,01 miliar atau 53,54% akibat menurunnya kas dari aktivitas operasi.

Current Assets

Total current assets in 2023 amounted to IDR2.11 trillion, a decrease of IDR254.14 billion when compared to the 2022 period of IDR2.36 trillion. This decrease was mainly due to a decrease in cash and cash equivalents of IDR299.01 billion or 53.54% due to a decrease in cash from operating activities.

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas meliputi kas, kas pada bank berupa rupiah dan dolar AS, dan deposito jangka pendek dengan bank pemerintah. Kas dan setara kas Perusahaan pada 2023 sebesar Rp259,45 miliar, turun Rp299,01 miliar atau 53,54% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp558,46 miliar. Penurunan terlihat pada kas di bank sebesar Rp240,16 miliar atau 107,75%. Penurunan saldo kas di bank terutama dikarenakan menurunnya penerimaan lain-lain dan penerimaan dari pelanggan.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya pada 2023 sebesar Rp101,14 miliar, turun Rp9,86 miliar atau 8,88% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp111 miliar. Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman bank untuk keperluan tambahan modal kerja dan untuk pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi yang masih berjalan.

Piutang Usaha

Piutang usaha Perusahaan selama 2023 tercatat Rp233,73 miliar, mengalami peningkatan Rp128,64 miliar atau 122,42% dibandingkan 2022 sebesar Rp105,09 miliar. Peningkatan disebabkan karena meningkatnya piutang usaha pihak ketiga.

Piutang usaha tersebut terbagi atas piutang usaha dengan pihak ketiga dan pihak berelasi yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 94,93% dan 5,07% dari piutang usaha bersih.

Persediaan

Persediaan yang dimiliki oleh Perusahaan terdiri dari produk kayu bulat, gondorukem, terpentin, kayu olahan, getah pinus dan karet, suku cadang dan bahan pembantu, dan produk lainnya. Persediaan pada tahun 2023 tercatat Rp546,25 miliar, meningkat Rp107,45 miliar atau 24,49% dibanding dengan tahun 2022 sebesar Rp438,80 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan peningkatan persediaan kayu bulat, minyak kayu putih, kayu olahan, terpentin, getah pinus dan karet.

Pajak Dibayar Dimuka

Pajak dibayar dimuka pada 2023 tercatat Rp166 juta, turun Rp1,45 miliar atau 89,75% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1,62 miliar. Penurunan ini disebabkan karena tidak adanya uang muka PPN pada posisi akhir tahun 2023.

Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks in rupiah and US dollars, and short-term deposits with state banks. The Company's cash and cash equivalents in 2023 amounted to IDR259.45 billion, a decrease of IDR299.01 billion or 53.54% when compared to 2022 of IDR558.46 billion. The decrease was seen in cash in banks amounting to IDR240.16 billion or 107.75%. The decrease in cash in bank was mainly due to the decrease in other receipts and receipts from customers.

Restricted Cash

The balance of restricted cash in 2023 amounted to IDR101.14 billion, a decrease of IDR9.86 billion or 8.88% when compared to 2022 of IDR111 billion. The placement of restricted cash is used as collateral for bank loans for additional working capital purposes and for the implementation of ongoing rehabilitation work.

Accounts Receivable

The Company's accounts receivable in 2023 was IDR233.73 billion, an increase of IDR128.64 billion or 122.42% compared to 2022 of IDR105.09 billion. The increase was due to an increase in third party accounts receivable.

Account receivables were divided into trade receivables with third parties and related parties which contributed 94.93% and 5.07% of net account receivables, respectively.

Inventories

The Company's inventories consist of round wood products, gum rosin, turpentine, processed wood, pine resin and rubber, spare parts and auxiliary materials, and other products. Inventories in 2023 were IDR546.25 billion, an increase of IDR107.45 billion or 24.49% compared to 2022 of IDR438.80 billion. The increase was due to an increase in inventory of logs, Cajuput oil, processed wood, turpentine, pine resin and rubber.

Prepaid Tax

Prepaid taxes in 2023 amounted to IDR166 million, a decrease of IDR1.45 billion or 89.75% compared to 2022 of IDR1.62 billion. This decrease was due to the absence of VAT advance at the end of 2023.

Aset Biologis

Aset biologis merupakan produk hasil panen agrikultur (getah pinus, daun kayu putih, dan tebu) dan kayu tegakan (tanaman jati dan pohon rimba lainnya). Aset biologis pada akhir tahun 2023 sebesar Rp845,28 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp227,10 miliar atau 21,18% dari akhir tahun 2022 sebesar Rp1,07 triliun. Peningkatan ini disebabkan menurunnya kayu tegakan (tanaman jati dan pohon rimba lainnya) siap panen.

Aset Lancar Lainnya

Aset lancar lainnya terdiri atas aset keuangan lancar lainnya dan aset non-keuangan lancar lainnya. Aset lancar lainnya pada 2023 tercatat Rp120,63 miliar, meningkat Rp47,19 miliar atau 64,27% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp73,43 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya aset non-keuangan lancar lainnya.

Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Perusahaan pada 2023 tercatat Rp15,86 triliun, meningkat Rp900,69 miliar atau 6,02% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp14,96 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan peningkatan tanaman produktif sebesar Rp594,09 miliar dan aset tetap sebesar Rp201,58 miliar.

Taksiran Klaim Pengembalian Pajak

Taksiran klaim pengembalian pajak pada tahun 2023 tercatat Rp36,84 miliar, meningkat Rp28,02 miliar atau 317,79% dibanding tahun 2022 sebesar Rp8,82 miliar karena perusahaan telah melaporkan lebih bayar atas PPH badan untuk masa pajak 2020.

Investasi Pada Entitas Asosiasi

Investasi pada entitas asosiasi pada tahun 2023 tercatat Rp104,26 miliar, meningkat Rp8,21 miliar atau 8,55% dibanding tahun 2022 sebesar Rp96,05 miliar dikarenakan bagian atas laba bersih entitas asosiasi menambah nilai kepemilikan. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

Aset Tetap

Aset tetap Perusahaan terdiri dari tanaman produktif non kayu baik telah maupun belum menghasilkan, tanah, bangunan, jalan dan jembatan, mesin dan instalasi, tempat penimbunan kayu, alat berat dan mesin industri, kendaraan bermotor, peralatan kantor, serta aset dalam penyelesaian. Perusahaan mencatat nilai buku aset tetap pada 2023 sebesar

Biological Assets

Biological assets represent agricultural harvest products (pine resin, Cajuput leaves, and sugar cane) and standing wood (teak and other jungle trees). Biological assets at the end of 2023 amounted to IDR845.28 billion, a decrease of IDR227.10 billion or 21.18% from the end of 2022 of IDR1.07 trillion. This increase was due to a decrease in standing wood (teak and other jungle trees) ready for harvest.

Other Current Assets

Other current assets consist of other current financial assets and other current non-financial assets. Other current assets in 2023 were IDR120.63 billion, an increase of IDR47.19 billion or 64.27% compared to 2022 of IDR73.43 billion. This increase was mainly due to the increase in other current non-financial assets.

Non-Current Assets

The Company's total non-current assets in 2023 were IDR15.86 trillion, an increase of IDR900.69 billion or 6.02% compared to 2022 of IDR14.96 trillion. The increase was mainly due to an increase in productive plants of IDR594.09 billion and fixed assets of IDR201.58 billion.

Estimated Tax Refund Claims

Estimated tax refund claim in 2023 was recorded at IDR36.84 billion, an increase of IDR28.02 billion or 317.79% compared to 2022 amounting to IDR8.82 billion because the company has reported an overpayment of corporate income tax for the 2020 tax period.

Investment in Associates

Investment in associates in 2023 was IDR104.26 billion, an increase of IDR8.21 billion or 8.55% compared to 2022 amounting to IDR96.05 billion because the share of net income of associates increased the value of ownership. Investments in associates are accounted for using the equity method.

Fixed Assets

The Company's fixed assets consist of productive non-wood crops, land, buildings, roads and bridges, machinery and installations, wood stockpiles, heavy equipment and industrial machinery, motor vehicles, office equipment, and construction in progress. The Company recorded book value of fixed assets in 2023 amounted to IDR2.45 trillion,

Rp2,45 triliun, meningkat Rp201,58 miliar atau 8,96% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp2,25 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh perolehan tanaman produktif baru terutama pinus, kayu putih, dan lainnya.

Aset Biologis

Aset biologis merupakan produk hasil panen agrikultur (getah pinus dan daun kayu putih) dan kayu tegakan (tanaman jati dan pohon rimba lainnya). Aset biologis dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu produk agrikultur dan kayu tegakan siap panen (Aset Lancar) serta kayu tegakan (Aset Tetap). Pada tahun 2023, aset biologis tercatat Rp13,08 triliun, meningkat Rp594,04 miliar atau 3,59% dibandingkan pada 2022 sebesar Rp12,49 triliun.

Aset Pajak Tangguhan

Perusahaan mencatat aset pajak tangguhan beserta penyesuaian aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan pada tahun 2023 berjumlah Rp10,70 miliar, turun Rp6,71 miliar atau 38,54% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp17,41 miliar.

Aset Hak Guna

Perusahaan mencatat aset hak guna sebesar Rp53,06 miliar, meningkat Rp45,49 miliar atau 601,30% dari tahun 2022 sebesar Rp7,57 miliar. Aset hak guna merupakan aset sewaan berupa tanah dan kendaraan untuk kegiatan operasional.

Aset Tidak Lancar Lainnya

Pada 2023, aset tidak lancar lainnya tercatat Rp121,40 miliar, meningkat Rp64,63 miliar atau 4,27% dibandingkan pada 2022 sebesar Rp91,40 miliar. Peningkatan ini dikarenakan meningkatnya aset keuangan tidak lancar lainnya yaitu penempatan kas yang dibatasi penggunaannya.

LIABILITAS

Jumlah liabilitas Perusahaan pada 2023 tercatat Rp 5,82 triliun, meningkat Rp423,05 miliar atau 7,84% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp5,40 triliun. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya liabilitas jangka pendek sebesar Rp262,82 miliar atau 18,89%.

an increase of IDR201.58 billion or 8.96% compared to 2022 of IDR2.25 trillion. This increase was due to the acquisition of new productive plants, especially pine, Cajuput, and others.

Biological Assets

Biological assets represent agricultural harvest products (pine resin and Cajuput leaves) and standing wood (teak and other jungle trees). Biological assets are grouped into 2 (two), namely agricultural products and standing wood ready for harvest (Current Assets) and standing wood (Fixed Assets). In 2023, biological assets were IDR13.08 trillion, an increase of IDR594.04 billion or 3.59% compared to IDR12.49 trillion in 2022.

Deferred Tax Assets

The Company recorded deferred tax assets along with adjustments to deferred tax assets. Deferred tax assets in 2023 amounted to IDR10.70 billion, decreased by IDR6.71 billion or 38.54% compared to 2022 amounting to IDR17.41 billion.

Right of Use Assets

The Company recorded right of use assets amounting to IDR53.06 billion, an increase of IDR45.49 billion or 601.30% from 2022 amounting to IDR7.57 billion. Right of use assets represent leased assets in the form of land and vehicles for operational activities.

Other Non-Current Assets

In 2023, other non-current assets were IDR121.40 billion, an increase of IDR64.63 billion or 4.27% compared to 2022 of IDR 91.40 billion. This increase was due to the increase in other non-current financial assets, namely the placement of restricted cash.

LIABILITIES

The Company's total liabilities in 2023 were IDR5.82 trillion, an increase of IDR423.05 billion or 7.84% compared to 2022 of IDR5.40 trillion. This increase was influenced by an increase in current liabilities of IDR262.82 billion or 18.89%.

Tabel Liabilitas Tahun 2023 dan 2022 (dalam jutaan Rupiah)

Table of Liability for 2023 and 2022 (in million IDR)

Keterangan Description		2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) Increase/(Decrease)	
				Selisih Difference	%
Liabilitas Jangka Pendek	Current Liabilities				
Utang usaha	Account payables	258.266	163.550	94.716	57,91%
Beban akrual	Accrual expenses	232.796	362.486	(129.690)	(35,78%)
Utang pajak	Tax payable	261.803	127.062	134.741	106,04%
Pinjaman	Loans				
Pinjaman bank jangka pendek	Short-term bank loans	460.218	300.000	160.218	53,41%
Bagian lancar pinjaman bank jangka panjang	Current portion of long-term bank loans	52.368	52.489	(121)	(0,23%)
Bagian lancar atas Liabilitas sewa	Current portion of lease liabilities	26.978	5.491	21.487	391,31%
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	Other current liabilities	181.981	207.473	(25.492)	(12,29%)
Bagian lancar liabilitas imbalan kerja	Current portion of employee benefit liabilities	179.492	172.534	6.958	4,03%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	Total Current Liabilities	1.653.902	1.391.085	262.817	18,89%
Liabilitas Jangka Panjang	Non-Current Liabilities				
Pinjaman	Loans				
Pinjaman bank jangka Panjang	Long-term bank loans	110.000	69.178	40.822	59,01%
Pinjaman jangka Panjang lainnya	Other long-term loans	100.972	108.069	(7.097)	(6,57%)
Liabilitas sewa pembiayaan jangka Panjang	Long-term finance lease liabilities	33.364	3.178	30.186	949,84%
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	Other non-current liabilities	36.441	34.347	2.094	6,10%
Liabilitas pajak tangguhan	Deferred tax liabilities	2.288.624	2.262.119	26.505	1,17%
Liabilitas Imbalan kerja karyawan	Employee benefits liabilities	1.598.822	1.531.102	67.720	4,42%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	Total non-current liabilities	4.168.223	4.007.993	160.230	4,00%
Jumlah Liabilitas	Total Liabilities	5.822.125	5.399.078	423.047	7,84%

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek Perusahaan pada 2023 tercatat Rp1,65 triliun, meningkat sebesar Rp262,82 miliar atau 18,89% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,39 triliun. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya pinjaman bank jangka panjang dan utang pajak.

Current Liabilities

The Company's current liabilities in 2023 were IDR1.65 trillion, an increase of IDR262.82 billion or 18.89% compared to the year 2022 of IDR1.39 trillion. This increase was largely due to the increase in long-term bank loans and tax payables.

Utang Usaha

Utang usaha Perusahaan merupakan utang atas operasional lahan agroforestri, pembelian bibit, pupuk, stimulan getah, dan perlengkapan lainnya. Utang usaha pada 2023 tercatat Rp258,27 miliar, meningkat Rp94,72 miliar atau 57,91% dibandingkan pada 2022 sebesar Rp163,55 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp99,05 miliar atau 75,81%.

Beban Akrua

Beban akrual Perusahaan terdiri atas bonus dan liabilitas imbalan kerja, eksploitasi, tuntutan hukum, gaji dan tunjangan, tanaman dan operasional, dan lain-lain. Beban akrual pada tahun 2023 tercatat Rp232,80 miliar, turun Rp129,69 miliar atau 35,78% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp362,49 miliar. Penurunan terbesar karena tahun 2023 tidak terdapat akrual atas beban eksploitasi dimana pada tahun lalu tercatat sebesar Rp73,71 miliar.

Utang Pajak

Utang pajak terdiri dari pajak penghasilan dan pajak lain-lain. Perusahaan mencatat utang pajak pada 2023 sebesar Rp261,80 miliar, meningkat Rp134,74 miliar atau 106,04% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp127,06 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan utang Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun pajak 2023 sebesar Rp186,51 miliar atau 543,54%.

Pinjaman

Pinjaman jangka pendek perusahaan yang terdiri dari pinjaman bank dan pinjaman pihak ketiga. Pinjaman bank jangka pendek pada tahun 2023 tercatat Rp460,22 miliar, meningkat Rp160,22 miliar atau 53,41% dari tahun 2022 sebesar Rp300 miliar. Sementara bagian lancar pinjaman bank jangka panjang turun Rp121 juta atau 0,21% dari Rp52,49 miliar menjadi Rp52,37 miliar di tahun 2023.

Bagian lancar atas liabilitas sewa

Perusahaan mencatatkan bagian lancar atas liabilitas sewa yang merupakan kewajiban sewa atas peralatan kantor dengan masa sewa kurang dari 12 bulan. Bagian lancar atas liabilitas sewa tercatat sebesar Rp26,98 miliar meningkat sebesar Rp21,49 miliar atau 391,31% dari tahun 2022 sebesar Rp5,49 miliar.

Accounts Payable

The Company's account payables represent payables for agroforestry land operations, purchase of seeds, fertilizers, sap stimulants, and other equipment. Accounts payable in 2023 was IDR258.27 billion, an increase of IDR94.72 billion or 57.91% compared to 2022 of IDR163.55 billion. This increase was due to an increase in third-party account payables of IDR99.05 billion or 75.81%.

Accrual Expenses

The Company's accruals consist of bonuses and liabilities for employee benefits, exploitation, lawsuits, salaries and benefits, plant and operations, and others. Accrual expenses in 2023 were IDR232.80 billion, a decrease of IDR129.69 billion or 35.78% compared to 2022 of IDR362.49 billion. The largest decrease was due to the fact that in 2023 there was no accrual for exploitation expenses, which last year was IDR73.71 billion.

Tax Payable

Tax payable consists of income tax and other taxes. The Company recorded tax payable in 2023 amounting to IDR261.80 billion, an increase of IDR134.74 billion or 106.04% compared to 2022 amounting to IDR127.06 billion. This increase was due to an increase in Land and Building Tax payable for financial year 2023 amounting to IDR186.51 billion or 543.54%.

Loans

The company's short-term loans consist of bank loans and third-party loans. Short-term bank loans in 2023 were IDR460.22 billion, an increase of IDR160.22 billion or 53.41% from IDR300 billion in 2022. Meanwhile, the current portion of long-term bank loans decreased by IDR121 million or 0.21% from IDR52.49 billion to IDR52.37 billion in 2023.

Current portion of lease liabilities

The Company recorded current portion of lease liabilities, which represent lease obligations for office equipment with lease terms of less than 12 months. The current portion of rental liabilities was IDR26.98 billion, an increase of IDR21.49 billion or 391.31% from IDR5.49 billion in 2022.

Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

Liabilitas jangka pendek lainnya terdiri dari uang muka penjualan kayu dan hasil hutan bukan kayu, liabilitas lancar lainnya terutama uang muka kerjasama, serta dana reboisasi. Pada tahun 2023, liabilitas jangka pendek lainnya tercatat Rp181,98 miliar, menurun Rp25,49 miliar atau 12,29% dibanding tahun 2022 sebesar Rp207,47 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya uang muka penjualan sebesar Rp20,70 miliar atau 18,02%.

Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja pada tahun 2023 sebesar Rp179,49 miliar, meningkat sebesar Rp6,96 miliar atau 4,03% dibanding tahun 2022 sebesar Rp172,53 miliar.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang tercatat Rp4,17 triliun pada tahun 2023, meningkat Rp160,23 miliar atau 4,00% dibanding tahun 2022 sebesar Rp4,01 triliun. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp67,72 miliar atau 4,42%.

Pinjaman

Pinjaman jangka panjang Perusahaan terdiri atas pinjaman bank dan pinjaman pihak ketiga. Pada tahun 2023, pinjaman bank jangka panjang tercatat Rp110 miliar, meningkat Rp40,82 miliar atau 59,01% dibanding tahun 2022 yang tercatat Rp69,18 miliar. Sementara pinjaman jangka panjang lainnya tercatat turun Rp7,10 juta atau 6,57% dari Rp108,07 miliar menjadi Rp100,97 miliar. Pinjaman bank digunakan untuk kegiatan kredit investasi, kredit kendaraan bermotor, dana reboisasi, dan dana program kemitraan yang digunakan oleh induk perusahaan maupun anak perusahaan.

Liabilitas sewa pembiayaan jangka panjang

Perusahaan mencatatkan liabilitas sewa pembiayaan jangka panjang sebesar Rp33,36 miliar meningkat Rp30,19 miliar atau 949,84% dari tahun sebelumnya sebesar Rp3,18 miliar. Liabilitas sewa pembiayaan jangka panjang merupakan kewajiban sewa tanah dan kendaraan dengan masa sewa antara 2 hingga 3 tahun.

Other Current Liabilities

Other current liabilities consist of advances on sales of wood and non-wood forest products, other current liabilities mainly advances on cooperation, and reforestation funds. In 2023, other current liabilities were IDR181.98 billion, a decrease of IDR25.49 billion or 12.29% compared to IDR207.47 billion in 2022. The decrease was mainly due to a decrease in advance sales of IDR20.70 billion or 18.02%.

Current Portion of Employee Benefits Liabilities

The Company recorded liabilities for employee benefits in 2023 amounting to IDR179.49 billion, an increase of IDR6.96 billion or 4.03% compared to 2022 amounting to IDR172.53 billion.

Non-Current Liabilities

Non-Current liabilities were IDR4.17 trillion in 2023, an increase of IDR160.23 billion or 4.00% compared to IDR4.01 trillion in 2022. The increase was influenced by an increase in employee benefits liabilities of IDR67.72 billion or 4.42%.

Loans

The Company's long-term loans consist of bank loans and third-party loans. In 2023, long-term bank loans were IDR110 billion, an increase of IDR40.82 billion or 59.01% compared to 2022, which was IDR69.18 billion. Meanwhile, other long-term loans decreased by IDR7.10 million or 6.57% from IDR108.07 billion to IDR100.97 billion. Bank loans are used for investment credit activities, motor vehicle loans, reforestation funds, and partnership program funds used by the parent company and subsidiaries.

Long-term finance lease liabilities

The Company recorded long-term finance lease liabilities of IDR33.36 billion, an increase of IDR30.19 billion or 949.84% from the previous year of IDR3.18 billion. Long-term finance lease liabilities represent lease obligations for land and vehicles with lease periods between 2 to 3 years.

Liabilitas Jangka Panjang Lainnya

Liabilitas jangka panjang lainnya pada tahun 2023 tercatat Rp36,44 miliar, meningkat Rp2,09 miliar atau 6,10% dibanding tahun 2022 sebesar Rp34,35 miliar. Liabilitas jangka panjang lainnya terdiri dari dana reboisasi, iuran pensiun, utang potongan karyawan lainnya, iuran asuransi kesehatan, utang dana sosial, dan liabilitas keuangan jangka panjang lainnya.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan perusahaan pada tahun 2023 tercatat Rp2,29 triliun, meningkat Rp26,51 miliar atau 1,17% dibanding tahun 2022 sebesar Rp2,26 triliun terutama disebabkan oleh kewajiban pajak atas aset biologis akibat dampak perubahan tarif pajak.

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Perusahaan memberikan imbalan kerja karyawan dalam bentuk pemberian program masa persiapan pensiun dan imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa kompensasi masa kerja dan uang duka. Kewajiban imbalan kerja perusahaan pada tahun 2023 tercatat Rp1,60 triliun, meningkat Rp67,72 miliar atau 4,42% dibanding tahun 2022 sebesar Rp1,53 triliun karena ada bagian dana pensiun yang telah dibayarkan.

EKUITAS

Ekuitas Perusahaan terdiri dari modal negara, tambahan modal disetor, saldo laba yang belum dicadangkan dan dicadangkan, rugi komprehensif lainnya, dan kepentingan non-pengendali. Pada tahun 2023, Perusahaan mencatat jumlah ekuitas sebesar Rp12,14 triliun, meningkat sebesar Rp223,51 miliar atau 1,87% dibanding tahun 2022 sebesar Rp11,92 triliun. Peningkatan ini berasal dari akumulasi saldo laba dari laba tahun berjalan.

Other Non-Current Liabilities

Other non-current liabilities in 2023 were IDR36.44 billion, an increase of IDR2.09 billion or 6.10% compared to 2022 of IDR34.35 billion. Other non-current liabilities consist of reforestation funds, pension contributions, other employee deductions payable, health insurance contributions, social fund payable, and other long-term financial liabilities.

Deferred Tax Liabilities

The company's deferred tax liabilities in 2023 were IDR2.29 trillion, an increase of IDR26.51 billion or 1.17% compared to the year 2022 of IDR2.26 trillion mainly due to tax liabilities on biological assets due to the impact of changes in tax rates.

Employee Benefits Liability

The Company provides employee benefits in the form of retirement preparation programs and other long-term employee benefits in the form of long service compensation and bereavement. The company's employee benefit obligation in 2023 was IDR1.60 trillion, an increase of IDR67.72 billion or 4.42% compared to 2022 of IDR1.53 trillion due to a portion of the pension fund that has been paid.

EQUITY

The Company's equity consists of state capital, additional paid-in capital, unappropriated and reserved retained earnings, other comprehensive loss, and non-controlling interests. In 2023, the Company recorded total equity of IDR12.14 trillion, an increase of IDR223.51 billion or 1.87% compared to 2022 of IDR11.92 trillion. This increase came from accumulated retained earnings from the current year's profit.

Ekuitas Tahun 2023 dan 2022 (dalam jutaan Rupiah)

Equity in 2023 and 2022 (in million IDR)

Keterangan Description		2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) Increase/(Decrease)	
				Selisih Difference	%
Modal Negara	State Capital	2.586.303	2.586.303	0	0,00%
Tambahan Modal Disetor	Additional paid-up capital	(1.334.148)	(1.334.148)	0	0,00%
Saldo Laba:	Retained Earnings:				
Belum Dicadangkan	Unreserved	7.188.501	7.415.346	(226.845)	(3,06%)
Dicadangkan	Reserved				
Cadangan Tujuan Khusus	Special Purpose Reserve	103.145	103.145	0	0,00%
Cadangan Umum	General Reserve	3.607.921	3.158.024	449.897	14,25%
Ekuitas yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Equity attributable to Owners of the Parent Entity	12.151.722	11.928.670	223.052	1,87%
Kepentingan Non-Pengendali	Non-controlling interest	(7.392)	(7.845)	453	(5,77%)
Jumlah Ekuitas	Total Equity	12.144.330	11.920.825	223.505	1,87%

**Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian**

Analysis of the Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian Tahun 2022-2023

Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for 2022-2023

Keterangan Description		2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) Increase/(Decrease)	
				Selisih Difference	%
Pendapatan	Revenue	4.776.816	4.812.351	(35.535)	(0,74%)
Kayu	Wood	2.282.164	2.220.873	61.291	2,76%
Non Kayu	Non-Wood	1.900.504	1.998.553	(98.049)	(4,91%)
Lainnya	Others	594.148	592.925	1.223	0,21%
Beban Pokok Pendapatan	Cost of Goods Sold	(3.817.558)	(3.719.282)	(98.276)	2,64%
Perubahan Nilai Wajar Aset Biologis	Change in Fair Value of Biological Assets	759.251	(563.591)	133.531	21,34%
Laba Bruto	Gross Profit	959.258	1.093.069	(133.811)	(12,24%)
Perubahan Nilai Wajar Aset Biologis	Gains arising from changes in fair value of biological assets		625.720		
Beban Usaha	Operating Expenses				
Beban Pemasaran dan Distribusi	Marketing and Distribution Expenses	(74.284)	(85.396)	11.112	(13,01%)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian Tahun 2022-2023

Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for 2022-2023

Keterangan Description		2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) Increase/(Decrease)	
				Selisih Difference	%
Beban Umum dan Administrasi	General and Administrative Expenses	(1.029.244)	(1.122.126)	92.882	(8,28%)
Laba Usaha	Operating Profit	614.981	511.267	103.714	20,29%
Pendapatan lain-lain	Other Income	190.849	347.108	(156.259)	(45,02%)
Beban lain-lain	Other expenses	(111.874)	(158.245)	46.371	(29,30%)
Bagian laba entitas asosiasi	Share of profit (loss) of associates	6.703	23.876	(17.173)	(71,93%)
Pendapatan keuangan	Finance income	13.845	15.699	(1.854)	(11,81%)
Beban keuangan	Finance expense	(51.955)	(24.202)	(27.753)	114,67%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	Profit Before Income Tax	662.549	715.503	(52.954)	(7,40%)
Beban pajak penghasilan	Income tax benefit (expense)	(160.623)	(165.232)	4.609	(2,79%)
Laba Tahun Berjalan	Profit for the Year	501.926	550.271	(48.345)	(8,79%)
Penghasilan Komprehensif Lain	Other Comprehensive Income				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	Remeasurement of post-employment benefits	(228.745)	(89.955)	(138.790)	154,29%
Pajak penghasilan terkait	Related tax expense	50.324	19.790	30.534	154,29%
Rugi Komprehensif Lain Tahun Berjalan, setelah pajak	Other Comprehensive Loss for the Year, net of tax	(178.421)	(70.165)	(108.256)	154,29%
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	Total Comprehensive Income for the Year	323.505	480.106	(156.601)	(32,62%)
Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada:	Profit for the Year attributable to:				
Pemilik Entitas Induk	Owners of the Parent Entity	501.473	549.897	(48.424)	(8,81%)
Kepentingan Non-Pengendali	Non-controlling interest	453	374	79	21,12%
Jumlah	Total	501.926	550.271	(48.345)	(8,79%)
Total Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada:	Total Comprehensive Income/(Loss) Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk	Owners of the Parent Entity	323.052	479.732	(156.680)	(32,66%)
Kepentingan Non-Pengendali	Non-controlling interest	453	374	79	21,12%
Jumlah	Total	323.505	480.106	(156.601)	(32,62%)

Pendapatan

Pendapatan Perusahaan pada tahun 2023 tercatat Rp4,78 triliun, turun sebesar Rp35,54 miliar atau 0,74% dibanding tahun 2022 sebesar Rp4,81 triliun. Pendapatan Perusahaan berasal dari segmen kayu yaitu penjualan kayu bulat dan kayu olahan, segmen non kayu yaitu gondorukem, terpentin, dan minyak kayu putih, juga segmen lainnya yaitu ekowisata, agribisnis, dan lain-lain. Penurunan pendapatan dikarenakan turunnya segmen usaha non kayu sebesar Rp98,05 miliar atau 4,91% meskipun segmen usaha lainnya yaitu segmen kayu dan segmen usaha lainnya meningkat. Hal ini disebabkan dipengaruhi oleh menurunnya daya serap pasar dan peningkatan penggunaan minyak kayu putih impor oleh merk pengemasan besar lantaran harga lebih murah. Porsi pendapatan dari dalam negeri sebesar 65,33% dan pendapatan ekspor sebesar 34,67%.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan pada tahun 2023 tercatat Rp3,82 triliun, meningkat sebesar Rp98,28 miliar atau 2,64% dibanding tahun 2022 sebesar Rp3,72 triliun karena meningkatnya biaya eksploitasi tanaman sebesar Rp129,10 miliar atau 7,68%.

Laba Bruto

Pada 2023, Perusahaan mencatat laba bruto sebesar Rp959,26 miliar, menurun Rp133,81 miliar atau 12,24% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,09 triliun dikarenakan peningkatan beban pokok pendapatan sementara penjualan mengalami penurunan.

Beban Usaha

Beban usaha Perusahaan terdiri dari beban pemasaran dan distribusi serta beban umum dan administrasi yang secara total tercatat Rp1,10 triliun atau turun Rp103,99 miliar atau 8,61% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1,21 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban umum dan administrasi yang berasal dari beban pegawai.

Laba Usaha

Pada tahun 2023, Perusahaan mencatat laba usaha sebesar Rp614,98 miliar, turun Rp103,71 miliar atau 20,29% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp511,27 miliar.

Revenue

The Company's revenue in 2023 was IDR4.78 trillion, a decrease of IDR35.54 billion or 0.74% compared to 2022 of IDR4.81 trillion. The Company's revenue comes from the wood segment, namely sales of logs and processed wood, non-wood segments, namely gum rosin, turpentine, and Cajuput oil, as well as other segments, namely ecotourism, agribusiness, and others. The decrease in revenue was due to a decrease in the non-wood business segment of IDR98.05 billion or 4.91% even though the other business segments, namely the wood segment and other business segments, increased. This was due to decreased market absorption and increased use of imported Cajuput oil by large packaging brands due to lower prices. The portion of domestic revenue amounted to 65.33% and export revenue amounted to 34.67%.

Cost of Revenue

Cost of revenue in 2023 was IDR3.82 trillion, an increase of IDR98.28 billion or 2.64% compared to IDR3.72 trillion in 2022 due to an increase in plant exploitation costs of IDR129.10 billion or 7.68%.

Gross Profit

In 2023, the Company recorded gross profit of IDR959.26 billion, decreased by IDR133.81 billion or 12.24% compared to 2022 of IDR1.09 trillion due to an increase in cost of revenue while sales decreased.

Operating Expenses

The Company's operating expenses consist of marketing and distribution expenses and general and administrative expenses which in total amounted to IDR1.10 trillion, a decrease of IDR103.99 billion or 8.61% compared to the year 2022 of IDR1.21 trillion. This decrease was mainly due to the increase in general and administrative expenses from personnel expenses

Operating Profit

In 2023, the Company recorded an operating profit of IDR614.98 billion, a decrease of IDR103.71 billion or 20.29% compared to 2022 of IDR511.27 billion.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Perusahaan mencatat laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp662,55 miliar pada 2023. Sedangkan pada tahun 2022 laba sebelum pajak Perusahaan tercatat sebesar Rp715,50 miliar. Perusahaan mengalami penurunan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp52,95 miliar atau 7,40% dibanding tahun 2022.

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan Perusahaan terdiri atas pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak penghasilan tercatat Rp160,62 miliar pada tahun 2023, mengalami penurunan Rp4,61 miliar atau 2,79% dibanding tahun 2022 yang mencatatkan beban pajak penghasilan sebesar Rp165,23 miliar. Hal ini dikarenakan turunnya laba sebelum pajak tahun 2023 yang menjadi dasar pengenaan pajak. Selain itu, penurunan disebabkan oleh turunnya tarif stimulus dari pemerintah berupa manfaat atas pajak penghasilan yang berasal dari manfaat pajak tangguhan.

Stimulus Pemerintah untuk mendukung industri-industri dari dampak pandemi yaitu dengan mengurangi tarif Pajak Penghasilan Badan yang semula sebesar 25%; menjadi 22% untuk tahun 2020-2021 dan 20% untuk tahun 2022 dan seterusnya, sesuai dengan Pasal 5 bagian 1 dari Perppu No. 1 tahun 2020.

Laba Tahun Berjalan

Perusahaan mencatat laba tahun berjalan pada tahun 2023 sebesar Rp501,93 miliar, sedangkan pada tahun 2022 Perusahaan mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp550,27 miliar. Penurunan laba tahun berjalan sebesar Rp48,35 miliar atau 8,79% dikarenakan pada tahun 2022 beban pokok pendapatan meningkat dan turunnya penjualan.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Pada 2023, Perusahaan mencatat jumlah laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp323,51 miliar, menurun Rp156,60 miliar atau 32,62% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp480,11 miliar. Penurunan ini disebabkan turunnya laba tahun berjalan dan meningkatnya rugi komprehensif lain sebesar Rp108,26 miliar.

Profit Before Income Tax

The Company recorded profit before income tax of IDR662.55 billion in 2023. Whereas in 2022 the Company's profit before tax was IDR715.50 billion. The Company experienced a decrease in profit before income tax of IDR52.95 billion or 7.40% compared to 2022.

Income Tax Benefit (Expense)

The Company's income tax expense consists of current income tax and deferred income tax. Income tax was IDR160.62 billion in 2023, a decrease of IDR4.61 billion or 2.79% compared to 2022, which recorded income tax expense of IDR165.23 billion. It was due to a decrease in profit before tax in 2023 which became the basis for tax imposition. In addition, the decrease was due to the lower rate of stimulus from the government in the form of benefits on income tax derived from deferred tax benefits

The Government's stimulus to support industries from the impact of the pandemic is by reducing the Corporate Income Tax rate from 25%; to 22% for 2020-2021 and 20% for 2022 onwards, according to Article 5 section 1 of Perppu No. 1 of 2020.

Profit for the Year

The Company recorded a profit for the year in 2023 of IDR501.93 billion, while in 2022 the Company recorded a profit for the year of IDR550.27 billion. The decrease in profit for the year amounted to IDR48.35 billion or 8.79% due to the increase in cost of revenue and decrease in sales in 2022.

Total Comprehensive Income for the Year

In 2023, the Company recorded total comprehensive income for the year of IDR323.51 billion, a decrease of IDR156.60 billion or 32.62% compared to 2022 of IDR480.11 billion. This decrease was due to a decrease in profit for the year and an increase in other comprehensive loss of IDR108.26 billion.



Analisis Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Cash Flow Analysis

Laporan Arus Kas Konsolidasian Tahun 2023 dan 2022 (dalam jutaan Rupiah)

Consolidated Statements of Cash Flows for 2023 and 2022 (in millions IDR)

Keterangan Description		2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) Increase/(Decrease)	
				Selisih Difference	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Cash Flow from Operating Activities				
Penerimaan dari pelanggan	Receipts from customers	4.649.198	4.886.541	(237.343)	(4,86%)
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	Payment to suppliers	(2.456.056)	(2.629.782)	173.726	(6,61%)
Pembayaran kepada karyawan	Payment to employees	(1.992.278)	(1.951.044)	(41.234)	2,11%
Penerimaan lain-lain	Other receipts	33.896	396.271	(362.375)	(91,45%)
Pembayaran beban keuangan	Payment of financial expenses	(51.955)	(24.202)	(27.753)	114,67%
Pembayaran pajak penghasilan badan	Payment of corporate income tax	(103.889)	(189.790)	85.901	(45,26%)
Penarikan kas yang dibatasi penggunaannya jangka pendek	Withdrawal of restricted cash	0	42.184	(42.184)	(100,00%)
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya jangka pendek	Placement of restricted cash	(30.000)	(2.516)	(27.484)	1.092,37%
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	Net Cash Flow Provided by Operating Activities	48.916	527.662	(478.746)	(90,73%)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Cash Flow from Investing Activities				
Penarikan kas yang dibatasi penggunaannya jangka panjang	Withdrawal of long-term restricted cash	31.098	1.990	29.108	1.462,71%
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya jangka panjang	Placement of long-term restricted cash	(2,428)	(57.584)	55.156	(95,78%)
Penerimaan dividen	Dividend receipts	8.735	13.453	(4.718)	(35,07%)
Penerimaan dari divestasi entitas asosiasi	Proceeds from divestment of associates	5.616	21.350	(15.734)	(73,70%)
Penambahan aset biologis	Acquisition of biological assets	(135.252)	(217.463)	82.211	(37,80%)
Perolehan aset tetap	Acquisition of fixed assets	(333.521)	(275.867)	(57.654)	20,90%
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	Net Cash Flow Used for Investing Activities	(425.752)	(514.121)	88.369	(17,19%)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Cash Flow from Financing Activities				
Penerimaan pinjaman bank jangka pendek	Receipt of short-term bank loans	158.886	22.870	136.016	594,74%

Laporan Arus Kas Konsolidasian Tahun 2023 dan 2022 (dalam jutaan Rupiah)

Consolidated Statements of Cash Flows for 2023 and 2022 (in millions IDR)

Keterangan Description		2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) Increase/(Decrease)	
				Selisih Difference	%
Penerimaan pinjaman bank jangka panjang	Long-term bank loan receipts	104.970	30.000	74.970	249,90%
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	Long-term bank loan repayment	(66.489)	(60.442)	(6.047)	10,00%
Pembayaran pinjaman jangka panjang lainnya	Other long-term loan repayment	(7.097)	-	(7.097)	N/A
Pembayaran utang sewa	Payment of lease payable	(11.721)	(16.817)	5.096	(30,30%)
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham	Payment of cash dividends to shareholders	(100.000)	(50.000)	(50.000)	100,00%
Kas Neto yang Diperoleh (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	Net Cash Flow (Used For)/ Obtained from Financing Activities	78.549	(74.389)	152.938	(205,59%)
Penurunan Neto Kas dan Setara Kas	Net decrease - Cash and Cash Equivalents	(298.287)	(60.848)	(237.439)	390,22%
Dampak neto atas perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas	Net impact of exchange rate changes on cash	(720)	(4.445)	3.725	(83,80%)
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	558.460	623.753	(65.293)	(10,47%)
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	Cash and Cash Equivalents at End of Year	259.453	558.460	(299.007)	(53,54%)

Kas dan setara kas pada 2023 tercatat Rp259,45 miliar, mengalami penurunan Rp299,01 miliar atau 53,54% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp558,46 miliar. Penurunan tersebut jika dilihat dari arus kas berasal dari aktivitas operasi dimana pada tahun 2023 terdapat penurunan penerimaan lain-lain sebesar Rp362,38 miliar serta penurunan penerimaan dari pelanggan. Kas dan setara kas Perusahaan terdiri atas kas, kas pada bank berupa rupiah dan dollar Amerika Serikat, dan deposito jangka pendek dengan bank pemerintah dan swasta.

Cash and cash equivalents in 2023 were IDR259.45 billion, a decrease of IDR299.01 billion or 53.54% compared to IDR558.46 billion in 2022. The decrease, when viewed from cash flow, came from operating activities where in 2023 there was a decrease in other receipts of IDR362.38 billion and a decrease in revenue from customers. The Company's cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks denominated in IDR and USD, and short-term deposits with government and private banks.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi Perusahaan terdiri atas penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, penerimaan lainnya, pembayaran beban keuangan, pembayaran pajak penghasilan, dan penarikan dan penempatan kas yang dibatasi penggunaannya. Pada tahun 2023, arus kas dari aktivitas operasi

Cash Flow from Operating Activities

The Company's operating activities consist of receipts from customers, payments to suppliers, payments to employees, other receipts, payments of financial expenses, payments of income taxes, and withdrawals and placements of restricted cash. In 2023, cash flows provided by operating activities amounted to IDR48.92 billion, a decrease

sebesar Rp48,92 miliar, turun Rp478,75 miliar atau 90,73% dibanding tahun 2022 sebesar Rp527,66 miliar. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan penerimaan lain-lain sebesar Rp362,38 miliar atau 91,45% serta turunnya penerimaan dari pelanggan sebesar Rp237,34 miliar atau 4,86%.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi Perusahaan terdiri atas penempatan pada surat-surat berharga, penarikan dan penempatan kas yang dibatasi penggunaannya jangka panjang, penerimaan dividen, perolehan aset tak berwujud, penerimaan dari divestasi entitas asosiasi, perolehan aset biologis, dan perolehan dan penjualan aset tetap. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2023 sebesar Rp425,75 miliar, turun Rp88,37 miliar atau 17,19% dibanding tahun 2022 sebesar Rp514,12 miliar. Penurunan ini dipengaruhi terutama dikarenakan turunnya penambahan aset biologis sebesar Rp82,21 miliar atau 37,80%.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan Perusahaan terdiri dari penerimaan dan pembayaran pinjaman bank baik jangka pendek maupun jangka panjang, penerimaan dan pembayaran pinjaman jangka panjang lainnya, pembayaran sewa, dan pembayaran dividen kepada pemilik modal. Pada tahun 2023, arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tercatat Rp78,55 miliar, dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencatatkan penggunaan arus kas sebesar Rp74,39 miliar. Perubahan ini disebabkan karena adanya peningkatan penerimaan pinjaman bank baik jangka pendek maupun jangka panjang masing-masing sebesar Rp136,02 miliar dan Rp74,97 miliar.

Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas

Akibat dari aktivitas Perusahaan di atas, tercatat penurunan bersih kas dan setara kas sebesar Rp298,29 miliar pada tahun 2023, terdapat perubahan sebesar Rp237,44 miliar dibanding tahun 2022 yang mencatatkan penurunan sebesar Rp60,85 miliar. Sehingga setelah ditambahkan dengan saldo awal kas dan setara kas, saldo akhir pada tahun 2023 menjadi Rp259,45 miliar, turun Rp299,01 miliar atau 53,54% dibanding tahun 2022 sebesar Rp558,46 miliar.

of IDR478.75 billion or 90.73% compared to IDR527.66 billion in 2022. This decrease was mainly due to a decrease in other income of IDR362.38 billion or 91.45% and a decrease in revenue from customers of IDR237.34 billion or 4.86%.

Cash Flow from Investing Activities

The Company's investing activities consist of placement in marketable securities, withdrawal and placement of long-term restricted cash, receipt of dividends, acquisition of intangible assets, divestment of associates, acquisition of biological assets, and acquisition and sale of property and equipment. Cash flows used for investing activities in 2023 amounted to IDR425.75 billion, a decrease of IDR88.37 billion or 17.19% compared to IDR514.12 billion in 2022. This decrease was mainly due to a decrease in the addition of biological assets of IDR82.21 billion or 37.80%.

Cash Flow from Financing Activities

The Company's financing activities consist of receipts and payments of bank loans both short-term and long-term, receipts and payments of other long-term loans, lease payments, and dividend payments to owners of capital. In 2023, cash flows obtained from financing activities were IDR78.55 billion, compared to 2022, which recorded the use of cash flows of IDR74.39 billion. This change was due to an increase in the receipt of bank loans both short-term and long-term amounting to IDR136.02 billion and IDR74.97 billion, respectively.

Net Increase in Cash and Cash Equivalents

As a result of the Company's activities above, there was a net decrease in cash and cash equivalents of IDR298.29 billion in 2023, a change of IDR237.44 billion compared to 2022, which recorded a decrease of IDR60.85 billion. So that after adding the initial balance of cash and cash equivalents, the final balance in 2023 was IDR259.45 billion, a decrease of IDR299.01 billion or 53.54% compared to 2022 of IDR558.46 billion



Analisis Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian

Laporan perubahan ekuitas pada akhir 2023 memperlihatkan jumlah modal sebesar Rp2,59 triliun dan tambahan modal disetor Rp1,33 triliun yang tidak mengalami perubahan dari tahun 2022. Selain itu, terdapat saldo laba belum dicadangkan sebesar Rp7,19 triliun, cadangan tujuan khusus Rp103,15 miliar, dan cadangan umum Rp3,61 triliun. Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp12,15 triliun dan kepentingan non-pengendali Rp7,39 miliar.

Analysis of the Consolidated Statement of Changes in Equity

The statement of changes in equity at the end of 2023 shows total capital of IDR2.59 trillion and additional paid-in capital of IDR1.33 trillion, which has not changed from 2022. In addition, there were unappropriated retained earnings of IDR7.19 trillion, purpose reserve of IDR03.15 billion, and general reserve of IDR3.61 trillion. Equity attributable to owners of the parent entity was IDR12.15 trillion and non-controlling interests at IDR7.39 billion.

Analisis Rasio Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Ratio Analysis

RASIO KINERJA KEUANGAN (%)

Financial Performance Ratio (%)

Uraian Description		2023	2022	2021	2020	2019
Rasio Kas	Cash Ratio	15.69	40,15	40,68	60,31	79,88
Rasio Lancar	Current Ratio	127.37	169,71	176,03	214,31	222,64
Rasio Utang terhadap Aktiva	Debt to Assets Ratio	32.41	31,17	32,58	32,19	33,38
Rasio Utang terhadap Ekuitas	Debt to Equity Ratio	47.94	45,29	48,33	47,47	50,11
Rasio Pendapatan Operasional	Operating Income Ratio	12.87	10,62	16,70	6,29	5,20
Rasio Laba Bersih terhadap Aset	Net Income to Assets Ratio	2.79	3,18	2,51	4,51	1,25
Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas	Net Profit to Equity Ratio	4.13	4,30	3,72	6,65	1,87
Rasio Laba Bersih terhadap Investasi	Net Profit to Investment Ratio	3.21	4,58	2,98	5,42	2,41
Marjin Laba Bersih	Net Profit Margin	10.51	11,43	9,31	19,06	4,95

Berikut adalah analisis mengenai rasio keuangan konsolidasian penting yang menggambarkan pencapaian kinerja keuangan dan operasional Perusahaan pada 2023 dan 2022.

The following is an analysis of key consolidated financial ratios that illustrate the Company's financial and operational performance achievements in 2023 and 2022.

Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kemampuan Perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya, yang tercermin pada rasio kas dan rasio lancar.

Rasio kas (*cash ratio*) Perusahaan pada 2023 sebesar 15,69%, menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 40,15%. Hal ini berarti bahwa kas dan setara kas Perusahaan masih mampu memenuhi liabilitas jangka pendeknya sebanyak 0,2 kali atau 1 rupiah liabilitas jangka pendek Perusahaan dapat dijamin pembayarannya dengan 0,2 rupiah kas dan setara kas Perusahaan.

Rasio lancar (*current ratio*) Perusahaan pada 2023 tercatat 127,37%, menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 169,71%. Hal ini berarti bahwa aset lancar Perusahaan mampu memenuhi liabilitas jangka pendek Perusahaan sebanyak 1,27 kali atau

Liquidity Ratio

Liquidity Ratio is a measure used to calculate the Company's ability to meet its current liabilities, which is reflected in the cash ratio and current ratio.

The Company's cash ratio in 2023 amounted to 15.69%, down from 40.15% in 2022. It means that the Company's cash and cash equivalents are still able to meet its current liabilities by 0.2 times or 1 rupiah of the Company's current liabilities can be guaranteed by 0.2 rupiah of the Company's cash and cash equivalents.

The Company's current ratio in 2023 was 127.37%, decrease from 169.71% in 2022. It means that the current assets are able to meet the current liabilities as much as 1.27 times or IDR1 of the current liabilities can be guaranteed payment with

1 rupiah liabilitas jangka pendek Perusahaan dapat dijamin pembayarannya dengan 1,27 rupiah aset lancar.

Rasio Leverage atau Solvabilitas

Rasio Leverage atau Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemampuan ini antara lain dapat diukur melalui rasio liabilitas terhadap aset (*debt to total asset*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset Perusahaan dibiayai dengan liabilitas Perusahaan, dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset, semakin besar rasio ini maka semakin besar kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi.

Selain itu, kemampuan Perusahaan juga dapat diukur dari rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to total equity*), yang digunakan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan liabilitasnya, dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas, semakin kecil rasio ini, maka semakin baik.

Rasio liabilitas terhadap aset Perusahaan pada 2023 tercatat 32,41% atau sedikit menurun dari tahun 2022 sebesar 31,17%. Hal ini berarti bahwa perusahaan didanai oleh liabilitasnya hanya sekitar 30% dan menunjukkan bahwa pendanaan perusahaan masih dapat dibiayai oleh aset yang dimiliki.

Rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) Perusahaan pada 2023 tercatat 47,94% atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 45,29%. Hal ini menunjukkan besarnya pendanaan Perusahaan yang dibiayai oleh total liabilitas masih lebih kecil dengan pendanaan yang dibiayai ekuitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan Perusahaan yang dibiayai oleh kreditor lebih kecil dari pendanaan yang dibiayai oleh pemilik modal.

Semakin besar nilai kedua rasio diatas, maka semakin besar liabilitas yang dimiliki Perusahaan, artinya semakin besar kewajiban Perusahaan yang harus dipenuhi.

1.27 rupiah of current assets.

Leverage or Solvency Ratio

Leverage or Solvency Ratio shows the Company's ability to pay all its obligations, both short-term and long-term. This ability, among others, can be measured through the ratio of liabilities to assets (*debt to total assets*), which is a ratio used to measure the extent to which the Company's assets are financed by the Company's liabilities, calculated by comparing total liabilities with total assets, the greater this ratio, the greater the company's obligations that must be met.

In addition, the Company's ability can also be measured from the ratio of liabilities to equity (*debt to total equity*), which is used to measure how much part of each rupiah of own capital is used as collateral for all its liabilities, calculated by comparing total liabilities to total equity, the smaller this ratio, the better.

The Company's liabilities to assets ratio in 2023 was 32.41% or slightly decreased from 2022 of 31.17%. It means that the company is funded by its liabilities only around 30% and shows that the company's funding can still be financed by its assets.

The Company's debt to equity ratio in 2023 was 47.94% or an increase compared to 2022 of 45.29%. It shows that the amount of the Company's funding financed by total liabilities is still smaller than the funding financed by its equity. This shows that the Company's funding financed by creditors is smaller than the funding financed by capital owners.

The greater the value of the two ratios above, the greater the liabilities the Company has, meaning the greater the Company's obligations that must be met.

Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah ukuran yang dipergunakan Perusahaan untuk menghitung hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil manajemen yang akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen dalam mengelola Perusahaan. Rasio ini merupakan rasio utama dalam seluruh laporan keuangan, karena tujuan utama Perusahaan adalah hasil operasi/keuntungan. Adapun tingkat profitabilitas perusahaan pada 2022 ditunjukkan dengan rasio *Net Profit Margin*, *Return on Investment* dan *Return on Equity*.

Rasio Marjin Laba Bersih

Pada tahun 2023, Perusahaan mencatat *rasio profit margin* sebesar 10,51%, berarti bahwa besarnya presentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari setiap penjualannya sebesar 10,51% atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 11,43%.

Rasio Laba Bersih terhadap Investasi

Pada tahun 2023, Perusahaan mencatat rasio *return on investment* sebesar 3,21% atau turun bila dibandingkan dengan 2022 sebesar 4,58%. Penurunan ini disebabkan adanya penjualan aset investasi Perusahaan yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional.

Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas

Pada tahun 2023, Perusahaan mencatat rasio *return on equity* sebesar 4,13% atau sedikit menurun bila dibandingkan dengan 2022 sebesar 4,30%. Peningkatan ini disebabkan karena turunnya perolehan laba bersih.

Profitability Ratio

Profitability ratio is a measure used by the Company to calculate the net result of various policies and decisions taken by management which will provide a final answer about the effectiveness of management in managing the Company. This ratio is the main ratio in all financial statements, because the main objective of the Company is operating results / profits. The level of profitability of the company in 2022 is shown by the ratio of Net Profit Margin, Return on Investment and Return on Equity.

Net Profit Margin Ratio

In 2023, the Company recorded a profit margin ratio of 10.51%, meaning that the percentage of net profit earned by the company from each of its sales was 10.51% or an increase compared to 2022 of 11.43%.

Net Income to Investment Ratio

In 2023, the Company recorded a return-on-investment ratio of 3.21% or decreased when compared to 2022 of 4.58%. This decrease was due to the sale of the Company's investment assets used to support operational activities.

Net Income to Equity Ratio

In 2023, the Company recorded a return on equity ratio of 4.13% or a slight decrease compared to 2022 of 4.30%. This increase was due to a decrease in net income.

Tinjauan Keuangan Lainnya

Other Financial Overview

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan membayar utang dapat dilihat melalui rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek antara lain dapat diukur melalui rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan cara membandingkan kas dan setara kas yang dimiliki Perusahaan dengan jumlah liabilitas jangka pendeknya, sedangkan rasio lancar dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendeknya.

Rasio Likuiditas (%)

Liquidity Ratio (%)

Uraian Description		2023	2022	Δ%
Rasio kas	Cash ratio	15,69	40,15	(24,46)
Rasio Lancar	Current ratio	127,37	169,71	(42,33)

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajibannya antara lain dapat diukur melalui rasio liabilitas terhadap aset (*debt to total asset ratio*) dengan cara membandingkan total liabilitas terhadap total asetnya dan rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) dengan cara membandingkan jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitasnya.

Rasio Solvabilitas (%)

Solvency Ratio (%)

Uraian Description		2023	2022	Δ%
Rasio Utang terhadap Aktiva	Debt to Asset Ratio	32,41	31,17	1,23
Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Aktiva	Long-term Debt to Assets Ratio	23,20	23,14	0,06
Rasio Utang terhadap Ekuitas	Debt to Equity Ratio	47,94	45,29	2,65
Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas	Long-term Debt to Equity Ratio	34,32	33,62	0,70

Solvency

The ability to pay debts can be seen through liquidity and solvency ratios. Liquidity ratios show the Company's ability to meet current liabilities, among others, can be measured through cash ratios and current ratios. The cash ratio is calculated by comparing the Company's cash and cash equivalents with its current liabilities, while the current ratio can be calculated by comparing total current assets with total current liabilities

Solvency ratio shows the Company's ability to pay its obligations, among others, can be measured through debt to total asset ratio by comparing total liabilities to total assets and debt to equity ratio by comparing total liabilities to total equity.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut dapat diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan non usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

Kolektibilitas piutang usaha dan piutang non usaha ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tak tertagih, dihapuskan secara langsung untuk mengurangi nilai tercatatnya. Kolektibilitas piutang Perusahaan berdasarkan *collection period ratio* pada 2023 sebesar 18 hari, lebih lambat 10 hari dari tahun 2022 sebesar 8 hari. Hal ini disebabkan piutang usaha relatif meningkat. Piutang usaha Perusahaan merupakan piutang jangka pendek karena kolektibilitasnya di bawah satu tahun. Perusahaan tidak memiliki piutang jangka Panjang.

Accounts Receivable Collectability Level

Account receivables represent amounts due from customers for the sale of merchandise or services in the normal course of business. If receivables are expected to be collected within one year or less (or within the normal operating cycle if longer), they are classified as current assets. Otherwise, they may be classified as non-current assets.

Account and non-account receivables are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, where the effect of discounting is significant, less provisions for impairment.

The collectibility of account and non-account receivables is reviewed periodically. Receivables that are known to be uncollectible are written off immediately to reduce their carrying value. The collectibility of the Company's receivables based on collection period ratio in 2023 amounted to 18 days, 10 days later than in 2022 of 8 days. It is due to the relative increase in account receivables. The Company's account receivables are short-term receivables because their collectibility is under one year. The Company has no long-term receivables.

Kolektibilitas Piutang (Rp Juta)

Accounts Receivable Collectability (IDR million)

Uraian Description		2023	2022
Lancar	Current	138.158	20.797
Jatuh tempo:	Maturity:		
1-30 hari	1-30 days	37.136	55.451
30-90 hari	30-90 days	25.247	26.977
Lebih dari 90 hari	More than 90 days	169.206	132.271
Penyisihan penurunan nilai pihak ketiga	Allowance for impairment of third parties	(136.017)	(130.409)
Piutang usaha, bersih	Account receivables, net	233.730	105.087

Struktur Modal

Capital Structure

Tujuan utama pengelolaan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa rasio modal tetap terjaga untuk mendukung bisnis Perusahaan. Pemilihan ini didasarkan pada penyesuaian yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap kondisi perekonomian Indonesia dan lebih mempertimbangkan risiko bisnis yang ada.

The key objective of the Company's management is to ensure that the capital ratio is maintained to support the Company's business. This selection is based on adjustments made by the Company to Indonesia's economic conditions and more consideration of existing business risks.

Struktur Modal (Rp Juta)

Capital Structure (IDR million)

Keterangan Description		2023	%	2022	%	Δ	Δ%
Jumlah Liabilitas	Total Liabilities	5.822.125	32,41%	5.399.078	31,17%	423.047	7,84%
Liabilitas berbasis bunga	Interest-based liabilities	783.900	4,36%	538.405	3,11%	245.495	45,60%
Jumlah Ekuitas	Total Equity	12.144.330	67,59%	11.920.825	68,83%	223.505	1,87%
Jumlah modal	Total Capital	17.966.455	100,00%	17.319.903	100,00%	646.552	3,73%

Komposisi struktur modal Perusahaan pada 2023 lebih didominasi oleh ekuitas dibanding liabilitas. Pada tahun 2023, aset yang dibiayai ekuitas adalah sebesar 67,59%, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar 68,83%, sedangkan aset yang dibiayai liabilitas adalah sebesar 32,41% lebih tinggi dibandingkan pada 2022 sebesar 31,17%.

The composition of the Company's capital structure in 2023 is more dominated by equity than liabilities. In 2023, equity-financed assets amounted to 67.59%, lower than in 2022 at 68.83%, while liability-financed assets amounted to 32.41% higher than in 2022 at 31.17%.

Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Perusahaan mengelola struktur modal dan hasil pengembalian kepada Pemilik Modal yang optimal dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan profitabilitas baik masa sekarang maupun yang akan datang, perkiraan arus kas operasi, estimasi belanja modal, dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

Management Policy on Capital Structure

The Company manages the optimal capital structure and return to equity by considering future capital requirements and profitability both present and future, forecasted operating cash flows, estimated capital expenditures, and projected strategic investment opportunities.

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Material Bonds for Capital Investment

Perusahaan memiliki ikatan yang material dengan mitra untuk investasi belanja modal pada tahun 2023 untuk beberapa tujuan sebagai berikut:

The Company has material ties with partners for capital expenditure investment in 2023 for the following purposes:

Uraian Description		Tujuan Purpose		Pihak Kedua Second Party
Pengembangan Wisata	Tourism Development	Pengembangan Wana Wisata Penggaron di Jawa Tengah	Development of Wana Wisata Penggaron in Central Java	PT Penggaron Sarana Semesta
Optimalisasi Aset Tanaman	Optimization of Plant Assets	Pemanfaatan Persemaian Proyek Penanaman Tanaman Biomassa	Utilization of Nursery for Biomass Planting Project	PT KOFPI
Optimalisasi Aset Tanaman	Optimization of Plant Assets	Pemanfaatan Persemaian Proyek Penanaman Tanaman Biomassa	Nursery Utilization of Biomass Planting Project	PT Kaliandra Merah Nusantara
Pengembangan Wisata	Tourism Development	Alih Kelola Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pengelolaan dan Pengusahaan Rest Area.	Transfer of Environmental Services Utilization Management and Rest Area Business.	PT Palawi Risorsis
Pengembangan Wisata	Tourism Development	Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Beserta Fasilitas dan Sarana Pendukung yang Berlokasi di Rest Area KM 626 jalur A dan B jalan tol Trans Jawa Ruas Tol Ngawi Kertosono Kediri.	Cooperation agreement for the implementation of Public Fuel Filling Stations (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum: SPBU) along with supporting facilities and facilities located at rest area KM 626 line A and B of Trans Java toll road Ngawi Kertosono Kediri.	PTPR
Pengembangan Wisata	Tourism Development	Perjanjian Kerja Sama Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam di Wana Wisata Menoreh View Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur.	Cooperation Agreement for Business Utilization of Nature Tourism Environmental Services at Wana Wisata Menoreh View of the Borobudur Tourism Area Authority Zone.	BPOB

Sumber dana yang digunakan selain dari Perusahaan dan mitra, juga berasal dari perbankan dan investor lainnya. Seluruh mata uang yang menjadi digunakan dalam transaksi atau perikatan adalah dalam rupiah sehingga tidak ada risiko nilai tukar mata asing.

The source of funds used in addition to the Company and partners, also comes from banks and other investors. All currencies used in transactions or contracts are in Indonesia Rupiah (IDR) so there is no foreign exchange risk.

Investasi Barang Modal

Investment in Capital Goods

Realisasi investasi tahun 2023 tercapai sebesar Rp328,90miliar, atau 33,48% dari RKAP tahun 2022 yang ditargetkan sebesar Rp982,39 miliar. Realisasi ini menurun sebesar Rp303,26 miliar atau 47,97% dari realisasi investasi tahun 2022 sebesar Rp632,16 miliar.

Investment realization in 2023 was achieved at IDR328,90 billion, or 33.48% of the 2022 RKAP targeted at IDR982.39 billion. This realization increased by IDR303.26 billion or 47.97% from the investment realization in 2022 of IDR632.16 billion.

Investasi Barang Modal (Rp Juta)

Investment in Capital Goods (IDR million)

Keterangan Description		2023	2022	Δ	Δ%
INVESTASI ASET TETAP	FIXED ASSET INVESTMENT	81.704	70.161	11.543	16,45%
Bangunan dan tanah	Buildings and land	46.558	30.924	15.634	50,56%
Jalan dan jembatan	Roads and bridges	157	3.998	(3.841)	(96,07%)
Bengkel dan Instalasi	Workshop and installation	6.475	267	6.208	2.325,09%
Tempat Penimbunan (Kayu dan Getah)	Stockpiles (Wood and Sap)	765	-	765	N/A
Mesin/alat industri	Industrial machinery/ tools	1.205	24.484	(23.279)	(95,08%)
Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	Motor Vehicles and Heavy Equipment	16.926	-	16.926	N/A
Perlengkapan Kantor dan Kendaraan Tak Bermotor	Office Supplies and Non-Motorized Vehicles	9.618	10.487	(869)	(8,29%)
ASET TANAMAN	FOREST RESOURCES INVESTMENT	188.309	538.343	(350.034)	(65,02%)
Tanaman Rutin	Routine Crops	117.653	431.764	(314.111)	(72,75%)
Tanaman Pembangunan (Agroforestry & Biomassa)	Development Crops (Agroforestry & Biomass)	70.656	106.578	(359.22)	(33,70%)
IT & WISATA	IT & TOURISM	27.974	12.470	26.727	2.143,30%
Teknologi Informasi	Information Technology	27.974	8.373	19.601	234,10%
Wisata	Tourism	-	4.097	(4.097)	(100,00%)
Anak Perusahaan	Subsidiary	30.910	11.185	(8.094)	(72,36%)
TOTAL INVESTASI	TOTAL INVESTMENT	328.897	632.158	(303.261)	(47,97%)

Perbandingan Antara Target Pada Awal Tahun Buku Dengan Hasil Yang Dicapai (Realisasi), dan Target atau Proyeksi Yang Ingin Dicapai Untuk Satu Tahun Mendatang

Comparison between the Target at the Beginning of the Financial Year and the Results Achieved (Realization), and Targets or Projections to be Achieved for the Next Year



Perbandingan Antara Target pada Awal Tahun Buku Dengan Hasil yang Dicapai (Realisasi), dan Target atau Proyeksi yang Ingin Dicapai untuk Satu Tahun Mendatang

Comparison between the Target at the Beginning of the Financial Year and the Results Achieved (Realization), and Targets or Projections to be Achieved for the Next Year

(Rp Juta) (IDR million)		Realisasi Realization 2023	Target 2023	Pencapaian Achievement	Proyeksi Projection 2024
Aset Lancar	Current Assets	2.106.655	3.032.556	69,47%	2.825.942
Aset Tidak Lancar	Non-current Assets	15.859.800	15.279.488	103,80%	16.017.869
Jumlah Aset	Total Assets	17.966.455	18.312.043	98,11%	18.843.812
Liabilitas Jangka Pendek	Current Liabilities	1.653.902	1.486.107	111,29%	1.656.980
Liabilitas Jangka Panjang	Non-Current Liabilities	4.168.223	4.272.185	97,57%	4.344.706
Jumlah Liabilitas	Total Liabilities	5.822.125	5.758.292	101,11%	6.001.686
Ekuitas	Equity	12.144.330	12.553.751	96,74%	12.842.126

Struktur Modal

Capital Structure

(Rp Juta) (IDR million)		Realisasi Realization 2023	Target 2023	Pencapaian Achievement	Proyeksi Projection 2024
Jumlah Liabilitas	Total Liabilities	5.822.125	5.758.292	101,11%	6.001.686
Jumlah Ekuitas	Total Equity	12.144.330	12.553.751	96,74%	12.842.126
Jumlah modal	Total Capital	17.966.455	18.312.043	98,11%	18.843.812

Realisasi aset lancar tahun 2023 sebesar Rp2,11 miliar mencapai 69,47% dari target RKAP 2023. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp2,36 triliun, mengalami penurunan 10,76% atau sebesar Rp254,14 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan kas, karena turunnya penjualan, serta penurunan aset biologis bagian lancar.

Realisasi aset tidak lancar tahun 2023 sebesar Rp15,86 triliun atau 103,80% dari target RKAP 2023. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 meningkat sebesar Rp900,69 miliar. Kenaikan ini karena pertumbuhan nilai aset biologis dan bertumbuhnya investasi tanaman baru.

The realization of current assets in 2023 amounted to IDR2.11 billion, reaching 69.47% of the 2023 RKAP target. When compared to the year 2022 of IDR2.36 trillion, it decreased by 10.76% or IDR254.14 billion. This decrease was caused by a decrease in cash, due to a decrease in sales, as well as a decrease in the current part of biological assets.

The realization of non-current assets in 2023 amounted to IDR15.86 trillion or 103.80% of the 2023 RKAP target. When compared to 2022, it increased by IDR900.69 billion. This increase was due to the growth in the value of biological assets and the growth of new plant investments.

Perusahaan memproyeksikan aset lancar pada RKAP 2024 akan mencapai Rp2,83 triliun dan aset tidak lancar pada RKAP 2024 akan mencapai Rp16,02 triliun.

Realisasi liabilitas jangka pendek tahun 2023 sebesar Rp1,65 triliun mencapai 111,29% dari target RKAP tahun 2023. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1,39 triliun meningkat sebesar 18,89% atau Rp262,82 miliar. Peningkatan ini karena penerimaan pinjaman bank jangka pendek serta bagian lancar atas pinjaman bank jangka panjang.

Realisasi Liabilitas Jangka Panjang tahun 2023 sebesar Rp4,17 triliun atau sebesar 97,57% dari RKAP tahun 2023. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp4,01 triliun, maka meningkat Rp160,23 miliar atau sebesar 4,00%. Peningkatan liabilitas karena adanya perhitungan pengatribusian imbalan paska kerja PSAK 24 dan peningkatan penerimaan pinjaman bank jangka panjang serta liabilitas sewa jangka panjang.

Perusahaan memproyeksikan liabilitas jangka pendek pada RKAP 2024 akan mencapai Rp1,66 triliun dan liabilitas jangka panjang akan mencapai Rp4,34 triliun.

The company projects that current assets in the 2024 RKAP will reach IDR2.83 trillion and non-current assets in the 2024 RKAP will reach IDR16.02 trillion.

The realization of current liabilities in 2023 of IDR1.65 trillion reached 111.29% of the 2023 RKAP target. When compared to the year 2022 of IDR1.39 trillion, it increased by 18.89% or IDR262.82 billion. This increase was due to the receipt of short-term bank loans and the current portion of long-term bank loans.

Realization of Non-Current Liabilities in 2023 amounted to IDR4.17 trillion or 97.57% of the 2023 RKAP. When compared to 2022 of IDR4.01 trillion, it increased by IDR160.23 billion or 4.00%. The increase in liabilities is due to the calculation of post-employment benefits attribution PSAK 24 and an increase in long-term bank loan receipts and long-term lease liabilities.

The company projects that current liabilities in the 2024 RKAP will reach Rp1.66 trillion and non-current liabilities will reach Rp4.34 trillion.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian (Rp Juta)

Consolidated Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income (IDR million)

Keterangan Description		Realisasi Realization 2023	Target 2023	Pencapaian Achievement	Proyeksi Projection 2024
Pendapatan	Revenue	4.776.816	5.120.327	93,29%	5.023.219
Beban Pokok Pendapatan	Cost of Revenue	(3.817.558)	(3.278.813)	116,43%	3.807.699
Laba Bruto	Gross Profit	959.258	1.841.514	52,09%	1.877.118
Perubahan Nilai Wajar Aset Biologis	Change in Fair Value of Biological Assets	759.251	685.048	110,83%	661.598
Beban Usaha	Operating Expenses	(1.103.528)	(1.115.395)	98,94%	1.151.236
Beban Pemasaran dan Distribusi	Marketing and Distribution Expenses	74.284	68.931	107,77%	76.121
Beban Umum dan Administrasi	General and Administrative Expenses	1.029.244	1.046.464	98,35%	1.075.115
Laba Usaha	Operating Profit	614.981	726.119	84,69%	725.882
Pendapatan Lainnya, Bersih	Other Income, Net	47.568	8.955	531,19%	17.356
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	Profit Before Income Tax	662.549	735.074	90,13%	743.238
Beban Pajak Penghasilan	Income Tax Expense	(160.623)	(161.716)	99,32%	163.512
Laba Tahun Berjalan	Profit for the Year	501.926	573.358	87,54%	579.725

Realisasi pendapatan usaha pokok tahun 2023 sebesar Rp4,78 triliun atau tercapai 93,29% dari target RKAP tahun 2023 sebesar Rp5,12 triliun. Ketidakcapaian terhadap RKAP bersumber dari volume penjualan kayu maupun non kayu yang belum tercapai terhadap RKAP, sedangkan pendapatan juga ditopang oleh capaian harga rata-rata penjualan yang volatil akibat kondisi pasar global yang belum stabil sehingga berdampak pada permintaan.

Laba Bersih Konsolidasian Perusahaan tahun 2023 tercatat sebesar Rp501,93 miliar. Laba tahun berjalan tersebut mencapai 87,54% bila dibandingkan dengan RKAP tahun 2023 sebesar Rp573,36 miliar. Ketidakcapaian ini dikarenakan pertumbuhan capaian pendapatan, baik pendapatan usaha dan pendapatan lainnya dari induk usaha maupun entitas anak.

Perusahaan memproyeksikan pendapatan pada RKAP 2024 akan mencapai Rp5,02 triliun sedangkan laba tahun berjalan pada RKAP 2024 akan mencapai Rp579,73 miliar.

The realization of basic operating income in 2023 amounted to IDR4.78 trillion or achieved 93.29% of the 2023 RKAP target of IDR5.12 trillion. Non-achievement against the RKAP stemmed from the sales volume of wood and non-wood that has not been achieved against the RKAP, while revenue was also supported by the achievement of volatile average sales prices due to unstable global market conditions that have an impact on demand.

The Company's Consolidated Net Profit for the year was recorded at IDR501.93 billion. The profit for the year reached 87.54% when compared to the 2023 RKAP of IDR573.36 billion. This non-achievement is due to the growth in revenue achievements, both operating revenues and other revenues from the parent company and subsidiaries.

The company projects that revenue in the 2024 RKAP will reach IDR5.02 trillion while profit for the year in the 2024 RKAP will reach IDR579.73 billion.

Operasional (Rp Juta)

Operational (IDR million)

Keterangan Operations		Realisasi Realization 2023	Target 2023	Pencapaian Achievement	Proyeksi Projection 2024
Beban Pemasaran (Rp Juta)	Marketing Expenses (IDR Million)	74.284	68.931	107,77%	76.121
Jumlah SDM (orang)	Number of Employees (people)	14.215	14.969	94.96%	14.164
Produksi	Production				
Kayu Bulat (m ³)	Logs (m ³)	916.108	931.737	98.32%	934.633
Kayu Olahan (m ³)	Processed Wood (m ³)	24.008	28.296	84.85%	37.791
Non kayu	Non-wood				
Getah pinus (ton)	Pine sap (tons)	104.067	90.359	115.17%	96.328
Daun kayu putih (ton)	Cajuput leaf (tons)	27.059	53.481	50.60%	-
Finished Product Jati (m ³)	Teak Wood Finished Product (m ³)	457	748	61.10%	2.803
Finished Product Rimba (m ³)	Non-Teak Wood Finished Product (m ³)	10.000	8.450	118.34%	12.528

Secara total, produksi kayu bulat tahun 2023 tercapai 916.108 m³ atau 98,32% dari RKAP tahun 2023 yang direncanakan produksi kayu sebanyak 931.737 m³. Sementara untuk produk non kayu juga belum mencapai target dikarenakan kondisi cuaca, yaitu curah hujan dengan intensitas yang tinggi mempengaruhi kegiatan proses produksi, penjualan, dan angkutan di lokasi penebangan. Pencapaian perhutani sebesar 104.067 ton pada

In total, round wood production in 2023 reached 916,108 m³ or 98.32% of the 2023 RKAP which planned wood production of 931,737 m³. Meanwhile, non-wood products also did not reach the target due to weather conditions, namely rainfall with high intensity affecting production, sales and transportation activities at logging sites. However, pine resin production of 104,067 tons was the highest achievement since 2010. Perhutani's

tahun 2023 merupakan pencapaian tertinggi sejak tahun 2010.

Total *finished product* tercapai 10.457 m³ atau 113,69% dari RKAP tahun 2023 sebanyak 9.198 m³. Produksi *finished product* berada di atas RKAP sehubungan dengan pasokan log kayu yang memadai masuk ke industri maupun mitra kerjasama.

Realisasi beban pemasaran sepanjang tahun 2023 sebesar Rp74,28 miliar atau 107,77% dari RKAP tahun 2023 sebesar Rp68,93 miliar dan bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp85,40 miliar, maka mengalami penurunan sebesar 13,01%. Penurunan ini terjadi seiring dengan turunnya pendapatan sehingga biaya agen atas kecepatan pembayaran oleh mitra dan biaya angkutan menurun.

Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2022

Company Sound Level

Indikator Asesmen Assessment Indicators		Standar Kinerja Performance Standard	2022
Aspek Keuangan	Financial Aspect	70,00	42,00
Aspek Operasional	Operational Aspect	15,00	13,80
Aspek Administrasi	Administrative Aspect	15,00	15,00
Total Skor	Total Score	100,00	70,80
Tingkat Kesehatan	Sound Level		Sehat /A/ Healthy

Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2023

Tingkat kesehatan BUMN dinilai menggunakan peringkat (rating) yang didasarkan pada Pemingkatan. Penilaian Tingkat Kesehatan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Untuk tahun 2023, pemingkatan Kesehatan Perusahaan Perhutani dilakukan oleh *Fitch Rating*.

Laporan tingkat kesehatan BUMN disusun dan disampaikan oleh Direksi dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan BUMN. Laporan tingkat kesehatan BUMN merupakan laporan Peringkat Korporasi yang meliputi Peringkat Berdiri Sendiri (*stand alone rating*) dan Peringkat Akhir (*final rating*).

Laporan Peringkat Berdiri Sendiri digunakan untuk kepentingan analisis kinerja dan pembinaan BUMN, sedangkan Laporan Peringkat Akhir digunakan sebagai bahan pertimbangan Berdasarkan hasil rating tersebut, Perhutani dikategorikan sebagai Perusahaan dengan peringkat A-Ibn Outlook Stabil sesuai dengan penilaian oleh Fitch Rating.

achievement of 104,067 tons in 2023 is the highest achievement since 2010.

Total finished products reached 10,457 m³ or 113.69% of the 2023 RKAP of 9,198 m³. Finished Product production was above the RKAP due to adequate supply of logs to the industry and cooperation partners.

The realization of marketing expenses throughout 2023 amounted to IDR74.28 billion or 107.77% of the 2023 RKAP of IDR68.93 billion and when compared to the same period in 2022 of IDR85.40 billion, it decreased by 13.01%. This decrease occurred in line with the decline in revenue so that agent fees for speed of payment by partners and transportation costs decreased.

Company Soundness Level in 2023

The soundness level of SoE is assessed using a rating based on the rating. The soundness level assessment is carried out once a year. For 2023, Perhutani's company soundness rating is carried out by Fitch Rating.

The SoE soundness level report is prepared and submitted by the Board of Directors and is part of the SoE Annual Report. The SoE soundness level report is a corporate rating report that includes the stand-alone rating and the final rating.

The stand-alone rating report is used for the purpose of analyzing SoE performance and coaching, while the final rating report is used as a consideration. Perhutani is categorized as a Company with an A-Ibn Stable Outlook rating according to the assessment by Fitch Rating.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts that Occurred After the Accountant's Report Date

Tidak terdapat kejadian yang bersifat material yang terjadi di Perusahaan setelah tanggal laporan akuntan.

There are no material events that occurred in the Company after the date of the accountant's report.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen yang Dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP)

Employee and/or Management Share Ownership Program Implemented by the Company (ESOP/MSOP)

Saham Perusahaan sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah RI, oleh sebab itu tidak terdapat informasi mengenai kepemilikan saham oleh karyawan maupun manajemen lainnya.

The Company's shares are fully owned by the Government of Indonesia, therefore there is no information regarding share ownership by employees or other management.

Dividen

Dividend

Untuk tahun 2023, Hasil Rapat Pembahasan Bersama dengan Kementerian BUMN perusahaan dikenakan dividen. Berdasarkan Surat Nomor S-356/MBU/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perum Kehutanan Negara Tahun Buku 2022 telah ditetapkan besaran dividen yang akan dibayar oleh Perum Perhutani dengan perhitungan sebagai berikut:

For the year 2023, the results of the Joint Discussion Meeting with the Ministry of SOEs, the company is subject to dividends. Based on Letter Number S-356/MBU/06/2023 dated June 27, 2023 concerning Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements of Perum Perhutani for the Financial Year 2022, the amount of dividends to be paid by Perum Perhutani has been determined with the following calculation

Dividen

Dividend

	Keterangan Description	Satuan Unit	2023	2022
Laba Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Profit Attributable to Owners of the Parent Entity	Rp juta Rp million	549.897	427.873
Payout Ratio	Payout Ratio	%	18.19%	11,69%
Nilai	Value	Rp juta Rp million	100.000	50.000
Cadangan	Reserves	Rp juta Rp million	449.897	377.873

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering

Hingga 31 Desember 2023, Perhutani merupakan BUMN yang tidak memperjualbelikan sahamnya pada Bursa Efek.

Until December 31, 2023, Perhutani is a SOE that does not trade its shares on the Stock Exchange.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties

Pihak Berelasi dan Sifat Hubungan

Pihak-pihak berelasi adalah perusahaan dan perorangan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan. Pihak berelasi termasuk anak usaha, Pemilik Modal pengendali dan mayoritas, induk dari Pemilik Modal mayoritas, dan Pemilik Modal akhir.

Pengungkapan saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Related Parties and Nature of Relation

Related parties are companies and individuals that have direct or indirect ownership or management relations with the Company. Related parties include subsidiaries, controlling and majority owners, parents of majority owners, and ultimate owners.

Disclosure of significant balances and transactions with related parties is as follows:

Pengungkapan Saldo dan Transaksi Signifikan dengan Pihak-Pihak Berelasi

Disclosure of Significant Balances and Transactions with Related Parties

Sifat Hubungan Nature of Relation	Pihak berelasi Related Party		Jenis Transaksi Type of Transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah Entities related to the Government	BRI, BTN, BNI, Mandiri, BPD dan Bank Syariah Indonesia, BTN Syariah, Bank Muamalat	BRI, BTN, BNI, Mandiri, BPD dan Bank Syariah Indonesia, BTN Syariah, Bank Muamalat	Penempatan dana pada bank dan penghasilan dan beban keuangan, Deposito berjangka, Pinjaman, Kas yang dibatasi penggunaannya. Placement of funds with banks and financial income and expenses, Time deposits, Loans, restricted cash.
	PT Perkebunan Nusantara III	PT Perkebunan Nusantara III	Pembelian bibit macadamia Purchase of macadamia seedlings
	PT Perkebunan Nusantara X dan XI	PT Perkebunan Nusantara X dan XI	Pembelian bibit tebu Purchase of sugarcane seedlings
	Kementerian Keuangan	Ministry of Finance	Kredit investasi Investment credit
	PT Nindya Karya	PT Nindya Karya	Pendapatan Kerjasama operasional Operational cooperation income

Pengungkapan Saldo dan Transaksi Signifikan dengan Pihak-Pihak Berelasi

Disclosure of Significant Balances and Transactions with Related Parties

Sifat Hubungan Nature of Relation	Pihak berelasi Related Party		Jenis Transaksi Type of Transaction
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Timah (Persero), PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perum Jasa Tirta I, PT Pertamina	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Timah (Persero), PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk, Minister For Public Works and Human Settlements, Perum Jasa Tirta I, PT Pertamina	Pendapatan jasa rehabilitasi Rehabilitation service income
	Pemda Kab. Ponorogo, Pemprov Jawa Barat, PT Geo Dipa Energi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Blitar	Pemda Kab. Ponorogo, Pemprov Jawa Barat, PT Geo Dipa Energi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Blitar	Pendapatan lain-lain Other income
	PT Telkom (Persero), Tbk	PT Telkom (Persero), Tbk	Beban jasa telekomunikasi Beban jasa telekomunikasi
Pemilik modal Capital owner	Pemerintah Indonesia	Government of Indonesia	Kekayaan Negara yang disisihkan, investasi surat utang negara State assets set aside, investment in government bonds
Entitas asosiasi Associated entities	PT Idec Abadi Wood Industries, PT HK Realtindo, PT Hutan Kintap	PT Idec Abadi Wood Industries, PT HK Realtindo, PT Hutan Kintap	Pendapatan penjualan kayu Wood sales revenue

Jumlah Transaksi Material dengan Pihak Berelasi

Rincian item yang terkait dengan transaksi pihak-pihak berelasi:

Total Material Transactions with Related Parties

Details of items related to related party transactions:

Rincian Item yang Terkait dengan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (Rp Juta)

Details of items Related to Related Party Transactions (IDR million)

Keterangan Description		2023	2022	Δ	Δ%
KAS DAN SETARA KAS/ CASH AND CASH EQUIVALENTS					
Kas pada bank	Cash at bank				
Entitas berelasi dengan Pemerintah	Entities related to the Government	222.402	461.884	(239.482)	(51,85%)
Deposit berjangka	Time deposits				
Entitas berelasi dengan Pemerintah	Entities related to the Government	34.947	92.678	(57.731)	(62,29%)
Jumlah	Total	257.349	554.562	(297.213)	(53,59%)
KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA/RESTRICTED CASH					
Kas pada bank	Cash at banks				
Entitas berelasi dengan Pemerintah	Entities related to the Government	70.143	51.000	19.143	37.54%

Rincian Item yang Terkait dengan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (Rp Juta)

Details of items Related to Related Party Transactions (IDR million)

Keterangan Description		2023	2022	Δ	Δ%
Deposito berjangka	Time deposit				
Entitas berelasi dengan Pemerintah	Entities related to the Government	31.000	60.000	(29.000)	(48.33%)
Jumlah	Total	101.143	111.000	(9.857)	(8.88%)
INVESTASI PADA SURAT-SURAT BERHARGA/INVESTASI PADA SURAT-SURAT BERHARGA					
Entitas berelasi dengan Pemerintah	Entities related to the Government	-	-		
PIUTANG USAHA/ACCOUNTS RECEIVABLE					
Entitas berelasi dengan Pemerintah	Entities related to the Government	12.012	17.923	(5.911)	(32.98%)
Penyisihan penurunan nilai	Provision for impairment	155	2.774	152.226	5.487.60%
Jumlah	Total	11.857	15.149	(3.292)	(21.73%)
ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR LAINNYA/OTHER NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS					
Kas pada bank	Cash at banks				
Entitas berelasi dengan Pemerintah	Entities related to the Government	104.507	72.079	32.428	44.99%
Deposito berjangka	Time deposits				
Entitas berelasi dengan Pemerintah	Entities related to the Government	2.449	2.749	(300)	(10.91%)
Jumlah	Total	106.956	74.828	32.128	42.94%
UTANG USAHA/OPERATING DEBT					
Entitas berelasi dengan Pemerintah	Entities related to the Government	28.572	32.902	(4.330)	(13.16%)
PINJAMAN/BORROWINGS/LOANS					
Pinjaman bank jangka pendek	Short-term bank loans	460.218	300.000	160.218	53.41%
Pinjaman bank jangka panjang	Long-term bank loans	162.368	121.667	40.701	33.45%
Pinjaman jangka panjang lainnya	Other long-term loans	11.664	13.883	(2.219)	(15.98%)
PENDAPATAN/INCOME					
Jumlah	Total	63.538	97.044	(33.506)	(34.53%)
PENDAPATAN LAINNYA/ OTHER INCOME					
Entitas berelasi dengan pemerintah	Government-related entities	11.413	53.528	(42.115)	(78.68%)
BEBAN KEUANGAN/ FINANCIAL EXPENSES					
Entitas berelasi dengan pemerintah	Government-related entities	37.614	19.558	18.056	92.32%

Alasan Dilakukannya Transaksi

Seperti halnya transaksi pada umumnya, transaksi dengan Pihak Berelasi yang dilakukan Perusahaan dilakukan untuk mendukung operasional Perusahaan.

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan Perusahaan dengan Pihak-pihak Berelasi/ Berafiliasi telah diungkapkan pada laporan keuangan, dan telah sesuai dengan standar PSAK 7 (revisi 2014) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Semua transaksi dengan pihak yang berelasi, dilakukan dengan persyaratan, tingkat harga, dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Tidak ada perbedaan kebijakan harga dan syarat transaksi antara pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga.

Kebijakan Perusahaan Terkait Mekanisme Review atas Transaksi

Mekanisme review Perusahaan atas transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi dilakukan melalui proses audit, khususnya audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik dan dipublikasikan, dimana mekanisme ini tertuang dalam PSAK 7 (revisi 2014) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dilakukan melalui upaya pengungkapan PSAK 7 (revisi 2014) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dalam laporan keuangan Perusahaan tahun 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Reason for Transaction

As with transactions in general, transactions with Related Parties conducted by the Company are carried out to support the Company's operations.

Explanation of Fairness of Transactions

The fairness of all transactions carried out by the Company with Related Parties has been disclosed in the financial statements, and is according to the standards of PSAK 7 (revised 2014) concerning "Related Party Disclosures". All transactions with related parties are carried out on normal terms, price levels and conditions as those carried out with third parties and have been disclosed in the financial statements. There is no difference in pricing policy and transaction terms between related parties and third parties.

Company Policy on Review Mechanism of Transactions

The Company's review mechanism for transactions with Related Parties is carried out through the audit process, especially audits that have been carried out by public accountants and published, where this mechanism is stated in PSAK 7 (revised 2014) concerning "Related Party Disclosures".

Fulfillment of Related Regulations and Provisions

Fulfillment of related rules and regulations, namely Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia is carried out through efforts to disclose PSAK 7 (revised 2014) concerning "Related Party Disclosures" in the Company's 2021 financial statements which have been audited by a Public Accountant.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan

Changes in Laws and Regulations that Significantly Affect the Company

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.16/MenLHK/Setjen/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024.

Peraturan ini diterbitkan berdasarkan pertimbangan untuk menyelaraskan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan KLHK untuk periode 2020-2024. Dalam Renstra KLHK 2020-2024 ini telah dirumuskan langkah-langkah sistematis ke dalam rumusan visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, hingga program dan kegiatan dengan target kinerja terukur yang selaras demi mendukung terwujudnya Visi KLHK yaitu Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat. Harapan yang ingin dicapai tercermin pada 4 pilar dari perwujudan tujuan KLHK sebagai berikut:

- (1) Pilar Lingkungan yakni Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim,
- (2) Pilar Ekonomi yakni Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup,
- (3) Pilar Sosial, yakni Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan, dan
- (4) Pilar Tata Kelola yakni Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

Dengan adanya peraturan ini tentunya mendukung Perusahaan untuk mencapai visi misi dan target Perusahaan dengan lebih baik lagi.

Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. 1 of 2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Environment and Forestry number P.16/MenLHK/Setjen/Set.1/8/2020 concerning the Strategic Plan of the Ministry of Environment and Forestry 2020-2024.

This regulation was issued based on considerations to harmonize the Ministry of Environment and Forestry's Strategic Plan 2020-2024.

The Ministry of Environment and Forestry (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: KLHK) Strategic Plan (Rencana Strategis: Renstra) 2020-2024 is the KLHK development planning document for the period 2020-2024. In this Renstra KLHK 2020-2024, systematic steps have been formulated into the formulation of vision and mission, goals, strategic objectives, to programs and activities with measurable performance targets that are aligned to support the realization of KLHK's Vision, namely the Sustainability of Forest Resources and the Environment for Community Welfare. The expectations to be achieved are reflected in the 4 pillars of the realization of KLHK's goals as follows

- (1) Environmental Pillar, namely Environmental Conditions and Forests that are increasingly responsive to Climate Change,
- (2) Economic Pillar, namely the Actualization of Economic Potential from Forest and Environmental Resources,
- (3) Social Pillar, namely Equitable Utilization of Forests for Communities, and
- (4) Governance Pillar, namely accountable, responsive and excellent service governance in the LHK sector.

The existence of this regulation certainly supports the Company to achieve the Company's vision and mission and targets even better.

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir

Changes in Accounting Policies Applied by the Company in the Last Financial Year

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK"). Standar dan interpretasi baru/revisi lain yang berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 1: Penyajian laporan keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap – Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Reformasi Pajak Internasional – Ketentuan Model Pilar Dua

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, perubahan-perubahan tersebut tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Changes in Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretation of Statement of Financial Accounting Standards ("ISAK"). Other new/revised standards and interpretations that are effective for financial years beginning on or after January 1, 2023, are as follows:

- Amendment to PSAK No. 1: Presentation of financial statements - Disclosure of accounting policies
- Amendment to PSAK 16: Property, Plant and Equipment - Results before Intended Use
- Amendment to PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors related to the Definition of Accounting Estimates
- Amendment to PSAK 46: Income Taxes - Deferred Taxes Related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction
- Amendment to PSAK 46: Income Taxes - International Tax Reform - Pillar Two Model Provisions

At the time of issuance of these consolidated financial statements, these amendments have not resulted in substantial changes to the Company's accounting policies and a material effect on the amounts reported for the current or prior year.

Informasi Kelangsungan Usaha

Business Continuity Information

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, perekonomian berangsur kembali seperti sebelum merebaknya COVID-19 ditandai dengan dibukanya aktivitas perdagangan barang dan jasa serta kunjungan wisatawan. Meskipun sejumlah tantangan menghampiri seperti konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, volatilitas harga energi, dan nilai tukar mata uang. Tantangan tersebut mempengaruhi, antara lain, permintaan global untuk produk dan layanan dan rantai pasokan. Manajemen telah menilai dampak yang mungkin timbul dari peristiwa ini terhadap operasi perusahaan dan percaya bahwa tidak ada dampak negatif yang signifikan pada tanggal penandatanganan laporan keuangan konsolidasian. Namun, manajemen akan terus memantau situasi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko terkait di masa depan.

Assessment Manajemen akan Kelangsungan Usaha Tahun 2023

Manajemen berkeyakinan tidak memiliki hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usahanya. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian kinerja operasional Perhutani yang optimal dan meningkat setiap tahunnya.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Assessment

Asumsi kelangsungan usaha Perhutani didasarkan pada asumsi-asumsi dari internal Perusahaan yang giat memperkuat kinerja operasionalnya.

Matters Potentially Significantly Affecting the Company's Business Continuity in 2023

Throughout 2023, the economy gradually returned to pre-COVID-19 levels, marked by the opening of trade activities in goods and services and tourist visits. Although a number of challenges approached such as geopolitical conflicts in the Middle East region, volatility in energy prices, and currency exchange rates. Such challenges affect, among others, global demand for products and services and the supply chain. Management has assessed the possible impact of these events on the company's operations and believes that there is no significant negative impact as at the date of signing the consolidated financial statements. However, management will continue to monitor the situation and take necessary actions to address the related risks in the future.

Management's Assessment of Business Continuity in 2023

Management believes that there are no matters that have the potential to significantly affect the continuity of its business. This can be seen from the achievement of Perhutani's operational performance, which is optimal and increases every year.

Assumptions Used by Management in Conducting Assessment

Perhutani's business continuity assumptions are based on assumptions from within the Company that are actively strengthening its operational performance.

Kontribusi Kepada Negara

Contribution to the Country

Perusahaan memberikan kontribusi finansial kepada negara dalam bentuk pembayaran dividen dan kewajiban pajak. Dalam hal perpajakan, Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak. Kontribusi Perusahaan ke kas negara tercatat pada tahun 2023 sebesar Rp702,37 miliar, menurun 19,85% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp876,28 miliar.

Companies make financial contributions to the state in the form of dividend payments and tax obligations. In terms of taxation, the Company is committed to fulfilling its obligations as a Taxpayer, Tax Withholder and Tax Collector. The Company's contribution to the state treasury was recorded in 2023 at IDR702.37 billion, a decrease of 19.85% compared to 2022 of IDR876.28 billion.

Kontribusi Finansial Kepada Negara (Rp Juta)

Financial Contribution to the Country (IDR million)

Keterangan Information		2023	2022	Δ	Δ%
PPH BADAN/ CORPORATE INCOME TAX					
PPH pasal 22	Income tax article 22	-	-	-	-
PPH pasal 23	Income tax article 23	-	8.130	(8.130)	(100.00%)
PPH pasal 25/29	Income tax article 25/29	95.458	180.440	(84.982)	(47,10%)
PPH pasal 4 ayat 2	Income tax article 4 paragraph 2	50	349	(299)	(85.67%)
Jumlah PPH badan	Total corporate income tax	95.508	159.238	(63.730)	(40.02%)
PPH PIHAK III/THIRD PARTY INCOME TAX					
PPH pasal 21	Income tax article 21	64.772	50.290	14.482	28,80%
PPH pasal 22	Income tax article 22	3.046	2.702	344	12,73%
PPH pasal 23	Income tax article 23	12.536	10.691	1.845	17,26%
PPH pasal 4 ayat 2/Final	Income tax article 4 paragraph 2/Final	5.395	2.997	2.398	80,01%
Jumlah PPH Pihak III	Total income tax of third party	85.749	66.679	19.070	28,60%
PPN/ VAT					
PPN Keluaran	Output VAT	217.210	212.147	5.063	2,39%
PPN Masukan	Input VAT	72.460	41.597	30.863	74,20%
Jumlah PPN	Total VAT	289.670	253.744	35.926	14,16%
PBB					
PBB	PBB	46.973	237.899	(190.926)	(80.26%)
PNBP					
IHH/PSDH	IHH/PSDH	83.349	76.276	7.073	9,27%
Retribusi	Retribution	561	2.765	(2.204)	(79,71%)
Jumlah PNBP	Total PNBP	83.910	79.041	4.869	6,16%
Dividen/Dividend					
Dividen	Dividend	100.000	50.000	50.000	100.00%
TOTAL KONTRIBUSI FINANSIAL KEPADA NEGARA	TOTAL FINANCIAL CONTRIBUTION TO THE COUNTRY	702.374	876.283	173.909	80,2%







5

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE
GOVERNANCE

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Pernyataan Komitmen untuk Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) Perhutani

Perhutani berkomitmen penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam seluruh aspek operasional dan manajemen perusahaan. Komitmen ini merupakan wujud tanggung jawab kami dalam memastikan praktik bisnis yang transparan, akuntabel, responsif, independen, dan berkeadilan.

- 1. Transparansi:** Perhutani berkomitmen untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Kami memastikan semua informasi yang relevan tersedia untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan adil oleh pihak yang berkepentingan.
- 2. Akuntabilitas:** Kami bertanggung jawab atas seluruh keputusan dan tindakan yang diambil oleh manajemen dan karyawan. Sistem pelaporan dan evaluasi kinerja kami dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu di Perhutani memahami, mampu, dan bersedia mempertanggungjawabkan kinerjanya.
- 3. Responsibilitas:** Perhutani mengedepankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam setiap aktivitas bisnisnya. Kami berupaya untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan serta menjaga dan memelihara sumber daya alam secara bijaksana.
- 4. Independensi:** Kami menjamin kemandirian dalam membuat keputusan yang bebas dari tekanan dan intervensi pihak-pihak luar, sehingga dapat menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi perusahaan.
- 5. Keadilan:** Kami memastikan perlakuan yang adil dan sama bagi semua pemangku kepentingan. Kami menghargai hak-hak semua pihak dan berkomitmen untuk menegakkan kesetaraan dan non-diskriminasi dalam setiap kebijakan dan tindakan perusahaan.

Dengan teguh memegang prinsip-prinsip ini, Perhutani yakin dapat membangun reputasi perusahaan yang kuat dan tepercaya, serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan

Statement of Commitment to Good Corporate Governance (GCG) Perhutani

Perhutani is fully committed to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) in all aspects of the company's operations and management. This commitment is a manifestation of our responsibility in ensuring transparent, accountable, responsive, independent, and fair business practices.

- 1. Transparency:** Perhutani is committed to providing clear, accurate, and accessible information to all stakeholders. We ensure that all relevant information is available to enable informed and fair decision-making by stakeholders.
- 2. Accountability:** We are responsible for all decisions and actions taken by management and employees. Our performance reporting and evaluation system is designed to ensure that every individual at Perhutani understands, is able, and is willing to be accountable for their performance.
- 3. Responsibility:** Perhutani prioritizes social and environmental responsibility in all its business activities. We strive to contribute to sustainable development and to protect and preserve natural resources wisely.
- 4. Independence:** We guarantee independence in making decisions that are free from pressure and intervention from external parties, so as to maintain integrity in carrying out the company's duties and functions.
- 5. Fairness:** We ensure fair and equal treatment for all stakeholders. We respect the rights of all parties and are committed to upholding equality and non-discrimination in all company policies and actions.

By firmly adhering to these principles, Perhutani is confident that it can build a strong and trusted corporate reputation, as well as provide sustainable added value to all stakeholders including the

bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat, karyawan, pemegang saham, dan mitra usaha. Kami percaya bahwa penerapan GCG yang konsisten dan berkelanjutan adalah kunci keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang.

Dasar Penerapan

Dalam melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perhutani berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum, sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Republik Indonesia:**
 - a. **Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara:** Mengatur tentang tata kelola dan pengelolaan BUMN untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
 - b. **Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:** Menjabarkan mengenai pengelolaan, tanggung jawab, dan kewajiban perusahaan terbatas, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan.
 - c. **Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:** Mensyaratkan keterbukaan informasi yang dimiliki badan publik demi tersedianya informasi yang akurat dan bertanggung jawab kepada publik.
 - d. **Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:** Menetapkan pedoman untuk aktivitas yang bertujuan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang guna menciptakan bisnis yang sehat dan bersih.
2. **Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN):**
 - a. **Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara:** Memberikan pedoman mengenai tata kelola serta kegiatan korporasi yang signifikan untuk memastikan praktek GCG di setiap BUMN.
 - b. **Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan**

community, employees, shareholders, and business partners. We believe that consistent and sustainable implementation of GCG is the key to the company's long-term success.

Basis of Implementation

In implementing the principles of Good Corporate Governance, Perhutani is guided by various laws and regulations that serve as legal basis, as follows:

1. **Laws of the Republic of Indonesia:**
 - a. **Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises:** Regulates the governance and management of BUMN to increase its contribution to the national economy.
 - b. **Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies:** Describes the management, responsibilities, and obligations of limited liability companies, and upholds the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and equality.
 - c. **Law No. 14 of 2008 concerning Openness of Public Information:** Requires openness of information held by public bodies in order to provide accurate and accountable information to the public.
 - d. **Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering:** Establishes guidelines for activities aimed at preventing and eradicating money laundering in order to create a healthy and clean business.
2. **Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN):**
 - a. **Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises:** Provides guidelines on governance and significant corporate activities to ensure GCG practices in each BUMN.
 - b. **Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human**

Usaha Milik Negara: Mengatur mengenai tata kelola organ perusahaan dan sumber daya manusia dalam BUMN untuk meningkatkan kompetensi dan tata kelola yang bertanggung jawab serta profesional.

Resources of State-Owned Enterprises: Regulates the governance of corporate organs and human resources in BUMN to improve competence and responsible and professional governance

Dengan berlandaskan pada undang-undang dan peraturan tersebut, Perhutani berkomitmen untuk menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai panduan utama dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. Penerapan yang konsisten diharapkan dapat menciptakan kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas yang diperlukan dalam menjamin keberlanjutan usaha dan memberikan kontribusi positif kepada seluruh pemangku kepentingan.

Based on these laws and regulations, Perhutani is committed to making GCG principles the main guideline in every aspect of company management. Consistent implementation is expected to create trust, transparency, and accountability needed to ensure business sustainability and provide positive contributions to all stakeholders.

Secara internal, Implementasi GCG di Perhutani didasarkan pada beberapa keputusan penting, di antaranya:

Internally, the implementation of GCG in Perhutani is based on several important decisions, including:

1. Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perum Perhutani Nomor: 10/DWAS-PHT/2019 dan Nomor: 1829/KPTS/DIR/2019 tentang Panduan Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) Perum Perhutani. Keputusan ini menyediakan panduan dan pedoman tentang tata kelola perusahaan yang baik di Perum Perhutani sebagai bagian dari implementasi GCG.
2. Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perum Perhutani Nomor 12/KPTS/DIR/02/2021 Tentang Penanggung Jawab Penerapan dan Pemantauan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Lingkungan Perum Perhutani. Keputusan ini menetapkan penanggung jawab dalam menerapkan dan memantau penerapan prinsip-prinsip GCG di Perum Perhutani, sehingga memastikan bahwa tata kelola perusahaan dijalankan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

1. Joint Decree of the Supervisory Board and Directors of Perum Perhutani Number: 10/DWAS-PHT/2019 and Number: 1829/KPTS/DIR/2019 concerning the Code of Corporate Governance of Perum Perhutani. This decision provides guidance and guidelines on good corporate governance in Perum Perhutani as part of the implementation of GCG.
2. Joint Decree of the Supervisory Board and Directors of Perum Perhutani Number 12/KPTS/DIR/02/2021 concerning Persons Responsible for Implementing and Monitoring Good Corporate Governance in Perum Perhutani. This decision determines the person in charge of implementing and monitoring the implementation of GCG principles in Perum Perhutani, thus ensuring that corporate governance is carried out in accordance with the established standards.

Implementasi GCG di Perhutani sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan perusahaan. Dengan keberadaan panduan serta penanggung jawab yang ditetapkan, diharapkan Perhutani dapat mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

The implementation of GCG in Perhutani is very important to ensure transparency, accountability, fairness, and sustainability in the management of the company. With the existence of guidelines and the designated person in charge, it is expected that Perhutani can manage the company in accordance with the principles of good corporate governance.

Tujuan Penerapan GCG

Perhutani mengembangkan struktur dan sistem tata kelola perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip

Objectives of GCG Implementation

Perhutani develops a corporate governance structure and system that is in accordance with the

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Adapun tujuan dari pelaksanaan GCG di Perhutani adalah sebagai berikut:

- 1. Mengoptimalkan Nilai Perusahaan:**
Perhutani bertujuan untuk membangun daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Dengan menjaga etika dan integritas, perusahaan dapat mempertahankan eksistensi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
- 2. Mendorong Pengelolaan yang Profesional, Efisien, dan Efektif:** Perhutani berkomitmen untuk mengelola perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif. Hal ini termasuk pemberdayaan fungsi dan peningkatan kemandirian organ-organ dalam perusahaan untuk menciptakan tata kelola yang solid.
- 3. Mengendalikan Hubungan Kerja Antar Organ Perusahaan:** Dengan tujuan untuk mengarahkan serta mengendalikan hubungan kerja antara organ Perhutani, struktur organisasi yang harmonis dan terkoordinasi dengan baik diharapkan dapat tercipta.
- 4. Pengambilan Keputusan yang Berlandaskan Nilai Moral:** Setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaannya harus dilandasi nilai moral yang tinggi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanggung jawab sosial yang tinggi.
- 5. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Profesional:** Salah satu tujuan utama adalah menciptakan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berintegritas untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan.
- 6. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemanfaatan:** Perhutani berupaya meningkatkan kesejahteraan seluruh insan perusahaan serta peningkatan kemanfaatan bagi para pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pemegang saham, mitra bisnis, dan masyarakat.
- 7. Mencegah Terjadinya Penyimpangan:** Melalui penerapan GCG, Perhutani bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terpercaya.
- 8. Memperbaiki Budaya Kerja:** Dengan pelaksanaan GCG, Perhutani berupaya memperbaiki budaya kerja perusahaan agar lebih baik, berintegritas, dan selaras dengan nilai-nilai GCG.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, Perhutani yakin dapat mewujudkan perusahaan yang tidak hanya berdaya saing tinggi dan berkelanjutan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif bagi

principles of Good Corporate Governance (GCG). The objectives of GCG implementation in Perhutani are as follows:

- 1. Optimizing Company Value:**
Perhutani aims to build strong competitiveness both nationally and internationally. By maintaining ethics and integrity, the company can maintain its existence and sustainable growth.
- 2. Encouraging Professional, Efficient, and Effective Management:** Perhutani is committed to managing the company professionally, efficiently, and effectively. This includes empowering the functions and increasing the independence of the organs within the company to create solid governance.
- 3. Controlling Working Relations Between Company Organs:** With the aim of directing and controlling working relations between Perhutani organs, a harmonious and well-coordinated organizational structure is expected to be created.
- 4. Decision Making Based on Moral Values:** Every decision making and its implementation must be based on high moral values, in accordance with applicable laws and regulations and high social responsibility.
- 5. Creating Professional Human Resources:** One of the main objectives is to create professional, competent, and integrity-based human resources to support the achievement of the company's vision and mission.
- 6. Improving Welfare and Benefit:**
Perhutani strives to improve the welfare of all company personnel and increase benefits for stakeholders, including employees, shareholders, business partners and the community.
- 7. Preventing Deviations:**
Through the implementation of GCG, Perhutani aims to prevent deviations in company management, creating a safe and trusted work environment.
- 8. Improving Work Culture:**
With the implementation of GCG, Perhutani seeks to improve the company's work culture to be better, with integrity, and in line with GCG values.

With these goals, Perhutani is confident that it can create a company that is not only highly competitive and sustainable, but also able to provide positive contributions to all stakeholders and maintain a

seluruh pemangku kepentingan serta menjaga reputasi yang baik di mata publik.

Kebijakan Tata kelola Perusahaan

Dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, Perhutani memberlakukan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan ini mencakup:

1. **Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy):** Kebijakan ini merupakan pedoman umum dalam mengelola perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan.
2. **Board Manual:** Panduan ini menjelaskan peran, tanggung jawab, dan kewajiban dari Dewan Direksi dan Dewan Pengawas, serta mengatur mekanisme kerja dan hubungan antara organ perusahaan untuk memastikan tata kelola yang efektif dan efisien.
3. **Code of Conduct:** Pedoman perilaku yang mengatur etika dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh insan Perhutani dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. *Code of Conduct* ini mencakup aspek-aspek seperti integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap hukum.
4. **Piagam Audit Internal:** Dokumen ini mengatur fungsi dan peran dari unit audit internal dalam memastikan keandalan proses pengelolaan risiko, pengendalian internal, serta tata kelola perusahaan yang efektif.
5. **Piagam Komite Penunjang Dewan Pengawas:** Pedoman ini menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari komite-komite yang dibentuk untuk mendukung Dewan Pengawas, seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan komite lainnya, dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan konsultasi.
6. **Kebijakan-kebijakan Lainnya:** Selain dokumen-dokumen di atas, Perhutani juga memiliki berbagai kebijakan pendukung lainnya yang dirancang untuk memastikan implementasi GCG secara menyeluruh dan konsisten.

Kebijakan-kebijakan ini dipublikasikan oleh Perhutani melalui situs web resmi perusahaan, sehingga mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Perhutani juga berkomitmen untuk melakukan pembaruan kebijakan secara berkala,

good reputation in the eyes of the public.

Corporate Governance Policy

In order to implement good corporate governance, Perhutani has implemented a series of policies aimed at supporting the implementation of GCG principles consistently and sustainably. These policies include

1. **Corporate Governance Policy:** : this policy is a general guideline in managing the company in accordance with GCG principles, such as transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.
2. **Board Manual:** This guideline explains the roles, responsibilities, and obligations of the Board of Directors and the Board of Supervisors, and regulates the working mechanisms and relationships between company organs to ensure effective and efficient governance.
3. **Code of Conduct:** behavioral guideline that regulates the ethics and values that must be upheld by all Perhutani personnel in carrying out their duties and responsibilities. This Code of Conduct covers aspects such as integrity, professionalism, and compliance with the law.
4. **Charter Internal Audit:** this document regulates the functions and roles of the internal audit unit in ensuring the reliability of the risk management process, internal control, and effective corporate governance.
5. **Charter of the Supporting Committee of the Board of Supervisors:** This guideline explains the duties and responsibilities of the committees formed to support the Board of Supervisors, such as the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and other committees, in carrying out their supervisory and consulting functions.
6. **Other Policies:** In addition to the documents above, Perhutani also has various other supporting policies designed to ensure comprehensive and consistent implementation of GCG.

These policies are published by Perhutani through the company's official website, so that they are easily accessible to all stakeholders. Perhutani is also committed to periodically updating policies, adjusting to company conditions and applicable

menyesuaikan dengan kondisi perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memastikan relevansi dan efektivitas implementasi tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan kebijakan-kebijakan ini, Perhutani bertekad untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG dan membangun perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan serta mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Roadmap Penerapan GCG

Dalam upaya mewujudkan perusahaan yang berdaya saing, transparan, dan akuntabel, Perum Perhutani telah menyusun *roadmap* Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*). *Roadmap* ini berfokus pada pengembangan dan penyempurnaan infrastruktur dan struktur lunak (*soft structure*) serta penerapan dan penilaian berkelanjutan.

1. Infrastruktur & Struktur Lunak (*Soft Structure*)

Perhutani berkomitmen untuk memperkuat fondasi tata kelola perusahaan melalui pembangunan infrastruktur dan struktur lunak yang meliputi:

- **Organ Perusahaan:** Penyusunan dan penguatan peran serta tanggung jawab dari organ-organ perusahaan, termasuk Dewan Direksi dan Dewan Pengawas, sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- **Organ Pendukung Dewan Pengawas:** Pembentukan dan optimalisasi peran komite-komite pendukung Dewan Pengawas seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan lainnya.
- **Pedoman GCG:** Penyusunan pedoman yang jelas mengenai prinsip-prinsip GCG yang harus diterapkan dalam setiap aspek operasional perusahaan.
- **Pedoman Kode Etik:** Pengembangan dan penerapan pedoman kode etik yang mengatur standar perilaku etis dan profesional bagi seluruh insan Perhutani.
- **Board Manual:** Penyusunan pedoman kerja yang komprehensif untuk Dewan Pengawas dan Direksi guna memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang optimal.
- **IT Governance:** Implementasi tata kelola teknologi informasi yang mendukung efisiensi, keamanan, dan transparansi

laws and regulations, in order to ensure the relevance and effectiveness of the implementation of good corporate governance.

With these policies, Perhutani is determined to uphold the principles of GCG and build a transparent, accountable, and sustainable company that is able to provide added value to all stakeholders.

GCG Implementation Roadmap

In an effort to realize a competitive, transparent, and accountable company, Perum Perhutani has prepared a Good Corporate Governance (GCG) roadmap. This roadmap focuses on the development and improvement of infrastructure and soft structures as well as sustainable implementation and assessment.

1. Infrastructure and Soft Structure

Perhutani is committed to strengthening the foundation of corporate governance through the development of infrastructure and soft structures that include:

- **Company Organs:** Preparation and strengthening of the roles and responsibilities of company organs, including the Board of Directors and Supervisory Boards, in accordance with GCG principles.
- **Supporting Organs of Supervisory Boards:** Formation and optimization of the roles of supporting committees of the Supervisory Boards such as the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and others.
- **GCG Guidelines:** Preparation of clear guidelines regarding GCG principles that must be applied in every aspect of the company's operations.
- **Code of Ethics Guidelines:** Development and implementation of code of ethics guidelines that regulate ethical and professional behavior standards for all Perhutani employees.
- **Board Manual:** Preparation of comprehensive work guidelines for the Supervisory Boards and Board of Directors to ensure optimal implementation of duties and responsibilities.
- **IT Governance:** Implementation of information technology governance

operasional perusahaan.

- **Pedoman Pelaporan Pelanggaran:** Penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) yang memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor serta memastikan tindak lanjut yang transparan dan akuntabel.
- **Sistem & Prosedur:** Pengembangan sistem dan prosedur operasional yang mendukung penerapan GCG secara efektif.

2. Penyempurnaan Berkelanjutan

Perhutani menjadikan penyempurnaan berkelanjutan sebagai bagian integral dari penerapan GCG, melalui program:

- **Penerapan:** Implementasi prinsip-prinsip GCG dalam setiap aspek operasional perusahaan secara konsisten.
- **Review:** Peninjauan berkala terhadap kebijakan dan prosedur GCG untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan internal dan eksternal.
- **Assessment:** Penilaian terhadap kinerja tata kelola perusahaan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
- **Audit:** Pelaksanaan audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG dan mengidentifikasi risiko serta peluang perbaikan.

3. Sasaran

Tujuan akhir dari roadmap ini adalah menjadikan GCG sebagai budaya dalam mengelola Perusahaan. Dengan demikian, Perum Perhutani dapat membangun perusahaan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel serta mampu memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

that supports efficiency, security, and transparency of company operations.

- **Whistleblowing Policy:** Implementation of a whistleblowing reporting system that provides protection for reporters and ensures transparent and accountable follow-up.
- **System & Procedure:** Development of operational systems and procedures that support effective GCG implementation.

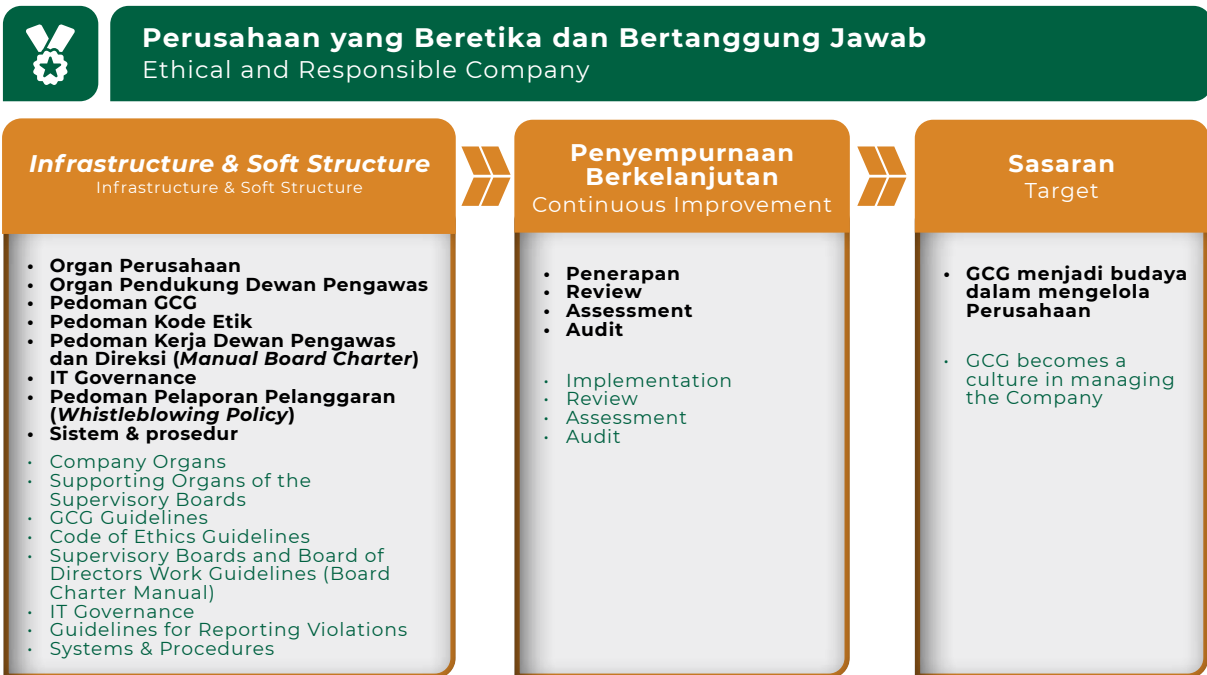
2. Continuous Improvement

Perhutani makes continuous improvement an integral part of GCG implementation, through the following programs:

- **Implementation:** Implementation of GCG principles in every aspect of the company's operations consistently.
- **Review:** Periodic review of GCG policies and procedures to ensure compliance with internal and external developments.
- **Assessment:** Assessment of corporate governance performance to identify areas that need improvement.
- **Audit:** Implementation of internal and external audits to ensure compliance with GCG principles and identify risks and opportunities for improvement.

3. Target

The ultimate goal of this roadmap is to make GCG a culture in managing the Company. Thus, Perum Perhutani can build a company with integrity, transparency, and accountability and is able to provide sustainable added value for all stakeholders.



Pengukuran Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Perhutani secara berkala melakukan pengukuran atas implementasi tata kelola perusahaan. Melalui proses pengukuran tersebut, Perhutani memiliki tujuan untuk:

- Menguji dan menilai penerapan GCG melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan perbandingan dengan indikator dan parameter pengujian yang telah ditentukan.
- Memberikan gambaran hasil pengukuran melalui pemberian nilai atas penerapan GCG, berikut rekomendasi perbaikan yang diusulkan, guna mengurangi kesenjangan antara tataran praktik dengan indikator dan parameter pengujian.
- Memantau konsistensi penerapan GCG di lingkungan organisasi Perhutani, serta untuk memperoleh masukan demi penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG.
- Mendorong pengelolaan Perhutani yang semakin profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perhutani.

Pada tahun 2023, Perhutani melaksanakan evaluasi atas penerapan GCG yang dilakukan dengan mengacu pada keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/parameter penilaian dan evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara yang meliputi 6 (enam) aspek pokok

Measurement of Corporate Governance Implementation

Perhutani periodically measures the implementation of corporate governance. Through the measurement process, Perhutani aims to:

- Test and assess the implementation of GCG through elaboration of the conditions of GCG implementation and comparison with the predetermined test indicators and parameters.
- Provide an overview of the measurement results by giving a score for the implementation of GCG, along with recommendations for proposed improvements, in order to reduce the gap between the level of practice and the test indicators and parameters.
- Monitor the consistency of GCG implementation in the Perhutani organizational environment, as well as to obtain input for the improvement and development of GCG policies.
- Encourage Perhutani management to be more professional, transparent, and efficient, as well as empower the functions and increase the independence of Perhutani organs.

In 2023, Perhutani will conduct an evaluation of the implementation of GCG by referring to the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises Number: SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/parameters for assessment and evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises which includes 6 (six) main aspects of measurement

pengukuran sebagai berikut:

- Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan;
- Pemegang saham dan RUPS/pemilik modal;
- Dewan Pengawas;
- Direksi;
- Pengungkapan informasi dan transparansi;
- Aspek lainnya.

Penilaian atas penerapan GCG di Perhutani dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melakukan langkah perbaikan dan pemutakhiran struktural maupun operasional dalam rangka menciptakan kinerja usaha yang tidak hanya berkualitas tapi juga mendukung perkembangan usaha yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika bisnis, dan praktik bisnis terbaik.

Metode Penilaian Tata Kelola Perusahaan

Penilaian/evaluasi GCG oleh Perusahaan dilakukan dengan mengacu kepada indikator dan parameter dalam SK-16/S.MBU/2012 dan dilaksanakan dengan melalui empat tahapan yakni:

- Mempelajari dan memahami aspek/indikator/parameter dan faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya;
- Menyusun analisis kecukupan pelaksanaan GCG;
- Mengambil kesimpulan melalui penetapan tingkat pemenuhan setiap parameter/sub-indikator beserta penjelasannya dengan berpedoman pada faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya; dan
- Menyusun hasil akhir penilaian/evaluasi. Metode pendekatan yang digunakan oleh Perusahaan dalam penilaian dan evaluasi atas penerapan GCG dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu *review* dokumen, wawancara, dan kuesioner.

Pihak Yang Menilai

Pelaksanaan penilaian sendiri GCG untuk tahun buku 2023 oleh PT Kharisma Integrasi Manajemen (KIM Consult).

Hasil Penilaian

Pada tahun 2023, Perusahaan telah melaksanakan penilaian GCG untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, penilaian dilakukan secara

as follows:

- Commitment to the implementation of good corporate governance on an ongoing basis;
- Shareholders and GMS/capital owners;
- Supervisory Boards;
- Board of Directors;
- Disclosure of information and transparency;
- Other aspects.

The assessment of the implementation of GCG in Perhutani is carried out as a form of commitment to take steps to improve and update the structure and operations in order to create business performance that is not only of high quality but also supports business development in line with applicable laws and regulations, business ethics, and best business practices.

Corporate Governance Assessment Method

The Company's GCG assessment/evaluation is carried out by referring to the indicators and parameters in SK-16/S.MBU/2012 and is carried out through four stages, namely:

- Studying and understanding the aspects/indicators/parameters and factors that are tested for suitability of their implementation;
- Preparing an analysis of the adequacy of GCG implementation;
- Drawing conclusions by determining the level of fulfillment of each parameter/sub-indicator along with its explanation by referring to the factors that are tested for suitability of their implementation; and
- Preparing the final results of the assessment/evaluation. The approach method used by the Company in the assessment and evaluation of GCG implementation is carried out in several stages, namely document review, interviews, and questionnaires.

Assessing Party

Implementation of GCG self-assessment for the 2023 financial year by PT Kharisma Integration Management (KIM Consult).

Assessment Results

In 2023, the Company has conducted a GCG assessment for the financial year ending on December 31, 2023, the assessment was conducted

mandiri (*self assessment*). Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilaksanakan di tahun 2024, Perhutani memperoleh skor 91,17 dan masuk dalam kategori "Sangat Baik".

independently (*self assessment*). Based on the results of the assessment that was conducted in 2023, Perhutani obtained a score of 91,17 and was included in the "Very Good" category.

ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR / PARAMETER TESTING ASPECT / INDICATORS / PARAMETERS		BOBOT Weight	SKOR Score	CAPAIAN Achievement	PENJELASAN Remarks
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan	Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7.000	6,87	98,19%	Sangat Baik Very Good
Pemilik Modal	Capital Owners	9.000	8,32	92,47%	Sangat Baik Very Good
Dewan Pengawas	Board of Supervisors	35.000	32,92	94,06%	Sangat Baik Very Good
Direksi	Board of Directors	35.000	32,43	92,67%	Sangat Baik Very Good
Pengungkapan Informasi dan Transparansi	Disclosure of Information and Transparency	9.000	8,12	90,25%	Sangat Baik Very Good
Aspek Lainnya	Other Aspects	5.000	2,50	5,00%	-
SKOR KESELURUHAN	OVERALL SCORE	100.000	91,17	91,17%	
KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG	CLASSIFICATION OF GCG IMPLEMENTATION QUALITY			Sangat Baik Very Good	

Perum Perhutani dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dengan berbagai aspek pengujian yang telah diukur. Secara keseluruhan, Perhutani menunjukkan hasil yang sangat baik dalam penerapan GCG, dengan skor keseluruhan sebesar 91,17 atau 91,17%.

I. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan

Perhutani menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan GCG secara berkelanjutan. Dengan persentase capaian sebesar 98,19%, Perhutani berhasil hampir mencapai skor maksimal dalam aspek ini, menunjukkan dedikasi tinggi dalam mempertahankan dan meningkatkan tata kelola yang baik.

II. Pemilik Modal

Keterlibatan dan dukungan pemilik modal terhadap penerapan GCG di Perhutani berada pada level yang sangat baik. Dengan 92,47% dari skor maksimal, ini menunjukkan bahwa pemilik modal memainkan peran yang signifikan dalam mendorong kepatuhan dan efektifitas tata kelola perusahaan.

III. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas di Perhutani jelas berfungsi dengan sangat baik, sebagaimana dibuktikan oleh skor tinggi sebesar 32,92 dari 35.000

Perum Perhutani in the implementation of Good Corporate Governance, with various aspects of testing that have been measured. Overall, Perhutani showed very good results in the implementation of GCG, with an overall score of 91.17 or 91.17%.

I. Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance

Perhutani demonstrates a strong commitment to sustainable implementation of GCG. With an achievement percentage of 98.19%, Perhutani has almost achieved the maximum score in this aspect, demonstrating high dedication in maintaining and improving good governance.

II. Capital Owners

The involvement and support of capital owners in the implementation of GCG in Perhutani is at a very good level. With 92.47% of the maximum score, this shows that capital owners play a significant role in encouraging compliance and effectiveness of corporate governance

III. Supervisory Board

The Supervisory Board at Perhutani is clearly functioning very well, as evidenced by the high score of 32.92 out of 35,000 with an achievement

dengan capaian persentase 94,06%. Ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawas melakukan tugas pengawasan dan konsultasi dengan sangat efektif.

IV. Direksi

Kinerja Direksi dalam menerapkan dan mengelola tata kelola perusahaan juga dinilai sangat baik dengan persentase capaian sebesar 92,67%. Hal ini menunjukkan bahwa Direksi melakukan tugas dan tanggung jawab dengan integritas dan profesionalisme tinggi.

V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Pengungkapan informasi dan transparansi dinilai sangat baik dengan capaian 90,25%. Ini menandakan bahwa Perhutani dengan baik menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada pemangku kepentingan, sesuai dengan prinsip transparansi dalam GCG.

VI. Aspek Lainnya

Aspek ini menunjukkan capaian yang sangat rendah, dengan hanya 5,00% dari skor maksimal. Ini mungkin mencakup area yang memerlukan perhatian khusus dan perbaikan signifikan namun tidak mempengaruhi secara signifikan keseluruhan capaian.

Skor Keseluruhan

Dengan skor keseluruhan 91,17%, penerapan GCG di Perum Perhutani diklasifikasikan sebagai "Sangat Baik". Meskipun hampir semua aspek menunjukkan hasil yang sangat baik, terdapat ruang untuk peningkatan dalam beberapa aspek lain yang tertinggal.

Rekomendasi:

- **Menindaklanjuti Aspek Lainnya:** Aspek lain yang memperoleh skor rendah perlu didiagnosis secara mendalam untuk memahami kekurangannya dan menetapkan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
- **Peningkatan Berkelanjutan:** Terus memperkuat komitmen terhadap GCG melalui pelatihan, audit berkala, dan peninjauan kebijakan untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi dan kebutuhan operasional.
- **Keterlibatan Pemangku Kepentingan:** Terus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemilik modal, untuk memastikan dukungan berkelanjutan dalam penerapan GCG yang efektif.

percentage of 94.06%. This shows that the Supervisory Board carries out its supervisory and consultation duties very effectively.

IV. Board of Directors

The performance of the Board of Directors in implementing and managing corporate governance is also considered very good with an achievement percentage of 92.67%. This shows that the Board of Directors carries out its duties and responsibilities with high integrity and professionalism.

V. Information Disclosure and Transparency

Information disclosure and transparency are considered very good with an achievement of 90.25%. This indicates that Perhutani provides clear and accurate information to stakeholders, in accordance with the principle of transparency in GCG.

VI. Other Aspects

This aspect shows very low achievement, with only 5.00% of the maximum score. This may include areas that require special attention and significant improvement but do not significantly affect the overall achievement.

Overall Score

With an overall score of 91.17%, the implementation of GCG in Perum Perhutani is classified as "Very Good". Although almost all aspects show very good results, there is room for improvement in several other aspects that are lagging behind.

Recommendations:

- **Follow Up on Other Aspects:** Other aspects that scored low need to be diagnosed in depth to understand their shortcomings and determine the necessary improvement steps.
- **Continuous Improvement:** Continue to strengthen commitment to GCG through training, periodic audits, and policy reviews to adjust to regulatory changes and operational needs.
- **Stakeholder Engagement:** Continue to involve all stakeholders, including capital owners, to ensure ongoing support in the effective implementation of GCG.

Selain melakukan *self-assessment*, Perhutani juga melakukan sejumlah pencapaian program dalam rangka memperkuat implementasi GCG pada tahun 2023, meliputi:

- Komitmen Implementasi GCG, melalui penandatanganan pakta integritas kepada seluruh karyawan Perhutani.
- Sosialisasi dan internalisasi CoC, kegiatan dilakukan kepada karyawan baru, mitra kerja, pemasok/ vendor, karyawan outsourcing baik di lingkungan kantor pusat, lapangan maupun anak perusahaan.
- Pengendalian gratifikasi, dilakukan melalui sosialisasi dan internalisasi secara rutin, penerbitan teasers (pengumuman Perhutani melalui internal *email blast*) kepada seluruh karyawan, surat edaran larangan penerimaan dan pemberian hadiah dan atau uang, serta pelaporan penerimaan hadiah dalam rangka hari besar keagamaan atau tahun baru.
- Pengelolaan *whistleblowing system*, bekerja sama dengan tim IT Perhutani untuk membuat aplikasi pengaduan secara terintegrasi dengan situs web Perhutani.
- Penyusunan pedoman kepatuhan, di antaranya adalah Pedoman Penerimaan dan Pemberian Hadiah/Hiburan, Pedoman *Whistleblowing System* dan Pedoman Hubungan dengan Pemerintah dan Lembaga Pemerintah.

In addition to conducting *self-assessment*, Perhutani also made a number of program achievements in order to strengthen the implementation of GCG in 2023, including:

- Commitment to Implement GCG, through the signing of an integrity pact to all Perhutani employees.
- Socialization and internalization of CoC, activities carried out for new employees, work partners, suppliers/vendors, outsourcing employees both in the head office, field and subsidiary environments.
- Gratification control, carried out through routine socialization and internalization, issuance of teasers (Perhutani announcements via internal email blasts) to all employees, circulars prohibiting the acceptance and giving of gifts and/or money, and reporting the acceptance of gifts in the context of religious holidays or New Year.
- Management of the whistleblowing system, working with the Perhutani IT team to create a complaint application integrated with the Perhutani website.
- Preparation of compliance guidelines, including the Guidelines for Accepting and Giving Gifts/Entertainment, the Whistleblowing System Guidelines and the Guidelines for Relations with the Government and Government Institutions.

Realisasi Pelaksanaan Rencana Tindak (*Action Plan*) dan Rekomendasi Hasil Penilaian GCG

Realization of the Implementation of the Action Plan and Recommendations of the Results of the GCG Assessment

ASPEK KOMITMEN

COMMITMENT ASPECT

No	Rekomendasi AoI GCG Recommendations of AoI GCG	Tindak Lanjut Temuan Follow-up of Findings	Status Tindak Lanjut Follow-up Status	
1	Menginstruksikan kepada Direktur Penanggungjawab GCG agar dalam membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik minimal setahun sekali yang disampaikan kepada Pemilik Modal dan Dewan Pengawas Perum Perhutani, dilengkapi dengan uraian yang membandingkan antara rencana kerja (<i>action plan</i>) secara spesifik untuk penerapan GCG dalam 1 (satu) tahun dan realisasinya.	Instruct the Director in Charge of GCG to make a Report on the Implementation of Good Corporate Governance at least once a year which is submitted to the Capital Owner and the Board of Supervisors of Perum Perhutani, equipped with a description that compares the specific work plan (action plan) for the implementation of GCG in 1 (one) year and its realization.	Membuat laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik minimal setahun sekali yang disampaikan kepada Pemilik Modal dan Dewan Pengawas Perum Perhutani, dilengkapi dengan uraian yang membandingkan antara rencana kerja (action plan) secara spesifik untuk penerapan GCG dalam 1 (satu) tahun dan realisasinya. Make a report on the implementation of Good Corporate Governance at least once a year which is submitted to the Capital Owner and the Supervisory Board of Perum Perhutani, complete with a description comparing the specific work plan (action plan) for the implementation of GCG in 1 (one) year and its realization.	Dalam proses. In progress.

ASPEK KOMITMEN

COMMITMENT ASPECT

No	Rekomendasi AoI GCG Recommendations of AoI GCG		Tindak Lanjut Temuan Follow-up of Findings	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
2	Lebih optimal lagi dalam pelaksanaan sosialisasi tentang <i>Board Manual</i> dan kebijakan/ panduan tambahan untuk pelaksanaan CoC kepada Dewan Pengawas, Direksi, organ pendukung dan pejabat setingkat di bawah Direksi juga karyawan.	More optimal in the implementation of socialization regarding the Board Manual and additional policies/guidelines for the implementation of CoC to the Board of Supervisors, Board of Directors, supporting organs and officials at the level below the Board of Directors as well as employees.	Revisi <i>Board Manual</i> dan mensosialisasikan kepada karyawan. Revise the Board Manual and socialize it to employees.	Dalam proses. In progress.
3	Menginstruksikan kepada seluruh karyawan untuk menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap CoC dan memperbaruinya setiap awal tahun.	Instruct all employees to sign a statement of compliance with the CoC and renew it at the beginning of each year.	Membuat pernyataan kepatuhan untuk seluruh karyawan setiap awal tahun. Make a statement of compliance for all employees at the beginning of each year.	Sesuai rekomendasi. As recommended.
4	Meningkatkan upaya tindak lanjut atas AoI hasil <i>assessment</i> GCG Tahun sebelumnya	Increase follow-up efforts on AoI GCG assessment results from the previous year	Membuat daftar AOI hasil GCG tahun sebelumnya Make a list of AOI results of GCG in the previous year	Dalam proses. In progress.
5	Dalam membuat kontrak manajemen individu Direksi agar memasukkan target skor GCG dalam Kontrak Manajemen Individu semua Direksi, kecuali Direktur Utama dan disahkan / ditandatangani oleh Direktur yang bersangkutan, Direktur Utama dan Dewan Pengawas.	In making individual management contracts, the Board of Directors must include the GCG score target in the Individual Management Contract of all Directors, except the President Director and be approved/signed by the relevant Director, the President Director and the Supervisory Board.	Memasukkan target skor GCG dalam Kontrak Manajemen Individu. Include the GCG score target in the Individual Management Contract.	Dalam proses. In progress.
6	Memberikan teguran / sanksi bagi penyelenggara negara yang belum atau terlambat menyampaikan LHKPN sesuai aturan yang berlaku di Perusahaan.	Provide warnings/sanctions for state administrators who have not or are late in submitting LHKPN in accordance with the rules applicable in the Company.	Diatur dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani. Regulated in the Decree of the Board of Directors of Perum Perhutani.	Sesuai rekomendasi. As recommended.
7	Menyempurnakan ketentuan/ kebijakan Pengendalian Gratifikasi dengan menambahkan muatan ketentuan untuk melakukan peninjauan dan penyempurnaan berkala perangkat pendukung pengendalian gratifikasi.	Improve the provisions/ policies for Gratification Control by adding provisions to conduct periodic reviews and improvements to supporting devices for gratification control.	Diatur dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani. Regulated in the Decree of the Board of Directors of Perum Perhutani	Sesuai rekomendasi. As recommended.
8	Mengoptimalkan sarana/ media WBS supaya sepenuhnya bisa efektif.	Optimize WBS facilities/ media so that they can be fully effective	Monitoring dan Evaluasi oleh KPK. Monitoring and Evaluation by the KPK.	Sesuai rekomendasi. As recommended.

ASPEK PEMILIK MODAL DAN RPB

CAPITAL OWNER AND RPB ASPECTS

No	Rekomendasi AoI GCG Recommendations of AoI GCG	Tindak Lanjut Temuan Follow-up of Findings	Status Tindak Lanjut Follow-up Status	
1	Menetapkan jumlah jabatan Direksi yang boleh dirangkap, bila tidak menimbulkan konflik kepentingan.	Determine the number of Board of Directors positions that may be held concurrently, if it does not cause a conflict of interest.	Kementerian BUMN Ministry of State-Owned Enterprises	Dalam proses. In progress.
2	Memberikan pengesahan RJPP atau Revisi RJPP Perum Perhutani dengan tepat waktu.	Provide ratification of the RJPP or Revision of the RJPP of Perum Perhutani in a timely manner.	Kementerian BUMN Ministry of State-Owned Enterprises	Dalam proses. In progress.
3	Memberikan persetujuan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan RPB/Pemilik modal dengan tepat waktu.	Provide approval for proposed corporate actions that require approval from the RPB/Capital Owner in a timely manner.	Kementerian BUMN Ministry of State-Owned Enterprises	Dalam proses. In progress.

ASPEK PEMILIK MODAL DAN RPB

CAPITAL OWNER AND RPB ASPECTS

No	Rekomendasi AoI GCG Recommendations of AoI GCG		Tindak Lanjut Temuan Follow-up of Findings	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
4	Menginstruksikan kepada Dewan Pengawas agar melaksanakan pelimpahan kewenangan dari Pemilik Modal, dengan menyebutkan besaran honorarium KAP dalam penetapan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan dan Laporan PKBL.	Instruct the Supervisory Board to carry out the delegation of authority from the Capital Owner, by stating the amount of the KAP honorarium in determining the KAP that will audit the Financial Report and PKBL Report.	Kementerian BUMN Ministry of State-Owned Enterprises	Dalam proses. In progress.
5	Membuat dan menetapkan pedoman penyusunan laporan tugas pengawasan Dewan Pengawas.	Create and determine guidelines for preparing the Supervisory Board's supervisory task report.	Kementerian BUMN Ministry of State-Owned Enterprises	Dalam proses. In progress.
6	Lebih meningkatkan upaya tindak lanjut atas areas of improvement yang dihasilkan dari assessment tahun sebelumnya.	Further improve follow-up efforts on areas of improvement resulting from the previous year's assessment.	Kementerian BUMN Ministry of State-Owned Enterprises	Dalam proses. In progress.
7	Menetapkan mekanisme/sistem penerimaan laporan mengenai gejala penurunan kinerja perusahaan.	Establish a mechanism/system for receiving reports regarding symptoms of declining company performance.	Kementerian BUMN. Ministry of State-Owned Enterprises	Dalam proses. In progress.

ASPEK DEWAN PENGAWAS

BOARD OF SUPERVISORS ASPECTS

No	Rekomendasi AoI GCG Recommendations of AoI GCG		Tindak Lanjut Temuan Follow-up of Findings	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
1	Melaksanakan kegiatan pelatihan/ peningkatan kompetensi dan pengetahuan bagi anggota Dewan Pengawas sesuai dengan rencana dalam Program Kerja Dewan Pengawas Tahun 2021.	Carry out training activities/improvement of competence and knowledge for members of the Board of Supervisors in accordance with the plan in the 2021 Board of Supervisors Work Program.	Penyampaian Surat dari Dirum kepada Dewan Pengawas Nomor 08/001.2/SDMU&IT/ 2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal tindak lanjut hasil assessment penerapan GCG. Submission of Letter from Dirum to the Supervisory Board Number 08/001.2/SDMU&IT/ 2023 dated January 18, 2023 regarding the follow-up to the results of the GCG implementation assessment.	Dalam proses. In progress.
2	Menyampaikan tanggapan atas rancangan RJPP kepada Pemilik Modal disampaikan sesuai dengan ketentuan yaitu paling lambat 60 hari sebelum tahun berjalan.	Submit responses to the draft RJPP to Capital Owners in accordance with the provisions, namely no later than 60 days before the current year.	RJPP Perhutani akan berakhir pada tahun 2024 sehingga belum dapat ditindaklanjuti. Perhutani's RJPP will end in 2024 so it cannot be followed up.	Dalam proses. In progress.
3	Menyampaikan tanggapan atas rancangan RKAP periode berikutnya kepada Pemilik Modal sesuai dengan ketentuan yaitu sebelum tahun anggaran berjalan.	Submit responses to the draft RKAP for the next period to Capital Owners in accordance with the provisions, namely before the current budget year.	Tanggapan atas rancangan RKAP tahun 2022. Response to the draft RKAP for 2022.	Dalam proses. In progress.
4	Melakukan telaah atas kesesuaian visi dan misi perusahaan menyampaikannya kepada Direksi secara tertulis.	Conduct a review of the suitability of the company's vision and mission and submit it to the Board of Directors in writing.	Penyampaian Surat dari Dirum kepada Dewan Pengawas Nomor 08/001.2/SDMU&IT/ 2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal tindak lanjut hasil assessment penerapan GCG. Submission of Letter from Dirum to the Supervisory Board Number 08/001.2/SDMU&IT/ 2023 dated January 18, 2023 regarding the follow-up to the results of the GCG implementation assessment.	Dalam proses. In progress.

ASPEK DEWAN PENGAWAS

BOARD OF SUPERVISORS ASPECTS

No	Rekomendasi AoI GCG Recommendations of AoI GCG		Tindak Lanjut Temuan Follow-up of Findings	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
5	Melakukan telaah atas kebijakan sistem pengendalian intern dan menyampaikannya kepada Direksi secara tertulis.	Conduct a review of the internal control system policy and submit it to the Board of Directors in writing.	Penyampaian Surat dari Dirum kepada Dewan Pengawas Nomor 08/001.2/SDMU&IT/ 2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal tindak lanjut hasil assessment penerapan GCG. Submission of Letter from Dirum to the Supervisory Board Number 08/001.2/SDMU&IT/ 2023 dated January 18, 2023 regarding the follow-up to the results of the GCG implementation assessment.	Dalam proses. In progress.
6	Mendorong Direksi melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern tingkat entitas dan selanjutnya menerbitkan <i>internal control report</i> .	Encourage the Board of Directors to evaluate the effectiveness of entity-level internal control and then issue an internal control report	Penyampaian Surat dari Dirum kepada Dewan Pengawas Nomor 08/001.2/SDMU&IT/ 2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal tindak lanjut hasil assessment penerapan GCG. Submission of Letter from Dirum to the Supervisory Board Number 08/001.2/SDMU&IT/ 2023 dated January 18, 2023 regarding the follow-up to the results of the GCG implementation assessment.	Dalam proses. In progress.
7	Melakukan telaah atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan keseluruhan proses manajemen risiko (antara lain identifikasi, penilaian, respon, dan mitigasi risiko).	Conduct a review of the company's risk management policies and implementation of the entire risk management process (including identification, assessment, response, and risk mitigation).	Penyampaian Surat dari Dirum kepada Dewan Pengawas Nomor 08/001.2/SDMU&IT/ 2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal tindak lanjut hasil assessment penerapan GCG. Submission of Letter from Dirum to the Supervisory Board Number 08/001.2/SDMU&IT/ 2023 dated January 18, 2023 regarding the follow-up to the results of the GCG implementation assessment.	Dalam proses. In progress.
8	Melakukan telaah atas kebijakan sistem teknologi informasi dan menyampaikannya kepada Direksi secara tertulis.	Conduct a review of the information technology system policy and submit it to the Board of Directors in writing.	Penyampaian Surat dari Dirum kepada Dewan Pengawas Nomor 08/001.2/SDMU&IT/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal tindak lanjut hasil assessment penerapan GCG. Submission of Letter from Dirum to the Supervisory Board Number 08/001.2/SDMU&IT/2023 dated January 18, 2023 regarding the follow-up to the results of the GCG implementation assessment	Dalam proses. In progress.
9	Melakukan telaah atas kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya terkait prosedur promosi, mutasi dan demosi kemudian menyampaikannya kepada Direktur secara tertulis.	Conduct a review of the human resource management policy, especially related to promotion, transfer and demotion procedures and then submit it to the Director in writing.	Penyampaian Surat dari Dirum kepada Dewan Pengawas Nomor 08/001.2/SDMU&IT/ 2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal tindak lanjut hasil assessment penerapan GCG. Submission of Letter from Dirum to the Supervisory Board Number 08/001.2/SDMU&IT/ 2023 dated January 18, 2023 regarding the follow-up to the results of the GCG implementation assessment.	Dalam proses. In progress.
10	Melakukan telaah atas kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan menyampaikannya kepada Direksi secara tertulis.	Conduct a review of the accounting policy in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia and submit it to the Board of Directors in writing.	Penyampaian Surat dari Dirum kepada Dewan Pengawas Nomor 08/001.2/SDMU&IT/ 2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal tindak lanjut hasil assessment penerapan GCG. Submission of Letter from Dirum to the Supervisory Board Number 08/001.2/SDMU&IT/ 2023 dated January 18, 2023 regarding the follow-up to the results of the GCG implementation assessment.	Dalam proses. In progress.
11	Melakukan telaah atas kebijakan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perusahaan dan menyampaikannya kepada Direksi secara tertulis.	Conduct a review of the procurement of goods and services policies applicable in the Company and submit it to the Board of Directors in writing.	Penyampaian Surat dari Dirum kepada Dewan Pengawas Nomor 08/001.2/SDMU&IT/ 2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal tindak lanjut hasil assessment penerapan GCG. Submission of Letter from Dirum to the Supervisory Board Number 08/001.2/SDMU&IT/ 2023 dated January 18, 2023 regarding the follow-up to the results of the GCG implementation assessment.	Dalam proses. In progress.

ASPEK DEWAN PENGAWAS

BOARD OF SUPERVISORS ASPECTS

No	Rekomendasi AoI GCG Recommendations of AoI GCG		Tindak Lanjut Temuan Follow-up of Findings	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
12	Melakukan telaah atas kebijakan mutu dan pelayanan serta menyampaikannya kepada Direksi secara tertulis.	Conduct a review of the quality and service policies and submit it to the Board of Directors in writing.	Penyampaian Surat dari Dirum kepada Dewan Pengawas Nomor 08/001.2/SDMU&IT/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal tindak lanjut hasil assessment penerapan GCG. Submission of Letter from Dirum to the Supervisory Board Number 08/001.2/SDMU&IT/2023 dated January 18, 2023 regarding the follow-up to the results of the GCG implementation assessment.	Dalam proses. In progress.
13	Pemberian persetujuan oleh Dewan Pengawas dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yaitu 14 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima.	Approval by the Supervisory Board is carried out in a timely manner in accordance with the provisions, namely 14 days after the proposal or complete documents are received.	Penyampaian Surat dari Dirum kepada Dewan Pengawas Nomor 08/001.2/SDMU&IT/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal tindak lanjut hasil assessment penerapan GCG. Submission of Letter from Dirum to the Supervisory Board Number 08/001.2/SDMU&IT/2023 dated January 18, 2023 regarding the follow-up to the results of the GCG implementation assessment.	Dalam proses. In progress.
14	Melakukan penilaian atas efektivitas audit eksternal yang mencakup pemantauan kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik, hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal.	Conduct an assessment of the effectiveness of external audits which includes monitoring the conformity of the audit implementation with public accounting professional standards, external audit results and the quality of external audit recommendations.	Penyampaian Surat dari Dirum kepada Dewan Pengawas Nomor 08/001.2/SDMU&IT/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal tindak lanjut hasil assessment penerapan GCG. Submission of Letter from Dirum to the Supervisory Board Number 08/001.2/SDMU&IT/2023 dated January 18, 2023 regarding the follow-up to the results of the GCG implementation assessment.	Dalam proses. In progress.
15	Melakukan penilaian atas efektivitas audit internal yang mencakup kesesuaian pelaksanaan audit internal yang mencakup kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal, kelengkapan atribut temuan dan kualitas dan kualitas rekomendasi hasil audit internal, rencana kerja pengawasan dan manajemen fungsi SPI.	Conduct an assessment of the effectiveness of internal audits that include the conformity of the implementation of internal audits that include the conformity of the implementation of audits with internal audit standards, completeness of the attributes of findings and the quality and quality of recommendations from internal audit results, work plans for supervision and management of SPI functions.	Penyampaian Surat dari Dirum kepada Dewan Pengawas Nomor 08/001.2/SDMU&IT/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal tindak lanjut hasil assessment penerapan GCG. Submission of a Letter from Dirum to the Supervisory Board Number 08/001.2/SDMU&IT/2023 dated January 18, 2023 regarding the follow-up of the results of the GCG implementation assessment.	Dalam proses. In progress.
16	Melakukan telaah atas hasil assessment GCG termasuk melakukan monitoring tindak lanjut area of improvement hasil assessment GCG.	Conducting a review of the results of the GCG assessment including monitoring the follow-up of the areas of improvement of the GCG assessment results.	Penyampaian Surat dari Dirum kepada Dewan Pengawas Nomor 08/001.2/SDMU&IT/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal tindak lanjut hasil assessment penerapan GCG. Submission of Letter from Dirum to the Supervisory Board Number 08/001.2/SDMU&IT/2023 dated January 18, 2023 regarding the follow-up to the results of the GCG implementation assessment.	Dalam proses. In progress.
17	Melakukan review/pemutakhiran Piagam Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko secara berkala, sesuai best practices pemutakhiran dilakukan tiga tahun sekali.	Conducting a review/update of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee Charters periodically, in accordance with best practices, updates are carried out every three years.	Penyampaian Surat dari Dirum kepada Dewan Pengawas Nomor 08/001.2/SDMU&IT/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal tindak lanjut hasil assessment penerapan GCG. Submission of Letter from Dirum to the Supervisory Board Number 08/001.2/SDMU&IT/2023 dated January 18, 2023 regarding the follow-up to the results of the GCG implementation assessment.	Dalam proses. In progress.

ASPEK DEWAN PENGAWAS

BOARD OF SUPERVISORS ASPECTS

No	Rekomendasi AoI GCG Recommendations of AoI GCG	Tindak Lanjut Temuan Follow-up of Findings	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
18	Menambahkan muatan <i>Self Assessment</i> kinerja dalam program kerja komite audit, Komite Pemantau Risiko, serta komite nominasi dan remunerasi untuk tahun berikutnya.	Adding the content of the Self Assessment of performance in the work program of the audit committee, Risk Monitoring Committee, and nomination and remuneration committee for the following year. Penyampaian Surat dari Dirum kepada Dewan Pengawas Nomor 08/001.2/SDMU&IT/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal tindak lanjut hasil assessment penerapan GCG. Submission of Letter from Dirum to the Supervisory Board Number 08/001.2/SDMU&IT/2023 dated January 18, 2023 regarding the follow-up to the results of the GCG implementation assessment.	Dalam proses. In progress.

ASPEK DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS ASPECTS

No	Rekomendasi AoI GCG Recommendations of AoI GCG		Tindak Lanjut Temuan Follow-up of Findings	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
1	Merealisasikan pelatihan bagi anggota Direksi sesuai dengan rencana dan membuat laporan hasil pelatihan yang telah diikuti oleh anggota Direksi.	Realizing training for members of the Board of Directors according to plan and making reports on the results of training that has been attended by members of the Board of Directors.	Pelatihan bagi anggota Direksi sesuai dengan rencana dan laporan hasil pelatihan yang telah diikuti oleh anggota Direksi. Training for members of the Board of Directors according to the plan and reports on the results of training that has been attended by members of the Board of Directors.	Sesuai rekomendasi. As recommended.
2	Menindaklanjuti temuan auditor internal dan auditor eksternal dengan melaksanakan SOP secara konsisten.	Following up on the findings of internal auditors and external auditors by implementing SOPs consistently.	Monitoring Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan SPI periode Tahun 2009 sd 2022. Monitoring Follow-up to the Settlement of SPI Findings for the period 2009 to 2022.	Dalam proses. In progress.
3	Meningjau dan menyempurnakan SOP secara berkala setiap terjadi perubahan proses dan kondisi perusahaan atau sesuai pedoman yang ditetapkan.	Reviewing and refining SOPs periodically whenever there are changes in the company's processes and conditions or according to the established guidelines.	Menyempurnakan SOP secara berkala dan di upload di SMPHT. Periodically perfecting SOPs and uploading them to SMPHT	Sesuai rekomendasi. As recommended.
4	Menyusun rancangan RJPP sesuai dengan pedoman penyusunan RJPP yang ditetapkan.	Preparing a draft of the RJPP in accordance with the established RJPP preparation guidelines.	RJPP Perhutani akan berakhir pada tahun 2024 sehingga belum dapat ditindaklanjuti. Perhutani's RJPP will end in 2024 so it cannot be followed up.	RJPP Perhutani akan berakhir 2024 sehingga belum dapat ditindaklanjuti. Perhutani's RJPP will end in 2024 so it cannot be followed up yet.
5	Menyampaikan rancangan RJPP kepada Pemilik Modal dan kepada Dewan Pengawas secara tepat waktu sesuai jadwal waktu yang ditentukan.	Submit the draft RJPP to the Capital Owner and to the Supervisory Board in a timely manner according to the specified time schedule.	RJPP Perhutani akan berakhir pada tahun 2024 sehingga belum dapat ditindaklanjuti. Perhutani's RJPP will end in 2024 so it cannot be followed up.	RJPP Perhutani akan berakhir 2024 sehingga belum dapat ditindaklanjuti. Perhutani's RJPP will end in 2024 so it cannot be followed up yet.
6	Menyosialisasikan RJPP periode 2020 - 2024 kepada seluruh karyawan.	Socialize the 2020-2024 RJPP to all employees.	RJPP Perhutani akan berakhir pada tahun 2024 sehingga belum dapat ditindaklanjuti. Perhutani's RJPP will end in 2024 so it cannot be followed up.	RJPP Perhutani akan berakhir 2024 sehingga belum dapat ditindaklanjuti. Perhutani's RJPP will end in 2024 so it cannot be followed up yet.
7	Menyampaikan rancangan RKAP kepada Dewan Pengawas secara tepat waktu sesuai jadwal waktu yang ditentukan.	Submit the draft RKAP to the Supervisory Board in a timely manner according to the specified time schedule.	Rancangan RKAP disampaikan kepada Dewan Pengawas secara tepat waktu. The draft RKAP is submitted to the Supervisory Board in a timely manner.	Sesuai rekomendasi. As recommended.

ASPEK DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS ASPECTS

No	Rekomendasi AoI GCG Recommendations of AoI GCG		Tindak Lanjut Temuan Follow-up of Findings	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
8	Menyampaikan rencana promosi dan mutasi satu level jabatan dibawah Direksi kepada Dewan Pengawas untuk kesempatan pemberian arahan terhadap rencana promosi dan mutasi tersebut.	Submit the promotion and transfer plan one level below the Board of Directors to the Supervisory Board for the opportunity to provide direction on the promotion and transfer plan.	Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan dibawah Direksi disampaikan kepada Dewan Pengawas. The promotion and transfer plan for one level of position below the Board of Directors is submitted to the Supervisory Board.	Dalam proses. In progress.
9	Menyempurnakan mekanisme bagi Direksi untuk sewaktu - waktu segera membahas isu - isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada kinerja perusahaan dengan muatan diantaranya dokumentasi yang harus dilengkapi dan kewajiban Direksi untuk melakukan analisis dengan memperhatikan risiko.	Perfect the mechanism for the Board of Directors to immediately discuss current issues regarding changes in the business environment and problems that have a major impact on the company's performance with the contents including documentation that must be completed and the Board of Directors' obligations to conduct analysis by paying attention to risk.	Analisis risiko untuk pembahasan isu - isu bisnis dan dokumentasinya. Risk analysis for discussing business issues and its documentation.	Dalam proses. In progress.
10	Melengkapi kegiatan penarikan pinjaman kredit dengan analisis yang memadai dan analisis risiko.	Complementing credit loan withdrawal activities with adequate analysis and risk analysis.	Penyampaian Nota Dinas Nomor 0423 /ND/ SDMU&IT/2022 dari Direktur SDM , Umum dan IT perihal Tindak lanjut AoI Tahun Buku 2021. Submission of Service Note Number 0423 /ND/ SDMU&IT/2022 from the Director of HR, General and IT regarding Follow-up to AoI for Fiscal Year 2021.	Dalam proses. In progress.
11	Menggunakan aplikasi komputer untuk seluruh tahapan proses pengukuran kinerja.	Use computer applications for all stages of the performance measurement process.	Proses pengukuran kinerja menggunakan aplikasi komputer. Performance measurement process using computer applications.	Sesuai rekomendasi. As recommended.
12	Menyempurnakan kebijakan Teknologi Informasi dengan menambahkan muatan tentang pelaporan Teknologi Informasi.	Improve Information Technology policy by adding content on Information Technology reporting.	Kebijakan TI disempurnakan dengan menambahkan muatan tentang laporan TI. IT policy is refined by adding content on IT reports.	Dalam proses. In progress.
13	Melaksanakan SOP pengadaan barang dan jasa secara konsisten.	Implement SOP for procurement of goods and services consistently.	Memerintahkan kepada Tim PBJ Jawa Barat dan Banten untuk melaksanakan SOP secara konsisten. Order the West Java and Banten PBJ Teams to implement SOPs consistently.	Sesuai rekomendasi. As recommended.
14	Menggunakan e-proc dalam proses pengadaan barang/jasa.	Use e-proc in the procurement process of goods/services.	Berkoordinasi dengan Divis IT untuk progres implementasi e-proc. Coordinate with the IT Division for the progress of e-proc implementation.	Dalam proses. In progress.
15	Menginstruksikan kepada atasan langsung peserta diklat untuk melakukan penilaian / evaluasi level 3 (perubahan perilaku) sesuai pedoman.	Instruct the direct superiors of training participants to conduct level 3 assessments/ evaluations (behavioral changes) according to the guidelines.	Penyampaian Nota Dinas Nomor 0423 /ND/ SDMU&IT/2022 dari Direktur SDM, Umum dan IT perihal Tindak lanjut AoI Tahun Buku 2021. Submission of Service Note Number 0423 /ND/ SDMU&IT/2022 from the Director of HR, General Affairs and IT regarding the Follow-up to AoI for Fiscal Year 2021.	Dalam proses. In progress.
16	Meningkatkan kesempatan karyawan untuk mengikuti diklat dan pengembangan karyawan.	Increase employee opportunities to participate in training and employee development.	Penyampaian Nota Dinas Nomor 0423 /ND/ SDMU&IT/2022 dari Direktur SDM, Umum dan IT perihal Tindak lanjut AoI Tahun Buku 2022. Submission of Service Note Number 0423 /ND/ SDMU&IT/2022 from the Director of HR, General Affairs and IT regarding the Follow-up to AoI for Fiscal Year 2022.	Dalam proses. In progress.

ASPEK DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS ASPECTS

No	Rekomendasi AoI GCG Recommendations of AoI GCG		Tindak Lanjut Temuan Follow-up of Findings	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
17	Menyusun rencana/program pengembangan SDM berupa coaching & counselling dan melaksanakannya.	Prepare HR development plans/programs in the form of coaching & counselling and implement them.	Penyampaian Nota Dinas Nomor 0423/ND/SDMU&IT/2022 dari Direktur SDM, Umum dan IT perihal Tindak lanjut AoI Tahun Buku 2023. Submission of Service Note Number 0423/ND/SDMU&IT/2022 from the Director of HR, General Affairs and IT regarding the Follow-up to AoI for Fiscal Year 2023.	Dalam proses. In progress.
18	Mengevaluasi terjadinya peningkatan kecelakaan kerja dan menindaklanjutinya.	Evaluate the increase in work accidents and follow up on them.	Penyampaian Nota Dinas Nomor 0423/ND/SDMU&IT/2022 dari Direktur SDM, Umum dan IT perihal Tindak lanjut AoI Tahun Buku 2024. Submission of Service Note Number 0423/ND/SDMU&IT/2022 from the Director of HR, General Affairs and IT regarding the Follow-up to AoI for the 2024 Fiscal Year.	Dalam proses. In progress.
19	Meninjau dan menyempurnakan kebijakan remunerasi secara berkala.	Review and refine remuneration policies periodically.	Kebijakan remunerasi ditinjau secara berkala. Remuneration policies are reviewed periodically.	Dalam proses. In progress.
20	Menyempurnakan Pedoman Pembinaan Anak Perusahaan Perum Perhutani dengan ketentuan penilaian kinerja Direksi secara individu.	Improve the Perum Perhutani Subsidiary Development Guidelines with provisions for individual performance assessment of the Board of Directors.	Pedoman Pembinaan Anak Perusahaan (PAP) agar direvisi. Subsidiary Development Guidelines (PAP) to be revised.	Belum proses. Not yet processed.
21	Menginstruksikan kepada pengurus Perusahaan anak perusahaan (PT Inhutani III, PT Inhutani IV, PT Inhutani V, PT Palawi Risorsis) untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mampu untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.	Instruct the management of subsidiary companies (PT Inhutani III, PT Inhutani IV, PT Inhutani V, PT Palawi Risorsis) to improve company performance so that they are able to achieve the set performance targets.	Menginstruksikan kepada pengurus Perusahaan anak perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Instructing the management of subsidiary companies to improve company performance.	Sesuai rekomendasi. As recommended.
22	Memutakhirkan kebijakan akuntansi dengan memperhatikan amandemen PSAK 16 tentang Aset Tetap dan PSAK 69 tentang Agrikultur serta penetapan PSAK 71, 72 dan 73.	Update accounting policies by taking into account amendments to PSAK 16 concerning Fixed Assets and PSAK 69 concerning Agriculture as well as the determination of PSAK 71, 72 and 73.	Penyampaian Nota Dinas Nomor 0423/ND/SDMU&IT/2022 dari Direktur SDM, Umum dan IT perihal Tindak lanjut AoI Tahun Buku 2023. Submission of Service Note Number 0423/ND/SDMU&IT/2022 from the Director of HR, General Affairs and IT regarding the Follow-up to AoI for the 2023 Fiscal Year.	Dalam proses. In progress.
23	Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko.	Follow up on recommendations of the Risk Management Maturity Level Assessment Report.	Penyampaian Nota Dinas Nomor 0423/ND/SDMU&IT/2022 dari Direktur SDM, Umum dan IT perihal Tindak lanjut AoI Tahun Buku 2023. Submission of Service Note Number 0423/ND/SDMU&IT/2022 from the Director of HR, General Affairs and IT regarding the Follow-up to AoI for the 2023 Fiscal Year.	Dalam proses. In progress.
24	Melakukan evaluasi / penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas dan selanjutnya menerbitkan internal control report.	Conduct evaluation/assessment of the effectiveness of internal control at the entity level and then issue an internal control report.	Melakukan evaluasi dengan pihak eksternal dalam pelaksanaan integrity risk assessment. Conducting evaluations with external parties in the implementation of integrity risk assessments.	Sesuai rekomendasi. As recommended.
25	Menetapkan unit kerja yang melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan melaporkan hasil pemantauannya kepada Dewan Pengawas.	Determine work units that monitor the follow-up of the results of the Public Accounting Firm (KAP) and report the results of their monitoring to the Supervisory Board.	Penyampaian Nota Dinas Nomor 0423/ND/SDMU&IT/2022 dari Direktur SDM, Umum dan IT perihal Tindak lanjut AoI Tahun Buku 2023. Submission of Service Note Number 0423/ND/SDMU&IT/2022 from the Director of HR, General Affairs and IT regarding Follow-up to AoI for the 2023 Financial Year.	Dalam proses. In progress.

ASPEK DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS ASPECTS

No	Rekomendasi AoI GCG Recommendations of AoI GCG		Tindak Lanjut Temuan Follow-up of Findings	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
26	Menginstruksikan pimpinan unit kerja untuk meningkatkan komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi / temuan audit internal dan eksternal.	Instruct work unit leaders to increase their commitment to following up on recommendations/ findings of internal and external audits.	Instruksi kepada pimpinan unit kerja untuk peningkatan komitmen dalam tindak lanjut rekomendasi audit internal dan eksternal. Instructions to work unit leaders to increase commitment in following up on internal and external audit recommendations.	Selesai. Finished
27	Meningkatkan kegiatan / upaya - upaya penyelesaian kasus litigasi termasuk sengketa dengan pihak lain.	Increase activities/efforts to resolve litigation cases including disputes with other parties.	Memprioritaskan penanganan perkara strategis dengan pendampingan kuasa hukum eksternal. Prioritize handling of strategic cases with assistance from external legal counsel.	Sesuai rekomendasi. As recommended.
28	Menetapkan KPI unit kerja yang indikatornya mengukur ketepatan waktu pembayaran kepada pihak ketiga (pemasok/ kreditor) dan melaksanakannya.	Determine work unit KPIs whose indicators measure the timeliness of payments to third parties (suppliers/ creditors) and implement them.	Memasukkan indikator yang mengatur ketepatan waktu pembayaran kepada pihak ketiga yaitu "ketepatan pembayaran kepada kreditor" di SMK Tahun 2022 untuk Kepala Divisi Keuangan. Include indicators that regulate the timeliness of payments to third parties, namely "timeliness of payments to creditors" in the 2022 SMK for the Head of Finance Division.	Sesuai rekomendasi As recommended.
29	Menginstruksikan kepada Tim Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan survei kepuasan pemasok.	Instruct the Procurement of Goods and Services Team to conduct a supplier satisfaction survey.	Melaksanakan survei kepuasan pemasok. Conduct supplier satisfaction surveys.	Belum proses. Not yet processed.
30	Menyusun kebijakan mengenai pengelolaan penggunaan pinjaman jangka panjang sesuai dengan peruntukannya dan pelunasannya.	Prepare policies regarding the management of the use of long-term loans in accordance with their designation and repayment.	Membuat kebijakan pengelolaan penggunaan pinjaman jangka panjang. Create policies for managing the use of long-term loans.	Dalam proses. In progress.
31	Melaporkan dokumen perpajakan dan membayar kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku.	Report tax documents and pay tax obligations in accordance with applicable regulations.	Dokumen pajak dan pembayaran sesuai ketentuan. Tax documents and payments according to provisions.	Dalam proses. In progress.
32	Melakukan upaya untuk meningkatkan pencapaian indeks kepuasan karyawan.	Make efforts to improve employee satisfaction index achievement.	Melakukan survei kepuasan karyawan. Conduct employee satisfaction surveys.	Dalam proses. In progress.
33	Meningkatkan upaya penagihan dana kemitraan yang dipinjamkan kepada usaha kecil.	Increase efforts to collect partnership funds loaned to small businesses.	Penagihan dana kemitraan yang dipinjamkan kepada usaha kecil agar dapat ditingkatkan prosesnya. Collecting partnership funds loaned to small businesses so that the process can be improved.	Dalam proses. In progress.
34	Menyampaikan laporan manajemen triwulanan dan laporan manajemen tahunan kepada Dewan Pengawas sebelum disampaikan kepada Pemilik Modal.	Submit quarterly management reports and annual management reports to the Board of Supervisors before being submitted to the Capital Owners.	Laporan manajemen triwulanan dan laporan manajemen tahunan disampaikan kepada Dewan Pengawas tepat waktu. Quarterly management reports and annual management reports are submitted to the Board of Supervisors on time.	Dalam proses. In progress.
35	Menyempurnakan pedoman / tata tertib rapat Direksi dengan menambahkan muatan mengenai pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, dan pembahasan / telaah atas arahan/ usulan dan/ atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Pengawas terkait dengan usulan Direksi.	Improve the guidelines / rules of procedure for Board of Directors meetings by adding content regarding the implementation of evaluation of follow-up results of previous meetings, and discussion / review of directives / proposals and / or follow-up implementation of decisions of the Board of Supervisors related to proposals from the Board of Directors.	Menyempurnakan pedoman / tata tertib rapat Direksi. Perfecting the guidelines / rules of procedure for Board of Directors meetings.	Belum Selesai. Unfinished.

ASPEK DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS ASPECTS

No	Rekomendasi AoI GCG Recommendations of AoI GCG	Tindak Lanjut Temuan Follow-up of Findings	Status Tindak Lanjut Follow-up Status	
36	Menyampaikan kepada Sekretaris Dewan Pengawas agar mencantumkan penjelasan alasan ketidakhadiran Direksi dalam rapat gabungan Direksi dan Dewan Pengawas dalam risalah rapat.	Submit to the Secretary of the Board of Supervisors to include an explanation of the reasons for the absence of the Board of Directors in joint meetings of the Board of Directors and the Board of Supervisors in the minutes of the meeting.	Membuat surat kepada Dewan Pengawas untuk mencantumkan penjelasan alasan ketidakhadiran Direksi dalam rapat gabungan Direksi dan Dewan Pengawas dalam risalah rapat. Writing a letter to the Supervisory Board to include an explanation of the reasons for the absence of the Board of Directors in the joint meeting of the Board of Directors and the Supervisory Board in the minutes of the meeting.	Dalam proses. In progress.
37	Menginstruksikan kepada Sekretaris Perusahaan agar mencantumkan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dalam risalah rapat Direksi.	Instruct the Corporate Secretary to include an evaluation of the implementation of the previous meeting's decisions in the minutes of the Board of Directors' meeting.	Mencantumkan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dalam risalah rapat Direksi. Including an evaluation of the implementation of the decisions of the previous meeting in the minutes of the Board of Directors meeting.	Dalam proses. In progress.
38	Mencantumkan uraian mengenai penggunaan standar profesi auditor internal sebagai acuan yang digunakan dalam penyusunan <i>Internal Audit Charter</i> .	Include a description of the use of internal auditor professional standards as a reference used in preparing the Internal Audit Charter.	Uraian mengenai penggunaan standar profesi auditor internal dituangkan dalam internal audit charter. A description of the use of internal auditor professional standards is stated in the internal audit charter.	Dalam proses. In progress.
39	Meningkatkan kualitas Kepala SPI melalui program sertifikasi profesi yang tepat.	Improve the quality of the Head of SPI through an appropriate professional certification program.	Melakukan sertifikasi profesi untuk Kepala SPI. Conducting professional certification for the Head of SPI.	Sesuai rekomendasi. As recommended.
40	Menyempurnakan pedoman pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan ekstern yang mencakup BPK, KAP, dan lainnya serta melaksanakannya.	Improve the guidelines for monitoring the follow-up of external supervision results that include the BPK, KAP, and others and implement them.	Melakukan revisi pedoman Tindak Lanjut hasil pengawasan audit ekstern. Revising the guidelines for follow-up on the results of external audit supervision.	Dalam proses. In progress.
41	Menginstruksikan kepada Kepala SPI agar meningkatkan aplikabilitas rekomendasi SPI sehingga dapat diterapkan oleh unit kerja.	Instruct the Head of SPI to improve the applicability of SPI recommendations so that they can be implemented by work units.	Meminta dirut untuk menginstruksikan kepada KSPI untuk meningkatkan aplikabilitas. Requesting the President Director to instruct KSPI to improve applicability.	Sesuai rekomendasi. As recommended.
42	Menginstruksikan kepada Sekretaris Perusahaan agar membuat risalah rapat untuk setiap rapat Direksi sesuai best practices dengan mencantumkan : (1) Pendapat yang berbeda (<i>dissenting comments</i>) dengan apa yang diputuskan dalam rapat (bila ada), (2) jalannya rapat (dinamika rapat), (3) evaluasi atas keputusan rapat sebelumnya.	Instruct the Corporate Secretary to prepare minutes of each Board of Directors meeting in accordance with best practices by including: (1) Dissenting comments to what was decided in the meeting (if any), (2) the course of the meeting (meeting dynamics), (3) evaluation of the decisions of the previous meeting.	Risalah rapat direksi dilengkapi dengan (1) Pendapat yang berbeda (<i>dissenting comments</i>) dengan apa yang diputuskan dalam rapat (bila ada), (2) jalannya rapat (dinamika rapat), (3) evaluasi atas keputusan rapat sebelumnya. The minutes of the board of directors' meeting are supplemented with (1) dissenting comments regarding what was decided at the meeting (if any), (2) the course of the meeting (meeting dynamics), (3) evaluation of the decisions of the previous meeting.	Dalam proses. In progress.
43	Meginstruksikan kepada Sekretaris Perusahaan agar menyusun rencana kerja untuk program pengenalan perusahaan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas yang baru diangkat.	Instruct the Corporate Secretary to prepare a work plan for the company's introduction program to newly appointed members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board.	Belum ada anggota direksi dan anggota Dewan Pengawas yang baru diangkat pada tahun 2022 sampai Januari 2023. There are no new members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board appointed in 2022 until January 2023.	Belum ada anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang baru diangkat pada 2022 - Januari 2023. There are no new members of the Board of Directors and Supervisory Board appointed in 2022 - January 2023.

ASPEK PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

INFORMATION DISCLOSURE AND TRANSPARENCY ASPECTS

No	Rekomendasi AoI GCG Recommendations of AoI GCG	Tindak Lanjut Temuan Follow-up of Findings	Status Tindak Lanjut Follow-up Status	
1	Menyempurnakan muatan Laporan Tahunan tentang profil Perusahaan yang mencakup: 1. Nama pemegang jabatan dalam struktur organisasi. 2. Pelaporan kepemilikan saham dari Keluarga Direktur dan Dewan Pengawas pada Perusahaan yang bersangkutan dan Perusahaan lain.	Perfecting the contents of the Annual Report on the Company profile which includes: 1. Names of office holders in the organizational structure. 2. Reporting of share ownership from the Director's Family and the Supervisory Board in the Company concerned and other Companies.	Menyempurnakan laporan tahunan dilengkapi dengan nama pemegang jabatan dalam struktur organisasi. Complete the annual report with the names of office holders in the organizational structure.	Sesuai rekomendasi. As recommended.
2	Menyempurnakan muatan Laporan tahunan tentang bagian tersendiri mengenai Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan yang mencakup: 1. Uraian tentang komponen-komponen dari pendapatan dan beban lainnya yang nilainya sama atau lebih dari 20% dari total nilai pendapatan dan beban lainnya, 2. Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta dampak perubahan harga terhadap laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun, 3. Uraian tentang prospek usaha perusahaan disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya.	Improve the contents of the Annual Report regarding a separate section on Management Analysis and Discussion of Company Performance which includes: 1. Description of the components of other income and expenses whose value is equal to or more than 20% of the total value of other income and expenses, 2. Discussion of the impact of price changes on the company's sales or net income and the impact of price changes on the company's operating profit for 2 (two) years, 3. Description of the company's business prospects accompanied by quantitative supporting data if there is a reliable data source	Menyempurnakan laporan tahunan dilengkapi dengan: 1. Uraian tentang komponen-komponen dari pendapatan dan beban lainnya yang nilainya sama atau lebih dari 20% dari total nilai pendapatan dan beban lainnya, 2. Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta dampak perubahan harga terhadap laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun, 3. Uraian tentang prospek usaha perusahaan disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya Complete the annual report with: 1. Description of the components of other income and expenses whose value is equal to or more than 20% of the total value of other income and expenses, 2. Discussion of the impact of price changes on sales or net income of the company and the impact of price changes on the company's operating profit for 2 (two) years, 3. Description of the company's business prospects accompanied by quantitative supporting data if there is a reliable data source.	Sesuai rekomendasi. As recommended.
3	Menyempurnakan muatan Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang mencakup: 1. Uraian tentang program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi 2. Uraian pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi & Remunerasi 3. Biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen 4. Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung	Improve the contents of the Annual Report to include disclosure of Good Corporate Governance practices which include: 1. Description of training programs to improve the competence of the Board of Directors 2. Description of the implementation of the activities of the Nomination & Remuneration Committee 3. Costs incurred related to corporate social responsibility, especially regarding the company's commitment to consumer protection 4. Description of activities and costs incurred related to corporate social responsibility, especially	Menyempurnakan laporan tahunan dilengkapi dengan: 1. Uraian tentang program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi 2. Uraian pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi 3. Biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen 4. Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai	Sesuai rekomendasi. As recommended.

ASPEK PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

INFORMATION DISCLOSURE AND TRANSPARENCY ASPECTS

No	Rekomendasi AoI GCG Recommendations of AoI GCG	Tindak Lanjut Temuan Follow-up of Findings	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
	jawab sosial perusahaan terutama mengenai community development program yang mencakup informasi tentang program pengembangan pendidikan, program perbaikan kesehatan, program pengembangan seni budaya. regarding community development programs which include information on education development programs, health improvement programs, arts and culture development programs	community development program yang mencakup informasi tentang program pengembangan pendidikan, program perbaikan kesehatan, program pengembangan seni budaya. Perfecting the annual report by completing with: 1. Description of training programs to improve the competence of the Board of Directors 2. Description of the implementation of the activities of the Nomination and Remuneration Committee 3. Costs incurred related to corporate social responsibility, especially regarding the company's commitment to consumer protection 4. Description of activities and costs incurred related to corporate social responsibility, especially regarding community development programs that include information on educational development programs, health improvement programs, arts and culture development programs	

Mekanisme dan Struktur Tata Kelola Perusahaan

Mekanisme tata kelola perusahaan merupakan komponen kunci dalam memastikan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) di Perum Perhutani. Implementasi tata kelola perusahaan tidak hanya bergantung pada struktur tata kelola yang kokoh tetapi juga membutuhkan aturan main yang jelas. Mekanisme tata kelola mencakup aturan main, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak pengambil keputusan dan pihak yang melakukan kontrol terhadap keputusan tersebut.

Perum Perhutani memiliki berbagai mekanisme tata kelola perusahaan yang diterapkan untuk mendukung GCG, antara lain:

- **Panduan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code):** Berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perum Perhutani Nomor : 06/DWAS-PHT/2023 dan Nomor : 162/KPTS/DIR/11/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) Perum Perhutani panduan ini menyediakan pedoman komprehensif mengenai tata kelola

Corporate Governance Mechanism and Structure

Corporate governance mechanisms are a key component in ensuring the implementation of good corporate governance (GCG) principles in Perum Perhutani. The implementation of corporate governance does not only depend on a solid governance structure but also requires clear rules. Governance mechanisms include clear rules, procedures, and relationships between decision makers and those who control those decisions.

Perum Perhutani has various corporate governance mechanisms implemented to support GCG, including:

- **Good Corporate Governance Guidelines (GCG Code):** Joint Decree of the Supervisory Board and Directors of Perum Perhutani Number: 06/DWAS-PHT/2023 and Number: 162/KPTS/DIR/11/2023 Concerning Perum Perhutani's Code of Corporate Governance that must be followed by all elements of the company.

perusahaan yang baik yang harus diikuti oleh seluruh elemen perusahaan.

- **Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct):** Berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perum Perhutani Nomor: 07/DWAS-PHT/2023 dan Nomor: 163/KPTS/DIR/11/2023 Tentang Pedoman Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) Perum Perhutani, pedoman ini mengatur standar perilaku etis yang diharapkan dari seluruh insan Perhutani dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
- **Panduan Kerja Dewan Pengawas dan Direksi (Board Manual):** Berdasarkan KEP DIR 161 KPTS/DIR/11/2023 tentang *Board Manual* Perum Perhutani, board manual ini menjabarkan panduan lengkap mengenai peran, tanggung jawab, dan tata kerja Dewan Pengawas dan Direksi.
- **Piagam Komite Audit:** Ditandatangani pada 12 Agustus 2014, piagam ini menetapkan tugas, tanggung jawab, dan tata kerja Komite Audit dalam membantu Dewan Pengawas melakukan fungsi pengawasan yang efektif terhadap sistem pengendalian internal dan pelaporan keuangan.
- **Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi:** Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: 07/DWAS-PHT/2020 tanggal 28 April 2020, piagam ini mengatur tata cara nominasi dan remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas dan Direksi serta pejabat eksekutif kunci lainnya.
- **Piagam Komite Pemantau Risiko:** Ditetapkan pada 12 Agustus 2014, piagam ini menguraikan peran dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dalam membantu Dewan Pengawas mengawasi manajemen risiko di Perhutani.
- Mekanisme-mekanisme ini dipublikasikan di situs web resmi Perhutani serta portal internal perusahaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Hal ini memastikan aksesibilitas dan transparansi bagi seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, pedoman-pedoman tersebut secara berkala diperbarui agar sesuai dengan kondisi terkini, praktik terbaik (best practices), serta perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dengan menerapkan mekanisme tata kelola yang kuat dan jelas, Perum Perhutani memastikan bahwa setiap keputusan dan kontrol atas keputusan tersebut dilakukan secara efektif demi terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini juga mencerminkan komitmen Perhutani dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan.

- **Corporate Ethics Guidelines (Code of Conduct):** Based on Joint Decree of the Supervisory Board and Directors of Perum Perhutani Number: 07/DWAS-PHT/2023 and Number: 163/KPTS/DIR/11/2023 Concerning Perum Perhutani's Code of Conduct, this guideline regulates the standards of ethical behavior expected of all Perhutani personnel in carrying out their duties and responsibilities.
- **Board of Supervisors and Board of Directors Work Guidelines (Board Manual):** Based on KEP DIR 161 KPTS/DIR/11/2023 concerning Perum Perhutani Board Manual, this board manual outlines a complete guide to the roles, responsibilities, and work procedures of the Board of Supervisors and Board of Directors.
- **Audit Committee Charter:** Signed on August 12, 2014, this charter sets out the duties, responsibilities, and working procedures of the Audit Committee in assisting the Supervisory Board in carrying out effective oversight functions over the internal control system and financial reporting.
- **Nomination and Remuneration Committee Charter:** Based on the Decision of the Supervisory Board Number: 07/DWAS-PHT/2020 dated April 28, 2020, this charter regulates the procedures for nomination and remuneration for members of the Supervisory Board and the Board of Directors as well as other key executive officers.
- **Risk Monitoring Committee Charter:** Stipulated on August 12, 2014, this charter outlines the roles and responsibilities of the Risk Monitoring Committee in assisting the Supervisory Board in overseeing risk management at Perhutani.
- These mechanisms are published on Perhutani's official website and the company's internal portal in Indonesian and English. This ensures accessibility and transparency for all stakeholders. In addition, these guidelines are periodically updated to comply with current conditions, best practices, and changes in applicable laws and regulations.
- By implementing strong and clear governance mechanisms, Perum Perhutani ensures that every decision and control over the decision is carried out effectively in order to create good corporate governance. This also reflects Perhutani's commitment to maintaining integrity, transparency, and accountability in managing the company.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Perum Perhutani memiliki struktur tata kelola perusahaan yang dirancang untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Struktur ini terdiri dari beberapa organ utama, yaitu: Rapat Pembahasan Bersama (RPB), Dewan Pengawas, dan Direksi. Masing-masing organ memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik sesuai dengan undang-undang dan Anggaran Dasar Perhutani.

1. Rapat Pembahasan Bersama (RPB)

Rapat Pembahasan Bersama, atau yang biasa disebut RPB, adalah organ Perhutani yang memiliki wewenang khusus yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Wewenang ini diatur dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perhutani. RPB berfungsi sebagai forum atau badan yang membahas dan memutuskan berbagai hal strategis yang penting bagi kelangsungan dan perkembangan perusahaan, yang meliputi bidang operasional, keuangan, dan manajerial.

2. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah organ Perhutani yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan umum maupun khusus terhadap kebijakan pengelolaan dan jalannya perusahaan. Dewan Pengawas juga memberikan nasihat kepada Direksi dalam mengelola perusahaan. Peran Dewan Pengawas mencakup:

- Mengawasi pelaksanaan strategi dan operasional perusahaan.
- Menilai kinerja Direksi dan memberikan umpan balik serta saran perbaikan.
- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan penerapan prinsip-prinsip GCG.

3. Direksi

Direksi adalah organ Perhutani yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perhutani untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Tugas dan peran Direksi meliputi:

- Mengelola dan memimpin jalannya operasional perusahaan sehari-hari.

Corporate Governance Structure

Perum Perhutani has a corporate governance structure designed to ensure the implementation of good corporate governance (GCG) principles. This structure consists of several main organs, namely: Joint Discussion Meeting (RPB), Supervisory Board, and Board of Directors. Each organ has a specific role and responsibility in accordance with the law and Perhutani's Articles of Association.

1. Joint Discussion Meeting (RPB)

Joint Discussion Meeting, or commonly called RPB, is a Perhutani organ that has special authority that is not given to the Board of Directors or the Supervisory Board. This authority is regulated within the limits determined by law and/or Perhutani's Articles of Association. RPB functions as a forum or body that discusses and decides on various strategic matters that are important for the continuity and development of the company, which include operational, financial, and managerial areas.

2. Supervisory Board

The Supervisory Board is a Perhutani organ responsible for carrying out general and specific supervision of the company's management policies and operations. The Supervisory Board also provides advice to the Board of Directors in managing the company. The role of the Supervisory Board includes:

- Supervising the implementation of the company's strategies and operations.
- Assessing the performance of the Board of Directors and providing feedback and suggestions for improvement.
- Ensuring compliance with regulations and the implementation of GCG principles.

3. Board of Directors

The Board of Directors is a Perhutani organ that has the authority and full responsibility for managing Perhutani for the benefit of the company in accordance with the intent and purpose set out in the Articles of Association. The duties and roles of the Board of Directors include:

- Managing and leading the company's daily operations.



- Merancang serta mengimplementasikan strategi bisnis dan rencana kerja perusahaan.
- Mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyusun laporan keuangan dan manajemen secara transparan dan akuntabel kepada Dewan Pengawas dan pemangku kepentingan lainnya.
- Designing and implementing the company's business strategies and work plans.
- Representing the company, both inside and outside the court, in accordance with applicable provisions.
- Preparing financial and management reports in a transparent and accountable manner to the Supervisory Board and other stakeholders

Sinergi Antar Organ Tata Kelola

Hubungan kerja antara RPB, Dewan Pengawas, dan Direksi didasarkan pada prinsip saling melengkapi dan mendukung dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Masing-masing organ menjalankan peran dan fungsinya dengan tingkat integritas dan profesionalisme yang tinggi, demi terciptanya tata kelola yang baik dan berkelanjutan.

Komitmen terhadap GCG

Dengan struktur tata kelola yang terdiri dari RPB, Dewan Pengawas, dan Direksi, Perhutani berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara konsisten. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, memperkuat daya saing, dan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Synergy Between Governance Organs

The working relationship between the RPB, Supervisory Board, and Board of Directors is based on the principle of complementarity and support in order to achieve the company's goals. Each organ carries out its role and function with a high level of integrity and professionalism, in order to create good and sustainable governance.

Commitment to GCG

With a governance structure consisting of the RPB, Supervisory Board, and Board of Directors, Perhutani is committed to implementing GCG principles consistently. This is expected to improve the company's performance, strengthen competitiveness, and provide sustainable added value for all stakeholders.

Pemilik Modal dan Rapat Pembahasan Bersama

Capital Owners and Joint Discussion Meetings

Perum Perhutani merupakan BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum), dimana 100 persen modalnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Modal Perusahaan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Secara lengkap, informasi mengenai Komposisi Pemegang Saham Perusahaan telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pemilik Modal/Menteri adalah Menteri yang ditunjuk dan atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku Pemilik Modal pada Perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Pembahasan Bersama (RPB) sebagai instansi tertinggi dalam Perhutani, mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Pengawas atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang tersebut mencakup permintaan pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Direksi terkait dengan pengelolaan Perhutani, mengubah Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan anggota Dewan Pengawas, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direktur dan lain-lain.

Sebagai perwujudan dari tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menjamin untuk memberikan segala keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan kepada RPB, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan RPB

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, RPB terdiri dari 2 (dua) jenis RPB, yaitu RPB Tahunan dan RPB lainnya atau disebut juga RPB Luar Biasa. Penyelenggaraan RPB dapat dilakukan dalam 2 (dua) metode, yaitu RPB dengan kehadiran (RPB fisik) dan RPB Sirkuler.

Perum Perhutani is a BUMN in the form of a Public Company (Perum), where 100 percent of its capital is owned by the Government of the Republic of Indonesia. The Company's capital is a state asset that is separated and not divided into shares. Complete information regarding the Company's Shareholder Composition has been described in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

Capital Owner/Minister is the Minister who is appointed and/or given the authority to represent the Government as the Capital Owner in the Company by taking into account the applicable laws and regulations.

Joint Discussion Meeting (RPB) as the highest institution in Perhutani, has authority that is not given to the Supervisory Board or Board of Directors within the limits specified in the Articles of Association and applicable laws and regulations. This authority includes requesting accountability from the Supervisory Board and Board of Directors related to the management of Perhutani, changing the Articles of Association, appointing and dismissing the Board of Directors and members of the Supervisory Board, deciding on the division of tasks and authority of management among Directors and others.

As a manifestation of good corporate governance, the Company guarantees to provide all information related to the Company to the RPB, as long as it does not conflict with laws and regulations

Implementation of RPB

According to the Company's Articles of Association, RPB consists of 2 (two) types of RPB, namely Annual RPB and other RPB or also called Extraordinary RPB. Implementation of RPB can be carried out in 2 (two) methods, namely RPB with presence (physical RPB) and Circular RPB.

Penyelenggaraan RPB di Tahun 2023

Di tahun 2023, Perusahaan menyelenggarakan 1 (satu) kali RPB, yaitu RPB Tahunan Tahun Buku 2022.

Pelaksana RPB

Perhutani bukan merupakan Perusahaan terbuka yang memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek dimana sahamnya hanya dimiliki Pemerintah Indonesia, sehingga dalam pelaksanaan RPB, Perhutani dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan dan tidak melibatkan pihak pihak independen.

Implementation of RPB in 2023

In 2023, the Company will hold 1 (one) RPB, namely the Annual RPB for the 2022 Financial Year.

RPB Implementer

Perhutani is not a public company that trades its shares on the Stock Exchange where its shares are only owned by the Indonesian Government, so that in the implementation of the RPB, Perhutani is carried out by the Corporate Secretary and does not involve independent parties.

Kehadiran Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi dalam RPB

Presence of Shareholders, Supervisory Board and Directors in RPB

Nama Name	Jabatan Position	
Bambang Hendroyono	Ketua Dewan Pengawas	Chairman of Supervisory Board
Komaruddin Simanjuntak	Anggota Dewan Pengawas	Member of Supervisory Board
YB. Priyatmo Hadi	Anggota Dewan Pengawas	Member of Supervisory Board
Bambang Risyanto	Anggota Independen Dewan Pengawas	Independent Member of Supervisory Board
Chalid Muhammad	Anggota Independen Dewan Pengawas	Independent Member of Supervisory Board
Noer Fauzi Rachman	Anggota Independen Dewan Pengawas	Independent Member of Supervisory Board
Wahyu Kuncoro	Direktur Utama	President Director
Dewi Fitrianingrum	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Director of Finance and Risk Management
Anggar Widiyatmoko	Direktur Komersial	Commercial Director
Natalas Anis Harjanto	Direktur Operasi & Perhutanan Sosial	Director of Operations & Social Forestry
Muhammad Denny Ermansyah	Direktur SDM, Umum & IT	Director of HR, General Affairs & IT
Endung Trihartaka	Direktur Perencanaan & Pengembangan	Director of Planning & Development

Perwakilan Pemilik Modal (Kementerian BUMN)/ Capital Owner Representative (Ministry of BUMN)

RPB Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022

Perhutani menyelenggarakan RPB Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan tahun buku 2022. Agenda dan keputusan RPB Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Berikut adalah tabel hasil RPB tahunan serta realisasi pelaksanaan hasil keputusannya:

RPB for Approval of Annual Report and Ratification of Financial Report for Fiscal Year 2022

Perhutani held RPB for Approval of Annual Report and Ratification of Financial Report and Social and Environmental Responsibility Report for Fiscal Year 2022. The agenda and decisions of RPB for Approval of Annual Report and Ratification of Financial Report for Fiscal Year 2022 are as follows

The following is a table of the results of the annual RPB and the realization of the implementation of the results of its decisions:

RPB Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2022

RPB for Approval of Annual Report and Ratification of Financial Report for the 2022 financial year

Agenda Agenda	Keputusan RPB RPB Decision	Realisasi Realization
Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Pengawas serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku 2022. Approval of the Annual Report and the Supervisory Implementation Report of the Board of Supervisors and the Company's Consolidated Financial Statements for the 2022 Financial Year.	Menyetujui Laporan Tahunan Perhutani untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Pengawas. Approving Perhutani's Annual Report for the financial year ending on December 31, 2022 and ratifying the Financial Statements ending on December 31, 2022 and the Supervisory Board's Supervisory Implementation Report.	Laporan Auditor Independen atas laporan Keuangan Konsolidasi. Independent Auditor's Report on the Consolidated Financial Statements.
Pengesahan laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Pengawas. Ratification of the Supervisory Board's supervisory task implementation report.	Mengesahkan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas untuk Tahun Buku 2022. Ratifying the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Supervisors for the 2022 Financial Year.	Telah dilaksanakan sepenuhnya. Has been fully implemented.
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2022. Ratification of the Consolidated Financial Statements for the 2022 Financial Year.	Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2022. Ratifying the Consolidated Financial Statements for the 2022 Financial Year.	Telah dilaksanakan sepenuhnya. Has been fully implemented.
Laporan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility Report	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Auditor Independen atas Laporan TJSL untuk Tahun Buku 2022 yang disampaikan Direksi dan telah diaudit oleh KAP. Approving and ratifying the Independent Auditor's Report on the TJSL Report for the 2022 Financial Year submitted by the Board of Directors and audited by the Public Accounting Firm.	Telah dilaksanakan sepenuhnya. Has been fully implemented.
Persetujuan penggunaan laba hasil kegiatan usaha tahun buku 2022 Approval of the use of profits from business activities for the 2022 Financial Year	Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba tahun berjalan konsolidasi. Approving and determining the use of consolidated current year profit	
Persetujuan pembagian laba hasil kegiatan usaha tahun buku 2022 Approval of the distribution of profits from business activities for the 2022 Financial Year	Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Pengawas serta tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Pengawas untuk Tahun Buku 2022 akan ditetapkan kemudian secara terpisah dan tersendiri oleh Perum Perhutani selaku Pemegang Saham mayoritas. The Salary of the Board of Directors and the Honorarium of the Board of Supervisors as well as allowances and facilities for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2022 Financial Year will be determined later separately and individually by Perum Perhutani as the majority Shareholder.	Telah dilaksanakan sepenuhnya. Has been fully implemented.
Persetujuan pemberian tantiem dan besaran gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas. Approval of the provision of bonuses and the amount of salary/honorarium, allowances, facilities and remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors.	Menyetujui pemberian Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas Tahun Buku 2022. Approving the provision of Tantiem for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2022 Financial Year.	Telah dilaksanakan sepenuhnya. Has been fully implemented.

RPB Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2022

RPB for Approval of Annual Report and Ratification of Financial Report for the 2022 financial year

Agenda Agenda	Keputusan RPB RPB Decision	Realisasi Realization
Persetujuan proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP). Approval of the appointment process for the Public Accounting Firm (KAP).	Menyetujui penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 dan Laporan TJSL Tahun Buku 2023. Approving the appointment of the Public Accounting Firm that will audit the Financial Statements for the 2023 Financial Year and the TJSL Report for the 2023 Financial Year.	Telah dilaksanakan sepenuhnya. Has been fully implemented.

RPB Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021

Perhutani menyelenggarakan RPB Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2021. Agenda dan keputusan RPB Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Berikut adalah tabel hasil RPB tahunan serta realisasi pelaksanaan hasil keputusannya:

RPB Approval of Annual Report and Ratification of Financial Report for Fiscal Year 2021

Perhutani held RPB Approval of Annual Report and Ratification of Financial Report and Partnership and Community Development Program (PKBL) Report for fiscal year 2021. The agenda and decisions of RPB Approval of Annual Report and Ratification of Financial Report for fiscal year 2021 are as follows:

The following is a table of the results of the annual RPB and the realization of the implementation of the results of its decisions:

Agenda Agenda	Keputusan RPB RPB Decision	Realisasi Realization
Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Pengawas serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku 2021. Approval of the Annual Report and the Supervisory Implementation Report of the Board of Supervisors and the Company's Consolidated Financial Statements for the 2021 Financial Year.	Menyetujui Laporan Tahunan Perhutani untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Pengawas. Approving Perhutani's Annual Report for the financial year ending on December 31, 2021 and ratifying the Financial Statements ending on December 31, 2021 and the Supervisory Board's Supervision Implementation Report.	Laporan Auditor Independen atas laporan Keuangan Konsolidasi. Independent Auditor's Report on the Consolidated Financial Statements.
Pengesahan laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Pengawas. Ratification of the Supervisory Board's supervisory task implementation report.	Mengesahkan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas untuk Tahun Buku 2021. Ratifying the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Supervisors for the 2021 Financial Year.	Telah dilaksanakan sepenuhnya. Has been fully implemented.
Pengesahan Penyajian Kembali (Restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2019. Ratification of the Restatement of the Consolidated Financial Statements for the 2019 financial year.	Mengesahkan Penyajian Kembali (Restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2021. Ratifying the Restatement of the Consolidated Financial Statements for the 2021 Financial Year.	Telah dilaksanakan sepenuhnya. Has been fully implemented.

Agenda Agenda	Keputusan RPB RPB Decision	Realisasi Realization
Pengesahan laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Ratification of the Partnership and Community Development Program (PKBL) financial report.	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Auditor Independen atas Laporan PKBL untuk Tahun Buku 2021 yang disampaikan Direksi dan telah diaudit oleh KAP. Approving and ratifying the Independent Auditor's Report on the PKBL Report for the 2021 Financial Year submitted by the Board of Directors and audited by the KAP.	Telah dilaksanakan sepenuhnya. Has been fully implemented.
Persetujuan penggunaan laba hasil kegiatan usaha tahun buku 2021. Approval of the use of profits from business activities for the 2021 financial year.	Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba tahun berjalan konsolidasi. Approving and determining the use of consolidated current year profit	Telah dilaksanakan sepenuhnya. Has been fully implemented.
Persetujuan pembagian laba hasil kegiatan usaha tahun buku 2021. Approval of the distribution of profits from business activities for the 2016 financial year.	Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Pengawas serta tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Pengawas untuk Tahun Buku 2022 akan ditetapkan kemudian secara terpisah dan tersendiri oleh Perum Perhutani selaku Pemegang Saham mayoritas. The Salary of the Board of Directors and Honorarium of the Board of Supervisors as well as allowances and facilities for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2017 Financial Year will be determined later separately and individually by Perum Perhutani as the majority Shareholder.	Telah dilaksanakan sepenuhnya. Has been fully implemented.
Persetujuan pemberian tantiem dan besaran gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas. Approval of the provision of bonuses and the amount of salary/honorarium, allowances, facilities and remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board.	Menyetujui pemberian Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas Tahun Buku 2021. Approved the provision of Tantiem for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2021 Financial Year.	Telah dilaksanakan sepenuhnya. Has been fully implemented.
Persetujuan proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP). Approval of the Public Accounting Firm (KAP) appointment process	Menyetujui penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 dan Laporan PKBL Tahun Buku 2022. Approved the appointment of the KAP that will audit the Financial Statements for the 2022 Financial Year and the PKBL Report for the 2022 Financial Year.	Telah dilaksanakan sepenuhnya. Has been fully implemented.

Dewan Pengawas

Supervisory Board

Dewan Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perhutani yang dilakukan Direksi, serta memberi nasihat kepada Direksi. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

The Supervisory Board is tasked with supervising management policies, the course of management, both regarding the Company and Perhutani's business carried out by the Board of Directors, and providing advice to the Board of Directors. This is done solely for the benefit of the Company and in accordance with the intent and purpose of the Company.

Komposisi Dewan Pengawas

Jumlah dan komposisi Dewan Pengawas ditetapkan oleh Pemilik Modal melalui RPB, disesuaikan dengan Anggaran Dasar serta dengan memperhatikan visi, misi dan rencana strategis pengembangan Perusahaan agar dimungkinkan terlaksananya pengawasan yang efektif dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta independen.

Composition of the Supervisory Board

The number and composition of the Supervisory Board are determined by the Capital Owner through the RPB, adjusted to the Articles of Association and by taking into account the vision, mission and strategic development plan of the Company to enable effective supervision and fast, accurate and independent decision making. Komposisi Dewan Pengawas

Komposisi anggota Dewan Pengawas Perhutani sampai dengan 31 Desember 2023 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Modal adalah sebagai berikut:

The composition of the members of the Perhutani Supervisory Board until December 31, 2023 based on the Deed of Statement of Decision of Capital Holders is as follows:

Komposisi Dewan Pengawas

Composition of the Supervisory Board

Nama Name	Jabatan Position	Domisili Domicile	SK Menteri BUMN Decree of the Minister of BUMN
Bambang Hendroyono	Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Supervisory Board	Bogor	SK-47/MBU/02/2020 tgl 12 Februari 2020
Komaruddin Simanjuntak	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	Jakarta	SK-83/MBU/03/2020 tgl 19 Maret 2020
YB. Priyatmo Hadi	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	Depok	SK-238/MBU/07/2020 tgl 14 Juli 2020
Bambang Risyanto	Anggota Dewan Pengawas Independen Member of the Independent Supervisory Board	Surabaya	SK-83/MBU/03/2020 tgl 19 Maret 2020
Chalid Muhammad	Anggota Dewan Pengawas Independen Member of the Independent Supervisory Board	Jakarta	SK-83/MBU/03/2020 tgl 19 Maret 2020
Noer Fauzi Rachman	Anggota Dewan Pengawas Independen Member of the Independent Supervisory Board	Bandung	SK-126/MBU/04/2020 tgl 22 April 2020

Persyaratan dan Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas

Seluruh anggota Dewan Pengawas yang diangkat dan diberhentikan oleh RPB telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perhutani serta sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Menteri BUMN Nomer PER-02/MBU/02/2015 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Dewan Pengawas harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang juga tertuang dalam Board Manual Perhutani, yang mencakup antara lain:

- Bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
- Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/ wakil kepala daerah;
- Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Pengawas;
- Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundangundangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Pengawas kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Pengawas;
- Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas pada perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut; dan
- Sehat jasmani dan rohani, tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Pengawas yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit.

Dewan Pengawas Perhutani juga diwajibkan untuk membuat surat pernyataan terkait dengan pemenuhan persyaratan dan disampaikan kepada Perhutani untuk didokumentasikan.

Keterangan terkait dengan keberagaman dalam pendidikan, pengalaman kerja dan usia dapat dilihat secara rinci pada sub bab profil Dewan Pengawas.

Requirements and Diversity of the Composition of the Supervisory Board

All members of the Supervisory Board appointed and dismissed by the RPB are in accordance with the Articles of Association of Perhutani and in accordance with the requirements contained in the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-02/MBU/02/2015 concerning the requirements and procedures for the appointment and dismissal of members of the Supervisory Board and the Supervisory Board of State-Owned Enterprises

The Supervisory Board must meet the general requirements and special requirements which are also stated in the Perhutani Board Manual, which include among others:

- Not a political party administrator, and/or a legislative member and/or not currently running as a legislative candidate;
- Not a regional head/deputy regional head and/or not currently running as a regional head/ deputy regional head candidate;
- Not currently holding a position that has the potential to cause a conflict of interest with the company concerned unless signing a statement of willingness to resign from the position if elected as a member of the Supervisory Board;
- Not currently holding a position that is prohibited by law from being held concurrently with the position of a member of the Supervisory Board unless signing a statement of willingness to resign from the position if elected as a member of the Supervisory Board;
- Not serving as a member of the Supervisory Board at the company concerned for 2 (two) consecutive terms; and
- Physically and mentally healthy, not currently suffering from an illness that could hinder the implementation of duties as a member of the Supervisory Board as evidenced by a health certificate from a hospital.

The Perhutani Supervisory Board is also required to make a statement letter regarding the fulfillment of requirements and submit it to Perhutani for documentation.

Information related to diversity in education, work experience and age can be seen in detail in the sub-chapter of the Supervisory Board profile.

Pedoman Kerja Dewan Pengawas

Perhutani telah memiliki pedoman kerja Dewan Pengawas yang telah diatur dalam *Board Manual* yang merupakan acuan bagi Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya agar selaras dengan praktik-praktik GCG bagi Dewan Pengawas. Pedoman tersebut berisi penjabaran tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian tugas, rapat, ketentuan benturan kepentingan, kepemilikan saham, hubungan Dewan Pengawas dengan Direksi, RUPS dan tatanan korporasi lainnya.

Pedoman Direksi dan Dewan Pengawas merupakan naskah yang telah disepakati Direksi dan Dewan Pengawas dan wajib dijadikan pedoman atau rujukan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing organ, agar meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ Perusahaan sejalan dengan penerapan asas-asas GCG untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan. Pedoman tersebut mengatur berbagai aspek mengenai Dewan Pengawas antara lain mencakup:

- Dewan Pengawas meliputi: Susunan serta Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas; Persyaratan dan kriteria menjadi Anggota Dewan Pengawas; Mekanisme Pengangkatan; Mekanisme Pengunduran Diri; Perangkapan Jabatan Anggota Dewan Pengawas; Penilaian Kinerja Dewan Pengawas; Organ Pendukung Dewan Pengawas.
- Tata Laksana Hubungan Kerja Dewan Pengawas dan Direksi, meliputi: Pertemuan Formal; Pertemuan Informal; Komunikasi Formal; Komunikasi Informal.
- Tindakan Tertentu Perusahaan meliputi: Transaksi Material; Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu; Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan; Transaksi Benturan Kepentingan; Pertanggungjawaban Direksi.

Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengawas

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak

Supervisory Board Work Guidelines

Perhutani has a Supervisory Board work guideline that has been regulated in the Board Manual which is a reference for the Supervisory Board in carrying out its duties in order to be in line with GCG practices for the Supervisory Board. The guideline contains a description of the duties, authorities, obligations, responsibilities, division of tasks, meetings, provisions on conflicts of interest, share ownership, the relationship between the Supervisory Board and the Board of Directors, GMS and other corporate arrangements.

The Directors and Supervisory Board Guidelines are a document that has been agreed upon by the Directors and the Supervisory Board and must be used as a guideline or reference in carrying out the main duties and work functions of each organ, in order to improve the quality and effectiveness of working relationships between the Company's organs in line with the implementation of GCG principles to achieve the Company's Vision and Mission. The guidelines regulate various aspects regarding the Supervisory Board, including:

- The Supervisory Board includes: Composition, Duties and Authorities of the Supervisory Board; Requirements and criteria for becoming a Member of the Supervisory Board; Appointment Mechanism; Resignation Mechanism; Dual Positions of Members of the Supervisory Board; Performance Assessment of the Supervisory Board; Supporting Organs of the Supervisory Board.
- Implementation of the Working Relationship between the Supervisory Board and the Board of Directors, including: Formal Meetings; Informal Meetings; Formal Communication; Informal Communication.
- Certain Company Actions include: Material Transactions; Affiliated Transactions and Conflicts of Interest Certain Transactions; Affiliated Transactions and Conflicts of Interest; Conflicts of Interest Transactions; Accountability of the Board of Directors.

Duties, Obligations and Authorities of the Supervisory Board

Duties and Responsibilities of the Supervisory Board

The Supervisory Board carries out its duties and responsibilities independently and is not involved

terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Pengawas adalah lembaga di dalam Perusahaan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan umum dan/atau khusus sesuai dengan PP Nomor 72 Tahun 2010, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Pengawas dilakukan dengan prinsip-prinsip berikut:

1. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas selalu mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.
2. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi.
3. Dewan Pengawas bertindak sebagai kolektif saat melakukan pengawasan dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Pengawas.
4. Pengawasan tidak boleh beralih menjadi pelaksanaan tugas eksekutif, kecuali dalam situasi di mana Perusahaan tidak memiliki Direksi. Dewan Pengawas mempunyai kewajiban untuk mengisi jabatan Direksi yang kosong dalam waktu maksimal 30 hari setelah posisi tersebut kosong.
5. Pengawasan dilakukan secara proaktif, tidak hanya sebatas menyetujui atau menolak tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas, tetapi juga mencakup semua aspek bisnis Perusahaan.
6. Dewan Pengawas dapat menggunakan layanan profesional independen dan/atau membentuk Komite untuk mendukung tugas Dewan Pengawas.

Dalam hubungannya dengan Pemilik Modal, Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk:

- Memberikan pendapat dan saran kepada Pemilik Modal mengenai Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Perusahaan, serta perubahan dan penambahan yang diperlukan.
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Pemilik Modal mengenai setiap masa yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan.
- Melaporkan secara cepat kepada Pemilik Modal

in decision-making related to operational activities except for other matters stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations

The Supervisory Board is an institution within the Company that is responsible for carrying out general and/or specific supervision in accordance with Government Regulation Number 72 of 2010, as well as providing advice to the Board of Directors. Supervision and advisory activities by the Supervisory Board are carried out with the following principles:

1. In carrying out its supervisory function, the Supervisory Board always complies with Government Regulation Number 72 of 2010, provisions of laws and regulations, and applies the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.
2. Supervision is carried out by the Supervisory Board on the management of the Company by the Board of Directors.
3. The Supervisory Board acts as a collective when carrying out supervision and cannot act individually on behalf of the Supervisory Board.
4. Supervision may not shift to the implementation of executive duties, except in situations where the Company does not have a Board of Directors. The Supervisory Board is obliged to fill vacant Board of Director positions within a maximum of 30 days after the position becomes vacant.
5. Supervision is carried out proactively, not only limited to approving or rejecting actions that require the approval of the Supervisory Board, but also covering all aspects of the Company's business.
6. The Supervisory Board may use independent professional services and/or form a Committee to support the duties of the Supervisory Board.

In relation to the Capital Owner, the Supervisory Board has the responsibility and obligation to:

- Provide opinions and suggestions to the Capital Owner regarding the Company's annual Work Plan and Budget, as well as changes and additions as necessary.
- Follow the development of the Company's activities, provide opinions and suggestions to the Capital Owner regarding any period that is considered important for the management of the Company.
- Report promptly to the Capital Owner if there is

jika terjadi penurunan kinerja Perusahaan beserta saran untuk langkah perbaikan yang diperlukan.

- Meneliti, menelaah, dan menandatangani Laporan Tahunan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi.
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain yang ditetapkan oleh Pemilik Modal.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemilik Modal.
- Mengajukan calon Auditor Eksternal kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara yang dilengkapi dengan alasan pencalonan dan estimasi biaya.

Dewan Pengawas juga memiliki kewajiban dalam:

- Pengelolaan Manajemen Risiko: Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi secara berkala mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko.
- Sistem Pengendalian Internal: Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif.
- Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi: Memastikan Direksi mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemilik Modal dan Instansi Pemerintah terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan.
- Etika Bisnis dan Anti Korupsi: Menegakkan integritas dengan tidak memberikan, menawarkan, atau menerima imbalan terkait untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan yang tidak sesuai dengan hukum.

Wewenang Dewan Pengawas

Kewenangan Dewan Pengawas diatur dalam PP No 72 Tahun 2010, mencakup: a) Persetujuan tertulis Dewan Pengawas diperlukan atas tindakan-tindakan Direksi. b) Direksi hanya dapat melakukan tindakan tertentu setelah memperoleh tanggapan tertulis Dewan Pengawas dan persetujuan dari Pemilik Modal.

Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak secara tertulis rencana/usulan Direksi dalam hal:

- Mengagunkan aset tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.
- Melakukan kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama

a decline in the Company's performance along with suggestions for necessary corrective steps.

- Examine, review, and sign the Annual Report prepared and submitted by the Board of Directors.
- Carry out other supervisory tasks determined by the Capital Owner.
- Be responsible for the implementation of its duties to the Capital Owner.
- Submit candidates for External Auditors to the Minister of State-Owned Enterprises, complete with reasons for nomination and cost estimates.

The Supervisory Board also has obligations in:

- Risk Management: Supervise and provide advice to the Board of Directors periodically regarding the effectiveness of risk management implementation.
- Internal Control System: Supervise and provide advice to the Board of Directors to establish an effective internal control system.
- Information Disclosure and Confidentiality: Ensure that the Board of Directors discloses important information in the Company's Annual Report and Financial Report to Capital Owners and related Government Agencies in accordance with applicable regulations, and maintains the confidentiality of Company information.
- Business Ethics and Anti-Corruption: Uphold integrity by not giving, offering, or receiving related rewards to influence actions or decisions that are not in accordance with the law.

Authorities of the Supervisory Board

The authority of the Supervisory Board is regulated in PP No. 72 of 2010, including: a) Written approval from the Supervisory Board is required for the actions of the Board of Directors. b) The Board of Directors may only take certain actions after obtaining a written response from the Supervisory Board and approval from the Capital Owner.

The Supervisory Board has the authority to approve or reject in writing the plans/proposals of the Board of Directors in the following cases:

- Collateralizing fixed assets for short-term credit withdrawals.
- Carrying out licensing cooperation, management contracts, leasing assets, Joint

Operasi (KSO), dan perjanjian kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu seperti yang ditetapkan oleh Menteri.

- Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, dengan pengecualian pinjaman yang timbul dari transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan yang harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas.
- Melepaskan dan menghapuskan aset bergerak dengan umur ekonomis lazim industri selama maksimal 5 tahun.
- Menghapuskan piutang macet dan persediaan barang mati.
- Menetapkan struktur organisasi hingga 1 tingkat di bawah Direksi.

Selain itu, Dewan Pengawas berhak untuk:

- Masuk ke lokasi perusahaan, termasuk pekarangan, gedung, dan kantor, serta memiliki hak untuk mengakses buku, surat, dokumen, dan melakukan pemeriksaan kas serta kekayaan perusahaan untuk verifikasi.
- Meminta penjelasan dari Direksi atau pejabat lain terkait pengelolaan perusahaan, mengetahui kebijakan dan tindakan yang dilakukan atau akan dilakukan oleh Direksi, dan meminta kehadiran Direksi atau pejabat lain di rapat Dewan Pengawas.
- Sementara waktu, Dewan Pengawas berhak untuk memberhentikan anggota Direksi jika terbukti bertentangan dengan PP No 72 Tahun 2010, menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, melalaikan kewajiban, atau terdapat alasan mendesak bagi Perusahaan.
- Membentuk komite lain selain komite audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
- Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu, dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
- Melakukan tindakan Pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
- Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibahas;
- Melaksanakan kewenangan Pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Menteri.

Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab secara internal agar pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasihat

Operations (KSO), and other cooperation agreements with a certain value or period as determined by the Minister.

- Receiving or providing medium/long-term loans, with the exception of loans arising from business transactions and loans given to subsidiaries that must be reported to the Supervisory Board.
- Releasing and writing off movable assets with a normal economic life of the industry for a maximum of 5 years.
- Writing off bad debts and dead stock.
- Establish an organizational structure up to 1 level below the Board of Directors

In addition, the Supervisory Board has the right to:

- Enter the company's premises, including yards, buildings, and offices, and have the right to access books, letters, documents, and conduct cash and company asset checks for verification.
- Request an explanation from the Board of Directors or other officials regarding the management of the company, find out the policies and actions taken or to be taken by the Board of Directors, and request the presence of the Board of Directors or other officials at the Supervisory Board meeting.
- In the meantime, the Supervisory Board has the right to dismiss members of the Board of Directors if they are proven to be in conflict with PP No. 72 of 2010, cause losses to the Company, neglect obligations, or there are urgent reasons for the Company.
- Form other committees besides the audit committee, if deemed necessary by considering the Company's capabilities;
- Use experts for certain matters, for a certain period of time at the Company's expense, if deemed necessary;
- Carry out Company Management actions in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of this Government Regulation;
- Attend Board of Directors meetings and provide views on matters discussed;
- Carry out other supervisory powers as long as they do not conflict with the provisions of laws and regulations, Articles of Association, and/or Ministerial decisions.

The Supervisory Board divides tasks and responsibilities internally so that the implementation of the supervisory and advisory

berjalan efektif. Berikut pembagian tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas:

functions runs effectively. The following is the division of tasks and responsibilities of the Supervisory Board:

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Division of Tasks and Responsibilities of the Supervisory Board

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Duties
Bambang Hendroyono	Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Supervisory Board	Melakukan koordinasi dengan segenap anggota Dewan Pengawas maupun perangkat Dewan Pengawas berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas. Coordinating with all members of the Supervisory Board and the Supervisory Board apparatus regarding the duties and authorities of the Supervisory Board.
Komaruddin Simanjuntak	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	- Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas khususnya di bidang Hukum serta Keamanan dan Perlindungan Hutan. - Sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko Perum Perhutani. - Handling activities related to the duties and authorities of the Supervisory Board, especially in the fields of Law and Forest Security and Protection. - As Chair of the Perum Perhutani Risk Monitoring Committee.
Chalid Muhammad	Anggota Dewan Pengawas Independen Member of the Independent Supervisory Board	- Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas khususnya di bidang Keuangan, RKAP & RJPP, Laporan Manajemen, Pemeriksaan Umum dan Khusus, Pengendalian Internal, Penunjukan KAP, Proses Audit Laporan Keuangan. - Sebagai Ketua Komite Audit Perum Perhutani. - Handle activities related to the duties and authorities of the Supervisory Board, especially in the fields of Finance, RKAP & RJPP, Management Reports, General and Special Audits, Internal Control, Appointment of KAP, Financial Report Audit Process. - As Chairman of the Audit Committee of Perum Perhutani.
Noer Fauzi Rachman	Anggota Dewan Pengawas Independen Member of the Independent Supervisory Board	Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas khususnya di bidang Penelitian dan Pengembangan Produksi dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Konservasi Lingkungan Hidup, Perhutanan Sosial serta <i>Corporate Social Responsibility</i> dan TJSL. Handling activities related to the duties and authorities of the Supervisory Board, especially in the fields of Research and Development of Forest Resources Production and Management, Environmental Conservation, Social Forestry and Corporate Social Responsibility and TJSL.
Bambang Risyanto	Anggota Dewan Pengawas Independen Member of the Independent Supervisory Board	Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas khususnya di bidang Operasional dan Industri, Pengembangan Bisnis, dan Pemasaran. Handling activities related to the duties and authorities of the Supervisory Board, especially in the fields of Operations and Industry, Business Development, and Marketing.
Yohanes Babtista Priyatmo Hadi	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	Bertugas menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengawas khususnya di bidang Organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM) <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), Teknologi Informasi, serta Humas dan Umum. In charge of handling activities related to the duties and authorities of the Supervisory Board, especially in the fields of Organization, Human Resources (HR) <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), Information Technology, and Public Relations and General.

Prosedur Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan Dewan Pengawas

- Semua keputusan Rapat Dewan Pengawas harus berdasarkan itikad baik, pertimbangan rasional dan telah melalui investigasi mendalam terhadap berbagai hal yang relevan, informasi yang cukup dan bebas dari benturan kepentingan serta dibuat secara independen oleh masing-masing anggota Dewan Pengawas;
- Pengambilan keputusan oleh Dewan Pengawas dilakukan melalui Rapat Dewan Pengawas;
- Para Anggota Dewan Pengawas diperkenankan memiliki pendapat yang berbeda walaupun secara keseluruhan jumlah suara yang setuju lebih banyak. Dalam hal seperti ini maka pendapat yang berbeda tersebut harus dicatat dalam risalah rapat sebagai bentuk dari *dissenting opinion*;
- Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa;
- Untuk menjaga independensi dan objektivitas, setiap anggota Dewan Pengawas yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak ikut serta dalam pemberian suara untuk pengambilan keputusan. Hal tersebut harus dicatat dalam risalah rapat;
- Setiap anggota Dewan Pengawas berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Pengawas lain yang diwakilinya;
- Suara blanko atau abstain dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat;
- Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;
- Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai tanggung jawab;
- Keputusan-keputusan yang menyangkut aspek-aspek strategis harus dilakukan melalui mekanisme Rapat Dewan Pengawas. Aspek-aspek strategis tersebut antara lain meliputi semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan Menteri setelah mendapatkan rekomendasi tertulis Dewan Pengawas serta semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Pengawas;

Procedures for Discussion of Issues and Decision-Making of the Supervisory Board

- All decisions of the Supervisory Board Meeting must be based on good faith, rational considerations and have gone through in-depth investigations of various relevant matters, sufficient information and free from conflict of interest and made independently by each member of the Supervisory Board;
- Decision-making by the Supervisory Board is carried out through a Supervisory Board Meeting;
- Members of the Supervisory Board are allowed to have different opinions even though overall the number of votes in favor is greater. In such cases, the different opinions must be recorded in the minutes of the meeting as a form of dissenting opinion;
- In the event that a decision cannot be made by consensus, the decision is made by ordinary majority vote;
- To maintain independence and objectivity, each member of the Supervisory Board who has a conflict of interest is required not to participate in voting for decision making. This must be recorded in the minutes of the meeting;
- Each member of the Supervisory Board has the right to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Supervisory Board he/she represents;
- Blank votes or abstentions are considered to agree to the proposal submitted at the meeting;
- Invalid votes are considered non-existent and are not counted in determining the number of votes cast at the meeting;
- If the number of votes in favor and against are the same, the decision of the meeting is in accordance with the opinion of the meeting chairperson while still considering the provisions regarding responsibility;
- Decisions concerning strategic aspects must be made through the Supervisory Board Meeting mechanism. These strategic aspects include all actions of the Board of Directors that must obtain the approval of the Minister after obtaining a written recommendation from the Supervisory Board and all actions of the Board of Directors that must obtain the written approval of the Supervisory Board;

- Dewan Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Pengawas dengan ketentuan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Pengawas.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023 Dewan Pengawas telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka tugas pengawasan sebagai berikut:

- Meninjau ulang dan memonitor kinerja Perhutani setiap bulan.
- Mengevaluasi dan memberikan persetujuan RKAP dan RJPP.
- Memberikan usulan nominasi calon Direksi.
- Memberikan usulan remunerasi pengurus Perhutani.
- Menetapkan KAP untuk melakukan audit 31 Desember 2023.
- Evaluasi investasi Perhutani.
- Tanggapan/Pendapat/Saran terkait transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Pengawas atau Menteri BUMN (Pemilik Modal).

Dewan Pengawas Independen

Dewan Pengawas Independen merupakan Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari luar Perhutani dan tidak memiliki benturan kepentingan sehingga tidak berpotensi mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.

Masing-masing Dewan Pengawas Independen Perhutani telah membuat Surat Pernyataan Independensi yang menyatakan bahwa sebagai Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/ atau keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan/atau Pemiik Modal atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

- The Board of Supervisors may also make valid decisions without holding a Board of Supervisors Meeting provided that all members of the Board of Supervisors have been notified in writing and all members of the Board of Supervisors have given their approval regarding the proposal submitted in writing by signing the approval. Decisions taken in this manner have the same legal force as decisions taken validly at a Board of Supervisors Meeting.

Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Supervisors in 2023

Throughout 2023 the Supervisory Board has carried out a series of activities within the framework of its supervisory duties as follows

- Review and monitor Perhutani's performance every month.
- Evaluate and approve the RKAP and RJPP.
- Provide proposals for nominations of candidates for the Board of Directors.
- Provide proposals for remuneration of Perhutani management.
- Determine KAP to conduct an audit on December 31, 2023.
- Evaluate Perhutani's investment.
- Responses/Opinions/Suggestions regarding transactions or actions of the Board of Directors within the scope of the authority of the Supervisory Board or the Minister of SOEs (Capital Owner).

Independent Supervisory Board

The Independent Supervisory Board is a member of the Supervisory Board who comes from outside Perhutani and does not have a conflict of interest so that it does not have the potential to interfere with its ability to carry out tasks independently and critically, both in relation to each other and in relation to the Board of Directors.

Each of Perhutani's Independent Supervisory Board members has made an Independence Statement stating that as an Independent Commissioner they do not have any financial, management, share ownership, and/or family relationships with other members of the Supervisory Board, Directors and/ or Capital Owners or relationships that may affect their ability to act independently and have met the requirements as an Independent Supervisory

dan telah memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas Independen sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan Desember 2023 Perhutani memiliki 3 (tiga) orang Dewan Pengawas Independen yaitu Chalid Muhammad, Noer Fauzi Rachman dan Bambang Risyanto. Dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik Dewan Pengawas setiap tahun selalu memperbaharui Pakta Integritas dan dalam memberikan Persetujuan atas Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.

Independensi Dewan Pengawas

Dalam upaya meminimalkan potensi benturan kepentingan, setiap anggota Dewan Pengawas yang baru menjabat diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan status independensinya. Selain itu anggota Dewan Pengawas juga telah mengisi Daftar Khusus yang memuat Informasi mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya di perusahaan lain. Surat Pernyataan dan Daftar Khusus tersebut disimpan dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

Pernyataan Dewan Pengawas Independen

Dewan Pengawas Independen Perhutani telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi dan telah disampaikan kepada Pemilik Modal.

Hubungan Afiliasi dan Kepengurusan di Perusahaan Lain

Hubungan afiliasi meliputi hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Dewan Pengawas dengan sesama anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi serta Pemilik Modal Perusahaan, hubungan kepemilikan saham dan hubungan kepengurusan (rangkap jabatan) pada perusahaan lain. Hubungan Keluarga dan Keuangan Dewan Pengawas selama periode tahun 2023 sebagai berikut:

Board as per applicable laws and regulations

As of December 2023, Perhutani has 3 (three) Independent Supervisory Board members, namely Chalid Muhammad, Noer Fauzi Rachman and Bambang Risyanto. In implementing the principles of good corporate governance, the Supervisory Board annually renews the Integrity Pact and in providing Approval for Proposed Board of Directors Actions that must obtain recommendations from the Supervisory Board

Independence of the Supervisory Board

In an effort to minimize the potential for conflicts of interest, each new member of the Supervisory Board is required to sign a statement stating their independent status. In addition, members of the Supervisory Board have also filled out a Special List containing Information regarding their and/or their family's share ownership in other companies. The Statement Letter and Special List are stored and administered by the Company Secretary.

Statement of the Independent Supervisory Board

Perhutani's Independent Supervisory Board has prepared and signed a Statement of Independence and has submitted it to the Capital Owners.

Affiliation and Management Relationships in Other Companies

Affiliation relationships include family and financial relationships between members of the Supervisory Board and fellow members of the Supervisory Board and/or members of the Board of Directors and the Company's Capital Owners, share ownership relationships and management relationships (dual positions) in other companies. Family and Financial Relationships of the Supervisory Board during the 2023 period are as follows:

Hubungan Keluarga dan Keuangan Anggota Dewan Pengawas

Family and Financial Relationships of Supervisory Board Members

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationships with			Hubungan Keuangan dengan Family Relationships with			Hubungan Kepengurusan pada Perusahaan Lain sebagai Management Relations with Other Companies as		
	Dewan Pengawas Supervisory Board	Direksi Board of Directors	Pemilik Modal Capital Owners	Dewan Pengawas Supervisory Board	Direksi Board of Directors	Pemilik Modal Capital Owners	Dewan Pengawas Supervisory Board	Direksi Board of Directors	Pemilik Modal Capital Owners
Bambang Hendroyono	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bambang Risyanto	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Chalid Muhammad	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Komaruddin Simanjuntak	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Noer Fauzi Rachman	X	X	X	X	X	X	X	X	X
YB. Priyatmo Hadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Seluruh anggota Dewan Pengawas telah mengungkapkan kepemilikan sahamnya pada tahun 2023, baik kepemilikan pada Perhutani maupun pada perusahaan lainnya dan diperbaharui setiap tahunnya. Berikut tabel kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas Perhutani:

All members of the Supervisory Board have disclosed their share ownership in 2023, both ownership in Perhutani and other companies and are updated annually. The following is a table of share ownership of members of the Perhutani Supervisory Board:

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas

Share Ownership of Supervisory Board

Nama Name	Kepemilikan Saham di Perhutani Share Ownership in Perhutani	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain Share Ownership in Other Companies
Bambang Hendroyono	Nihil / Nil	Nihil / Nil
Bambang Risyanto	Nihil / Nil	Nihil / Nil
Chalid Muhammad	Nihil / Nil	Nihil / Nil
Komaruddin Simanjuntak	Nihil / Nil	Nihil / Nil
Noer Fauzi Rachman	Nihil / Nil	Nihil / Nil
YB. Priyatmo Hadi	Nihil / Nil	Nihil / Nil

Program Pengenalan dan Pelatihan Dewan Pengawas

Perhutani memiliki dan menjalankan program pengenalan bagi anggota Dewan Pengawas yang baru menjabat dengan tujuan memberikan gambaran kondisi Perhutani secara umum. Program pengenalan disusun dan disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan dalam bentuk tampilan presentasi serta materi cetak, meliputi:

- Profil Perhutani.
- Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan.
- Gambaran mengenai kondisi Perhutani berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasional,

Supervisory Board Introduction and Training Program

Perhutani has and runs an introduction program for newly appointed members of the Supervisory Board with the aim of providing a general overview of Perhutani's condition. The introduction program is prepared and delivered by the Corporate Secretary in the form of presentation displays and printed materials, including:

- Perhutani Profile.
- Implementation of GCG principles in the Company
- Description of Perhutani's condition related to objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategies, short-

strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang dan masalah-masalah strategis lainnya.

- Keterangan berkaitan dengan pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi di Perhutani.
- Pemahaman terkait dengan prinsip etika dan norma yang berlaku di lingkungan Perhutani serta masyarakat setempat.

term and long-term plans and other strategic issues.

- Information related to guidelines for implementing the duties and responsibilities of the Board of Directors at Perhutani.
- Understanding of ethical principles and norms applicable in the Perhutani environment and the local community

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas

Selama 2023 anggota Dewan Pengawas yang telah mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar adalah sebagai berikut:

Training and Competency Development Program for the Board of Supervisors

During 2023, members of the Board of Supervisors who have participated in training and seminar activities are as follows:

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas

Training and Competency Development Program for the Board of Supervisors

Tanggal Date	Tema Theme	Peserta Dewan Pengawas Members of the Supervisory Board
24-25 Mei 2023 May 24-25, 2023	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	1. Bambang Hendroyono 2. Bambang Risyanto 3. Chalid Muhammad 4. Komaruddin Simanjuntak 5. Noer Fauzi Rachman 6. YB. Priyatmo Hadi

Penilaian Terhadap Kinerja Komite-Komite Pendukung Di Bawah Dewan Pengawas

Selama tahun 2023, Dewan Pengawas diperkuat oleh tiga Komite pendukung yang telah berperan penting dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penasihat. Pertama, Komite Audit menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya sesuai dengan Piagam Komite Audit, memastikan bahwa proses pengawasan dilakukan dengan teliti dan akurat. Kedua, Komite Nominasi dan Remunerasi turut membantu dalam penetapan nominasi dan remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perhutani, memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan objektivitas. Ketiga, Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi sistem pengelolaan risiko, pengawasan internal, serta memberikan informasi yang berarti kepada Dewan Pengawas untuk mengantisipasi risiko potensial.

Assessment of the Performance of the Supporting Committees Under the Supervisory Board

During 2023, the Supervisory Board was strengthened by three supporting committees that have played an important role in carrying out the supervisory and advisory functions. First, the Audit Committee carries out its duties, responsibilities, and authorities in accordance with the Audit Committee Charter, ensuring that the supervisory process is carried out carefully and accurately. Second, the Nomination and Remuneration Committee assists in determining the nomination and remuneration for members of the Supervisory Board and the Board of Directors of Perhutani, ensuring that the process runs in accordance with the principles of fairness and objectivity. Third, the Risk Monitoring Committee evaluates the risk management system, internal supervision, and provides meaningful information to the Supervisory Board to anticipate potential risks.

Melalui pelaksanaan program kerja yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, ketiga komite ini telah berhasil melaksanakan kajian sistematis proses manajemen atas kegiatan-kegiatan korporasi. Kolaborasi yang efektif antara Dewan Pengawas dan ketiga komite pendukung ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan risiko yang baik dalam lingkungan korporasi Perhutani selama tahun 2023.

Berikut adalah ringkasan dari penilaian terhadap kinerja komite-komite pendukung di bawah Dewan Pengawas pada tahun 2023:

1. Komite Audit:

- Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya sesuai dengan Piagam Komite Audit.
- Melakukan kajian sistematis proses manajemen atas kegiatan-kegiatan korporasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

2. Komite Nominasi dan Remunerasi:

- Membantu Dewan Pengawas dalam penetapan nominasi dan remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi Perhutani.
- Berperan dalam memastikan proses nominasi dan remunerasi dilakukan secara adil dan objektif.

3. Komite Pemantau Risiko:

- Memberikan masukan dan melakukan evaluasi sistem pengelolaan risiko serta pengawasan internal.
- Menyediakan informasi kepada Dewan Pengawas mengenai masalah terkait risiko untuk membantu dalam mengantisipasi risiko potensial.

Dengan menjalankan program kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, ketiga komite-komite ini mendukung Dewan Pengawas dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penasihat dengan baik selama tahun 2023.

Through the implementation of work programs determined in accordance with their respective duties and responsibilities, these three committees have succeeded in carrying out a systematic review of the management process for corporate activities. Effective collaboration between the Supervisory Board and these three supporting committees has made a significant contribution in ensuring transparency, accountability, and good risk management in Perhutani's corporate environment during 2023.

The following is a summary of the assessment of the performance of the supporting committees under the Supervisory Board in 2023:

1. Audit Committee:

- Carry out its duties, responsibilities, and authorities in accordance with the Audit Committee Charter.
- Conduct systematic reviews of the management process for corporate activities to ensure transparency and accountability.

2. Nomination and Remuneration Committee

- Assist the Supervisory Board in determining nominations and remuneration for the Perhutani Supervisory Board and Board of Directors.
- Play a role in ensuring that the nomination and remuneration process is carried out fairly and objectively.

3. Risk Monitoring Committee:

- Provide input and evaluate the risk management system and internal supervision.
- Provide information to the Supervisory Board regarding risk-related issues to assist in anticipating potential risks.

By implementing work programs in accordance with their duties and responsibilities effectively, these three committees support the Supervisory Board in carrying out its supervisory and advisory functions properly during 2023.

Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas/Kunjungan Kerja

Implementation of Supervisory Board Duties/Working Visit

Tanggal Date	Tempat Tujuan Destination	Perihal Regarding	Peserta Participant
9 Maret 2023 March 9, 2023	Ranca Upas (Ciwidey)	Kunjungan kerja lapangan sehubungan dengan peristiwa pengrusakan ekologi akibat acara besar momotoran yang menjadi kemelut dan viral Field work visit in connection with an event of ecological destruction caused by a large motorbike event which became chaotic and went viral	Noer Fauzi Rachman
29-30 Maret 2023 March 29-30, 2023	Perhutani Forestry Institute	Mengisi acara orientasi pra tugas pada recruitment baru pegawai Perhutani Attending pre-assignment orientation events for new recruitment of Perhutani employees	Noer Fauzi Rachman
22-23 Mei 2023 May 22-23, 2023	Perhutani Forestry Institute	Sharing Session bersama Ibu Justi Ariesthiawati (Purnakaryawan Senior General Manager Assessment Center PT Telkom (Persero) Tbk) tentang Revitalisasi Assessment Sharing Session with Justi Ariesthiawati (Retired Senior General Manager of the Assessment Center PT Telkom (Persero) Tbk) regarding Assessment	Noer Fauzi Rachman
7-10 Juli 2023 July 7-10, 2023	KPH Pekalongan Timur East Pekalongan Forest Management Unit	1. KPH Pekalongan Timur 2. Acara Konsolidasi mengenali arah perhutanan sosial dan reforma agraria di Jawa 1. East Pekalongan Forest Management Unit 2. The Consolidation Event recognizes the direction of social forestry and agrarian reform in Java	Noer Fauzi Rachman
10-11 Oktober 2023 October 10-11, 2023	Perhutani Forestry Institute	Groundcheck Aset Perhutani Heritage Groundcheck of Perhutani Heritage Assets	Noer Fauzi Rachman
21-24 Desember 2023 December 21-24, 2023	1. Perhutani Forestry Institute 2. Divisi Regional Jawa Timur 3. Divisi Regional Jawa Barat dan Banten 4. Divisi Regional Jawa Tengah 1. Perhutani Forestry Institute 2. East Java Regional Division 3. West Java and Banten Regional Division 4. Central Java Regional Division	Melaksanakan kegiatan penilaian Perhutani Innovation Award 2022-2023 dengan tema "Grow and Develop Innovation" Carrying out assessment activities for the 2022-2023 Perhutani Innovation Award with the theme "Grow and Develop Innovation"	Noer Fauzi Rachman

Rapat Dewan Pengawas

Rapat Dewan Pengawas dilaksanakan dalam rangka review analisis kinerja bulanan Perusahaan, mengetahui perkembangan kondisi serta masalah-masalah aktual yang dialami perusahaan termasuk pemberian nasihat/saran kepada Direksi. Rapat Dewan Pengawas terdiri dari Rapat Internal, Rapat Gabungan dengan Direksi dan Rapat Pembahasan Bersama dengan Pemilik Modal.

Supervisory Board Meeting

The Supervisory Board Meeting is held in order to review the Company's monthly performance analysis, find out the development of conditions and actual problems experienced by the company including providing advice/suggestions to the Board of Directors. The Supervisory Board Meeting consists of Internal Meetings, Joint Meetings with the Board of Directors and Joint Discussion Meetings with Capital Owners.

Dalam kesempatan Rapat Pembahasan Bersama, Dewan Pengawas menyampaikan pendapat/tanggapan/masukan kepada Pemilik Modal atas Laporan Tahunan dan Usulan RKAP serta masalah-masalah penting lainnya.

Kebijakan Rapat

- Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan di kantor pusat Perusahaan atau di lokasi lain di wilayah Indonesia setidaknya satu kali setiap bulan, dengan kemungkinan mengundang Direksi.
- Dewan Pengawas dapat mengadakan rapat sesuai kebutuhan, baik atas inisiatif Ketua Dewan Pengawas, usulan minimal 1/3 anggota Dewan Pengawas, atau atas permintaan khusus dari Menteri yang menentukan agenda rapat.
- Keterlibatan setiap peserta rapat dalam proses pengambilan keputusan adalah suatu keharusan.
- Jika ada anggota Dewan Pengawas yang tidak dapat hadir, kehadiran dapat diwakilkan oleh anggota Dewan Pengawas lain sesuai dengan kuasa tertulis yang diberikan untuk tujuan tersebut.

Penyusunan Risalah Rapat:

- Setiap rapat Dewan Pengawas harus didokumentasikan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat serta seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir.
- Asli risalah rapat diserahkan kepada Direksi untuk penyimpanan dan pengarsipan, sementara Dewan Pengawas menyimpan salinan untuk catatan internal.
- Penyusunan dan administrasi risalah rapat dipegang oleh Sekretaris Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas. Setiap anggota Dewan Pengawas berhak mendapatkan salinan risalah rapat, tanpa terkecuali, baik saat hadir maupun tidak saat rapat berlangsung.

Selama tahun 2023, Dewan Pengawas tercatat telah melaksanakan 14 (empat belas) Rapat Internal, sebagai berikut:

In the Joint Discussion Meeting, the Supervisory Board conveys opinions/responses/input to Capital Owners on the Annual Report and Proposed RKAP and other important issues.

Meeting Policy

- The Supervisory Board meeting is held at the Company's head office or at another location in Indonesia at least once a month, with the possibility of inviting the Board of Directors.
- The Supervisory Board may hold meetings as needed, either at the initiative of the Chairman of the Supervisory Board, a proposal of at least 1/3 of the members of the Supervisory Board, or at the special request of the Minister who determines the meeting agenda.
- The involvement of every meeting participant in the decision-making process is a must.
- If any member of the Supervisory Board is unable to attend, his/her attendance may be represented by another member of the Supervisory Board in accordance with a written power of attorney granted for that purpose.

Preparation of Meeting Minutes:

- Every meeting of the Board of Supervisors must be documented in meeting minutes signed by the meeting leader and all members of the Board of Supervisors present.
- The original meeting minutes are submitted to the Board of Directors for storage and archiving, while the Board of Supervisors keeps a copy for internal records.
- The preparation and administration of the minutes of the meeting are handled by the Secretary of the Supervisory Board or an official appointed by the Supervisory Board. Every member of the Supervisory Board has the right to receive a copy of the minutes of the meeting, without exception, whether or not they are present during the meeting.

During 2023, the Supervisory Board has held 14 (fourteen) Internal Meetings, as follows:

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	
1	20 Januari 2023	1. Pembahasan Revisi Draft RKAP Tahun 2023 Perum	1. Discussion of the Revised Draft of the 2023 RKAP of Perum
2	28 Februari 2023	1. Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya a. Update masing-masing kegiatan Komite Dewan Pengawas; b. Keikutsertaan dalam kegiatan Sosialisasi Updating Talent Pool Direksi BUMN Tahun 2023; c. Progres Laporan Tahunan Audited Tahun 2022. 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Januari 2023 3. Isu-isu Strategis Lainnya: a. Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan Audit Internal (Highlight Laporan Tahunan SPI 2022); b. Usulan Perubahan Struktur Organisasi BOD-1. 4. <i>Current Issue</i> a. Evaluasi Kinerja Direksi Tahun 2022; b. Penyampaian Usulan Nominated Talent Perum Perhutani Tahun 2023 kepada <i>Cluster Talent Committee</i> (CTC) BUMN Perkebunan dan Kehutanan; c. Sertifikasi Organ Pengelola Risiko Perusahaan	1. Follow-up to the results of the previous meeting a. Update on each activity of the Supervisory Board Committee; b. Participation in the Socialization of Updating Talent Pool of BUMN Directors in 2023; c. Progress of the 2022 Audited Annual Report. 2. Discussion of the Company's Performance in January 2023 3. Other Strategic Issues: a. Supervision of the effectiveness of the implementation of Internal Audit (Highlight of the 2022 SPI Annual Report); b. Proposed Changes to the BOD-1 Organizational Structure. 4. Current Issue a. Evaluation of the Performance of the Board of Directors in 2022; b. Submission of the Proposal for Nominated Talent of Perum Perhutani in 2023 to the Cluster Talent Committee (CTC) of Plantation and Forestry BUMN; c. Certification of the Company's Risk Management Organ
3	27 Maret 2023	1. Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya a. Update masing-masing kegiatan Komite Dewan Pengawas; b. Pembahasan bersama Direktorat Komersial (Industri Kayu). 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Februari 2023 3. Isu-isu Strategis Lainnya: a. Progres Laporan Tahunan Audited Tahun 2022; b. Assessment GCG Perum Perhutani Tahun 2022. 4. <i>Current Issue</i> : a. Kasus Ranca Upas; b. Kebijakan SDM dan Pengembangan: - Penundaan pembayaran uang pensiun (Laporan dari Sdr. Kuswo); - Rencana Sertifikasi Manajemen Risiko.	1. Follow-up to the results of the previous meeting a. Update on each activity of the Supervisory Board Committee; b. Discussion with Commercial Directorate (Wood Industry). 2. Discussion of Company Performance in February 2023 3. Other Strategic Issues: a. Progress of Audited Annual Report 2022; b. GCG Assessment of Perum Perhutani in 2022. 4. Current Issue: a. Ranca Upas Case; b. HR Policy and Development: - Postponement of pension payment (Report from Mr. Kuswo); - Risk Management Certification Plan.
4	27 April 2023	1. Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya a. Update masing-masing kegiatan Komite Dewan Pengawas; b. Progres asesmen terhadap Industri Kayu; 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Maret 2023 3. Isu-isu Strategis Lainnya: a. Progres Laporan Tahunan Audited Tahun 2022; b. Pembaharuan RJPP 2020-2024 (atas perubahan regulasi terbaru dan pasca merger anak perusahaan); 4. <i>Current Issue</i> : a. Daftar Catatan Audit Kepatuhan Tahun 2022; b. Hasil Assessment GCG Tahun 2022.	1. Follow-up to the results of the previous meeting a. Update on each activity of the Supervisory Board Committee; b. Progress of assessment of the Wood Industry; 2. Discussion of Company Performance in March 2023 3. Other Strategic Issues: a. Progress of Audited Annual Report 2022; b. Update of RJPP 2020-2024 (regarding the latest regulatory changes and post-merger of subsidiaries); 4. Current Issue: a. List of Compliance Audit Notes for 2022; b. Results of GCG Assessment for 2022.
5	25 Mei 2023	1. Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya a. Update masing-masing kegiatan Komite Dewan Pengawas; b. Progres Telaah Komite atas Laporan Manajemen Triwulan 1 2023; c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan; d. Rencana bertemu dengan SDM SPI; 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan April 2023 3. Isu-isu Strategis Lainnya: a. Persiapan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dengan Pemilik Modal terkait Pengesahan Audit Tahun 2022; b. Progres Revisi RJPP Perum Perhutani atas perubahan regulasi dan pasca merger anak usaha; 4. <i>Current Issue</i> : a. <i>Sharing</i> Hasil Pertemuan Sosialisasi di Bali bersama Pemilik Modal; b. <i>Sharing</i> Hasil Pertemuan tentang Revitalisasi Assessment bersama PeFI.	1. Follow-up to previous meeting results a. Update on each activity of the Supervisory Board Committee; b. Progress of the Committee's Review of the Management Report for Quarter 1 2023; c. Monitoring and Evaluation of the Implementation of Corporate Risk Management; d. Plan to meet with SPI HR; 2. Discussion of Company Performance in April 2023 3. Other Strategic Issues: a. Preparation of Joint Discussion Meeting (RPB) with Capital Owners regarding the Approval of the 2022 Audit; b. Progress of the Revision of Perum Perhutani's RJPP regarding changes in regulations and post-merger of subsidiaries; 4. Current Issue: a. Sharing of Results of the Socialization Meeting in Bali with Capital Owners; b. Sharing of Results of the Meeting on Revitalization of Assessment with PeFI.

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	
6	26 Juni 2023	- Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya - Progres <i>Agroforestry</i> Tebu (Peran dan Strategi Perhutani dalam PSN Tebu Kelola Mandiri); - Progres Revitalisasi Hilirisasi Industri Kayu Perum Perhutani (Hasil Penyiapan Konsultan dan Sertifikasi SDM); - Arahan Rencana Pertemuan Dewan Pengawas dengan Manajemen Perhutani: - SDM SPI (Penguatan SDM & Program Kerja SPI) - Anak Perusahaan (Pembahasan Kinerja dan Program Kerja) - Fisik dengan Manajemen Perhutani (Penyampaian Hal-Hal Strategis dan Penguatan SDM Perhutani) - Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Mei 2023 - Isu-isu Strategis Lainnya: - Persiapan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dengan Pemilik Modal terkait Pengesahan Audit Tahun 2022 pada tanggal 27 Juni 2023; - Monitoring dan Evaluasi Progres Penerapan Perum Perhutani terkait perubahan Permen BUMN PER-01/MBU/03/2023, PER-02/MBU/03/2023, dan PER-03/MBU/03/2023; <i>Current Issue</i>: <i>GRC Masterclass Program</i> 2023 (27 Juni 2023 s.d. 25 Oktober 2023); - Laporan <i>Cluster Talent Committee</i> (CTC) BUMN (27 Juni 2023); <i>Workbook</i> Sertifikasi <i>Qualified Risk Governance Professional</i> (QRGP).	- Follow-up to previous meeting results - Sugarcane <i>Agroforestry</i> Progress (Perhutani's Role and Strategy in the Independent Sugarcane PSN); - Progress of Revitalization of Perum Perhutani's Wood Industry Downstream (Results of Consultant Preparation and HR Certification); - Directions for the Planned Meeting of the Supervisory Board with Perhutani Management: - SPI HR (Strengthening SPI HR & Work Program) - Subsidiaries (Discussion of Performance and Work Program) - Physical with Perhutani Management (Delivery of Strategic Matters and Strengthening Perhutani HR) - Discussion of Company Performance in May 2023 - Other Strategic Issues: - Preparation of Joint Discussion Meeting (RPB) with Capital Owners regarding the Ratification of the 2022 Audit on June 27, 2023; - Monitoring and Evaluation of the Progress of Implementation of Perum Perhutani regarding changes to BUMN Ministerial Regulation PER-01/MBU/03/2023, PER-02/MBU/03/2023, and PER-03/MBU/03/2023; <i>Current Issue</i>: <i>GRC Masterclass Program</i> 2023 (June 27, 2023 to October 25, 2023); - BUMN Cluster Talent Committee (CTC) Report (June 27, 2023); - Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Certification Workbook.
7	6 Juli 2023	Mekanisme Tata Kelola Dewan Pengawas dan Organ Pendukung Dewan Pengawas Perum Perhutani	Governance Mechanism of the Supervisory Board and Supporting Organs of the Perum Perhutani Supervisory Board
8	28 Juli 2023	- Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya - Update masing-masing kegiatan Komite Dewan Pengawas (persiapan laporan berkala kegiatan Komite Dewan Pengawas); <i>Flowchart</i> proses persetujuan RJPP Perum Perhutani. - Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Mei 2023 - Isu-isu Strategis Lainnya: - Progress program strategis Perusahaan (new factory dan komersialisasi produk biomassa); - Pengawasan terhadap anak perusahaan (persiapan penyusunan kerangka kerja monitoring anak perusahaan). <i>Current Issue</i>: - Permohonan persetujuan agunan aset tetap (rencana agunan berupa tanah dan bangunan kantor Divisi Regional Jawa Barat dan Banten untuk kredit jangka pendek); - Permohonan persetujuan penanganan piutang Perhutani kepada anak perusahaan (PT Inhutani V eks PT PAK) dalam bentuk <i>debt to equity swap</i>; - Persiapan penyusunan RKA Dewan Pengawas tahun 2024.	- Follow-up to the results of the previous meeting - Update on each activity of the Supervisory Board Committee (preparation of periodic reports on the activities of the Supervisory Board Committee); - Flowchart of the Perum Perhutani RJPP approval process. - Discussion of the Company's Performance in May 2023 - Other Strategic Issues: - Progress of the Company's strategic programs (new factory and commercialization of biomass products); - Supervision of subsidiaries (preparation of the preparation of a subsidiary monitoring framework). <i>Current Issue</i>: - Application for approval of fixed asset collateral (planned collateral in the form of land and office buildings of the West Java and Banten Regional Divisions for short-term credit); - Application for approval of handling Perhutani's receivables to a subsidiary (PT Inhutani V ex PT PAK) in the form of a debt to equity swap; - Preparation for the preparation of the 2024 Board of Supervisors' RKA.
9	7 Agustus 2023	Pendalaman atas hasil pemaparan Direksi pada saat Rapat Gabungan tanggal 31 Juli 2023.	In-depth study of the results of the Board of Directors' presentation at the Joint Meeting on July 31, 2023.
10	29 Agustus 2023	- Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya - Update masing-masing kegiatan Komite Dewan Pengawas; - Update rapat bersama unit Pemantau Risiko terkait persetujuan penanganan piutang Perhutani kepada anak perusahaan (PT Inhutani V eks PT PAK) dalam bentuk <i>debt to equity swap</i>.	- Follow-up to the results of the previous meeting - Update on each activity of the Board of Supervisors Committee; - Update on the joint meeting of the Risk Monitoring unit regarding the approval of handling Perhutani's receivables to a subsidiary (PT Inhutani V ex PT PAK) in the form of a debt to equity swap.

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	
		c. Update hasil pelaksanaan wawancara kandidat Kepala SPI oleh Dewan Pengawas. 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Juli 2023. 3. Isu-isu Strategis Lainnya: a. Progress pemenuhan dokumen <i>feasibility study</i> dan kajian hulu-hilir pasar biomassa (data dukung lainnya mengenai pembangunan pabrik biomassa); b. Rekomendasi Dewan Pengawas untuk dibuatkannya kajian KHDPK secara terstruktur (inventarisasi kesiapan KPH, identifikasi kebijakan Perhutani terhadap KPH, dan inventarisasi MoU di seluruh KPH). 4. <i>Current Issue</i> : a. Kebijakan remunerasi sehubungan dengan terbitnya SK Direksi Nomor 127/KPTS/DIR/07/2023 (<i>monitoring</i> implementasi dan evaluasi); b. Evaluasi SK Pembagian Tugas Dewan Pengawas.	c. Update on the results of the interview of the Head of SPI candidate by the Board of Supervisors. 2. Discussion of Company Performance in July 2023. 3. Other Strategic Issues: a. Progress in fulfilling the feasibility study documents and upstream-downstream biomass market studies (other supporting data regarding the construction of a biomass plant); b. Recommendation from the Supervisory Board for a structured KHDPK study (inventory of KPH readiness, identification of Perhutani policies towards KPH, and inventory of MoUs in all KPHs). 4. Current Issue: a. Remuneration policy in connection with the issuance of the Board of Directors Decree Number 127/KPTS/DIR/07/2023 (monitoring of implementation and evaluation); b. Evaluation of the Decree on the Division of Tasks of the Supervisory Board.
11	25 September 2023	1. Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya a. <i>Update</i> masing-masing kegiatan Komite Dewan Pengawas; b. Laporan hasil kehadiran pada Audiensi Pimpinan KPK dan Pelaku Usaha Sektor Kehutanan dan Perkebunan dalam upaya pencegahan korupsi. 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Agustus 2023 3. Isu-isu Strategis Lainnya: a. Progress pelaksanaan kajian KHDPK secara terstruktur; b. PERDIR Nomor: 13/PER/DIR/08/2023 tentang Pedoman Kemitraan Perhutani. 4. <i>Current Issue</i> : a. Kebakaran TPK Banjarejo (dampak dan langkah evaluasi Perusahaan); b. SK Pembagian Tugas Dewan Pengawas serta Rencana Kerja Anggaran Dewan Pengawas Tahun 2024; c. Evaluasi kebijakan remunerasi organ Dewan Pengawas.	1. Follow-up to the results of the previous meeting a. Update on each activity of the Supervisory Board Committee; b. Report on the results of attendance at the Audience of the KPK Leadership and Forestry and Plantation Sector Business Actors in efforts to prevent corruption. 2. Discussion of Company Performance in August 2023 3. Other Strategic Issues: a. Progress in implementing a structured KHDPK study; b. PERDIR Number: 13/PER/DIR/08/2023 concerning Perhutani Partnership Guidelines. 4. Current Issue: a. Banjarejo TPK Fire (impact and Company evaluation steps); b. Decree on the Division of Tasks of the Supervisory Board and the 2024 Supervisory Board Work Budget Plan; c. Evaluation of the remuneration policy of the Supervisory Board organs.
12	27 Oktober 2023	1. Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya a. <i>Update</i> masing-masing kegiatan Komite Dewan Pengawas; b. Progres pembaharuan dokumen GCG (<i>Board Manual</i> , <i>Code of Conduct</i> , dan <i>Code of Corporate Governance</i>); c. Draft SK Pembaharuan Pembagian Tugas Dewan Pengawas (menyesuaikan dengan tugas yang ada di Direksi); 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan September 2023 3. Isu-isu Strategis Lainnya: a. <i>Progress</i> pelaksanaan kajian KHDPK secara terstruktur; b. Persiapan Pembahasan Perkembangan Proyek Biomass 4. <i>Current Issue</i> : Persiapan Pembahasan RKAP Tahun 2024 (S-491/MBU/09/2023: Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024).	1. Follow-up to the results of the previous meeting a. Update on each activity of the Supervisory Board Committee; b. Progress on updating GCG documents (<i>Board Manual</i> , <i>Code of Conduct</i> , and <i>Code of Corporate Governance</i>); c. Draft Decree on the Update of the Division of Tasks of the Supervisory Board (adjusting to the duties of the Board of Directors); 2. Discussion of Company Performance in September 2023 3. Other Strategic Issues: a. Progress on the implementation of the KHDPK study in a structured manner; b. Preparation for Discussion on the Development of the Biomass Project 4. Current Issue: Preparation for Discussion of 2024 RKAP (S-491/MBU/09/2023: Shareholders' Aspirations for the Preparation of the Company's Work Plan and Budget for 2024).
13	29 November 2023	1. Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya Update masing-masing kegiatan Komite Dewan Pengawas 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Oktober 2023 3. Isu-isu Strategis Lainnya: a. Progres Persetujuan Draft RKAP Tahun 2024 (Hasil Pembahasan Komite bersama Tim Internal di bawah Direksi); b. Program Hilirisasi dan Industrialisasi Perusahaan (Arahan Dewas terkait Rencana Persiapan Pelaksanaan FGD bagi BOC dan BOD)	1. Follow-up to the results of the previous meeting Update on each activity of the Supervisory Board Committee 2. Discussion of the Company's Performance in October 2023 3. Other Strategic Issues: a. Progress of Approval of the Draft RKAP for 2024 (Results of the Committee's Discussion with the Internal Team under the Board of Directors); b. Company Downstream and Industrialization Program (Board of Commissioners' Direction regarding the FGD Implementation Preparation Plan for BOC and BOD)

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	
		4. <i>Current Issue:</i> a. <i>Update</i> Perkembangan Kasus Dana Pensiun Perum Perhutani; b. Hasil Sosialisasi Juknis Pelaporan Manajemen Risiko	4. <i>Current Issue:</i> a. Update on the Development of the Perum Perhutani Pension Fund Case; b. Results of the Socialization of Technical Instructions for Risk Management Reporting
14	2 Januari 2024	1. Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya a. Penyusunan strategi Penguatan fungsi/unit khusus pada Direktorat Komersil (bertugas merumuskan strategi pemasaran, perencanaan pemasaran dan penjualan, monitoring dan evaluasi) b. Industrialisasi Perusahaan (Program Strategis RKAP Tahun 2024 dan update perkembangan hasil diagnosa menyeluruh bagi Industri kayu) 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan November 2023	1. Follow-up to the results of the previous meeting a. Preparation of a strategy for strengthening special functions/units in the Commercial Directorate (tasked with formulating marketing strategies, marketing and sales planning, monitoring and evaluation) b. Company Industrialization (Strategic Program of the 2024 RKAP and updates on the development of comprehensive diagnostic results for the Wood Industry) 2. Discussion of Company Performance in November 2023

Realisasi Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Pada Tahun 2023

Realization of the Attendance Level of the Supervisory Board Meeting in 2023

Nama Name	Kepemilikan Saham di Perhutani Share Ownership in Perhutani	Jumlah Rapat Number of Meetings	Rapat yang dihadiri Meetings Attended	%
Bambang Hendroyono	Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Supervisory Board	14	14	100
Komaruddin Simanjuntak	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	14	14	100
YB. Priyatmo Hadi	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	14	14	100
Bambang Risyanto	Anggota Dewan Pengawas Independen Member of the Independent Supervisory Board	14	14	100
Chalid Muhammad	Anggota Dewan Pengawas Independen Member of the Independent Supervisory Board	14	14	100
Noer Fauzi Rachman	Anggota Dewan Pengawas Independen Member of the Independent Supervisory Board	14	14	100

Direksi

Board of Directors

Direksi Perhutani merupakan organ perusahaan yang bertugas mengelola perusahaan demi kepentingan dan sesuai dengan maksud serta tujuan Perhutani. Direksi bertindak sebagai wakil perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Keputusan Rapat Pembahasan Bersamam (RPB).

Setiap anggota Direksi, termasuk Direktur Utama, memiliki kedudukan yang setara. Direksi memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, baik melalui rapat Direksi maupun secara individu, namun tetap dalam kerangka tanggung jawab kolektif. Keputusan yang diambil oleh anggota Direksi diluar rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi Direksi sampai keputusan tersebut disetujui dalam rapat Direksi.

Dengan prinsip ini, Direksi Perhutani bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan melindungi kepentingan perusahaan, sekaligus memastikan setiap keputusan yang diambil selaras dengan arah dan kebijakan Perhutani.

Komposisi Direksi

Komposisi Direksi ditetapkan berdasarkan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas, ketepatan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.

Komposisi Direksi

Composition of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period
Wahyu Kuncoro	Direktur Utama President Director	SK-55/MBU/02/2020 tanggal 26 Februari 2020	2020 - Sekarang 2020 - Present
Dewi Fitrianingrum	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	SK.17/MBU/01/2023 tanggal 30 Januari 2023	2023 - Juli 2024 2023 - July 2024

The Perhutani Board of Directors is a company organ tasked with managing the company for the benefit and in accordance with the intent and purpose of Perhutani. The Board of Directors acts as a representative of the company both inside and outside the court by complying with all applicable laws and regulations, the Articles of Association, and the Decisions of the Joint Discussion Meeting (RPB).

Each member of the Board of Directors, including the President Director, has an equal position. The Board of Directors has the authority to make decisions, either through Board of Directors meetings or individually, but remains within the framework of collective responsibility. Decisions taken by members of the Board of Directors outside of Board of Directors meetings are the personal responsibility of the Board of Directors until the decision is approved in a Board of Directors meeting.

With this principle, the Perhutani Board of Directors is responsible for carrying out its duties professionally and protecting the interests of the company, while ensuring that every decision taken is in line with Perhutani's direction and policies.

Composition of the Board of Directors

The composition of the Board of Directors is determined based on the complexity of the Company while still considering the effectiveness, accuracy and speed in decision-making and can act independently in the sense of not having interests that can interfere with its ability to carry out tasks independently and critically

Komposisi Direksi

Composition of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period
Anggar Widiyatmoko	Direktur Komersial Commercial Director	SK.17/MBU/01/2023 tanggal 30 Januari 2023	2023 - sekarang 2023 - Present
Natalas Anis Harjanto	Direktur Operasi & Perhutanan Sosial Director of Operations & Social Forestry	SK-55/MBU/02/2020 tanggal 26 Februari 2020 SK-12/DWAS-PHT/2020 tanggal 21 September 2020 SK-45/MBU/02/2021 tanggal 9 Februari 2021	2020 - Sekarang 2020 - Present
Muhammad Denny Ermansyah	Direktur SDM, Umum & IT Director of HR, General & IT	SK-45/MBU/02/2021 tanggal 9 Februari 2021	2021-Sekarang 2021 - Present
Endung Trihartaka	Direktur Perencanaan & Pengembangan Director of Planning & Development	SK-45/MBU/02/2021 tanggal 9 Februari 2021	2021-Sekarang 2021 - Present

Persyaratan dan Keberagaman Komposisi Direksi

Seluruh anggota Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh RPB telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN.

Direksi Perhutani juga diwajibkan untuk membuat surat pernyataan terkait dengan pemenuhan persyaratan dan disampaikan kepada Perhutani untuk didokumentasikan. Pengangkatan Direksi Perhutani telah melalui proses *fit & proper test* (uji kemampuan dan kepatutan) yang dilakukan oleh pemilik modal sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan tata kelola perusahaan, untuk kemudian diajukan kepada RPB untuk dilakukan proses selanjutnya.

Penentuan komposisi anggota Direksi merupakan hak dari Pemilik Modal dengan mempertimbangkan adanya keberagaman dalam aspek pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin. Keterangan terkait dengan keberagaman dalam pendidikan, pengalaman kerja dan usia dapat dilihat secara rinci pada sub bab profil Direksi.

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perhutani dilakukan oleh RPB setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pencalonan tersebut mengikat bagi RPB. Seluruh anggota Direksi diangkat dengan mempertimbangkan aspek

Requirements and Diversity of Board of Directors Composition

All members of the Board of Directors appointed and dismissed by the RPB are in accordance with the Company's Articles of Association and in accordance with the requirements contained in the Regulations issued by the Ministry of BUMN.

The Perhutani Board of Directors is also required to make a statement letter regarding the fulfillment of the requirements and submit it to Perhutani for documentation. The appointment of the Perhutani Board of Directors has gone through a *fit & proper test* process (capability and propriety test) carried out by the capital owner in accordance with applicable laws and regulations and corporate governance provisions, to then be submitted to the RPB for further processing.

Determining the composition of the Board of Directors is the right of the Capital Owner by considering the diversity in terms of education, work experience, age and gender. Information related to diversity in education, work experience and age can be seen in detail in the sub-chapter of the Board of Directors profile.

Appointment and Dismissal of the Board of Directors

The appointment and dismissal of the Board of Directors of Perhutani is carried out by the RPB after going through a nomination process in accordance with laws and regulations and the nomination is binding on the RPB. All members of the Board of Directors are appointed by considering aspects of

integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan bisnis Perhutani. Direksi harus memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan dalam *Board Manual*.

Direksi dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan:

- Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
- Terlibat dalam tindakan merugikan Perusahaan;
- Dinyatakan bersalah sehubungan butir 1, 2 dan 3 diatas oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan atau;
- Mengundurkan diri.

Pedoman Kerja Direksi

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Direksi berpedoman pada Board Manual. Board Manual tersebut berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten untuk menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar prinsip tata kelola perusahaan untuk mencapai visi misi Perusahaan.

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum perusahaan, ketentuan anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan dari pemilik modal serta *best practices* tata kelola perusahaan. Pedoman kerja Direksi akan selalu dilakukan evaluasi untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan yang berlaku serta kebutuhan Perhutani.

Tugas, Kewajiban dan Wewenang Direksi

Direksi menjalankan tugas dan kewenangan pengurusan Perhutani untuk tujuan dan kepentingan Perhutani termasuk mewakili Perhutani baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Sesuai dengan *Board Manual* yang ditetapkan, tugas pokok Direksi secara kolegal melalui Rapat Direksi berwenang untuk:

integrity, competence and adequate reputation in accordance with Perhutani's business needs. The Board of Directors must meet the general and specific requirements set out in the Board Manual.

Directors may be dismissed if the person concerned:

- Does not carry out his/her duties properly;
- Does not carry out or violates the provisions of the laws and/or the provisions of the Articles of Association;
- Is involved in actions detrimental to the Company;
- Is declared guilty in relation to points 1, 2 and 3 above by a court decision that has permanent legal force, and/or;
- Resigns.

Board of Directors Work Guidelines

In carrying out its duties, responsibilities and authorities, the Board of Directors is guided by the Board Manual. The Board Manual contains instructions on the Board of Directors' work procedures and explains the stages of activities in a structured, systematic, easy-to-understand and consistently implemented manner to serve as a reference for the Board of Directors in carrying out their duties in accordance with the standards of corporate governance principles to achieve the Company's vision and mission.

The Board Manual is prepared based on the principles of corporate law, provisions of the articles of association, applicable laws and regulations, directives from capital owners and best practices of corporate governance. The Board of Directors' work guidelines will always be evaluated to adjust to changes in applicable regulations and the needs of Perhutani.

Duties, Obligations and Authorities of the Board of Directors

The Board of Directors carries out the duties and authorities of managing Perhutani for the purposes and interests of Perhutani including representing Perhutani both inside and outside the court.

In accordance with the stipulated Board Manual, the main duties of the Board of Directors collegially through the Board of Directors Meeting are authorized to:

1. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan;
 2. Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
 3. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
 4. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan;
 5. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
 6. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan, risalah Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi, risalah Rapat Direksi, laporan tahunan, dokumen keuangan, dan dokumen lain;
 7. Menyusun sistem akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
 8. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
 9. Menerapkan *good corporate governance* secara konsisten;
 10. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan;
 11. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan, apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah berlanjutnya kerugian tersebut.
 12. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi;
 13. Memberikan laporan berkala menurut cara dan
1. Lead and manage the Company in accordance with the Company's intent and objectives and always strive to improve the Company's efficiency and effectiveness;
 2. Maintain and manage the Company's assets;
 3. The Board of Directors is fully responsible for carrying out its duties for the benefit of the Company in achieving its intent and objectives;
 4. In good faith and with full responsibility carry out its duties for the benefit and business of the Company by observing laws and regulations;
 5. Conduct and maintain the Company's bookkeeping and administration in accordance with the customs applicable to a Company;
 6. Store minutes of Joint Meetings of the Board of Supervisors and Board of Directors, minutes of Board of Directors Meetings, annual reports, financial documents, and other documents at the Company's domicile;
 7. Prepare an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the functions of management, recording, storage and supervision;
 8. Prepare the Company's organizational structure complete with details of its duties;
 9. Implement good corporate governance consistently;
 10. Each member of the Board of Directors is fully responsible personally if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his/her duties for the interests and business of the Company;
 11. Members of the Board of Directors cannot be held responsible for losses to the Company, if the person concerned can prove that:
 - a. The loss is not due to his/her fault or negligence;
 - b. Has carried out management in good faith and with caution for the interests and in accordance with the intent and purpose of the Company;
 - c. Has no conflict of interest either directly or indirectly regarding management actions that result in losses; and
 - d. Has taken action to prevent the continuation of such losses.
 12. Actions taken by members of the Board of Directors outside those decided by the Board of Directors meeting are the personal responsibility of the person concerned until the action in question is approved by the Board of Directors meeting;
 13. Provide periodic reports in the manner and time in accordance with applicable provisions,

waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Pengawas dan/atau Menteri;

14. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Pengawas dan Menteri.

Terkait dengan Tugas dan Kewajiban Lain

Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sebagai berikut:

DIREKTUR UTAMA

President Director

No	Tugas Pokok Main Duties	
1.	Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.	Carry out all actions related to the management of the company for the benefit of the company and in accordance with the intent and purpose of the company.
2.	Mengkoordinasikan seluruh fungsi untuk bersinergi dalam mendorong tercapainya tujuan perusahaan.	Coordinate all functions to synergize in encouraging the achievement of the company's goals.
3.	Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.	Strive for and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with the intent and purpose and its business activities.
4.	Mengkoordinir penyiapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahannya dan menyampaikan kepada Dewan Pengawas dan Menteri untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Coordinate the preparation of the Company's Long-Term Plan, the Company's Work Plan and Budget and its amendments and submit them to the Supervisory Board and the Minister to obtain approval from the Minister in accordance with applicable provisions.
5.	Membangun budaya perusahaan yang unggul berdasarkan tata nilai yang telah ditetapkan.	Build a superior corporate culture based on established values.
6.	Menyusun dan menetapkan <i>blue print</i> organisasi Perusahaan.	Prepare and determine the Company's organizational blueprint.
7.	Memimpin rapat Direksi dan rapat gabungan dengan Dewan Pengawas secara rutin.	Lead regular Board of Directors meetings and joint meetings with the Supervisory Board.
8.	Mengkoordinir penyusunan risalah rapat Direksi.	Coordinate the preparation of minutes of Board of Directors meetings.
9.	Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Pengawas dan Menteri.	Provide explanations regarding all matters asked or requested by members of the Supervisory Board and the Minister.
10.	Memberikan penjelasan kepada Menteri mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta laporan tahunan.	Provide explanations to the Minister regarding the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget and annual reports.
11.	Mengkoordinir pembuatan laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban Pengelolaan Perusahaan dan dokumen keuangan sesuai dengan Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.	Coordinate the preparation of annual reports as a form of accountability for Company Management and financial documents in accordance with the Law on Company Documents.
12.	Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Pengawas dan Menteri.	Provide explanations on all matters asked or requested by members of the Supervisory Board and the Minister.
13.	Mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan Peraturan Menteri BUMN.	Represent the company both inside and outside the court regarding all matters and all events with restrictions as stipulated in the provisions of laws and regulations, the Articles of Association and the Regulation of the Minister of SOEs.

as well as other reports whenever requested by the Board of Supervisors and/or the Minister;

14. Provide explanations regarding all matters asked or requested by members of the Board of Supervisors and the Minister.

Related to Other Duties and Obligations

Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and those stipulated by the GMS based on applicable laws and regulations. Details of the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors are as follows:

DIREKTUR UTAMA

President Director

No	Tugas Pokok Main Duties	
14.	Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai Pengurusan dan pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/ atau peraturan Menteri yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Carry out all other actions and deeds regarding the Management and ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties and/or other parties with the Company, and represent the Company inside and outside the court regarding all matters and all events, with limitations as stipulated in the provisions of laws and regulations, Articles of Association, and/or Ministerial regulations stipulated based on provisions of laws and regulations.
15.	Melakukan upaya-upaya simplikasi proses dengan berinovasi termasuk reformasi birokrasi.	Carry out efforts to simplify the process by innovating including bureaucratic reform.
16.	Mending dalam proses kerja untuk memperbaiki kualitas, menurunkan biaya dan mempercepat proses.	Encourage the work process to improve quality, reduce costs and accelerate the process.
17.	Melakukan pembinaan terhadap karyawan dan penilaian kinerja terhadap bawahannya (2 jenjang dibawahnya).	Provide coaching for employees and performance assessments for subordinates (2 levels below)
18.	Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in this Government Regulation and those stipulated by the Minister based on provisions of laws and regulations.
19.	Memastikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 pada Satuan Unit Kerjanya.	Ensure the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System in its Work Units.

DIREKTUR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Director of Planning and Development

No	Tugas Pokok Main Duties	
1.	Mengarahkan, merencanakan dan mengendalikan penyusunan visi dan misi perusahaan, rencana jangka panjang perusahaan (RUP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana KerjaTahunan (RKTP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).	Directing, planning and controlling the preparation of the company's vision and mission, the company's long-term plan (RUP), the Company's Long-Term Plan (RJPP), the Annual Work Plan (RKTP), the Company's Work Plan and Budget (RKAP).
2.	Mengarahkan, merencanakan dan mengendalikan untuk melakukan analisis lingkungan bisnis internal dan eksternal baik makro maupun mikro untuk kepentingan perumusan kebijakan, strategi, penyusunan rencana dan pengembangan bisnis.	Directing, planning and controlling to conduct analysis of the internal and external business environment, both macro and micro, for the benefit of formulating policies, strategies, preparing plans and business development.
3.	Mengarahkan, merencanakan dan mengendalikan untuk merumuskan arah kebijakan dan penetapan strategi perusahaan dan pengembangan bisnis.	Directing, planning and controlling to formulate policy directions and determining company strategies and business development.
4.	Mengarahkan, merencanakan dan mengendalikan untuk melakukan kajian potensi bisnis dan atau melakukan evaluasi terhadap hasil kajian potensi bisnis dan aset. Melakukan koordinasi dengan Direktorat lain untuk konsolidasi penyusunan kebijakan strategi perusahaan, rencana umum perusahaan, rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja & anggaran perusahaan.	Directing, planning and controlling to conduct business potential studies and/or evaluate the results of business potential and asset studies. Coordinating with other Directorates for the consolidation of the preparation of company strategy policies, general company plans, long-term company plans and company work plans & budgets.
5.	Mengarahkan dalam membuat kebijakan pengelolaan kajian internal dan eksternal serta penyusunan rencana strategis perusahaan.	Directing in making internal and external review management policies and preparing the company's strategic plan
6.	Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan pengembangan bisnis perusahaan.	Directing and controlling the management of the company's business development
7.	Mengarahkan dalam merencanakan perumusan <i>framework</i> risiko serta program budaya manajemen risiko perusahaan.	Directing in planning the formulation of the risk framework and the company's risk management culture program
8.	Mengarahkan, merencanakan dan mengendalikan dalam pengelolaan risiko untuk seluruh perusahaan.	Directing, planning and controlling in risk management for the entire company.

DIREKTUR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Director of Planning and Development

No	Tugas Pokok Main Duties	
9.	Mengarahkan, merencanakan dan mengendalikan pengelolaan alignment rencana strategis seluruh anak perusahaan serta pencapaian kinerja Anak Perusahaan.	Directing, planning and controlling the management of strategic plan alignment for all subsidiaries and the achievement of Subsidiary performance.
10.	Mengarahkan, merencanakan dan mengendalikan untuk melaksanakan Pengelolaan Anak Perusahaan, termasuk sinergi AP dan potensi sinergi dengan BUMN lain.	Directing, planning and controlling to carry out Subsidiary Management, including AP synergy and potential synergy with other BUMN.
11.	Persiapan <i>holding</i> kehutanan dan integrasi seluruh AP	Preparation of forestry holding and integration of all AP
12.	Mengarahkan, merencanakan dan mengendalikan dalam melaksanakan Pengelolaan rekonstruksi batas kawasan hutan, inventarisasi sumberdaya hutan, evaluasi potensi SDH dan persetujuan RPKH.	Directing, planning and controlling in carrying out Management of forest area boundary reconstruction, forest resource inventory, evaluation of SDH potential and RPKH approval.
13.	Mengarahkan, merencanakan dan mengendalikan serta mengevaluasi rencana strategis perusahaan dan penggunaan kawasan hutan.	Directing, planning and controlling and evaluating the company's strategic plan and use of forest areas.
14.	Menjamin tersedianya laporan kegiatan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan secara periodik kepada Direktur Utama.	Ensure the availability of periodic reports of the Directorate of Planning and Development activities to the President Director.
15.	Mendorong terciptanya bisnis yang kompetitif melalui operasi bisnis pasar hingga <i>benchmark</i> .	Encourage the creation of a competitive business through market business operations to benchmarks.
16.	Mengembangkan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik serta melakukan tindakan perbaikan secara berkelanjutan.	Develop and implement good corporate governance and take continuous improvement actions.
17.	Melakukan pembinaan karyawan dan penilaian kinerja terhadap bawahannya pada jajaran Direktorat Perencanaan dan Pengembangan untuk penilaian kinerja pada bawahannya 2 (dua) jenjang di bawahnya.	Conduct employee coaching and performance assessments of subordinates in the ranks of the Directorate of Planning and Development for performance assessments of subordinates 2 (two) levels below.
18.	Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah/Anggaran Dasar Perusahaan dan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Government Regulation/Company Articles of Association and those stipulated by the Minister based on the provisions of laws and regulations.
19.	Memastikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 pada Satuan Unit Kerjanya.	Ensure the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System in its Work Units.

DIREKTUR OPERASI

Director of Operations

No	Tugas Pokok Main Duties	
1.	Merencanakan dan menyusun arah kebijakan dan strategi serta tujuan dan sasaran bidang pengelolaan sumber daya hutan, produksi dan perhutanan sosial.	Plan and formulate policy directions and strategies as well as goals and targets in the field of forest resource management, production and social forestry.
2.	Mengarahkan dan mengendalikan penyusunan RJP dan RKAP lingkup Direktorat Operasional dan Divisi Regional terkait bidang pengelolaan sumber daya hutan, produksi dan perhutanan sosial, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pemilik modal sebagai dasar penyusunan rencana kerja/bisnis dan anggaran.	Directing and controlling the preparation of RJP and RKAP within the scope of the Operational Directorate and Regional Division related to the field of forest resource management, production and social forestry, in accordance with applicable laws and regulations and the direction of the capital owner as a basis for preparing work/business plans and budgets.
3.	Mengarahkan pengendalian pelaksanaan kebijakan, strategi dan program kerja disertai penyusunan prosedur kerja dan standar biaya bidang pembinaan SDH, produksi, perlindungan, pengamanan, pengujian, <i>agroforestry</i> dan perhutanan sosial.	Directing the control of the implementation of policies, strategies and work programs accompanied by the preparation of work procedures and cost standards in the field of SDH development, production, protection, security, testing, agroforestry and social forestry.
4.	Mengarahkan pengendalian kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu, untuk kepastian pasokan bahan baku industri, sesuai dengan kapasitas, tata waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan.	Directing the control of activities for the collection of wood and non-wood forest products, for the certainty of the supply of industrial raw materials, in accordance with the capacity, timetable and specifications required.

DIREKTUR OPERASI

Director of Operations

No	Tugas Pokok Main Duties	
5.	Mengarahkan dan mengevaluasi Kajian dan model pengelolaan sosial	Directing and evaluating Social Management Studies and Models
6.	Mengarahkan pengendalian kegiatan serta evaluasi perizinan serta pengelolaan konflik sosial.	Directing the control of activities and evaluation of permits and management of social conflicts.
7.	Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja operasional dan perhutanan sosial, serta pemberian <i>reward & punishment</i> .	Conduct monitoring and evaluation of operational and social forestry performance, as well as providing rewards & punishments.
8.	Memeriksa, menganalisis dan mengevaluasi laporan kegiatan operasional dan perhutanan sosial secara periodik dan insidental, serta mengambil tindakan atau keputusan yang strategis.	Check, analyze and evaluate operational and social forestry activity reports periodically and incidentally, and take strategic actions or decisions.
9.	Mengembangkan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik serta melakukan tindakan perbaikan secara berkelanjutan.	Develop and implement good corporate governance and take continuous improvement actions.
10.	Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah/anggaran Dasar Perusahaan dan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan ketentuan peraturan.	Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in Government Regulations/ Company Articles of Association and those stipulated by the Minister based on regulatory provisions.
11.	Melakukan penilaian kinerja dan pembinaan karyawan pada lingkup operasional.	Conduct employee performance assessments and coaching in the operational scope.
12.	Memastikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 pada Satuan Unit Kerjanya.	Ensure the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System in its Work Units.

DIREKTUR SDM, UMUM DAN IT

Director of HR, General and IT

No	Tugas Pokok Main Duties	
1.	Merencanakan arah, kebijakan, strategi, sararan bidang SDM, umum, sarana & prasarana, administrasi pengelolaan aset, serta teknologi informasi	Direction, policies, strategies, suggestions for HR, general, facilities & infrastructure, asset management administration, and Information Technology.
2.	Merencanakan kebutuhan SDM yang berintegritas, kompeten dan produktif sesuai kebutuhan perusahaan.	Plan the need for HR with integrity, competence and productivity according to the company's needs.
3.	Mengarahkan penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Strategis bidang SDM, Umum, sarana & prasarana, pengelolaan aset, serta bidang teknologi informasi.	Directing the preparation of the Company's Long-Term Plan (RJPP) and Strategic Plan for HR, General, Facilities & Infrastructure, Asset Management, and Information Technology.
4.	Mengarahkan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) bidang SDM, Umum, sarana & prasarana, pengelolaan aset, serta bidang teknologi informasi.	Directing the preparation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for HR, General, Facilities & Infrastructure, Asset Management, and Information Technology.
5.	Mengarahkan pedoman kerja dan standar bidang SDM, Umum, sarana & prasarana, pengelolaan aset, serta bidang teknologi informasi.	Directing the work guidelines and standards for HR, General, Facilities & Infrastructure, Asset Management, and Information Technology.
6.	Mengendalikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan umum perkantoran dan pemenuhan sarana dan prasarana kerja perusahaan, hukum dan kepatuhan serta bidang teknologi informasi.	Controlling and supervising human resource management activities, general office services and fulfillment of company work facilities and infrastructure, law and compliance, and Information Technology.
7.	Mengevaluasi kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan umum perkantoran dan pemenuhan sarana dan prasarana kerja perusahaan, hukum dan kepatuhan serta bidang teknologi informasi.	Evaluating human resource management activities, general office services and fulfillment of company work facilities and infrastructure, law and compliance, and Information Technology.
8.	Menjaga kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan.	Maintaining the company's compliance with laws and regulations.
9.	Mengembangkan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik serta melakukan tindakan perbaikan secara berkelanjutan.	Developing and implementing good corporate governance and taking continuous improvement actions.
10.	Mengendalikan dan mengawasi kegiatan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.	Controlling and supervising the implementation of Procurement of Goods and Services.

DIREKTUR SDM, UMUM DAN IT

Director of HR, General and IT

No	Tugas Pokok Main Duties	
11.	Menjamin tersedianya laporan kegiatan Direktorat SDM, Umum dan IT.	Ensuring the availability of activity reports for the Directorate of HR, General Affairs and IT.
12.	Melakukan penilaian kinerja dan pembinaan karyawan pada lingkup Direktorat SDM, Umum dan IT.	Conducting performance assessments and coaching of employees within the Directorate of HR, General Affairs and IT.
13.	Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah/ Anggaran Dasar Perusahaan dan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Carrying out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Government Regulation/ Articles of Association of the Company and those stipulated by the Minister based on the provisions of laws and regulations.
14.	Memastikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 pada Satuan Unit Kerjanya.	Ensuring the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System in its Work Units.
15.	Memastikan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan 12/KPTS/DIR/2/2021 tentang Penunjukan Penanggung Penerapan dan Pemantauan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) di Lingkungan Perum Perhutani.	Ensuring the implementation of Good Corporate Governance based on 12/KPTS/DIR/2/2021 concerning the Appointment of the Person in Charge of the Implementation and Monitoring of Good Corporate Governance in the Perum Perhutani Environment.

DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Director of Finance and Risk Management

No	Tugas Pokok Main Duties	
1.	Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat dan tepat waktu.	Manage the accounting function in processing financial data and information to produce financial reports needed by the company accurately and on time.
2.	Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.	Coordinate and control the planning, reporting and payment of the company's tax obligations to be efficient, accurate, timely and in accordance with applicable government regulations.
3.	Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas perusahaan (<i>cashflow</i>), terutama pengelolaan piutang dan hutang, sehingga memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kesehatan kondisi keuangan.	Plan, coordinate and control the company's cash flow, especially the management of receivables and payables, so as to ensure the availability of funds for the company's operations and the health of its financial condition.
4.	Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan dan mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan.	Plan and coordinate the preparation of the company's budget and control the use of the budget to ensure the use of funds effectively and efficiently in supporting the company's operational activities.
5.	Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem dan prosedur keuangan, akuntansi, serta mengontrol pelaksanaannya untuk memastikan semua proses dan transaksi keuangan berjalan dengan tertib dan teratur, serta mengurangi risiko keuangan.	Plan and coordinate the development of financial systems and procedures, accounting, and control their implementation to ensure that all financial processes and transactions run orderly and regularly, and reduce financial risks.
6.	Mengkoordinasikan dan melakukan perencanaan dan analisis keuangan untuk dapat memberikan masukan dari sisi keuangan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis, baik untuk kebutuhan investasi, ekspansi, operasional maupun kondisi keuangan lainnya.	Coordinate and conduct financial planning and analysis to be able to provide financial input for the company in making business decisions, both for investment needs, expansion, operations and other financial conditions.
7.	Merencanakan dan mengkonsolidasikan perpajakan seluruh perusahaan untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.	Plan and consolidate taxation of the entire company to ensure cost efficiency and compliance with tax regulations.
8.	Mengarahkan dan mengkoordinir dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perusahaan berupa laporan kegiatan perusahaan termasuk laporan keuangan baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya berkaitan dalam pelaksanaan kegiatan RUPS.	Direct and coordinate in the preparation of accountability reports and all information about the condition and progress of the company in the form of company activity reports including financial reports both in the form of annual reports and in the form of other periodic reports related to the implementation of GMS activities.

DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Director of Finance and Risk Management

No	Tugas Pokok Main Duties	
9.	Mengarahkan dan mengkoordinir dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).	Direct and coordinate in the preparation of the Company's Long-Term Plan (RJPP).
10.	Mengarahkan dan mengkoordinir dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).	Direct and coordinate in the preparation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP).
11.	Mengarahkan dan mengkoordinir dalam penyusunan laporan keuangan tahunan maupun secara periodik.	Direct and coordinate in the preparation of annual and periodic financial reports.
12.	Merencanakan, mengarahkan dan mengembangkan tata kelola teknologi informasi dan sistem keuangan yang efektif yang mendukung terhadap terlaksananya pengelolaan kegiatan keuangan perusahaan.	Plan, direct and develop effective information technology governance and financial systems that support the implementation of the company's financial management activities.
13.	Mengkoordinir penyajian Laporan keuangan konsolidasian anak perusahaan.	Coordinate the presentation of consolidated financial statements of subsidiaries.
14.	Merencanakan dan mengembangkan fungsi verifikasi sebagai internal kontrol.	Plan and develop verification functions as internal control.
15.	Mengarahkan dan merencanakan pengendalian kinerja dan biaya.	Direct and plan performance and cost control.
16.	Mengkoordinir dan mengawal KPI Korporat serta turunannya.	Coordinate and oversee Corporate KPIs and their derivatives.
17.	Melaksanakan penilaian, pengukuran kinerja dan pembinaan karyawan di lingkup Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko.	Carry out assessments, performance measurements and employee coaching within the Directorate of Finance and Risk Management.
18.	Memberikan saran-saran dan pertimbangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan kepada Direktur Utama.	Provide suggestions and considerations related to financial management to the President Director.
19.	Memastikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 pada Direktoratnya.	Ensure the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System in its Directorate.
20.	Merumuskan arah, kebijakan dan strategi pengelolaan risiko sesuai dengan strategi dan kebijakan perusahaan.	Formulate direction, policies and strategies of risk management in accordance with the company's strategy and policies.
21.	Mengarahkan dan mengawal penyusunan pedoman manajemen risiko.	Direct and oversee the preparation of risk management guidelines.
22.	Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan identifikasi risiko sedini mungkin pada setiap aktivitas dan proyek.	Direct and control the implementation of risk identification activities as early as possible in every activity and project.
23.	Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengukuran risiko dengan memperhitungkan besarnya dampak dan kemungkinan terjadinya peluang risiko.	Direct and control the implementation of risk measurement activities by taking into account the magnitude of the impact and the possibility of risk opportunities.

DIREKTUR KOMERSIAL

Commercial Director

No	Tugas Pokok Main Duties	
1.	Mengarahkan, merencanakan dan mengendalikan penyusunan visi dan misi perusahaan, rencana jangka panjang perusahaan (RUP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja Tahunan (RKTP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).	Direct, plan and control the preparation of the company's vision and mission, the company's long-term plan (RUP), the Company's Long-Term Plan (RJPP), the Annual Work Plan (RKTP), the Company's Work Plan and Budget (RKAP).
2.	Mengarahkan, merencanakan dan mengendalikan untuk melakukan analisis lingkungan bisnis internal dan eksternal baik makro maupun mikro untuk kepentingan perumusan kebijakan, strategi, dan penyusunan rencana penjualan.	Direct, plan and control to conduct analysis of the internal and external business environment, both macro and micro, for the benefit of formulating policies, strategies, and preparing sales plans.
3.	Mengarahkan, merencanakan dan mengendalikan untuk merumuskan arah kebijakan dan penetapan strategi penjualan perusahaan.	Directing, planning and controlling to formulate the direction of the company's sales policy and strategy.

DIREKTUR KOMERSIAL

Commercial Director

No	Tugas Pokok Main Duties	
4.	Mengarahkan, merencanakan dan mengendalikan untuk melakukan kajian potensi penjualan dan atau melakukan evaluasi terhadap hasil kajian penjualan. Melakukan koordinasi dengan Direktorat lain untuk konsolidasi penyusunan kebijakan strategi perusahaan, rencana umum perusahaan, rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja & anggaran perusahaan.	Directing, planning and controlling to conduct sales potential studies and/or evaluate the results of sales studies. Coordinating with other Directorates for the consolidation of the preparation of company strategy policies, general company plans, long-term company plans and company work plans & budgets.
5.	Mengarahkan dalam membuat kebijakan pengelolaan kajian internal dan eksternal serta penyusunan rencana strategis penjualan perusahaan	Directing in making internal and external study management policies and preparing the company's sales strategic plan
6.	Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan strategi penjualan perusahaan	Directing and controlling the management of the company's sales strategy
7.	Mengarahkan, merencanakan dan mengendalikan pengelolaan alignment rencana strategis seluruh anak perusahaan serta pencapaian kinerja Anak Perusahaan.	Directing, planning and controlling the management of the strategic plan alignment of all subsidiaries and the achievement of Subsidiary performance.
8.	Persiapan dan integrasi bisnis komersial ke Anak Perusahaan.	Preparation and integration of commercial business to Subsidiaries.
9.	Menjamin tersedianya laporan kegiatan Direktorat Komersial secara periodik kepada Direktur Utama.	Ensuring the availability of periodic Commercial Directorate activity reports to the President Director.
10.	Mendorong terciptanya bisnis yang kompetitif melalui operasi bisnis pasar hingga benchmark.	Encouraging the creation of a competitive business through market business operations to benchmarks.
11.	Mengembangkan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik serta melakukan tindakan perbaikan secara berkelanjutan.	Developing and implementing good corporate governance and taking continuous improvement actions.
12.	Melakukan pembinaan karyawan dan penilaian kinerja terhadap bawahannya pada jajaran Direktorat Perencanaan dan Pengembangan untuk penilaian kinerja pada bawahannya 2 (dua) jenjang di bawahnya.	Conduct employee coaching and performance assessments for subordinates in the Directorate of Planning and Development for performance assessments of subordinates 2 (two) levels below.
13.	Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah/ Anggaran Dasar Perusahaan dan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Government Regulation/ Articles of Association of the Company and those stipulated by the Minister based on the provisions of laws and regulations.
14.	Memastikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 pada Satuan Unit Kerjanya.	Ensure the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System in its Work Units.

Hubungan Afiliasi dan Kepengurusan di Perusahaan Lain

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perhutani dan Pedoman Kerja Direksi (*Board Manual*) setiap anggota Direksi dilarang untuk memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan Anggota Dewan Pengawas dan/atau Direktur lainnya.

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki rangkap jabatan di perusahaan lainnya, tidak ada potensi benturan kepentingan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan dan tidak ada yang memiliki hubungan afiliasi baik dengan sesama anggota Direksi lainnya, Dewan Pengawas ataupun Pemilik Modal.

Affiliate and Management Relations in Other Companies

In accordance with the Perhutani Articles of Association and the Board Manual, each member of the Board of Directors is prohibited from having blood relations up to the third degree, either vertically or horizontally or by marriage (son-in-law or brother-in-law) with Members of the Supervisory Board and/or other Directors.

Throughout 2023, no member of the Board of Directors held concurrent positions in other companies, there was no potential conflict of interest faced in decision-making and none had affiliated relationships with fellow members of the Board of Directors, the Supervisory Board or Capital Owners

Hubungan Keluarga dan Keuangan Anggota Direksi

Family and Financial Relationships of Members of the Board of Directors

Nama Name	Hubungan Keluarga Dengan Financial Relationship With			Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With			Hubungan Kepengurusan di Perusahaan Lain sebagai Management Relations in Other Companies		
	Dewan Pengawas Supervisory Board	Direksi Board of Directors	Pemilik Modal Capital Owner	Dewan Pengawas Supervisory Board	Direksi Board of Directors	Pemilik Modal Capital Owner	Dewan Pengawas Supervisory Board	Direksi Board of Directors	Pemilik Modal Capital Owner
Wahyu Kuncoro	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dewi Fitrianingrum	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Natalas Anis Harjanto	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Anggar Widiyatmoko	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Muhammad Denny Ermansyah	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Endung Trihartaka	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Selain itu, masing-masing Direksi pada komposisi Direksi yang baru telah mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik kepemilikan pada Perhutani maupun pada perusahaan lainnya dan diperbaharui setiap tahunnya. Per Desember 2023 kepemilikan saham anggota Direksi Perhutani adalah sebagai berikut:

In addition, each Director in the new Board of Directors composition has disclosed their share ownership, both ownership in Perhutani and in other companies and is updated annually. As of December 2023, the share ownership of Perhutani Board of Directors members is as follows:

Kepemilikan Saham Direksi

Directors' Share Ownership

Nama Name	Kepemilikan Saham di Perhutani Share Ownership in Perhutani	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain Share Ownership in Other Companies
Wahyu Kuncoro	Nihil/Nil	Nihil/Nil
Dewi Fitrianingrum	Nihil/Nil	Nihil/Nil
Natalas Anis Harjanto	Nihil/Nil	Nihil/Nil
Anggar Widiyatmoko	Nihil/Nil	Nihil/Nil
Muhammad Denny Ermansyah	Nihil/Nil	Nihil/Nil
Endung Trihartaka	Nihil/Nil	Nihil/Nil

Program Pengenalan dan Pelatihan Direksi

Program Pengenalan Direksi

Perhutani memiliki dan menjalankan program pengenalan Perhutani bagi anggota Direksi yang baru menjabat dengan tujuan memberikan gambaran kondisi Perhutani secara umum. Program pengenalan disusun dan disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan dalam bentuk tampilan presentasi serta *hard copy*, meliputi:

- Profil Perhutani.
- Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di Perhutani.
- Gambaran mengenai kondisi Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasional, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang

Directors' Introduction and Training Program

Directors Introduction Program

Perhutani has and runs a Perhutani introduction program for newly appointed members of the Board of Directors with the aim of providing a general overview of Perhutani's condition. The introduction program is prepared and delivered by the Corporate Secretary in the form of a presentation and hard copy, including:

- Perhutani Profile.
- Implementation of GCG principles in Perhutani.
- Overview of the Company's condition related to objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategies, short-term and long-term plans and other strategic

dan masalah-masalah strategis lainnya.

- Keterangan berkaitan dengan pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi di Perhutani.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi

Untuk meningkatkan kompetensi dan menunjang pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2023, Direksi Perusahaan telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi dan seminar:

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi

Directors Competency Training and Development Program

Tanggal Date	Tema Theme	Peserta Direksi Participants Directors	
24-25 Mei 2023 May 24-25, 2023	Profesional Tata Kelola Risiko Berkualifikasi <i>Qualified Risk Management Professional</i>	• Direktur Utama • Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko • Direktur Komersial • Direktur Operasi • Direktur SDM, Umum & IT • Direktur Perencanaan	• President Director • Director of Finance and Risk Management • Commercial Director • Director of Operations • Director of HR, General & IT • Planning Director
28 Oktober 2023 October 28, 2023	<i>Business Essential Strategic Management</i>	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Director of Finance and Risk Management

Penilaian Kinerja Komite/Unit Kerja Dibawah Direksi

Perhutani tidak memiliki Komite khusus yang membantu kerja Direksi, namun Direksi dibantu oleh unit kerja terkait Tata Kelola Perusahaan diantaranya: Sekretaris Perusahaan, SPI, dan manajemen Risiko. Direksi melakukan evaluasi atas unit kerja di bawah Direksi, dengan dasar penilaian KPI yang ditetapkan oleh masing-masing unit kerja.

Penilaian Kinerja Unit Kerja Dibawah Direksi

Performance Assessment of Work Units Under the Board of Directors

Jabatan Position	KPI KPI		Persentase Percentage
Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>	Penyusunan Laporan Manajemen	Preparation of Management Reports	100%
	Tone Positif Pemberitaan	Positive News Coverage	100%
SPI	Audit Rutin	Routine Audit	100%
	PTL	PTL	100%
Divisi Manajemen Risiko <i>Risk Management Division</i>	Penyusunan kajian Manajemen Risiko Rutin	Preparation of Routine Risk Management studies	100%
	Penyusunan kajian Manajemen Risiko insidentil/proyek	Preparation of incidental/project Risk Management studies	100%

issues.

- Information related to guidelines for implementing the duties and responsibilities of the Board of Directors in Perhutani.

Board of Directors Training and Competency Development Program

To improve competence and support the implementation of the Board of Directors' duties during 2023, the Company's Board of Directors has participated in various training programs, workshops, conferences and seminars:

Performance Assessment of Committees/Work Units Under the Board of Directors

Perhutani does not have a special Committee to assist the Board of Directors, but the Board of Directors is assisted by work units related to Corporate Governance, including: Corporate Secretary, SPI, and Risk Management. The Board of Directors evaluates work units under the Board of Directors, based on the KPI assessment set by each work unit.

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala, paling sedikit sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Pengawas.
2. Direksi wajib menetapkan tata tertib rapat Direksi.
3. Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam rapat Direksi tersebut.
4. Risalah asli dari setiap rapat Direksi wajib disimpan oleh Perusahaan.
5. Laporan tahunan wajib memuat jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi.

Selama tahun 2023, Direksi telah melakukan rapat internal sebanyak 52 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Frekuensi Rapat Direksi

Frequency of the Board of Directors Meetings

Nama Name	Jabatan Position		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	%
Wahyu Kuncoro	Direktur Utama	President Director	52	52	100%
Dewi Fitrianingrum	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Director of Finance and Risk Management	48	48	100%
Natalas Anis Harjanto	Direktur Operasi	Director of Operations	52	52	100%
Muhammad Denny Ermansyah	Direktur SDM, Umum & IT	Director of HR, General & IT	52	51	98%
Endung Trihartaka	Direktur Perencanaan	Director of Planning	52	52	100%
Anggar Widiyatmoko	Direktur Komersial	Director of Commercial	48	47	98%

Agenda Rapat Direksi

Agenda of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda	
1.	2 Jan 2023 Jan 2, 2023	Pengadaan Pekerjaan EPC Pabrik Serbuk Kayu di KPH Sukabumi	Procurement of EPC work for a sawdust factory at KPH Sukabumi
		Bagi Hasil Usaha Retribusi Wana Wisata Padusan dan Air Terjun Dlundung	Profit Sharing from Wana Tourism Levy for Padusan and Dlundung Waterfall
		Penjajakan teknologi KATAM untuk inventarisasi SDH	Exploration of KATAM technology for SDH inventory
		Alokasi Getah Pinus dari Perhutani ke PT Inhutani V	Allocation of Pine Sap from Perhutani to PT Inhutani V
		RKAP tahun 2023 Anak Perusahaan	RKAP 2023 Subsidiaries
2.	9 Jan 2023 Jan 9, 2023	Kebijakan terkait perjanjian kerjasama	Policies related to cooperation agreements
		Hasil evaluasi PT General Laju	PT General Laju evaluation results
		Undangan RR Mewani & Company	Invitation from RR Mewani & Company
		Perpanjangan kontrak Prof Dede	Prof Dede's contract extension

Board of Directors Meetings

Board of Directors Meeting Policy

1. Board of Directors meetings must be held periodically, at least once a month, and the Board of Directors may invite the Supervisory Board to the meeting.
2. The Board of Directors must determine the rules of procedure for Board of Directors meetings.
3. Each member of the Board of Directors has the right to receive a copy of the minutes of meeting, whether or not the person concerned is present at the Board of Directors meeting.
4. The original minutes of each Board of Directors meeting must be kept by the Company.
5. The annual report must include the number of Board of Directors meetings and the attendance of each member of the Board of Directors.

During 2023, the Board of Directors has held 51 internal meetings with the following attendance levels:

Agenda Rapat Direksi

Agenda of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda	
		Tindaklanjut atas temuan BPK Perihal PT Sima Agung	Follow-up to BPK's findings regarding PT Sima Agung
3.	16 Jan 2023 Jan 16, 2023	Kebijakan Penjualan Kayu	Wood Sales Policy
		Kerjasama Bidang Pengembangan Pendidikan dengan UGM	Collaboration in the Field of Educational Development with UGM
		Net off Piutang PT Perkebunan Nusantara IX	PT Perkebunan Nusantara IX Receivables Netoff
		Pengadaan Pekerjaan Reorgansasi Anak Perusahaan	Procurement of Subsidiary Reorganization Work
4.	24 Jan 2023 Jan 24, 2023	Perkembangan tanah eks Bosbouw Madiun	Development of the former Bosbouw Madiun land
		Permohonan Surat Kuasa Khusus Slawi	Application Slawi Special Power of Attorney
		Laporan Pengadilan negeri Sragen Kebijakan Pengelolaan Kayu	Sragen District Court Report Timber Management Policy
		Kerjasama rehabilitasi Hutan dengan PT Kukuh Mandiri Lestari	Forest rehabilitation collaboration with PT Kukuh Mandiri Lestari
5.	30 Jan 2023 Jan 30, 2023	Penambahan tenaga mandor sadap	Additional tapping foreman staff
		Pemberian <i>reward</i> getah pinus	Giving pine resin rewards
		Kebijakan Penjualan Kayu	Wood Sales Policy
6.	2 Feb 2023 Feb 2, 2023	Pengenalan BOD Baru	Introduction of New BOD
		Acara Pisah Sambut Direksi	Farewell Ceremony for Directors
		Penataan SDM	HR structuring
		Pemeriksaan mesin <i>woodchip</i>	Woodchip machine inspection
		Pengagendaaan BoD Meeting dan BPR	BoD Meeting and BPR agenda
		Tindaklanjut arahan Wamen	Follow up on the Deputy Minister's direction
		Agenda pertemuan dengan Direksi AP	Meeting agenda with AP Directors
		Tindaklanjut permintaan data Mc Kinsey	Follow-up to Mc Kinsey's data request
		Realokasi rumah dinas KRPH Darupono	Reallocation of KRPH Darupono official residence
		Pelaksanaan <i>kick off meeting</i> RKAP dengan BOD dan perubahan jenjang I	Implementation of RKAP kick off meeting with BOD and level I changes
7.	6 Feb 2023 Feb 6, 2023	<i>Nature Based Solution</i>	Nature Based Solutions
		Pabrik Biomassa Rembang dan Sukabumi	Rembang and Sukabumi Biomass Plants
		Laporan Kinerja Januari 2023	January 2023 Performance Report
		Pembahasan Industri Kayu	Discussion of the Wood Industry
		Penggunaan sub Lisensi V legal	Use of sub License V is legal
		Penjualan sisa persediaan <i>barcore</i> mutu A	Sale of remaining A quality barcore inventory
		Usulan lelang Minyak Kayu Putih	Proposed auction for Cajuput Oil
		Update revisi PP 72	Update revision of PP 72
		update kedatangan KATAM	Update on the arrival of KATAM
		Perubahan angka pada laporan keuangan 2022	Changes to figures in the 2022 financial statements
		Progres implementasi FICO	FICO implementation progress
		Finalisasi kerjasama tempo MKP	Finalization of MKP tempo cooperation
8.	13 Feb 2023 Feb 13, 2023	Kerjasama Bobocabin Kawah Ijen	Ijen Crater Bobocabin Collaboration
		Revisi PK Penggunaan Kawasan	Revision of PK on Area Use
		Revisi SK 760 Tentang Kerjasama	Revision of SK 760 concerning Cooperation
		Peta shp KHDPK	KHDPK shp map
		Kerjasama dengan Berdikari Meuble	Collaboration with Berdikari Meuble
		Persetujuan anggaran angkutan kayu divre Jatim	Approval of the East Java regional timber transportation budget
		Konsultan <i>Risk Management</i>	Risk Management Consultant
		Progres Pembangunan Pabrik Brumbung	Brumbung Factory Construction Progress

Agenda Rapat Direksi

Agenda of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda	
		Kondisi Pasar Kayu	Timber Market Conditions
		Analisa HPP Kayu Jati AI	AI Teak HPP Analysis
		Kunjungan <i>buyer</i> Turki Kastamonu Entegre	Visit of Turkish buyer Kastamonu Entegre
		Kebijakan kayu Sonokeling	Sonokeling wood policy
		Lelang Kayu Putih	Cajuput Auction
		Progres perhitungan KJPP	KJPP calculation progress
		RJPP Palawi Risosrsis	RJPP Palawi Risosrsis
		Mekanisme HPS	HPS mechanism
		Progress mekanisme <i>cashless</i>	Progress of cashless mechanism
9.	27 Feb 2023 Feb 27, 2023	Pengadaan bingkisan lebaran non karyawan tahun 2023	Procurement of Eid gifts for non-employees in 2023
		Program <i>Agroforestry</i> Tebu Mandiri	Mandiri Sugarcane Agroforestry Program
		Kegiatan Jalan Sehat BUMN	BUMN Healthy Walk Activities
		Rencana Pembayaran Dividen	Dividend Payment Plan
		KPI Individu	Individual KPIs
		Review Perjanjian di Perhutani	Review of Agreements at Perhutani
10.	6 Mar 2023 Mar 6, 2023	Perbaikan rumah dinas dan kantor dampak gempa Cianjur	Repairs to official residences and offices due to the Cianjur earthquake
		Kendaraan dinas Asper dan KRPH	Asper and KRPH official vehicles
		Pemindahan Aset PGT Paninggaran ke PGT Sindangwangi	Transfer of PGT Paninggaran Assets to PGT Sindangwangi
		Pelaksanaan uji kompetensi GANISPH	Implementation of the GANISPH competency test
		Penyusunan kamus <i>hard competency</i> AP	Preparation of the AP hard competency dictionary
11.	13 Mar 2023 Mar 13, 2023	Jasa kajian remunerasi Direksi dan Dewas Tahun 2023	Directors and Board of Directors remuneration review services for 2023
		EPC pembangunan pabrik serbuk kayu KPH Sukabumi	EPC construction of KPH Sukabumi sawdust factory
		Divestasi saham PT Inhutani I dan PT Taman hutan asri	Divestment of shares in PT Inhutani I and PT Taman Hutan Asri
		Penetapan anggaran FGD DPR RI komisi IV	Determination of the DPR RI FGD budget for Commission IV
		Update proyek strategis	Strategic project updates
		skema pelaporan <i>power BI</i>	power BI reporting scheme
12.	27 Mar 2023 Mar 23, 2023	Rencana tanaman ATM 2023/2024	ATM plant plan 2023/2024
		Usulan biaya yayasan bersahaja	The proposed foundation costs are modest
		Kebijakan penjualan kayu Mindi	Mindi wood sales policy
		Pembebasan pembayaran kompensasi tahun 2022 PT Palawi	Exemption from compensation payments for 2022 PT Palawi
		Pengadaan kendaraan operasional	Procurement of operational vehicles
13.	10 Apr 2023 Apr 10, 2023	Pembahasan WanaArtha Life	Discussion of WanaArtha Life
		Pengadaan jasa kendaraan dinas Administratur	Procurement of administrative official vehicle services
		Pembahasan kebijakan perjalanan dinas	Discussion of official travel policies
		Update <i>Cashflow</i> Perusahaan	Company Cashflow Update
		Pembahasan kebijakan perjalanan dinas	Discussion of official travel policies
14.	14 Apr 2023 Apr 14, 2023	Update <i>Cashflow</i> Perusahaan	Company Cashflow Update
15.	17 Apr 2023 Apr 17, 2023	Pertimbangan teknis pelepasan kawasan Bukit Jonggol Asri	Technical considerations for releasing the Bukit Jonggol Asri area
		Pemanfaatan teknologi LIDAR dalam inventarisasi hutan	Utilization of LIDAR technology in forest inventory
		Progress Pembangunan Pabrik Serbuk Kayu di KPH Mantingan	Progress of Construction of the Wood Powder Factory at KPH Mantingan

Agenda Rapat Direksi

Agenda of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda	
16	26 Apr 2023 Apr 26, 2023	Pengawasan Target RKAP 2023	Monitoring 2023 RKAP Targets
		Pembangunan Pabrik wood Pellet & Progres Biomassa	Wood Pellet Factory Construction & Biomass Progress
		Rekrutmen bersama BUMN	Recruitment with BUMN
		Kegiatan Halal bi halal	Halal bi halal activities
		Pembahasan hutan sosial	Discussion of social forests
		Alih kelola wisata ke PT Palawi Risorsis	Transfer management of tourism to PT Palawi Risorsis
		Penataan SPI	SPI setup
17	2 Mei 2023 May 2, 2023	Rencana kerja SPI Bulan Mei 2023	SPI work plan for May 2023
		Progres perizinan pabrik serbuk kayu	Progress of permitting sawdust factory
		Pembahasan cash flow perusahaan	Discussion of company cash flow
		Rapat kerja keasdepan Industri Perkebunan & Kehutanan BUMN	Future working meeting for the BUMN Plantation & Forestry Industry
		Progres Smart KPH	Smart KPH Progress
		Empowering Anak Perusahaan	Empowering Subsidiaries
		Progress TPK Modern	Modern TPK Progress
18	8 Mei 2023 May 8, 2023	Perjanjian kerjasama reaktivasi pabrik Porang dengan UGM	Porang factory reactivation cooperation agreement with UGM
		Jasa mekanisasi LC/LP bibit dan pupuk	LC/LP seed and fertilizer mechanization services
19	12 Mei 2023 May 12, 2023	Penggunaan anggaran Perusahaan	Use of Company budget
20	16 Mei 2023 May 16, 2023	Kerjasama PT Yodya Karya	Collaboration with PT Yodya Karya
21	22 Mei 2023 May 22, 2023	Divestasi Saham HTI Patungan milik PT Ihutani I pada PT Taman Hutan Asri	Divestment of Joint Venture HTI Shares owned by PT Ihutani I to PT Taman Hutan Asri
		Pemegang Saham Tunggal PT Inhutani I & V	Sole Shareholder of PT Inhutani I and V
		DITES atas hutang PT PAK	DITES for PT PAK's debt
		Biaya penyusunan RJPP PT Palawi Risorsis	Costs for preparing RJPP PT Palawi Risorsis
		Penugasan AMDK ke PT Palawi Risorsis	Assignment of AMDK to PT Palawi Risorsis
		CAPEX wisata di lokasi Spin Off ke PT Palawi Risorsis	Tourist CAPEX at the Spin Off location to PT Palawi Risorsis
		Penyelesaian hutang Karyawan BUMN HL	Settlement of debts for BUMN HL employees
		Draft RUPS Inhutani I, V dan Palawi	Inhutani I, V and Palawi GMS Draft
		Kajian akuisisi PT Berdikari Meubel Nusantara	Study of acquisition of PT Berdikari Meubel Nusantara
		Sharing Produksi Kayu dan Non Kayu	Sharing Wood and Non-Wood Production
		Rencana Pengembangan Eksitu Durian dengan UGM	Durian Exitu Development Plan with UGM
		Program Tugas Belajar Karyawan	Employee Learning Assignment Program
		Pengadaan mobil POLMOB	POLMOB car procurement
		Harga Pinus, Jati dan Sonokeling	Prices of Pine, Teak and Sonokeling
		Harga Tebu Giling di KPH Jati	Price of Milled Sugarcane at KPH Jati
		Rencana Kunjungan RI 1 ke Mojokerto	RI 1st Visit Plan to Mojokerto
		Surat Tebu di Lokasi Indikatif KHDPK	Sugar Cane Letters at KHDPK Indicative Locations
		Konten PK kegiatan Off Road di Perhutani	PK content for Off Road activities at Perhutani
		Skema tiket LHI	LHI ticket scheme
		Pelatihan organ pengelola Risiko	Training of Risk management organs
		Penyampaian KPI Individual Direksi 2022	Submission of 2022 Directors' Individual KPIs
		Update Cash flow	Cash flow updates

Agenda Rapat Direksi

Agenda of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda	
22	5 Juni 2023 June 5, 2023	Kerjasama dengan PT Duta Mas Satu	Collaboration with PT Duta Mas Satu
		Kerjasama Pemungutan Getah dengan PT AJAS	Rubber Collection Collaboration with PT AJAS
		Pengadaan Kendaraan Bermotor roda 2 tahap I	Procurement of 2-wheeled motorized vehicles phase I
		Pembahasan Isu Strategis Perusahaan	Discussion of Company Strategic Issues
		Update Cash flow Perusahaan	Company Cashflow Update
23	12 Juni 2023 June 12, 2023	Penyusunan Annual Report 2022	Preparation of the 2022 Annual Report
		Sponsorship Summer Course IPB 2023	IPB Summer Course Sponsorship 2023
		Kegiatan kurban 2023	Sacrificial Qurban activities 2023
		Persetujuan penanaman ATM 2023/2024 dan rencana KSO dengan PTPN	Approval of 2023/2024 ATM planting and KSO plans with PTPN
24	19 Juni 2023 June 19, 2023	Update pengelolaan wisata oleh PT Palawi Risorsis	Update on tourism management by PT Palawi Risorsis
		Pembahasan Kinerja SPI	Discussion of SPI Performance
		Tindaklanjut Socio Forest	Socio Forest follow-up
		Bantuan hewan Qurban 2023	Qurban assistance 2023
		Struktur Organisasi PT Inhutani V	PT Inhutani V Organizational Structure
		Iuran BPJS Kesehatan terpusat	BPJS Health contributions are centralized
		Rencana kerjasama pembangunan SPBU KPH Saradan	Collaboration plan for the construction of the KPH Saradan gas station
		Penjualan persediaan RST 2021 kepada PT Legenda Bintang Bola	Sale of 2021 RST inventory to PT Legenda Bintang Bola
		SKK Kerjasama dengan PT Dutamas Satu	SKK Collaboration with PT Dutamas Satu
25	26 Juni 2023 June 26, 2023	Kerjasama pembangunan konservasi ex-Situ Durian	Cooperation in developing Durian ex-situ conservation
		Kerjasama penelitian Pefi dengan IPB skema Kedaireka	Pefi research collaboration with IPB Kedaireka scheme
		Rencana kerjasama PT Dunia Integritas Abadi	Collaboration plan with PT Dunia Integritas Abadi
		Rencana kerjasama CV Warung Kopi Gunung	CV Warung Kopi Gunung cooperation plan
		Rencana kerjasama PT Djawani Muda Bakti	PT Djawani Muda Bakti cooperation plan
		NDA dengan PPT Energy Trading	NDA with PPT Energy Trading
		Nota Kesepahaman Perlindungan Hutan an Desa Lebakherang	Memorandum of Understanding on Forest Protection and Lebakherang Village
		Rencana kerjasama CV Anugrah Wana Sejahtera	CV Anugrah Wana Sejahtera collaboration plan
		Peringatan Tiga Tahun AKHLAK lingkup Perhutani Group	Three Year Commemoration of AKHLAK within the Perhutani Group
26	10 Juli 2023 July 10, 2023	Pembahasan Uang kerja	Discussion of working money
		Tindaklanjut pertemuan dengan Asper	Follow up meeting with Asper
		Pembuatan kurikulum basic operation	Creating a basic operations curriculum
		Pembahasan proyek strategis biomassa	Discussion of strategic biomass projects
		Pembahasan rangkaian kegiatan BUMN	Discussion of a series of BUMN activities
		Divestasi AP	AP Divestment
		Penjualan kayu Mahoni	Mahogany wood sales
		Pembahasan harga jual Tebu	Discussion of the selling price of Sugarcane
		Realokasi RUPS PT Palawi Risorsis	Reallocation of PT Palawi Risorsis GMS
27	18 Juli 2023 July 18, 2023	Penunjukan Konsultan FSC	Appointment of FSC Consultant
28	24 Juli 2023 July 24, 2023	Penjualan Kayu jati A1 2022	A1 teak wood sales 2022
29	31 Juli 2023 July 31, 2023	Rencana kerjasama PT Nanibar Kapital Nusantara	PT Nanibar Kapital Nusantara collaboration plan

Agenda Rapat Direksi

Agenda of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda	
		Penghentian sementara kegiatan Produksi	Temporary cessation of Production activities
30	7 Aug 2023 Aug 7, 2023	Kerjasama dengan PT Pertamina Retail	Collaboration with PT Pertamina Retail
		Kerjasama dengan Badan Pengelola Otorita Borobudur	Collaboration with the Borobudur Authority Management Body
		Perluasan <i>cluster</i> Punceling	Expansion of the Punceling cluster
		Rencana kerjasama Dendy Ocean View	Dendy Ocean View collaboration plan
		Kerjasama pemanfaatan alur dengan PT Semen Indonesia	Collaboration on channel utilization with PT Semen Indonesia
		Rencana penelitian KHDTK Cemoro Modang	KHDTK Cemoro Modang research plan
		Temuan BPK RI Terkait PT Lignum Asia Pacific (LAP)	BPK RI Findings Regarding PT Lignum Asia Pacific (LAP)
		Usulan Alat Sadap Mekanis	Proposed Mechanical Tapping Tool
		Usulan pembangunan TPK Cabak	Proposed construction of TPK Cabak
		Progress <i>MoU Offroad</i> dengan IMI dan IOF	Progress of Offroad MoU with IMI and IOF
		Usulan pengganti pengurus LSP Perhutani	Proposed replacement for the Perhutani LSP management
		Usulan Anggaran Program <i>Green Youth Movement</i> & Program Labotarium Keadilan Sosial dan Ekologis	Proposed Budget for the Green Youth Movement Program & Social and Ecological Justice Laboratory Program
		Usulan Pengangkatan tenaga PKWT	Proposed Appointment of PKWT staff
		Usulan pengadaan Tenaga Alih Daya (<i>Outsourcing</i>)	Proposed procurement of Outsourcing (<i>Outsourcing</i>)
31	14 Aug 2023 Aug 14, 2023	Kebijakan Penjualan Kayu	Wood Sales Policy
		Kerjasama CV Tri Putra Telecom	CV Tri Putra Telecom collaboration
		Kerjasama PeFI dengan Institut Hijau Indonesia	PeFI collaboration with the Indonesian Green Institute
		Penjualan Tebu Giling ATM	ATM Milled Sugarcane Sales
32	21 Aug 2023 Aug 21, 2023	Kunjungan <i>Fitch Ratings</i>	Fitch Ratings Visit
33	28 Aug 2023 Aug 28, 2023	Pembayaran terpusat BPJS ketenagakerjaan dan iuran DPLK	Centralized payment of BPJS employment and DPLK contributions
34	4 Sep 2023 Sep 4, 2023	Pembahasan Aset Tandes	Discussion of Tandes Assets
		Usulan penetapan Komisaris Inhutani I	Proposed appointment of Inhutani BoC I
		Usulan penetapan tenaga ahli	Proposed appointment of experts
		Update Rekrutmen bersama BUMN	Update on Recruitment with BUMN
		Permohonan <i>sponsorship</i> PB ISSI	PB ISSI sponsorship application
		Pembayaran iuran keanggotaan APhi	Payment of APhi membership fees
		Penetapan harga bibit tebu	Determining the price of sugar cane seeds
		Kebijakan penjualan kayu	Wood sales policy
35	18 Sep 2023 Sep 18, 2023	Kerjasama wisata dengan PT Nanibar Kapital Nusantara	Tourism collaboration with PT Nanibar Kapital Nusantara
		Kerjasama wisata dengan PT Denov Putra Samudra	Tourism collaboration with PT Denov Putra Samudra
		Kerjasama wisata dengan PT Kampung Makmur	Tourism collaboration with PT Kampung Makmur
		Kerjasama wisata dengan PT Koperasi Jasa Putra Sangkuriang Sejahtera	Tourism collaboration with PT Koperasi Jasa Putra Sangkuriang Sejahtera
		Rencana <i>take over</i> pemeliharaan tanaman Balsa oleh PT Bina Megah Indowood	Plan to take over Balsa plant maintenance by PT Bina Megah Indowood
		Kerjasama pemanfaatan hutan dengan pemda kabupaten Bogor	Collaboration on forest utilization with the Bogor district government
		Kerjasama pemanfaatan hutan dengan pemda kabupaten Bandung	Collaboration in forest utilization with the Bandung district government
		Penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Negeri Sebelas Maret	Signing of a memorandum of understanding with Sebelas Maret State University

Agenda Rapat Direksi

Agenda of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda	
36	20 Sep 2023 Sep 20, 2023	Progres Proyek <i>Nature Based Solution</i>	Nature Based Solution Project Progress
37	2 Okt 2023 Oct 2, 2023	Kebijakan penjualan Kayu Perhutani	Perhutani Wood sales policy
38	4 Okt 2023 Oct 4, 2023	Pembahasan Pengurus YP3JS	YP3JS Management Discussion
39	9 Okt 2023 Oct 9, 2023	Usulan perpanjangan dan <i>top up</i> kredit Bank Raya	Proposed extension and top up of Bank Raya credit
		Pengadaan tenaga alih daya / <i>outsourcing</i>	Procurement of outsourcing
		Kebijakan Penjualan Kayu	Wood Sales Policy
40	16 Okt 2023 Oct 16, 2023	Pengadaan Barang dan Jasa	Procurement of goods and services
		Pengelolaan Data dan Informasi	Data and Information Management
		Tim perundingan perjanjian kerja bersama	Collective labor agreement negotiation team
		Pengangkatan PKWT	Appointment of PKWT
		Tunjangan pendidikan	Educational allowance
		Mesin <i>face detector</i>	Face detector machine
		DTES dan likuidasi PT BUMN HL I	DTES and liquidation of PT BUMN HL I
		Pengadaan konsultan Manajemen Risiko	Procurement of Risk Management consultants
		Penyesuaian harga getah pinus PT Inhutani V	PT Inhutani V pine resin price adjustment
		Divestasi Cucu Perusahaan	Divestment of Company Grandchildren
41	17 Okt 2023 Oct 17, 2023	Pengelolaan Gedung Perhutani Jl. Villa No 6 Jakarta	Perhutani Building Management Jl. Villa No. 6 Jakarta
		Progres Cikole <i>Estate Forest Tourism</i>	Progress of Cikole Estate Forest Tourism
42	23 Okt 2023 Oct 23, 2023	Pemutusan kontrak PT Arafah Alam Sejahtera	Termination of PT Arafah Alam Sejahtera contract
43	6 Nov 2023 Nov 6, 2023	Kebijakan Penjualan Kayu	Wood Sales Policy
		Pengadaan Jasa Audit FSC FM Tahun 2023	Procurement of FSC FM Audit Services in 2023
		Pengadaan Drone Lidar dan <i>Backpack</i>	Procurement of Drone Lidar and Backpack
44	13 Nov 2023 Nov 13, 2023	Penetapan Advisor PeFI	Determination of PeFI Advisor
		Penetapan komisaris cucu perusahaan	Determination of the company's subsidiary commissioners
		Penetapan PKWT	Determination of PKWT
		Kenaikan gaji tahun 2023	Salary increase in 2023
		Personil bagian umum	General personnel
		Usulan penambahan <i>supply</i> getah Inhutani V	Proposed additional supply of Inhutani V rubber
		Pengadaan alat sadap mekanis	Procurement of mechanical tapping equipment
		Pembelian dan pembuatan kemasan MKP	Purchase and manufacture of MKP packaging
		Pemaparan pengelolaan jalan villa	Explanation of villa road management
		Pemaparan Manajemen Risiko	Risk Management Exposure
		Pengadaan kontraktor Pabrik serbuk Kayu Mantingan	Procurement of contractors for the Mantingan wood powder factory
		Persetujuan PT Panorama Dahayu Dakara	Approval of PT Panorama Dahayu Dakara
		Persetujuan kerjasama kawasan hutan Majalengka	Agreement on cooperation in the Majalengka forest area
		Penunjukan penyusunan KLHS KEK Merauke	Appointment of the Merauke SEZ SEA preparation
		Pengenalan dan <i>benchmark</i> audit internal SPI	Introduction and benchmarking of SPI internal audit
		Penunjukan KJPP	KJPP appointment

Agenda Rapat Direksi

Agenda of the Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda	
45	20 Nov 2023 Nov 20, 2023	Rapat pembahasan bersama KJPP dan Aktuaris	Discussion meeting with KJPP and Actuaries
		Perpanjangan perjanjian kerjasama Taman Safari Indonesia	Extension of the Indonesian Safari Park cooperation agreement
46	21 Nov 2023 Nov 21, 2023	Kebijakan Penjualan Kayu	Wood Sales Policy
		Pengadaan Mekanisasi Lahan ATM pola B KPH Mojokerto	Procurement of ATM Land Mechanization pattern B KPH Mojokerto
47	24 Nov 2023 Nov 24, 2023	Gathering & Awarding Pelanggan 2023	Gathering & Awarding Customers 2023
		Update proyek KEK	KEK project updates
		Pelaksanaan penilaian KJPP dan aktuaris	Implementation of KJPP and actuarial assessments
		Kerjasama <i>ratoon cane</i> PT Cakra Benteng Sejahtera	PT Cakra Benteng Sejahtera <i>ratoon cane</i> collaboration
48	26 Nov 2023 Nov 26, 2023	Progres kegiatan temu mitra 2023	Progress of 2023 partner meeting activities
49	27 Nov 2023 Nov 27, 2023	Usulan alih kelola 15 wisata rintisan ke Palawi	Proposed transfer of management of 15 pilot tours to Palawi
		Penyederhanaan aturan perhutani	Simplification of forestry regulations
		Refinancing kredit investasi BRI	Refinancing BRI investment credit
		Piagam Manajemen Risiko	Risk Management Charter
		Usulan KPI 2024	Proposed KPI 2024
50	4 Des 2023 Dec 4, 2023	Update Cash flow Perusahaan	Company cash flow updates
		Tindaklanjut Kunjungan Kerja Komisi VI	Follow-up to Commission VI Working Visit
		Proses pengadaan Backpack LIDAR	Backpack LIDAR procurement process
		Pemanfaatan pohon roboh oleh Bupati Blora	Use of fallen trees by the Regent of Blora
		Pembahasan biaya letak kayu	Discussion of the cost of laying wood
		Reward Moto GP 2023	Moto GP 2023 Rewards
		Kegiatan Perhutani Muda	Young Forestry Activities
51	11 Des 2023 Dec 11, 2023	Paparan Rancangan / Draft RJPP 2023-2027	Exposure to 2023-2027 RJPP Draft
		Internship kerjasama UGM	UGM collaboration internship
		Performance Cash Flow dan Pendapatan	Cash Flow and Income Performance
		Sponsorship National Sugar Summit	National Sugar Summit Sponsorship
		Rencana Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Universitas Padjajaran	Plan to Sign a Memorandum of Understanding with Padjadjaran University
		Usulan adendum Anggaran Dasar PT Inhutani I	Proposed addendum to PT Inhutani I's Articles of Association
		Penyelesaian piutang negara eks PT Inhutani II dan eks PT Inhutani III oleh PT Inhutani I	Settlement of state receivables from former PT Inhutani II and former PT Inhutani III by PT Inhutani I
		Progres kerjasama PT Palawi Risorsis dengan GOERS dan PT DIA	Progress of PT Palawi Risorsis' collaboration with GOERS and PT DIA
		Persetujuan Multiyears Pekerjaan Teknologi Informasi	Multiyear Approval of Information Technology Jobs
		Rekrutmen Pegawai	Employee Recruitment
		Perpanjangan Perjanjian Kerja	Extension of Employment Agreement
52	12 Des 2023 Dec 12, 2023	Kebijakan komersial kayu	Timber commercial policy
		Pembahasan Cash Flow Perusahaan	Company Cash Flow Discussion

Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi

Kehadiran Dewan Pengawas dan Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan Pengawas-Direksi

Selama 2023, Dewan Pengawas dan Direksi menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali rapat gabungan Dewan Pengawas-Direksi dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Frekuensi Rapat Gabungan

Frequency of Joint Meetings

Nama Name	Jabatan Position		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%
Bambang Hendroyono	Ketua Dewan Pengawas	Chairman of the Supervisory Board	13	13	100%
Bambang Risyanto	Anggota Dewan Pengawas Independen	Member of the Independent Supervisory Board	13	13	100%
Chalid Muhammad	Anggota Dewan Pengawas Independen	Member of the Independent Supervisory Board	13	13	100%
Komaruddin Simanjuntak	Anggota Dewan Pengawas	Member of the Supervisory Board	13	13	100%
Noer Fauzi Rachman	Anggota Dewan Pengawas Independen	Member of the Independent Supervisory Board	13	13	100%
YB. Priyatmo Hadi	Anggota Dewan Pengawas	Member of the Supervisory Board	13	13	100%
Wahyu Kuncoro	Direktur Utama	President Director	13	13	100%
Natalas Anis Harjanto	Direktur Operasi	Director of Operations	13	13	100%
Dewi Fitrianingrum	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Director of Finance and Risk Management	12	12	100%
Anggar Widiyatmoko	Direktur Komersial	Director of Commercial	12	12	100%
Muhammad Denny Ermansyah	Direktur SDM, Umum & IT	Director of HR, General & IT	13	13	100%
Endung Trihartaka	Direktur Perencanaan	Planning Director	13	13	100%

Joint Meeting of the Supervisory Board and Board of Directors

Attendance of the Supervisory Board and Board of Directors in Joint Meetings of the Supervisory Board-Board of Directors

During 2023, the Supervisory Board and Board of Directors held 13 (thirteen) joint meetings of the Supervisory Board-Board of Directors with the following attendance levels:

Agenda Rapat Gabungan

Joint Meetings Agenda

No	Tanggal Date	Agenda	
1.	31 Jan 2023	1. Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya a. Progres Pabrik Biomass Brumbung (Pengawasan terhadap penyusunan FS) b. Penjelasan hasil tindak lanjut Direksi terhadap hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran terhadap pengadaan mesin <i>wood chipper</i> 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Desember 2022 3. Progres persiapan Audit KAP 4. Isu-isu Strategis Lainnya a. Perbaikan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 Perum Perhutani (Penjelasan Isi dan Persiapan Pengesahan oleh Pemilik Modal) b. Kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan c. Hal yang membutuhkan klarifikasi Direksi (SPI, Serikat Pekerja, dsb)	1. Follow-up to previous meeting results a. Progress of Brumbung Biomass Plant (Supervision of FS preparation) b. Explanation of the results of the Board of Directors' follow-up to the results of the examination of alleged violations of the procurement of wood chipper machines 2. Discussion of Company Performance in December 2022 3. Progress of KAP Audit preparation 4. Other Strategic Issues a. Improvement of the Proposed Work Plan and Budget (RKAP) of Perum Perhutani 2023 (Explanation of Contents and Preparation for Approval by Capital Owners) b. Company risk management policies and implementation c. Matters requiring clarification from the Board of Directors (SPI, Trade Unions, etc.)
2.	28 Feb 2023	1. Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya a. <i>Update</i> masing-masing Kegiatan Komite Dewan Pengawas b. Keikutsertaan dalam kegiatan Sosialisasi <i>Updating Talent Pool</i> Direksi BUMN Tahun 2023 c. Progres Laporan Tahunan Audited Tahun 2022 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Januari 2023 3. Isu-isu Strategis Lainnya: a. Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan Audit Internal (Highlight Laporan Tahunan SPI 2022) b. Usulan Perubahan Struktur Organisasi BOD-1 4. <i>Current Issue</i> a. Evaluasi Kinerja Direksi Tahun 2022 b. Penyampaian Usulan Nominated Talent Perum Perhutani Tahun 2023 kepada <i>Cluster Talent Committee</i> (CTC) BUMN Perkebunan dan Kehutanan c. Sertifikasi Organ Pengelola Risiko Perusahaan	1. Follow-up to the results of the previous meeting a. Update on each Supervisory Board Committee Activity b. Participation in the 2023 BUMN Directors' Talent Pool Updating Socialization Activity c. Progress of the 2022 Audited Annual Report 2. Discussion of the Company's Performance in January 2023 3. Other Strategic Issues: a. Supervision of the effectiveness of the implementation of Internal Audit (Highlight of the 2022 SPI Annual Report) b. Proposed Changes to the BOD-1 Organizational Structure 4. Current Issue a. Evaluation of the 2022 Board of Directors' Performance b. Submission of the 2023 Perum Perhutani Nominated Talent Proposal to the Cluster Talent Committee (CTC) of BUMN Plantations and Forestry c. Certification of the Company's Risk Management Organ
3.	24 Mar 2023	Rapat Pembahasan Direktorat Komersil Perum Perhutani	Commercial Directorate Discussion Meeting of Perum Perhutaniw
4.	30 Mar 2023	1. Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya a. Evaluasi Persediaan (Quick Win Penanganan Tumpukan Kayu A1) b. Implementasi Proyek Strategis (Usulan Pembentukan Tim dan Pendampingan Advisor) c. Penegakan Terhadap Temuan Berulang (Strategi dan Penguatan Peran SPI) 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Februari 2023 3. Audit Tahunan Tahun 2022 (Progres Laporan dan Persiapan Dokumen Persetujuan Pemilik Modal) 4. Isu-isu Strategis Lainnya: a. Proveksi Kinerja Perusahaan Paska Penerapan KHDPK b. Penjelasan Kepada Dewan Pengawas terkait Deregulasi Peraturan Kementerian BUMN (Hasil Sosialisasi 27 Maret 2023 oleh Kementerian BUMN)	1. Follow up on the results of the previous meeting a. Inventory Evaluation (Quick Win Handling of A1 Wood Piles) b. Implementation of Strategic Projects (Proposed Team Formation and Advisor Assistance) c. Enforcement of Recurring Findings (Strategy and Strengthening of the Role of SPI) 2. Discussion of Company Performance in February 2023 3. Annual Audit in 2022 (Progress Report and Preparation of Capital Owner Approval Documents) 4. Other Strategic Issues: a. Company Performance Provision Post-Implementation of KHDPK b. Explanation to the Supervisory Board regarding Deregulation of the Ministry of SOEs Regulations (Results of Socialization on March 27, 2023 by the Ministry of SOEs)

Agenda Rapat Gabungan

Joint Meetings Agenda

No	Tanggal Date	Agenda
		c. Revitalisasi Hilirisasi Industri Kayu Perum Perhutani (Overview dan Rencana Agenda Pembahasan Khusus) d. Pengawasan terhadap Anak Perusahaan - Merger INHUTANI & V (Over View dan Rencana Agenda Pembahasan Khusus) - Spin off bisnis Wisata Palawi (Over View dan Penielasan Kasus Ranca Upas serta Rencana Agenda Pembahasan Khusus)
5.	28 Apr 2023	1. Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya a. Progres Revitalisasi Hilirisasi Industri Kayu Perum Perhutani b. Progres <i>Empowering</i> Inhutani I 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Maret 2023 3. Audit Tahunan Tahun 2022 (Pembahasan Laporan Final) 4. Isu-isu Strategis Lainnya: a. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan TJSL Tahun 2022, serta <i>Volledig Acquit et de charge</i> bagi BOD dan BOC b. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih konsolidasi dan <i>Pay Out Ratio</i> (POR) 11,69% c. Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tantiem) BOD & BOC d. Persetujuan Penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja (Ernst and Young) untuk melakukan audit umum Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 5. Isu-isu Strategis Lainnya: a. Hal yang perlu Perhatian Pemilik Modal dalam Audit Tahunan Tahun 2022: 1) Pendalaman dan Penielasan Kepada Dewan Pengawas terkait Revisi RJPP 2020-2024 2) Revisi/Pembaruan PP No. 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara yang telah dicabut beberapa pasalnya oleh PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan b. Kebijakan Akuntansi Perusahaan Terkini (Keselarasan dengan PSAK dan langkah evaluasi)
6.	26 Mei 2023	1. Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya a. Progres <i>Argoforestry</i> Tebu (Peran dan Strategi Perhutani dalam PSN Tebu Kelola Mandiri) b. Progres Revitalisasi Hilirisasi Industri Kayu Perum Perhutani (Hasil Penyiapan Konsultan dan Sertifikasi SDM) c. Rencana Pertemuan Fisik Dewan Pengawas dengan Manajemen Perhutani (Penyampaian Hal-Hal Strategis dan Penguatan SDM Perhutani) 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan April 2023 3. Persiapan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dengan Pemilik Modal terkait Pengesahan Audit Tahun 2022 4. Isu-isu Strategis Lainnya: a. Progres Revisi RJPP Perum Perhutani atas perubahan regulasi dan pasca merger anak usaha (Rencana Pembahasan Khusus) b. Pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan (Kebijakan dan Strategi Penerapan)

Agenda Rapat Gabungan

Joint Meetings Agenda

No	Tanggal Date	Agenda
7.	26 Juni 2023	- Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya - Monitoring Evaluasi Progres Kesiapan Bisnis Perum Perhutani dalam menjalankan kebijakan KHDPK - Progres Penyusunan Konsultan dalam rangka Revitalisasi Hilirisasi Industri Kayu Perum Perhutani - Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Mei 2023 - Persiapan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dengan Pemilik Modal terkait Pengesahan Audit Tahun 2022 pada tanggal 27 Juni 2023 - Isu-isu Strategis Lainnya: - Monitoring Evaluasi Progres Penerapan Perum Perhutani terhadap perubahan Permen BUMN PER-01/MBU/03/2023, PER-02/MBU/03/2023, dan PER-03/MBU/03/2023 - Pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan (Tindak Lanjut Sosialisasi Juknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko - oleh Kementerian BUMN (13 Juni 2023)
8.	31 Juli 2023	- Follow-up on the results of the previous meeting - Monitoring and Evaluation of the Progress of Perum Perhutani's Business Readiness in implementing the KHDPK policy - Progress of Consultant Preparation in the context of Revitalizing Perum Perhutani's Wood Industry Downstream - Discussion of Company Performance in May 2023 - Preparation of the Joint Discussion Meeting (RPB) with Capital Owners regarding the Ratification of the 2022 Audit on June 27, 2023 - Other Strategic Issues: - Monitoring and Evaluation of the Progress of Perum Perhutani's Implementation of the changes to BUMN Ministerial Regulation PER-01/MBU/03/2023, PER-02/MBU/03/2023, and PER-03/MBU/03/2023 - Implementation of Corporate Risk Management (Follow-up to the Socialization of Technical Instructions for the Composition and Qualifications of Risk Management Organs - by the Ministry of BUMN (June 13, 2023)
8.	31 Juli 2023	- Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya - Update terkini Dana Pensiun Perum Perhutani (strategi dan kebijakan kedepan) - Progres Rencana Revisi RJPP Perum Perhutani (draft RJPP dan persiapan pemaparan Direksi) - Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Juni 2023 - Detail indikator penyebab penurunan kinerja perusahaan s.d. Juni 2023 - Strategi Perusahaan menghadapi Semester 2 tahun 2023 - Isu-isu Strategis Lainnya: - Pembahasan Manajemen Risiko terkait permohonan persetujuan Agun Aset Tetap (surat Direksi Nomor: 93/021.1/Keu/2023) dan permohonan Direksi atas Persetujuan Penanganan Piutang Perhutani dalam bentuk DTES (surat Direksi Nomor: 0222/001.2/SEKPER/2023). 0222/001.2/SEKPER/2023). - Progres proyek strategis <i>new factory</i> dan komersialisasi produk biomass (<i>progress</i> dan penjelasan hulu hilir usaha biomassa Perum Perhutani) - Current Issue: Penjelasan terkait Surat Serikat Pekerja Perum Perhutani Nomor: 169/L/DPP/VII/2023 Tanggal 27 Juli 2023 hal Pernyataan Sikap Serikat Karyawan Perhutani
9.	31 Aug 2023	- Evaluation of the follow-up to the results of the previous meeting - Latest update on Perum Perhutani Pension Fund (strategy and future policies) - Progress of Perum Perhutani RJPP Revision Plan (draft RJPP and preparation of the Board of Directors' presentation) - Discussion of Company Performance in June 2023 - Detailed indicators of the cause of the decline in company performance until June 2023 - Company Strategy facing Semester 2 of 2023 - Other Strategic Issues: - Discussion of Risk Management related to the application for approval of Fixed Asset Collateral (Board of Directors letter Number: 93/021.1/Keu/2023) and requesting the Board of Directors for the Approval of Handling Perhutani Receivables in the form of DTES (Board of Directors letter Number: 0222/001.2/SEKPER/2023). 0222/001.2/SEKPER/2023). - Progress of strategic projects of new factory and commercialization of biomass products (progress and explanation of upstream and downstream biomass business of Perum Perhutani) - Current Issue: Explanation related to Letter of Perum Perhutani Workers Union Number: 169/L/DPP/VII/2023 Dated 27 July 2023 regarding Statement of Position of Perhutani Workers Union
9.	31 Aug 2023	- Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya - Hasil laporan <i>due diligence</i> Deloitte dan Audit OJK serta progress hasil audit tujuan tertentu BPKP Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Perum Perhutani Tahun 2023 (persoalan dana pensiun Perhutani) - Laporan update terkini hasil pertemuan Direksi dengan Serikat Pekerja (tindak lanjut atas Pernyataan Sikap Serikat Pekerja) - Follow-up to the results of the previous meeting - Results of the Deloitte due diligence report and the OJK Audit and the progress of the results of the BPKP specific purpose audit Report on the Supervisory Tasks of the Perum Perhutani Supervisory Board in 2023 (Perhutani pension fund issues) - The latest update report on the results of the Board of Directors' meeting with the Workers' Union (follow-up to the Workers' Union's Position Statement)

Agenda Rapat Gabungan

Joint Meetings Agenda

No	Tanggal Date	Agenda
		- Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Juli 2023 <i>Quick Wins</i> persoalan penjualan, penyelesaian nilai persediaan tinggi dan pengendalian <i>cash flow</i> perusahaan; - Tingkat kesehatan atas kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh Perusahaan (kewajiban kepada perbankan, vendor serta karyawan). - Isu-isu Strategis Lainnya: - Pembahasan Manajemen Risiko terkait permohonan persetujuan Agun Aset Tetap (surat Direksi Nomor: 93/021.1/Keu/2023) dan permohonan Direksi atas Persetujuan Penanganan Piutang Perhutani dalam bentuk DTES (surat Direksi Nomor: 0222/001.2/SEKPER/2023). - Progres prospek strategis <i>new factory</i> dan komersialisasi produk biomassa (<i>progress</i> dan penjelasan hulu hilir usaha biomassa Perum Perhutani) <i>Current Issue</i>: Implementasi Manajemen Risiko di Perusahaan (Rekomendasi bagi Direksi untuk meningkatkan kompetensi seluruh KPH hingga tataran seluruh adm dapat melakukan kajian risiko sesuai keunikan daerahnya masing-masing)
10	29 Sept 2023	- Discussion of the Company's Performance in July 2023 <i>Quick Wins</i> on sales issues, settlement of high inventory values and control of the company's cash flow; - Health level of obligations owned by the Company (obligations to banks, vendors and employees). - Other Strategic Issues: - Discussion of Risk Management related to the application for approval of Fixed Asset Collateral (Board of Directors letter Number: 93/021.1/Keu/2023) and the application of the Board of Directors for the Approval of Handling of Perhutani Receivables in the form of DTES (Board of Directors letter Number: 0222/001.2/SEKPER/2023). - Progress of strategic proof of new factory and commercialization of biomass products (progress and explanation of upstream and downstream biomass business of Perum Perhutani) - Current Issue: Implementation of Risk Management in the Company (Recommendation for the Board of Directors to improve the competence of all KPHs to the level of all admins to be able to conduct risk studies according to the uniqueness of their respective regions)
		- Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya <i>Progres Quick Wins</i> penyelesaian persoalan penjualan, nilai persediaan tinggi dan pengendalian <i>cash flow</i>; - Hasil simulasi <i>stress test</i> kondisi <i>cash flow</i> dan laba rugi sampai dengan bulan Desember 2023 sesuai dengan RKAP (Asumsi Pesimis, Moderat dan Optimis); <i>Update</i> hasil kalkulasi biaya dan proveksi dampak SMART KPH terhadap kinerja Perusahaan. - Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Agustus 2023. - Isu-isu Strategis Lainnya: - Kebijakan Direksi menghadapi KHDPK - Penjelasan terbitnya PERDIR Nomor: 13/PER/DIR/08/2023 tentang Pedoman Kemitraan Perhutani serta ketentuan lainnya sehubungan dengan KHDPK (jika ada); - Kesiapan KPH-KPH menghadapi KHDPK (contoh KPH sebagai <i>role model</i>). - Proses bisnis anak perusahaan dan kesiapan sehubungan perhitungan program perdagangan karbon. <i>Current Issue</i>: Penjelasan kronologi kebakaran TPK Banjarejo (dampak dan langkah evaluasi Perusahaan).
		- Follow up on the results of the previous meeting <i>Quick Wins</i> progress in resolving sales problems, high inventory values and cash flow control; - The stress test simulation results for cash flow and profit and loss conditions until December 2023 are in accordance with the RKAP (Pessimistic, Moderate and Optimistic Assumptions); - Update the results of cost calculations and prove the impact of SMART KPH on the Company's performance. - Discussion of Company Performance for August 2023. - Other Strategic Issues: - Directors' policy regarding KHDPK - Explanation of the issuance of PERDIR Number: 13/PER/DIR/08/2023 concerning Perhutani Partnership Guidelines and other provisions relating to KHDPK (if any); - KPH-KPH readiness to face KHDPK (example of KPH as a role model). - Subsidiary business processes and readiness regarding carbon trading program calculations. - Current Issue: Explanation of the chronology of the Banjarejo TPK fire (impact and company evaluation steps).
11.	30 Okt 2023	- Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya - Pemetaan faktor produksi yang berpotensi unggul hingga akhir tahun (distribusi perbulan bagi pendapatan perusahaan) - Strategi pencapaian Target RKAP Tahun 2023, dari aspek:
		- Follow up on the results of the previous meeting - Mapping of production factors that have the potential to excel until the end of the year (monthly distribution of company income) - Strategy for achieving the 2023 RKAP Target, from the aspects:

Agenda Rapat Gabungan

Joint Meetings Agenda

No	Tanggal Date	Agenda	
		- Aspek <i>Progres Quick Wins</i> penyelesaian persoalan penjualan, nilai persediaan tinggi dan pengendalian <i>cash flow</i>; - Aspek Evaluasi terhadap implementasi KPI Direksi	- Quick Wins Progress Aspects, resolving sales problems, high inventory values and controlling cash flow; - Evaluation aspects of the implementation of the Board of Directors' KPI
		2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan September 2023	2. Discussion of Company Performance in September 2023
		3. <i>Current Issue</i> : Progres Perkembangan Kasus Dana Pensiun Perum Perhutani	3. Current Issue: Progress of the Perum Perhutani Pension Fund Case
12.	6 Nov 2023	Pembahasan Draft RKAP Tahun 2024 Perum Perhutani	Discussion of the Draft RKAP in 2024 Perum Perhutani
13.	30 Nov 2023	1. Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya a. Inventarisasi Aset Perhutani di Wilayah KHDPK (Strategi Direksi dalam memastikan aset dibawah kewenangan Perhutani teriaga) b. Strategi pencapaian Target RKAP Tahun 2023 (<i>Progres Quick Wins</i> penyelesaian persoalan pengendalian <i>cash flow</i>); 2. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Oktober 2023 3. <i>Progress</i> Finalisasi Draft RKAP Tahun 2024 4. <i>Current Issue</i>: Progres Perkembangan Kasus Dana Pensiun Perum Perhutani.	1. Follow up on the results of the previous meeting a. Inventory of Perhutani Assets in the KHDPK Area (Directors' strategy in ensuring that assets under Perhutani's authority are maintained) b. Strategy for achieving the 2023 RKAP Target (<i>Quick Wins</i> Progress in resolving cash flow control problems); 2. Discussion of Company Performance in October 2023 3. Progress on Finalization of the 2024 RKAP Draft 4. Current Issue: Progress of the Perum Perhutani Pension Fund Case.

Keputusan dan Tindak Lanjut Rapat

Seluruh keputusan hasil Rapat Internal Direksi, Rapat Internal Dewan Pengawas dan Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi tertuang dalam Notulen Rapat yang ditandatangani oleh Direksi dan/ atau Dewan Pengawas. Sekretaris Dewan Pengawas ditugaskan untuk memonitor pelaksanaan keputusan dan rekomendasi Dewan Pengawas, sedangkan Sekretaris Perusahaan ditugaskan untuk memonitor pelaksanaan dan rekomendasi Direksi. Hal yang perlu ditindaklanjuti harus dilaporkan kembali dalam rapat selanjutnya.

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Pengawas

Dengan memperhatikan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, terdapat perbuatan-perbuatan Direksi yang perlu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas diantaranya dan tidak terbatas pada:

- Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perusahaan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain serta perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka

Decisions and Follow-up of Meetings

All decisions resulting from Internal Board of Directors Meetings, Internal Board of Supervisors Meetings and Joint Meetings of the Board of Supervisors and Board of Directors are stated in the Minutes of Meeting signed by the Board of Directors and/or the Board of Supervisors. The Secretary of the Board of Supervisors is assigned to monitor the implementation of decisions and recommendations of the Board of Supervisors, while the Corporate Secretary is assigned to monitor the implementation and recommendations of the Board of Directors. Matters that need to be followed up must be reported back in the next meeting.

Decisions Requiring Approval from the Supervisory Board

By taking into account the Articles of Association, laws and regulations and other provisions, there are actions of the Board of Directors that require written approval from the Board of Supervisors including but not limited to::

- Releasing/transferring and/or pledging Company assets with criteria and values exceeding a certain amount determined by the Board of Supervisors.
- Entering into cooperation with other business entities or parties and other agreements of the same nature whose term or value exceeds that

waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

- Melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Pengawas pada Perusahaan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan dengan memperhatikan ketentuan.
- Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Pengawas dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang ada.
- Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Pengawas.
- Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Pengawas, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-Undangan.
- Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP.

determined by the Board of Supervisors

- Make capital participation with a certain value determined by the Supervisory Board in other Companies, subsidiaries, and joint ventures by considering the provisions.
- Establish subsidiaries and/or joint ventures with a certain value determined by the Supervisory Board by considering the existing provisions and regulations.
- Conduct mergers, amalgamations, takeovers, separations, and dissolutions of subsidiaries and joint ventures with a certain value determined by the Supervisory Board.
- Take actions that are included in material transactions as stipulated by laws and regulations with a certain value determined by the Supervisory Board, unless such actions are included in material transactions that are excluded by laws and regulations.
- Actions that have not been stipulated in the RKAP.

Penilaian Dewan Pengawas dan Direksi

Assessment of the Supervisory Board and Board of Directors

Perhutani melakukan penilaian (assessment) terhadap kinerja Dewan Pengawas dan Direksi sebagai organ utama perusahaan guna menjaga kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab keduanya. Proses *assessment* ini dilakukan dengan merujuk pada pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) serta indikator penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan.

Dalam penilaian kinerja, Dewan Pengawas dinilai oleh RPB, sedangkan Direksi dinilai oleh Dewan Pengawas dan RPB. Dewan Pengawas dalam mengevaluasi kinerja Direksi menggunakan indikator KPI Direksi yang telah ditetapkan. Selain itu, Dewan Pengawas dan Direksi bertanggung jawab atas pencapaian kinerja mereka selama periode tertentu, termasuk dalam kerangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di dalam RPB.

Untuk melihat realisasi pencapaian target KPI yang telah ditetapkan selama tahun buku 2023, dilakukan general audit oleh Kantor Akuntan Publik. General audit ini bertujuan untuk memahami aspek finansial yang berpengaruh pada KPI serta mengevaluasi indikator-indikator KPI terhadap target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Upaya ini menunjukkan komitmen Perhutani dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan mengukur kinerja organ perusahaan secara komprehensif.

Hasil Penilaian Dewan Pengawas dan Direksi 2023

Hasil *assessment* kinerja Dewan Pengawas dan Direksi pada tahun 2023 berdasarkan 2 (dua) kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

Perhutani conducts an assessment of the performance of the Supervisory Board and Board of Directors as the main organs of the company in order to maintain the quality and effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of both. This assessment process is carried out by referring to the achievement of Key Performance Indicators (KPI) and the Company's Good Corporate Governance (GCG) assessment indicators.

In the performance assessment, the Supervisory Board is assessed by the RPB, while the Board of Directors is assessed by the Supervisory Board and RPB. The Supervisory Board in evaluating the performance of the Board of Directors uses the Board of Directors' KPI indicators that have been set. In addition, the Supervisory Board and Board of Directors are responsible for their performance achievements during a certain period, including within the framework of implementing duties and responsibilities in the RPB.

To see the realization of the achievement of the KPI targets that have been set during the 2023 financial year, a general audit was conducted by a Public Accounting Firm. This general audit aims to understand the financial aspects that affect the KPI and evaluate the KPI indicators against the targets set by the company. This effort demonstrates Perhutani's commitment to maintaining good corporate governance and measuring the performance of the company's organs comprehensively.

Results of the Assessment of the Board of Supervisors and Board of Directors 2023

The results of the performance assessment of the Board of Supervisors and Board of Directors in 2023 based on the 2 (two) criteria used are as follows:

Pencapaian KPI

KPI Achievement

Pencapaian KPI Dewan Pengawas

Board of Supervisors KPI Achievement

Indikator Indicator		Bobot Weight	Skor Score
Aspek Pengawasan & Pengarahan	Supervision & Direction Aspect	60%	67,50%
Aspek Pelaporan	Reporting Aspect	30%	40%
Aspek Dinamis/Lain-lain	Dynamic/Other Aspect	10%	10%
Total	Total	100%	117,50%

Pencapaian KPI Direksi

Board of Directors KPI Achievement

Indikator Indicator		Bobot Weigh	Skor Score
Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia	Economic and Social Value for Indonesia	37%	31,85%
Inovasi Model Bisnis	Business Model Innovation	19%	13,71%
Kepemimpinan Teknologi	Technology Leadership	14%	15,40%
Peningkatan Investasi	Investment Increase	13%	8,28%
Pengembangan Talenta	Talent Development	17%	18,00%
Total	Total	100%	87,24%

Penilaian atas Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya penilaian dilakukan sesuai dengan Kontrak Manajemen.

Assessment of Key Performance Indicator (KPI) Achievement has been carried out with reference to applicable provisions. In its implementation, the assessment is carried out in accordance with the Management Contract.

Realisasi pencapaian KPI Individual Direksi sebagai berikut:

The realization of the achievement of the Directors' Individual KPIs is as follows:

Direktur Operasi	102,40%	Director of Operations
Direktur Perencanaan dan Pengembangan	101,95%	Director of Planning and Development
Direktur Komersial	80,06%	Commercial Director
Direktur SDM Umum dan IT	105,60%	Director of General HR and IT
Direktur Keuangan dan MR	85,15%	Director of Finance and MR

Penilaian GCG Aspek Dewan Pengawas dan Direksi

Berdasarkan hasil penilaian Good Corporate Governance (GCG) untuk tahun buku 2023, Dewan Pengawas memperoleh nilai sebesar 94,06% sementara Direksi memperoleh nilai 92,67% Skor yang tinggi untuk kedua lembaga tersebut menunjukkan kinerja yang baik dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan.

GCG Assessment of Supervisory Board and Board of Directors Aspects

Based on the results of the Good Corporate Governance (GCG) assessment for the 2023 financial year, the Supervisory Board obtained a score of 94.06% while the Board of Directors obtained a score of 92.67%. The high scores for both institutions indicate good performance in implementing GCG principles that include transparency, accountability, responsibility, and fairness in company management.

Dewan Pengawas dengan skor 94,06% menunjukkan bahwa mereka berhasil memainkan peran pengawasan dengan efektif dan memastikan kebijakan perusahaan sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku. Sementara itu, Direksi dengan skor 92,67% menunjukkan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Kedua lembaga ini memainkan peran yang krusial dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik, dan hasil *assessment* GCG yang positif ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menerapkan praktik tata kelola yang sehat dan transparan.

The Supervisory Board with a score of 94.06% shows that they have successfully played an effective supervisory role and ensured that company policies are in accordance with applicable ethical and legal standards. Meanwhile, the Board of Directors with a score of 92.67% shows their ability to carry out their duties and responsibilities well and manage the company in accordance with the interests of all stakeholders.

Both institutions play a crucial role in maintaining good corporate governance, and the positive GCG assessment results show the company's commitment to implementing healthy and transparent governance practices.

Pengungkapan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Disclosure of Remuneration for the Supervisory Board and Board of Directors

Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi ditetapkan oleh RPB mengacu pada Keputusan Pemilik Modal. Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi meliputi Remunerasi dan Tunjangan-tunjangan serta Tantiem yang diberikan berdasarkan kinerja dan pencapaian Perusahaan. Kebijakan penetapan remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi merujuk pada:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 113;
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-181/MBU/07/2023 tanggal
- 4 Juli 2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Tahun 2023;
- Anggaran Dasar Perusahaan

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Kebijakan dan prosedur penetapan remunerasi bagi Dewan Pengawas terdiri dari beberapa tahapan yang mencakup proses penyusunan, analisis, pengajuan, dan penetapan.

Perusahaan menetapkan penghasilan berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas yang bersifat tetap serta insentif yang bersifat variable dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

- Kinerja/ *Key Performance Indicator* (KPI),
- Ukuran (size),
- Pertumbuhan Perusahaan, dan
- Tingkat inflasi.

Selain itu, pemberian remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi juga mempertimbangkan pencapaian jangka panjang sebagai hasil dari pada sistem yang telah dibangun di dalam Perusahaan.

Remuneration for the Supervisory Board and Board of Directors is determined by the GMS referring to the Capital Owner's Decision. Income for the Supervisory Board and Board of Directors includes Remuneration and Allowances as well as Tantiem given based on the Company's performance and achievements. The remuneration determination policy for the Supervisory Board and Board of Directors refers to:

- Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Article 113;
- Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 24, 2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
- Decree of the Minister of SOEs No. SK-181/MBU/07/2023 dated
- July 4, 2023 concerning Determination of Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises in 2023;
- Company Articles of Association

Procedure for Determining Remuneration for the Supervisory Board and Directors

The policy and procedures for determining remuneration for the Supervisory Board consist of several stages which include the process of preparation, analysis, submission and determination.

The company determines income in the form of Salary or Honorarium, Allowances and Facilities that are fixed and variable incentives by considering the following criteria:

- Performance/Key Performance Indicator (KPI),
- Size,
- Company Growth, and
- Inflation rate.

In addition, the provision of remuneration to the Board of Supervisors and Board of Directors also takes into account long-term achievements as a result of the system that has been built within the Company.

Mekanisme Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/06/2016 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, komponen penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari:

- Honorarium;
- Tunjangan;
- Fasilitas;
- Tantiem.

Berikut ini merupakan tahapan pengajuan usulan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi:

- Perusahaan menyusun usulan remunerasi
- Pembahasan usulan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi juga melihat kesesuaian kinerja Dewan Pengawas dan Direksi dengan KPI yang ditetapkan.
- Penetapan usulan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi juga memperhatikan kondisi perusahaan, apakah kondisi keuangan perusahaan dapat memenuhi *Supervisory Board and Board of Directors Remuneration Mechanism* usulan tersebut atau tidak.
- Penetapan usulan besaran formula remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi memperhatikan faktor penyesuaian industri, inflasi dan faktor jabatan agar relevan.
- Dewan Pengawas melakukan telaah terhadap usulan besaran formula remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi
- Berdasarkan hasil telaah terhadap usulan besaran formula remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi, selanjutnya diusulkan dalam agenda pembahasan RPB.
- Keputusan Penetapan besaran formula remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi dituangkan dalam risalah RPB Laporan Keuangan Tahun Buku 2023.

Mechanism for Determining Remuneration for the Board of Supervisors and Board of Directors

Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-02/MBU/06/2016 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises, the components of the income of the Supervisory Board consist of:

- Honorarium;
- Allowance;
- Facilities;
- Bonus.

The following are the stages for submitting a proposal for Remuneration of the Supervisory Board and Directors:

- The company prepares a remuneration proposal
- Discussion of the proposed remuneration for the Supervisory Board and Board of Directors also looks at the suitability of the performance of the Supervisory Board and Board of Directors with the established KPIs.
- Determination of the proposed remuneration for the Supervisory Board and Board of Directors also takes into account the condition of the company, whether the company's financial condition can meet the proposed Supervisory Board and Board of Directors Remuneration Mechanism or not.
- Determination of the proposed amount of the remuneration formula for the Supervisory Board and Board of Directors takes into account industry adjustment factors, inflation and position factors to ensure relevance.
- The Supervisory Board reviews the proposed amount of the remuneration formula for the Supervisory Board and Board of Directors
- Based on the results of the review of the proposed amount of the remuneration formula for the Supervisory Board and Board of Directors, it is then proposed in the RPB discussion agenda.
- The Decision to Determine the Amount of the Remuneration Formula for the Supervisory Board and Board of Directors is stated in the minutes of the RPB Financial Report for the 2023 Fiscal Year.

Struktur Remunerasi Anggota Dewan Pengawas

Komponen penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari:

- Honorarium
- Tunjangan
 - Tunjangan Hari Raya;
 - Asuransi Purna Jabatan;
 - Tunjangan Transportasi.
- Fasilitas
 - Fasilitas Kesehatan;
 - Bantuan Hukum.
- Tantiem/Insentif Kinerja.

Dengan proporsi besaran honorarium berikut:

- Honorarium Ketua Dewan Pengawas sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama;
- Honorarium Anggota Dewan Pengawas sebesar 90% dari Honorarium Ketua Dewan Pengawas.

Indikator Penetapan Remunerasi Bagi Dewan Pengawas dan Direksi

Alur penetapan penghasilan (remunerasi) berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bersifat tetap harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pendapatan;
- Aktiva;
- Kondisi dan kemampuan keuangan anak perusahaan/perusahaan patungan yang bersangkutan;
- Faktor-faktor lain yang relevan;
- Kepatuhan (*compliance*) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan penghasilan berupa tantiem yang bersifat variabel dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- *Performance* perusahaan, termasuk EBITDA dan *Key Performance Indicator* (KPI);
- Tingkat kesehatan;
- Kondisi dan kemampuan anak perusahaan/perusahaan patungan yang bersangkutan;
- Faktor-faktor yang relevan.

Berdasar proses dan alur di atas, Pemilik Modal menjadi satu-satunya pemangku kepentingan yang terlibat dalam penentuan remunerasi Dewan Pengawas. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka jumlah remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Perhutani tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Remuneration Structure for the Supervisory Board

The components of the Supervisory Board's income consist of:

- Honorarium
- Allowances
 - Holiday Allowance;
 - Post-Service Insurance;
 - Transportation Allowance.
- Facilities
 - Health Facilities;
 - Legal Aid.
- Tantiem/Performance Incentives.

With the following proportion of honorarium amounts:

- Honorarium for the Chairman of the Supervisory Board is 45% of the President Director's Salary;
- Honorarium for Members of the Supervisory Board is 90% of the Honorarium for the Chairman of the Supervisory Board.

Indicators for Determining Remuneration for the Supervisory Board and Board of Directors

The flow for determining income (remuneration) in the form of salary/honorarium, allowances and facilities of a fixed nature must consider the following:

- Income;
- Assets;
- Condition and financial capacity of the relevant subsidiary/joint venture;
- Other relevant factors;
- Compliance that does not conflict with laws and regulations.

Determination of income in the form of variable bonuses is carried out by considering the following

- *Company performance, including EBITDA and Key Performance Indicators (KPI);*
- *Health level;*
- *Condition and capabilities of the relevant subsidiary/joint venture;*
- *Relevant factors.*

Based on the process and flow above, the Capital Owner is the only stakeholder involved in determining the remuneration of the Supervisory Board. Referring to these provisions, the amount of remuneration for the Supervisory Board and Directors of Perhutani in 2023 is as follows:

Remunerasi Dewan Pengawas

Remuneration of the Supervisory Board

Nama Name	Jabatan Position	Gaji/Bulan (Bruto) Salary/Month (Gross)
Bambang Hendroyono	Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Supervisory Board	101.700.000
Chalid Muhammad	Dewan Pengawas Independen Independent Supervisory Board	91.530.000
Bambang Risyanto	Dewan Pengawas Independen Independent Supervisory Board	91.530.000
Komarudin Simanjuntak	Dewan Pengawas/ Supervisory Board	91.530.000
Noer Fauzi Rachman	Dewan Pengawas Independen Independent Supervisory Board	91.530.000
Yohanes Babtista Priyatmo Hadi	Dewan Pengawas/ Supervisory Board	91.530.000

Remunerasi Direksi

Board of Directors Remuneration

Nama Name	Jabatan Position	Gaji/Bulan (Bruto) Salary/Month (Gross)
Wahyu Kuncoro	Direktur Utama/ President Director	226.000.000
Anggar Widiyatmoko	Direktur Komersial/ Commercial Director	192.100.000
Dewi Fitrianingrum	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/ Finance and Risk Management Director	192.100.000
Endung Trihartaka	Direktur Perencanaan dan Pengembangan/ Director of Planning and Development	192.100.000
Muhamad Denny Ermansyah	Direktur Sumberdaya Manusia, Umum dan IT/ Director of Human Resources, General and IT	192.100.000
Natalas Anis Harjanto	Direktur Operasi/ Director of Operations	192.100.000

**Hubungan Antara
Remunerasi dan Kinerja
Perusahaan**

Kebijakan dan prosedur penetapan remunerasi bagi Direksi melibatkan beberapa tahapan penting yang mencakup proses penyusunan, analisis, pengajuan, dan penetapan. Penyusunan kebijakan dan proposal remunerasi dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Direksi kemudian disampaikan kepada Pemilik Modal. Pada tahap akhir, rekomendasi remunerasi tersebut diajukan dalam Rapat Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara (RPB) Tahunan yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terakhir terkait penetapan remunerasi untuk Direksi.

Komitmen Direksi untuk mencapai *Key Performance Indicators* (KPI) tahun 2023 direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara target kinerja perusahaan dengan pembagian

**Relationship Between
Remuneration and Company
Performance**

The policy and procedure for determining remuneration for the Board of Directors involves several important stages that include the process of preparation, analysis, submission, and determination. The preparation of the remuneration policy and proposal is carried out by the Supervisory Board and the Board of Directors and then submitted to the Capital Owner. In the final stage, the remuneration recommendation is submitted at the Annual State-Owned Enterprise Management Meeting (RPB) which has the authority to make the final decision regarding the determination of remuneration for the Board of Directors.

The Board of Directors' commitment to achieving the 2023 *Key Performance Indicators* (KPI) is planned in the Company's Work Plan and Budget which has been approved by the Supervisory Board. This shows the suitability between the company's performance targets and the division

tugas dan tanggung jawab Direksi. KPI yang menjadi tolok ukur pencapaian dijadikan sebagai target yang diperjuangkan untuk dicapai secara optimal demi meningkatkan kinerja dan hasil perusahaan.

Dengan keterkaitan yang kuat antara penetapan remunerasi, komitmen mencapai KPI, dan pengawasan Dewan Pengawas, perusahaan menunjukkan keseriusan dalam memastikan hubungan yang sehat antara insentif kinerja dan hasil yang diharapkan.

Pengungkapan Bonus Kinerja, Bonus Non Kinerja dan Opsi Saham Dewan Pengawas dan Direksi

Struktur remunerasi untuk Dewan Pengawas dan Direksi di Perhutani didasarkan pada prinsip-prinsip yang melibatkan gaji/honorarium dan tantiem sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi pada Perusahaan. Tidak ada pemberian bonus non-kinerja atau opsi saham kepada anggota Dewan Pengawas dan Direksi, menekankan pendekatan yang bersifat langsung dan transparan dalam penghargaan terhadap kinerja Dewan Pengawas dan Direksi. Penetapan gaji dan tantiem untuk tahun buku 2023 dilakukan berdasarkan Keputusan Pemilik Modal dalam Rapat Pembahasan Bersama.

Kebijakan penghargaan/kompensasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan jangka panjang

Perhutani saat ini belum memiliki kebijakan khusus yang mendukung pemberian kompensasi jangka panjang berdasarkan kinerja. Meskipun demikian, perusahaan memberikan Asuransi Purna Jabatan kepada anggota Direksi sebagai bentuk kompensasi jangka panjang,

of duties and responsibilities of the Board of Directors. KPIs which are the benchmark for achievement are used as targets that are fought for to be achieved optimally in order to improve the company's performance and results.

With a strong link between remuneration determination, commitment to achieving KPIs, and supervision by the Supervisory Board, the company shows its seriousness in ensuring a healthy relationship between performance incentives and expected results.

Disclosure of Performance Bonuses, Non-Performance Bonuses and Stock Options of the Board of Commissioners and Directors

The remuneration structure for the Board of Supervisors and Board of Directors at Perhutani is based on principles involving salary/honorarium and bonuses as a form of recognition for contributions to the Company. There is no provision of non-performance bonuses or stock options to members of the Board of Supervisors and Board of Directors, emphasizing a direct and transparent approach in rewarding the performance of the Board of Supervisors and Board of Directors. Determination of salaries and bonuses for the 2023 financial year is carried out based on the Capital Owner's Decision in the Joint Discussion Meeting.

Reward/compensation policy that takes into account long-term company performance

Perhutani currently does not have a specific policy that supports the provision of long-term compensation based on performance. However, the company provides Post-Service Insurance to members of the Board of Directors as a form of long-term compensation,

Sekretaris Dewan Pengawas

Secretary of the Supervisory Board

Sekretaris Dewan Pengawas memegang peran penting dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG dan mematuhi regulasi yang berlaku. Mereka juga bertanggung jawab dalam mengurus kegiatan administrasi dan kesekretariatan terkait fungsi pengawasan, serta melapor secara langsung kepada Dewan Pengawas. Dengan demikian, keberadaan Sekretaris Dewan Pengawas membantu memastikan transparansi, akuntabilitas, dan ketaatan terhadap standar terbaik dalam tata kelola Perusahaan.

The Secretary of the Supervisory Board plays an important role in ensuring the implementation of GCG principles and compliance with applicable regulations. They are also responsible for managing administrative and secretarial activities related to the supervisory function, and reporting directly to the Supervisory Board. Thus, the existence of the Secretary of the Supervisory Board helps ensure transparency, accountability, and compliance with the best standards in corporate governance.

Profil Sekretaris Dewan Pengawas

Profile of the Secretary of the Supervisory Board



Tri Budi Pramono

Sekretaris Dewan Pengawas
Secretary of the Supervisory Board

Warga Negara Indonesia, lahir di Pekanbaru, 15 Maret 1990. Menyelesaikan Studi S1 Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta tahun 2012. S2 Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2015. Pada tahun 2015 menjadi PNS di Kementerian BUMN. Mulai karir di Perum Perhutani sejak 16 September 2022 diangkat sebagai Sekretaris Dewan Pengawas.

Indonesian citizen, born in Pekanbaru, March 15, 1990. Completed his Bachelor's Degree in International Relations from the National Veteran Development University of Yogyakarta in 2012. Master's Degree in International Relations from Gadjah Mada University, Yogyakarta in 2015. In 2015 he became a civil servant at the Ministry of SOEs. Started his career at Perum Perhutani since September 16, 2022, appointed as Secretary of the Supervisory Board.

Pedoman Kerja dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Pengawas

Work Guidelines and Responsibilities of the Secretary of the Supervisory Board

Sekretaris Dewan Pengawas, dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Pedoman Kerja yang tercantum dalam Pedoman Direksi dan

The Secretary of the Supervisory Board, in carrying out his duties, refers to the Work Guidelines contained in the Board of Directors and Supervisory

Dewan Pengawas (*Board Manual*), dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan pengurusan komunikasi dan penyelenggaraan administrasi Dewan Pengawas dan kesekretariatan Dewan Pengawas sesuai hukum dan prinsip GCG;
- Mempersiapkan keputusan terhadap usulan perbuatan hukum Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Pengawas;
- Mempersiapkan materi awal dalam hal nasihat yang akan disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Direksi;
- Mempersiapkan pendapat dan saran (tanggapan) Dewan Pengawas yang akan disampaikan kepada RPB mengenai RJPP, RKAP dan Laporan Tahunan;
- Mempersiapkan tugas Dewan Pengawas dalam menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan ke dalam RKAP;
- Mempersiapkan usulan Dewan Pengawas kepada RPB mengenai Akuntan Publik yang akan digunakan oleh Perusahaan;
- Membuat risalah rapat Dewan Pengawas
- Mempersiapkan materi laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku terkait pada RPB;
- Melaksanakan kewajiban lainnya yang ditugaskan oleh Dewan Pengawas.

Remunerasi Sekretaris Dewan Pengawas

Remunerasi Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.

Besaran dan jenis penghasilan Sekretaris Dewan Pengawas terdiri dari:

- Honorarium maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan;
- Fasilitas;
- Tunjangan; dan/atau
- Tantiem atau insentif kerja

Kegiatan Sekretaris Dewan Pengawas Tahun 2023

Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pengawas yang bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Kegiatan Sekretariat Dewan Pengawas selama

Board Manual, with the following duties and responsibilities:

- Coordinating the management of communication and administration of the Supervisory Board and the secretariat of the Supervisory Board in accordance with the law and GCG principles;
- Preparing decisions on proposed legal actions of the Board of Directors that require written approval from the Supervisory Board;
- Preparing initial materials in terms of advice to be submitted by the Supervisory Board to the Board of Directors;
- Preparing opinions and suggestions (responses) of the Supervisory Board to be submitted to the RPB regarding the RJPP, RKAP and Annual Report;
- Preparing the duties of the Supervisory Board in preparing the annual work program and including it in the RKAP;
- Preparing proposals from the Supervisory Board to the RPB regarding Public Accountants to be used by the Company;
- Making minutes of Supervisory Board meetings
- Preparing report materials on supervisory duties that have been carried out by the Supervisory Board during the related financial year in the RPB;
- Carrying out other obligations assigned by the Supervisory Board.

Remuneration of the Secretary of the Supervisory Board

The remuneration of the Secretary of the Supervisory Board is determined by the Supervisory Board by considering the Company's capabilities

The amount and type of income of the Secretary of the Supervisory Board consists of:

- Honorarium of a maximum of 15% (fifteen percent) of the salary of the Company's President Director;
- Facilities;
- Allowances; and/or
- Tantiem or work incentives

Activities of the Secretary of the Supervisory Board in 2023

The Secretariat of the Supervisory Board is led by the Secretary of the Supervisory Board who is tasked with carrying out activities to assist the Supervisory Board in carrying out its duties. The activities of the Secretariat of the Supervisory

tahun 2023, antara lain:

- Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Pengawas.
- Membuat risalah rapat Dewan Pengawas sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan.
- Mengadministrasikan dokumen Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
- Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Pengawas.
- Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas.

Selain melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Sekretaris Dewan Pengawas selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:

- Memastikan bahwa Dewan Pengawas mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
- Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
- Berkoordinasi dengan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Pengawas.
- Sebagai penghubung (liaison officer) Dewan Pengawas dengan pihak lain.

Board during 2023 include:

- Preparing meetings, including meeting materials (briefing sheets) of the Supervisory Board.
- Making minutes of meetings of the Supervisory Board in accordance with the provisions of the Company's articles of association.
- Administering documents of the Supervisory Board, including incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents.
- Preparing Draft Reports of the Supervisory Board.
- Carrying out other duties of the Supervisory Board

In addition to carrying out the duties mentioned above, the Secretary of the Supervisory Board as the head of the Secretariat, carries out other duties in the form of:

- Ensuring that the Supervisory Board complies with laws and regulations and implements GCG principles.
- Providing information needed by the Supervisory Board periodically and/or at any time when requested.
- Coordinating with Committee members, if necessary in order to facilitate the duties of the Supervisory Board.
- As a liaison officer between the Supervisory Board and other parties.

Komite Dewan Pengawas

Supervisory Board Committee



Komite Audit Audit Committee

Komite Audit yang dibentuk oleh Perhutani memiliki peran yang krusial dalam memastikan prinsip akuntabilitas perusahaan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Komite ini bertanggung jawab utama dalam menegakkan akuntabilitas perusahaan melalui berbagai tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Beberapa tugas dan tanggung jawab utama Komite Audit antara lain memastikan bahwa informasi keuangan Perhutani disajikan secara wajar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas terkait penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee audit yang sesuai. Selain itu, Komite Audit juga bertanggung jawab dalam memantau pelaksanaan audit internal dan eksternal sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Pedoman Komite Audit yang telah ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2014, secara garis besar memuat tujuan, fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang menjadi dasar kerja Komite Audit. Pedoman ini terus direview dan diperbarui secara berkala sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan regulasi demi memastikan bahwa Komite Audit tetap efektif dalam menunaikan tugasnya.

Susunan Keanggotaan Komite Audit

Komposisi Komite Audit yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dari Dewan Pengawas, dan 2 (two) orang anggota independen yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang audit, akuntansi, keuangan, dan tata kelola.

The Audit Committee formed by Perhutani has a crucial role in ensuring the principles of corporate accountability in accordance with the laws and regulations in Indonesia. This committee is primarily responsible for enforcing corporate accountability through various tasks and responsibilities.

Some of the main tasks and responsibilities of the Audit Committee include ensuring that Perhutani's financial information is presented fairly in accordance with applicable provisions and laws. In addition, the Audit Committee provides recommendations to the Supervisory Board regarding the appointment of accountants based on independence, scope of assignment, and appropriate audit fees. In addition, the Audit Committee is also responsible for monitoring the implementation of internal and external audits in accordance with applicable audit standards.

The Audit Committee Guidelines, which were established on August 12, 2014, broadly contain the objectives, functions, duties, and responsibilities that form the basis for the Audit Committee's work. These guidelines are continuously reviewed and updated periodically in accordance with the company's needs and regulatory developments to ensure that the Audit Committee remains effective in carrying out its duties.

Audit Committee Membership

The composition of the Audit Committee consists of 1 (one) Chairman from the Supervisory Board, and 2 (two) independent members who have knowledge and experience in the fields of audit, accounting, finance, and governance

Komposisi dan Profil Komite Audit

Audit Committee Composition and Profile

Nama Name	Jabatan Position		Keterangan Description
Chalid Muhammad	Ketua	Chairman	SK Pengangkatan No.06/ DWAS-PHT/2020 tanggal 28 April 2020
M Farkhan Supriyadi	Anggota	Member	SK Pengangkatan No.02/ DWAS-PHT/2020 tanggal 1 April 2020.
Agus Budi Wibowo	Anggota	Member	SK Pengangkatan No. 01/DWAS-PHT/2022 tgl 1 Juli 2022

Profil Keanggotaan Komite Audit**Audit Committee Membership Profile****CHALID MUHAMMAD**

Ketua Komite Audit
Chairman of Audit Committee

Profil Beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Pengawas.
His profile can be seen in the Profile of the Supervisory Board.

**M FARKHAN SUPRIYADI**

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Warga Negara Indonesia, lahir di Brebes, 24 April 1974 (48 tahun). Mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Diponegoro dan Magister Finance dari Universitas Trisakti. Berpengalaman di industri keuangan sejak tahun 1995 dan pernah bekerja di PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero). Diangkat sebagai Anggota Komite Audit Perum Perhutani sejak 1 April 2020. Memiliki sertifikasi antara lain:

- *Certified Risk Management Profesional*
- *Certified Public Accountant (CPA)*

Indonesian citizen, born in Brebes, April 24, 1974 (48 years old). Received a Bachelor of Accounting from Diponegoro University and a Master of Finance from Trisakti University. Experienced in the financial industry since 1995 and has worked at PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero). Appointed as a Member of the Audit Committee of Perum Perhutani since April 1, 2020. Has certifications including:

- *Certified Risk Management Profesional*
- *Certified Public Accountant (CPA)*

**AGUS BUDI WIBOWO**

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Warga Negara Indonesia, Lahir di Bogor, 3 Agustus 1968 (54 tahun). Menyelesaikan S1 Kehutanan di Institut Pertanian Bogor tahun 1994. Sebelumnya berkarir sebagai anggota Direksi *Center for Forestry Organization Capacity and Institution Development Institut Pertanian Bogor*. Diangkat sebagai Anggota Komite Audit Perum Perhutani sejak 01 Juli 2022.

Indonesian citizen, born in Bogor, August 3, 1968 (54 years old). Completed his Bachelor of Forestry at the Bogor Agricultural Institute in 1994. Previously worked as a member of the Board of Directors of the Center for Forestry Organization Capacity and Institution Development, Bogor Agricultural Institute. Appointed as a Member of the Audit Committee of Perum Perhutani since July 1, 2022

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit adalah organ/perangkat yang diangkat oleh Dewan Pengawas untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, disebutkan hal-hal sebagai berikut:

- Membantu Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.
- Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal.
- Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
- Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN yang bersangkutan.
- Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas/ Dewan Pengawas BUMN serta tugas-tugas Dewan Pengawas/Dewan Pengawas BUMN bersangkutan lainnya; dan
- Melakukan tugas terkait pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The Audit Committee is an organ/device appointed by the Supervisory Board to assist in carrying out the duties of the Supervisory Board, in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, which states the following:

- Assist the Supervisory Board to ensure the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the implementation of the duties of internal auditors and external auditors.
- Assess the implementation of activities and audit results carried out by the Internal Audit Unit and external auditors.
- Provide recommendations regarding the improvement of the management control system and its implementation.
- Ensure that there is a satisfactory evaluation procedure for all information issued by the BUMN concerned.
- Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners/Board of Supervisors of the BUMN concerned and other duties of the Board of Commissioners/Board of Supervisors of the BUMN concerned; and
- Carry out tasks related to risk management as stipulated in laws and regulations.

Selain tugas inti tersebut, Dewan Pengawas dapat memberikan penugasan tambahan kepada Komite Audit sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik perusahaan yang diatur dalam Piagam Komite Audit. Dengan demikian, Komite Audit memegang peranan penting dalam menjaga keberlangsungan operasional perusahaan dan memastikan praktik-praktik bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit di Perhutani untuk tahun buku 2023 mencakup berbagai kegiatan yang mendukung pengawasan dan pengendalian internal perusahaan. Berdasarkan laporan kegiatan Komite Audit, beberapa aktivitas yang dilakukan selama tahun tersebut antara lain:

1. **Penyiapan Telaahan dan Bahan Rapat Dewan Pengawas**

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit secara konsisten menyiapkan telaahan dan bahan rapat yang diperlukan oleh Dewan Pengawas. Kegiatan ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap laporan keuangan, kinerja operasional, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Berkat upaya ini, Dewan Pengawas dapat menjalankan tugas pengawasannya dengan lebih terinformasi dan efektif.

2. **Penunjukan Auditor Independen untuk Tahun Buku 2023**

Pada tahun 2023, dengan persetujuan Dewan Pengawas, Perhutani kembali menunjuk KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai auditor independen untuk melaksanakan audit tahun buku 2023. Penunjukan ini didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pengawas yang mengikuti mandat dari Rencana Pengawasan Tahunan (RPB), yang mendelegasikan kewenangan penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Pengawas.

Independensi Komite Audit

Anggota Komite Audit harus merupakan pihak yang independen, minimal salah satu diantaranya harus memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan/atau keuangan, untuk menghindari adanya benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan Perhutani.

In addition to these core duties, the Supervisory Board may assign additional assignments to the Audit Committee in accordance with the specific needs and conditions of the company as stipulated in the Audit Committee Charter. Thus, the Audit Committee plays an important role in maintaining the continuity of the company's operations and ensuring healthy and sustainable business practices.

Implementation of Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The duties and responsibilities of the Audit Committee at Perhutani for the 2023 financial year include various activities that support the company's internal supervision and control. Based on the Audit Committee's activity report, several activities carried out during the year include:

1. **Preparation of Reviews and Materials for the Board of Supervisors Meeting**

Throughout 2023, the Audit Committee consistently prepared reviews and meeting materials required by the Board of Supervisors. This activity involves a comprehensive analysis of financial statements, operational performance, and compliance with applicable regulations. Thanks to these efforts, the Board of Supervisors can carry out its supervisory duties in a more informed and effective manner.

2. **Appointment of Independent Auditor for Fiscal Year 2023**

In 2023, with the approval of the Supervisory Board, Perhutani re-appointed KAP Purwantono, Sungkoro & Surja as an independent auditor to carry out the audit for the 2023 fiscal year. This appointment was based on the Decree of the Supervisory Board which follows the mandate of the Annual Supervisory Plan (RPB), which delegates the authority to determine the Public Accounting Firm (KAP) to the Supervisory Board.

Independence of the Audit Committee

Members of the Audit Committee must be independent parties, at least one of whom must have expertise in accounting and/or finance, to avoid any conflict of interest in the decision-making process in achieving Perhutani's goals.

Agar memenuhi syarat independensi sesuai dengan peraturan yang berlaku, anggota eksternal Komite Audit antara lain:

- Bukan sebagai pejabat eksekutif KAP yang memberikan jasa audit dan/atau jasa non-audit kepada Perhutani dalam jangka waktu enam bulan terakhir sebelum penunjukannya sebagai anggota Komite Audit.
- Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Direksi, dan/atau Pemilik Modal atau hubungan dengan Perhutani.

In order to meet the independence requirements in accordance with applicable regulations, external members of the Audit Committee include:

- Not an executive officer of a KAP that provides audit services and/or non-audit services to Perhutani within the last six months prior to their appointment as members of the Audit Committee.
- Not having any financial, management, share ownership and/or family relationship with the Supervisory Board, Directors, and/or Capital Owners or relationship with Perhutani

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan 13 (tiga belas) kali rapat, yang terdiri dari rapat internal Komite Audit, rapat gabungan dengan mitra kerja (SPI) serta rapat dengan Eksternal Auditor dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Frequency and Attendance Level of Audit Committee Meetings

Throughout 2023, the Audit Committee has held 13 (thirteen) meetings, consisting of internal Audit Committee meetings, joint meetings with working partners (SPI) and meetings with External Auditors with the following attendance levels:

Rapat Komite Audit

Audit Committee Meetings

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Chalid Muhammad	13	13	100%
M Farkhan Supriyadi	13	13	100%
Agus Budi Wibowo	13	13	100%

Agenda Rapat Komite Audit

Audit Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda	
1	17 Jan 2023	• Review terhadap RKAP 2023	Review of the 2023 RKAP
2	23 Feb 2023	• Pembahasan laporan tahunan SPI 2022 • Program kerja pengawasan tahunan PKPT SPI tahun 2023 • Temuan audit 2022	• Discussion of the 2022 SPI annual report • PKPT SPI annual supervision work program in 2023 • 2022 audit findings
3	24 Feb 2023	• Pembahasan kinerja operasional Perhutani s.d Januari 2023 • Kinerja keuangan Perhutani bulan Januari 2023 • Pembahasan laporan tahunan SPI tahun 2022	• Discussion of Perhutani operational performance until January 2023 • Perhutani financial performance in January 2023 • Discussion of the 2022 SPI annual report
4	20 Mar 2023	• Pembahasan kinerja operasional Perhutani s.d Februari 2023 • Kinerja keuangan Perhutani bulan Februari 2023	• Discussion of Perhutani operational performance until February 2023 • Perhutani's financial performance in February 2023
5	26 Apr 2023	• Pembahasan kinerja operasional Perhutani s.d Maret 2023 • Kinerja keuangan Perhutani bulan Maret 2023	• Discussion of Perhutani operational performance until March 2023 • Perhutani's financial performance in March 2023

Agenda Rapat Komite Audit

Audit Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda	
6	22 Mei 2023	- Pembahasan kinerja operasional Perhutani s.d April 2023 - Kinerja keuangan Perhutani bulan April 2023	- Discussion of Perhutani operational performance until April 2023 - Perhutani's financial performance in April 2023
7	15 Jun 2023	- Pembahasan kinerja operasional Perhutani s.d Mei 2023 - Kinerja keuangan Perhutani bulan Mei 2023	- Discussion of Perhutani operational performance until May 2023 - Perhutani's financial performance in May 2023
8	26 Jul 2023	- Pembahasan kinerja operasional Perhutani s.d Juni 2023 - Kinerja keuangan Perhutani bulan Juni 2023	- Discussion of Perhutani operational performance until June 2023 - Perhutani's financial performance in June 2023
9	25 Aug 2023	- Pembahasan kinerja operasional Perhutani s.d Juli 2023 - Kinerja keuangan Perhutani bulan Juli 2023	- Discussion of Perhutani operational performance until July 2023 - Perhutani's financial performance in July 2023
10	22 Sept 2023	- Pembahasan kinerja operasional Perhutani s.d Agustus 2023 - Kinerja keuangan Perhutani bulan Agustus 2023	- Discussion of Perhutani operational performance until August 2023 - Perhutani's financial performance in August 2023
11	25 Okt 2023	- Pembahasan kinerja operasional Perhutani s.d September 2023 - Kinerja keuangan Perhutani bulan September 2023	- Discussion of Perhutani operational performance until September 2023 - Perhutani financial performance in September 2023
12	28 Nov 2023	- Pembahasan kinerja operasional Perhutani s.d Oktober 2023 - Kinerja keuangan Perhutani bulan Oktober 2023	- Discussion of Perhutani operational performance until October 2023 - Perhutani financial performance in October 2023
13	29 Des 2023	- Pembahasan kinerja keuangan Perhutani bulan November 2023 - Kinerja operasional Perhutani s.d bulan November	- Discussion of Perhutani's financial performance in November 2023 - Perhutani operational performance up to November

Program Pengembangan Komite Audit

Peningkatan Kompetensi Komite Audit mengenai perkembangan dunia usaha khususnya terkait pelaksanaan kebijakan sistem pengendalian internal dan audit. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam mengawal aktivitas Perusahaan.

Audit Committee Development Program

Improving the Audit Committee's Competence regarding business developments, especially related to the implementation of internal control and audit system policies. This activity is expected to support the implementation of the Audit Committee's duties and responsibilities in overseeing the Company's activities



Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk sebagai bentuk transparansi proses nominasi dan remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari satu orang ketua komite yang merangkap sebagai anggota dan dua orang anggota komite.

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dengan mengacu pada Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor: 07/DWA9-PHT/2020 tanggal 28 April 2020 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Umum Pengawas Perusahaan (PERUM) Kehutanan Negara dan Surat Keputusan No. 11/DWASPHT/2020 tanggal 22 Juni 2020 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Pengawas Perum Perhutani.

The Nomination and Remuneration Committee was formed as a form of transparency in the nomination and remuneration process. The Nomination and Remuneration Committee consists of one committee chair who also serves as a member and two committee members.

The Nomination and Remuneration Committee was formed with reference to the Decree of the Supervisory Board of Perum Perhutani Number: 07/DWA9-PHT/2020 dated April 28, 2020 concerning the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee of the State Forestry Supervisory Company (PERUM) and Decree No. 11/DWASPHT/2020 dated June 22, 2020 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of Perum Perhutani.

Komposisi dan Profil Komite Nominasi Dan Remunerasi

Composition and Profile of the Nomination and Remuneration Committee

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Description
Bambang Hendroyono	Ketua Chairman	SK Pengangkatan No. 07/DWAS-PHT/2020 tanggal 28 April 2020
Noer Fauzi Rachman	Sekretaris merangkap Anggota Secretary concurrently Member	SK Pengangkatan No. 03/DWAS-PHT/2021 tanggal 25 Maret 2021 Appointment Decree No. 03/DWAS-PHT/2021 dated March 25, 2021
Y.B. Priyatmo Hadi	Anggota Member	SK-238/MBU/07/2020 tgl 14 Juli 2020

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profile of Nomination and Remuneration Committee Members



Bambang Hendroyono

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Profil Beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Pengawas.

His profile can be seen in the Profile of the Supervisory Board.



Noer Fauzi Rachman

Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi
Secretary of the Nomination and Remuneration Committee

Profil Beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Pengawas.

His profile can be seen in the Profile of the Supervisory Board.



Y.B. Priyatmo Hadi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Profil Beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Pengawas.

His profile can be seen in the Profile of the Supervisory Board.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, disebutkan Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk:

1. Melakukan tinjauan secara berkala atas sistem Manajemen Talenta BUMN serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaannya;
2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian Talenta yang dilakukan oleh Direksi BUMN;
3. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta Terseleksi (selected talent), untuk menghasilkan daftar Talenta Ternominasi (nominated talent) yang dinominasikan oleh Dewan Pengawas/Dewan Pengawas BUMN kepada RPB/Menteri;
4. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil BUMN yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas Anak Perusahaan, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri;
5. Melakukan evaluasi atas usulan KPI individu anggota Direksi BUMN;
6. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

According to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, it is stated that the Nomination and Remuneration Committee is tasked with:

1. Conducting periodic reviews of the BUMN Talent Management system and Supervision and evaluation of its implementation;
2. Conducting evaluations of the Talent classification system and procedures carried out by the BUMN Board of Directors;
3. Validating and calibrating Selected Talents, to produce a list of Nominated Talents nominated by the BUMN Board of Commissioners/Supervisory Board to the GMS/Minister;
4. Conducting evaluations of BUMN representative candidates who will be proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of Subsidiaries, before being submitted to the GMS/Minister;
5. Conducting evaluations of the proposed individual KPIs of BUMN Board of Directors;
6. Prepare a proposal for an individual performance evaluation system for members of the Board of Directors and/or members of the Board of

anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas BUMN;

7. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas BUMN;
8. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi karyawan yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Pengawas/Dewan Pengawas BUMN dan Melakukan evaluasi atas usulan Direksi BUMN mengenai struktur organisasi BUMN.

Independensi Komite Nominasi Dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, tanpa intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015, anggota komite tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan usaha dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau anggota Direksi ataupun Pemilik Modal.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, program dan kegiatan Komite dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu (1) Pengawasan dan Pemberian Saran/ Nasihat di bidang nominasi, dan (2) Pengawasan dan Pemberian Saran/ Nasihat di bidang remunerasi dengan penjabaran sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas atas perubahan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas atas usulan pengangkatan Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI).
- Melakukan validasi *selected talent* yang diusulkan oleh Direksi.
- Evaluasi atas pencapaian *Key Performance Indicators* Individu anggota Direksi.
- Melakukan telaah atas usulan remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas Tahun 2022.
- Melakukan penyusunan Rencana Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2023.
- Melakukan wawancara kandidat Sekretaris Perusahaan Perum Perhutani dan memberikan rekomendasi.

Commissioners/Supervisory Board of BUMN;

7. Prepare a proposal for a development program for members of the Board of Directors and/ or members of the Board of Commissioners/ Supervisory Board of BUMN;
8. Conduct an evaluation of the remuneration policy for employees that requires approval/ response from the Board of Commissioners/ Supervisory Board of BUMN and Conduct an evaluation of the proposal of the Board of Directors of BUMN regarding the organizational structure of BUMN.

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee carries out its duties and responsibilities professionally and independently, without intervention from any party that is not in accordance with the provisions of laws and regulations. In accordance with POJK No. 55/POJK.04/2015, members of the committee do not have family or business relationships with other members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors or Capital Owners.

Implementation of Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

In accordance with its duties and functions, the Committee's programs and activities can be grouped into two parts, namely (1) Supervision and Provision of Advice/Advice in the field of nomination, and (2) Supervision and Provision of Advice/Advice in the field of remuneration with the following description:

- Provide recommendations to the Supervisory Board on changes to the organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors.
- Provide recommendations to the Supervisory Board on the proposed appointment of the Head of the Internal Audit Unit (SPI).
- Validate selected talents proposed by the Board of Directors.
- Evaluate the achievement of Key Performance Indicators for Individual members of the Board of Directors.
- Review the proposed remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2022.
- Prepare the Nomination and Remuneration Committee Work Plan for 2023.
- Interview candidates for Corporate Secretary of Perum Perhutani and provide recommendations

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Meetings

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Bambang Hendroyono	1	1	100%
Bambang Risyanto	1	1	100%
Noer Fauzi Rachman	1	1	100%
Komaruddin Simanjuntak	1	1	100%
YB. Priyatmo Hadi	1	1	100%

Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Meetings Agenda

No	Tanggal Date	Agenda
1	24 Aug 2023	Undangan pengisian jabatan KSPI pertemuan bersama anggota Dewas Invitation to fill KSPI positions in joint meeting with members of the Supervisory Board

Program Pelatihan Komite Nominasi dan Remunerasi

Evaluasi Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Dewan Pengawas. Metode penilaian kinerja tersebut berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah tersusun dalam RKA tahunan Komite yang dilaporkan secara tahunan dalam laporan Komite.

Penilaian juga dilakukan atas saran, rekomendasi dan masukan yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi terkait penyempurnaan *soft-structure* pendukung pelaksanaan nominasi dan remunerasi Perusahaan. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan Dewan Pengawas untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite.

Frequency and Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meetings

During 2023, the Nomination and Remuneration Committee has held 1 (one) meetings with the following attendance levels:

Nomination and Remuneration Committee Training Program

Evaluation The performance assessment of the Nomination and Remuneration Committee is carried out once a year by the Board of Supervisors. The performance assessment method is based on the realization and completion of the work program that has been prepared in the Committee's annual RKA which is reported annually in the Committee's report.

The assessment is also carried out based on suggestions, recommendations and input provided by the Nomination and Remuneration Committee regarding the improvement of the supporting *soft-structure* for the implementation of the Company's nomination and remuneration. The results of the assessment are used as consideration by the Board of Supervisors to reappoint and/or dismiss members of the Committee



Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee

Komite Pemantau Risiko Perhutani terdiri dari satu orang Ketua Komite dan dua orang anggota Komite. Komite Pemantau Risiko telah menyusun Piagam Komite Pemantau Risiko yang dimutakhirkan dan disahkan terakhir oleh Dewan Pengawas pada tanggal 12 Agustus 2014 serta telah dipublikasikan di situs web Perhutani.

Perhutani's Risk Monitoring Committee consists of one Committee Chairperson and two Committee members. The Risk Monitoring Committee has prepared a Risk Monitoring Committee Charter which was updated and last approved by the Supervisory Board on August 12, 2014 and has been published on the Perhutani website.

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Membership Composition of the Risk Monitoring Committee

Komposisi dan Profil Komite Pemantau Risiko

Composition and Profile of the Nomination and Remuneration Committee

Nama Name	Jabatan Position		Keterangan Description
Komaruddin Simanjuntak	Ketua	Chairman	SK Pengangkatan No. 10/DWASPHT/2020 tgl 22 Juni 2020
Muchamad Iman Tawakal	Anggota	Member	SK Pengangkatan No.06/DWASPHT/2019 tgl 02 Agustus 2019
Muhdi Al Fajar	Anggota	Member	SK Pengangkatan: No. 04/DWAS-PHT/2022 tgl 1 September 2022

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Member Profile



Komaruddin Simanjuntak

Ketua Komite Pemantau Risiko

Chairman of the Risk Monitoring Committee

Profil Beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Pengawas.

His profile can be seen in the Profile of the Supervisory Board.



Muchamad Iman Tawakal

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Warga Negara Indonesia. Lahir 25 November 1959 (63 tahun). Menyelesaikan studi S1 di IPB tahun 1984, S2 Institut Manajemen Prasetiya Mulya tahun 1991, S2 Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya tahun 1993. Sebelumnya adalah Komisaris Utama PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah Jiwa Giri Artha. Diangkat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko sejak 02 Agustus 2019. Memiliki sertifikasi antara lain: Sertifikasi Pengelola Dana Pensiun.

Indonesian citizen. Born November 25, 1959 (63 years old). Completed his Bachelor's degree at IPB in 1984, Master's degree at Prasetiya Mulya Management Institute in 1991, Master's degree at Prasetiya Mulya Management College in 1993. Previously, he was the President Commissioner of PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah Jiwa Giri Artha. Appointed as a Member of the Risk Monitoring Committee since August 2, 2019. Has certifications including: Pension Fund Manager Certification.



Muhdi Al Fajar

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Warga Negara Indonesia. Lahir di Wonogiri, 20 Juni 1968 (54 tahun). Menyelesaikan studi S1 di Universitas Gadjah Mada tahun 1998, S2 di Universitas Indonesia tahun 2013. Sebelumnya adalah Anggota Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Diangkat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko sejak 1 September 2022. Memiliki sertifikasi antara lain: *Certified Information System Auditor* (CISA)

Indonesian citizen. Born in Wonogiri, June 20, 1968 (54 years old). Completed his undergraduate studies at Gadjah Mada University in 1998, his Masters at the University of Indonesia in 2013. Previously was a Member of the Audit Committee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Appointed as a Member of the Risk Monitoring Committee since September 1, 2022. Has certifications including: *Certified Information System Auditor* (CISA)

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya

Duties and Responsibilities of the Risk Monitoring Committee

In accordance with the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 concerning

Manusia Badan Usaha Milk Negara dan Keputusan Dewan Pengawas Nomor 08/DWAS-PHT/2014 jo SK No. 02/DWAS-PHT/2023 tanggal 05 Juni 2023 maka tugas-tugas Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- Membantu Dewan Pengawas dalam melakukan evaluasi dan mengkaji ulang secara berkala atas kebijakan manajemen risiko, nominasi & remunerasi dan pemberian pendapat kepada Dewan Pengawas sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi atau persetujuan atas kebijakan manajemen risiko dan kebilangan nominasi dan remunerasi.
- Membantu Dewan Pengawas dalam mengkaji dan melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi yang berkaitan dengan hubungan bisnis atau kegiatan usaha yang harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Pengawas.
- Membantu Dewan Pengawas dalam melakukan evaluasi dan melakukan analisis atas setiap usulan Direksi yang terkait dengan kerjasama investasi, penyertaan modal, pendirian perusahaan patungan, pendirian anak perusahaan, pelepasan aset perusahaan, dan kegiatan lain perusahaan untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Pengawas.
- Membantu Dewan Pengawas dalam melakukan evaluasi dan mengkaji Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Bisnis Perusahaan, dan Rencana Jangka Panjang perusahaan untuk mendapat rekomendasi atau persetujuan Dewan Pengawas.
- Membantu Dewan Pengawas dalam memonitor risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur memantau dan mengendalikan risiko-risiko tersebut.
- Memberikan masukan-masukan kepada Dewan Pengawas dalam rangka perbaikan dan pengembangan kebijakan manajemen risiko dan kebijakan nominasi & remunerasi Perusahaan.
- Menjalankan tugas-tugas lainnya yang sewaktu-waktu diberikan oleh Dewan Pengawas.

Selain tugas-tugas tersebut di atas, Dewan Pengawas dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko.

Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises and the Decree of the Supervisory Board Number 08/DWAS-PHT/2014 in conjunction with SK No.02/DWAS-PHT/2023 dated June 5, 2023, the duties of the Risk Monitoring Committee are as follows:

- Assist the Supervisory Board in conducting periodic evaluations and reviews of risk management, nomination & remuneration policies and providing opinions to the Supervisory Board as a consideration in providing recommendations or approvals for risk management policies and nomination and remuneration policies.
- Assist the Supervisory Board in reviewing and evaluating the accountability of the Board of Directors related to business relationships or business activities that must obtain recommendations or approval from the Supervisory Board.
- Assist the Supervisory Board in evaluating and analyzing each proposal from the Board of Directors related to investment cooperation, capital participation, establishment of joint ventures, establishment of subsidiaries, disposal of company assets, and other company activities to obtain recommendations or approval from the Supervisory Board.
- Assist the Supervisory Board in evaluating and reviewing the Company's Work Plan and Budget (RKAP), Company Business Plan, and Long-Term Plan to obtain recommendations or approval from the Supervisory Board.
- Assist the Supervisory Board in monitoring the main risks faced by the Company and ensuring that the Board of Directors has taken the necessary steps to identify, measure, monitor and control these risks.
- Provide inputs to the Supervisory Board in order to improve and develop the Company's risk management and nomination & remuneration policies.
- Carry out other tasks that are assigned from time to time by the Supervisory Board.

In addition to the above duties, the Supervisory Board may assign other tasks to the Risk Monitoring Committee as set out in the Risk Monitoring Committee Charter.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memberikan dukungan penting kepada Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan dan pemberian saran/nasihat dalam bidang manajemen risiko. Pada tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pengelolaan risiko yang optimal di perusahaan.

- **Review Kebijakan Manajemen Risiko** Komite Pemantau Risiko telah melakukan review mendalam terhadap kebijakan manajemen risiko yang ada di Perhutani. Proses ini mencakup analisis dan penilaian atas kebijakan yang diterapkan, memastikan bahwa semua aspek risiko yang potensial telah diakomodasi sesuai dengan kondisi dan dinamika lingkungan bisnis saat ini.
- **Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan** Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya, khususnya dalam hal investasi yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan risiko sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan bahwa investasi dilakukan dengan mempertimbangkan semua aspek risiko yang relevan.
- **Rekomendasi Kepada Dewan Pengawas** Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko secara proaktif menyampaikan berbagai rekomendasi kepada Dewan Pengawas terkait kebijakan yang telah diambil oleh Direksi berkaitan dengan manajemen risiko. Rekomendasi ini diberikan setelah melakukan kajian komprehensif dan bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan efektif dalam hal manajemen risiko.
- **Tugas dan Tanggung Jawab Lain** Selain tugas utama yang terkait dengan manajemen risiko, Komite Pemantau Risiko melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Pengawas dari waktu ke waktu. Fleksibilitas dan responsivitas Komite dalam menangani tugas-tugas tambahan ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung operasional perusahaan.
- **Telaahan dan Bahan Rapat Dewan Pengawas** Komite Pemantau Risiko menyiapkan telaahan

Implementation of Duties and Responsibilities of the Risk Monitoring Committee

Based on its duties and functions, the Risk Monitoring Committee provides important support to the Supervisory Board in carrying out supervision and providing advice/counsel in the field of risk management. In 2023, the Risk Monitoring Committee has carried out its various duties and responsibilities well, demonstrating a high commitment to optimal risk management in the company.

- **Risk Management Policy Review** The Risk Monitoring Committee has conducted an in-depth review of the existing risk management policies at Perhutani. This process includes analysis and assessment of the policies implemented, ensuring that all potential risk aspects have been accommodated in accordance with the current conditions and dynamics of the business environment.
- **Policy Implementation Evaluation** The Risk Monitoring Committee evaluates the suitability between the risk management policy and its implementation, especially in terms of investments that require the approval of the Supervisory Board. This evaluation is important to ensure that the implementation of the risk policy is in accordance with the established guidelines and that investments are made by considering all relevant risk aspects.
- **Recommendations to the Supervisory Board** During 2023, the Risk Monitoring Committee proactively submitted various recommendations to the Supervisory Board regarding policies that have been taken by the Board of Directors related to risk management. These recommendations are given after conducting a comprehensive study and aim to support appropriate and effective decision-making in terms of risk management.
- **Other Duties and Responsibilities** In addition to its main duties related to risk management, the Risk Monitoring Committee carries out various other duties and responsibilities assigned by the Supervisory Board from time to time. The Committee's flexibility and responsiveness in handling these additional duties demonstrates a strong commitment to supporting the company's operations.
- **Review and Materials for the Supervisory Board Meeting** The Risk Monitoring Committee prepares the review and materials for the

dan bahan rapat Dewan Pengawas dengan cermat dan teliti. Penyusunan bahan ini dilakukan melalui analisis yang mendalam dan dipresentasikan dalam rapat Dewan Pengawas untuk mendukung keputusan strategis yang berkaitan dengan manajemen risiko.

Supervisory Board meeting carefully and thoroughly. The preparation of these materials is carried out through in-depth analysis and presented at the Supervisory Board meeting to support strategic decisions related to risk management.

Secara keseluruhan, Komite Pemantau Risiko telah berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan harapan. Hasil kerja Komite tidak hanya membantu Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif tetapi juga memastikan bahwa manajemen risiko di Perhutani dilaksanakan dengan standar tertinggi. Komite terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengawasan risiko, guna mendukung kestabilan dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.

Overall, the Risk Monitoring Committee has successfully carried out its duties and responsibilities as expected. The Committee's work results not only assist the Supervisory Board in carrying out its supervisory function effectively but also ensure that risk management at Perhutani is implemented to the highest standards. The Committee continues to strive to improve the quality of risk monitoring, in order to support the company's stability and growth in the long term.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Saat ini lebih dari 50% dari anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen dan eksternal Perhutani.

Independence of the Risk Monitoring Committee

Currently, more than 50% of the members of the Risk Monitoring Committee are independent and external parties of Perhutani.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan 19 (sembilan belas) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Frequency and Attendance of Risk Monitoring Committee Meetings

During 2023, the Risk Monitoring Committee has held 19 (nineteen) meetings with the following attendance levels:

Rapat Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Meetings

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Komaruddin Simanjuntak	19	19	100%
Muchamad Iman Tawakal	19	19	100%
Muhdi Al Fajar	19	19	100%
Y.B. Priyatmo Hadi	19	19	100%

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal Date	Agenda	
1	10 Januari 2023	- Pembahasan atas usul penghapusan buku dan pemindahtanganan aktiva tetap kendaraan bermotor roda empat Perhutani - Pembahasan dan pencermatan kebijakan MR pada RKAP tahun 2023 Perhutani	- Discussion on the proposal to write off and transfer fixed assets of Perhutani four-wheeled motorized vehicles - Discussion and review of MR policies in Perhutani's 2023 RKAP
2	2 Februari 2023	- Pembahasan pengelolaan teknologi informasi di Perhutani - Usul penghapusbukuan bangunan industri kayu brumbung - Hilirisasi industri kayu	- Discussion of information technology management in forestry - Proposed write-off of barn timber industry buildings - Downstreaming of the wood industry
3	23 Maret 2023	- Pembahasan asal usul penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap kendaraan bermotor roda empat pefi, bahan paparan direkom tentang optimalisasi industri kayu - Progress proyek strategis <i>new factory</i> dan komersialisasi produk biomassa s.d bulan Maret 2023 - Pembahasan <i>progress</i> proyek strategis <i>empowering perhutani subsidiaries</i> s.d bulan Maret 2023	- Discussion on the origins of the write-off and transfer of fixed assets of PEFI four-wheeled motorized vehicles, recommended presentation material on optimizing the wood industry - Progress of the new factory strategic project and commercialization of biomass products until March 2023 - Discussion of the progress of the strategic project empowering Perhutani subsidiaries until March 2023
4	3 April 2023	- Pembahasan kajian atas usulan penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap tanah dan bangunan KPH Ngawi dan KPH Padangan - Kajian <i>progress new factory</i> dan komersialisasi produk biomassa s.d bulan Maret 2023 - Pembahasan tentang pemberlakuan peraturan Menteri BUMN nomor 01, 02, dan 03 tahun 2023	- The study Discussion of the proposed write-off and transfer of land and building fixed assets of KPH Ngawi and KPH Padangan - Review of the progress of the new factory and commercialization of biomass products until March 2023 - Discussion on the implementation of Minister of BUMN regulations number 01, 02 and 03 of 2023
5	17 Mei 2023	- Pembahasan <i>progress</i> proyek startegis agro tebu mandiri s.d bulan April 2023 - Revitalisasi hilir industri kayu s.d bulan Mei 2023 - Kajian perubahan piagam Dewas dan piagam Komite Pemantau Risiko	- Discussion of the progress of the Mandiri sugar cane agro strategic project until April 2023 - Revitalization of downstream wood industry until May 2023 - Review of changes to the Dewas charter and the Risk Monitoring Committee charter
6	21 Juni 2023	- Pembahasan progress implementasi SMART KPH s.d bulan Mei 2023 - Pembahasan draft akhir perubahan piagam Komite Pemantau Risiko	- Discussion of the progress of SMART KPH implementation until May 2023 - Discussion of the final draft of changes to the Risk Monitoring Committee charter
7	22 Juni 2023	- Pembahasan persiapan evaluasi Komite Pemantau Risiko atas penerapan manajemen risiko di Perhutani - Pembahasan program sertifikasi <i>qualified risk governance professional</i> QRG	- Discussion of preparations for the Risk Monitoring Committee's evaluation of the implementation of risk management at Perhutani - Discussion of the QRG qualified risk governance professional certification program

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal Date	Agenda	
8	21 Juli 2023	Pemenuhan data dalam rangka evaluasi atas penerapan manajemen risiko, system pengendalian internal sebagai dimaksud dalam per 02/2023 pasal 69 ayat 2	Fulfillment of data in the context of evaluating the implementation of risk management and internal control systems as intended in 02/2023 article 69 paragraph 2
9	25 Juli 2023	- Progress program strategis perusahaan pembangunan pabrik biomass s.d bulan Juni 2023 - Pemohonan <i>debt to equity swap</i> DTES - Pembahasan tentang permohonan persetujuan penggunaan asset	- Progress of the company's strategic program for building a biomass factory until June 2023 - DTES debt to equity swap application - Discussion regarding the application for approval for asset use
10	4 Agustus 2023	Pembahasan permohonan persetujuan mengagunkan asset tetap	Discussion of the application for approval to mortgage fixed assets as collateral
11	7 Agustus 2023	- Usul penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap tanah di KPH cepu, KPH gundih dan KPH randublatung - Persetujuan mengagunkan aktiva tetap - Permasalahan dalam permohonan persetujuan <i>debt to equity swap</i> DTES	- Proposed write-off and transfer of land fixed assets in KPH Cepu, KPH Gundih and KPH Randublatung - Approval of collateralizing fixed assets - Problems in the DTES debt to equity swap approval application
12	18 Agustus 2023	Pembahasan permohonan persetujuan penanganan piutang Perhutani kepada Anak perusahaan PT inhutani V dalam bentuk <i>debt to equity swap</i>	Discussion of the application for approval to handle Perhutani's receivables from the subsidiary PT Inhutani V in the form of a debt to equity swap
13	29 Agustus 2023	- Progress transformasi perusahaan pembangunan smart KPH s.d bulan Agustus 2023 - Lanjutan persetujuan <i>debt to equity swap</i> (DTES) - Pemohonan perpanjangan perjanjian Kerjasama agro tebu p.81 dengan PTPN IX	- Progress of the transformation of the smart KPH development company until August 2023 - Continued debt to equity swap (DTES) approval - Application for extension of sugar cane agro cooperation agreement p.81 with PTPN IX
14	12 September 2023	- Pemohonan persetujuan KKPP kemitra kehutan Perhutani produktif - Rencana kerjasama pengembangan wana wisata menoreh view dengan otoritas badan pelaksana otorita Borobudur - Persetujuan renkersama pengembangan wisata tangkal pinus CV Suvi Nusantara	- Request for KKPP approval from productive forestry partners - Plans for cooperation in developing Menoreh View tourist attractions with the Borobudur authority implementing agency - Approval of the cooperation agreement for the development of CV Suvi Nusantara pine forest tourism
15	2 Oktober 2023	Pembahasan rencana kerjasama penyelenggaraan SPBU beserta fasilitas pendukung lainnya dengan PT Pertamina Retail pada ruas tol ngawi kertosono KM 626 jalur A dan B KPH Saradan	Discussion of plans for cooperation in providing gas stations and other supporting facilities with PT Pertamina Retail on the Ngawi Kertosono toll road KM 626 routes A and B KPH Saradan
16	16 Oktober 2023	- Pembahasan tentang rencana kerjasama wisata PT Nanibar Kapital Nusantara (PT NKN) di KPH Purwakarta - Pembahasan <i>progress</i> revitalisasi industri kayu s.d bulan Oktober 2023 - Draft SK kategori klasifikasi Perhutani	- Discussion about PT Nanibar Kapital Nusantara (PT NKN) tourism cooperation plans at KPH Purwakarta - Discussion of the progress of the revitalization of the wood industry until October 2023 - Draft SK for forestry classification categories

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal Date	Agenda	
17	14 November 2023	- Rencana kerja sama aksi mitigasi perubahan iklim dengan PT United Tractors tbk - Pembangunan pabrik biomassa s.d bulan Oktober 2023 - Sosialisasi petunjuk teknis pelaporan manajemen risiko dan usulan penandatanganan dokumen GCG	- Collaboration plan for climate change mitigation action with PT United Tractors tbk - Construction of a biomass factory until October 2023 - Socialization of technical instructions for risk management reporting and proposals for signing GCG documents
18	12 Desember 2023	pembahasan permohonan aktiva tetap dengan Komite Pemantau Risiko	Discussion of fixed asset applications with the Risk Monitoring Committee
19	14 Desember 2023	- Pembahasan rencana kerja bersama pengembangan tanaman <i>agroforestry</i> tebu dengan Inhutani V - Pembahasan progress strategis perusahaan - Pengembangan <i>agroforestry</i> tebu Kelola mandiri s.d bulan November 2023 - Pembahasan persetujuan mengagunkan aktiva tetap perpanjangan kredit modal kerja <i>refinancing</i> kredit invest	- Discussion of joint work plans for developing sugar cane <i>agroforestry</i> plants with Inhutani V - Discussion of the company's strategic progress - Development of sugarcane <i>agroforestry</i> Manage independently until November 2023 - Discussion on approval to collateralize fixed assets, extension of working capital credit, refinancing of investment credit

Program Pelatihan Komite Pemantau Risiko

Keberhasilan organisasi dalam mengelola risiko serta mengembangkan usaha sangat tergantung pada kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh Komite Pemantau Risiko. Oleh karena itu, program pelatihan dan pengembangan yang tepat dan berkesinambungan sangat diperlukan. Dengan mengikuti berbagai pelatihan, anggota komite dapat memperoleh wawasan baru, strategi terkini, dan *best practices* dalam bidang manajemen risiko dan pengembangan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas mereka untuk memberikan saran dan pengawasan yang lebih efektif.

Pada tahun 2023, Komite Pemantau Risiko Perhutani tidak mengikuti program pengembangan atau pelatihan. Ketiadaan program pelatihan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meninjau kembali dan merancang program pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk tahun-tahun berikutnya.

Risk Monitoring Committee Training Program

The success of an organization in managing risk and developing its business is highly dependent on the capabilities and competencies of the Risk Monitoring Committee. Therefore, an appropriate and continuous training and development program is essential. By participating in various trainings, committee members can gain new insights, the latest strategies, and best practices in the field of risk management and business development, which in turn will increase their capacity to provide more effective advice and supervision.

In 2023, the Perhutani Risk Monitoring Committee did not participate in any development or training programs. The absence of this training program indicates the need to review and design a more structured and sustainable training program for the following years.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan Perhutani berperan sebagai penghubung (*Liaison Officer*) antara perusahaan dan pihak-pihak berkepentingan, serta menjaga nama baik perusahaan melalui pengelolaan citra korporat. Sekretaris Perusahaan ini berada langsung di bawah Direktur Utama dan memiliki berbagai tugas dan kewajiban yang esensial dalam mendukung operasional dan komunikasi perusahaan.

Terkait dengan pemilik modal, Dewan Pengawas, dan Direksi, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk menyusun jadwal dan tahapan kegiatan menjelang rapat, mengikuti rapat-rapat Direksi serta rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Pengawas, serta membuat risalah rapat. Selain itu, Sekretaris Perusahaan mengoordinir pelaksanaan tindak lanjut dari hasil rapat, keputusan, dan arahan Direksi, gabungan Direksi dan Dewan Pengawas, serta pemilik modal. Tugas protokol, kesekretariatan, dan kerumahtanggaan Direksi juga menjadi bagian dari tanggung jawabnya, termasuk pengelolaan dokumen perusahaan dan pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.

Dalam kaitannya dengan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, Sekretaris Perusahaan memastikan bahwa perusahaan memenuhi semua aturan hukum yang berlaku. Sekretaris Perusahaan melakukan kajian atas perubahan dan perkembangan peraturan perundangan yang terkait dengan bidang usaha perusahaan, menyeleksi informasi-informasi relevan untuk dipublikasikan, serta mengoordinasikan dan memastikan proses penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*) di lingkungan perusahaan.

Sekretaris Perusahaan juga berperan penting dalam mengumumkan kebijakan dan produk hukum internal perusahaan serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan kepada Kantor Satuan Kerja. Selain itu, Sekretaris Perusahaan melancarkan informasi dan komunikasi antara Direksi dan manajemen di bawah Direksi.

The Perhutani Corporate Secretary acts as a liaison officer between the company and stakeholders, and maintains the company's good name through corporate image management. The Corporate Secretary is directly under the President Director and has various essential duties and obligations in supporting the company's operations and communications.

In relation to capital owners, the Supervisory Board, and the Board of Directors, the Corporate Secretary is responsible for preparing the schedule and stages of activities leading up to the meeting, attending Board of Directors meetings and joint meetings between the Board of Directors and the Supervisory Board, and making minutes of the meeting. In addition, the Corporate Secretary coordinates the implementation of follow-up actions from the results of meetings, decisions, and directives of the Board of Directors, the joint Board of Directors and the Supervisory Board, and capital owners. The protocol, secretarial, and household duties of the Board of Directors are also part of his/her responsibilities, including managing company documents and reporting on the implementation of his/her duties to the Board of Directors.

In relation to the company's compliance with laws and regulations, the Corporate Secretary ensures that the company complies with all applicable legal rules. The Corporate Secretary conducts a review of changes and developments in laws and regulations related to the company's business field, selects relevant information for publication, and coordinates and ensures the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the company environment.

The Corporate Secretary also plays an important role in announcing the company's internal policies and legal products as well as laws and regulations related to the company's business activities to the Work Unit Office. In addition, the Corporate Secretary facilitates information and communication between the Board of Directors and management under the Board of Directors.

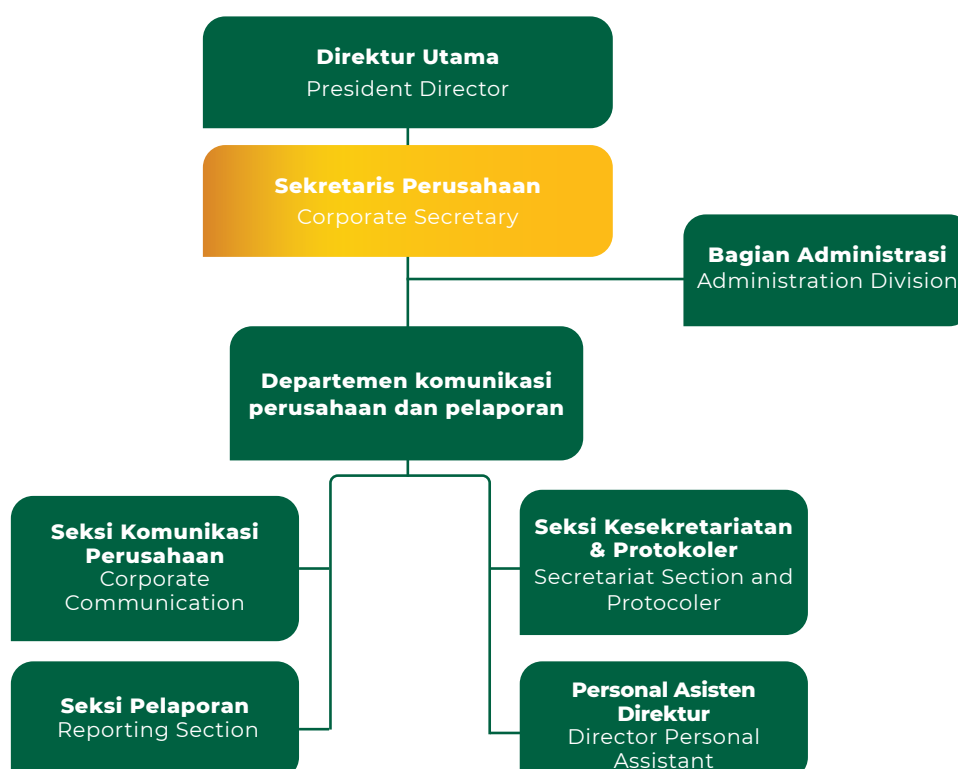
Terkait dengan *stakeholders* lainnya, Sekretaris Perusahaan bertugas untuk memberikan informasi yang material dan relevan kepada *stakeholders* serta mengorganisasikan dan melakukan koordinasi kegiatan perusahaan dengan *stakeholders*. Peran ini sangat krusial dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan hubungan baik antara Perhutani dan semua pihak yang berkepentingan.

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan

Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Perusahaan telah memiliki pedoman kerja yang dituangkan dalam *Board Manual* dan Surat Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Pedoman tersebut mencakup tugas pokok organisasi Sekretariat Perusahaan, uraian tugas Sekretaris Perusahaan, dan Pedoman Komunikasi Perusahaan serta hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi Sekretaris Perusahaan. Dengan adanya Pedoman Kerja ini, diharapkan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan akan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan.

Struktur Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan struktur sebagai berikut:



In relation to other stakeholders, the Corporate Secretary is tasked with providing material and relevant information to stakeholders and organizing and coordinating company activities with stakeholders. This role is crucial in maintaining transparency, accountability, and good relations between Perhutani and all interested parties.

Corporate Secretary Work Guidelines

In carrying out its functions, the Corporate Secretary has work guidelines that are stated in the Board Manual and the Letter of Appointment of the Corporate Secretary. The guidelines cover the main tasks of the Corporate Secretariat organization, the job description of the Corporate Secretary, and the Corporate Communication Guidelines as well as other matters relating to the implementation of the Corporate Secretary's functional duties. With this Work Guideline, it is expected that the implementation of the Corporate Secretary's duties will be more focused and effective and can be used as one of the tools for assessing the performance of the Corporate Secretary.

Corporate Secretary Structure

The Corporate Secretary is directly responsible to the President Director with the following structure:

Profil Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Profile



Tedy Sumarto

Sekretaris Perusahaan
(1 Januari 2023 - 2 November 2023)
Corporate Secretary
(January 1, 2023 - November 2, 2023)

Warga negara Indonesia, Menjabat sebagai sekretaris Perusahaan sejak 8 Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.1043/KPTS/DIR/2022. Menjabat sampai dengan 3 November 2023.

Lahir di Tasikmalaya, 13 Maret 1983 (40 tahun). Menamatkan Pendidikan Sarjana di Institut Pertanian Bogor dibidang Teknololgi Hasil Hutan pada tahun 2005 dan Pasca Sarjana dibidang Sumber Daya Manusia di Universitas Diponegoro (2019).

Sebelum diangkat menjadi Sekretaris Perusahaan pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Komersial Hutan Kayu dan Biomassa (2022), Kepala Divisi Pengelolaan Perhutanan Sosial (2022), Kepala Departemen Komersial Kayu (2022), Kepala Departemen Pemasaran Kayu Log dan Hasil Industri Kayu (2021), Kepala Departemen E-Commerce, CRM Dan Penjualan Hasil Industri Kayu Dan Industri Non Kayu (2021).

Indonesian citizen, Served as Corporate Secretary since December 8, 2022 based on Board of Directors Decree No.1043/KPTS/DIR/2022. Menjabat sampai dengan 3 November 2023.

Born in Tasikmalaya, March 13 1983 (40 years old). Completed undergraduate education at Bogor Agricultural Institute in the field of Forest Products Technology in 2005 and postgraduate education in Human Resources at Diponegoro University (2019).

Before being appointed as Corporate Secretary, he served as Head of the Commercial Division of Timber and Biomass Forestry (2022), Head of the Social Forestry Management Division (2022), Head of the Commercial Timber Department (2022), Head of the Log Timber Marketing Department and Timber Industry Products (2021), Head of the E-Commerce, CRM and Sales Department of Timber and Non-Timber Industry Products (2021).



Anton Fadjar Agung Susetyo

Plt. Sekretaris Perusahaan (03 November 2023 - 31 Desember 2023)
Act. Corporate Secretary (November 3, 2023 - December 31, 2023)

Warga negara Indonesia, Lahir di Purworejo pada tanggal 11 September 1970 (53 tahun).

Menjabat sebagai Plt. Sekretaris Perusahaan sejak 3 November 2023.

Menamatkan Pendidikan Sarjana Kehutanan di Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 1995 dan Magister Agribisnis di Universitas Diponegoro (2015).

Sebelum diangkat menjadi Plt Sekretaris Perusahaan, menjabat sebagai Kepala Divisi SDM (2023), Kepala Departemen Pengembangan Perhutanan Sosial (2023), Kepala Departemen Perencanaan dan Pengembangan SDM (2021-2023).

Indonesian citizen, Born in Purworejo on September 11, 1970 (53 years old).

Served as Act. Corporate Secretary since November 3, 2023.

Completed his Bachelor of Forestry education at Gajah Mada University Yogyakarta in 1995 and Masters in Agribusiness at Diponegoro University (2015).

Before being appointed Acting Corporate Secretary, he served as Head of HR Division (2023), Head of the Social Forestry Development Department (2023), Head of the Human Resource Planning and Development (2021-2023).

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Secara umum tugas Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Mengarahkan dan mengendalikan menyusun arah kebijakan dan strategi serta tujuan dan sasaran Sekretariat Perusahaan meliputi komunikasi perusahaan, kesekretariatan, prokoler perusahaan, pelaporan perusahaan dan TJSL.
- Mengkomunikasikan kegiatan perusahaan secara akurat dan tepat waktu dan menjadi pejabat penghubung baik antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan maupun didalam internal perusahaan.
- Mengarahkan dan mengendalikan penyusunan agenda pelaksanaan Rapat Pembahasan Bersama (RPB), Rapat Evaluasi Kinerja Direksi, Rapat Gabungan dengan Dewan Pengawas dan kegiatan perusahaan lainnya yang melibatkan jajaran Direksi (tidak hanya Direktur Utama).
- Mempersiapkan dan mengkomunikasikan pelaksanaan Rapat Pembahasan Bersama (RPB), Rapat Kinerja Direksi, Rapat Gabungan dengan Dewan Pengawas, dan rapat lainnya yang melibatkan Direksi dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, internal maupun eksternal.
- Menginformasikan hasil rapat RPB, Rapat Direksi dengan Dewan Pengawas dan Rapat Direksi kepada pengampu proses.
- Mengarahkan dan mengendalikan penyusunan laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban Pengurusan Perusahaan dan dokumen keuangan sesuai dengan

Duties and Responsibilities of a Corporate Secretary

In general, the duties of a Corporate Secretary are as follows:

- Directing and controlling the formulation of policy and strategy directions as well as the goals and objectives of the Corporate Secretariat including corporate communication, secretariat, corporate protocol, corporate reporting and TJSL.
- Communicating corporate activities accurately and timely and becoming a liaison officer both between the company and all stakeholders and within the company.
- Directing and controlling the preparation of the agenda for the implementation of the Joint Discussion Meeting (RPB), the Board of Directors Performance Evaluation Meeting, the Joint Meeting with the Supervisory Board and other company activities involving the Board of Directors (not only the President Director).
- Preparing and communicating the implementation of the Joint Discussion Meeting (RPB), the Board of Directors Performance Meeting, the Joint Meeting with the Supervisory Board, and other meetings involving the Board of Directors by coordinating with related parties, both internal and external.
- Informing the results of the RPB meeting, the Board of Directors Meeting with the Supervisory Board and the Board of Directors Meeting to the process manager.
- Directing and controlling the preparation of the annual report as a form of accountability for the Company's Management and financial

- Undang-undang tentang dokumen Perusahaan.
- Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Pengawas dan/atau Menteri.
 - Mengelola arsip dokumen, perpustakaan, data informasi perusahaan dan literatur korporat perusahaan
 - Mengelola citra positif dan identitas perusahaan kepada publik eksternal dengan menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat melalui media massa dan akitivitas eksternal lainnya.
 - Melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung aktivitas Direksi termasuk korespondensi, protokoler dan logistik Direksi.
 - Bertindak sebagai corong korporat dalam memberikan informasi dan memberikan jawaban kepada publik atas pertanyaan maupun permasalahan yang dihadapi perusahaan (sampai dengan tingkat holding).
 - Menyusun rencana CSR dan mengelola pelaksanaan CSR tersebut.
 - Mengkoordinir dan mengendalikan penyusunan pedoman, prosedur dan standar bidang komunikasi perusahaan, pelaporan, TJSL dan protokoler.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk bidang kesekretariatan secara berkala dan membuat laporannya.
 - Menganalisis realisasi target RJPP dan RKAP serta menindaklanjuti hasil monitoring terkait RJPP dan RKAP.
 - Memastikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 pada Satuan Unit Kerjanya.
 - Melakukan penilaian kinerja terhadap bawahannya.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2023

Uraian Laporan pelaksanaan tugas *Corporate Secretary* pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan dan Dokumentasi Rapat Internal Direksi dan Rapat Gabungan Direksi Bersama Dewan Pengawas. Selama tahun 2023, Direksi telah mengadakan rapat internal Direksi sebanyak 49 kali rapat dan 16 kali rapat gabungan bersama Dewan Pengawas. Adapun rincian penyelenggaraan Rapat Direksi dan rincian Rapat bersama Direksi dan Dewan Pengawas telah diuraikan pada subbab Direksi dan Dewan Pengawas Laporan tahunan ini.

documents in accordance with the Law on Company Documents.

- Provide periodic reports in accordance with the applicable provisions and time, as well as other reports whenever requested by the Supervisory Board and/or the Minister.
- Manage document archives, libraries, company information data and corporate literature
- Manage the positive image and identity of the company to the external public by organizing public relations activities through mass media and other external activities.
- Carry out various activities to support the activities of the Board of Directors including correspondence, protocol and logistics of the Board of Directors.
- Act as a corporate spokesperson in providing information and providing answers to the public regarding questions or problems faced by the company (up to the holding level).
- Prepare CSR plans and manage the implementation of CSR.
- Coordinate and control the preparation of guidelines, procedures and standards for corporate communication, reporting, TJSL and protocol.
- Monitor and evaluate the implementation of the annual work plan and budget for the secretariat sector periodically and make reports.
- Analyze the realization of RJPP and RKAP targets and follow up on monitoring results related to RJPP and RKAP.
- Ensure the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System in its Work Units.
- Conduct performance assessments of its subordinates.

Implementation of Corporate Secretary Duties in 2023

Description of the Corporate Secretary's task implementation report in 2023 is as follows

- Implementation and Documentation of Internal Board of Directors Meetings and Joint Board of Directors Meetings with the Board of Commissioners. During 2023, the Board of Directors held 49 internal Board of Directors meetings and 16 joint meetings with the Board of Commissioners. The details of the implementation of Board of Directors Meetings and details of Joint Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners have

- Penyampaian laporan berkala. Sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan telah menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala setiap tahunnya kepada Direksi, Dewan Pengawas dan Pemilik Modal dengan uraian sebagai berikut:

Penyampaian laporan berkala

Submission of periodic reports

Laporan Reports		Penerima Recipients	
Laporan Triwulanan I tahun 2023	Quarterly Report I of 2022	Pemilik Modal	Capital Owners
Laporan Triwulanan II tahun 2023	Quarterly Report II of 2022	Pemilik Modal	Capital Owners
Laporan Triwulanan III tahun 2023	Quarterly Report III of 2022	Pemilik Modal	Capital Owners
Laporan Triwulanan IV tahun 2022	Quarterly Report IV of 2022	Pemilik Modal	Capital Owners
Laporan Manajemen Tahunan	Annual Management Report	Pemilik Modal	Capital Owners
Laporan Tahunan tahun buku 2022 (dipublikasi)	Annual Report for the fiscal year 2022 (published)	Pemilik Modal dan Publik	Capital Owners and the Public

- Melaksanakan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal. Optimalisasi hubungan dua arah dengan stakeholder internal dan eksternal melalui optimalisasi saluran komunikasi internal dan eksternal melalui berbagai media.

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Selama kurun waktu periode pelaporan, Perusahaan belum menyertakan Sekretaris Perusahaan pada program dan kegiatan, yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi.

been described in the Sub-chapter of Directors and Supervisory Board of this Annual Report.

- Submission of periodic reports. As accountability for the implementation of his duties, the Corporate Secretary has prepared and submitted a Periodic Report every year to the Board of Directors, Board of Commissioners and Capital Owners with the following description:

- Implementing communication with internal and external parties. Optimizing two-way relationships with internal and external stakeholders through optimizing internal and external communication channels through various media.

Corporate Secretary Competency Improvement Program

During the reporting period, the Company has not included the Corporate Secretary in programs and activities aimed at improving competence.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Competency Development

Program Pelatihan/Pengembangan Training/Development Program	Peserta Participants	Waktu Date
Pelatihan Pengisian CTP, RBR, KPI CTP, RBR, KPI Completion Training	31 Orang	10 Oktober 2023

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Competency Development

Nama Name	Judul Pelatihan Training Title		Waktu Time
Yuswan Hendrawan	Pemahaman Budaya Sadar Risiko	Understanding Risk Awareness Culture	25 Oktober 2023
	Pelatihan WBS dan Pengendalian Gratifikasi	WBS Training and Gratification Control	15 Juni 2023
	Pelatihan Cyber Security Awareness	Cyber Security Awareness Training	24 Juli 2023
Andre Lesmana	Pemahaman Budaya Sadar Risiko	Understanding Risk Awareness Culture	25 Oktober 2023
	Pelatihan WBS dan Pengendalian Gratifikasi	WBS Training and Gratification Control	15 Juni 2023
	Pelatihan Cyber Security Awareness	Cyber Security Awareness Training	24 Juli 2023
Prayogi Saputro	Pemahaman Budaya Sadar Risiko	Understanding Risk Awareness Culture	25 Oktober 2023
	Pelatihan Tanggap Darurat dan Kebakaran Gedung	Emergency Response and Building Fire Training	14-15 Maret 2023
	Pelatihan WBS dan Pengendalian Gratifikasi	WBS Training and Gratification Control	15 Juni 2023
	Pelatihan Cyber Security Awareness	Cyber Security Awareness Training	24 Juli 2023
	Pelatihan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung	Protected Forest Area Management Training	13 September 2023
Rizka Amalia	Pemahaman Budaya Sadar Risiko	Understanding Risk Awareness Culture	25 Oktober 2023
	Pelatihan WBS dan Pengendalian Gratifikasi	WBS Training and Gratification Control	15 Juni 2023
	Pelatihan Cyber Security Awareness	Cyber Security Awareness Training	24 Juli 2023
Nararya Gunadharma	Pemahaman Budaya Sadar Risiko	Understanding Risk Awareness Culture	25 Oktober 2023
	Pelatihan WBS dan Pengendalian Gratifikasi	WBS Training and Gratification Control	15 Juni 2023
	Pelatihan Cyber Security Awareness	Cyber Security Awareness Training	24 Juli 2023
Ardya Setya Nurvrandita	Pemahaman Budaya Sadar Risiko	Understanding Risk Awareness Culture	25 Oktober 2023
	Pelatihan WBS dan Pengendalian Gratifikasi	WBS Training and Gratification Control	15 Juni 2023
	Pelatihan Cyber Security Awareness	Cyber Security Awareness Training	24 Juli 2023
Aga Prasetya	Pemahaman Budaya Sadar Risiko	Understanding Risk Awareness Culture	25 Oktober 2023
	Pelatihan WBS dan Pengendalian Gratifikasi	WBS Training and Gratification Control	15 Juni 2023
	Pelatihan Cyber Security Awareness	Cyber Security Awareness Training	24 Juli 2023
Nanjar Munandar	Pemahaman Budaya Sadar Risiko	Understanding Risk Awareness Culture	25 Oktober 2023
	Pelatihan Tanggap Darurat dan Kebakaran Gedung	Emergency Response and Building Fire Training	14-15 Maret 2023
	Pelatihan WBS dan Pengendalian Gratifikasi	WBS Training and Gratification Control	15 Juni 2023
	Pelatihan Cyber Security Awareness	Cyber Security Awareness Training	24 Juli 2023

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Competency Development

Nama Name	Judul Pelatihan Training Title		Waktu Time
Natalia Dian Permatasari	BUMN Voice Over Talent	BUMN Voice Over Talent	7 Desember 2023
	BUMN Communications Week 2023	BUMN Communications Week 2023	5-6 Mei 2023
	Ranger Class Danareksa	Danareksa Ranger Class	1-3 Juni 2023
	Pemahaman Budaya Sadar Risiko	Understanding Risk Awareness Culture	25 Oktober 2023
	Pelatihan WBS dan Pengendalian Gratifikasi	WBS Training and Gratification Control	15 Juni 2023
	Pelatihan Cyber Security Awareness	Cyber Security Awareness Training	24 Juli 2023
Finsa Firmansyah	Pelatihan Pengoprasian dan Pemeliharaan Alat Mekanisasi Produksi Kayu	Training on Operation and Maintenance of Wood Production Mechanization Equipment	1-2 Maret 2023
	Pemahaman Budaya Sadar Risiko	Understanding Risk Awareness Culture	25 Oktober 2023
	Pelatihan WBS dan Pengendalian Gratifikasi	WBS Training and Gratification Control	15 Juni 2023
	Pelatihan Cyber Security Awareness	Cyber Security Awareness Training	24 Juli 2023
Mutia Anggraini N	Pemahaman Budaya Sadar Risiko	Understanding Risk Awareness Culture	25 Oktober 2023
	Pelatihan WBS dan Pengendalian Gratifikasi	WBS Training and Gratification Control	15 Juni 2023
	Pelatihan Cyber Security Awareness	Cyber Security Awareness Training	24 Juli 2023
	Pelatihan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung	Protected Forest Area Management Training	13 September 2023

Evaluasi Kinerja Corporate Secretary

Berdasarkan realisasi kinerja Sekretaris Perusahaan, capaian Key Performance Indicator (KPI) Sekretaris Perusahaan pada tahun 2023 adalah sebesar 100%.

Corporate Secretary Performance Evaluation

Based on the realization of the Corporate Secretary's performance, the achievement of the Corporate Secretary's Key Performance Indicator (KPI) in 2023 was 100%.

Satuan Pengawasan Intern

Internal Audit Unit

Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perhutani berperan krusial dalam memastikan tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, serta akuntabilitas operasional. SPI bertugas untuk memberikan jaminan dan konsultasi independen yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi Perhutani.

Untuk menjalankan fungsinya, SPI mengadopsi pendekatan yang sistematis dan terdisiplin dalam mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol, dan proses tata kelola. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek operasional, mulai dari keuangan, kepatuhan, hingga operasional Perusahaan.

Komitmen SPI Perhutani adalah mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, dengan memastikan bahwa semua aktivitas dilaksanakan dengan integritas dan dalam kerangka tata kelola yang baik. Melalui pengawasan dan pembinaan yang ketat, SPI berkontribusi dalam mewujudkan Perhutani yang lebih transparan, akuntabel, dan berdaya saing tinggi.

Struktur dan Kedudukan Unit Internal Audit (SPI)

Guna menjaga objektivitas dan independensi peran SPI, satuan ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Proses pengangkatan dan pemberhentian Kepala SPI dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengawas melalui Komite Audit, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani SK No.: 007/KPTS/DIR/2018 Pasal 8. Hal ini memastikan bahwa SPI dapat beroperasi tanpa tekanan eksternal dan dapat memberikan penilaian yang jujur dan objektif mengenai operasional perusahaan.

Dalam setiap penugasannya, SPI melaporkan hasil kegiatannya langsung kepada Direktur Utama. Ini termasuk melaksanakan audit secara berkala terhadap seluruh unit dan departemen untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi perusahaan, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Perhutani's Internal Audit Unit (SPI) plays a crucial role in ensuring good corporate governance, transparency, and operational accountability. SPI is tasked with providing independent assurance and consultation designed to add value and improve Perhutani's operations.

To carry out its functions, SPI adopts a systematic and disciplined approach in evaluating and improving the effectiveness of risk management, control, and governance processes. This supervision covers various operational aspects, from finance, compliance, to the Company's operations.

SPI Perhutani's commitment is to support the company in achieving its goals effectively and efficiently, by ensuring that all activities are carried out with integrity and within a good governance framework. Through strict supervision and guidance, SPI contributes to realizing a more transparent, accountable, and highly competitive Perhutani.

Structure and Position of Internal Audit Unit (SPI)

In order to maintain the objectivity and independence of the SPI's role, this unit is directly responsible to the President Director. The process of appointing and dismissing the Head of SPI is carried out based on recommendations from the Supervisory Board through the Audit Committee, as stipulated in the Decree of the Board of Directors of Perum Perhutani SK No.: 007/KPTS/DIR/2018 Article 8. This ensures that SPI can operate without external pressure and can provide honest and objective assessments of the company's operations.

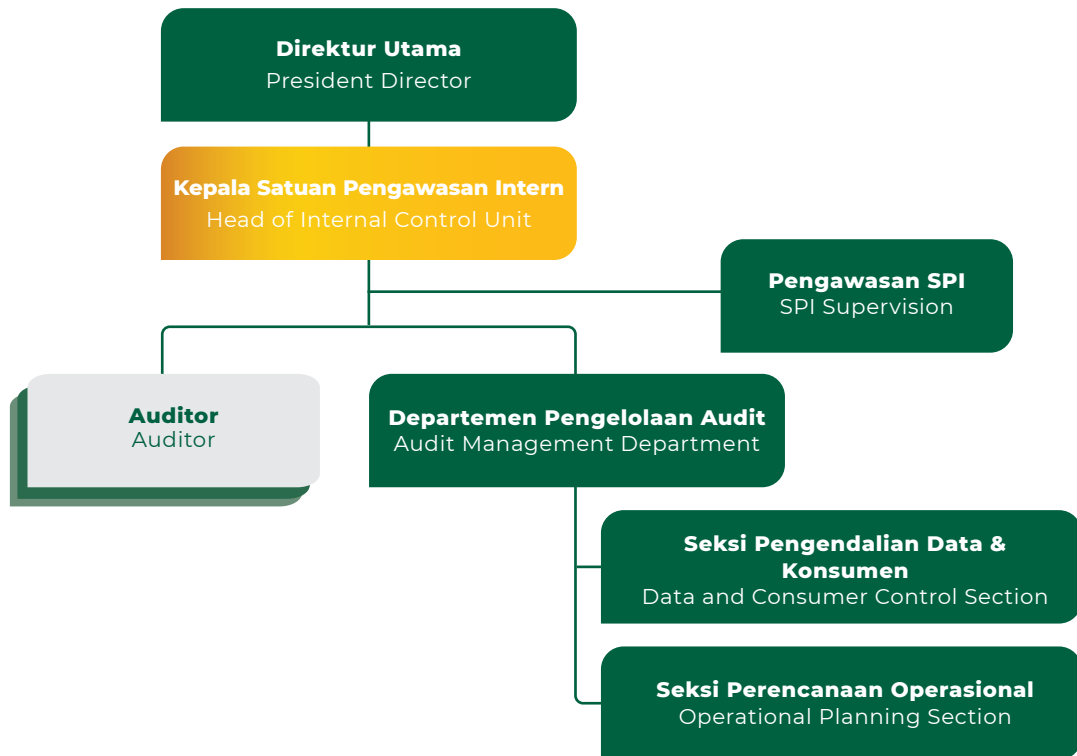
In each of its assignments, SPI reports the results of its activities directly to the President Director. This includes conducting periodic audits of all units and departments to ensure compliance with company procedures and regulations, as well as identifying areas that require improvement.

Kedudukan dan Struktur Organisasi SPI adalah sebagai berikut:

The position and organizational structure of SPI are as follows:

Kedudukan dan Struktur Organisasi Pengawasan Intern (SPI)

The position and organizational structure of SPI



Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern

Kepala Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan dinamika dan kebutuhan perusahaan. Pengangkatan dan pemberhentian Satuan Pengawasan Intern mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Party Appointing and Dismissing the Head of Internal Control Unit

The Head of Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the Board of Directors in accordance with the dynamics and needs of the company. The appointment and dismissal of the Internal Audit Unit is approved by the Supervisory Board.

Profil Kepala SPI

The Head of SPI Profile



Ema Ismariana

Kepala SPI (Januari 2023 – 4 September 2023)
Head of SPI (January 2023 – September 4, 2023)

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang 14 Desember 1968 (54 tahun). Menjabat sebagai Kepala SPI sejak 7 Juni 2022 sampai dengan 4 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No.281/KPTS/DIR/ 2022. Menamatkan Pendidikan sarjana di bidang Teknologi Hasil Hutan dari Universitas Gajah Mada (1993), Magister Manajemen dari Universitas Diponegoro (2006).

Sebelum menjabat sebagai Kepala SPI pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Produksi (2022), Kepala Divisi Produksi Dan Industri (2022), Kepala Divisi Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis (2020-2021), Kepala Departemen Pengelolaan SDH, Produksi, Industri dan *Agroforestry* (2017-2020), Ketua Tim Sekretariat Kedaulatan Pangan (2015)

Indonesian citizen, born in Semarang on December 14, 1968 (54 years old). Served as Head of SPI since June 7, 2022 based on the Decree of the President Director No. 281/KPTS/DIR/2022. Graduated with a Bachelor's degree in Forest Product Technology from Gajah Mada University (1993), Master of Management from Diponegoro University (2006).

Before serving as Head of SPI, he served as Head of Production Division (2022), Head of Production and Industry Division (2022), Head of Business Planning and Development Division (2020-2021), Head of SDH Management Department, Production, Industry and Agroforestry (2017-2020), Head of Food Sovereignty Secretariat Team (2015)



Toni Kuspuja Hariyanto

Kepala SPI (4 September 2023-Sekarang)
Head of SPI (September 4, 2023-present)

Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon, 22 Februari 1976 (47 tahun). Menjabat sebagai Kepala SPI sejak 4 September 2023, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No.1295/KPTS/DIR/ 2023. Menamatkan Pendidikan sarjana di bidang Kehutanan dari Universitas Gajah Mada (1999).

Sebelum menjabat sebagai Kepala SPI pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi Regional (2023), Kepala Divisi Produksi (2022-2023), Kepala Divisi Produksi Dan Industri (2022), Kepala Departemen Departemen Perencanaan Pengembangan Bisnis (2021-2022).

Indonesian citizen, born in Cirebon, 22 February 1976 (47 years). Served as Head of SPI since 4 September 2023, based on Main Director Decree No.1295/KPTS/DIR/ 2023. Completed undergraduate education in Forestry from Gajah Mada University (1999).

Before serving as Head of SPI, he served as Deputy Head of Regional Division (2023), Head of Production Division (2022-2023), Head of Production and Industry Division (2022), Head of Business Development Planning Department (2021-2022).

Pedoman Kerja SPI

Dalam melaksanakan tugasnya, SPI berpedoman kepada Piagam Audit Internal, yaitu dokumen formal yang berisi pengakuan keberadaan dan komitmen atas berfungsinya suatu unit pengawasan internal di sebuah organisasi atau badan hukum. Piagam Audit Intern atau Internal Audit Charter berisi:

SPI Work Guidelines

In carrying out its duties, SPI is guided by the Internal Audit Charter, which is a formal document containing the recognition of the existence and commitment to the functioning of an internal audit unit in an organization or legal entity. The Internal Audit Charter contains:

- Pengesahan
- Pendahuluan
- Dasar Hukum
- Visi dan Misi
- Kedudukan
- Wewenang
- Ruang Lingkup Tugas
- Tanggung Jawab
- Kewajiban
- Kode Etik
- Penutup

- Approval
- Introduction
- Legal Basis
- Vision and Mission
- Position
- Authority
- Scope of Duties
- Responsibilities
- Obligations
- Code of Ethics
- Closing

Tugas, Kewenangan dan Ruang Lingkup Kegiatan SPI

SPI ikut berperan dan mendukung terwujudnya sasaran Perhutani melalui pendekatan sistematis dan obyektif. SPI juga melaksanakan evaluasi atas keefektifitas pengendalian internal, pengelolaan risiko, proses pelaksanaan operasional dengan memanfaatkan sumber daya serta memberikan masukan-masukan guna kepuasan pelanggan.

Adapun kewenangan SPI sebagai berikut:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang BUMN terkait dengan tugas dan fungsi SPI;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Pengawas dan Komite Audit;
- Melakukan penyelenggaraan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Pengawas dan Komite Audit;
- Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal;
- Mengalokasikan sumberdaya audit, menentukan focus ruang lingkup dan jadwal audit;
- Mengikuti rapat yang bersifat strategis; dan
- Mendapatkan saran dan pembinaan dari tenaga yang diperlukan.

Sumber Daya Manusia SPI

SPI harus didukung sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan audit. Piagam Internal Audit mengharuskan auditor memenuhi kualifikasi yakni Auditor bersertifikat *Qualified Internal Auditor (QIA)* atau setara, mengacu pada standar dari *The Institute of Internal Auditors (IIA)*.

Selain itu, auditor harus memenuhi standar perilaku yang diatur dalam Piagam Internal Audit, antara lain:

Duties, Authorities and Scope of SPI Activities

SPI plays a role and supports the realization of Perhutani's targets through a systematic and objective approach. SPI also carries out evaluations of the effectiveness of internal control, risk management, operational implementation processes by utilizing resources and providing input for customer satisfaction.

The SPI's authority is as follows:

- Access all relevant information about BUMN related to the duties and functions of SPI;
- Communicate directly with the Board of Directors, Supervisory Board and Audit Committee;
- Hold regular and incidental meetings with the Board of Directors, Supervisory Board and Audit Committee;
- Coordinate activities with external auditors;
- Allocate audit resources, determine the focus of the scope and audit schedule;
- Attend strategic meetings; and
- Receive advice and guidance from the necessary personnel.

SPI Human Resources

SPI must be supported by competent human resources (HR) to support the success of the audit implementation. The Internal Audit Charter requires auditors to meet the qualifications, namely Certified Auditors Qualified Internal Auditor (QIA) or equivalent, referring to the standards of The Institute of Internal Auditors (IIA).

In addition, auditors must meet the standards of conduct set out in the Internal Audit Charter, including:

- Auditor Internal harus menegakkan kode etik yang terdiri dari prinsip dan perilaku.
- Menghindari aktivitas yang merugikan dan/atau patut dicurigai dapat merugikan profesi auditor internal atau organisasi.
- Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun baik langsung maupun tidak langsung dari auditee, rekanan atau pihak yang tidak berkepentingan, untuk menjaga independensi dan objektivitas proses audit.
- Mematuhi standar profesional auditor internal dan kebijakan serta aturan organisasi
- Internal auditors must uphold a code of ethics consisting of principles and behaviors.
- Avoid activities that are detrimental and/or suspected of being detrimental to the internal auditor profession or the organization.
- Not accept gifts in any form and from anyone, either directly or indirectly, from auditees, partners or uninterested parties, to maintain the independence and objectivity of the audit process.
- Comply with the professional standards of internal auditors and the policies and rules of the organization

Jumlah Pegawai SPI

Perhutani terus berupaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia SPI untuk menunjang pelaksanaan fungsi audit internal dalam sistem pengendalian internal Perusahaan. Sampai dengan Desember 2023, jumlah Pegawai SPI adalah 25 orang, berikut rincian SDM SPI hingga 31 Desember 2023:

Jumlah Pegawai SPI

Number of SPI Employees

Jabatan Position		Jumlah Personil Number of Personnel
Kepala SPI	Head of SPI	1
Kepala Departemen Pengelola Audit	Head of Audit Management Department	0
Pengawas SPI	SPI Supervisor	1
Auditor Utama	Main Auditor	3
Auditor Madya/Kepala Seksi	Middle Auditor/Section Head	7
Auditor Muda	Junior Auditor	13
Jumlah	Total	25

Sertifikasi Profesional Auditor Internal

SPI telah didukung dengan kualitas auditor yang memadai dalam menunjang tugas dan tanggung jawabnya. Dari keseluruhan auditor SPI, sebanyak 4 (empat) orang auditor telah dikukuhkan sebagai Profesional Internal Auditor.

Number of SPI Employees

Perhutani continues to strive to meet the needs of SPI human resources to support the implementation of the internal audit function in the Company's internal control system. Until December 2023, the number of SPI employees is 25 people, the following are the details of SPI HR until December 31, 2023:

Internal Auditor Professional Certification

SPI has been supported by adequate auditor quality in supporting its duties and responsibilities. Of all SPI auditors, 4 (four) auditors have been confirmed as Professional Internal Auditors.

Sertifikasi Profesional Auditor Internal

Internal Auditor Professional Certification

Nama Name	Jabatan Position		Sertifikasi Certification
Toni Kuspuja Hariyanto	Kepala SPI	Head of SPI	Profesional Internal Auditor (PIA)
Yusep Sumantri	Auditor Madya	Madya Auditor	(Registrasi sertifikat PIA-1194)
Rahmat Subaidi	Auditor Madya	Madya Auditor	Associate Certified Competent Internal Auditor (ACCIA)
Danny Setiadhy	Auditor Madya	Madya Auditor	Associate Certified Competent Internal Auditor (ACCIA)

Program Peningkatan Kompetensi

Program peningkatan kompetensi dilakukan untuk lebih meningkatkan kompetensi Auditor Internal. Divisi SPI mengikutkan auditornya pada program pelatihan baik ekstern maupun intern, seminar, workshop serta mempersiapkan auditor-auditor untuk mengikuti program pelatihan berkelanjutan auditor internal.

Selama tahun 2023, terdapat berbagai pelatihan yang diikuti oleh Kepala Divisi Satuan Pengawasan dan staf diantaranya program pendidikan profesi, seminar, workshop di bidang audit serta sertifikasi profesi, yang secara rinci sesuai tabel berikut:

Competency Improvement Program

The competency improvement program is carried out to further improve the competence of Internal Auditors. The SPI Division includes its auditors in both external and internal training programs, seminars, workshops and prepares auditors to participate in continuous internal auditor training programs.

During 2023, there were various trainings attended by the Head of the Supervisory Unit Division and staff including professional education programs, seminars, workshops in the field of auditing and professional certification, which are detailed in the following table:

Program Peningkatan Kompetensi

Competency Improvement Program

No.	Jenis Pelatihan dan Sertifikasi Type of Training and Certification	
1	Diklat Dasar - Dasar Audit	Basic Audit Training
2	Diklat Audit Operasional	Operational Audit Training
3	Diklat Audit Kecurangan	Fraud Audit Training
4	Diklat Komunikasi & Psikologi Audit	Audit Communication & Psychology Training
5	Diklat Pengelolaan tugas-tugas audit	Audit Task Management Training
6	Diklat Khusus Kepala SPI	Special Training for SPI Head
7	Diklat AMI ISO 9001:2015	AMI ISO 9001:2015 Training
8	Diklat SMAP ISO 37001:2016	SMAP ISO 37001:2016 Training
9	Diklat Security IT ISO 27001 : 2022	IT Security ISO 27001:2022 Training
10	Diklat Audit Investigative	Investigative Audit Training
11	Diklat Basic Finance Statement	Basic Finance Statement Training
10	Diklat Integritas Anti Korupsi	Anti-Corruption Integrity Training
11	Diklat Peningkatan Sistem Pengendalian Internal & Kepatuhan yang Efektif	Effective Internal Control & Compliance System Improvement Training
12	Seminar dan Workshop Internal Audit	Internal Audit Seminar and Workshop
13	Seminar dan Workshop Building the Internal Audit Dream Team	Building the Internal Audit Dream Team Seminar and Workshop

Program Peningkatan Kompetensi

Competency Improvement Program

No.	Jenis Pelatihan dan Sertifikasi Type of Training and Certification	
14	Seminar dan Workshop Objective Assurance and Consulting Activity	Objective Assurance and Consulting Activity Seminar and Workshop
15	Seminar dan Workshop Effective Fraud Investigation	Effective Fraud Investigation Seminar and Workshop
16	Sertifikasi Profesional Internal Auditor (PIA)	Internal Auditor Professional Certification (PIA)
17	Sertifikasi Associate Certified Competent Internal Auditor (ACCIA)	Associate Certified Competent Internal Auditor (ACCIA) Certification

Rapat SPI

Kebijakan

Kebijakan rapat Satuan Pengawasan Intern (SPI) diatur dalam Pedoman Kerja SPI, SPI melakukan Rapat dengan Komite Audit, Dewan Pengawas, dan Direksi yang merupakan instrumen penting dalam menjaga koordinasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat dalam pengawasan internal perusahaan. Dengan menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk frekuensi dan agenda rapat, mekanisme pelaporan, tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi, kerjasama dan komunikasi, serta evaluasi dan peninjauan kembali, kebijakan ini memastikan bahwa SPI, Komite Audit, Dewan Pengawas, dan Direksi dapat bekerja bersama-sama secara efektif dalam mendukung tata kelola yang baik dan mencapai tujuan perusahaan.

Frekuensi Rapat

Sepanjang tahun 2023, SPI menyelenggarakan 20 kali rapat dengan agenda dan tingkat kehadiran masing-masing anggota SPI sebagai berikut:

Frekuensi Rapat

Meeting Frequency

Tanggal Date	Agenda	Jumlah Peserta Participant
18-20 Januari 2023	Pembahasan Internal Audit Charter & PKPT 2023	15 Orang
14 Februari 2023	Pembahasan Temuan MDP Hasil Audit 2009-2022	16 Orang
13-14 Maret 2023	Pembinaan, Evaluasi Kinerja dan Sosialisasi IAC & PKPT 2023	45 Orang
20-21 Maret 2023	Pembahasan Audit Investigative	10 Orang
4 April 2023	Quality Assurance Review SPI	7 Orang
29 Mei 2023	Review Hasil Riktin Produksi Getah Pinus	40 Orang
7 Juni 2023	Review Hasil Produksi Kayu	43 Orang
14 Juli 2023	Benchmarking SPI PT PLN (Persero) Tbk via Zoom	35 Orang
8 Agustus 2023	Review Hasil Riktin Komersial Kayu	40 Orang

SPI Meetings

Policy

The Internal Audit Unit (SPI) meeting policy is regulated in the SPI Work Guidelines, SPI holds meetings with the Audit Committee, Supervisory Board, and Board of Directors which are important instruments in maintaining effective coordination between all parties involved in the company's internal supervision. By establishing a clear framework for meeting frequency and agenda, reporting mechanisms, follow-up on findings and recommendations, cooperation and communication, and evaluation and review, this policy ensures that SPI, Audit Committee, Supervisory Board, and Board of Directors can work together effectively in supporting good governance and achieving company goals.

Meeting Frequency

Throughout 2023, SPI held 20 meetings with the agenda and attendance level of each SPI member as follows:

Frekuensi Rapat

Meeting Frequency

Tanggal Date	Agenda	Jumlah Peserta Participant
9 Agustus 2023	Review Hasil Riktin HHBK	40 Orang
15 Agustus 2023	Review Hasil Riktin Operasional	27 Orang
21 Agustus 2023	Review Evaluasi PKPT 2023	22 Orang
29 Agustus 2023	Review Pembahasan WBS	11 Orang
4 September 2023	Perkenalan dan Pengarahan KSPI Baru	15 Orang
4 September 2023	Sharing Sesion SPI dengan Dirum	15 Orang
11 Oktober 2023	Sharing Sesion SPI dengan Dir Komersial	15 Orang
13 November 2023	Pembahasan Metode Audit Operasional	26 Orang
28 Nov – 1 Des 2023	Pembahasan dan Pelatihan SIPHA	26 Orang
6 Desember 2023	Pembahasan Metode Audit Produksi Kayu	26 Orang
13 Desember 2023	Pembahasan Rencana Pendampingan PBJ Drone Lidar	10 Orang

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab SPI tahun 2023

Secara umum, kinerja Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perum Perhutani pada tahun 2023 masih memerlukan peningkatan, sebagaimana tercermin dari beberapa capaian berikut:

- Pencapaian kinerja pengawasan SPI dalam bentuk Pemeriksaan Rutin Tahun 2023 mencapai 72 satuan unit kerja (satker) dari rencana 92 objek pemeriksaan, atau sebesar 78% terhadap PKPT Tahun 2023. Meskipun angka ini menunjukkan komitmen SPI dalam melaksanakan tugasnya, masih ada ruang untuk peningkatan dalam mencapai target.
- Dalam kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) dan Pemantauan Temuan Masih Dalam Proses (MDP), hasil pemeriksaan SPI dari tahun 2009 hingga akhir tahun 2023 menunjukkan adanya 607 temuan dari pemeriksaan rutin. Dari jumlah ini, sebanyak 407 temuan telah diselesaikan, sementara 200 temuan masih dalam proses penyelesaian. Selain itu, temuan MDP dari periode 2009-2022 sebanyak 455, dengan 302 temuan telah diselesaikan dan 153 temuan masih berstatus MDP. Secara keseluruhan, jumlah total temuan yang masih berstatus MDP dari periode 2009 sampai akhir tahun 2023 adalah 353 temuan.
- Terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), tidak ada kegiatan PDTT yang dilaksanakan hingga akhir tahun 2023. Namun, SPI terus memantau perkembangan hasil PDTT yang pernah dilakukan di tahun-tahun

Brief Report on the Implementation of SPI Duties and Responsibilities in 2023

In general, the performance of the Internal Audit Unit (SPI) of Perum Perhutani in 2023 still requires improvement, as reflected in the following achievements:

- The achievement of SPI's supervision performance in the form of Routine Inspections in 2023 reached 72 work units (satker) from the planned 92 inspection objects, or 78% of the 2023 PKPT. Although this figure shows SPI's commitment to carrying out its duties, there is still room for improvement in achieving the target.
- In the Follow-up Monitoring (PTL) and Monitoring of Findings Still in Process (MDP) activities, the results of SPI inspections from 2009 to the end of 2023 showed 607 findings from routine inspections. Of this number, 407 findings have been resolved, while 200 findings are still in the process of being resolved. In addition, MDP findings from the 2009-2022 period were 455, with 302 findings having been resolved and 153 findings still having MDP status. Overall, the total number of findings still having MDP status from the 2009 to the end of 2023 period is 353 findings.
- Regarding Specific Purpose Audits (PDTT), no PDTT activities will be carried out until the end of 2023. However, SPI continues to monitor the development of PDTT results that have been carried out in previous years to ensure that the necessary follow-up continues.

sebelumnya untuk memastikan tindak lanjut yang diperlukan tetap berjalan.

- Audit Mutu Internal (AMI) ISO 9001:2015 berhasil dilaksanakan di 31 area terapan pada tahun 2023 dengan menghasilkan 91 temuan, yang terdiri dari 29 temuan mayor dan 62 temuan minor. Temuan ini menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam proses manajemen mutu di Perum Perhutani.
- Dalam pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK RI, hasil Semester I Tahun 2023 menunjukkan adanya 24 rekomendasi yang berstatus Belum Sesuai (BS) dan 2 rekomendasi berstatus Belum Ditindaklanjuti (BD). Hingga Triwulan IV tahun 2023, dari total 227 rekomendasi temuan BPK, sebanyak 200 telah diselesaikan dengan status Sesuai (S), 20 masih berstatus Belum Sesuai (BS), dan 7 rekomendasi berstatus Tidak dapat Ditindaklanjuti (TDD).

Evaluasi Kinerja Unit Internal Audit

Hasil *Assessment Quality Assurance Review* (QAR) sesuai dengan Permen BUMN Nomor: Per-02/MBU/3/2023 menunjukkan bahwa kinerja SPI Perhutani berada dalam kategori Sesuai Sebagian (Partially Conform). Identifikasi peluang pengembangan aktivitas SPI mencakup penajaman prioritas penugasan, perbaikan kualitas penugasan, penugasan konsultasi dan strategik, serta penerapan combined assurance.

Dengan evaluasi dan identifikasi poin-poin pengembangan ini, SPI berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam mendukung tata kelola perusahaan yang lebih baik dan mencapai tujuan strategis Perum Perhutani dengan lebih efektif dan efisien.

- The ISO 9001:2015 Internal Quality Audit (AMI) was successfully implemented in 31 applied areas in 2023, resulting in 91 findings, consisting of 29 major findings and 62 minor findings. These findings are the basis for continuous improvement in the quality management process at Perum Perhutani.
- In monitoring the follow-up to the BPK RI audit recommendations, the results of Semester I of 2023 showed that there were 24 recommendations with the status Not Yet Appropriate (BS) and 2 recommendations with the status Not Yet Followed Up (BD). Until the fourth quarter of 2023, of the total 227 recommendations of BPK findings, 200 have been completed with the status of Appropriate (S), 20 still have the status of Not Appropriate (BS), and 7 recommendations have the status of Not Yet Appropriate (TDD).

Internal Audit Unit Performance Evaluation

The results of the Quality Assurance Review (QAR) Assessment in accordance with BUMN Ministerial Regulation Number: Per-02/MBU/3/2023 show that Perhutani's SPI performance is in the Partially Conform category. Identification of opportunities for developing SPI activities includes sharpening assignment priorities, improving assignment quality, consulting and strategic assignments, and implementing combined assurance.

With the evaluation and identification of these development points, SPI is committed to continuing to improve its performance in supporting better corporate governance and achieving Perum Perhutani's strategic goals more effectively and efficiently.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Pengendalian internal merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai dalam upaya pencapaian tujuan Perusahaan, pengendalian internal menjadi fondasi yang mendukung berbagai aktivitas operasional dan strategis perusahaan.

Perhutani senantiasa melakukan evaluasi dan penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal, baik pada level perusahaan secara keseluruhan maupun pada level operasional. Evaluasi ini melibatkan penelitian mendalam terhadap kebijakan, pedoman, dan prosedur yang diterapkan, serta bagaimana penerapannya di lapangan.

Penilaian atas efektivitas pengendalian internal dilakukan baik oleh pihak eksternal seperti kantor akuntan publik maupun oleh pihak internal seperti Satuan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko. Dengan melibatkan berbagai pihak yang terampil dan berkompeten, Perhutani memastikan bahwa seluruh aspek pengendalian internal terkelola dengan baik sesuai standar yang ditetapkan.

Sistem Pengendalian Keuangan dan Operasional

Sistem Pengendalian Keuangan Perhutani dirancang untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan bagi setiap tingkatan manajemen, Pemilik Modal, dan pihak kepentingan lainnya sebagai dasar pengambilan keputusan. Melalui sistem ini, manajemen dapat merencanakan dan mengendalikan operasi Perhutani secara efektif. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disediakan akurat serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sementara itu, sistem pengendalian operasional Perhutani dilakukan melalui penerapan kebijakan dan prosedur yang langsung berdampak pada pencapaian sasaran dan target perusahaan. Sistem ini dirancang untuk memastikan laporan keuangan yang disediakan sesuai dan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang

Internal control is one of the important aspects in the implementation of good corporate governance. Designed to provide adequate assurance in achieving the Company's objectives, internal control is the foundation that supports various operational and strategic activities of the company.

Perhutani always evaluates and assesses the effectiveness of internal control, both at the company level as a whole and at the operational level. This evaluation involves in-depth research on the policies, guidelines, and procedures implemented, as well as how they are implemented in the field.

Assessment of the effectiveness of internal control is carried out both by external parties such as public accounting firms and by internal parties such as the Internal Control Unit and Risk Management. By involving various skilled and competent parties, Perhutani ensures that all aspects of internal control are well managed according to established standards.

Financial and Operational Control System

Perhutani's Financial Control System is designed to provide relevant financial information for all levels of management, Capital Owners, and other stakeholders as a basis for decision making. Through this system, management can plan and control Perhutani's operations effectively. This aims to ensure that the financial information provided is accurate and to ensure compliance with applicable laws and regulations.

Meanwhile, Perhutani's operational control system is carried out through the implementation of policies and procedures that directly impact the achievement of the company's goals and targets. This system is designed to ensure that the financial reports provided are appropriate and to ensure compliance with applicable laws and regulations.

berlaku. Dengan penerapan kebijakan yang tepat, sistem pengendalian operasional memastikan bahwa aktivitas Perhutani berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam kerangka Sistem Pengendalian Intern Perhutani, perusahaan mengadopsi Kerangka Kerja *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) yang diakui secara internasional. Sistem pengendalian intern ini melibatkan Dewan Pengawas, Direksi, serta personel lainnya, dengan fokus pada efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Kerangka Sistem Pengendalian Intern

Perhutani memiliki sistem pengendalian intern yang sesuai dengan kerangka kerja yang diakui secara internasional, yakni *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Menurut COSO, sistem pengendalian intern merupakan proses yang melibatkan Dewan Pengawas, Direksi, serta personil lainnya. Hal ini sejalan dengan sistem pengendalian intern yang ada di Perhutani yang terus membangun sistem kontrol organisasi dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada.

Perhutani berpendapat bahwa sistem pengendalian intern bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini:

- Efektivitas dan efisiensi operasi
- Keandalan pelaporan keuangan
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Perhutani memandang bahwa pengendalian intern merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam bisnis Perhutani. Pengendalian intern berada dalam proses manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Komponen sistem pengendalian intern di lingkungan Perhutani antara lain terdiri dari:

- Lingkungan pengendalian (control environment) yang meliputi integritas, nilai etik, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi, cara manajemen memberikan otoritas dan tanggung jawab serta mengorganisasikan dan

With the implementation of appropriate policies, the operational control system ensures that Perhutani's activities run in accordance with established standards and achieve the desired goals.

Within the framework of Perhutani's Internal Control System, the company adopts the internationally recognized Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) Framework. This internal control system involves the Board of Commissioners, Directors, and other personnel, with a focus on operational effectiveness, reliability of financial reporting, and compliance with applicable laws and regulations.

Internal Control System Framework

Perhutani has an internal control system that is in accordance with an internationally recognized framework, namely the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). According to COSO, the internal control system is a process that involves the Board of Commissioners, Directors, and other personnel. This is in line with the internal control system in Perhutani which continues to build an organizational control system by involving all existing resources.

Perhutani believes that the internal control system aims to provide reasonable assurance regarding the achievement of the following three objectives:

- Effectiveness and efficiency of operations
- Reliability of financial reporting
- Compliance with applicable laws and regulations.

Perhutani views internal control as a series of actions that cover the entire process in Perhutani's business. Internal control is in the basic management process, namely planning, implementation, and monitoring. The components of the internal control system in Perhutani's environment include:

- Control environment which includes integrity, ethical values, and competence of people and entities, management philosophy and operating style, how management grants authority and responsibility and organizes and develops business in accordance with

mengembangkan bisnis sesuai dengan arahan manajemen.

- Penaksiran risiko (risk assessment) yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas bisnis Perhutani.
- Aktivitas pengendalian (control activities) yang senantiasa dilakukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan bisnis Perhutani tercapai.
- Informasi dan komunikasi (information and communication) yang memungkinkan orang atau entitas, memperoleh dan bertukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasional Perhutani.
- Pemantauan (monitoring) dengan tujuan untuk menilai mutu kinerja Perhutani. Hal ini dijalankan melalui aktivitas pemantauan yang terus-menerus, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya.

Evaluasi Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Dalam evaluasi Sistem Pengendalian Internal (SPI) Perhutani, langkah-langkah berikut diambil untuk menjamin efektivitas sistem pengendalian internal dan memberikan dasar evaluasi kepada Manajemen untuk perbaikan dan penyempurnaan:

- Satuan Pengawasan Intern, melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal di perusahaan. Langkah ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap berbagai aspek pengendalian internal di Perhutani.
- Direksi menindaklanjuti laporan hasil audit yang disusun oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal. Tindak lanjut dari audit ini akan dilaporkan kepada Dewan Pengawas untuk diperhatikan dan diambil langkah-langkah yang sesuai untuk perbaikan dan pengembangan di masa depan.
- Dewan Pengawas bertanggung jawab untuk memantau perkembangan tindak lanjut atas laporan hasil audit dari Satuan Pengawasan Internal dan Auditor Eksternal. Tindakan koreksi yang diperlukan akan dibahas dan diawasi secara teliti oleh Dewan Pengawas.

management direction.

- Risk assessment which aims to identify, analyze, and manage risks related to various Perhutani business activities.
- Control activities which are always carried out in determining policies and procedures set by management to help ensure that Perhutani's business objectives are achieved.
- Information and communication which allows people or entities to obtain and exchange information needed to implement, manage, and control Perhutani operations.
- Monitoring with the aim of assessing the quality of Perhutani's performance. This is carried out through continuous monitoring activities, separate evaluations or a combination of both.

Evaluation of the Effectiveness of the Internal Control System

In the evaluation of Perhutani's Internal Control System (SPI), the following steps are taken to ensure the effectiveness of the internal control system and provide a basis for evaluation to Management for improvement and refinement:

- Internal Audit Unit, evaluates the implementation of the internal control system in the company. This step involves a comprehensive assessment of various aspects of internal control in Perhutani.
- The Board of Directors follows up on the audit report prepared by the Internal Audit Unit and External Auditor. The follow-up of this audit will be reported to the Supervisory Board for attention and appropriate steps to be taken for improvement and development in the future.
- The Supervisory Board is responsible for monitoring the progress of follow-up on audit reports from the Internal Audit Unit and External Auditor. The necessary corrective actions will be discussed and carefully supervised by the Supervisory Board.

- Dewan Pengawas memberikan penilaian dan masukan terhadap laporan hasil audit dari Satuan Pengawasan Internal dan Auditor Eksternal. Evaluasi ini mencakup materi laporan, sasaran audit, serta ruang lingkup audit yang dilakukan untuk memastikan ketepatan dan efektivitas pengendalian internal di Perhutani.
- Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dan tim manajemen untuk memastikan bahwa aturan dan regulasi yang berlaku dipatuhi dengan baik. Langkah-langkah pengendalian internal yang dijalankan oleh manajemen juga tetap diperhatikan dan dipastikan efektifitasnya.

Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada Direksi dan kepada pemangku kepentingan lainnya bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern di Perhutani telah memadai dalam mencapai tujuan perusahaan, termasuk kepatuhan terhadap aturan hukum, ketersediaan informasi keuangan yang akurat, tepat waktu, serta efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan operasi bisnis.

Selain memberikan keyakinan, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang perbaikan yang dapat dilakukan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan di masa mendatang. Hal ini mencakup identifikasi area perbaikan yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan pengendalian internal di Perhutani.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Pengawas atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Komponen utama dari sistem pengendalian intern Perhutani mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dengan menyelaraskan keseluruhan komponen ini, Perhutani memastikan bahwa pengendalian intern merupakan rangkaian tindakan yang mendukung proses manajemen dasar perusahaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.

Melalui Satuan Pengawasan Intern, evaluasi terhadap sistem pengendalian internal dilakukan sebagai dasar evaluasi manajemen untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem. Pertimbangan

- The Supervisory Board provides assessment and input on audit reports from the Internal Audit Unit and External Auditor. This evaluation includes report materials, audit objectives, and the scope of the audit conducted to ensure the accuracy and effectiveness of internal control at Perhutani.
- The Supervisory Board supervises and monitors the compliance of the Board of Directors and management team to ensure that applicable rules and regulations are properly complied with. Internal control measures implemented by management are also continuously monitored and their effectiveness is ensured.

The main objective of this evaluation is to provide assurance to the Board of Directors and other stakeholders that the implementation of the Internal Control System in Perhutani is adequate in achieving the company's objectives, including compliance with legal regulations, the availability of accurate and timely financial information, and efficiency and effectiveness in carrying out business operations.

In addition to providing assurance, this evaluation also aims to provide recommendations to the Board of Directors regarding improvements that can be made in the implementation of the Company's Internal Control System in the future. This includes identifying areas of improvement that may be needed to improve the effectiveness and compliance of internal control in Perhutani.

Statement of the Board of Directors and/or the Supervisory Board on the Adequacy of the Internal Control System

The main components of Perhutani's internal control system include the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. By aligning all of these components, Perhutani ensures that internal control is a series of actions that support the company's basic management processes, namely planning, implementing, and monitoring.

Through the Internal Audit Unit, evaluation of the internal control system is carried out as a basis for management evaluation for system improvement and refinement. The Board of Directors and

Direksi dan Dewan Pengawas atas hasil evaluasi membentuk dasar penilaian atas efektivitas sistem pengendalian internal Perhutani, yang meliputi lima komponen utama pengendalian.

Dengan komitmen Direksi dan Dewan Pengawas, serta melalui telaah yang berkelanjutan oleh Komite Audit, Perhutani memastikan kecukupan sistem pengendalian intern untuk menjaga integritas, efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Evaluasi dan penilaian yang dilakukan secara teratur dan teliti bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal di Perhutani terus berjalan sesuai standar yang ditetapkan dan mendukung tercapainya tujuan perusahaan.

Supervisory Board's consideration of the evaluation results forms the basis for assessing the effectiveness of Perhutani's internal control system, which includes five main components of control.

With the commitment of the Board of Directors and Supervisory Board, and through ongoing review by the Audit Committee, Perhutani ensures the adequacy of the internal control system to maintain integrity, operational effectiveness, and compliance with legal regulations. Evaluations and assessments carried out regularly and thoroughly aim to ensure that the internal control system at Perhutani continues to run according to established standards and supports the achievement of company goals.

Manajemen Risiko

Risk Management

Perhutani menetapkan bahwa pengelolaan risiko adalah bagian integral dari proses bisnis dan harus diinternalisasikan menjadi bagian dari budaya Perusahaan. Untuk merealisasikan hal ini, Perhutani telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Korporat serta menerapkan *Enterprise Risk Management* (ERM) untuk seluruh fungsi organisasi. ERM adalah proses yang menangani risiko secara menyeluruh, menjangkau berbagai jenis risiko, lokasi, dan aktivitas bisnis, dengan mengadaptasi standar manajemen dan praktik terbaik terkini.

Implementasi Sistem Manajemen Risiko di Perhutani mengikuti *framework* ISO 31000:2018. Standar ini dipilih untuk menghasilkan praktik manajemen risiko yang lebih luas, mudah dipahami, terukur, serta mendukung koordinasi dan integrasi antar unit kerja dalam Perusahaan. Penerapan sistem ini terdiri dari tahapan pengelolaan risiko yang sistematis, yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara efektif.

Kebijakan dan Kerangka Proses Manajemen Risiko

Perhutani menyadari bahwa pencapaian tujuan-tujuan Perusahaan dihadapkan pada berbagai risiko yang dapat mempengaruhi hasil yang diinginkan. Sebagai entitas yang mengelola sumber daya hutan yang luas dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi baik nasional maupun global, Perhutani menghadapi beragam risiko usaha yang bersifat internal dan eksternal. Oleh karena itu, Perusahaan menerapkan ERM dengan mengacu pada kerangka kerja standar internasional seperti ISO 31000 untuk mengelola risiko-risiko tersebut.

Sistem Manajemen Risiko Perhutani dituangkan dalam Pedoman Manajemen Risiko yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 1958/KPTS/DIR/2017 tentang Pedoman Manajemen Risiko Perum Perhutani. Pelaksanaan pedoman ini dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk prosedur kerja, salah satunya adalah Prosedur Kerja Penyusunan Kajian Manajemen Risiko PK-SMPHT.13-001.

Perhutani determines that risk management is an integral part of the business process and must be internalized as part of the Company's culture. To realize this, Perhutani has prepared and established a Corporate Risk Management Policy and implemented Enterprise Risk Management (ERM) for all organizational functions. ERM is a process that handles risk comprehensively, spanning various types of risks, locations, and business activities, by adapting the latest management standards and best practices.

The implementation of the Risk Management System in Perhutani follows the ISO 31000:2018 framework. This standard was chosen to produce broader, easier to understand, measurable risk management practices, and support coordination and integration between work units within the Company. The implementation of this system consists of systematic risk management stages, which are designed to identify, evaluate, and manage risks effectively.

Risk Management Policy and Process Framework

Perhutani is aware that achieving the Company's goals is faced with various risks that can affect the desired results. As an entity that manages extensive forest resources and is influenced by both national and global economic conditions, Perhutani faces various internal and external business risks. Therefore, the Company implements ERM by referring to international standard frameworks such as ISO 31000 to manage these risks.

Perhutani's Risk Management System is outlined in the Risk Management Guidelines stipulated through the Decree of the Board of Directors of Perum Perhutani Number: 1958/KPTS/DIR/2017 concerning the Perum Perhutani Risk Management Guidelines. The implementation of these guidelines is further described in the form of work procedures, one of which is the Work Procedure for Preparing Risk Management Studies PK-SMPHT.13-001.

Perhutani memaknai manajemen risiko sebagai langkah dan upaya yang terarah, sistematis, dan terukur dalam mengelola risiko melalui pengambilan keputusan yang tepat dan efisien untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Proses manajemen risiko telah menjadi bagian integral dari proses perencanaan strategis yang dilaksanakan pada saat penentuan rencana kerja ke depan. Framework yang dirancang untuk analisis dan pengelolaan risiko perusahaan memastikan bahwa manajemen risiko di Perhutani lebih terstruktur dan efektif.

Dalam segala kegiatan dan proses pengambilan keputusan, Perhutani menyertakan analisis risiko sebagai salah satu pertimbangan utama. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil telah melalui pertimbangan yang matang terkait potensi risiko yang mungkin dihadapi, sehingga mampu meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan peluang.

Dengan penerapan manajemen risiko yang konsisten dan terintegrasi, Perhutani berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan, menjaga kelestarian sumber daya hutan, dan menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan.

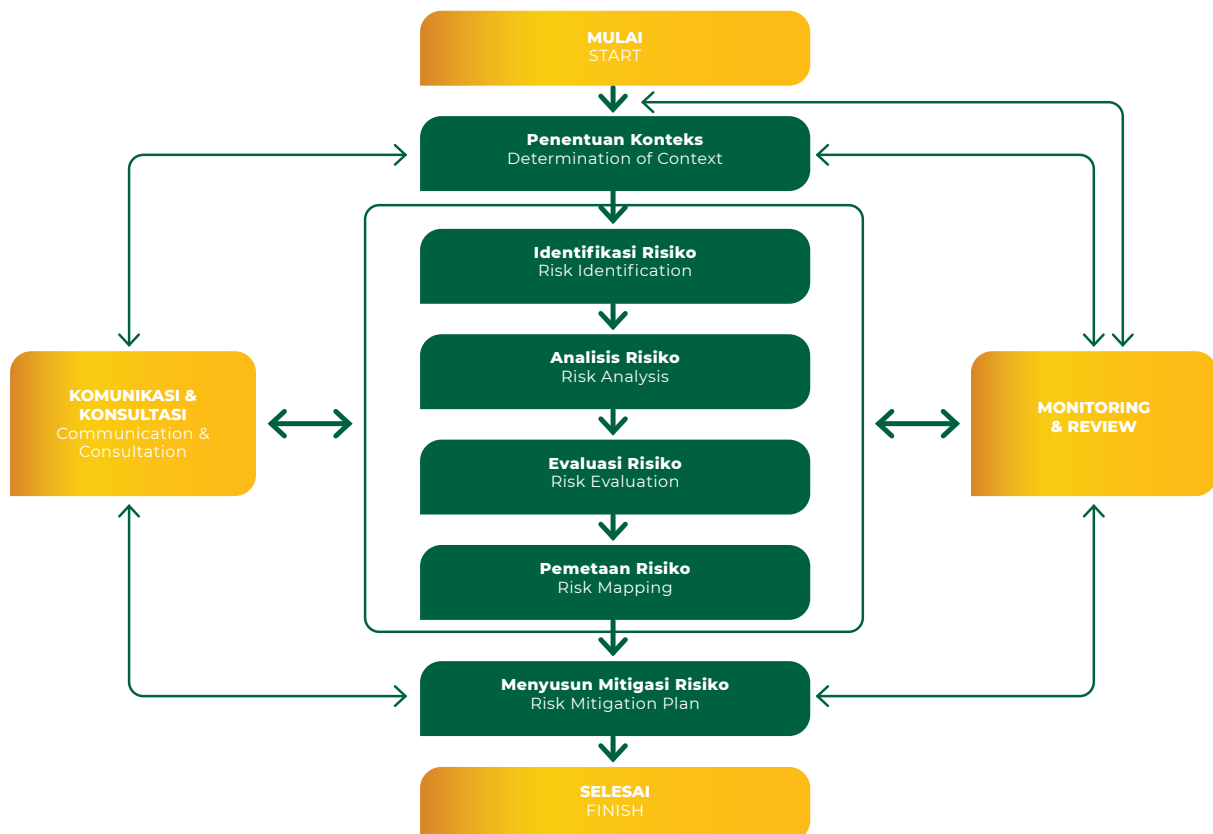
Perhutani defines risk management as directed, systematic, and measurable steps and efforts in managing risks through appropriate and efficient decision making to achieve the expected performance. The risk management process has become an integral part of the strategic planning process implemented when determining future work plans. The framework designed for corporate risk analysis and management ensures that risk management at Perhutani is more structured and effective.

In all activities and decision-making processes, Perhutani includes risk analysis as one of the main considerations. This aims to ensure that decisions taken have gone through careful consideration of potential risks that may be faced, so as to minimize negative impacts and optimize opportunities.

With the implementation of consistent and integrated risk management, Perhutani is committed to continuously improving company performance, maintaining the sustainability of forest resources, and creating added value for all stakeholders.

Kebijakan dan Kerangka Proses Manajemen Risiko

Risk Management Process Policy and Framework



Pernyataan atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Sistem manajemen risiko Perhutani dirancang untuk mendukung pengelolaan bisnis dan pencapaian pertumbuhan yang berkelanjutan, dengan mengacu pada Kebijakan Manajemen Risiko yang didasarkan pada standar ISO 31000:2018. Komitmen Perhutani dalam penerapan manajemen risiko diwujudkan melalui pembentukan Unit Kerja Manajemen Risiko dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang andal dalam pengelolaan risiko.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko di Perhutani terdiri dari enam unsur utama yang berperan dalam penerapan Manajemen Risiko:

1. **Dewan Pengawas** menjalankan fungsi pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Risk Sponsor (Direksi/BoD).
2. **Risk Sponsor (Direksi)** bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko di seluruh perusahaan.
3. **Risk Manager** (Direktur yang membidangi Manajemen Risiko) mengoordinasikan penerapan manajemen risiko di semua unit kerja dan fungsi dalam perusahaan.
4. **Risk Coordinator** (Kepala Divisi Regional, Kepala Divisi, dan Kepala Pusat) mengoordinasikan penerapan manajemen risiko dalam lingkup unit kerja masing-masing.
5. **Risk Control** (Satuan Pengawas Internal/SPI) melaksanakan aktivitas assurance dan consulting independen untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki kegiatan operasional perusahaan. Mereka membantu perusahaan mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematis dan terstruktur dalam evaluasi efektivitas proses manajemen risiko.
6. **Risk Owner** (Unit Kerja Pemilik Risiko) merupakan fungsi yang memiliki risiko dan bertanggung jawab atas rangkaian proses kegiatan kerja terkait.

Efektivitas dan integrasi manajemen risiko yang baik memerlukan peran aktif dari Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh karyawan Perhutani. Direksi bertindak dengan mendefinisikan dan menetapkan kebijakan Manajemen Risiko yang memperhitungkan strategi, sasaran, tujuan, dan sifat operasi perusahaan yang kemudian disosialisasikan kepada seluruh karyawan Perhutani setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

Statement on Adequacy of Risk Management System

Perhutani's risk management system is designed to support business management and the achievement of sustainable growth, with reference to the Risk Management Policy based on the ISO 31000:2018 standard. Perhutani's commitment to implementing risk management is realized through the establishment of a Risk Management Work Unit and improving the quality of reliable human resources in risk management.

The Risk Management Organizational Structure at Perhutani consists of six main elements that play a role in implementing Risk Management:

1. **The Supervisory Board** carries out the function of supervising the implementation of risk management carried out by the Risk Sponsor (Board of Directors/BoD).
2. **The Risk Sponsor (Board of Directors)** is responsible for the implementation of risk management throughout the company.
3. **The Risk Manager (Director in charge of Risk Management)** coordinates the implementation of risk management in all work units and functions within the company.
4. **The Risk Coordinator (Head of Regional Division, Head of Division, and Head of Center)** coordinates the implementation of risk management within the scope of their respective work units.
5. **Risk Control (Internal Supervisory Unit/SPI)** carries out independent assurance and consulting activities to provide added value and improve the company's operational activities. They help the company achieve its goals through a systematic and structured approach in evaluating the effectiveness of the risk management process.
6. **The Risk Owner (Risk Owner Work Unit)** is a function that has risks and is responsible for a series of related work activity processes.

Effectiveness and integration of good risk management require an active role from the Supervisory Board, the Board of Directors, and all Perhutani employees. The Board of Directors acts by defining and establishing Risk Management policies that take into account the company's strategy, targets, objectives, and nature of operations which are then socialized to all Perhutani employees after obtaining approval from the Supervisory Board.

Proses Manajemen Risiko meliputi:

- Identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko;
- Penentuan strategi perlakuan risiko;
- Implementasi strategi pengurangan risiko yang telah ditentukan;
- Pelaporan dan pemantauan secara berkala.

Pada level strategis, identifikasi risiko dilakukan oleh Direksi dan manajer bidang/unit terkait dengan mempertimbangkan faktor risiko internal dan eksternal. Analisis risiko membantu dalam mengukur kemungkinan terjadinya peristiwa risiko (loss events) dan menilai dampaknya terhadap bisnis Perhutani. Penanganan atau pengendalian risiko dipilih melalui evaluasi analisis biaya-manfaat, serta diputuskan oleh tim Manajemen Risiko yang melibatkan Direksi dan manajer terkait, termasuk Satuan Pengawas Intern.

Strategi dan pengendalian risiko diimplementasikan secara sistematis oleh Direksi dan unit/fungsi terkait sesuai dengan level risikonya. Manajemen risiko melakukan koordinasi pelaksanaan strategi dan pengendalian risiko ke unit atau direktorat terkait untuk menjamin efektivitas respon risiko setiap unit kerja.

Unit kerja manajemen risiko melaporkan hasil identifikasi, analisis, evaluasi, serta pelaksanaan strategi dan pengurangan risiko secara periodik kepada Direksi. Laporan ini kemudian diteruskan kepada Dewan Pengawas melalui Komite Pemantau Risiko dalam bentuk Laporan *Risk Assessment*. Direksi juga mengungkapkan penilaian risiko usaha dan risiko material dalam laporan tahunan, memberikan informasi penting bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi ini, Perhutani terus berkomitmen untuk memelihara dan meningkatkan kecukupan sistem manajemen risiko, mendukung pencapaian sasaran perusahaan dengan lebih efektif dan efisien.

Struktur Organisasi Penerapan Manajemen Risiko

Saat ini jumlah pegawai Unit kerja Manajemen Risiko sebanyak 5 orang. 1 Orang ter-Certified *Risk Management Officer*.

The Risk Management process includes:

- Identification, analysis, and evaluation of risks;
- Determination of risk treatment strategies;
- Implementation of predetermined risk reduction strategies;
- Periodic reporting and monitoring

At the strategic level, risk identification is carried out by the Board of Directors and related field/unit managers by considering internal and external risk factors. Risk analysis helps in measuring the possibility of risk events (loss events) and assessing their impact on Perhutani's business. Risk handling or control is selected through a cost-benefit analysis evaluation, and is decided by the Risk Management team involving the Board of Directors and related managers, including the Internal Audit Unit.

Risk strategies and controls are implemented systematically by the Board of Directors and related units/functions according to their risk levels. Risk management coordinates the implementation of strategies and risk controls to related units or directorates to ensure the effectiveness of each work unit's risk response.

The risk management work unit reports the results of identification, analysis, evaluation, and implementation of strategies and risk reduction periodically to the Board of Directors. This report is then forwarded to the Supervisory Board through the Risk Monitoring Committee in the form of a Risk Assessment Report. The Board of Directors also discloses the assessment of business risks and material risks in the annual report, providing important information for stakeholders in decision making.

With this comprehensive and coordinated approach, Perhutani continues to be committed to maintaining and improving the adequacy of the risk management system, supporting the achievement of company goals more effectively and efficiently.

Organizational Structure of Risk Management Implementation

Currently, the number of employees of the Risk Management work unit is 5 people. 1 person is a Certified Risk Management Officer.



Profil Kepala Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Manajemen Risiko adalah memastikan tata kelola dan kepatuhan Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi Manajemen Risiko secara terintegrasi, konsisten dan berkesinambungan guna mendukung tercapainya GCG dan visi Perusahaan berdasarkan prosedur dan regulasi yang berlaku. Berikut profil Kepala Manajemen Risiko Perhutani.

Head of Risk Management Profile

The Head of Risk Management's duties and responsibilities are to ensure the Company's governance and compliance in accordance with applicable regulations through planning, implementing and supervising the implementation of Risk Management in an integrated, consistent and sustainable manner to support the achievement of GCG and the Company's vision based on applicable procedures and regulations. The following is the profile of the Head of Risk Management of Perhutani.



Henry Purnomo

Kepala Divisi Manajemen Risiko
Head of Risk Management Division

Henry Purnomo lahir di Kuningan, 5 Oktober 1973 (50 tahun). Memperoleh gelar Sarjana Manajemen Hutan dari Institut Pertanian Bogor, dan Strata dua Manajemen SDM dari Universitas Satyagama serta Doktor dibidang Manajemen Pemasaran (Eco-Wisata) dari Universitas Padjadjaran Bandung (2017).

Menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko Perum Perhutani sejak Oktober 2021 sampai dengan 3 November 2023. Telah menduduki

Henry Purnomo was born in Kuningan, October 5, 1973 (50 years old). He obtained a Bachelor's degree in Forest Management from the Bogor Agricultural Institute, and a Master's degree in Human Resource Management from Satyagama University and a Doctorate in Marketing Management (Eco-Tourism) from Padjadjaran University Bandung (2017).

Served as Head of Risk Management Division of Perum Perhutani since October 2021 to November 3, 2023. Has held various positions throughout

berbagai jabatan sepanjang karir beliau di Perum Perhutani diantaranya Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Sumberdaya Hutan (2021), Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Sumberdaya Hutan (2021), Kepala Departemen Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Perhutanan Sosial (2020), Kepala Departemen Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Hutan (2019). Kepala Departemen Keuangan Divisi Regional Jawa Tengah (2012), Kepala Departemen Akuntansi Kantor Pusat (2011), Kepala Seksi Akuntansi Divisi Regional Jawa Tengah (2009) dan Kepala Seksi Akuntansi Kantor Pusat (2006).

his career at Perum Perhutani including Forest Resource Management Assessor (2021), Forest Resource Management Assessor (2021), Head of Forest Resource Management and Social Forestry Department (2020), Head of Forest Resource Management and Protection Department (2019). Head of Finance Department of Central Java Regional Division (2012), Head of Accounting Department of Head Office (2011), Head of Accounting Section of Central Java Regional Division (2009) and Head of Accounting Section of Head Office (2006).



Jhon Akang Saragih

Kepala Divisi Manajemen Risiko
Head of Risk Management Division

Jhon Akang Saragih lahir di Jember, 19 November 1982 (41 tahun). Memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Padjadjaran Bandung (2007).

Jhon Akang Saragih was born in Jember, 19 November 1982 (41 years old). Obtained a Bachelor's degree in Agriculture from Padjadjaran University, Bandung (2007).

Menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko Perum Perhutani sejak 03 November 2023. Telah menduduki berbagai jabatan sepanjang karir beliau di Perum Perhutani diantaranya Ketua Tim Project Management Unit (PMU) ERP FICO dan HCMS (2023), Kepala Departemen Pengelolaan Audit (2021), Anggota Satuan Pengawasan Intern (2021).

Serves as Head of the Risk Management Division of Perum Perhutani since 3 November 2023. Has held various positions throughout his career at Perum Perhutani including Head of the FICO and HCMS ERP Project Management Unit (PMU) Team (2023), Head of the Audit Management Department (2021), Unit Member Internal Supervision (2021).

Sosialisasi dan Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko

Socialization and Development of Risk Management Competencies

Nama Program Program Name		Tanggal Date	Peserta Participants
Risk Management Training	Risk Management Training	04 Apr 2023	Kantor Pusat (Kadiv, Kadeb, Kasi), Divisi Regional (Kadep, Adm, GM, Manajer, KPHW, Kasi, KSS), Anak Perusahaan (INH I, II, PT. Palawi Risorsis)/ Head Office (Head of Division, Department, Section), Regional Division (Head of Dept, Adm, GM, Manager, KPHW, Head of Section, KSS), Subsidiaries (INH I, II, PT. Palawi Risorsis)

Sosialisasi dan Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko

Socialization and Development of Risk Management Competencies

Nama Program Program Name		Tanggal Date	Peserta Participants
Pelatihan Organ Pengelola Risiko Bagi BOD & BOC Perum Perhutani	Risk Management Organ Training for BOD & BOC Perum Perhutani	Mei - Juni 2023	16 orang (Dewas, Direksi, SPI)/ 16 people (Supervisory Board, Board of Directors, SPI)
Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi BUMN - BLBI GRC Masterclass Program 2023	BUMN Capacity and Competency Development - BLBI GRC Masterclass Program 2023	10 Aug 2023	Segenap Organ Pengelola Risiko BUMN, Segenap Perusahaan BUMN All SoE Risk Management Organs, All SoE Companies
Sosialisasi Penerapan Integrated Risk Management	Socialization of Integrated Risk Management Implementation	28 Aug - 01 Sept 2023	Segenap PIC MR Divisi Kantor Pusat All PIC MR Head Office Division
Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN (GRC Masterclass Program 2023)	Socialization of BUMN & BUMN Subsidiary Ranking (GRC Masterclass Program 2023)	Sept 2023	Segenap Organ Pengelola Risiko Perhutani (Dewas, Direksi, SPI, Divisi MR), Segenap Perusahaan BUMN/ All Perhutani Risk Management Organs (Board of Commissioners, Board of Directors, SPI, MR Division), All BUMN Companies
Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 Quality Management System Training	14-15 Sept 2023	26 orang (SPI, PeFi Divisi Renstra, Perencanaan SDH, Pengembangan Bisnis, Produksi, Komersil HHBK, IHH, SDM, IT, Hukum, PKB, MR)/ 26 people (SPI, PeFi Renstra Division, SDH Planning, Business Development, Production, Commercial HHBK, IHH, HR, IT, Legal, PKB, MR)
Pendampingan Tenaga Ahli Manajemen Risiko	Risk Management Expert Mentoring	April - Mei 2023	-
Studi Banding Pengelolaan Risiko di Bank BTN	Comparative Study of Risk Management at Bank BTN	Jul 2023	-
Penguatan Manajemen Risiko	Strengthening Risk Management	Aug 2023	Divisi MR dan Asisten Deputi Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Webinar "Memahami Regulasi Perlindungan Data Pribadi"	Webinar "Understanding Personal Data Protection Regulations"	13 Jan 2023	Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division
Sharing Session "Investigasi Kecurangan Bidang Keuangan"	Sharing Session "Investigation of Financial Fraud"	18-19 Jan 2023	Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division
Webinar <i>Leader Talk Value 'LOYAL'</i>	Webinar <i>Leader Talk Value 'LOYAL'</i>	27 Jan 2023	Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division
Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi	Socialization of Corruption Crimes	01-06 Feb 2023	Kadiv MR, Kadep MR, Kasi MR, Kadiv Divreg, Kepala PeFi, GM/GM KBM Divreg
Partisipasi Bedah Buku Ekonomi Keteknikan Analisis Investasi Kehutanan dan Lingkungan	Participation in Book Review of Engineering Economics, Forestry and Environmental Investment Analysis	22 Feb 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR All employees and staff of the MR Division
Webinar <i>Leader Talk Value 'ADAPTIF'</i>	Webinar <i>Leader Talk Value 'ADAPTIF'</i>	28 Feb 2023	Karyawan Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division Employees
Knowledge Sharing "Driving Digital Transformation with Knowledge Management"	Knowledge Sharing "Driving Digital Transformation with Knowledge Management"	08 Mar 2023	-
E-Learning Cyber Security Awareness	E-Learning Cyber Security Awareness	24 Mar 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division

Sosialisasi dan Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko

Socialization and Development of Risk Management Competencies

Nama Program Program Name		Tanggal Date	Peserta Participants
Peningkatan Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan yang Efektif	Improving Effective Internal Control and Compliance Systems	15 Mar 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division
Knowledge Sharing modernisasi TPK	Knowledge Sharing on TPK Modernization	21 Mar 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division
Knowledge Sharing "Implementasi SMART KPH"	Knowledge Sharing on "Implementation of SMART KPH"	31 Mar 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR / All employees and staff of the MR Division
Knowledge Sharing "Optimalisasi NBS untuk kemajuan perusahaan"	Knowledge Sharing on "Optimizing NBS for Company Progress"	06 Apr 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division
Sosialisasi Peraturan BUMN	Socialization of BUMN Regulations	06 Apr 2023	-
Knowledge Sharing "Agroforestry Tebu Mandiri (ATM)"	Knowledge Sharing on "Independent Sugarcane Agroforestry (ATM)"	12 Apr 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division
Leader Talks Value "Kolaboratif"	Leader Talks Value "Collaborative"	14 Apr 2023	Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division
Knowledge Sharing "Rehabilitasi Hutan Keterlanjuran di Lampung Melalui Pola Partisipatif"	Knowledge Sharing "Forest Rehabilitation in Lampung Through Participatory Patterns"	18 Apr 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division
Peran Perhutanan Sosial dalam Adaptasi Perubahan Iklim	The Role of Social Forestry in Climate Change Adaptation	11 Mei 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division
Sosialisasi Perpajakan Perum Perhutani	Socialization of Perum Perhutani Taxation	16 Mei 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division
Bedah Buku "Formula Pariwisata Indonesia"	Book Review "Indonesian Tourism Formula"	19 Mei 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division
Pembinaan Jajaran Direktorat Keuangan	Coaching of Finance Directorate Ranks	22 Mei 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division
Pelatihan "Iklim Komoditi Kopi: Dampak dan Mitigasi El Nino"	Training "Coffee Commodity Climate: Impact and Mitigation of El Nino"	05 Jun 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division
Sosialisasi Juknis "Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko"	Socialization of Technical Instructions "Composition and Qualification of Risk Management Organs"	13 Jun 2023	Seg. Organ Pengelola Risiko BUMN (Dewan Pengawas, Direksi, Dir. Keu dan MR, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Kepala SPI)
Knowledge Sharing "PeFi potensi dan kualitas biomassa"	Knowledge Sharing "PeFi potential and quality of biomass"	15 Jun 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division
Knowledge Sharing "Digitalisasi Implementasi Pemetaan dan Pengamanan SDH"	Knowledge Sharing "Digitalization of SDH Mapping Implementation and Security"	22 Jun 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division
Knowledge Sharing "Spin off Bisnis Industri Kayu"	Knowledge Sharing "Spin off Wood Industry Business"	25 Aug 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division
Knowledge Sharing "Hasil penelitian analisis perhitungan valuasi lahan"	Knowledge Sharing "Results of land valuation calculation analysis"	07 Sept 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division

Sosialisasi dan Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko

Socialization and Development of Risk Management Competencies

Nama Program Program Name		Tanggal Date	Peserta Participants
<i>Knowledge Sharing “Spin off Bisnis Industri hasil bukan kayu”</i>	Knowledge Sharing “Spin off Non-timber Industry Business”	14 Sept 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division
<i>Knowledge Sharing “Pengelolaan Kawasan Lindung”</i>	Knowledge Sharing “Protected Area Management”	16 Sept 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division
Bedah Buku “Analisis Kebijakan Tata Kelola Sumber Daya Alam”	Book Review “Analysis of Natural Resource Governance Policy”	21 Sept 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division
Sosialisasi “Berbagi Pengetahuan dengan Cerdas”	Socialization “Sharing Knowledge with Smart”	27 Sept 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division
<i>Knowledge Sharing “Ancaman jamur Autropuccinia Psidii”</i>	Knowledge Sharing “The Threat of Autropuccinia Psidii Fungus”	05 Okt 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division
<i>Knowledge Sharing “Dua Dekade Program Pinus Bocar Getah di Perhutani”</i>	Knowledge Sharing “Two Decades of Pine Sap Leaking Program in Perhutani”	12 Okt 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division
<i>Knowledge Sharing “Turn Your Ideas Into Reality”</i>	Knowledge Sharing “Turn Your Ideas Into Reality”	19 Oktober 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division
<i>Webinar “Risk Culture: Protect and Create Value to Achieve Strategic Goals”</i>	Webinar “Risk Culture: Protect and Create Value to Achieve Strategic Goals”	04 Okt 2023	Segenap PIC MR Divisi-divisi Kantor Pusat, Segenap Satuan Kerja Lapangan/ All PIC MR Divisions of Head Office, All Field Work Units
Pelatihan “BLMN GRC Masterclass 2023”	Training “BLMN GRC Masterclass 2023”	05 Okt 2023	Dewan Pengawas dan Direksi, Divisi Manajemen Risiko Kantor Pusat
<i>Workshop penyusunan RKAP 2024 berbasis manajemen risiko</i>	Workshop on preparing RKAP 2024 based on risk management	24 Okt 2023	Segenap OPR BUMN, Segenap Perusahaan BUMN/ All SoE OPR, All SoE Companies
<i>Knowledge Sharing “Perspektif Pensiun dan Mitigasinya”</i>	Knowledge Sharing “Pension Perspective and Its Mitigation”	02 Nov 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division
<i>Knowledge Sharing “Karakteristik Kualitas Kayu JPP dan Pengolahannya”</i>	Knowledge Sharing “Characteristics of JPP Wood Quality and Its Processing”	10 Nov 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division
Sosialisasi “Juknis Penyusunan KPI, Proses Manajemen Risiko, dan Agregasi Taksonomi Risiko Portofolio BUMN”	Socialization of “Technical Guidelines for Preparing KPIs, Risk Management Process, and Aggregation of BUMN Portfolio Risk Taxonomy”	14 Nov 2023	Segenap OPR Perusahaan BUMN (Dewas, Direksi, Divisi MR, Kepala SPI)/ All OPR of SoE Companies (Board of Supervisors, Board of Directors, MR Division, Head of SPI)
Webinar ISO 27001 Awareness	ISO 27001 Awareness Webinar	13 Des 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division
Sosialisasi “Perdir 13 Tahun 2023 tentang Kemitraan Perhutani”	Socialization of “Perdir 13 of 2023 concerning Perhutani Partnership”	19 Des 2023	KSPI, Plt Transformasi, Seg. Divisi/ KSPI, Acting Transformation, Division Seg.
Anti Korupsi Sedunia 2023: “Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”	Worldwide Anti-Corruption 2023: “Synergy to Eradicate Corruption for Advanced Indonesia”	20 Des 2023	Segenap karyawan beserta jajaran Divisi MR/ All employees and staff of the MR Division
Sosialisasi “Juknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) di Lingkungan BUMN”	Socialization of “Technical Guidelines for Risk Maturity Index Assessment in BUMN Environment”	20 Des 2023	Segenap Organ Pengelola Risiko BUMN (47 BUMN)/ All SoE Risk Management Organs (47 SoE)

Pelatihan dan Sertifikasi

Perusahaan terus mengembangkan dan memelihara kemampuan pekerjanya di bidang Manajemen Risiko. Perusahaan melakukan *upskilling training* dan diskusi manajemen. Adapun terkait dengan sertifikasi Manajemen Risiko, pada tahun 2023 Perusahaan menambah jumlah pekerja tersertifikasi. Saat ini total jumlah pekerja sertifikasi manajemen risiko adalah sebanyak 7 (tujuh) orang.

Training and Certification

The Company continues to develop and maintain the capabilities of its employees in the field of Risk Management. The Company conducts upskilling training and management discussions. Regarding Risk Management certification, in 2023 the Company will increase the number of certified employees. Currently, the total number of risk management certification employees is 7 (seven) people.

Sertifikasi Divisi Manajemen Risiko Perum Perhutani tahun 2023

Certification for the Risk Management Division of Perum Perhutani in 2023

Nama Name	Nama Sertifikasi Certification Title	Pelaksana Implementer
Noor Rochman	<i>Risk Management Training</i>	Konsultan MR
	Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	PT Samudera Karya Mustika
	<i>Knowing Your Risk, Creat Value to Achieve Strategic Goal</i>	PT MIM
Yopitasari	<i>Risk Management Training</i>	Konsultan MR
	Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	PT Samudera Karya Mustika
	<i>Knowing Your Risk, Creat Value to Achieve Strategic Goal</i>	PT MIM
Nanang Helmi	<i>Risk Management Training</i>	Konsultan MR
	Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	PT MIM
Moh Ariefin	<i>Risk Management Training</i>	Konsultan MR
	Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	PT MIM
Okny Nugraha	<i>Risk Management Training</i>	Konsultan MR
	Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	PT Samudera Karya Mustika
	<i>Knowing Your Risk, Creat Value to Achieve Strategic Goal</i>	PT MIM
Aris Saptono	<i>Risk Management Training</i>	Konsultan MR
	Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	PT Samudera Karya Mustika
	<i>Knowing Your Risk, Creat Value to Achieve Strategic Goal</i>	PT MIM
Justin Sianturi	<i>Knowing Your Risk, Creat Value to Achieve Strategic Goal</i>	PT MIM

Profil dan Mitigasi Risiko Korporat

Sebagai salah satu usaha memberikan kepastian kepada stakeholders bahwa Perhutani memahami sepenuhnya risiko yang ada di dalam Perusahaan dan risiko yang berada di bawah kendali, Perhutani selalu melakukan pengembangan dan pembaruan terhadap *risk appetite* dan *risk tolerance* yang akan menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan strategis Perusahaan.

Proses identifikasi risiko dilakukan pada setiap aktivitas dan/atau transaksi usaha dalam proses bisnis Perusahaan. Identifikasi harus dilakukan secara teliti agar risiko yang teridentifikasi merupakan risiko yang relevan dengan proses

Corporate Risk Profile and Mitigation

As an effort to provide certainty to stakeholders that Perhutani fully understands the risks within the Company and the risks that are under control, Perhutani always develops and updates its risk appetite and risk tolerance which will be taken into consideration in every strategic decision-making process of the Company.

The risk identification process is carried out on every activity and/or business transaction in the Company's business process. Identification must be carried out carefully so that the identified risks are risks that are relevant to Perhutani's business

bisnis Perhutani, termasuk risiko- risiko yang berada di luar kendali Perusahaan. Analisis risiko kemudian dilakukan untuk mengetahui besaran kemungkinan terjadinya risiko serta dampak yang ditimbulkan, baik yang bersifat kualitatif dan/atau kuantitatif. Selanjutnya, evaluasi risiko dilakukan untuk mengetahui keberterimaan risiko dengan memperhatikan hasil analisis risiko yang telah dilakukan. Evaluasi risiko dilakukan untuk mengetahui risiko yang memerlukan penanganan risiko berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan.

processes, including risks that are beyond the Company's control. Risk analysis is then carried out to determine the magnitude of the possibility of risk and the impacts caused, both qualitatively and/or quantitatively. Furthermore, risk evaluation is carried out to determine the acceptability of the risk by considering the results of the risk analysis that has been carried out. Risk evaluation is carried out to determine the risks that require risk handling based on the targets that have been set.

Profil Risiko Korporat

Corporate Risk Profile

Uraian Risiko Risk Description	Penyebab Cause	Mitigasi Mitigation
Pengurangan Lahan Hutan Produksi Perhutani. Reduction of Production Forest Land Perhutani	- Perubahan regulasi terbitnya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; - PP 23 tahun tentang Penyelenggaraan Kehutanan; - Permen LHK No. 7 tahun tentang Perencanaan Kehutanan, - Perubahan Peruntukan Kaw. Ht & Perubahan Fungsi Kaw. Ht serta Penggunaan Kaw. Ht.	- Aspek Operasional - Usul penataan hutan Jawa. Penyesuaian Tata Hutan dan revisi RPKH. Revisi scope sertifikasi pengelolaan hutan. - Aspek Finansial - Review RKAP dan RJPP serta keberlangsungan bisnis Perhutani. Penghitungan PBB, PPN, PSDH, gaji dan kewajiban lain bagi SDM, asset biologis dan tetap. Menyusun mekanisme penyerahan asset. - Aspek Organisasi - Pembahasan dg Kement BUMN dan LHK terkait dengan gaji dan pesangon.
Tidak tercapainya penjualan ekspor Gondorukem, Terpentin dan Derivate (GTD) Failure to achieve export sales of Gondorukem, Terpentine and Derivate (GTD)	- Fluktuasi harga internasional Kendala Pengapalan; Pengelolaan ketersediaan bahan baku getah pinus belum optimal; - Teknologi produksi derivat gondorukem perlu revitalisasi / peningkatan.	- Pengamatan/ Market itelligent harga Gondorukem, terptentin dan derivate; - Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan digital marketing. - Direct selling target 2022 sebesar 30%; - Pemenuhan bahan baku getah pinus sesuai dengan target yg ditetapkan.

Profil Risiko Korporat

Corporate Risk Profile

Uraian Risiko Risk Description	Penyebab Cause	Mitigasi Mitigation
Produksi Getah Tidak Tercapai Sap Production Not Achieved	Produksi getah pinus ditentukan oleh kondisi, cuaca dan aktivitas penjadap dalam pembaharuan quare. Pine resin production is determined by conditions, weather and tapper activity in quare renewal.	1. Pemberian insentif. 2. Pemberian reward. 3. Mengatur luas wilayah sadapan 4. Mendatangkan penjadap dari luar daerah. 5. Membentuk regu kerja mobile di lokasi-lokasi sulit. 6. Mencukupi kebutuhan uang kerja dan sarpra sadapan. 7. Memperbaiki prasarana jalan angkutan 8. Mengaktifkan Tim PPIC (Planning, Production Inventory Control) di tingkat KPH.
Produktivitas Karyawan tidak tercapai. Employee Productivity Not Achieved.	Pendapatan berkurang akibat berkurangnya Kawasan yang dikelola sebagai dampak penetapan KHDPK. Income decreases due to the reduction in managed areas as a result of the KHDPK determination.	1. Rekrutmen secara parsial diprioritaskan untuk memperkuat sektor industri hilir dan supporting digitalisasi. 2. Rekrutmen tetap selalu memperhatikan laju pendapatan. 3. Reposisi Karyawan terdampak KHDPK ke satker lain. 4. Penugasan khusus kepada karyawan terdampak KHDPK. dalam konteks model bisnis baru di satker terdampak KHDPK. 5. Merger satker-satker terdampak yang tidak cukup luas untuk tetap bertahan menjadi satker sendiri.

Pemetaan Risiko Korporat

Untuk memberikan gambaran secara utuh hasil identifikasi risiko korporat maka dilakukan pemetaan risiko berdasarkan dampak dan kemungkinan risiko tersebut terjadi. Hasil pemetaan risiko sebagai berikut:

Corporate Risk Mapping

To provide a complete picture of the results of corporate risk identification, risk mapping is carried out based on the impact and possibility of the risk occurring. The results of the risk mapping are as follows:

Setiap risiko yang telah dipetakan akan dirancang upaya penyelesaian (mitigasi) risiko sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan risiko yang muncul dalam proses bisnis di masa yang akan datang. Berdasarkan pengelompokan dan peta risiko Perusahaan di atas, Perhutani telah melakukan mitigasi guna mengurangi dampak ataupun kerugian yang dapat mengganggu kinerja Perusahaan.

Each risk that has been mapped will be designed to resolve (mitigate) the risk as a form of anticipation of possible risks that arise in the business process in the future. Based on the grouping and map of the Company's risks above, Perhutani has carried out mitigation to reduce the impact or losses that can disrupt the Company's performance.

		RISIKO INHEREN					
PROBABILITY	Sangat Tinggi Very High	5			27, 32, 8	25, 64	
	Tinggi High	4		85	1, 3, 28, 95, 96, 97, 118, 143, 145, 148	62, 67, 72,88, 122, 124	63, 70, 73, 75
	Sedang Average	3	138, 139	18, 19, 35, 125, 144	4, 6, 26, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 60, 61, 66, 69, 79, 82, 84, 87, 89, 91, 94, 104,115, 117, 130, 132, 136, 140	2, 38, 40, 42, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 68, 74, 76, 81, 83, 90, 120, 121, 126, 127, 128, 129, 131	30, 33, 71, 98, 99, 100, 102, 103, 116
	Rendah Low	2		9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20,105, 106, 107, 109,110,113, 114	5, 7,8,78.93. 101, 111, 112, 119, 134, 135, 137, 141, 142, 146, 147	21, 22, 23, 24, 86, 92, 123	133
	Sangat Rendah Very Low	1		77, 108		36	34
		1	2	3	4	5	
SKALA		Sangat Rendah Very Low	Rendah Low	Sedang Average	Tinggi High	Sangat Tinggi Very High	
IMPACT							
		Sangat Tinggi Very High	Tinggi High	Sedang Average	Rendah Low		

Level Maturitas Manajemen Risiko

Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Tahun 2023

Pada tahun 2023, Perhutani melaksanakan penilaian tingkat kematangan manajemen risiko yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mengukur sejauh mana sistem manajemen risiko internal telah diterapkan secara efektif dalam perusahaan. Proses penilaian dilakukan menggunakan metode yang komprehensif, termasuk tinjauan dokumen, wawancara, dan observasi.

Penilaian ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, pada Pasal 74 yang menjelaskan dimensi penilaian Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index). Dimensi penilaian tersebut terdiri dari lima unsur utama. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, masing-masing dimensi memperoleh nilai sebagai berikut:

- **Budaya dan Kapabilitas Risiko:** Nilai 4,0 – Kategori *Strong Practice*
- **Organisasi dan Tata Kelola Risiko:** Nilai 4,0 – Kategori *Strong Practice*
- **Kerangka Risiko dan Kepatuhan:** Nilai 3,7 – Kategori *Strong Practice*
- **Proses dan Kontrol Risiko:** Nilai 4,0 – Kategori *Strong Practice*
- **Model, Data, dan Teknologi Risiko:** Nilai 3,3 – Kategori *Strong Practice*

Secara keseluruhan, tingkat maturitas manajemen risiko Perhutani berada pada kategori *Strong Practice* dengan nilai rata-rata 3,8. Nilai ini menunjukkan bahwa Perhutani telah mengimplementasikan praktik manajemen risiko dengan baik dan efektif, yang mencakup budaya dan kapabilitas risiko yang kuat, organisasi dan tata kelola risiko yang baik, kerangka kerja dan kepatuhan yang memadai, serta proses dan kontrol risiko yang kuat. Meskipun demikian, terdapat area seperti model, data, dan teknologi risiko yang masih dapat ditingkatkan untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi.

Dengan hasil penilaian ini, Perhutani menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola risiko dan terus membangun kapasitas manajemen risiko yang lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan. Implementasi manajemen risiko

Risk Management Maturity Level

Implementation of Risk Management Maturity Level Assessment in 2023

In 2023, Perhutani conducted a risk management maturity level assessment which aims to evaluate and measure the extent to which the internal risk management system has been implemented effectively in the company. The assessment process was carried out using a comprehensive method, including document review, interviews, and observations.

This assessment was carried out based on the Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, in Article 74 which explains the dimensions of the Risk Maturity Index assessment. The assessment dimensions consist of five main elements. Based on the assessment carried out, each dimension received the following values:

- **Risk Culture and Capabilities:** Score 4.0 – Strong Practice Category
- **Risk Organization and Governance:** Score 4.0 – Strong Practice Category
- **Risk and Compliance Framework:** Score 3.7 – Strong Practice Category
- **Risk Processes and Controls:** Score 4.0 – Strong Practice Category
- **Risk Models, Data, and Technology:** Score 3.3 – Strong Practice Category

Overall, Perhutani's risk management maturity level is in the Strong Practice category with an average value of 3.8. This value indicates that Perhutani has implemented risk management practices well and effectively, which include a strong risk culture and capability, good risk organization and governance, adequate framework and compliance, and strong risk processes and controls. However, there are areas such as risk models, data, and technology that can still be improved to achieve a higher level of maturity.

With the results of this assessment, Perhutani shows a strong commitment to managing risk and continues to build a more resilient and adaptive risk management capacity to change. The implementation of effective risk management is an

yang efektif merupakan langkah penting dalam mendukung keberlangsungan operasi dan mencapai tujuan strategis perusahaan.

Hasil Review Atas Pelaksanaan Manajemen Risiko

Untuk memastikan keefektifan pengelolaan risiko sebagai enabler dalam pencapaian sasaran perusahaan, maka perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan penerapan manajemen risiko. Sasaran dilakukannya pemantauan dan peninjauan tersebut adalah untuk: (1) Mengevaluasi pemenuhan kaidah, kebijakan dan ketentuan pengelolaan risiko; (2) Mengukur keefektifan sistem pengelolaan risiko; (3) Alat manajemen untuk mensinkronisasikan ERM sebagai *enabler* dari kegiatan-kegiatan perusahaan; (4) Identifikasi langkah-langkah perbaikan secara bertahap Pemantauan.

Pengawasan Aktif Dewan Pengawas dan Direksi

Pengelolaan Manajemen Risiko dilakukan melalui pengawasan aktif oleh Dewan Pengawas dan Direksi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Organ Dewan Pengawas dan Direksi dibantu beberapa komite dalam menjalankan tugas dan aktivitas Perusahaan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Serta Penetapan Limit Risiko

Dalam menjalankan penerapan manajemen risiko yang sehat diperlukan kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang baik. Menindaklanjuti hal tersebut, Perhutani telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko sebagai Kebijakan tertinggi dalam penerapan Manajemen Risiko dengan *framework* mencakup seluruh aktivitas dalam penerapan Manajemen Risiko Perusahaan.

Pemetaan kebijakan umum manajemen risiko digambarkan mulai dari strategi manajemen risiko hingga pengelolaan risiko. Dalam menjaga Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko, maka dilakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan internal dan dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulasi dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan untuk meningkatkan

important step in supporting the sustainability of operations and achieving the company's strategic goals.

Results of Risk Management Implementation Review

To ensure the effectiveness of risk management as an enabler in achieving company targets, it is necessary to monitor and review the implementation of risk management. The objectives of monitoring and review are to: (1) Evaluate the fulfillment of risk management rules, policies and provisions; (2) Measure the effectiveness of the risk management system; (3) Management tools to synchronize ERM as an enabler of company activities; (4) Identify gradual improvement steps Monitoring.

Active Supervision of the Supervisory Board and Board of Directors

Risk Management is carried out through active supervision by the Supervisory Board and Board of Directors and the Risk Management Work Unit.

The Supervisory Board and Board of Directors are assisted by several committees in carrying out the Company's duties and activities in accordance with applicable regulatory provisions.

Adequacy of Risk Management Policies and Procedures and Determination of Risk Limits

In implementing healthy risk management, adequate risk management policies and procedures are required. Following up on this, Perhutani has prepared a Risk Management Policy as the highest policy in implementing Risk Management with a framework covering all activities in implementing Company Risk Management.

The mapping of general risk management policies is described starting from risk management strategies to risk management. In maintaining the adequacy of risk management policies and procedures and the determination of risk limits, a review of internal policies is carried out and carried out to comply with the latest provisions of the regulations by conducting gap analysis and accommodating best practices that are commonly used to improve the quality of risk management

kualitas penerapan manajemen risiko. *Review* terhadap kebijakan internal telah dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh Dewan Pengawas dan Direksi dengan menyempurnakan kebijakan manajemen risiko.

implementation. Reviews of internal policies have been carried out periodically at least once a year by the Board of Commissioners and Board of Directors by perfecting risk management policies.

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Serta Penetapan Limit Risiko

Adequacy of Risk Management Policies and Procedures and Determination of Risk Limits

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Serta Penetapan Limit Risiko

Adequacy of Risk Management Policies and Procedures and Determination of Risk Limits

Nomor Surat Letter Number	Perihal Surat Regarding the Letter
S-01/DWAS-PHT/2022	Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap di Taman Wisata Alam (TWA) Carita Approval of Write-off and Transfer of Fixed Assets in Carita Nature Tourism Park (TWA)
S-05/DWAS-PHT/2022	Permohonan Persetujuan Perjanjian KHDTK Cemoro Modang Request for Approval of Cemoro Modang KHDTK Agreement
S-17/DWAS-PHT/2022	Usul Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap di WW Penggaron KPH Semarang Proposal for Write-off and Transfer of Fixed Assets in WW Penggaron KPH Semarang
S-19/DWAS-PHT/2022	Usul Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Tanah Perusahaan di KPH Surakarta Proposal for Write-off and Transfer of Fixed Assets of Company Land in KPH Surakarta
S-40/DWAS-PHT/2022	Tanggapan atas pemberian Pinjaman Kepada Anak Perusahaan Response to the Provision of Loans to Subsidiaries
S-42/DWAS-PHT/2022	Persetujuan Dewan Pengawas Atas Rencana Kerja Sama Keamanan Siber Antara Perum Perhutani dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Approval of the Supervisory Board on the Cyber Security Cooperation Plan between Perum Perhutani and the National Cyber and Crypto Agency (BSSN)
S-47/DWAS-PHT/2022	Usulan Penghapusbukuan Aset Tetap di WW Penggaron KPH Semarang Proposal for Write-off of Fixed Assets in WW Penggaron KPH Semarang
S-53/DWAS-PHT/2022	Permintaan Penjelasan ataupun Kronologis atas Transaksi Peminjaman serta Pembelian Mesin Chipper Bekas Request for Explanation or Chronology of the Loan Transaction and Purchase of Used Chipper Machines
S-54/DWAS-PHT/2022	Tanggapan atas Permintaan Persetujuan Dewan Pengawas atas Perpanjangan Kerja Sama Pengembangan Orchid Forest Cikole dengan PT Jala Energi Response to the Request for Approval of the Supervisory Board on the Extension of the Orchid Forest Cikole Development Cooperation with PT Jala Energi
S-55/DWAS-PHT/2022	Persetujuan Komisaris PT. Inhutani I, PT Inhutani V dan PT Palawi Risorsis Pasca Penggabungan dan <i>Spin Off Bisnis</i> Approval of the Commissioner of PT. Inhutani I, PT Inhutani V and PT Palawi Risorsis Post Merger and Business Spin Off
S-62/DWAS-PHT/2022	Permohonan Persetujuan Menganggunkan Aset Tetap untuk Kredit Jangka Pendek Application for Approval to Pledge Fixed Assets for Short-Term Credit

Akuntan Publik

Public Accountant

Dalam rangka menjaga independensi dalam aspek keuangan, Perhutani telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja (EY) sebagai auditor eksternal untuk tahun buku 2023. Penunjukan ini bertujuan memastikan bahwa pencatatan akuntansi perusahaan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK), dan bahwa laporan keuangan yang disajikan mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha secara wajar.

Akuntan publik sebagai organ eksternal perusahaan memiliki fungsi penting dalam memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Perhutani terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Pada tahun 2023, audit laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh Damestar Hutagalung dari KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (EY). Audit ini mencakup laporan keuangan konsolidasi Perum Perhutani dan mendapatkan opini wajar dalam semua hal yang material.

Periode Auditor Eksternal dan Besaran Biaya Jasa

Audit laporan keuangan perusahaan tahun 2023 dilakukan oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (EY) :

In order to maintain independence in financial aspects, Perhutani has appointed Public Accounting Firm (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja (EY) as an external auditor for the 2023 financial year. This appointment aims to ensure that the company's accounting records comply with the provisions of the Statement of Accounting and Financial Standards (PSAK), and that the financial statements presented fairly reflect the financial position and business results.

Public accountants as external organs of the company have an important function in providing opinions regarding the conformity of the presentation of Perhutani's financial statements to the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia. In 2023, the audit of the company's financial statements was conducted by Damestar Hutagalung from KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (EY). This audit covers the consolidated financial statements of Perum Perhutani and obtains a fair opinion in all material respects.

External Auditor Period and Amount of Service Fee

The audit of the company's financial statements in 2023 was conducted by KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (EY):

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Perhutani

External Auditor Period and Amount of Service Fee

Tahun Buku Fiscal Year	Akuntan Accountant	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Ruang Lingkup Audit Scope of Audit	Opini Publik Public Opinion	Biaya Audit Audit Fee
2023	Damestar Hutagalung	KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (EY)	Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perum Perhutani Audit of Consolidated Financial Statements of Perum Perhutani	Wajar dalam hal yang material Fair in material respects	5.293.028.340
2022	Damestar Hutagalung	KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (EY)	Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perum Perhutani Audit of Consolidated Financial Statements of Perum Perhutani	Wajar dalam hal yang material Fair in material respects	4.810.000.000

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Perhutani

Annual Auditor Period and Amount of Service Fee

Tahun Buku Fiscal Year	Akuntan Accountant	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Ruang Lingkup Audit Scope of Audit	Opini Publik Public Opinion	Biaya Audit Audit Fee
2021	Damestar Hutagalung	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perum Perhutani Audit of Consolidated Financial Statements of Perum Perhutani	Wajar dalam hal yang material Fair in material respects	3.810.000.000
2020	Yusron, S.E., Ak., CPA (NIAP 0243)	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC)	Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perum Perhutani Audit of Consolidated Financial Statements of Perum Perhutani	Wajar dalam hal yang material Fair in material respects	4.904.900.000
2019	Yusron, S.E., Ak., CPA (NIAP 0243)	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC)	Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perum Perhutani Audit of Consolidated Financial Statements of Perum Perhutani	Wajar dalam hal yang material Fair in material respects	2.475.000.000

Ruang Lingkup Pekerjaan Akuntan Publik Tahun 2023

Ruang lingkup pekerjaan akuntan publik tahun 2023 meliputi pelaksanaan audit umum terhadap laporan keuangan konsolidasi, review atas laporan hasil kinerja untuk tahun buku 2022 sesuai dengan peraturan BUMN, serta audit kepatuhan tahunan atas peraturan dan pengendalian internal yang diterapkan perusahaan hingga periode berakhir 31 Desember 2022, serta penilaian tingkat kesehatan perusahaan.

Efektivitas Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik

Efektivitas pelaksanaan audit oleh akuntan publik diawasi oleh Komite Audit yang berkoordinasi dengan Satuan Pengendalian Internal. Komite Audit dan SPI melakukan kajian untuk memastikan bahwa seluruh temuan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dan meningkatkan kinerja keuangan serta operasional perusahaan. Perhutani berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap temuan audit oleh KAP, sehingga dapat menekan temuan negatif pada tahun-tahun berikutnya dan terus meningkatkan efektivitas serta efisiensi proses audit.

Scope of Public Accountant Work in 2023

The scope of work of public accountants in 2023 includes conducting general audits of consolidated financial statements, reviewing performance reports for the 2022 financial year in accordance with BUMN regulations, as well as annual compliance audits of regulations and internal controls implemented by the company until the period ending December 31, 2021, as well as assessing the company's health level.

Effectiveness of Audit Implementation by Public Accountants

The effectiveness of audit implementation by public accountants is supervised by the Audit Committee in coordination with the Internal Control Unit. The Audit Committee and SPI conduct studies to ensure that all findings can be followed up in accordance with the assigned authority and improve the company's financial and operational performance. Perhutani is committed to following up on every audit finding by KAP, so that it can reduce negative findings in the following years and continue to improve the effectiveness and efficiency of the audit process.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access on Company Information and Data

Perhutani menunjukkan komitmennya terhadap prinsip keterbukaan informasi sebagai bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/ GCG) dan Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia. Implementasi asas transparansi dijalankan dengan menyediakan data dan informasi yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan.

Untuk memudahkan akses informasi, Perhutani menyediakan berbagai sarana komunikasi bagi pemangku kepentingan yang berkepentingan mendapatkan informasi terkait perusahaan yang tidak bersifat rahasia. Di lingkungan internal, sarana komunikasi seperti intranet, buletin internal, e-mail, dan media lainnya digunakan untuk menyebarkan informasi secara efektif.

Bagi masyarakat umum, Perhutani menyediakan situs web www.perhutani.co.id yang memuat informasi lengkap mengenai bisnis perusahaan, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial, kesempatan kerja, serta laman "Kontak" untuk permintaan informasi, penyampaian pendapat, kritik, keluhan, maupun pertanyaan. Selain itu, pemangku kepentingan juga dapat menghubungi Kantor Pusat Perum Perhutani :

Kantor Pusat Perum Perhutani

Graha Perhutani
Jl. TB Simatupang No.22, RT.1/RW.8 Jati Padang,
Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
Tel. (021) 7805730 (hunting)
email: humas@perhutani.co.id
www.perumperhutani.co.id

Pengelolaan Inhouse Magazine

Perhutani juga mengelola Majalah Duta Rimba sebagai *inhouse magazine* yang diterbitkan secara resmi. Majalah ini berfungsi sebagai sarana publikasi program, kebijakan perusahaan, promosi produk, dan penyebaran informasi antara Perhutani dan *stakeholders*.

Perhutani demonstrates its commitment to the principle of openness of information as part of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and the Indonesian Corporate Governance Roadmap. The implementation of the principle of transparency is carried out by providing data and information that can be accessed by stakeholders.

To facilitate access to information, Perhutani provides various means of communication for stakeholders who are interested in obtaining information related to the company that is not confidential. In the internal environment, means of communication such as intranet, internal bulletins, e-mail, and other media are used to disseminate information effectively.

For the general public, Perhutani provides a website www.perhutani.co.id which contains complete information about the company's business, corporate governance, social responsibility, job opportunities, and a "Contact" page for requests for information, submission of opinions, criticism, complaints, or questions. In addition, stakeholders can also contact the Head Office of Perum Perhutani

Head Office of Perum Perhutani

Graha Perhutani
Jl. TB Simatupang No.22, RT.1/RW.8 Jati Padang,
Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
Tel. (021) 7805730 (hunting)
email: humas@perhutani.co.id
www.perumperhutani.co.id

Inhouse Magazine Management

Perhutani also manages Duta Rimba Magazine as an inhouse magazine that is officially published. This magazine functions as a means of publishing programs, company policies, product promotions, and disseminating information between Perhutani and stakeholders.

Kontak Informasi

Untuk menjamin akses informasi publik, Perhutani menyediakan ruang layanan informasi di Kantor Pusat serta saluran e-mail dan situs web. Pelanggan juga dapat menghubungi *Call Center* di nomor 1500-235. Setiap tahun, Perhutani menyusun Annual Report yang menyajikan ringkasan kinerja perusahaan baik dari segi keuangan maupun operasional, termasuk profil perusahaan dan implementasi tata kelola perusahaan serta tanggung jawab sosial perusahaan. Laporan ini disampaikan kepada pemilik modal, regulator, organisasi massa, media massa, dan masyarakat.

Annual Report

Annual Report disusun setiap tahunnya yang memaparkan ringkasan kinerja Perusahaan baik keuangan maupun operasional, Profil Perusahaan dan Implementasi Tata Kelola Perusahaan termasuk Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Annual Report ini akan disampaikan kepada Pemilik Modal, regulator, organisasi massa, media massa dan masyarakat.

Forum Komunikasi Internal

Untuk komunikasi internal, Perhutani memiliki forum-forum seperti *family gathering*, pertemuan bulanan, dan morning briefing yang dilakukan secara berkala. Semua upaya ini bertujuan memberikan informasi yang jelas dan terpercaya kepada semua pemangku kepentingan, serta menjaga komunikasi yang efektif dan transparan di seluruh lapisan perusahaan.

Selain saluran informasi digital, Perhutani juga aktif menggunakan media eksternal untuk menyampaikan informasi perusahaan kepada publik. Perhutani secara teratur melaporkan informasi yang relevan kepada pemilik modal dan Dewan Pengawas melalui laporan manajemen bulanan, triwulanan, dan tahunan sebelum disampaikan kepada pemilik modal.

Akses Informasi

Penyampaian informasi seluas-luasnya bagi para pemangku kepentingan dan investor disediakan melalui situs di www.perhutani.co.id. Informasi yang sama juga bisa diperoleh dari Portal BUMN <http://www.bumn.go.id/perhutani> serta majalah internal perusahaan DUTA RIMBA yang diterbitkan dua bulan sekali dan dapat diakses secara digital di situs web. Perhutani juga memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan pemangku

Contact Information

To ensure public access to information, Perhutani provides an information service room at the Head Office as well as an e-mail channel and website. Customers can also contact the Call Center at 1500-235. Every year, Perhutani prepares an Annual Report that presents a summary of the company's performance in terms of both finance and operations, including the company profile and implementation of corporate governance and corporate social responsibility. This report is submitted to capital owners, regulators, mass organizations, mass media, and the public.

Annual Report

Annual Report is prepared annually which presents a summary of the Company's performance both financially and operationally, Company Profile and Implementation of Corporate Governance including Corporate Social Responsibility Activities. This Annual Report will be submitted to Capital Owners, regulators, mass organizations, mass media and the public.

Internal Communication Forum

For internal communication, Perhutani has forums such as family gatherings, monthly meetings, and morning briefings which are held periodically. All of these efforts aim to provide clear and reliable information to all stakeholders, as well as maintain effective and transparent communication throughout the company.

In addition to digital information channels, Perhutani also actively uses external media to convey company information to the public. Perhutani regularly reports relevant information to capital owners and the Board of Supervisors through monthly, quarterly, and annual management reports before being submitted to capital owners.

Access to Information

The widest possible information dissemination for stakeholders and investors is provided through the website at www.perhutani.co.id. The same information can also be obtained from the BUMN Portal <http://www.bumn.go.id/perhutani> and the company's internal magazine DUTA RIMBA which is published every two months and can be accessed digitally on the HIGO website and application. Perhutani also utilizes social media to interact with

kepentingan, yaitu:

Facebook Fan Page : Perum Perhutani
X : @PerumPerhutani
Instagram : Perum Perhutani
Youtube : Perum Perhutani

stakeholders, namely:

Facebook Fan Page : Perum Perhutani
X : @PerumPerhutani
Instagram : Perum Perhutani
Youtube : Perum Perhutani

Keterangan Description		Satuan Unit	2023	2022
Website Korporat/ Corporate Website				
Suara Rimba		Berita/ News	3.127	2.856
Press Release		Berita/ News	41	49
Berita Website		Berita/ News	294	452
Portal BUMN		Berita/ News	64	92
Website Visitors		Views	503.993	281.042
Sosial Media/ Social Media				
Facebook		Followers	12.349	11.766
X (Twitter)		Followers	7.042	6.591
Instagram		Followers	52.369	40.253
Youtube		Subscriber	4.993	3.978
Tiktok		Followers	13.412	10.200
Inhouse Magazine/ Inhouse Magazine				
Majalah Duta Rimba	Duta Rimba Magazine	Edisi/ Edition	6	5
Media Monitoring (Media Massa)/ Media Monitoring (Mass Media)				
Berita Positif	Positive News	Berita/ News	8.166	6.054
Berita Netral	Neutral News	Berita/ News	1.310	1.142
Berita Negatif	Negative News	Berita/ News	342	237
Email Korporat/ Corporate Email				
Email Masuk	Inbox Email	Email	2.536	3.295
Pelayanan Informasi Publik/ Pelayanan Informasi Publik				
Diberikan	Granted	Permohonan/ Request	24	15
Diberikan Sebagian	Partially Granted	Permohonan / Request	6	1
Ditolak (Dikecualikan)	Rejected (Excluded)	Permohonan / Request	12	13
Dalam Proses	In Process	Permohonan / Request	3	-
Dibatalkan	Cancelled	Permohonan / Request	-	1

Permasalahan Hukum

Litigation

Permasalahan hukum yang terjadi di Perhutani untuk periode Januari – Desember 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Legal issues that occurred in Perhutani for the period January - December 2023 can be seen as follows

Permasalahan Hukum

Legal Issues

Status Status	Perdata Civil	Pidana Criminal	Tata Usaha Negara State Administrative
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Resolved and have permanent legal force	6	0	0
Dalam Proses Penyelesaian In Settlement Process	5	0	0
Jumlah Total	11	0	0

Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan

Bahwa terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perusahaan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap operasional Perusahaan, karena Perusahaan telah melakukan upaya hukum dan mitigasi yang diperlukan.

Impact on Company Conditions

That the legal issues faced by the Company do not have a significant impact on the Company's operations, because the Company has made the necessary legal and mitigation efforts.

Daftar Penanganan Perkara Perum Perhutani Tahun 2023

List of Handling of Perum Perhutani

No.	No. Perkara Case No.	Penggugat Plaintiff	Tergugat Defendant	Objek Gugatan Object of the Lawsuit	Keterangan Description	Status Status
SEDANG DALAM PROSES PENYELESAIAN/ SEDANG DALAM PROSES PENYELESAIAN						
1.	Perdata No. 735/Pdt.G/2021/PN.Jkt-Sel	PT Visi Investama Properti (Mahdi Hidayatullah)	Perum Perhutani	Wanprestasi	Keterlambatan pembayaran Tahap III atas jual beli Gedung Zuria Tower (Graha Perhutani) berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 88 tanggal 26 Desember 2019. Terhadap Perkara tersebut sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada intinya Perum Perhutani kalah dan membayar denda keterlambatan. Dalam Penanganan Perkara ini menggunakan Lawyer Eksternal "SAFIR LAW".	Dalam Perkara ini Perum Perhutani mengajukan Upaya Hukum Kasasi, sehingga penanganan perkara saat ini masih dalam proses di Mahkamah Agung.

Daftar Penanganan Perkara Perum Perhutani Tahun 2023

List of Handling of Perum Perhutani

No.	No. Perkara Case No.	Penggugat Plaintiff	Tergugat Defendant	Objek Gugatan Object of the Lawsuit	Keterangan Description	Status Status
	Perdata No. 735/Pdt.G/2021/PN.Jkt-Sel	PT Visi Investama Properti (Mahdi Hidayatullah)	Perum Perhutani	Wanprestasi	Late payment of Phase III for the sale and purchase of the Zuria Tower Building (Graha Perhutani) based on Deed of Agreement Number 88 dated December 26, 2019. Regarding the case, there has been a Decision of the South Jakarta District Court which in essence Perum Perhutani lost and paid a fine for the delay. In handling this case, an External Lawyer "SAFIR LAW" was used.	In this case, Perum Perhutani filed a cassation appeal, so that the handling of the case is currently still in process at the Supreme Court.
2.	Perdata No. 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl	Yudi	Perum Perhutani	Perbuatan Melawan Hukum	Klaim Kawasan Hutan dengan total seluas 19.685 M ² .	Dalam Perkara ini Penggugat telah menyatakan upaya hukum Kasasi, sehingga penanganan perkara saat ini masih dalam proses di Mahkamah Agung.
	Perdata No. 25/Pdt.G/2022/PN.Bkl	Yudi	Perum Perhutani	Unlawful Acts	Forest Area Claims with a total area of 19,685 M2.	In this case, Perum Perhutani filed a cassation appeal, so that the handling of the case is currently still in process at the Supreme Court.
3.	Perdata No. 1/Pdt.bth/2023/PN.Slw	Sadirin B Rakhma, dkk.	Perum Perhutani	Perbuatan Melawan Hukum	Para Pelawan melakukan perlawanan terhadap Putusan Nomor 27 Pdt /G/ 2014 /PN.Slw jo. 476/Pdt/2019/ PT.Smg jo.1954/K/Pdt/2016 yang mana sebelumnya sudah pernah dilakukan upaya hukum luar biasa perlawanan oleh beberapa pihak dalam gugatan ini dan telah diputus dengan Putusan Nomor 48/Pdt. Bth/2019/PN.Slw jo. 368/ PDT/2020/PT SMG jo. 3258 K/PDT/2021.	Dalam Perkara ini Para Pelawan mengajukan Upaya Hukum Banding, sehingga penanganan perkara saat ini masih dalam proses di Pengadilan Tinggi Semarang.
	Perdata No. 1/Pdt.bth/2023/PN.Slw	Sadirin B Rakhma, dkk.	Perum Perhutani	Unlawful Acts	The Opponents are resisting Decision Number 27/ Pdt/G/2014/PN.Slw jo. 476/Pdt/2019/PT.Smg jo. 1954/K/Pdt/2016 which previously had been carried out extraordinary legal efforts of resistance by several parties in this lawsuit and has been decided by Decision Number 48/Pdt.Bth/2019/ PN.Slw jo. 368/PDT/2020/PT SMG jo. 3258 K/PDT/2021.	In this case, the Defendants filed an Appeal, so that the case is currently still in process at the Semarang High Court.
4.	Perdata No. 10/Pdt.G/2023 /PN.Smd	Juned Permana	Perum Perhutani	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat bernama JUNED PERMANA dalam gugatannya mengaku sebagai Ahli Waris dari KH Mukibat yang mempunyai tanah di Blok Satim Dusun Cikuleu, Desa Sukarjaya dahulu Desa Ujung Jaya, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat Persil Nomor : 175 Kelas V seluas	Dalam Perkara ini Penggugat mengajukan Upaya Hukum Banding, sehingga penanganan perkara saat ini masih dalam proses di Pengadilan Tinggi Bandung.

Daftar Penanganan Perkara Perum Perhutani Tahun 2023

List of Handling of Perum Perhutani

No.	No. Perkara Case No.	Penggugat Plaintiff	Tergugat Defendant	Objek Gugatan Object of the Lawsuit	Keterangan Description	Status Status
	Perdata No. 10/Pdt.G/2023/PN.Smd	Juned Permana	Perum Perhutani	Unlawful Acts	±22 Ha. Lokasi tersebut dipergunakan untuk Jalan Tol Cisumdawu oleh Kementerian PUPR sebagai Proyek Strategis Nasional. Dengan dipergunakannya tanah tersebut, JUNED PERMANA menggugat Pihak-Pihak yang berkaitan salah satunya Perum Perhutani karena dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum. The plaintiff named JUNED PERMANA in his lawsuit claims to be the heir of KH Mukibat who owns land in the Satim Block, Cikuleu Hamlet, Sukarjaya Village, formerly Ujung Jaya Village, Tomo District, Sumedang Regency, West Java Province, Plot Number: 175 Class V with an area of ±22 Ha. The location is used for the Cisumdawu Toll Road by the PUPR Ministry as a National Strategic Project. With the use of the land, JUNED PERMANA sued the related parties, one of which was Perum Perhutani, because it was considered to have committed an unlawful act.	In this case, the Plaintiff filed an Appeal, so that the case is currently still in process at the Bandung High Court.
5.	Perdata No.42/Pdt.G/2023/PN.Kwg	Ara, dkk.	Perum Perhutani	Perbuatan Melawan Hukum	Klaim Kawasan Hutan. 1. Penggugat I menyatakan bahwa sebidang tanah seluas ± 41.100 m2 yang terletak di blok cijengkol, Desa Mulyasari, Kec. Ciampel, Kab. Karawang adalah milik Penggugat I. 2. Penggugat II menyatakan bahwa sebidang tanah seluas ± 25.925 m2 yang terletak di blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kec. Ciampel, Kab. Karawang adalah milik Penggugat II. 3. Penggugat III menyatakan bahwa sebidang tanah seluas ±14.260 m2 yang terletak di blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kec. Ciampel, Kab. Karawang adalah milik Penggugat III. 4. Penggugat IV menyatakan bahwa sebidang tanah seluas ± 12.270 m2 yang terletak di blok Cijengkol, Desa Mulyasari, Kec. Ciampel, Kab. Karawang adalah milik Penggugat IV.	Dalam Perkara ini Para Penggugat mengajukan Upaya Hukum Banding, sehingga penanganan perkara saat ini masih dalam proses di Pengadilan Tinggi Bandung.
	Perdata No.42/Pdt.G/2023/PN.Kwg	Ara, dkk.	Perum Perhutani	Unlawful Acts	Forest Area Claim. 1. Plaintiff I stated that a plot of land with an area of ± 41,100 m2 located in the Cijengkol block, Mulyasari Village, Ciampel District, Karawang Regency belongs to Plaintiff I. 2. Plaintiff II stated that a plot of land with an area of ± 25,925 m2 located in the Cijengkol block, Mulyasari Village, Ciampel District, Karawang Regency belongs to Plaintiff II. 3. Plaintiff III stated that a plot of land with an area of ± 14,260 m2 located in the Cijengkol block, Mulyasari Village, Ciampel District, Karawang Regency belongs to Plaintiff III.	In this case, the Plaintiffs filed an Appeal, so that the case is currently still in process at the Bandung High Court.

Daftar Penanganan Perkara Perum Perhutani Tahun 2023

List of Handling of Perum Perhutani

No.	No. Perkara Case No.	Penggugat Plaintiff	Tergugat Defendant	Objek Gugatan Object of the Lawsuit	Keterangan Description	Status Status
					4. Plaintiff IV stated that a plot of land with an area of ± 12,270 m2 located in the Cijengkol block, Mulyasari Village, Ciampel District, Karawang Regency belongs to Plaintiff Karawang is owned by Plaintiff IV.	
SELESAI (INKRACHT)/ COMPLETED (INKRACHT)						
6.	Perdata No.67/Pdt.G/2021/PN.Kwg	Ara, dkk.	Perum Perhutani	Perbuatan Melawan Hukum	Klaim Kawasan Hutan. Penggugat I menyatakan bahwa sebidang tanah seluas ± 41.100 m2 yang terletak di blok cijengkol, Desa Mulyasari, Kec. Ciampel, Kab. Karawang adalah milik Penggugat I. Penggugat II menyatakan bahwa sebidang tanah seluas ± 25.925 m2 yang terletak di blok cijengkol, Desa Mulyasari, Kec. Ciampel, Kab. Karawang adalah milik Penggugat II. Penggugat III menyatakan bahwa sebidang tanah seluas ±14.260 m2 yang terletak di blok cijengkol, Desa Mulyasari, Kec. Ciampel, Kab. Karawang adalah milik Penggugat III. Penggugat IV menyatakan bahwa sebidang tanah seluas ± 12.270 m2 yang terletak di blok cijengkol, Desa Mulyasari, Kec. Ciampel, Kab. Karawang adalah milik Penggugat IV.	Inkracht.
	Perdata No.67/Pdt.G/2021/PN.Kwg	Ara, dkk.	Perum Perhutani	Unlawful Acts	Forest Area Claim. 1. Plaintiff I stated that a plot of land with an area of ± 41,100 m2 located in the Cijengkol block, Mulyasari Village, Ciampel District, Karawang Regency belongs to Plaintiff I. 2. Plaintiff II stated that a plot of land with an area of ± 25,925 m2 located in the Cijengkol block, Mulyasari Village, Ciampel District, Karawang Regency belongs to Plaintiff II. 3. Plaintiff III stated that a plot of land with an area of ± 14,260 m2 located in the Cijengkol block, Mulyasari Village, Ciampel District, Karawang Regency belongs to Plaintiff III. 4. Plaintiff IV stated that a plot of land with an area of ± 12,270 m2 located in the Cijengkol block, Mulyasari Village, Ciampel District, Karawang Regency belongs to Plaintiff Karawang is owned by Plaintiff IV.	Inkracht.
7.	Perdata No. 218/Pdt.Sus-PHI/ PN. Bdg	Eks. Karyawan PT BUMNHL I	Perum Perhutani (Turut Tergugat)	Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial, dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Sesuai dengan Putusan Perkara No. 218/Pdt.Sus- PHI/ PN.Bdg tanggal 01 Februari 2023, Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Karena Para Penggugat tidak melakukan upaya Hukum Kasasi, maka Perkara tersebut telah <i>Inkracht</i> atau telah berkekuatan hukum tetap.	<i>Inkracht</i> – NO. Karena Para Penggugat tidak melakukan upaya hukum Kasasi sesuai ketentuan yang berlaku, maka Putusan PN dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (<i>Inkracht</i>).

Daftar Penanganan Perkara Perum Perhutani Tahun 2023

List of Handling of Perum Perhutani

No.	No. Perkara Case No.	Penggugat Plaintiff	Tergugat Defendant	Objek Gugatan Object of the Lawsuit	Keterangan Description	Status Status
	Perdata No. 218/Pdt.Sus-PHI/ PN. Bdg	Eks. Karyawan PT BUMNHL I	Perum Perhutani (Turut Tergugat)	Industrial Relations Dispute Lawsuit, in terms of Termination of Employment (PHK)	In accordance with the Decision of Case No. 218/Pdt. Sus- PHI/PN.Bdg dated 01 February 2023, the Plaintiff's Lawsuit was declared inadmissible. Because the Plaintiffs did not make a cassation appeal, the case has been Inkracht or has permanent legal force.	Inkracht – NO. Because the Plaintiffs did not make a cassation legal effort in accordance with the applicable provisions, the District Court Decision in this case has permanent legal force (Inkracht).
8.	Perdata No. 33/ Pdt. bth/2021/ PN.Skb	Chandra Gunawan, dkk. sebagai Para Pelawan	Perum Perhutani sebagai Para Terlawan	Perbuatan Melawan Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)	PARA PELAWAN telah melakukan pengikatan jual beli dengan Nyonya TOETI RAHAYU dan GATOT DENNY IRIANTO, SH (TERLAWAN II) telah melakukan pembayaran lunas harga harga sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) untuk pembelian atas sebidang tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik No. 122/Kadipaten, seluas 970 M2 (sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro.	Perum Perhutani Menang, Perlawanan Tidak Dapat Diterima.
	Perdata No. 33/ Pdt. bth/2021/ PN.Skb	Chandra Gunawan, dkk. sebagai Para Pelawan	Perum Perhutani sebagai Para Terlawan	Unlawful Acts of Third Party Resistance (Derden Verzet)	The OPPONENT has entered into a sale and purchase agreement with Mrs. TOETI RAHAYU and GATOT DENNY IRIANTO, SH (OPPONENT II) has made full payment of the price of IDR 1,600,000,000.00 (one billion six hundred million IDR) for the purchase of a plot of land and building with Freehold Certificate No. 122/Kadipaten, covering an area of 970 M2 (nine hundred and seventy square meters), located in East Java Province, Bojonegoro Regency.	Perum Perhutani Wins, the Opponents' Resistance is Not Acceptable.
9.	Perdata No. 59/ Pdt.G/2022/P N.Idm	Suprianto	Perum Perhutani	Perbuatan Melawan Hukum	Pada tahun 1939 telah terjadi Tukar Menukar Kawasan Hutan, yaitu antara Djawatan Kehutanan dengan DAIRAN Cs. di Blok Tegal Harendong, Desa Sukaslamet, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Penggugat (SUPRIANTO) mengaku sebagai ahli waris (CUCU) dari DARBANARAN yang dianggap termasuk bagian dari DAIRAN Cs. Penggugat merasa proses tukar menukar tahun 1939 tersebut belum selesai secara <i>clear and clean</i> karena merasa belum dapat tanah pengganti, sehingga menuntut proses tukar menukar <i>a quo</i> batal demi hukum, dan tanah adat yang sudah menjadi kawasan hutan (<i>eks</i> tukar menukar) dikembalikan, serta menganggap Perum Perhutani melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai tanah <i>a quo</i> dengan tanpa hak.	Inkracht.

Daftar Penanganan Perkara Perum Perhutani Tahun 2023

List of Handling of Perum Perhutani

No.	No. Perkara Case No.	Penggugat Plaintiff	Tergugat Defendant	Objek Gugatan Object of the Lawsuit	Keterangan Description	Status Status
	Perdata No. 59/ Pdt.G/2022/P N.Idm	Suprianto	Perum Perhutani	Unlawful Acts	In 1939, there was a Forest Area Exchange, namely between the Forestry Service and DAIRAN et al. in Tegal Harendong Block, Sukaslamet Village, District Kroya, Indramayu Regency. The plaintiff (SUPRIANTO) claims to be the heir (grandson) of DARBANARAN which is considered part of DAIRAN et al. The plaintiff feels that the 1939 exchange process has not been completed clearly and cleanly because he feels that he has not received replacement land, so he demands that the a quo exchange process be null and void by law, and that the customary land that has become a forest area (former exchange) be returned, and considers Perum Perhutani to have committed an Unlawful Act because it controls the a quo land without rights.	Inkracht.
10.	Perdata No.51/Pdt. G/2022	Ignatius Cogot Cahyanto	Perum Perhutani	Perbuatan Melawan Hukum	Surat Perum Perhutani yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen Nomor: 153/044.1/PSDH/Thw/I tanggal 3 Maret 2010 perihal Konfirmasi masalah warkah HM No. 31 an. Hadi Supomo yang intinya menanyakan Warkah Tanah, dianggap menghalangi proses balik nama sertifikat Penggugat sehingga Penggugat mengajukan Gugatan PMH kepada PN Sragen. Putusan PN Sragen telah menetapkan Gugatan tersebut tidak dapat diterima dan mengabulkan sebagian gugatan rekonsvansi, akan tetapi terhadap Putusan tersebut telah diajukan Banding oleh Penggugat dan telah ada Putusan dari Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor Perkara Nomor:82/Pdt/2023/PT.Smg tanggal 16 Maret 2023 yang memutuskan untuk membatalkan Putusan PN Sragen.	Inkracht Dalam Perkara ini masih menunggu arahan dari Direksi mengenai Upaya Hukum yang akan ditempuh (Peninjauan Kembali atau Gugatan Baru).
	Perdata No.51/Pdt. G/2022	Ignatius Cogot Cahyanto	Perum Perhutani	Unlawful Acts	Letter from Perum Perhutani addressed to the Sragen Regency Land Office Number: 153/044.1/PSDH/Thw/I dated March 3, 2010 regarding Confirmation of the issue of HM deed No. 31 an. Hadi Supomo which essentially asked about the Land Deed, was considered to hinder the Plaintiff's certificate name change process so that the Plaintiff filed a PMH Lawsuit with the Sragen District Court.	Inkracht. In this case, we are still waiting for direction from the Board of Directors regarding the Legal Efforts to be taken (Judicial Review or New Lawsuit).

Daftar Penanganan Perkara Perum Perhutani Tahun 2023

List of Handling of Perum Perhutani

No.	No. Perkara Case No.	Penggugat Plaintiff	Tergugat Defendant	Objek Gugatan Object of the Lawsuit	Keterangan Description	Status Status
					The Sragen District Court's decision has determined that the Lawsuit cannot be accepted and granted part of the counterclaim, however, the Plaintiff has filed an Appeal against the Decision and there has been a Decision from the Semarang High Court with Case Number: 82/Pdt/2023/PT.Smg dated March 16, 2023 which decided to cancel the Sragen District Court's Decision.	
GUGATAN DICABUT/ LAWSUIT WITHDRAWN						
11.	No.48/ Pdt.G/2 023/ PN.Blit	Supangat	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta Subianto Andre Ary Wijaya	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat bernama Supangat menduga bahwa Tergugat II dan Tergugat III sengaja melakukan pengukuran ulang yang hasilnya tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Sebagian Batas Kawasan Hutan sehingga menyebabkan kerugian yang diderita oleh Penggugat.	Selesai. (Gugatan Dicabut)
	No.48/ Pdt.G/2 023/ PN.Blit	Supangat	Head of Forest Area Improvement Center Region XI Yogyakarta 2.Subianto Andre Ary Wijaya	Unlawful Act	The plaintiff named Supangat suspects that Defendant II and Defendant III deliberately carried out re-measurements with results that did not match the results of the examination as stated in the Minutes of Examination of Part of the Forest Area Boundary, thus causing losses suffered by the plaintiff.	Completed. (Lawsuit Withdrawn)

Perkara Hukum Yang
Dihadapi Anak Perusahaan

Sampai dengan Desember 2023, terdapat beberapa perkara hukum yang dihadapi anak perusahaan, antara lain:

Legal Cases Faced by
Subsidiaries

As of December 2023, there are several legal cases faced by subsidiaries, including:

Perkara Hukum Yang Dihadapi Anak Perusahaan

Legal Cases Faced by Subsidiaries

Anak Perusahaan Subsidiaries	Jumlah Perkara Pidana Number of Criminal Cases	Jumlah Perkara Perdata Number of Criminal Cases	Jumlah Perkara Tata Usaha Negara None of State Administrative Cases
PT Inhutani I	Nihil/ None	Nihil/ None	Nihil/ None
PT Inhutani V	Nihil/ None	Nihil/ None	Nihil/ None
PT Palawi Risorsis	Nihil/ None	Nihil/ None	Nihil/ None

Pengungkapan Permasalahan Hukum yang Dihadapi Dewan Pengawas dan Direksi

Pada tahun 2023, tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi yang sedang menjabat.

Pengungkapan Sanksi Administrasi oleh Otoritas Terkait

Pada tahun 2023, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan dan juga tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perusahaan sebagai organisasi, entitas anak, anggota Direksi maupun anggota Dewan Pengawas oleh Otoritas terkait atau Pemilik Modal.

Perkara Penting di Luar Aspek Hukum

Di sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak menemukan adanya perkara penting di luar aspek hukum yang melibatkan Perusahaan sebagai organisasi, entitas anak, Dewan Pengawas maupun Direksi.

Disclosure of Legal Problems Faced by the Supervisory Board and Board of Directors

In 2023, there were no legal issues faced by the incumbent Members of the Supervisory Board and Members of the Board of Directors.

Disclosure of Administrative Sanctions by Relevant Authorities

In 2023, there were no material administrative sanctions that affected the Company's business continuity and there were also no administrative sanctions imposed on the Company as an organization, subsidiary, member of the Board of Directors or member of the Supervisory Board by the relevant Authorities or Capital Owners.

Important Cases Outside the Legal Aspect

Throughout 2023, the Company did not find any important cases outside the legal aspect involving the Company as an organization, subsidiary, the Supervisory Board or the Board of Directors.

Pedoman Etika Perusahaan

Code of Conduct

Perhutani telah secara aktif melakukan transformasi dengan fokus pada pengembangan dan implementasi *Code of Conduct* (Kode Etik) sesuai dengan praktik terbaik. Pada tahun 2023, Pedoman Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*) terbaru telah disahkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 163/KPTS/DIR/11/2023 tanggal 22 November 2023 tentang Pedoman Perilaku Perusahaan (CoC) Perum Perhutani setelah melalui proses *review* dan disahkan oleh Dewan Pengawas dan Direksi. Tujuan dari *Code of Conduct* ini adalah untuk menjadi panduan etika yang memandu integritas karyawan Perhutani pada semua tingkatan di dalam organisasi, sehingga penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat tercapai secara maksimal.

Dalam Pedoman ini, terdapat beberapa muatan terkait Kode Etik Perusahaan, antara lain:

- Pendahuluan
- Etika Bisnis
- Etika Kerja
- Komitmen terhadap Hal-hal Khusus
- Penegakan Pedoman Perilaku Perusahaan
- Penutup

Komitmen Dewan Pengawas dan Direksi

Sebagai salah satu upaya dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perhutani menerbitkan Pedoman Perilaku/ *Code of Conduct* yang berisi panduan dalam bertindak dan berperilaku dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Seluruh jajaran Dewan Pengawas dan Direksi melakukan penandatanganan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) sebagai wujud bahwa Dewan Pengawas dan Direksi menerima, memahami dan bersedia untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum di dalamnya serta mengesahkan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) tersebut.

Etika Bisnis Perhutani

Etika Bisnis Perusahaan merupakan penjelasan tentang bagaimana sikap dasar perusahaan

Perhutani has been actively transforming with a focus on developing and implementing a Code of Conduct in accordance with best practices. In 2023, the latest Company Code of Conduct was ratified by the Board of Directors based on the Decree of the Board of Directors No. 163/KPTS/DIR/11/2023 dated November 22, 2023 concerning the Company Code of Conduct (CoC) of Perum Perhutani after going through a review process and ratified by the Supervisory Board and Board of Directors. The purpose of this Code of Conduct is to be an ethical guide that guides the integrity of Perhutani employees at all levels within the organization, so that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) can be achieved optimally

In this Guideline, there are several contents related to the Company's Code of Ethics, including:

- Introduction
- Business Ethics
- Work Ethics
- Commitment to Specific Matters
- Enforcement of the Company's Code of Conduct
- Closing

Commitment of the Supervisory Board and Board of Directors

As one of the efforts in implementing good corporate governance, Perhutani issued a Code of Conduct containing guidelines for acting and behaving in carrying out daily work. All levels of the Supervisory Board and Board of Directors signed the Code of Conduct as a form that the Supervisory Board and Board of Directors accept, understand and are willing to comply with all provisions contained therein and ratify the Code of Conduct.

Perhutani Business Ethics

The Company's Business Ethics is an explanation of the company's basic attitude in doing business

dalam berbisnis dengan semua *stakeholders*. Aktivitas perusahaan berdasarkan pada Nilai-nilai Perusahaan, "INTIKU". Selain itu, menegaskan dan menjelaskan bahwa Perusahaan mempunyai komitmen untuk secara terus menerus membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan para *stakeholders*, sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Etika Kerja Perhutani

Kinerja dan citra Perusahaan sangat berkaitan dengan perilaku individu. Individu sebagai penggerak utama perusahaan memiliki peran utama dalam mewujudkan kinerja dan citra perusahaan yang baik. Oleh karena itu setiap individu harus menyadari bahwa citra dan reputasi perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi dan menentukan kelancaran usaha dan kelangsungan bisnis perusahaan. Karenanya Pedoman Perilaku juga berisi pedoman perilaku individu di dalam maupun di luar Perusahaan, pedoman berperilaku sebagai atasan dan pedoman berperilaku sebagai bawahan.

Komitmen terhadap hal-hal khusus

Merupakan pedoman mengenai hal-hal yang sifatnya khusus dan sangat penting dilaksanakan untuk menunjang pencapaian *best practices* penerapan GCG. Beberapa pedoman mengenai hal khusus yang ditetapkan menyangkut diantaranya: Pelaksanaan pengelolaan catatan, dokumen dan informasi yang akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan.

- Kewajiban untuk turut mengamankan dan menjaga, memelihara dan menggunakan harta benda
- Perusahaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan.
- Tidak mentolerir adanya praktek-praktek penjualan informasi dari orang dalam (*insider trading*) dan melakukan tindakan hukum atas pelaku *insider trading*.
- Menghindari adanya transaksi benturan kepentingan maupun kegiatan yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan terjadinya benturan kepentingan.
- Tidak melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kerja dan melarang seluruh individu menjadi pengurus partai politik.
- Melarang adanya tindakan pemberian hadiah/

with all *stakeholders*. The company's activities are based on the Company's Values, "INTIKU". In addition, it emphasizes and explains that the Company is committed to continuously building long-term, mutually beneficial relationships with *stakeholders*, in accordance with the principles of GCG.

Perhutani Work Ethics

The company's performance and image are closely related to individual behavior. Individuals as the main drivers of the company have a major role in realizing good company performance and image. Therefore, every individual must realize that the company's image and reputation are factors that influence and determine the smooth running of the company's business and its sustainability. Therefore, the Code of Conduct also contains guidelines for individual behavior inside and outside the Company, guidelines for behavior as superiors and guidelines for behavior as subordinates.

Commitment to specific matters

Are guidelines regarding specific matters that are very important to be implemented to support the achievement of best practices in GCG implementation. Several guidelines regarding specific matters that have been set include:

- Implementation of accurate, timely and accountable management of records, documents and information.
- Obligation to participate in securing and maintaining, preserving and using the Company's assets as well as possible in accordance with the provisions.
- Do not tolerate the practice of selling information from insiders (*insider trading*) and take legal action against *insider trading* perpetrators.
- Avoiding any conflict of interest transactions or activities that cause or have the potential to cause a conflict of interest.
- Not carrying out practical political activities in the work environment and prohibiting all individuals from becoming administrators of

cinderamata, donasi, komisi maupun suap yang tidak memenuhi azas kepatutan dan kewajaran. *Code of Conduct* Bagi Seluruh pegawai.

- Pembuatan Buku Pedoman Perilaku Perusahaan *Code Of Conduct* (COC).
- Sosialisasi *Code Of Conduct* (COC).
- Pendistribusian serta Pemasangan Plakat *Code Of Conduct* (COC) di setiap Kantor Perum Perhutani.
- Review penyempurnaan Pedoman Perilaku Perusahaan *Code Of Conduct* (COC).

Upaya Penegakan *Code of Conduct*

1. Pemantauan Pelaksanaan

Pelaksanaan *Code of Conduct* diawasi oleh Dewan Kehormatan yang terdiri dari unsur Dewan Pengawas, Direksi, Karyawan yang ditunjuk dan Serikat Pekerja yang pembentukan dan mekanisme kerjanya diatur dalam Surat Keputusan Direksi.

2. Pelaporan Pelanggaran *Code of Conduct*

Pelanggaran atas *Code of Conduct* dilaporkan pada Dewan Kehormatan atau Pimpinan Unit, dengan disertai bukti yang cukup. Laporan dari pihak luar wajib diterima sepanjang didukung bukti yang cukup dan identitas pelapor. Dewan Kehormatan wajib menindak lanjuti laporan yang valid dan memberikan perlindungan terhadap pelapor.

3. Sanksi atas Pelanggaran *Code of Conduct*.

Sanksi pelanggaran *Code of Conduct* diberikan oleh Direksi atau pejabat berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Jika pelanggaran dilakukan oleh Direksi maupun Dewan Pengawas, sanksi diberikan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Seluruh sanksi diberikan setelah ditemukan bukti nyata atas terjadinya pelanggaran.

political parties.

- Prohibiting the giving of gifts/souvenirs, donations, commissions or bribes that do not meet the principles of propriety and fairness. Disclosure of the Code of Conduct for all employees.
- Making a Company Code of Conduct (COC) Guidelines.
- Socialization of the Code of Conduct (COC).
- Distribution and Installation of Code of Conduct (COC) Plaques in every Perum Perhutani Office.
- Review of improvements to the Company Code of Conduct (COC) Guidelines.

Code of Conduct Enforcement Efforts

1. Monitoring of Implementation

The implementation of the Code of Conduct is supervised by the Honorary Council consisting of elements of the Supervisory Board, Board of Directors, appointed Employees and the Workers Union whose formation and working mechanism are regulated in the Board of Directors' Decree.

2. Reporting of Code of Conduct Violations

Violations of the Code of Conduct are reported to the Honorary Council or Unit Leader, accompanied by sufficient evidence. Reports from external parties must be accepted as long as they are supported by sufficient evidence and the identity of the reporter. The Honorary Council is obliged to follow up on valid reports and provide protection to the reporter.

3. Sanctions for Violations of the Code of Conduct.

Sanctions for violations of the Code of Conduct are given by the Board of Directors or authorized officials in accordance with applicable provisions. If the violation is committed by the Board of Directors or the Supervisory Board, sanctions are given with reference to applicable provisions. All sanctions are given after real evidence of the violation is found.

Sosialisasi *Code of Conduct*

Perhutani memastikan bahwa setiap Insan Perusahaan mengetahui dan memahami *Code of Conduct* serta peduli terhadap penerapan perilaku yang baik di lingkungan maupun di luar Perusahaan. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi CoC bagi seluruh elemen, mulai dari level operasional sampai kepada *top management*.

Code of Conduct Socialization

Perhutani ensures that every Company Personnel knows and understands the Code of Conduct and cares about implementing good behavior in the environment and outside the Company. One effort to achieve this is by conducting CoC socialization for all elements, from the operational level to top management.

Sepanjang tahun 2023, telah dilakukan sosialisasi CoC Perusahaan yang melibatkan segenap karyawan di seluruh jenjang organisasi di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan. Selain itu, sosialisasi CoC termasuk budaya perusahaan dilakukan melalui website Perusahaan yang dapat diakses baik pihak internal maupun eksternal Perhutani. Penyebaran CoC juga dilakukan melalui email oleh Unit Learning Center Perhutani dan Buletin Perhutani. Pelaksanaan pengisian materi mata ajaran Tata Nilai AKHLAK dan Pedoman Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct/CoC*) Perum Perhutani pada DIKLAT START Program untuk Pembekalan Kompetensi Khusus bidang SDM Pratugas Perum Perhutani Tahun 2023 pada tanggal 20 Oktober 2023.

Selain itu, Perhutani juga melaksanakan dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan implementasi transformasi budaya AKHLAK. Berdasarkan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan sejak pelaksanaan sosialisasi hingga implementasi berbagai program terkait transformasi budaya di Perhutani, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk memperkuat nilai-nilai inti dan budaya kerja telah menjadi fokus utama perusahaan. Dengan pelaksanaan survei, program pelatihan, dan kegiatan sosialisasi, Perum Perhutani secara aktif mendorong instilasi nilai-nilai AKHLAK di seluruh jajaran perusahaan.

Hasil survei dan laporan kemajuan implementasi menunjukkan tingkat partisipasi yang positif dari Insan Perhutani serta pencapaian yang memadai dalam pemahaman tata nilai, kesiapan menghadapi perubahan, dan level intervensi perusahaan. Selain itu, pelaksanaan program seperti Deklarasi dan Afirmasi Tata Nilai AKHLAK serta CEO TALK turut memperkuat kesadaran dan keterlibatan seluruh Insan Perhutani dalam memperkuat budaya perusahaan.

Melalui berbagai kegiatan seperti peluncuran aplikasi Manajemen Budaya (MAYA), perlombaan, dan partisipasi dalam acara BUMN Culture Festival, Perum Perhutani berhasil membangun kesadaran kolektif dalam penerapan nilai-nilai AKHLAK. Sosialisasi kebijakan berperilaku saling menghargai, program Leader Talks Values, dan kegiatan kesehatan mental merupakan upaya lanjutan dalam memastikan integritas dan kesejahteraan Insan Perhutani terjaga.

Dengan perencanaan dan implementasi yang terstruktur, Perhutani menunjukkan komitmen

Throughout 2023, the Company's CoC socialization has been carried out involving all employees at all levels of the organization at the Head Office and Representative Offices. In addition, the socialization of the CoC including the company culture is carried out through the Company's website which can be accessed by both internal and external parties of Perhutani. The distribution of the CoC is also carried out via email by the Perhutani Learning Center Unit and the Perhutani Bulletin. Implementation of the filling of the teaching materials for the AKHLAK Values and Company Code of Conduct (CoC) of Perum Perhutani at the DIKLAT START Program for the Provision of Special Competencies in the field of Pre-Assignment HR for Perum Perhutani in 2023 on October 20, 2023.

In addition, Perhutani also implements and participates in the implementation activities of AKHLAK cultural transformation. Based on a series of activities that have been carried out since the implementation of socialization to the implementation of various programs related to cultural transformation in Perhutani, it can be concluded that efforts to strengthen core values and work culture have become the main focus of the company. By implementing surveys, training programs, and socialization activities, Perum Perhutani actively encourages the instillation of AKHLAK values throughout the company.

The survey results and implementation progress reports show a positive level of participation from Perhutani employees and adequate achievement in understanding values, readiness to face change, and the level of company intervention. In addition, the implementation of programs such as the Declaration and Affirmation of AKHLAK Values and CEO TALK also strengthen the awareness and involvement of all Perhutani employees in strengthening the company's culture.

Through various activities such as the launch of the Cultural Management (MAYA) application, competitions, and participation in the BUMN Culture Festival event, Perum Perhutani has succeeded in building collective awareness in implementing AKHLAK values. Socialization of the policy of behaving with mutual respect, the Leader Talks Values program, and mental health activities are further efforts to ensure the integrity and welfare of Perhutani employees are maintained.

With structured planning and implementation, Perhutani shows a strong commitment to cultural

yang kuat dalam transformasi budaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, etis, dan berkelanjutan. Seluruh kegiatan yang dilakukan sejalan dengan upaya membangun nilai-nilai yang kuat bagi kelangsungan dan kesuksesan perusahaan di masa depan.

Sanksi Pelanggaran Disiplin Perusahaan

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik diberikan untuk mencegah terjadinya perilaku indisipliner dan memberikan efek jera kepada para pelanggar kode etik di lingkungan Perhutani. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik, dikategorikan kedalam 3 (tiga) jenis sanksi sebagai berikut:

- Sanksi Ringan, berupa Surat Pernyataan Tidak Puas
- Sanksi Sedang, berupa Surat Peringatan dan Pemotongan Apresiasi Kerja.
- Sanksi Berat, berupa Demosi sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Implementasi dan Penegakan Disiplin Perusahaan

Implementasi dan penegakkan CoC Perhutani dilakukan dengan penuh kesadaran secara terus menerus dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen dan ketentuan. Jenjang pelaksanaan dalam penerapan *Code of Conduct* Perhutani dilakukan sebagai berikut:

- Dewan Pengawas bertanggung jawab atas dipatuhinya Nilai-nilai Inti dan Komitmen Perhutani yang dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko;
- Direksi bertanggung jawab atas penerapan atas nilai-nilai inti dan komitmen Perhutani di lingkungan Perusahaan;
- Setiap Insan Perhutani menerima dan menandatangani formulir pernyataan kepatuhan terhadap Nilai-nilai Inti dan komitmen GCG dalam *Code of Conduct*. Pegawai, Direksi dan Dewan Pengawas Perhutani diwajibkan menandatangani pernyataan komitmen kepatuhan terhadap pedoman etika Perusahaan.

Pelanggaran Code of Conduct Tahun 2023

Salah satu aspek krusial dari *Code of Conduct* ini adalah penegakan aturan melalui fasilitas pelaporan pelanggaran CoC. Setiap insan Perhutani diharapkan melaporkan segala bentuk

transformation to create a professional, ethical, and sustainable work environment. All activities carried out are in line with efforts to build strong values for the continuity and success of the company in the future.

Sanctions for Violations of Company Discipline

Sanctions for violations of the code of ethics are given to prevent indisciplinary behavior and provide a deterrent effect to violators of the code of ethics in the Perhutani environment. Sanctions for violations of the code of ethics are categorized into 3 (three) types of sanctions as follows:

- Light Sanctions, in the form of a Statement of Dissatisfaction
- Medium Sanctions, in the form of a Warning Letter and Deduction of Work Appreciation.
- Severe Sanctions, in the form of Demotion up to Termination of Employment (PHK).

Implementation and Enforcement of Company Discipline

The implementation and enforcement of Perhutani's CoC is carried out with full awareness continuously in the form of attitudes, actions, commitments and provisions. The levels of implementation in the application of Perhutani's Code of Conduct are as follows:

- The Supervisory Board is responsible for compliance with Perhutani's Core Values and Commitments assisted by the Audit Committee and Risk Monitoring Committee;
- The Board of Directors is responsible for the implementation of Perhutani's core values and commitments within the Company;
- Every Perhutani Personnel receives and signs a statement form of compliance with the Core Values and GCG commitments in the Code of Conduct. Perhutani Employees, Directors and Supervisory Board are required to sign a statement of commitment to compliance with the Company's ethical guidelines

2023 Code of Conduct Violations

One crucial aspect of the Code of Conduct is the enforcement of the rules through the CoC violation reporting facility. Every Perhutani employee is expected to report any form of deviation from

penyimpangan terhadap nilai-nilai inti dan *Code of Conduct* melalui *website* Perhutani. Identitas pelapor akan tetap dirahasiakan namun mereka diwajibkan memberikan informasi yang jelas. Laporan-laporan ini akan ditindaklanjuti oleh pengelola sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan hasilnya akan disampaikan kepada Direksi untuk pengambilan keputusan terkait pembinaan, sanksi, perbaikan, dan pencegahan.

Selain itu, penerapan hukuman disiplin di Perum Perhutani mengacu pada Peraturan Disiplin Karyawan yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 161/KPTS/DIR/12/2021. Sampai tahun 2023, tercatat bahwa sebanyak 373 pegawai Perum Perhutani telah dikenakan hukuman disiplin, terdiri dari:

- Hukuman ringan: 112 orang
- Hukuman sedang: 207 orang
- Hukuman berat: 54 orang

Dengan adanya aturan *Code of Conduct* dan mekanisme penegakan disiplin yang jelas, diharapkan seluruh pihak di Perum Perhutani akan dapat menjaga integritas dan etika kerja yang tinggi demi terciptanya lingkungan kerja yang profesional dan berkualitas.

the core values and Code of Conduct through the Perhutani website. The identity of the reporter will remain confidential but they are required to provide clear information. These reports will be followed up by the management in accordance with established procedures and the results will be submitted to the Board of Directors for decision making regarding coaching, sanctions, improvements, and prevention.

In addition, the implementation of disciplinary sanctions at Perum Perhutani refers to the Employee Disciplinary Regulations stipulated in the Decree of the Board of Directors Number 161/KPTS/DIR/12/2021. Until 2023, it was recorded that 373 Perum Perhutani employees had been subject to disciplinary sanctions, consisting of:

- Light punishment: 112 people
- Medium punishment: 207 people
- Heavy punishment: 54 people

The existence of the Code of Conduct and a clear disciplinary enforcement mechanism, it is hoped that all parties at Perum Perhutani will be able to maintain high integrity and work ethics in order to create a professional and quality work environment.

Gratifikasi

Gratification

Dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya, Perum Perhutani tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal yang memungkinkan terjadinya penerimaan dan/atau pemberian dan/atau penerimaan yang dapat dikategorikan gratifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perhutani telah menetapkan beberapa ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi, yaitu Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perum Perhutani Nomor: 12/Dewas-PHT/2019 – Nomor: 1831/KPTS/DIR/2019 diperbaharui Kembali dengan Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perum Perhutani Nomor : 05/DWAS-PHT/2021 dan NOMOR : 135/KPTS/ DIR/11/2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perum Perhutani.

Pada prinsipnya seluruh insan Perhutani dilarang menerima Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dari *Stakeholders*. Terhadap pemberian gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Insan Perhutani wajib melakukan penolakan secara sopan dan santun atas pemberian dimaksud serta menjelaskan bahwa pemberian ini termasuk gratifikasi yang dilarang.

Sistematika Pelaporan Gratifikasi

1. Penerimaan, pemberian, permintaan, dan penolakan gratifikasi yang wajib dilaporkan kepada UPG dengan mengisi formulir sebagaimana pada Lampiran I atau II keputusan ini, disertai dokumen pendukung paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal Penerimaan, pemberian, permintaan, dan penolakan.
2. UPG menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi disertai dengan dokumen pendukung kepada KPK paling lama 16 (enam belas) hari sejak tanggal penerimaan laporan gratifikasi.
3. UPG membuat rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi serta melaporkannya kepada Direksi.

In carrying out its business activities, Perum Perhutani is inseparable from relationships and interactions with various parties, both internal and external, which allow for the receipt and/or giving and/or receiving of things that can be categorized as gratification. In this regard, Perhutani has established several provisions on Gratification Control, namely Perum Perhutani Gratification Control Guidelines Number: 12/Dewas-PHT/2019 - Number: 1831/KPTS/DIR/2019 updated again by Joint Decree of the Supervisory Board and Directors of Perum Perhutani Number: 05/DWAS-PHT/2021 and NUMBER: 135/KPTS/DIR/11/2021 concerning Perum Perhutani Gratification Control Guidelines.

In principle, all Perhutani personnel are prohibited from accepting Gratification related to their position and contrary to their obligations or duties from Stakeholders. For the provision of gratification that is not in accordance with the provisions stipulated in the Gratification Control Guidelines, Perhutani personnel are required to politely and courteously reject the provision in question and explain that this provision is included in the prohibited gratification.

Systematic Reporting of Gratification

1. Receipt, provision, request and rejection of gratuities must be reported to the UPG by filling out the form as in Attachment I or II to this decision, accompanied by supporting documents no later than 14 (fourteen) days after the date of receipt, provision, request and rejection.
2. UPG submits a report on receipt of gratification accompanied by supporting documents to the KPK no later than 16 (sixteen) days from the date of receipt of the gratification report.
3. UPG makes a recapitulation of the report on receipt and rejection of gratification and reports it to the Board of Directors.

4. Apabila diketahui adanya Insan Perhutani menerima/memberi gratifikasi yang tidak diperbolehkan atau berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan dan Insan Perhutani dimaksud tidak melaporkannya maka dapat dilaporkan melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS) Perhutani dan saluran lainnya.
5. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang mudah kadaluwarsa, busuk, atau rusak dalam batasan kewajaran (misal: makanan dan minuman), maka dapat diserahkan kepada panti asuhan, panti jompo, pihak-pihak yang membutuhkan, atau Lembaga Sosial lainnya selanjutnya melaporkan kepada UPG dengan melampirkan bukti tanda penyerahan kepada UPG Perhutani selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud.
6. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang tidak cepat kadaluwarsa (misal: uang, emas, dan lainnya) wajib disimpan di Bagian Keuangan di lingkungan kerja Insan Perhutani yang bersangkutan, sampai dengan ditentukannya status kepemilikan atas penerimaan tersebut oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan menyampaikan laporan dan bukti tanda penyimpanan kepada UPG Perhutani selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud.
4. If it is discovered that a Perhutani Personnel has received/given gratification that is not permitted or has the potential to result in abuse of authority/position and the Perhutani Personnel in question do not report it, it can be reported through the Perhutani Whistle Blowing System (WBS) mechanism and other channels.
5. For goods received that are easily expired, rotten, or damaged within reasonable limits (e.g. food and drinks), they can be handed over to orphanages, nursing homes, parties in need, or other social institutions, then reported to the UPG by attaching proof of delivery to the Perhutani UPG no later than 14 (fourteen) days after the date of receipt as intended.
6. For receipts that are goods that do not expire quickly (for example: money, gold, and others) must be stored in the Finance Section in the work environment of the Perhutani Personnel concerned, until the ownership status of the receipt is determined by the Corruption Eradication Commission (KPK), by submitting a report and proof of storage to the Perhutani UPG no later than 14 (fourteen) days after the date of receipt as referred to.

Kegiatan Tim Unit Pengendali Gratifikasi Tahun 2023

- Perum Perhutani telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 64 Tahun 2021 dan Nomor :19/PKS/DIR/2021.
- Untuk meningkatkan pemahaman karyawan Perusahaan tentang Gratifikasi, Tim UPG telah melakukan sosialisasi Pesan Anti Gratifikasi melalui *e-flyer*.

Activities of the Gratification Control Unit Team in 2023

- Perum Perhutani has collaborated with the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK RI) regarding Handling Complaints in Efforts to Eradicate Criminal Acts of Corruption as stated in the Cooperation Agreement Number 64 of 2021 and Number: 19/PKS/DIR/2021.
- To improve the understanding of Company employees about Gratification, the UPG Team has conducted socialization of Anti-Gratification Messages through *e-flyers*.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

State Officials Wealth Report (LHKPN)

Dasar Hukum dan Peraturan

Dalam penyampaian LHKPN, Perusahaan mengacu kepada peraturan antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/BUMN/2011 pasal 2 (1) yang mewajibkan BUMN menerapkan GCG;
- Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.
- Keputusan Direksi Nomor 2535/KPTS/DIR/12/2021 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Perum Perhutani

Pedoman LHKPN Perusahaan dan Pelaksanaannya

Sebagai bentuk komitmen dalam melakukan pencegahan korupsi di lingkungan perusahaan, Direksi menetapkan Pedoman melalui Keputusan Direksi Nomor 2535/KPTS/DIR/12/2021 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Perum Perhutani yang di dalamnya juga mengatur bahwa wajib LHKPN.

Sebagai wujud komitmen dalam penerapannya, Pejabat Perusahaan telah menyampaikan LHKPN kepada KPK dan telah melakukan pemutakhiran pada saat terjadi mutasi jabatan dan pada saat jatuh tempo.

Tambahan Berita Negara

Dokumen LHKPN yang sudah lengkap dan telah diproses oleh KPK akan diumumkan pada Tambahan Berita Negara (TBN) dan diberi Nomor Harta Kekayaan (NHK), dimana TBN dan poster pengumuman dari KPK tersebut akan diberikan

Legal Basis and Regulations

In submitting LHKPN, the Company refers to regulations including the following:

- Law No. 28 of 1999 concerning State Administrators Who Are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism;
- Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission;
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/BUMN/2011 article 2 (1) which requires BUMN to implement GCG;
- Decree of the Secretary of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good GCG Implementation.
- Decree of the Board of Directors Number 2535/KPTS/DIR/12/2021 Concerning Reports of State Administrators' Wealth within Perum Perhutani

Company LHKPN Guidelines and Its Implementation

As a form of commitment to preventing corruption in the company environment, the Board of Directors has established Guidelines through Board of Directors Decree Number 2535/KPTS/DIR/12/2021 Concerning State Officials' Wealth Reports within Perum Perhutani, which also stipulates that LHKPN is mandatory.

As a form of commitment in its implementation, Company Officials have submitted LHKPN to the KPK and have updated it when there is a job transfer and when it is due

Additional State Gazette

Complete LHKPN documents that have been processed by the KPK will be announced in the Additional State Gazette (TBN) and given a Wealth Number (NHK), where the TBN and announcement poster from the KPK will be given to Officials

kepada Pejabat Wajib Laport di Perusahaan.

Pejabat Wajib Laport wajib mengumumkan poster pengumuman dari KPK pada media pengumuman di perusahaan dan menyampaikan lembar pemberitahuan pengumuman LHKPN kepada KPK.

LHKPN dari pejabat perusahaan di lingkungan Perhutani hingga akhir periode pelaporan sudah ada 12 LHKPN yang disampaikan atau 100% dari total 12 pejabat Perusahaan yang menjadi wajib laport.

Required to Report in the Company.

Officials Required to Report are required to announce the announcement poster from the KPK on the announcement media in the company and submit the LHKPN announcement notification sheet to the KPK.

LHKPN from company officials within Perhutani until the end of the reporting period, there have been 12 LHKPN submitted or 100% of the total 12 Company officials who are required to report.

Keterangan Description	Wajib Laport Mandatory Reporting	Telah Laport Reported	Belum Laport Not Reported
LHKPN	12	12	0
Persentase/ Percentage LHKPN	100%	100%	-

Pengadaan Barang dan Jasa

Procurement of Goods and Services

Proses pengadaan barang dan jasa merupakan upaya pemenuhan setiap kebutuhan Perhutani dalam menunjang tata kelola dan operasional Perusahaan. Perhutani telah melakukan proses pengadaan secara terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat dan wajar diantara penyedia barang dan jasa dan memenuhi syarat tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Perusahaan juga telah memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan oleh unit terkait berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Perhutani

Pedoman terkait pengadaan barang dan jasa Perusahaan telah ditetapkan oleh Direktur Utama Perhutani melalui Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor 15/PER/DIR/09/2023 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa perum perhutani tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa sebagai Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. Perhutani berupaya mewujudkan kegiatan pengadaan yang efektif, aman, cepat, transparan, efisien dan akuntabel, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Senantiasa tunduk dan patuh terhadap regulasi internal maupun eksternal.
- Berpedoman terhadap budaya Perusahaan dan *Code of Conduct*.
- Menggunakan sistem teknologi informasi.

Metode Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Perhutani dikategorikan kedalam beberapa metode sebagai berikut:

The procurement process of goods and services is an effort to fulfill every need of Perhutani in supporting the governance and operations of the Company. Perhutani has carried out an open procurement process for providers of goods and services that meet the requirements and is carried out through healthy and fair competition among providers of goods and services and meets certain requirements based on clear and transparent provisions and procedures. The Company also has its own estimated price (HPS) which is calculated by the relevant unit based on accountable data.

Perhutani Goods and Services Procurement Policy

Guidelines related to the procurement of goods and services of the Company have been stipulated by the President Director of Perhutani through Decree of the Board of Directors No. 15/PER/DIR/09/2023 concerning Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods/Services as Guidelines for Procurement of Goods and Services. Perhutani strives to realize effective, safe, fast, transparent, efficient and accountable procurement activities, by doing the following:

- Always submit and comply with internal and external regulations.
- Guided by the Company's culture and Code of Conduct.
- Use information technology systems.

Goods and Services Procurement Methods

Procurement of goods and services carried out by Perhutani is categorized into several methods as follows:

Metode Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Methods

Mekanisme Mechanism	Definisi Definition	
Pelelangan Terbatas Limited Auction	Metode Pengadaan melalui pelelangan dengan cara mengundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) calon Penyedia yang terdaftar	Procurement method through auction by inviting at least 3 (three) registered prospective Providers
Pelelangan Terbuka Open Auction	Metode Pengadaan yang dilakukan Secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui elektronik (website), papan pengumuman resmi atau jika diperlukan dapat juga melalui media massa, yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/ jasa yang memenuhi syarat	Procurement method carried out openly with a wide announcement via electronic (website), official notice board or if necessary can also be through mass media, which can be followed by all qualified providers of goods/services.
Penunjukan Langsung Direct Appointment	Metode Pengadaan barang/jasa dengan cara menunjuk satu atau lebih penyedia yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan.	Procurement method of goods/services by appointing one or more providers who are considered capable of carrying out the work.
Pengadaan Langsung Direct Appointment	Pengadaan barang/jasa secara langsung kepada satu penyedia jasa setinggi-tingginya dengan nilai Rp 30 juta.	Procurement of goods/services directly to one service provider with a maximum value of IDR 30 million.
Penunjukan Langsung dengan Metode <i>Open Book</i> Direct Appointment with Open Book Method	Metode pemilihan penyedia barang/ jasa yang memperlombakan gagasan/ ide kreativitas, inovasi atau barang/ benda tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.	A method of selecting providers of goods/ services that competes for creative ideas/ ideas, innovations or certain goods/ objects whose prices/costs cannot be determined based on unit prices.

Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023

Perhutani telah menyelesaikan sejumlah kegiatan pengadaan untuk memenuhi kebutuhan operasi Perusahaan pada tahun 2023 melalui mekanisme dan metode yang ditetapkan Perusahaan. Nilai pengadaan telah dikalkulasikan oleh unit terkait berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Program Bagi Pemasok

Pemasok atau vendor merupakan mitra bisnis strategis yang menunjang kegiatan bisnis Perhutani. Oleh karena itu, Perhutani terus berupaya menjaga hubungan yang harmonis kepada para pemasok atau rekanan. Perhutani juga berupaya meningkatkan kualitas kerjasama dan memberikan pemahaman kepada pemasok terkait proses pengadaan yang sesuai dengan kebijakan Perhutani maupun informasi lain yang bermanfaat bagi pemasok. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menciptakan proses pengadaan yang kompetitif, efektif dan efisien.

Procurement of Goods and Services Activities in 2023

Perhutani has completed a number of procurement activities to meet the Company's operational needs in 2023 through the mechanisms and methods set by the Company. The procurement value has been calculated by the relevant unit based on accountable data.

Supplier Program

Suppliers or vendors are strategic business partners that support Perhutani's business activities. Therefore, Perhutani continues to strive to maintain harmonious relationships with suppliers or partners. Perhutani also strives to improve the quality of cooperation and provide suppliers with an understanding of the procurement process in accordance with Perhutani's policies and other information that is useful for suppliers. These activities are expected to create a competitive, effective and efficient procurement process.

Survei Kepuasan Pemasok

Perhutani mengadakan survei kepada pemasok untuk mengetahui kualitas kerja sama antara Perhutani dengan pemasok dari perspektif pemasok. Perhutani menerima setiap masukan yang membangun dari pemasok untuk perbaikan kualitas pengadaan dan kerja sama di masa yang akan datang.

Audit Pengadaan Barang dan Jasa

Perhutani secara rutin melakukan audit terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan kualitas pengelolaannya. Audit pengadaan barang dan jasa dilakukan guna memastikan kegiatan pengadaan Perhutani telah dijalankan sesuai dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang dimiliki Perhutani serta untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi proses pengadaan yang telah dilakukan.

Supplier Satisfaction Survey

Perhutani conducted a survey to suppliers to determine the quality of cooperation between Perhutani and suppliers from the supplier's perspective. Perhutani welcomes any constructive input from suppliers to improve the quality of procurement and cooperation in the future.

Goods and Services Procurement Audit

Perhutani routinely conducts audits on the implementation of goods and services procurement activities to improve the quality of its management. Goods and services procurement audits are conducted to ensure that Perhutani's procurement activities have been carried out in accordance with Perhutani's goods and services procurement policies and to determine the effectiveness and efficiency of the procurement process that has been carried out.

Program Anti Korupsi

Anti-Corruption Program

Perhutani terus berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi dengan terus mendorong efektivitas penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi, *Whistleblowing System*, Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selain itu, Perhutani juga melakukan upaya dalam mendukung Program Anti Korupsi melalui pelaksanaan Sertifikasi dan *Surveillance* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Program dan Prosedur yang Dilakukan dalam Mengatasi Praktik Korupsi

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Sejalan dengan komitmen pemberantasan korupsi, Perhutani telah memiliki sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 atas implementasi ISO 37001:2016 di lingkungan Perhutani.

Dalam upaya mempertahankan sertifikat ISO 37001:2016 tersebut, Perhutani melakukan audit *surveillance* ISO 37001:2016 SMAP. Pada tanggal 8-9 Agustus 2022 Perhutani telah dilakukan audit *Surveillance* ISO 37001:2016 dan berhasil mempertahankan sertifikasi SMAP dengan mendapatkan sertifikat atas audit *surveillance* oleh Badan Sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP.

Adapun pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) telah berjalan dengan baik sesuai Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) diantaranya yaitu:

- Melakukan pengkajian perubahan dalam isu internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen anti penyuapan;
- Melakukan pengkajian efektivitas tindakan yang diambil untuk menunjukkan risiko penyuapan;
- Melakukan pengkajian peluang peningkatan berkelanjutan dari SMAP;
- Melakukan internalisasi SMAP dan *Whistleblowing System* (WBS) melalui berbagai media sosialisasi guna peningkatan kualitas SMAP;

Perhutani continues to be committed to eradicating corruption by continuing to encourage the effectiveness of the implementation of gratification control policies, *Whistleblowing System*, Management of State Officials' Wealth Reports (LHKPN). In addition, Perhutani also makes efforts to support the Anti-Corruption Program through the implementation of ISO 37001:2016 Certification and *Surveillance* of the Anti-Bribery Management System (SMAP).

Programs and Procedures Implemented in Addressing Corruption Practices

Anti-Bribery Management System

In line with the commitment to eradicate corruption, Perhutani has obtained ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System certification issued by the SNI ISO 37001:2016 Certification Body for the implementation of ISO 37001:2016 within Perhutani.

In an effort to maintain the ISO 37001:2016 certificate, Perhutani conducted an ISO 37001:2016 SMAP *surveillance* audit. On August 8-9, 2022, Perhutani conducted an ISO 37001:2016 *Surveillance* audit and successfully maintained the SMAP certification by obtaining a certificate for the *surveillance* audit by the ISO 37001:2016 SMAP Certification Body.

The management of the Anti-Bribery Management System (SMAP) has been running well in accordance with the Anti-Bribery Management System (SMAP) Guidelines, including:

- Conducting a review of changes in internal and external issues relevant to the anti-bribery management system;
- Conducting a review of the effectiveness of actions taken to indicate bribery risks;
- Conducting a review of opportunities for continuous improvement of the SMAP;
- Internalizing the SMAP and *Whistleblowing System* (WBS) through various socialization media to improve the quality of the SMAP;
- Signing of the Employee Integrity Pact related

- Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai terkait komitmen implementasi SMAP yang diperbaharui setiap tahunnya secara berkala;
- Melakukan pengkajian terhadap penambahan unit kerja yang disertifikasi ISO 37001:2016 SMAP.

Hasil akhir yang akan diperoleh Perhutani dengan penerapan ISO 37001:2016 adalah peningkatan daya saing Perhutani dalam jangka panjang sehingga Perhutani akan semakin sehat dan tumbuh secara *sustainable*.

Dalam rangka mengawal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum Perhutani Tahun 2023 dan mencegah Tindak Pidana Korupsi, Departemen Kepatuhan dan *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjalankan berbagai inisiatif strategis. Salah satu inisiatif utama adalah melaksanakan sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi serta penerapan Peraturan Menteri BUMN No. 5/MBU/09/2022 tentang Manajemen Risiko pada BUMN. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian BUMN, Kejaksaan, dan Kepolisian sebagai narasumber. Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada tiga Divisi Regional dengan rincian sebagai berikut:

Pelaksanaan Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi

- to the commitment to implementing the SMAP which is renewed annually on a regular basis;
- Conducting a review of the addition of work units certified by ISO 37001:2016 SMAP.

The final result that Perhutani will obtain with the implementation of ISO 37001:2016 is an increase in Perhutani's competitiveness in the long term so that Perhutani will be healthier and grow sustainably.

In order to oversee the 2023 Perum Perhutani Work Plan and Budget (RKAP) and prevent Corruption, the Compliance and Good Corporate Governance (GCG) Department has implemented various strategic initiatives. One of the main initiatives is to implement the socialization of the Prevention of Corruption and the implementation of the Regulation of the Minister of SOEs No. 5/MBU/09/2022 concerning Risk Management in SOEs. This socialization activity involved the Corruption Eradication Commission (KPK), the Ministry of SOEs, the Prosecutor's Office, and the Police as resource persons. The socialization was carried out in three Regional Divisions with the following details:

Implementation of Socialization of Corruption

Pelaksanaan Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi Divisi Hukum Dan Kepatuhan Tahun 2023 Implementation of Socialization Of Corruption Criminal Acts of The Legal And Compliance Division In 2023

Tanggal Date	Satuan/ Unit kerja Division/ Work Unit	Dihadiri oleh Participants
1 Februari 2023 February 1, 2023	Divisi Regional Jawa Timur	Kepala Divisi Regional, Kepala PeFI, KSPI, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan, Wakil Kepala Divisi Regional, Wakil Kepala PeFI, Segenap Kepala Departemen Divre, Sekretaris Divre, Segenap Administratur/KKPH, Segenap Wakil Administratur/KKPH, Kepala Seksi Utama Hukum dan Kepatuhan, Kepala Seksi Utama PKB dan MR, KSS Hukum dan Kepatuhan, KSS PKB dan MR, GM Komersial Kayu, Manajer Komersial Kayu, GM Industri Kayu dan Biomassa, Manajer IHKK dan Biomassa, GM Industri HHBK, Manajer Industri HHBK, Kantor Pusat. Sosialisasi juga dihadiri secara online oleh Wakil Administratur/KSKPH, Manajer pada KBM IHKK & Biomassa, Manajer pada KBM IHBBK, Manajer KBM Penjualan Kayu, dan Asper Sederajat.

Pelaksanaan Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi Divisi Hukum Dan Kepatuhan Tahun 2023

Implementation of Socialization Of Corruption Criminal Acts of The Legal And Compliance Division In 2023

Tanggal Date	Satuan/ Unit kerja Division/ Work Unit	Dihadiri oleh Participants	
3 Februari 2023 February 3, 2023	Divisi Regional Jawa Tengah	Kepala Divisi Regional, KSPI, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan, Wakil Kepala Divisi Regional, Segenap Kepala Departemen Divre, Sekretaris Divre, Segenap Administratur/KKPH, Segenap Wakil Administratur/KSKPH, Kepala Seksi Utama Hukum dan Kepatuhan, Kepala Seksi Utama PKB dan MR, KSS Hukum dan Kepatuhan, KSS PKB dan MR, GM Komersial Kayu, Manajer Komersial Kayu, GM Industri Kayu dan Biomassa, Manajer IHHK dan Biomassa, GM Industri HHBK, Manajer Industri HHBK, Kantor Pusat. Sosialisasi juga dihadiri secara online oleh Wakil Administratur/KSKPH, Manajer pada KBM IHHK & Biomassa, Manajer pada KBM IHHBK, Manajer KBM Penjualan Kayu, dan Asper Sederajat.	Head of Regional Division, KSPI, Head of Risk Management Division, Head of Legal and Compliance Division, Deputy Head of Regional Division, All Heads of Department of Divre, Secretary of Divre, All Administrators/KKPH, All Deputy Administrators/KSKPH, Head of Main Section of Legal and Compliance, Head of Main Section of PKB and MR, KSS Legal and Compliance, KSS PKB and MR, GM Commercial Wood, Manager Commercial Wood, GM Wood and Biomass Industry, Manager of IHHK and Biomass, GM HHBK Industry, Manager of HHBK Industry, Head Office. The socialization was also attended online by Deputy Administrators/KSKPH, Managers at KBM IHHK & Biomass, Managers at KBM IHHBK, Managers of KBM Wood Sales, and Asper and Equivalent.
6 Februari 2023 February 6, 2023	Divisi Regional Jawa Barat dan Banten	Kepala Divisi Regional, KSPI, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan, Wakil Kepala Divisi Regional, Segenap Kepala Departemen Divre, Sekretaris Divre, Segenap Administratur/KKPH, Segenap Wakil Administratur/KSKPH, Kepala Seksi Utama Hukum dan Kepatuhan, Kepala Seksi Utama PKB dan MR, KSS Hukum dan Kepatuhan, KSS PKB dan MR, GM Komersial Kayu, Manajer Komersial Kayu, GM Industri Kayu dan Biomassa, Manajer IHHK dan Biomassa, GM Industri HHBK, Manajer Industri HHBK, Kantor Pusat. Sosialisasi juga dihadiri secara online oleh Wakil Administratur/KSKPH, Manajer pada KBM IHHK & Biomassa, Manajer pada KBM IHHBK, Manajer KBM Penjualan Kayu, dan Asper Sederajat.	Head of Regional Division, KSPI, Head of Risk Management Division, Head of Legal and Compliance Division, Deputy Head of Regional Division, All Heads of Department of Divre, Secretary of Divre, All Administrators/KKPH, All Deputy Administrators/KSKPH, Head of Main Section of Legal and Compliance, Head of Main Section of PKB and MR, KSS Legal and Compliance, KSS PKB and MR, GM Commercial Wood, Manager Commercial Wood, GM Wood and Biomass Industry, Manager of IHHK and Biomass, GM HHBK Industry, Manager of HHBK Industry, Head Office. The socialization was also attended online by Deputy Administrators/KSKPH, Managers at KBM IHHK & Biomass, Managers at KBM IHHBK, Managers of KBM Wood Sales, and Equivalent Asper

Kegiatan dan Inisiatif Anti Korupsi

1. Kerja Sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

Perum Perhutani telah menjalin kerja sama dengan KPK melalui Perjanjian Kerja Sama yang diperbarui dalam Amandemen Perjanjian Nomor 60 Tahun 2023 dan Nomor 10/ADD-PKS/DIR-PHT/2023 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berlaku selama dua tahun dari 28 Februari 2023.

Anti-Corruption Activities and Initiatives

1. Cooperation with the Corruption Eradication Commission (KPK):

Perum Perhutani has established cooperation with the KPK through a Cooperation Agreement which was updated in the Amendment to Agreement Number 60 of 2023 and Number 10/ADD-PKS/DIR-PHT/2023 concerning Handling Complaints in Efforts to Eradicate Criminal Acts of Corruption, valid for two years from February 28, 2023.

2. Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi:

Sosialisasi mengenai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Menteri BUMN No. 5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

3. Monitoring dan Evaluasi WBS:

Monitoring dan Evaluasi WBS Terintegrasi Triwulan I Tahun 2023 untuk memastikan efektivitas sistem.

4. E-learning Sistem Pengaduan Pelanggaran/WBS:

Pelatihan online yang mencakup WBS, Gratifikasi, dan Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP), yang diselenggarakan oleh Perhutani Forestry Institute bagi karyawan di Jenjang IV, V, dan VI.

5. Revisi Peraturan Direksi terkait WBS:

Revisi Peraturan Direksi Nomor 10/PER/DIR/08/2023 pada 16 Agustus 2023, memperbarui ketentuan sistem pengaduan pelanggaran.

6. Prosedur Perlindungan Pelapor:

Penyusunan Prosedur Kerja terkait Perlindungan atas Karir Pelapor, Nomor 14.1.017 tanggal 28 Agustus 2023.

7. Prosedur Pengungkapan Identitas Pelapor:

Penyusunan Prosedur Kerja Pengungkapan Identitas Pelapor dan Materi Pengaduan Nomor 14.1.018 tanggal 28 Agustus 2023.

8. Pelaporan Data Statistik Pengaduan:

Penyampaian data statistik pengaduan kepada KPK secara berkala.

9. Laporan WBS Tahun 2023:

Penyusunan dan penyampaian laporan WBS secara lengkap kepada seluruh pemangku kepentingan.

10. Monitoring dan Evaluasi Bersama KPK:

Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang ketiga bersama KPK untuk memastikan efektivitas implementasi WBS di Perum Perhutani.

Implementasi program anti korupsi di Perhutani pada tahun 2023 menunjukkan komitmen perusahaan dalam mencegah dan menangani tindak pidana korupsi melalui pengelolaan kepatuhan dan tata kelola yang baik. Kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta kerja sama dengan berbagai instansi terkait memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditangani dengan transparan dan akuntabel, mendukung visi perusahaan untuk menjalankan operasi yang jujur dan bertanggung jawab.

2. Dissemination of Corruption Prevention:

Dissemination of Corruption Prevention and Regulation of the Minister of SOEs No. 5/MBU/09/2022 concerning the Implementation of Risk Management.

3. WBS Monitoring and Evaluation:

Integrated WBS Monitoring and Evaluation for the First Quarter of 2023 to ensure system effectiveness.

4. E-learning of Violation Complaint System/WBS:

Online training covering WBS, Gratification, and Anti-Bribery Management System (SMAP), organized by Perhutani Forestry Institute for employees at Levels IV, V, and VI.

5. Revision of the Board of Directors Regulation regarding WBS:

Revision of the Board of Directors Regulation Number 10/PER/DIR/08/2023 on August 16, 2023, updating the provisions of the violation complaint system.

6. Whistleblower Protection Procedure:

Preparation of Work Procedures related to Protection of Whistleblowers' Careers, Number 14.1.017 dated August 28, 2023.

7. Whistleblower Identity Disclosure Procedure:

Preparation of Work Procedures for Disclosure of Whistleblower Identity and Complaint Materials Number 14.1.018 dated August 28, 2023.

8. Reporting of Complaint Statistical Data:

Submission of complaint statistical data to the KPK periodically.

9. 2023 WBS Report:

Preparation and submission of a complete WBS report to all stakeholders.

10. Joint Monitoring and Evaluation with the KPK:

Carrying out the third monitoring and evaluation with the KPK to ensure the effectiveness of WBS implementation at Perum Perhutani.

The implementation of the anti-corruption program at Perhutani in 2023 shows the company's commitment to preventing and handling criminal acts of corruption through compliance management and good governance. Socialization activities, training, and cooperation with various related agencies ensure that every report of violations can be handled transparently and accountably, supporting the company's vision to carry out honest and responsible operations.

Whistleblowing System (WBS)

Whistleblowing System (WBS)

Pengimplementasian *Whistleblowing System* (WBS) oleh Perum Perhutani merupakan langkah penting dalam menjaga integritas dan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan dasar hukum yang kuat dan prosedur yang transparan dan setara, WBS memastikan bahwa semua pelanggaran dapat dilaporkan dan ditangani dengan profesionalisme dan keadilan. Sistem ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga membangun budaya kepercayaan dan integritas di lingkungan Perhutani, mendukung tujuan jangka panjang untuk menciptakan perusahaan yang bebas dari fraud dan korupsi.

Kebijakan Pelaporan Pelanggaran Perhutani

Perum Perhutani telah menetapkan kebijakan pelaporan pelanggaran yang dikenal sebagai Sistem Pengaduan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). Kebijakan ini berlaku secara universal dan setara untuk seluruh individu di Perhutani, tanpa memandang jenjang kepegawaian. Hal ini mencakup Direksi, Dewan Pengawas, anggota-anggota Komite di bawah Dewan Pengawas, pelaksana sistem pelaporan pelanggaran itu sendiri, serta pihak eksternal yang memiliki informasi terkait dengan tindakan pelanggaran yang terjadi.

Dasar Hukum Pelaksanaan WBS

Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di Perhutani diatur dan disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 124/KPTS/DIR/11/2021. Kebijakan ini mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menangani laporan terkait pelanggaran.

Pelaksanaan WBS di Perhutani didasarkan pada berbagai peraturan perundangan yang relevan, yaitu:

1. **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003** tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010** tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

The implementation of the *Whistleblowing System* (WBS) by Perum Perhutani is an important step in maintaining integrity and good corporate governance. With a strong legal basis and transparent and equal procedures, WBS ensures that all violations can be reported and handled with professionalism and fairness. This system not only increases accountability but also builds a culture of trust and integrity within Perhutani, supporting the long-term goal of creating a company free from fraud and corruption.

Perhutani Violation Reporting Policy

Perum Perhutani has established a violation reporting policy known as the *Whistleblowing System* (WBS). This policy applies universally and equally to all individuals at Perhutani, regardless of employee level. This includes the Board of Directors, the Supervisory Board, members of the Committee under the Supervisory Board, implementers of the violation reporting system itself, and external parties who have information related to the violations that occur.

Legal Basis for Implementing WBS

The management of Violation Reporting at Perhutani is regulated and authorized through the Decree of the Board of Directors of Perum Perhutani Number: 124/KPTS/DIR/11/2021. This policy prioritizes transparency and accountability in handling reports related to violations.

The implementation of WBS in Perhutani is based on various relevant laws and regulations, namely:

1. **Law Number 19 of 2003** concerning State-Owned Enterprises.
2. **Government Regulation Number 72 of 2010** concerning State Forestry Public Companies (Perum).

3. **Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/2023** tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.
4. **Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2015** tentang Benturan Kepentingan.
5. **Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001 tahun 2016** tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
6. **ISO 37002 tahun 2021** tentang *Whistleblowing System*.

Struktur dan Pelaksanaan WBS

WBS di Perhutani dirancang untuk memastikan bahwa semua individu, baik internal maupun eksternal, dapat melaporkan pelanggaran dengan aman dan tanpa takut akan pembalasan. Sistem ini memberikan saluran komunikasi yang transparan dan sistematis, sehingga semua laporan dapat ditangani dengan adil dan profesional.

1. **Universalitas dan Kesetaraan:** Sistem WBS berlaku untuk semua individu di Perhutani, memastikan setiap pelaporan diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan posisi atau status.
2. **Anonimitas dan Kerahasiaan:** Pelapor dapat memilih untuk tetap anonim, dan kerahasiaan identitas pelapor akan dijaga untuk melindungi mereka dari segala bentuk pembalasan.
3. **Proses Investigasi:** Setiap laporan yang diterima melalui WBS akan dianalisis dan diinvestigasi oleh tim yang independen dan berkompeten, memastikan penanganan yang tepat atas setiap pelanggaran.

Tujuan WBS Perhutani

Sebagai bagian dari *Fraud Control System* (FCS) dan termasuk dalam GCG *soft structure* yang dimiliki Perhutani, Kebijakan WBS memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

- Sebagai wadah dan panduan untuk penerimaan pelaporan dari berbagai dugaan melanggar hukum & peraturan Perusahaan, benturan kepentingan, kecurangan, korupsi, suap serta pencurian yang terjadi di lingkungan kerja Perusahaan;
- Membangun sistem penanganan pengaduan yang tanggap, transparan, aman dan bertanggung jawab;

3. **Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/2023** concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of BUMN.
4. **Regulation of the Minister of BUMN Number PER-01/MBU/2015** concerning Conflict of Interest.
5. **Indonesian National Standard (SNI) ISO 37001 of 2016** concerning Anti-Bribery Management Systems.
6. **ISO 37002 of 2021** concerning Whistleblowing System.

Structure and Implementation of WBS

WBS in Perhutani is designed to ensure that all individuals, both internal and external, can report violations safely and without fear of retaliation. This system provides a transparent and systematic communication channel, so that all reports can be handled fairly and professionally.

1. **Universality and Equality:** The WBS system applies to all individuals in Perhutani, ensuring that every report is treated fairly without discrimination based on position or status.
2. **Anonymity and Confidentiality:** Reporters can choose to remain anonymous, and the confidentiality of the reporter's identity will be maintained to protect them from any form of retaliation.
3. **Investigation Process:** Every report received through WBS will be analyzed and investigated by an independent and competent team, ensuring proper handling of every violation.

Objectives of Perhutani's WBS

As part of the Fraud Control System (FCS) and included in the GCG *soft structure* owned by Perhutani, the WBS Policy has objectives including the following:

- As a forum and guide for receiving reports of various alleged violations of Company laws & regulations, conflicts of interest, fraud, corruption, bribery and theft that occur in the Company's work environment;
- Building a responsive, transparent, safe and responsible complaint handling system;

- Memberi pemahaman yang sama tentang fungsi, peran dan proses-proses Sistem Pelaporan Pelanggaran serta menjamin kesinambungan sistem manajemen meskipun terjadi perubahan organisasi dan rotasi sumber daya manusia dengan menciptakan budaya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
 - Menyediakan cara penyampaian yang efektif untuk informasi penting dan kritis bagi Perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
 - Menciptakan keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, dan kepercayaan terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran yang efektif;
 - Menyediakan mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran;
 - Menyediakan kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik dan melibatkan aparat yang berwenang;
 - Mengurangi risiko yang dihadapi Perusahaan, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi;
 - Mengurangi biaya dalam menangani suatu perkara akibat dari terjadinya pelanggaran;
 - Meningkatkan reputasi Perusahaan di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator, dan masyarakat umum.
- Providing a common understanding of the functions, roles and processes of the Violation Reporting System and ensuring the continuity of the management system despite organizational changes and human resource rotations by creating a culture of Good Corporate Governance;
 - Providing an effective way to convey important and critical information for the Company to parties who must immediately handle it safely;
 - Creating a reluctance to commit violations, with increasing willingness to report violations, and trust in an effective Violation Reporting System;
 - Provide an early warning system for potential violations;
 - Provide an opportunity to handle violations internally first, before they escalate into public violations and involve authorized officers;
 - Reduce the risks faced by the Company, as a result of violations in terms of finance, operations, law, work safety, and reputation;
 - Reduce costs in handling a case resulting from a violation;
 - Increase the Company's reputation in the eyes of stakeholders, regulators, and the general public.

Lingkup Kebijakan WBS Perhutani

Lingkup pengaduan/penyingkapan yang ditindaklanjuti oleh sistem pelaporan pelanggaran antara lain:

- Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Korupsi, kolusi, nepotisme, tindakan kekerasan fisik, pemerasan, pencurian, penyuapan, gratifikasi, pelecehan seksual, penggunaan narkoba, kecurangan, perbuatan tindak pidana kehutanan, perbuatan yang membahayakan keamanan hutan, keselamatan kerja, kesehatan kerja dan keamanan perusahaan & perbuatan tindak pidana lainnya).
- Pelanggaran etika Perusahaan (*Code of Conduct*) atau norma-norma kesopanan, antara lain: benturan kepentingan, insider trading, etika kerja, dan kegiatan politik.

Scope of Perhutani WBS Policy

The scope of complaints/disclosures followed up by the violation reporting system includes:

- Violations of laws and regulations (Corruption, collusion, nepotism, acts of physical violence, extortion, theft, bribery, gratification, sexual harassment, drug use, fraud, forestry crimes, acts that endanger forest security, work safety, work health and company security & other criminal acts).
- Violation of Company ethics (Code of Conduct) or norms of decency, including: conflict of interest, insider trading, work ethics, and political activities.

- Pelanggaran peraturan Perusahaan (Peraturan Kerja Bersama dan Peraturan Disiplin Karyawan).

- Violation of Company regulations (Joint Work Regulations and Employee Disciplinary Regulations).

Pihak Pengelola Pengaduan

WBS Perhutani dikelola oleh Komite Pelaporan Pelanggaran, dengan komposisi sebagai berikut:

Komite Pelaporan Pelanggaran

Violation Reporting Committee

Sekretaris Perusahaan	Corporate Secretary	Ketua merangkap Anggota	Deputy Chairperson concurrently Member
Kepala Divisi SDM	Head of HR Division	Sekretaris merangkap Anggota	Secretary concurrently Member
Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan	Head of Legal and Compliance Division	Anggota	Member
Kepala SPI	Head of SPI	Anggota	Member
Petugas Khusus Bidang SDM	Special Officer for HR	Administrasi	Administration

Pengelolaan WBS Perhutani diatur dalam sebuah Prosedur Kerja Nomor: PK-SMPHT.15-016 tentang Pengelolaan Aplikasi Sistem Pengaduan Pelanggaran.

Complaint Management

Perhutani's WBS is managed by the Violation Reporting Committee, with the following composition:

The management of Perhutani's WBS is regulated in a Work Procedure Number: PK-SMPHT.15-016 concerning the Management of the Violation Complaint System Application.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Untuk menciptakan organisasi yang bersih sesuai dengan prinsip-prinsip GCG (Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, Kesetaraan dan Kewajaran), Perum Perhutani telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis, pedoman perilaku, peraturan Perusahaan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan akan pelanggaran tersebut disampaikan melalui sarana /media website <https://layanan.perhutani.co.id/wbs/>.

Submission of Violation Reports

To create a clean organization in accordance with the principles of GCG (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Equality and Fairness), Perum Perhutani has provided an opportunity to submit reports regarding alleged violations of business ethics, guidelines for behavior, Company regulations, and applicable laws and regulations. Reports of such violations are submitted through the website media <https://layanan.perhutani.co.id/wbs/>.

Pihak yang Dapat Melapor dan Dilaporkan Dalam WBS

Seluruh pemangku kepentingan perusahaan dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi di perusahaan, antara lain: Pelanggan, Vendor/Supplier, Mitra Bisnis, Karyawan/Pegawai, Dewan Pengawas, Direksi dan Pemilik Modal. Sedangkan pihak yang dapat dilaporkan sebagai pelaku pelanggaran adalah Dewan Pengawas, Direksi,

Parties Who Can Report and Be Reported in the WBS

All stakeholders of the company can report violations that occur in the company, including: Customers, Vendors/Suppliers, Business Partners, Employees/Staff, Supervisory Board, Directors and Capital Owners. Meanwhile, the parties that can be reported as perpetrators of violations are the Supervisory Board, Directors, and all employees

dan seluruh pegawai Perusahaan. Sanksi dapat diberikan kepada pelapor apabila terbukti bahwa laporan yang disampaikan ternyata fitnah dan terbukti bahwa laporan yang disampaikan mempunyai tujuan lain yang menyimpang dari maksud dan tujuan Kebijakan WBS. Sanksi dimaksud mengacu pada ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Sosialisasi WBS

Sosialisasi WBS telah dilakukan dengan metode penyebaran pamflet dan penyebaran informasi yang dimuat dalam Buletin Bulanan yang dibagikan kepada seluruh pegawai serta pada website Perusahaan. Sosialisasi WBS akan terus dilakukan secara berjenjang dan bertahap kepada seluruh stakeholder dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan WBS.

Perlindungan Pelapor Pelanggaran

Perhutani berkomitmen melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan melarang segala bentuk diskriminasi, pelecehan dan/ atau pembalasan dendam terhadap para Pelapor atau yang memberikan informasi, membantu dalam penyelidikan atau melanjutkan atau melakukan apapun yang terkait dengan WBS. Setiap Pelapor yang mendapatkan tekanan, ancaman atau tindakan pembalasan lain yang dialaminya dapat mengadukan hal tersebut kepada saluran yang telah disediakan Perusahaan. Apabila tidak dapat diselesaikan secara internal Perusahaan, Pelapor dijamin haknya untuk membawa ke lembaga independen di luar Perusahaan, seperti Mediator, Kepolisian atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan dibiayai Perusahaan.

Setiap Pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan dari Perusahaan berupa:

1. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh perusahaan, Perlindungan pelapor dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor dan perlindungan dari tindakan yang merugikan pelapor. Perlindungan pelapor bertujuan untuk menumbuhkan rasa aman bagi Insan Perhutani dan pelapor lainnya. Kebijakan perlindungan pelapor dimaksudkan pula untuk mendorong setiap Insan Perhutani dan Pelapor lainnya untuk berani melaporkan atas pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perhutani.

of the Company. Sanctions can be given to the reporter if it is proven that the report submitted is slanderous and it is proven that the report submitted has another purpose that deviates from the intent and purpose of the WBS Policy. The sanctions referred to refer to the provisions applicable in the Company.

WBS Socialization

WBS socialization has been carried out using the method of distributing pamphlets and disseminating information contained in the Monthly Bulletin which is distributed to all employees and on the Company's website. WBS socialization will continue to be carried out in stages and in stages to all stakeholders in order to increase the effectiveness of WBS implementation.

Protection of Violation Reporters

Perhutani is committed to protecting violation reporters who act in good faith and prohibits all forms of discrimination, harassment and/or retaliation against Reporters or those who provide information, assist in investigations or continue or do anything related to WBS. Any Reporter who experiences pressure, threats or other retaliatory actions that they experience can report this to the channels provided by the Company. If it cannot be resolved internally by the Company, the Reporter is guaranteed the right to take it to an independent institution outside the Company, such as a Mediator, the Police or the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and is funded by the Company

Every whistleblower will receive protection from the Company in the form of:

1. The identity of the reporter is guaranteed confidentiality by the company. Protection of the reporter is intended to provide a guarantee of confidentiality of the reporter's identity and protection from actions that are detrimental to the reporter. Protection of the reporter aims to foster a sense of security for Perhutani Personnel and other reporters. The policy of reporter protection is also intended to encourage every Perhutani Personnel and other Reporters to dare to report violations that occur within Perhutani.

2. Pelapor dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya.
3. Data dan bukti-bukti pengaduan terjaga kerahasiaannya.
4. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.
5. Pelapor dapat mengadukan bila mendapatkan balasan berupa tekanan atau ancaman atau tindakan pembalasan lain yang dialaminya.
6. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan tersebut.
7. Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor yang mempunyai itikad baik sebagai berikut:
 - Pemecatan yang tidak adil;
 - Penurunan jabatan atau pangkat;
 - Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
 - Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (personel file record).

Bagi Pelapor yang terlibat dalam Pelanggaran akan mendapat keringanan sanksi. Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum jika diperlukan, sejalan dengan yang diatur pada pasal 43 UU No. 15 tahun 2002 jo. UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 13 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 5 PP No. 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mekanisme dan Penanganan Pelaporan

1. Pelapor menyampaikan pengaduan pelanggaran melalui sarana/media website <http://layanan.perhutani.co.id/wbs/>.
2. Verifikator menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan pelanggaran, dengan ketentuan:
 - a. Apabila pengaduan tidak lengkap, akan dikonfirmasi kepada Pelapor untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya

2. The reporter is guaranteed the right to obtain information regarding the follow-up to his/her report.
3. Data and evidence of complaints are kept confidential.
4. The company guarantees protection for the reporter from all forms of threats, intimidation, or unpleasant actions from any party as long as the reporter maintains the confidentiality of the violation reported to any party.
5. The reporter can report if they receive a response in the form of pressure or threats or other retaliatory actions that they experience.
6. Protection for the reporter also applies to parties who carry out investigations and parties who provide information related to the complaint/disclosure.
7. The company provides protection to reporters who have good intentions as follows:
 - Unfair dismissal;
 - Demotion;
 - Harassment or discrimination in any form;
 - Adverse records in his/her personal data file (personnel file record).

For Reporters involved in Violations will receive reduced sanctions. The Company will also provide legal protection if necessary, in line with Article 43 of Law No. 15 of 2002 in conjunction with Law No. 25 of 2003 concerning Money Laundering Crimes and Article 13 of Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, and Article 5 of PP No. 57 of 2003 concerning Special Protection Procedures for Reporters and Witnesses in Money Laundering Crimes

Reporting Mechanism and Handling

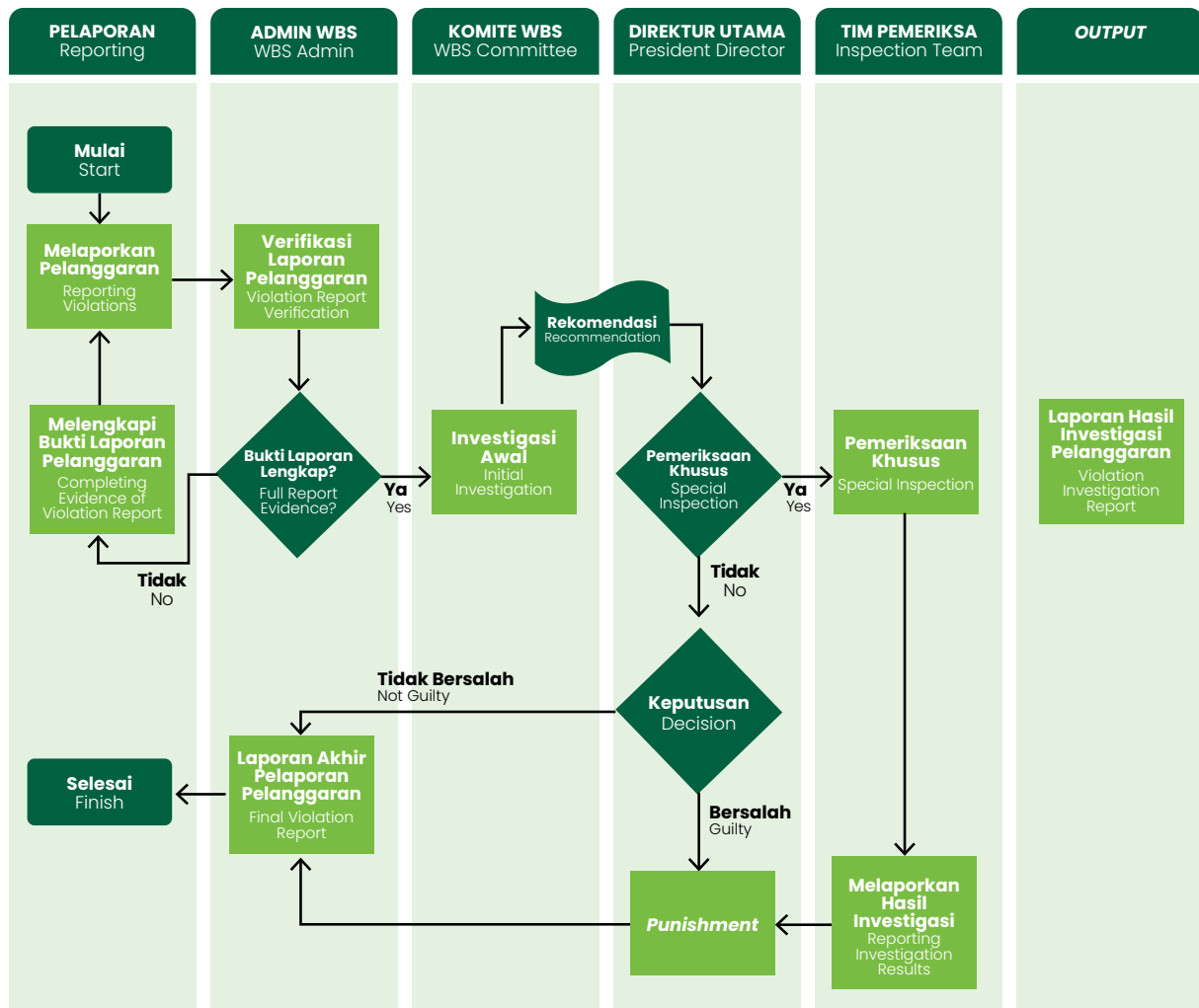
1. The reporter submits a complaint of violations through the website <http://layanan.perhutani.co.id/wbs/>.
2. The verifier receives and verifies the completeness of the complaint of violations, with the following provisions:
 - a. If the complaint is incomplete, it will be confirmed to the reporter to be completed within a maximum period of 7 (seven) calendar days from the receipt of the

- pengaduan.
 - b. Apabila dalam jangka waktu 7 hari kalender, Pelapor tidak melengkapi bukti-bukti pengaduan maka pengaduan tidak akan ditindak lanjuti dan dianggap selesai.
 - c. Apabila pengaduan lengkap maka pengaduan akan diteruskan ke Komite WBS melalui email yang hanya dapat diakses oleh Komite WBS.
3. Penelaah melakukan kajian/telaah dan investigasi awal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Melakukan kajian/telaah berdasarkan data-data yang ada dan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Hasil investigasi awal dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak menerima notifikasi dari Admin WBS;
 - c. Melaporkan hasil investigasi awal kepada *Reviewer* sebagai dasar pengambilan keputusan.
4. *Reviewer* berdasarkan hasil investigasi awal melakukan *review* terhadap kajian/pemeriksaan awal yang dilakukan oleh penelaah.
5. Berdasarkan laporan *reviewer*, Majelis Disiplin menetapkan:
 - a. Keputusan apakah akan dilakukan Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa;
 - b. Apabila terdapat bukti yang cukup maka Direktur Utama memutuskan pemberian sanksi sesuai peraturan perusahaan, atau diteruskan kepada pihak penyidik untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. Apabila tidak terdapat bukti yang cukup, maka Direktur Utama memutuskan proses pengaduan dinyatakan selesai (closed).
6. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama.
7. Dari laporan Tim Pemeriksa, Direktur Utama menetapkan keputusan tindakan selanjutnya, yaitu:
 - Apabila pengaduan tidak terbukti maka dinyatakan selesai; atau
 - Apabila pengaduan terbukti atau memerlukan tindak lanjut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, atau diteruskan kepada pihak aparat penegak hukum untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- complaint.
 - b. If within a period of 7 calendar days, the reporter does not complete the evidence of the complaint, the complaint will not be followed up and is considered complete.
 - c. If the complaint is complete, the complaint will be forwarded to the WBS Committee via email that can only be accessed by the WBS Committee.
3. The reviewer conducts a review/review and initial investigation with the following provisions:
 - a. Conduct a review/review based on existing data and in accordance with the provisions of applicable laws and regulations;
 - b. The results of the initial investigation are carried out no later than 7 (seven) calendar days after receiving notification from the WBS Admin;
 - c. Report the results of the initial investigation to the Reviewer as a basis for decision making.
4. The reviewer, based on the results of the initial investigation, reviews the initial study/examination conducted by the reviewer.
5. Based on the reviewer's report, the Disciplinary Council determines:
 - a. The decision whether an Examination will be conducted by the Examination Team;
 - b. If there is sufficient evidence, the President Director decides to impose sanctions in accordance with company regulations, or forward it to the investigator for further processing in accordance with laws and regulations; or
 - c. If there is insufficient evidence, the President Director decides that the complaint process is declared closed.
6. The Examination Team conducts a special examination of the complaint and reports the results to the President Director.
7. From the Examination Team's report, the President Director determines the decision on further action, namely:
 - If the complaint is not proven, it is declared finished; or
 - If the complaint is proven or requires follow-up, sanctions will be imposed in accordance with applicable provisions, or forwarded to law enforcement officers for further processing in accordance with laws and regulations.

Alur Whistleblowing System Perhutani

Perhutani Whistleblowing System Timeline



Pelaporan Pelanggaran dan Tindak Lanjut

Selama tahun 2023 tercatat 3 laporan dan 3 proses penelaahan pengaduan yang masuk ke akun WBS.

Perhutani melalui unit terkait secara aktif merespon dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk guna meminimalisir dampak atau risiko yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut terhadap Perusahaan. Seluruh laporan yang masuk telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh Perusahaan. Akan tetapi laporan tidak dapat di proses lebih lanjut karena data yang disampaikan pelapor kurang lengkap. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman pelapor terhadap sistem WBS yang ada, oleh sebab itu perlu bagi Perhutani untuk lebih menguatkan sosialisasi WBS.

Reporting of Violations and Follow-up

During 2023, 3 reports and 3 complaint review processes were recorded that were entered into the WBS account.

Perhutani through related units actively responded and followed up on each report received in order to minimize the impact or risk caused by the violation to the Company. All reports received have been followed up by the Company. However, the report could not be processed further because the data submitted by the reporter was incomplete. This happened because of the reporter's lack of understanding of the existing WBS system, therefore it is necessary for Perhutani to further strengthen the socialization of WBS.

Sanksi Bagi Pelanggar

Sanksi bagi terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sanksi bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran antara lain berupa teguran, peringatan tertulis, penurunan kelas jabatan, hingga pemecatan. Sanksi bagi pihak lain yang bekerja sama dengan Perhutani antara lain berupa pemutusan kontrak kerjasama. Selama tahun 2023, tidak terdapat sanksi yang diberikan sebagai tindak lanjut atas pelaporan pelanggaran.

Sanctions for Violators

Sanctions for reported parties who are proven to have committed violations have been regulated in the Joint Working Agreement (PKB). Sanctions for employees who are proven to have committed violations include reprimands, written warnings, demotions, and dismissal. Sanctions for other parties who work with Perhutani include termination of cooperation contracts. During 2023, there were no sanctions imposed as a follow-up to reporting violations.

Kebijakan Insider Trading Perhutani

Perhutani Insider trading Policy

Meskipun Perhutani bukan merupakan perusahaan terbuka (Tbk), kebijakan ketat mengenai Insider Trading tetap diimplementasikan untuk memastikan integritas dan etika seluruh proses bisnis serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. *Insider Trading* mengacu pada penyalahgunaan informasi material, namun non-publik, untuk keuntungan pribadi dalam transaksi sekuritas atau aset yang terkait dengan perusahaan.

Although Perhutani is not a public company (Tbk), a strict policy on Insider Trading is still implemented to ensure the integrity and ethics of the entire business process and maintain the trust of stakeholders. Insider Trading refers to the misuse of material, but non-public, information for personal gain in securities or asset transactions related to the company.

Ruang Lingkup Kebijakan

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh karyawan Perhutani, serta Direksi, Dewan Pengawas, anggota-anggota Komite di bawah Dewan Pengawas, dan pihak-pihak eksternal yang bekerja sama dengan Perhutani dan mungkin memiliki akses ke informasi penting yang belum dipublikasikan. Elemen-elemen utama kebijakan tersebut meliputi:

1. Pembatasan Penggunaan Informasi Material Non-Publik:

- Semua individu yang memiliki akses ke informasi material yang belum dipublikasikan dilarang keras untuk menggunakan informasi tersebut untuk transaksi atau keuntungan pribadi atau pihak lain.
- Informasi material non-publik mencakup data strategis yang berpotensi mempengaruhi keputusan operasi perusahaan atau nilai aset perusahaan jika diketahui oleh publik.

2. Transparansi dan Pelaporan:

- Direksi, Dewan Pengawas, dan karyawan wajib melaporkan kepemilikan aset yang terkait dengan perusahaan dan setiap transaksi yang dilakukan.
- Pelaporan ini membantu dalam menjaga transparansi dan mengurangi risiko penyalahgunaan informasi material.

3. Periode Tertentu (*Blackout Periods*):

- Perhutani menetapkan periode khusus, misalnya saat mendekati pengumuman

Policy Scope

This policy applies to all Perhutani employees, as well as the Board of Directors, Supervisory Board, members of the Committee under the Supervisory Board, and external parties who work with Perhutani and may have access to important information that has not been published. The main elements of the policy include:

1. Restrictions on the Use of Non-Public Material Information:

- All individuals who have access to unpublished material information are strictly prohibited from using such information for personal or other party transactions or benefits.
- Material non-public information includes strategic data that could potentially affect the company's operating decisions or the value of the company's assets if known to the public.

2. Transparency and Reporting:

- The Board of Directors, Supervisory Board, and employees are required to report the ownership of assets related to the company and any transactions made.
- This reporting helps maintain transparency and reduces the risk of misuse of material information.

3. Certain Periods (*Blackout Periods*):

- Perhutani sets special periods, for example when approaching the announcement

hasil keuangan atau strategi penting lainnya, di mana transaksi yang melibatkan aset atau sekuritas perusahaan dilarang bagi individu yang memiliki akses ke informasi material tersebut.

- Langkah ini dilakukan untuk mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan informasi rahasia dalam periode yang sensitif.

4. Kepatuhan terhadap Regulasi:

- Meski tidak diatur dengan ketat oleh regulasi pasar modal sebagaimana perusahaan terbuka, Perhutani tetap mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan etika bisnis dalam mengelola informasi material.
- Pelanggaran kebijakan ini dikenai sanksi sesuai prosedur internal, termasuk tindakan disipliner dan pelaporan ke otoritas terkait jika diperlukan.

5. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran:

Program edukasi secara berkelanjutan disediakan untuk seluruh karyawan dan mitra kerja agar memahami kebijakan insider trading dan pentingnya menjaga integritas serta kepercayaan.

of financial results or other important strategies, where transactions involving company assets or securities are prohibited for individuals who have access to such material information.

- This step is taken to prevent conflicts of interest and misuse of confidential information during sensitive periods.

4. Compliance with Regulations:

- Although not strictly regulated by capital market regulations as public companies, Perhutani still refers to the principles of good corporate governance and business ethics in managing material information.
- Violations of this policy are subject to sanctions according to internal procedures, including disciplinary action and reporting to relevant authorities if necessary.

5. Education and Awareness:

Continuous education programs are provided for all employees and partners to understand the insider trading policy and the importance of maintaining integrity and trust.

Penegakan Kebijakan

Perhutani menegakkan kebijakan insider trading melalui mekanisme pengawasan ketat dan audit internal yang rutin. Setiap laporan atau dugaan pelanggaran akan ditangani secara independen untuk memastikan investigasi yang adil dan objektif. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan diambil berdasarkan keadilan dan transparansi. Kebijakan ini mencerminkan komitmen Perum Perhutani untuk mencegah penyalahgunaan informasi material yang dapat merugikan perusahaan dan para pemangku kepentingannya. Dengan menjalankan kebijakan ketat dan terus mengedukasi seluruh karyawan dan pihak terkait, Perhutani berupaya menciptakan budaya perusahaan yang menjunjung tinggi etika dan kepercayaan. Melalui upaya ini, Perhutani tidak hanya melindungi aset dan informasi strategisnya tetapi juga memastikan lingkungan bisnis yang transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Policy Enforcement

Perhutani enforces its insider trading policy through strict monitoring mechanisms and regular internal audits. Any reports or allegations of violations will be handled independently to ensure a fair and objective investigation. This policy is designed to ensure that all decisions and actions are taken based on fairness and transparency. This policy reflects Perum Perhutani's commitment to preventing the misuse of material information that could harm the company and its stakeholders. By implementing strict policies and continuously educating all employees and related parties, Perhutani strives to create a corporate culture that upholds ethics and trust. Through these efforts, Perhutani not only protects its strategic assets and information but also ensures a transparent and fair business environment for all parties involved.





6

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY

Rujukan Keberlanjutan

Sustainability Reference

Laporan Keberlanjutan yang memuat informasi kegiatan Perhutani terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) disampaikan pada Laporan Keberlanjutan 2023, yang diterbitkan dalam buku terpisah dan dalam waktu yang bersamaan dengan Laporan Tahunan ini, sesuai dengan ketentuan SEOJK 16/SEOJK.04/2021. Informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan ini dan dalam Laporan Keberlanjutan 2023 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2022 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

The Sustainability Report containing information on Perhutani's activities related to social and environmental responsibility (TJSL) is submitted in the 2023 Sustainability Report, which is published in a separate book and at the same time as this Annual Report, in accordance with the provisions of SEOJK 16/SEOJK.04/2021. The information contained in this Annual Report and in the 2023 Sustainability Report is an inseparable and complementary part, as stipulated in the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2022 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Sebagai gambaran bahwa Perum Perhutani menerapkan strategi keberlanjutan untuk mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola guna mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilakukan secara GCG dan berlandaskan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Realisasi penyaluran TJSL tahun 2023 mencapai Rp17.499.405.858,- yang berpedoman pada regulasi dari Kementerian BUMN, serta realisasi pendanaan UMK tahun 2023 adalah sebesar Rp4.099.000.000,-, pendanaan ini dimasukkan ke dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 8, yang berfokus pada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

As an illustration, Perum Perhutani implements a sustainability strategy to cover economic, social, environmental, and governance aspects to support the Sustainable Development Goals (SDGs). The implementation of the Social and Environmental Responsibility program is carried out in a GCG manner and is based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises.

The realization of TJSL distribution in 2023 reached IDR 17,499,405,858, - which is guided by regulations from the Ministry of SOEs, and the realization of UMK funding in 2023 was IDR 4,099,000,000, -, this funding is included in the Sustainable Development Goal (TPB) 8, which focuses on decent work and economic growth.

Perhutani menerapkan prinsip tata kelola keberlanjutan yang sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, mulai dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan asas kewajaran. Selain itu Manajemen risiko tidak dapat dipisahkan dari kegiatan utama ataupun proses lain dalam Perusahaan. Oleh sebab itu manajemen risiko kami integrasikan sepenuhnya ke dalam tata kelola Perusahaan agar dapat memberikan kepastian terhadap pencapaian sasaran Perusahaan. Perhutani, sebagai perusahaan yang berfokus pada jasa pengolahan Sumber Daya Alam, menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap kinerja lingkungan, dengan tetap memperhatikan aspek sosial, kemasyarakatan, sampai dengan tanggung jawab pengembangan produk/jasa berkelanjutan.

Perhutani applies the principle of sustainable governance that is in line with the principles of good corporate governance, starting from transparency, accountability, responsibility, independence, and the principle of fairness. In addition, risk management cannot be separated from the main activities or other processes in the Company. Therefore, we fully integrate risk management into the Company's governance in order to provide certainty regarding the achievement of the Company's targets. Perhutani, as a company that focuses on Natural Resource processing services, shows a high commitment to environmental performance, while still paying attention to social and community aspects, to the responsibility for developing sustainable products/services.



Referensi POJK No. 29/POJK.04/2016 dan SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021

POJK NO. 29/POJK.04/2016 and SEOJK No.16/SEOJK.04/2021 Reference

No	Uraian Description	Halaman Page
1. Ketentuan Umum/ General Requirements		
A.	Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai: • Ikhtisar data keuangan penting; • Informasi saham (jika ada); • Laporan Direksi; • Laporan Dewan Komisaris; • Profil Emiten atau Perusahaan Publik; • Analisis dan pembahasan manajemen; • Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; • Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; • Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan • Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan;	The Annual Report at least contains information regarding: • Overview of key financial data; • Share information (if any); • Report of the Board of Directors; • Report of the Board of Commissioners; • Profile of the Issuer or Public Company; • Management analysis and discussion; • Governance of the Issuer or Public Company; • Social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company; • Audited annual financial statements; and • Statement letter from members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding responsibility for the Annual Report;
B.	Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami	The Annual Report may present information in pictures, graphs, tables, and/or diagrams by including a clear title and/or description, so that it is easy to read and understand.
2. Uraian Isi Laporan Tahunan/ Description of Annual Report Contents		
A.	Ikhtisar Data Keuangan Penting	Summary of Key Financial Data
	Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	Summary of significant financial data contains financial information presented in comparative form for 3 (three) financial years or since commencement of business if the Issuer or Public Company has been in business for less than 3 (three) years, at least the following contains:
	1. Pendapatan/penjualan;	Revenue/sales;
	2. Laba bruto;	Gross profit;
	3. Laba (rugi);	Profit (loss);
	4. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	Total profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;
	5. Total laba (rugi) komprehensif;	Total comprehensive income (loss);
	6. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	Total comprehensive income (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interests;
	7. Laba (rugi) per saham;	Earnings (loss) per share;
	8. Jumlah aset;	Total assets;
	9. Jumlah liabilitas;	Total liabilities;
	10. Jumlah ekuitas;	Total equity;
	11. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	Ratio of profit (loss) to total assets;
	12. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	Ratio of profit (loss) to equity;
	13. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;	Ratio of profit (loss) to revenue/sales;
	14. Rasio lancar;	Current ratio;
	15. Rasio liabilitas terhadap ekuitas;	Liability to equity ratio;
	16. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	Liability to total assets ratio; and
	17. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya;	Other financial information and ratios relevant to the Issuer or Public Company and its industry;
B.	Informasi Saham	Share Information
	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:	Share information for Public Listed Companies shall at least contain:
	1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	Shares that have been issued for each quarterly period presented in the form of a comparison for the last 2 (two) financial years, at least containing:

No	Uraian Description	Halaman Page
	a. Jumlah saham yang beredar; b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan d. Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. e. Informasi dalam huruf b), huruf c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek;	a. Number of shares outstanding; b. Market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed; c. The highest, lowest, and closing share price based on the price on the stock exchange where the shares are listed; and d. Trading volume on the stock exchange where the shares are listed. e. Information in letter b), letter c), and letter d) is only disclosed if the shares are listed on the stock exchange;
2.	Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	In the event of corporate actions that cause changes to the shares, such as stock splits, reverse stock mergers, stock dividends, bonus shares, changes in par value of shares, issuance of convertible securities, and capital increases and decreases, the information on shares as referred to in point 1) shall be added with explanations at least regarding:
	a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi; b. Rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; c. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; d. Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan e. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	a. Date of implementation of the corporate action; b. Ratio of stock split, reverse stock, stock dividend, bonus shares, number of convertible securities issued, and change in par value of shares; c. Number of shares outstanding before and after the corporate action; d. Number of convertible securities exercised (if any); and e. The share price before and after the corporate action;
3.	Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan	In the event of suspension and/or delisting during the financial year, the reasons for the suspension and/or delisting shall be explained; and
4.	Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut.	In the event that the suspension as referred to in point 3) and/or delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, the actions taken to resolve the suspension and/or delisting are explained.
C.	Laporan Direksi	The Board of Directors Report
	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	The Board of Directors report shall at least contain a brief description of:
1.	Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	Performance of the Issuer or Public Company, at least contains:
	a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik	a. Strategy and strategic policy of the Issuer or Public Company
	b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik	b. The role of the Board of Directors in the formulation of strategic strategies and policies of the Issuer or Public Company
	c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik	c. The process undertaken by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategies
	d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan	d. Comparison between the results achieved and those targeted by the Issuer or Public Company; and
	e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	e. Obstacles faced by the Issuer or Public Company;
2.	Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan	An overview of the business prospects of the Issuer or Public Company; and
3.	Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik	Implementation of governance of the Issuer or Public Company
D	Laporan Dewan Komisaris	The Board of Commissioners Report
	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	The Board of Commissioners' report contains at least a brief description of:

No	Uraian Description	Halaman Page
1.	Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi;	Assessment of the performance of the Board of Directors regarding the management of the Issuer or Public Company, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of the strategy of the Issuer or Public Company carried out by the Board of Directors;
2.	Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan	Views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and
3.	Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	Views on the implementation of governance of the Issuer or Public Company.
E	Profil Emiten atau Perusahaan Publik	Profile of Issuer or Public Company
	Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi:	Profile of Issuer or Public Company at least contains information on:
1.	Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	Name of the Issuer or Public Company, including if there is a change of name, the reason for the change, and the effective date of the change of name in the financial year;
2.	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: a. Alamat; b. Nomor telepon; c. Alamat surat elektronik; dan d. Alamat situs web;	Access to the Issuer or Public Company including branch offices or representative offices that enable the public to obtain information about the Issuer or Public Company, including: a. Address; b. Phone number c. Email address; and d. Website address;
3.	Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik	Brief history of the Issuer or Public Company
4.	Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan	Vision and mission of the Issuer or Public Company as well as corporate culture or corporate values;
5.	Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	Business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the financial year, and types of goods and/or services produced;
6.	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik;	Operational area of the Issuer or Public Company;
7.	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan	Organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to a structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions
8.	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan;	List of membership of industry associations both on a national and international scale relating to the implementation of sustainable finance;
9.	Profil Direksi, paling sedikit memuat:	Profile of the Board of Directors, containing at least:
a.	Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	a. Name and position according to duties and responsibilities;
b.	Foto terbaru;	b. Latest photograph;
c.	Usia;	c. Age;
d.	Kewarganegaraan;	d. Nationality;
e.	Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	e. Education and/or certification history;
f.	Riwayat jabatan, meliputi informasi: i. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; ii. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan iii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.	f. Position history, including information: i. Legal basis for appointment as member of the Board of Directors in the relevant Issuer or Public Company; ii. Concurrent position, either as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of committee and other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that the member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then disclose the matter; and iii. Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company.
g.	Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan	g. Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly up to the individual owner, including the name of the affiliated party. In the event that a member has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose the same; and

No	Uraian Description	Halaman Page
	h. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	h. Changes in the composition of members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of members of the Board of Directors, then disclose the matter;
10.	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; b. Foto terbaru; c. Usia; d. Kewarganegaraan; e. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; f. Riwayat jabatan, meliputi informasi: i. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; ii. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; iii. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan iv. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. g. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; h. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan i. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	Profile of the Board of Commissioners, at least contains: a. Name and position according to duties and responsibilities; b. Latest photograph; c. Age; d. Nationality; e. Education and/or certification history; f. Position history, including information: i. Legal basis for appointment as a member of the Board of Commissioners; ii. Legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the relevant Issuer or Public Company; iii. Concurrent position, either as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of committee and other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners does not hold concurrent positions, such disclosure shall be made; and IV. Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company. g. Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly up to the individual owner, including the name of the affiliated party; In the event that members of the Board of Commissioners do not have any affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose the same; h. Statement of independence of independent commissioners in the event that independent commissioners have served more than 2 (two) periods; and i. Changes in the composition of members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of members of the Board of Commissioners, then disclose the matter;
11.	Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	In the event that there is a change in the composition of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that occurs after the end of the financial year until the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the last and previous composition of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
12.	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku;	Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contract) in the financial year;
13.	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: a. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan c. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik	Names of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the financial year, which consists of information regarding: a. Shareholders who own 5% (five percent) or more of the shares of the Issuer or Public Company; b. Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares of the Issuer or Public Company. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then the matter shall be disclosed; and c. Group of public shareholders, i.e. group of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company.

No	Uraian Description	Halaman Page
14.	Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	Percentage of indirect ownership of shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year, including information on shareholders registered in the register of shareholders for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
15.	Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: a. Kepemilikan institusi lokal; b. Kepemilikan institusi asing; c. Kepemilikan individu lokal; dan d. Kepemilikan individu asing;	Number of shareholders and percentage of ownership as of the end of the financial year by classification: a. Local institutional ownership; b. Foreign institutional ownership; c. Local individual ownership; and d. Foreign individual ownership;
16.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	Information on major shareholders and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, down to individual owners, presented in the form of schemes or charts;
17.	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama;	Name of subsidiaries, associated companies, joint venture companies where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), along with percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of subsidiaries, associated companies, joint venture companies;
18.	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada);	Chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing until the end of the financial year and the name of the stock exchange where the Issuer's or Public Company's shares are listed, including stock split, reverse stock merger, stock dividend, bonus shares, and change in nominal value of shares, implementation of convertible securities, implementation of capital increase and reduction (if any);
19.	Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	Information on the listing of other securities other than the securities as referred to in the number that have not matured in the financial year at least contains the name of the securities, year of issuance, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);
20.	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: a. Nama dan alamat; b. Periode penugasan; c. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; d. Biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan e. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan f. Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.	Information on the use of services of public accountants (AP) and public accounting firms (KAP) and their networks/associations/alliances including: a. Name and address; b. Period of assignment; c. Information on audit and/or non-audit services provided; d. Audit and/or non-audit fees for each assignment provided during the financial year; and e. In the event that the AP and KAP along with its network/association/alliance, appointed do not provide non-audit services, the information shall be disclosed; and f. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/alliances can be presented in the form of a table.
21.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	Name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP.
F.	Analisis dan Pembahasan Manajemen	Management Discussion and Analysis
	Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	Management's discussion and analysis contains analysis and discussion of the financial statements and other important information with an emphasis on material changes that occurred during the financial year, which includes at least:
1.	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; b. Pendapatan/penjualan; dan c. Profitabilitas;	Review of operations per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding: a. Production, including process, capacity, and development; b. Revenue/sales; and c. Profitability;

No	Uraian Description	Halaman Page
2.	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: a. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; b. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; c. Ekuitas; d. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan e. Arus kas;	Comprehensive financial performance that includes a comparison of financial performance in the last 2 (two) financial years, an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes, at least regarding: a. Current assets, non-current assets, and total assets; b. Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities; c. Equity; d. Revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive income (loss); and e. Cash flow;
3.	Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	Ability to pay debts or liabilities by presenting relevant ratio calculations;
4.	Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	The collectibility level of receivables of the Issuer or Public Company by presenting relevant ratio calculations;
5.	Struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	Capital structure and management policy on the capital structure, along with the basis for determining the policy;
6.	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: a. Tujuan dari ikatan tersebut; b. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; c. Mata uang yang menjadi denominasi; dan d. Langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	Discussion on material ties for investment in capital goods with an explanation containing at least: a. The purpose of the bond; b. The expected source of funds to fulfill the bond; c. The currency of denomination; and d. Measures planned by the Issuer or Public Company to hedge the risk of the related foreign currency position;
7.	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: a. Jenis investasi barang modal; b. Tujuan investasi barang modal; dan c. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	Discussion on investment in capital goods realized in the last financial year, at least containing: a. Type of investment in capital goods; b. Purpose of capital goods investment; and c. The value of capital goods investment incurred;
8.	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	Information and material facts that occurred after the date of the accountant's report (if any);
9.	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	Business prospects of the Issuer or Public Company in relation to industry conditions, the economy in general and international markets accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources;
10.	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: a. Pendapatan/penjualan; b. Laba (rugi); c. Struktur modal (capital structure); atau d. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	Comparison between targets/projections at the beginning of the financial year and the results achieved (realization), regarding: a. Revenue/sales; b. Profit (loss); c. Capital structure; or d. Other matters considered important for the Issuer or Public Company;
11.	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: a. Pendapatan/penjualan; b. Laba (rugi); c. Struktur modal (capital structure); d. Kebijakan dividen; atau e. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	Target/projection to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding: a. Revenue/sales; b. Profit (loss); c. Capital structure; d. Dividend policy; or e. Other matters considered important for the Issuer or Public Company;
12.	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	Marketing spec on goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding marketing strategy and market share;
13.	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: a. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; b. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; c. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan d. Jumlah dividen per tahun yang dibayar; e. Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan hal tersebut.	Description of dividends for the last 2 (two) financial years, at least: a. Dividend policy, including information on the percentage of total dividends distributed to net profit; b. Cash dividend payment dates and/or non-cash dividend distribution dates; c. The amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and d. Total dividends per year paid; e. Disclosure of information may be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company has not paid dividends in the last 2 (two) years, it shall disclose the same.

No	Uraian Description	Halaman Page
14.	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	Realization of the use of proceeds from the public offering, provided that: a. In the event that during the financial year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of proceeds, the realization of the use of proceeds from public offering shall be disclosed cumulatively up to the end of the financial year; and b. In the event that there is a change in the use of proceeds as stipulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of proceeds from public offering, the Issuer shall explain such change;
15	Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi; b. Nama pihak yang melakukan transaksi; c. Sifat hubungan afiliasi (jika ada); d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; e. Pemenuhan ketentuan terkait; dan f. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: i. Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms-length principle); dan ii. Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms-length principle);	Material information (if any), among others regarding investment, expansion, divestment, merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, which occurred during the year under review, at least contains: a. Date, value, and object of the transaction; b. The name of the party conducting the transaction; c. The nature of the affiliated relation (if any); d. Explanation of the fairness of the transaction; e. Fulfillment of related provisions; and f. In the event that there is an affiliated relation, in addition to disclosing information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company shall also disclose information: i. Statement of the Board of Directors that the affiliated transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliated transaction is carried out according to generally accepted business practices, among others, by fulfilling the arms-length principle; and ii. The role of the Board of Commissioners and audit committee in conducting adequate procedures to ensure that related party transactions are carried out according to generally accepted business practices, among others, by fulfilling the arms-length principle;
	g. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; h. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; i. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	g. For affiliated transactions or material transactions that are business activities carried out to generate business income and are carried out routinely, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transaction or material transaction is a business activity carried out to generate business income and is carried out routinely, repeatedly, and/or continuously; h. For the disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that are the result of the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, information is added regarding the date of the GMS that approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions; i. In the event that there are no affiliated transactions and/or conflict of interest transactions, then disclose the matter;
16.	Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	Changes in legislation that significantly affect the Issuer or Public Company and its impact on financial statements (if any); and
17.	Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	Changes in accounting policies, reasons and impact on financial statements (if any).
G	Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik	Governance of the Issuer or Public Company
	Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	The governance of the Issuer or Public Company at least contains a brief description of:
1.	RUPS, paling sedikit memuat	GMS, at least contains
	a. Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	a. Information regarding GMS decisions in the financial year and 1 (one) year prior to the financial year including:

No	Uraian Description	Halaman Page
	i. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan ii. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; b. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	
	i. GMS resolutions in the financial year and 1 (one) year prior to the financial year that are realized in the financial year; and ii. GMS resolutions in the financial year and 1 (one) year prior to the financial year that have not been realized along with the reasons for not yet realized; b. In the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the implementation of the GMS for vote counting, it shall disclose such matter;	
2.	Direksi, paling sedikit memuat:	Board of Directors, at least contains:
	a. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	a. Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors;
	b. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi;	b. A statement that the Board of Directors has a guideline or charter of the Board of Directors;
	c. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	c. Policies and implementation of the frequency of Board of Directors meetings, joint Board of Directors meetings with the Board of Commissioners, and the attendance rate of members of the Board of Directors in such meetings including attendance at the GMS; Information on the level of attendance of members of the Board of Directors in Board of Directors meetings, joint meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or GMS can be presented in the form of a table.
	d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	d. Training and/or competency improvement of members of the Board of Directors:
	i. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan	i. Policy on training and/or competency improvement of members of the Board of Directors, including orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and
	ii. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);	ii. Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the financial year (if any);
	e. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: i. Prosedur penilaian kinerja; dan ii. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	e. The Board of Directors' assessment of the performance of committees that support the implementation of the duties of the Board of Directors in the financial year at least contains: i. Performance assessment procedures; and ii. Criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings;
	f. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut	f. In the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, then disclose the matter.
3.	Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	Board of Commissioners, at least contains
	a. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	a. Duties and responsibilities of the Board of Commissioners;
	b. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris;	b. A statement that the Board of Commissioners has a guideline or charter for the Board of Commissioners;
	c. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	c. Policy and implementation of the frequency of Board of Commissioners meetings, Board of Commissioners meetings with the Board of Directors and the attendance rate of members of the Board of Commissioners in such meetings including attendance at the GMS; Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners in Board of Commissioners meetings, Board of Commissioners meetings with Board of Directors, or GMS can be presented in form of a table.
	d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	d. Training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:
	i. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan	i. Policy on training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners, including orientation program for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and
	ii. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada);	ii. Training and/or competency improvement attended by members of Board of Commissioners during financial year (if any);

No	Uraian Description	Halaman Page
e.	Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: i. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; ii. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan iii. Pihak yang melakukan penilaian;	e. Performance assessment of the Board of Directors and the Board of Commissioners and each member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, at least containing: i. Procedures for the implementation of performance appraisal; ii. Criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; iii. The party conducting the assessment;
f.	Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: i. Prosedur penilaian kinerja; dan ii. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	f. The Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committee that supports the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the financial year includes: i. Performance assessment procedures; and ii. Criteria used such as performance achievements during the financial year, competence, and attendance at meetings;
4.	Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan b. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: i. Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; ii. Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/ bonus dan lainnya; dan iii. Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	Nomination and remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners, at least contains: a. Nomination procedures, including a brief description of the policy and process of nominating members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and b. Procedures and implementation of remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners, among others: i. Procedures for determining the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners; ii. Structure of remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and iii. The amount of remuneration of each member of Board of Directors and members of Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in form of a table.
5.	Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: a. Nama; b. Dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; c. Periode penugasan dewan pengawas syariah; d. Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan e. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	Sharia supervisory board, for Issuers or Public Companies conducting business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, at least contains: a. Name; b. Legal basis for the appointment of the sharia supervisory board; c. Period of assignment of the sharia supervisory board; d. Duties and responsibilities of the sharia supervisory board; and e. The frequency and manner of providing advice and counsel and supervising the fulfillment of sharia principles in the capital market to the Issuer or Public Company;
6.	Komite audit, paling sedikit memuat: a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b. Usia; c. Kewarganegaraan; d. Riwayat pendidikan; e. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; f. Riwayat jabatan, meliputi informasi: i. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/ atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan ii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; g. Periode dan masa jabatan anggota komite audit;	Audit committee, at least contains: a. Name and position in the committee membership; b. Age; c. Nationality; d. Education history; e. Position history, including information: f. Legal basis for appointment as a committee member; i. Concurrent position, either as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee and other positions (if any); and ii. Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; g. Period and tenure of audit committee members;

No	Uraian Description	Halaman Page
	h. Pernyataan independensi komite audit;	h. Statement of independence of the audit committee;
	i. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	i. Training and/or competency improvement that has been followed in the financial year (if any);
	j. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan	j. Policy and implementation of audit committee meeting frequency and attendance level of audit committee members in the meeting; and
	k. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit;	k. Implementation of audit committee activities in the financial year according to the guidelines or charter of the audit committee;
7.	Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	The nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least contains:
	a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	a. Name and position in the committee membership;
	b. Usia;	b. Age;
	c. Kewarganegaraan;	c. Nationality;
	d. Riwayat pendidikan;	d. Education history;
	e. Riwayat jabatan, meliputi informasi:	e. Position history, including information
	i. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	i. Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee and other positions (if any); and
	ii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	ii. Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;
	f. Periode dan masa jabatan anggota komite;	f. Period and tenure of committee members;
	g. Pernyataan independensi komite;	g. Statement of independence of the committee;
	h. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	h. Training and/or competency improvement that has been followed in the financial year (if any);
	i. Uraian tugas dan tanggung jawab;	i. Description of duties and responsibilities;
	j. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter);	j. Statement that there is a guideline or charter;
	k. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut;	k. Policy and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meetings;
	l. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan	l. A brief description of the implementation of activities in the financial year; and
	m. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:	m. In the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) up to letter l) and disclose:
	i. Alasan tidak dibentuknya komite; dan	i. The reason for not forming the committee; and
	ii. Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	ii. Parties that carry out the nomination and remuneration function;
8.	Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	Other committees owned by the Issuer or Public Company to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least contain:
	a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	a. Name and position in the committee membership;
	b. Usia;	b. Age;
	c. Kewarganegaraan;	c. Nationality;
	d. Riwayat pendidikan;	d. Education history;
	e. Riwayat jabatan, meliputi informasi:	e. Position history, including information
	f. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	f. Legal basis for appointment as a committee member;
	i. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	i. Concurrent position, either as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee and other positions (if any); and

No	Uraian Description	Halaman Page
	ii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; g. Periode dan masa jabatan anggota komite; h. Pernyataan independensi komite; i. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan j. Uraian tugas dan tanggung jawab; k. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; l. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan i. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	ii. Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; g. Period and tenure of committee members; h. Statement of independence of the committee; i. Training and/or competency improvement that has been participated in the financial year (if any); and j. Description of duties and responsibilities; k. Statement that the committee has a guideline or charter; l. Policy and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at such meetings; and i. A brief description of the implementation of committee activities in the financial year;
9.	Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat:	Corporate secretary, at least contains:
	a. Usia;	a. Age;
	b. Domisili;	b. Domicile;
	c. Riwayat jabatan, meliputi:	c. Position history, including:
	i. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan	i. Legal basis for appointment as corporate secretary; and
	ii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	ii. Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;
	e. Riwayat pendidikan;	e. Education history;
	f. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan	f. Training and/or competency improvement participated in the year under review; and
	g. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku;	g. Brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary in the financial year;
10.	Unit audit internal, paling sedikit memuat:	Internal audit unit, at least contains:
	a. Nama kepala unit audit internal;	a. Name of the head of the internal audit unit;
	b. Riwayat jabatan, meliputi:	b. Position history, including:
	i. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan	i. Legal basis for appointment as head of internal audit unit; and
	ii. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	ii. Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;
	c. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	c. Qualification or certification as internal audit professional (if any);
	d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku;	d. Training and/or competency improvement participated in the year under review
	e. Struktur dan kedudukan unit audit internal;	e. Structure and position of the internal audit unit;
	f. Uraian tugas dan tanggung jawab;	f. Description of duties and responsibilities;
	g. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan	g. A statement that the internal audit unit has a guideline or charter; and
	h. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit;	h. A brief description of the implementation of the internal audit unit's duties in the financial year including policies and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;
11.	Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	Description of the internal control system applied by the Issuer or Public Company, at least containing:
	a. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya;	a. Financial and operational control, and compliance with other legislation;
	b. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan	b. Review of the effectiveness of the internal control system; and
	c. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	c. Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;

No	Uraian Description	Halaman Page
12.	Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	Risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least contains:
a.	Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	a. General description of the risk management system of the Issuer or Public Company;
b.	Jenis risiko dan cara pengelolaannya;	b. Types of risks and how they are managed;
c.	Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan	c. Review of the effectiveness of the Issuer's or Public Company's risk management system; and
d.	Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	d. Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or audit committee on the adequacy of the risk management system;
	Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat:	Legal cases with material impact faced by the Issuer or Public Company, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), including at least:
a.	Pokok perkara/gugatan;	a. The subject matter of the case/defense;
b.	Status penyelesaian perkara/gugatan; dan	b. Status of settlement of the case/defense; and
c.	Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	c. Effect on the condition of the Issuer or Public Company;
14.	Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	Information on administrative sanctions/sanctions imposed on the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities in the financial year (if any);
15.	Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	Information on the code of ethics of the Issuer or Public Company including:
a.	Pokok-pokok kode etik;	a. Principles of code of ethics;
b.	Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	b. Form of socialization of the code of ethics and its enforcement; and
c.	Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	c. A statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Issuer or Public Company;
16.	Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen.	A brief description of the policy of providing performance-based long-term compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), among others in the form of share ownership program by management.
	Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat:	In the case of compensation in the form of management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed shall at least contain:
a.	Jumlah saham dan/atau opsi;	a. Number of shares and/or options;
b.	Jangka waktu pelaksanaan;	b. The period of implementation;
c.	Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	c. Requirements for eligible employees and/or management; and
d.	Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan;	d. Implementation price or determination of implementation price;
17.	Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:	A brief description of the information disclosure policy regarding:
a.	Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan	a. Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) business days after the occurrence of ownership or any change in ownership of the Public Company's shares; and
b.	Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;	b. Implementation of the policy;
18.	Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	Description of the whistleblowing system in the Issuer or Public Company, at least containing:
a.	Cara penyampaian laporan pelanggaran;	a. How to submit violation report;
b.	Perlindungan bagi pelapor;	b. Protection for the whistleblower;
c.	Penanganan pengaduan;	c. Handling of complaints;
d.	Pihak yang mengelola pengaduan; dan	d. Parties that manage complaints; and

No	Uraian Description	Halaman Page
	e. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: i. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan ii. Tindak lanjut pengaduan; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	e. Results of complaint handling, at least: i. The number of complaints received and processed in the financial year; and ii. Follow-up of complaints; In the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, it shall disclose this matter.
19	Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a. Program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan b. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud	Description of anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing: a. Programs and procedures undertaken in addressing corruption, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities within the Issuer or Public Company; and b. Anti-corruption training/socialization to employees of the Issuer or Public Company; In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, explain the reasons for not having such policy.
20.	Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: a. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau b. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	Implementation of Public Company governance guidelines for Issuers that issue equity securities or Public Company, including: a. Statement regarding recommendations that have been implemented; and/or b. Explanation on recommendations that have not been implemented, along with reasons and alternative implementation (if any). Disclosure of information may be presented in the form of a table.
H.	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik (Lampiran SEOJK 16/2021) Bagian Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik disajikan dalam bentuk Laporan Keberlanjutan (Sustainability Reporting) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini.	Social and Environmental Responsibility of Issuer or Public Company (Attachment SEOJK 16/2021) The Social and Environmental Responsibility section of the Issuer or Public Company is presented in the form of a Sustainability Reporting which is an integral part of this Annual Report.
I.	Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek.	Audited Annual Financial Statements The annual financial statements contained in the Annual Report are prepared according to Indonesian financial accounting standards and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The annual financial statements contain a statement regarding the responsibility for the financial statements as stipulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the responsibility of the Board of Directors for financial statements or the laws and regulations in the capital market sector that regulate the periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities company.
J.	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan	Statement Letter of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners on the Responsibility for the Annual Report. Statement letter of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding responsibility for the Annual Report shall be prepared according to the format of Statement Letter of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibility for the Annual Report.

7

**LAMPIRAN
FITCH RATINGS**

FITCH RATINGS ATTACHMENT



Jakarta, 13 Mei 2024

No: 84/DIR/RATLTR/V/2024

Kepada Yth.
Bapak Wahyu Kuncoro
Direktur Utama
Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
Jl. TB Simatupang No.22, RT. 1/RW. 8,
Jati Padang, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540

Perihal: Peringkat Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

Dengan hormat,

PT Fitch Ratings Indonesia (“**Fitch**”) menetapkan peringkat berikut ini:

- Peringkat Nasional Jangka Panjang ‘**A-(idn)**’; Outlook Stabil

Peringkat Nasional 'A' menunjukkan ekspektasi tingkat risiko gagal bayar yang rendah relatif terhadap emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama.

Dalam menerbitkan dan memantau pemeringkatannya, Fitch mengandalkan informasi faktual yang diterimanya dari para emiten dan dari sumber lainnya yang Fitch percayai kredibilitasnya. Fitch melakukan pemeriksaan yang masuk akal sehubungan dengan informasi faktual sesuai dengan metodologi pemeringkatannya, dan mendapatkan verifikasi yang masuk akal mengenai informasi tersebut dari sumber yang independen, sejauh sumber-sumber tersebut tersedia untuk efek tersebut atau dalam yurisdiksi tersebut.

Sifat pemeriksaan faktual yang dilakukan Fitch dan cakupan dari verifikasi pihak-ketiga yang diperoleh akan berbeda-beda bergantung pada sifat dari efek yang diperingkat dan emiten yang menerbitkannya, ketentuan-ketentuan dan praktek dalam yurisdiksi dimana efek yang diperingkat ditawarkan/dijual atau dimana emiten berada, tersedianya dan sifat dari informasi publik yang relevan, akses terhadap manajemen dari emiten dan para penasihatnya, tersedianya verifikasi pihak ketiga yang sudah tersedia sebelumnya seperti laporan audit, surat-surat mengenai prosedur-prosedur yang telah disepakati sebelumnya, *appraisals*, laporan aktuarial, laporan teknis, opini legal dan laporan lainnya yang disediakan oleh pihak ketiga, tersedianya sumber verifikasi pihak ketiga yang independen dan kompeten sehubungan dengan efek tertentu atau dalam yurisdiksi tertentu dari emiten, dan banyak faktor-faktor lainnya.

Para pengguna pemeringkatan Fitch hendaknya mengerti bahwa pemeriksaan faktual atau verifikasi pihak ketiga manapun tidak dapat memastikan bahwa semua informasi yang diandalkan Fitch sehubungan dengan proses pemberian peringkat akan pasti akurat atau lengkap. Sehingga, para emiten dan penasihatnya adalah yang bertanggung jawab atas keakuratan dari informasi yang mereka sediakan bagi Fitch dan bagi pasar dalam dokumen penawaran dan laporan-laporan lainnya. Dalam menerbitkan pemeringkatannya, Fitch harus mengandalkan pekerjaan dari para ahli, termasuk auditor independen sehubungan dengan laporan keuangan dan pengacara sehubungan dengan permasalahan legal dan pajak. Lagi pula, pemeringkatan berpandangan kedepan dan menggambarkan asumsi dan perkiraan mengenai kejadian-kejadian di masa depan, yang pada dasarnya tidak bisa diverifikasi sebagai fakta. Oleh karena itu, walaupun fakta-fakta yang ada sekarang dapat

Halaman 1 dari 3



diverifikasi, pemeringkatan dapat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian atau kondisi lainnya di masa depan yang tidak dapat diantisipasi pada saat peringkat dipublikasikan atau ditetapkan.

Fitch terus berusaha meningkatkan kriteria dan metodologi pemeringkatannya, dan secara berkala memperbaharui penjelasannya sehubungan dengan kriteria dan metodologinya terhadap efek jenis tertentu dalam situs webnya. Metodologi dan kriteria yang digunakan untuk menentukan suatu tindakan pemeringkatan adalah metodologi dan kriteria yang berlaku pada saat keputusan peringkat tersebut dilakukan, yang untuk peringkat-peringkat publik yaitu tanggal komentar atas peringkat tersebut diberikan. Setiap komentar yang diberikan untuk setiap tindakan pemeringkatan menyediakan informasi mengenai kriteria dan metodologi yang digunakan untuk menghasilkan peringkat yang telah diberikan, yang dapat berbeda dari kriteria dan metodologi umum untuk tipe efek yang sama yang terdapat di situs web pada waktu-waktu tertentu. Untuk alasan ini, anda hendaknya selalu memperhatikan komentar atas tindakan pemeringkatan yang bersangkutan untuk informasi yang paling akurat berdasarkan peringkat publik apapun yang diberikan.

Peringkat didasarkan atas kriteria dan metodologi yang ditetapkan Fitch dan yang secara berkelanjutan dievaluasi dan diperbaharui. Maka, pemeringkatan adalah produk pekerjaan kolektif dari Fitch dan tidak ada pribadi atau sekelompok pribadi yang secara terpisah bertanggung jawab atas sebuah peringkat. Semua laporan Fitch adalah hasil kerjasama. Individu yang diidentifikasi dalam laporan Fitch, terhubung, tetapi tidak secara pribadi bertanggung jawab atas opini yang dinyatakan disana. Individu tersebut dicantumkan hanya untuk tujuan komunikasi.

Pemeringkatan bukanlah sebuah rekomendasi atau saran, baik secara langsung ataupun tidak langsung, kepada anda atau orang lain manapun untuk membeli, menjual, melakukan, atau menahan investasi, pinjaman atau efek apapun atau untuk menentukan strategi investasi apapun sehubungan dengan investasi, pinjaman atau efek apapun atau emiten apapun. Pemeringkatan tidak mengomentari kewajiban dari harga pasar, kecocokan dari investasi manapun, pinjaman atau efek untuk investor tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada, penerapan prinsip akuntansi dan/atau peraturan regulator tertentu), atau sifat bebas pajak dan kena pajak dari pembayaran yang dibuat sehubungan dengan investasi, pinjaman atau efek apapun. Fitch bukanlah penasihat anda, Fitch juga tidak menyediakan bagi anda atau bagi siapapun juga nasihat apapun secara finansial, legal, auditing, akuntansi, *appraisal*, penilaian atau jasa aktuarial. Sebuah peringkat hendaknya tidak dipandang sebagai pengganti dari jasa atau nasihat tersebut.

Penetapan peringkat oleh Fitch bukan merupakan persetujuan dari Fitch untuk menggunakan namanya sebagai ahli sehubungan dengan pernyataan registrasi apapun atau pendaftaran apapun dibawah undang-undang AS, Inggris atau undang-undang efek lain manapun. Fitch tidak menyetujui dimasukkannya surat tertulis apapun yang memberitahukan tindakan pemeringkatan Fitch di dalam dokumen penawaran apapun.

Fitch memonitor peringkat secara terus menerus dan akan memperbaharui surat peringkat ini setidaknya sekali dalam satu tahun. Merupakan hal yang penting bahwa Anda harus segera memberikan kepada kami semua informasi yang mungkin bersifat material bagi pemberian peringkat agar pemberian peringkat kami terus sesuai. Peringkat dapat dinaikkan, diturunkan, dicabut, atau dimasukkan dalam Peringkat Yang Dipantau/Rating Watch karena perubahan-perubahan, tambahan-tambahan, keakuratan atau ketidakakuratan informasi atau karena alasan lainnya yang dianggap cukup oleh Fitch.

Tidak ada hal apapun dalam surat ini yang dapat dimaksudkan atau diartikan sebagai pembuatan hubungan fidusia antara Fitch dengan anda atau antara Fitch dengan pengguna pemeringkatannya.



Peringkat publik akan valid dan efektif hanya setelah publikasi peringkat di situs www.fitchratings.com.

Kami senang mendapatkan kesempatan untuk memberikan layanan jasa kami kepada Anda. Apabila kami dapat membantu lebih jauh, silahkan menghubungi Wenny Anthony, Analyst di +6221-40632249.

Hormat kami,

PT Fitch Ratings Indonesia

Oleh:

Olly Prayudi
Direktur

8

LAPORAN KEUANGAN AUDIT

AUDITED FINANCIAL REPORT

**Perusahaan Umum Kehutanan Negara
(Perum Perhutani) dan Entitas Anaknya/
and its Subsidiaries**

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Consolidated financial statements as of December 31, 2023 and
for the year then ended with independent auditor's report



SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(DIAUDIT) /
DIRECTOR'S STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2023
FOR THE YEAR THEN ENDED
(AUDITED)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini / *We, the undersigned:*

Nama/ Name	: Wahyu Kuncoro
Alamat Kantor / Office Address	: Jalan TB. Simatupang No. 22 Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540
Alamat Domisili / Domiciled at	: Jalan TB. Simatupang No. 22 Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540
Jabatan / Title	: Direktur Utama/ President Director
Nama/ Name	: Dewi Fitrianingrum
Alamat Kantor / Office Address	: Jalan TB. Simatupang No. 22 Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540
Alamat Domisili / Domiciled at	: Jalan TB. Simatupang No. 22 Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540
Jabatan / Title	: Direktur Keuangan & Manajemen Risiko/ Director of Finance & Risk Management

Menyatakan bahwa / *certify that :*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak; 2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar; b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan Entitas Anak.	1. <i>We take the responsibility for the compilation and presentation of consolidated financial statements of the Company and Subsidiaries;</i> 2. <i>The consolidated financial statements of the Company and Subsidiaries have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards;</i> 3. a. <i>All information in the consolidated financial statements of the Company and Subsidiaries has been completely and properly disclosed;</i> b. <i>The consolidated financial statements of the Company and Subsidiaries do not contain improper material information or fact, and do not omit any material information or fact;</i> 4. <i>We are responsible for the internal control system of the Company dan Subsidiaries.</i>

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The statement is made truthfully.

Jakarta, 30 Maret 2024 / *March, 30, 2024*
 Perusahaan Umum Kehutanan Negara
 (Perum Perhutani)

Wahyu Kuncoro
 Direktur Utama/ President Director



Dewi Fitrianingrum
 Direktur Keuangan & Manajemen Risiko/
 Director of Finance & Risk Management

The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1-2	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3-4	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6-7	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	8-130	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>



Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00470/2.1032/AU.1/01/1609-3/1/III/2024

Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi
Perusahaan Umum Kehutanan Negara
("Perum Perhutani")

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Kehutanan Negara ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

Report No. 00470/2.1032/AU.1/01/1609-3/1/III/2024

The Capital Owner and the Boards of Supervisory and Directors Perusahaan Umum Kehutanan Negara ("Perum Perhutani")

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements Perusahaan Umum Kehutanan Negara (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00470/2.1032/AU.1/01/1609-3/1/III/2024 (lanjutan)

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ("SPKN") yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Hal lain

Kami juga telah menerbitkan secara terpisah laporan-laporan bertanggal 30 Maret 2024, masing-masing atas: (i) kepatuhan Grup terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian, dan (ii) pengendalian internal Grup.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan Tahun 2023 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan konsolidasian terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00470/2.1032/AU.1/01/1609-3/1/III/2024 (continued)

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA") and State Financial Auditing Standards ("SPKN") established by the Audit Board of Republic of Indonesia ("BPK"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other matter

We have also separately issued reports dated March 30, 2024, on: (i) the Group's compliance with laws and regulations that directly and materially affect the presentation of its Consolidated financial statements, and (ii) the Group's internal control.

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2023 Annual Report (the "Annual Report") other than the accompanying consolidated financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00470/2.1032/AU.1/01/1609-3/1/III/2024 (lanjutan)

Informasi lain

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00470/2.1032/AU.1/01/1609-3/1/III/2024 (continued)

Other information

Our opinion on the accompanying consolidated financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying consolidated financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00470/2.1032/AU.1/01/1609-3/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00470/2.1032/AU.1/01/1609-3/1/III/2024 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements (continued)

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00470/2.1032/AU.1/01/1609-3/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan suatu opini audit atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00470/2.1032/AU.1/01/1609-3/1/III/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an audit opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00470/2.1032/AU.1/01/1609-3/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00470/2.1032/AU.1/01/1609-3/1/III/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00470/2.1032/AU.1/01/1609-3/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan SPKN yang ditetapkan BPK juga mencakup pengujian atas: (i) kepatuhan Grup terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup, dan (ii) pengendalian internal Grup.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00470/2.1032/AU.1/01/1609-3/1/III/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

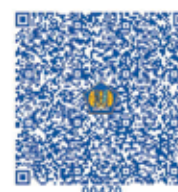
An audit conducted in accordance with SPKN established by BPK also includes testing of the: (i) Group's compliance with laws and regulations that directly affect and material to the presentation of Group's consolidated financial statements, and (ii) Group's internal control.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Damestar Hutagalung
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1609/Public Accountant Registration No. AP.1609

30 Maret 2024/March 30, 2024



The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4	259.453	558.460	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	5	101.143	111.000	Restricted cash
Piutang usaha	6	233.730	105.087	Trade receivables
Persediaan	8	546.252	438.801	Inventories
Pajak dibayar dimuka	9a	166	1.620	Prepaid taxes
Aset biologis	11	845.284	1.072.388	Biological assets
Aset lancar lainnya	7a	120.627	73.434	Other current assets
Total aset lancar		2.106.655	2.360.790	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Klaim pengembalian pajak	9b	36.841	8.818	Claims for tax refund
Investasi pada entitas asosiasi	10	104.264	96.050	Investments in associates
Aset tetap	13	2.451.706	2.250.125	Fixed assets
Aset biologis	11	13.081.836	12.487.746	Biological assets
Aset pajak tangguhan	9g	10.697	17.405	Deferred tax assets
Aset hak guna	12	53.060	7.566	Right-of-use assets
Aset tidak lancar lainnya	7b	121.396	91.403	Other non-current assets
Total aset tidak lancar		15.859.800	14.959.113	Total non-current assets
TOTAL ASET		17.966.455	17.319.903	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	14	258.266	163.550	Trade payables
Beban akrual	15	232.796	362.486	Accrued expenses
Utang pajak	9c	261.803	127.062	Taxes payables
Pinjaman				Loans
Pinjaman bank jangka pendek	16a	460.218	300.000	Short-term bank loans
Bagian lancar pinjaman bank jangka panjang	16b	52.368	52.489	Current maturities of long-term bank loans
Bagian lancar atas liabilitas sewa	12	26.978	5.491	Current maturities of lease liabilities
Liabilitas jangka pendek lainnya	17	181.981	207.473	Other short-term liabilities
Bagian lancar liabilitas imbalan kerja	18	179.492	172.534	Current maturities of employee benefits liability
Total liabilitas jangka pendek		1.653.902	1.391.085	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Pinjaman				Borrowings
Pinjaman bank jangka panjang	16b	110.000	69.178	Long-term bank loans
Pinjaman jangka panjang lainnya	16c	100.972	108.069	Other long-term loans
Liabilitas sewa jangka panjang	12	33.364	3.178	Long-term lease liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya		36.441	34.347	Other long-term liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	9g	2.288.624	2.262.119	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan kerja karyawan	18	1.598.822	1.531.102	Employee benefits liability
Total liabilitas jangka panjang		4.168.223	4.007.993	Total non-current liabilities
TOTAL LIABILITAS		5.822.125	5.399.078	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal negara	19	2.586.303	2.586.303	State capital
Tambahan modal disetor	20	(1.334.148)	(1.334.148)	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
Belum dicadangkan		7.188.501	7.415.346	Unappropriated
Dicadangkan:				Appropriated:
Cadangan tujuan khusus	19	103.145	103.145	Special purpose reserves
Cadangan umum		3.607.921	3.158.024	General reserves
Total ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		12.151.722	11.928.670	Total equity attributable to owners of the parent
Kepentingan non-pengendali		(7.392)	(7.845)	Non-controlling interests
TOTAL EKUITAS		12.144.330	11.920.825	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		17.966.455	17.319.903	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31				
	2023	Catatan/ Notes	2022	
Pendapatan	4.776.816	21	4.812.351	Revenue
Beban pokok pendapatan	(3.817.558)	22	(3.719.282)	Cost of revenue
LABA BRUTO	959.258		1.093.069	GROSS PROFIT
Perubahan nilai wajar aset biologis	759.251	11	625.720	Changes in fair value of biological assets
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban pemasaran dan distribusi	(74.284)	23	(85.396)	Selling and distribution expenses
Beban umum dan administrasi	(1.029.244)	24	(1.122.126)	General and administrative expenses
LABA USAHA	614.981		511.267	OPERATING INCOME
Pendapatan lain-lain	190.849	25	347.108	Other income
Beban lain-lain	(111.874)	26	(158.245)	Other expenses
Bagian laba entitas asosiasi	6.703		23.876	Gain from associates
Pendapatan keuangan	13.845		15.699	Finance income
Beban keuangan	(51.955)	27	(24.202)	Finance costs
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	662.549		715.503	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan	(160.623)	9d	(165.232)	Income tax expense
LABA TAHUN BERJALAN	501.926		550.271	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
<u>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</u>				<u>Items that will not be reclassified to profit or loss</u>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	(228.745)	18	(89.955)	Remeasurement of employee benefits liability
Pajak penghasilan terkait	50.324	9g	19.790	Related income tax
Rugi komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(178.421)		(70.165)	Other Comprehensive loss for the year, net of tax
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	323.505		480.106	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
2023	Catatan/ Notes	2022	
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:			Profit For The Year Attributable To:
Pemilik entitas induk	501.473	549.897	Owner of parent entity
Kepentingan non-pengendali	453	374	Non-controlling interests
TOTAL	501.926	550.271	TOTAL
Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:			Total Comprehensive Income Attributable To:
Pemilik entitas induk	323.052	479.732	Owner of parent entity
Kepentingan non-pengendali	453	374	Non-controlling interests
TOTAL	323.505	480.106	TOTAL

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
Years Ended December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent									
Saldo laba/Retained earnings Dicadangkan/Appropriated									
Catatan/ Notes	Modal negara/ State capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Cadangan tujuan khusus/ Special purpose reserves	Cadangan umum/General reserves	Belum dicadangkan/ Unappropriated	Total/Total	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interests	Total ekuitas/ Total equity	
Saldo 31 Desember 2021	2.586.303	(1.334.148)	103.145	2.780.151	7.363.487	11.498.938	(8.219)	11.490.719	Balance as of December 31, 2021
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	549.897	549.897	374	550.271	Profit for the year
Cadangan umum	19	-	-	377.873	(377.873)	-	-	-	General reserves
Dividen kas	19	-	-	-	(50.000)	(50.000)	-	(50.000)	Dividend cash
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	-	-	-	-	(70.165)	(70.165)	-	(70.165)	Remeasurement of employee benefits liability, net of tax
Saldo 31 Desember 2022	2.586.303	(1.334.148)	103.145	3.158.024	7.415.346	11.928.670	(7.845)	11.920.825	Balance as of December 31, 2022
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	501.473	501.473	453	501.926	Profit for the year
Cadangan umum	19	-	-	449.897	(449.897)	-	-	-	General reserves
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	-	-	-	-	(178.421)	(178.421)	-	(178.421)	Remeasurement of employee benefits liability, net of tax
Dividen kas	19	-	-	-	(100.000)	(100.000)	-	(100.000)	Dividend cash
Saldo 31 Desember 2023	2.586.303	(1.334.148)	103.145	3.607.921	7.188.501	12.151.722	(7.392)	12.144.330	Balance as of December 31, 2023

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2023	Catatan/ Notes	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari pelanggan	4.649.198		4.886.541
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	(2.456.056)		(2.629.782)
Pembayaran kepada karyawan	(1.992.278)		(1.951.044)
Penerimaan lain-lain	33.896		396.271
Pembayaran beban keuangan	(51.955)		(24.202)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(103.889)		(189.790)
Penarikan kas yang dibatasi penggunaannya jangka pendek	-		42.184
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya jangka pendek	(30.000)		(2.516)
Kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasi	48.916		527.662
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penarikan kas yang dibatasi penggunaannya jangka panjang	31.098		1.990
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya jangka panjang	(2.428)		(57.584)
Penerimaan dividen	8.735		13.453
Penerimaan dari divestasi entitas asosiasi	5.616		21.350
Penambahan aset biologis	(135.252)		(217.463)
Perolehan aset tetap	(333.521)		(275.867)
Kas netto yang digunakan untuk untuk aktivitas investasi	(425.752)		(514.121)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan pinjaman bank jangka pendek	158.886	31	22.870
Penerimaan pinjaman bank jangka panjang	104.970	31	30.000
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	(66.489)	31	(60.442)
Pembayaran pinjaman jangka panjang lainnya	(7.097)	31	-
Pembayaran utang sewa	(11.721)	31	(16.817)
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham	(100.000)	19	(50.000)
Kas netto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	78.549		(74.389)

**CASH FLOWS FROM
OPERATING ACTIVITIES**
Receipts from customers
Payments to
suppliers and others
Payments to employees
Other receipts
Finance expense payments
Corporate income tax payments
Short-term restricted
cash withdrawals
Short-term restricted
cash placements

**Net cash provided by
operating activities**

**CASH FLOWS FROM
INVESTING ACTIVITIES**
Long-term restricted
cash withdrawals
Long-term restricted
cash placements
Dividend receipts
Proceed from divestation of
investment in associate
Addition of biological assets
Acquisition of fixed assets

**Net cash used in
activities**

**CASH FLOWS FROM (FOR)
FINANCING ACTIVITIES**
Receipts from short-term
bank loan
Receipts from long-term
bank loan
Repayments long-term
bank loan
Repayments of other
long-term loan
Payment for lease liabilities
Dividend paid to shareholders

**Net cash provided by
(used in)
financing activities**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT
OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2023	Catatan/ Notes	2022	
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(298.287)		(60.848)	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Dampak neto atas perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas	(720)		(4.445)	Net effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	558.460	4	623.753	CASH AND CASH EQUIVALENT AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	259.453	4	558.460	CASH AND CASH EQUIVALENT AT ENDING OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

*The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.*

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Umum Kehutanan Negara ("Perum Perhutani"), selanjutnya disebut "Perusahaan", didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 15 Tahun 1972 yang diubah dengan PP No. 36 Tahun 1986. Pada tahun 1998, Pemerintah menerbitkan PP No. 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum). Dengan diterbitkannya PP ini, peraturan yang mendasari terbentuknya Perum Perhutani diatur kembali, yaitu dengan PP No. 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Berdasarkan PP No. 14 Tahun 2001, tanggal 23 Maret 2001 bentuk Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Perubahan status ini dituangkan dalam akta No. 3 tanggal 2 Juli 2001 oleh Notaris Imas Fatimah dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan ("SK") No. C-05080.HT.01.01.TH.2001 tanggal 7 Agustus 2001.

Pada tahun 2003, bentuk Perusahaan kembali berubah menjadi "Perusahaan Umum" sesuai dengan PP No. 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum (Perum Perhutani). Perubahan ini telah dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 67.

Peraturan kembali berubah dengan PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, dimana wilayah kerja Perusahaan meliputi seluruh hutan negara yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten.

Sesuai dengan Pasal 11 PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip hutan lestari dan tata kelola perusahaan yang baik.

1. GENERAL

a. The Company establishment

Perusahaan Umum Kehutanan Negara ("Perum Perhutani") hereinafter referred to as ("the Company"), was established by Government Regulation ("PP") No. 15 of 1972 as amended by PP No. 36 of 1986. In 1998, the Government issued PP No. 13 of 1998 on Perusahaan Umum (Perum). With the issuance of this PP, the rules underlying the formation of Perum Perhutani were updated by PP No. 53 of 1999 regarding Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Based on PP No. 14 of 2001, dated March 23, 2001, the legal business form changed from Perum Perhutani to Perusahaan Perseroan (Persero).

This legal business transformation was stipulated in notarial deed No. 3 dated July 2, 2001 by Notary Imas Fatimah and was approved by the Ministry of Justice and Human Rights by Decree ("SK") No. C-05080. HT.01.01.TH.2001 dated August 7, 2001.

In 2003, the Company changed the legal form to "Perusahaan Umum" in accordance with PP No. 30 of 2003 concerning the Perusahaan Umum (Perum Perhutani). These changes have been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 67.

The regulation was further amended with PP No. 72 of 2010 on Perusahaan Umum (Perum) State Forestry, where the Company covers the entire working area of state forest located in Central Java, East Java, West Java Province and Banten Province.

In accordance with Article 11 of PP No. 72 of 2010 on Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, the purposes and objectives of the Company are conducting business aimed at public benefit in the form of supplying goods and/or services associated with high quality forest management and forest products at an affordable price by the community based on the principles of sustainable forestry and good corporate governance.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Untuk mencapai maksud dan tujuan ini, Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pengelolaan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi, pendidikan dan pelatihan di bidang kehutanan, penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan, pengembangan agroforestri, membangun dan mengembangkan hutan rakyat dan/atau hutan tanaman rakyat dan perdagangan hasil hutan dan hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain.

Selain kegiatan usaha, Perusahaan juga dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain berupa usaha optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki untuk kantor perdagangan, kompleks agroindustri, agrobisnis, properti, pergudangan, pariwisata, hotel, resort, rest area, rumah sakit, pertambangan galian, prasarana telekomunikasi, pemanfaatan sumber daya air, dan sumber daya alam lainnya, dan kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Perusahaan berkantor pusat di Jakarta, Graha Perhutani Jl. TB Simatupang No. 22, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540 Tel: (021) 7805730

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, susunan Dewan Pengawas Perusahaan adalah sebagai berikut:

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Bambang Hendroyono
Bambang Risyanto
Chalid Muhammad
Komaruddin Simanjuntak
Noer Fauzi Rachman
Yohanes Baptisa Priyatmo Hadi

Chairman
Member
Member
Member
Member
Member

1. GENERAL (continued)

a. The Company establishment (continued)

To achieve the above purposes, the Company has the following primary business activities: forest governance and forest management planning, forest exploiting management, which includes the area utilization, environmental services, utilization and collection of timber and non-timber forest products, rehabilitation and reclamation, forest protection and nature conservation, production of forest products as raw material and finished goods, education and training in the field of forestry, research and development in the field of forestry, agroforestry development, build and develop forests community and/or forest smallholder crop and forest products trade and production of its own production and other parties.

In addition to its main business activities, the Company also may conduct other business activities such as optimisation of potential owned resource for trading house, agroindustrial complex, agribusiness, property, warehousing, tourism, hotels, resorts, rest areas, hospitals, mining quarrying, telecommunications infrastructures, utilization of water resources, and other natural resources and other business activities in accordance with the purposes and objectives of the Company.

The Company's headquarter is in Jakarta, Graha Perhutani at Jl. TB Simatupang No. 22, Jati Padang, Pasar Minggu, South Jakarta City, 12540 Tel: (021) 7805730

As of December 31, 2023 and 2022, the composition of the Company's Board of Supervisory was as follows:

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, susunan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2023	
Direktur Utama	Wahyu Kuncoro	President Director
Direktur Perencanaan dan Pengembangan	Endung Trihartaka	Director of Planning and Development
Direktur Operasi	Natalas Anis Harjanto	Director of Operation
Direktur Komersial	Anggar Widiyatmoko	Director of Commercial
Direktur Sumber Daya Manusia, Umum dan Informasi Teknologi Informasi	Muhammad Denny Ermansyah	Director of Human Resources, General, and Information Technology
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Dewi Fitrianingrum	Director of Finance and Risk Management
	2022	
Direktur Utama	Wahyu Kuncoro	President Director
Direktur Perencanaan dan Pengembangan	Endung Trihartaka	Director of Planning and Development
Direktur Operasi	Natalas Anis Harjanto	Director of Operation
Direktur Komersial	Ahmad Ibrahim	Director of Commercial
Direktur Sumber Daya Manusia, Umum dan Informasi Teknologi Informasi	Muhammad Denny Ermansyah	Director of Human Resources, General, and Information Technology
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Kemal Sudiro	Director of Finance and Risk Management

Susunan Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko Perusahaan terdiri dari:

The composition of the Company's Audit Committee and Risk Management Committee was as follows:

	2023	2022	
Komite Manajemen Risiko	Much. Iman Tawakal	Much. Iman Tawakal	Risk Management Committee
Komite Manajemen Risiko	Muhdi Al Fajar	Muhdi Al Fajar	Risk Management Committee
Komite Audit	M. Farkhan Supriyadi	M. Farkhan Supriyadi	Audit Committee
Komite Audit	Agus Budi Wibowo	Agus Budi Wibowo	Audit Committee

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup memiliki 15.245 orang karyawan (2022: 16.624 orang karyawan) (tidak diaudit).

As of December 31, 2023, the Group had 15,245 employees (2022: 16,624 employees) (unaudited).

b. Modal

PP No. 30 Tahun 2003 tentang Perum Perhutani menyatakan bahwa modal Perusahaan merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Nilai kekayaan negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan. Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2010, ditetapkan besarnya modal Perusahaan adalah sebesar seluruh nilai penyertaan modal negara dalam Perusahaan dengan jumlah sebesar Rp700.000.

b. Capital

PP No. 30 of 2003 on Perum Perhutani stated that the Company's capital represents and is from separated state's wealth and is not divided into shares. The value of state's wealth was determined by the Minister of Finance based on the calculation made by the Ministry of Finance and the Ministry of Forestry. Based on PP No. 72 of 2010, the amount of the Company's capital is equal to the entire value of state's equity participation in the Company with a total value of Rp700,000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Modal (lanjutan)

Pada tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan PP No. 73 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. PP No. 73 Tahun 2014 ini menjelaskan tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara yang berasal dari pengalihan seluruh saham milik negara Republik Indonesia pada PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (PT Inhutani I) (Persero), PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II) (Persero), PT Eksploitasi dan Industri Hutan III (PT Inhutani III) (Persero), PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV (PT Inhutani IV) (Persero), dan PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V) (Persero). Penambahan Penyertaan Modal Negara mengakibatkan perubahan status Perusahaan yang sebelumnya merupakan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, dan PT Inhutani V menjadi PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, dan PT Inhutani V yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, Perusahaan menjadi Pemegang Saham PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, dan PT Inhutani V.

Penambahan penyertaan modal dari PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, dan PT Inhutani V sebesar masing-masing Rp450.333, Rp183.083, Rp324.120, Rp92.253, dan Rp132.659.

Berdasarkan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 619/KMK.06/2015 tanggal 25 Mei 2015 menetapkan tentang Penetapan Nilai Definitif Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara dari PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, dan PT Inhutani V masing-masing sebesar Rp1.211.262, Rp225.707, Rp308.509, Rp64.920, dan Rp75.905.

1. GENERAL (continued)

b. Capital (continued)

In 2014, the Government issued the PP No. 73 of 2014 on Additional Capital Investment of the Republic of Indonesia into Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. PP No. 73 of 2014 describes Additional Capital Investment of the Republic of Indonesia into Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara which was derived from the transfer of all shares owned by the Republic of Indonesia to PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (PT Inhutani I) (Persero), PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II) (Persero), PT Eksploitasi dan Industri Hutan III (PT Inhutani III) (Persero), PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV (PT Inhutani IV) (Persero), and PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V) (Persero). Additional Capital Investment by the Company resulted in a change of status that was previously a Limited Liability Company (Persero) PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, and PT Inhutani V into PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, and PT Inhutani V which have to fully comply with the Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company. Thus, the Company became the Shareholders of PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, and PT Inhutani V.

The share capital increase from PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, and PT Inhutani V amounting to Rp450,333, Rp183,083, Rp324,120, Rp92,253, and Rp132,659, respectively.

SK Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 619/KMK.06/2015 dated May 25, 2015 stated the Determination of Definitive Additional Capital Investment of the Republic of Indonesia into Perum Kehutanan Negara equity's from PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, and PT Inhutani V amounting to Rp1,211,262, Rp225,707, Rp308,509, Rp64,920, and Rp75,905, respectively.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Modal (lanjutan)

Pada tahun 2020, Perusahaan mengambil alih modal saham dari Koperasi Karyawan PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, dan PT Inhutani V dengan nilai masing-masing sebesar Rp100, Rp30, Rp10, Rp10, dan Rp10.

Penambahan penyertaan modal ini dituangkan dalam akta notaris tanggal 4 Mei 2020 oleh Dr. Dewi Tenty Septi Artiani dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Juni 2020.

c. Struktur Grup

1. GENERAL (continued)

b. Capital (continued)

In 2020, the Company acquired share capital from Koperasi Karyawan PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, and PT Inhutani V amounting to Rp100, Rp30, Rp10, Rp10, and Rp10.

The additional capital investment was stipulated in notarial deed dated on May 4, 2020 by Dr. Dewi Tenty Septi Artiani and was approved by the Ministry of Justice and Human Rights dated June 10, 2020.

c. Group structure

No	Entitas anak/ Subsidiaries	Jenis usaha/ Nature of business	Kepemilikan/ Ownership		Tanggal pendirian/ Date of establishment	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
			2023	2022		2023	2022
<u>Kepemilikan langsung/ Direct ownership</u>							
1	PT Inhutani I	Pengelolaan hutan, pengusahaan, dan industri hasil hutan/ <i>Forest management, exploitation, and manufacturing of forest products</i>	100.00	100.00%	1973	793.351	723.030
2	PT Inhutani V	Pengelolaan hutan, pengusahaan, dan industri hasil hutan terutama gondorukem dan tebu/ <i>Forest management, exploitation, and manufacturing of forest products, primarily gum rosin, and sugarcane</i>	100.00%	100.00%	1991	280.217	284.188
3	PT Palawi Risorsis	Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, pariwisata, dan perjalanan/ <i>Running business in service, tourism, and travel sector</i>	99.66%	99.66%	2002	100.116	53.117
4	PT BUMN Hijau Lestari	Proses likuidasi/ <i>liquidation process</i>	51.08%	54.13%	2009	4.671	4.671
<u>Kepemilikan tidak langsung/ Indirect ownership</u>							
5	PT Penggaron Sarana Semesta	Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa / <i>Running business in service sector</i>	51.00%	51.00%	2018	10.611	9.520
6	PT Pola Inti Rimba	Pengelolaan hutan tanaman industri jasa / <i>Forest Management-HT</i>	99.00%	99.00%	1992	-	-

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Grup (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 40 tanggal 30 Juli 2022 oleh Ulya Faridah, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Dr. Dewi Tenty Septi Artianty, S.H., M.H., M.Kn, entitas anak, PT Eksploitasi dan Industri Hutan I, PT Eksploitasi dan Industri Hutan II serta PT Eksploitasi dan Industri Hutan III telah setuju dan bersepakat untuk melakukan penggabungan ke dalam PT Eksploitasi dan Industri Hutan I. Atas transaksi tersebut, modal ditempatkan dan disetor entitas yang bertahan (IHT I) ditingkatkan sebesar Rp73.482, yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan, sehingga modal disetor IHT I menjadi sebesar Rp523.815 (523.815 lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham Rp1.000.000 (angka penuh)). Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No.AHU-AH.01.09-0038803 dan No. AHU-AH.01.03-0272910 tanggal 31 Juli 2022, dan berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2022.

Berdasarkan Akta Notaris No. 42 tanggal 30 Juli 2022 oleh Ulya Faridah, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Dr. Dewi Tenty Septi Artianty, S.H., M.H., M.Kn, entitas anak, PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV, PT Eksploitasi dan Industri Hutan V serta PT Perhutani Anugerah Kimia telah setuju dan bersepakat untuk melakukan penggabungan ke dalam PT Eksploitasi dan Industri Hutan V. Atas transaksi tersebut, modal ditempatkan dan disetor entitas yang bertahan (IHT V) ditingkatkan sebesar Rp132.659 yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan, sehingga modal disetor IHT V menjadi sebesar Rp150.102 (150.102 lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham Rp1.000.000 (angka penuh)). Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No.AHU-AH.01.09-0038790 tanggal 31 Juli 2022, dan berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2022.

1. GENERAL (continued)

c. Group structure (continued)

Based on Notarial Deed No. 40 dated July 30, 2022 by Ulya Faridah, S.H., M.Kn., as a substitute for Notary Dr. Dewi Tenty Septi Artianty, S.H., M.H., M.Kn, subsidiaries, PT Eksploitasi dan Industri Hutan I, PT Eksploitasi dan Industri Hutan II and PT Eksploitasi dan Industri Hutan III have agreed to merge into PT Eksploitasi dan Industri Hutan I. For this transaction, the issued and paid-up capital of the surviving entity (IHT I) was increased by Rp73,482, all of which were subscribed by the Company, therefore the paid-up capital of IHT I became Rp523,815 (523,815 shares, with a nominal value per share of Rp1,000,000 (full amount)). This change has been accepted and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decree No.AHU-AH.01.09-0038803 and No. AHU-AH.01.03-0272910 dated July 31, 2022, and will be effective on August 1, 2022.

Based on Notarial Deed No. 42 dated July 30, 2022 by Ulya Faridah, S.H., M.Kn., as a substitute for Notary Dr. Dewi Tenty Septi Artianty, S.H., M.H., M.Kn, subsidiaries, PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV, PT Eksploitasi dan Industri Hutan V and PT Perhutani Anugerah Kimia have agreed to merge into PT Eksploitasi dan Industri Hutan V. For this transaction, the issued and paid-up capital of the surviving entity (IHT V) was increased by Rp132,659, all of which were subscribed by the Company, therefore the paid-up capital of IHT V became Rp150,102 (150,102 shares, with a nominal value per share of Rp1,000,000 (full amount)). This change has been accepted and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decree No.AHU-AH.01.09-0038790 dated July 31, 2022, and will be effective on August 1, 2022.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Grup (lanjutan)

Seluruh area Grup berada di Indonesia.

d. Luas kawasan hutan

Luas kawasan hutan yang dikelola Perusahaan per 31 Desember 2023 (dalam hektar) sebagai berikut:

Wilayah/Area	Hutan produksi/ Production forest (Ha) ^{*)}	Hutan lindung/ Preserved forest (Ha) ^{*)}	Total/Total
Jawa Tengah/Central Java	551.645	83.742	635.387
Jawa Timur/East Java	806.205	311.058	1.117.263
Jawa Barat dan Banten/ West Java and Banten	449.898	237.962	687.860
Total/Total	1.807.748	632.762	2.440.510

^{*)}tidak diaudit/unaudited

1. GENERAL (continued)

c. Group structure (continued)

All of the Group's area are located in Indonesia.

d. Size of forest area

Forest area managed by the Company as of December 31, 2023 (in hectares) is as follows:

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh Grup sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"). Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 oleh Grup.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

Accounting policies and financial reporting that were applied by the Group according to Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"). Accounting policies are applied consistently for the preparation of the consolidated financial statements of the Group for the year then ended December 31, 2023 and 2022.

a. Basis of preparation of consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprises the Statements and Interpretations issued by Board of Financial Accounting Standards ("DSAK") of the Indonesian Institute of Accountants.

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, and using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts that measured based on the measurement that disclosed in the accounting policies of each account to the consolidated financial statement.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian yang disusun menggunakan metode langsung (*direct method*), dengan mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

b. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Entitas-entitas Anak. Kendali diperoleh ketika Grup terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal dibawah ini:

- i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
- ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Umumnya, kepemilikan hak suara mayoritas menghasilkan pengendalian. Untuk mendukung hal ini, dan jika Grup memiliki hak suara kurang dari hak suara mayoritas, atau hak sejenis atas suatu *investee*, Grup mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan ketika menilai apakah Grup memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- i) pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- ii) hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- iii) hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

a. Basis of preparation of consolidated financial statements (continued)

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash into operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the consolidated financial statements are Rupiah, which is the Group's functional currency.

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its Subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the investor controls an investee if and only if the investor has all of the following:

- i) Power over the investee, that is existing rights that give the investor current ability to direct the relevant activities of the investee,
- ii) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
- iii) The ability to use its power over the investee to affect its returns.

Generally, there is a presumption that a majority of voting rights results in control. To support this presumption and when the Group has less than a majority of the voting, or similar, rights of an investee, it considers all relevant facts and circumstances in assessing whether the Group has power over an investee, including:

- i) the contractual arrangement with the other vote holders of the investee,
- ii) rights arising from other contractual arrangements, and
- iii) the Group's voting rights and potential voting rights.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

b. Principles of consolidation (continued)

Grup menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas Entitas-entitas Anak dimulai sejak Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berhenti pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak.

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of Subsidiaries begin when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain ("OCI") diatribusikan kepada pemilik entitas induk dari Grup dan kepentingan non-pengendali ("KNP"), meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent company and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having deficit balance.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Jika anggota Grup menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda untuk transaksi dan peristiwa dalam keadaan yang serupa, maka penyesuaian dilakukan atas laporan keuangannya dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

The consolidated financial statements are prepared using consistent accounting policies for transactions and events in similar circumstances. If the members of the Group use different accounting policies for transactions and events in similar circumstances, adjustments were made to its financial statements in preparing the consolidated financial statements.

Seluruh saldo akun, transaksi antar perusahaan yang signifikan, dan laba atau rugi hasil transaksi dari intra Grup yang belum direalisasi dan dividen dieliminasi pada saat konsolidasi.

All significant accounts, transactions between entities, and unrealized gain or losses resulting from intra-Group transactions and dividends are eliminated in consolidation.

Entitas-entitas Anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Grup memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian.

Subsidiaries are fully consolidated from the dates of acquisition, being the date on which the Group obtained control, and continue to be consolidated until the date such control ceases.

Seluruh laba rugi komprehensif diatribusikan pada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendalian ("KNP") bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

All comprehensive income and losses are attributed to the owner of the parent entity and non-controlling interest ("NCI") even if that results in a deficit balance.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

b. Principles of consolidation (continued)

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup :

If it loses control over a subsidiary, the Group:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, jika ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; dan mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif lain ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

- derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;*
- derecognizes the carrying amount of any NCI;*
- derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;*
- recognizes the fair value of the consideration received;*
- recognizes the fair value of any investment retained;*
- recognizes any surplus or deficit in the statement of profit or loss and other comprehensive income; and reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to the statement of profit or loss and other comprehensive income or retained earnings, as appropriate.*

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari Entitas-entitas Anak yang dapat diatribusikan pada kepentingan ekuitas yang tidak dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Grup, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

NCI represents a portion of the profit or loss and net assets of the Subsidiaries attributable to equity interests that are not owned directly or indirectly by the Group, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the parent company.

c. Investasi saham

c. Investment in shares of stock

Investasi Grup pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh signifikan. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai perolehan investasi ditambah atau dikurang dengan bagian Grup atas laba atau rugi neto dan penerimaan dividen dari entitas asosiasi sejak tanggal perolehan. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi, jika ada, termasuk dalam jumlah tercatat investasi dan tidak diamortisasi maupun diuji secara individual untuk penurunan nilai.

The Group's investment in associate is measured using equity method. An associate is an entity in which the Group has significant influence. Under the equity method, the cost of investment is increased or decreased by the Group's share of net income or loss of the associate, and the dividend received from the associate since the date of the acquisition. Goodwill which related to associate, if any, included to the investment carrying value and are not amortized or individually tested for impairment.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

c. Investasi saham (lanjutan)

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian Grup atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Grup mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika dapat dipakai, dalam laporan perubahan ekuitas. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan Grup dalam entitas asosiasi.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Setelah kepentingan Grup dikurangkan menjadi nihil, tambahan kerugian dicadangkan, dan liabilitas diakui, hanya sepanjang Grup memiliki kewajiban konstruktif atau hukum, atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi. Jika entitas asosiasi kemudian melaporkan laba, maka Grup mulai mengakui bagiannya atas laba tersebut hanya setelah bagian atas laba tersebut sama dengan bagian atas rugi yang belum diakui.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas tahun pelaporan yang sama dengan Grup.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

c. Investment in shares of stock (continued)

The consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income reflect the share of the Group on the results of operations of the associate. Where there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Group recognizes its share of any such changes and discloses this, when applicable, in the consolidated statements of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate.

If the Group's share of loss of an associate equals or exceeds its interests in associates, the Group derecognise its share of further losses. After the Group's interests are deducted to zero, additional losses are reserved, and a liability is recognized, only to the extent the Group has a legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate. If the associate subsequently reports profits, the Group began to recognize its share of profits only after a portion of the profit is equal to the top of the unrecognized losses.

The financial statements of the associate are prepared for the same reporting period of the Group.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

c. Investasi saham (lanjutan)

Setelah penerapan metode ekuitas, Grup menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Grup dalam entitas asosiasi. Grup menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang objektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Grup menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, Grup mengukur dan mengakui bagian investasi tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan investasi diakui pada laba rugi.

d. Klasifikasi lancar dan tak lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

c. Investment in shares of stock (continued)

After the implementation equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Group's investment in associates. The Group determines whether there is objective evidence that the investment in the associate is impaired at each reporting date. In this regard, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount and the carrying value and recognizes the amount in the consolidated statement of comprehensive income.

When there is a loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

d. Current and non-current classification

The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- i) expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,*
- ii) held primarily for the purpose of trading,*
- iii) expected to be realized within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.*

All other assets are classified as non-current.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

d. Klasifikasi lancar dan tak lancar (lanjutan)

**d. Current and non-current classification
(continued)**

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

A liability is current when it is:

- i) *expected to be settled in the normal operating cycle,*
- ii) *held primarily for the purpose of trading,*
- iii) *due to be settled within twelve months after the reporting period, or*
- iv) *there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.*

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

All other liabilities are classified as non-current.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan kewajiban tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

e. Kombinasi bisnis

e. Business combinations

Kombinasi bisnis, jika ada, dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban-beban administrasi.

Business combinations, if any, are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value, and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer selects whether it measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as of the acquisition date.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

If the business combination is achieved in stages, the acquirer is remeasured the previously held equity interest in the acquiree at fair value in the acquisition date and recognized gain or loss through consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

e. Kombinasi bisnis (lanjutan)

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diasumsikan. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto Entitas Anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen menilai kembali identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Grup yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Business combinations (continued)

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the Subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously assessing the identification and fair value measurement of the acquired assets and the assumed liabilities.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group's Cash-generating Units ("CGU") that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those CGUs.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operations within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

f. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

f. Transactions and balances in foreign currencies

Grup menentukan bahwa mata uang fungsionalnya adalah Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing selain Rupiah dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

The Group determines that its functional currency is Rupiah. Transactions in currencies other than Rupiah are recorded at the prevailing rates of exchange in effect on the date of transactions.

Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah terakhir yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada tahun tersebut. Laba atau rugi selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam laba atau rugi tahun berjalan.

As of reporting date, monetary asset and liabilities denominated in foreign currencies are translated to Rupiah using the last middle exchange rates published by Bank Indonesia on those years. The resulting net foreign exchange gains or losses are recognized in current year's profit or loss.

Kurs yang digunakan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp15.416 dan Rp15.731 untuk 1 Dolar Amerika Serikat.

The exchange rates used as of December 31, 2023 and 2022 were Rp15,416 and Rp15,731, respectively, for 1 United States Dollar.

g. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

g. Transactions with related party

Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh para pihak, di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi.

The Group has transactions with related parties, as defined in Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 7: Related Parties Disclosure. The transactions are made based on terms agree by the parties, which may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 28 atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes 28 to the consolidated financial statements.

h. Kas dan setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya

h. Cash and cash equivalents and restricted cash

Kas dan setara kas terdiri atas kas dan bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak saat penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman, serta tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents include cash on hand and in banks and time deposits with maturity periods of 3 months or less at the time of placement and not used as collateral and unrestricted in use.

Kas yang dibatasi penggunaannya termasuk kas di bank yang digunakan sebagai jaminan pelaksanaan dan deposito berjangka yang digunakan sebagai agunan atas pinjaman bank yang disajikan sebagai aset lancar.

Restricted cash include cash in banks used as performance guarantee and time deposits which are pledged for bank loans presented under current assets.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

i. Piutang

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE, dikurangi dengan penyisihan untuk penurunan nilai. Jika piutang diharapkan tertagih dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika lebih dari satu tahun, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*the lower cost or net realizable value*) dan meliputi seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang terjadi untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisinya yang sekarang. Biaya persediaan barang jadi ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dan biaya persediaan bahan pembantu dan lainnya ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Penyisihan persediaan usang dan/atau penurunan nilai persediaan, disisihkan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik persediaan dan nilai realisasi neto persediaan.

k. Aset biologis

Aset biologis terdiri atas tanaman tebang dan produk agrikultur yang tumbuh pada tanaman produktif.

Aset biologis dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dari aset biologis pada setiap tanggal pelaporan dimasukkan dalam laba rugi pada tahun terjadinya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

i. Receivables

Trade receivables and other receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the EIR method, less provision for impairment. If the expected uncollectible accounts receivable within one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), the receivables are classified as current assets. If more than one year, these receivables are presented as non-current assets.

j. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value and covered all the cost of purchase, conversion cost and other cost that take the inventory to its location and its condition now. Cost of the finished goods inventories is determined using the weighted average method and cost of the supporting goods and other inventories is determined using the moving average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Allowance for inventory obsolescence and/or decline in market value is provided based on periodic reviews of the physical condition and net realizable value of the inventories.

k. Biological assets

Biological assets comprise of consumable plant and agriculture produce growing on bearer plant.

Biological assets are stated at fair value less costs to sell. Gains or losses arising on initial recognition of agricultural produce at fair value less costs to sell and from the change in fair value less costs to sell of the biological assets at each reporting date are included in the profit or loss for the year in which they arise.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

k. Aset biologis (lanjutan)

k. Biological assets (continued)

Karena harga pasar tidak tersedia untuk tanaman tebangkan, nilai wajarnya diestimasi menggunakan pendekatan pendapatan (*income approach*) berdasarkan nilai kini dari arus kas masa depan neto yang diharapkan, didiskontokan dengan tingkat diskonto berdasarkan kondisi kini pasar.

As the market determined prices are not readily available for consumable plant, their fair values are estimated using income approach based on the present values of the expected net future cash flows, discounted at a current market determined discount rate.

Tanaman tebangkan terdiri dari kayu jati dan kayu rimba. Kayu jati dan kayu rimba digolongkan menjadi kayu tegakan sampai dengan siap dipanen.

Consumable plant comprises of teak wood and forest trees. Teak wood and forest trees are classified as standing timber until it is ready to produce.

Kayu jati dan kayu rimba sejak saat penanaman sampai dengan siap dipanen dikategorikan sebagai aset biologis bagian tidak lancar, sedangkan kayu jati dan kayu rimba yang akan dipanen dalam waktu satu tahun digolongkan sebagai aset biologis bagian lancar.

Teak wood and forest trees from the time of planting until they are ready to be harvested are categorized as non-current biological assets, while teak and forest trees which will be produced within one year are classified as the current biological assets.

Tanaman pinus, karet, dan beberapa jenis tanaman produksi lainnya adalah tanaman produktif sehingga disajikan dan diperhitungkan sebagai tanaman produktif penghasil produk agrikultur. Namun, getah pinus, getah karet dan hasil produk lainnya yang tumbuh pada tanaman, dicatat sebagai produk agrikultur yang tumbuh pada tanaman produktif sampai waktu panen. Getah pinus, getah karet dan hasil produk lainnya dipindahkan ke persediaan dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk dijual ketika dipanen.

Pine trees, rubber plants and other types of bearer plants are productive plants, so they are presented and calculated as bearer plants. However, pine sap, rubber latex and other products that grow on plants, are recorded as biological produce growing on bearer plant until harvest time. Pine sap, rubber latex and other products are transferred to inventories at fair value less costs to sell when produced.

Perubahan nilai wajar tanaman tebangkan serta produk agrikultur diakui dalam laporan laba rugi.

Changes in the fair value of consumable plants and agricultural product are recognized in the income statement.

Produk agrikultur atas tanaman pinus, karet dan beberapa jenis tanaman produktif lainnya di kategorikan sebagai aset biologis bagian lancar.

Biological produce of pine trees, rubber plants and several other types of productive plants are categorized as current biological assets.

Biaya untuk menanam seperti biaya pembelian bibit, biaya tenaga kerja penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pemanenan dan biaya lain-lain dikapitalisasi sebagai bagian dari aset biologis dan akan dilakukan penyesuaian berkala terhadap pengukuran nilai wajar aset biologis.

Costs for planting such as the cost of purchasing seeds, labor costs for planting, fertilizing, maintenance, producing and other costs are capitalized as part of biological assets and periodic adjustments will be made to the measurement of the fair value of biological assets.

l. Instrumen keuangan

l. Financial instruments

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

I. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan

Pengakuan dan Pengukuran awal

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Grup telah menerapkan cara praktis, diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 72, seperti diungkapkan pada Catatan 2v.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("NWPKL"), aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang SPPB dari pokok belum dilunasi. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari pendapatan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari pokok yang belum dilunasi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

I. Financial instruments (continued)

Financial assets

Initial recognition and Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at Fair Value through Profit or Loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72, as disclosed in Note 2v.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

1. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas), dan
- NWLR.

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing seperti berikut ini:

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan diuji untuk penurunan nilai. Laba dan rugi diakui pada laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya. Aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk piutang usaha dan aset keuangan lancar lainnya sebagai bagian dari aset keuangan tidak lancar lainnya.

Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas).

Pada pengakuan awal, Grup dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang tidak dapat dikembalikan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 50 dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan berdasarkan instrumen per instrumen.

Laba dan rugi atas aset keuangan ini tidak pernah didaur ke laba rugi dan tidak diuji untuk penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak pembayaran telah ditetapkan.

Grup menetapkan, tanpa dapat dikembalikan, klasifikasi investasi ekuitas yang tidak terdaftar di bursa pada kategori ini.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

1. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent Measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- Financial assets at amortized cost (debt instruments),
- Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),
- Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and
- FVTPL.

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired. The Group's financial assets at amortized cost includes trade receivables and other current financial liabilities under other non-current financial assets.

Financial asset designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments).

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 50 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss and they are not subject to impairment assessment. Dividends are recognized as other income in the profit or loss when the right of payment has been established.

The Group elected to classify irrevocably its non-listed equity investments under this category.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

I. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir. Pada penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat dan jumlah imbalan yang diterima dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui dalam laba rugi.

Penurunan Nilai

Grup mengakui penyisihan KKE untuk semua instrumen utang yang bukan pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual sesuai kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup, didiskonto pada estimasi SBE awal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan bagian dari ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur eksposur, terlepas dari jangka waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena piutang usaha dan piutang lain-lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Grup tidak melacak perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE seumur hidupnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup membentuk matriks pencadangan berdasarkan kerugian kredit masa lalu, disesuaikan dengan faktor-faktor spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi masa depan (*forward-looking*) yang relevan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

I. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition

A financial asset is derecognized when the contractual rights to receive the cash flows from the assets has expired. On derecognition of a financial asset in its entirety, the differences between the carrying amount and the sum of the consideration received and any cumulative gains or losses that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss.

Impairment

The Group recognizes an allowance for ECL for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have not been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

Because its trade and other receivables do not contain significant financing component, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

1. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, bagi liabilitas keuangan dalam bentuk utang dan pinjaman, dicatat pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman seperti utang usaha, beban akrual dan liabilitas keuangan jangka pendek lainnya.

Pengukuran Selanjutnya

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, akrual dan liabilitas imbalan jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

1. Financial instruments (continued)

Financial liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair values and, in the case of loans and borrowings, net of directly attributable transaction costs.

The Group designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as trade payables, accrued and other short term financial liabilities.

Subsequent Measurement

Liabilities for current trade and other payables, accrued and short-term employee benefits liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying values is recognized in profit or loss.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

l. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

m. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka dibebankan melalui amortisasi sesuai masa manfaat masing-masing biaya yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

n. Aset tetap

Tanaman produktif

Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur; diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode; dan sangat jarang dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa hanya sesekali.

Tanaman produktif belum menghasilkan

Seluruh biaya yang berhubungan dengan pengembangan tanaman produktif belum menghasilkan, beban imbalan kerja dan biaya bunga sehubungan dengan kredit yang digunakan untuk pengembangan tanaman produktif belum menghasilkan dikapitalisasi sampai produksi komersial telah dicapai.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

l. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

m. Prepaid expenses

Prepaid expenses are charged through amortization over the useful life of each of the related costs using straight line method.

n. Fixed assets

Bearer plants

Bearer plants are living plants used in the production or supply of agricultural produce; are expected to bear produce for more than one period; and have a remote likelihood of being sold as agricultural produce, except for incidental scrap sales.

Immature bearer plants

All of cost related to the bearer plant development, employee benefit expenses and borrowing cost related to the credit used for bearer plant development are capitalized until commercial production has been achieved.

Keterangan	Tahun Kapitalisasi/ Capitalization Year	Description
Tanaman Karet	5	Rubber
Tanaman Pinus	11	Pine Trees
Tanaman Kayu Putih	3	Cajeput Trees
Tanaman Gliricidia Sepium	3	Gliricidia Sepium
Tanaman Tebu	1	Sugarcane

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

n. Aset tetap (lanjutan)

n. Fixed assets (continued)

Tanaman produktif (lanjutan)

Bearer plants (continued)

Tanaman produktif menghasilkan

Mature bearer plants

Biaya perolehan tanaman belum menghasilkan diklasifikasi ke tanaman menghasilkan pada saat tanaman tersebut mulai menghasilkan. Jangka waktu suatu tanaman dinyatakan mulai menghasilkan ditentukan oleh pertumbuhan vegetatif dan berdasarkan taksiran manajemen, dengan ketentuan sebagai berikut:

Cost of immature plants classified into mature plants when the plants starts to produced. The period of a plants classified as mature depends on the vegetative growth and based on the management estimation with criteria as follows:

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat yang diestimasi sebagai berikut:

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives, estimated as follows:

Keterangan	Tahun/ Year	Description
Tanaman menghasilkan - Karet	25	Mature plant - Rubber
Tanaman menghasilkan - Pinus	24	Mature plant - Pine
Tanaman menghasilkan - Kayu Putih	22	Mature plant - Cajeput
Tanaman menghasilkan - Gliricidia Sepium	12	Mature plant - Gliricidia Sepium
Tanaman menghasilkan - Tebu	4	Mature plantation - Sugarcane

Jumlah tercatat tanaman produktif direviu atas penurunan nilai jika terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

The carrying amounts of bearer plants are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that their carrying values may not be fully recoverable.

Umur manfaat aset dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan secara prospektif jika dipandang perlu.

The asset useful lives and depreciation method are reviewed at the end of each reporting year and adjusted prospectively if necessary.

Beban pemeliharaan tanaman produktif dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Grup manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Upkeep and maintenance costs of bearer plants are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Pembibitan

Seedlings

Biaya-biaya yang terjadi atas pembelian bibit dan pemeliharaannya dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya ini akan dipindahkan ke akun "Tanaman Belum Menghasilkan" pada saat siap ditanam.

Costs incurred in the purchase of seeds and their maintenance are stated at cost. The accumulated costs are transferred to the "Immature Plant" account at the time of planting.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

n. Aset tetap (lanjutan)

n. Fixed assets (continued)

Aset tetap lainnya

Other fixed asset

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset-aset tersebut sebagai berikut:

Depreciation of an asset starts when it is available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the assets as follows:

Keterangan	Tahun/ Year	Description
Bangunan	10-20	Buildings
Jalan dan jembatan	4-20	Road and bridges
Mesin dan instalasi	4-16	Machinery and Installations
Tempat penimbunan kayu	4-10	Wood landfills
Alat berat dan mesin industri	4-8	Heavy equipment and industrial machinery
Kendaraan bermotor	4-8	Vehicles
Peralatan kantor	4-8	Office equipment

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

The assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate, at each financial year end.

Tanah pada awalnya dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa besar kemungkinan hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

At the initial recognition, land is stated at acquisition cost and not amortized as the management is of the opinion that it is probable that the titles can be renewed/extended upon expiration.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs that occur subsequently incurred to add, replace or repair fixed assets recorded as cost of the asset if and only if it is probable economic benefits in the future associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

Fixed assets are derecognized or sold in carrying value are removed from fixed assets section. Any gain or loss arising from sales of fixed assets included in profit or loss.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

n. Aset tetap (lanjutan)

n. Fixed assets (continued)

Aset tetap lainnya (lanjutan)

Other fixed asset (continued)

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Fixed Assets" account when the construction is completed and ready to use.

Aset tidak produktif

Non-productive assets

Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha diklasifikasikan ke akun aset tetap tidak produktif dalam akun aset tidak lancar lainnya - neto dan disajikan sebesar nilai setelah dikurangi penurunan nilai.

Fixed assets not used in operation are classified as non-productive assets in the other non-current assets - net account and are presented net of impairment.

Penghapusan dan pemindahtanganan aset tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-02/MBU/2010, tentang tata cara penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap Badan Usaha Milik Negara.

Write-off and transfer of non-productive assets follow the provisions set forth in the Regulation of Minister of BUMN No. PER-02/MBU/2010 on Procedures of Write-off and Transfer of Fixed Assets of BUMN.

Aset tetap yang diusulkan untuk dihapusbukukan yang selanjutnya telah mendapat persetujuan Direksi dan diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuan penghapusan oleh Pemegang Saham, maka biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak produktif tersebut direklasifikasi ke aset tidak produktif dalam akun aset tidak lancar lainnya - neto dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Akumulasi penurunan nilai aset tidak produktif dibentuk sebagai penerapan atas akuntansi penurunan nilai.

The non-productive assets are proposed to be written-off with Directors, Board of Commissioners, and Shareholders approval. Cost and accumulated depreciation of the non-productive assets are presented as part of other non-current assets - net account in the consolidated statement of financial position. Accumulated impairment of the non-productive assets is provided based on the policy of impairment on non-financial assets.

Pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan aset tetap usulan penghapusan ini, diakui sebagai pendapatan lain-lain (keuntungan penjualan aset tetap).

Income earned from the sale of the non-productive assets is recognized as other income (gain on sale of fixed assets).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

o. Aset takberwujud - Beban tangguhan hak atas tanah

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB"), dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB, dan HP diakui sebagai bagian dari akun "Beban Tangguhan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomis tanah.

p. Penurunan nilai aset - non keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Grup membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai, jika ada, diakui sebagai laba rugi sesuai dengan kategori beban yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui sebagai laba rugi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

o. Intangible assets - Deferred charges of land rights

Legal cost of land rights in the form of HGU, HGB, and Usage Rights ("Hak Pakai" or "HP") when the land was acquired initially are recognized as part of the cost of the land under the "Fixed Assets" account and not amortized. Meanwhile, the extension or the legal renewal costs of land rights in the form of HGU, HGB, and HP were recognized as part of "Deferred Charges" account in the consolidated statement of financial position and were amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.

p. Impairment of non-financial assets

The Group assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Impairment losses, if any, are recognized as profit or loss under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

q. Sewa

q. Leases

Grup mengevaluasi pada insepisi kontrak bila kontrak tersebut adalah, atau mengandung, sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Sebagai Penyewa

As Lessee

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

Aset Hak Guna

Right of use assets

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal dimulainya sewa (tanggal aset dasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna termasuk jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

Liabilitas Sewa

Lease Liabilities

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi pembelian yang secara wajar pasti akan dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan pelaksanaan opsi untuk mengakhiri. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

q. Sewa (lanjutan)

Sebagai Penyewa (lanjutan)

Liabilitas Sewa (lanjutan)

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental ("SBPI") pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa (misalnya, perubahan pembayaran masa depan yang dihasilkan dari perubahan indeks atau kurs yang digunakan untuk menentukan pembayaran sewa) atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset yang mendasarinya.

Sewa jangka pendek dan bernilai rendah

Grup juga memiliki sewa tertentu untuk peralatan kantor dan perabot kantor dengan jangka waktu sewa kurang dari 12 bulan (sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal dimulainya dan tidak mengandung opsi pembelian) atau dengan harga beli yang rendah nilai. Grup menerapkan 'sewa jangka pendek' dan 'sewa pengecualian aset bernilai rendah' untuk sewa ini dan mengakui biaya sewa berdasarkan garis lurus. Biaya-biaya ini disajikan dalam biaya umum dan administrasi dalam laba rugi.

Sebagai Pesewa

Sewa yang didalamnya Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan disertakan dalam pendapatan pada laba rugi karena sifat operasinya. Biaya langsung awal yang timbul dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

q. Leases (continued)

As Lessee (continued)

Lease Liabilities (continued)

In calculating the present value of lease payments, the Group uses its incremental borrowing rate at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments (e.g., changes to future payments resulting from a change in an index or rate used to determine such lease payments) or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group also has certain leases of office equipment and office furniture with lease terms of less than 12 months (those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option) or with low value. The Group applies the 'short-term lease' and 'lease of low value assets' recognition exemptions for these leases and recognize lease expenses on a straight-line basis. These expenses are presented within general and administrative expenses in the profit or loss.

As Lessor

Leases where the Group does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of the asset are classified as operating leases. Rental income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in revenue in the profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

r. Beban tangguhan

Biaya-biaya yang mempunyai manfaat di kemudian hari dan melebihi akhir periode pembukuan dikapitalisasi dan diamortisasikan selama taksiran masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

s. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tetap tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung Grup sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

t. Perpajakan

Grup menyajikan kurang bayar/lebih bayar atas pajak penghasilan, jika ada, dan pajak tangguhan sebagai bagian dari "Beban Pajak" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pajak kini

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan estimasi laba kena pajak tahun berjalan.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

r. Deferred charges

Expenses incurred which have future economic benefits and exceeded the accounting period are capitalized and amortized over their beneficial periods by using the straight-line method.

s. Borrowing costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of the related asset. Otherwise, borrowing costs are recognized as expense when incurred. Borrowing costs consist of interest and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying assets for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are substantially completed for their intended use.

t. Taxation

The Group presents the underpayment/overpayment of income tax, if any, and deferred tax as part of "Tax Expense" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Current tax

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the year.

Current tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as of the reporting dates.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Perpajakan (lanjutan)

Pajak kini (lanjutan)

Penghasilan kena pajak berbeda dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena penghasilan kena pajak tidak termasuk bagian dari pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan di tahun-tahun yang berbeda, dan juga tidak termasuk bagian-bagian yang tidak dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Penyesuaian atas pajak penghasilan kini dan tangguhan tahun sebelumnya (tidak termasuk bunga dan penalti, yang disajikan sebagai bagian dari "Beban Operasi Lainnya") disajikan sebagai bagian dari "Beban Pajak" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, jika ada.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Grup mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

Pajak final

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian. Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46: "Pajak Penghasilan".

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Taxation (continued)

Current tax (continued)

Taxable profit differs from profit as reported in the statement of profit or loss and other comprehensive income because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are non-taxable or non-deductible.

The adjustments in respect of current and deferred income tax of the previous years (exclusive of interests and penalties, which are presented as part of "Other Operating Expenses" account) are presented as part of "Tax Expense" account in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, if any.

Changes to the tax obligation are recognized when tax assessment is received or if the Group appealed, when the result of the appeal has been decided.

Final tax

In accordance with tax regulation in Indonesia, final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction are recognizing losses. Final tax is no longer governed by PSAK 46: "Income Tax".

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Perpajakan (lanjutan)

t. Taxation (continued)

Pajak tangguhan

Deferred tax

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes on reporting date.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal yang belum terpakai, sepanjang besar kemungkinan penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal yang belum terpakai tersebut dapat dimanfaatkan.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and unused tax losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and unused tax losses can be utilized.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila penghasilan kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan dipakai pada saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling menghapuskan jika secara legal dapat saling menghapuskan antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan terhadap liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan untuk entitas yang sama, atau Grup bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas jangka pendek berdasarkan jumlah neto.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized, or the liability is settled based on the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date. Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Group intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Perpajakan (lanjutan)

Pajak pertambahan nilai (PPN)

PPN keluaran dan pajak masukan yang berhubungan dengan produksi, distribusi, manajemen, dan *marketing*, diakui neto atas jumlah PPN, kecuali:

- PPN Masukan yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan, yang dalam hal ini Pajak Masukan diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk yang telah dikenakan PPN kecuali secara peraturan tidak dikenakan.

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari/atau terutang termasuk sebagai bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan konsolidasi.

u. Imbalan kerja karyawan

Perusahaan mempunyai program dana pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat.

Pembayaran program manfaat pensiun iuran pasti diakui sebagai beban pada saat pekerja telah memberikan jasa mereka, dimana mereka memperoleh hak atas iuran. Pembayaran kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan diperhitungkan sebagai pembayaran untuk program iuran pasti di mana kewajiban Perusahaan dan anak perusahaan tertentu berdasarkan program tersebut setara dengan kewajiban yang timbul dalam program manfaat pensiun iuran pasti.

Grup juga mencatat penyisihan manfaat tambahan selain program dana pensiun tersebut di atas untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama dan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang berlaku. Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode "Projected Unit Credit".

Beban atas pemberian imbalan dalam program imbalan manfaat pasti ditentukan dengan metode *Projected Unit Credit*.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Taxation (continued)

Value added tax (VAT)

VAT in and out that related to production, distribution, management, and marketing, recognized net of the amount of VAT, except:

- VAT-In arising from assets or service purchase that can not be credited in accordance with the regulation, in which the VAT - in recognized as a part of cost of asset or a part of the item of applied expenses; and
- Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included, unless not permitted by regulation.

The net amount of VAT recoverable from, or payable to, the taxation authorities is included as part of receivables or payables in the consolidated statement of financial position.

u. Employment benefits

The Company have defined contribution retirement plans covering all their qualified permanent employees.

Payments to defined contribution retirement benefit plans are recognised as an expense when employees have rendered service entitling them to the contributions. Payments made to Dana Pensiun Lembaga Keuangan are accounted for as payments to defined contribution plans where the obligations of the Company and certain subsidiaries under the plans are equivalent to those arising in a defined contribution retirement benefit plan.

The Group also provides additional provisions on top of the benefits provided under the above-mentioned defined contribution pension programs in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Collective Labor Agreement and the relevant labor law. The said additional provisions are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

The cost of providing benefits under the defined benefits plan is determined using the Projected Unit Credit method.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

u. Imbalan kerja karyawan (lanjutan)

u. Employment benefits (continued)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari (i) keuntungan dan kerugian aktuarial; (ii) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto; dan (iii) setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Remeasurements of the net defined benefits liability (asset), which are recognized as other comprehensive income, consists of (i) actuarial gain and losses; (ii) the return on plan assets, excluding amounts included in net interest on the net defined benefits liability (asset); and (iii) any change in the effect of the asset ceiling, excluding amounts included in net interest on the net defined benefits liability (asset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Remeasurements of the net defined benefits liability (asset) recognized in other comprehensive income will not be reclassified to profit or loss in the next periods.

Beban imbalan kerja jangka panjang lainnya ditentukan dengan metode *Projected Unit Credit* dengan metode yang disederhanakan di mana metode ini tidak mengakui pengukuran kembali dalam penghasilan komprehensif lain. Total nilai neto dari biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui pada laba rugi tahun berjalan.

The cost of providing other long-term employee benefits is determined using the Projected Unit Credit method using simplified method of not recognizing remeasurements in other comprehensive income. The net total of service cost, net interest on the net defined benefits liability (asset) and remeasurements of the net defined benefits liability (asset) are recognized in profit or loss for the period.

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara tanggal amendemen atau kurtailmen program dan tanggal pada saat Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier of the date of the plan amendment or curtailment; and the date that the Group recognizes related restructuring costs.

Bunga neto ditentukan dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto. Grup mengakui perubahan atas liabilitas imbalan pasti neto berikut pada "Beban pokok penjualan", "Beban pemasaran dan penjualan" dan "Beban umum dan administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

Net interest is calculated by applying discount rate to the net defined benefits liability or asset. The Group recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "Cost of goods sold", "Marketing and selling expenses" and "General and administrative expenses" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income:

- Biaya jasa yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan dan kerugian atas kurtailmen; dan
- Beban atau pendapatan bunga neto.

- Service costs comprising current service costs, past-service costs and gains and losses on curtailments; and
- Interest expense or income - net

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

u. Imbalan kerja karyawan (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi. Kurtailmen terjadi apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- (i) Menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau
- (ii) Mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang signifikan dari jasa masa depan pekerja tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Penyelesaian program terjadi ketika Grup melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti.

Imbalan jasa masa kerja karyawan

Imbalan jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek Grup meliputi:

a. Tantiem

Penyisihan atas tantiem dibuat berdasarkan estimasi manajemen dan dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Tantiem akan dibayarkan kepada Direksi dan Komisaris setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selisih antara jumlah tantiem yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah yang disahkan oleh pemegang saham dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana tantiem tersebut disahkan oleh RUPS.

b. Bonus

Bonus ditetapkan berdasarkan estimasi manajemen Grup dan disahkan oleh RUPS. Selisih antara jumlah bonus yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah yang disahkan oleh pemegang saham dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana bonus tersebut disahkan oleh RUPS.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

u. Employment benefits (continued)

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized when the curtailment or settlement occurs. A curtailment occurs when an entity either:

- (i) Is demonstrably committed to make a significant reduction in the number of employees covered by a plan; or*
- (ii) Amends the terms of a defined benefit plan so that a significant element of future service by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits.*

A settlement occurs when the Group enters into a transaction that eliminates all further legal or constructive obligation for part or all of the benefits provided under a defined benefit plan.

Employee service entitlements

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits of the Group comprise of:

a. Tantiem

Provision of tantiem are based on management estimates and charged to the current period profit or loss. Tantiem will be paid to Directors and Commissioners after obtaining the approval in the General Stockholders' Meeting (GSM). The difference between the provision of tantiem that was estimated by management and the amount approved by the stockholders is recognized in the period when such tantiem is approved by GSM.

b. Bonus

Bonus is provided based on the estimation of Group's management and approved by GSM. The difference between the total bonus estimated by management and approved by stockholders is recognized in the period when such bonus is approved by GSM.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

u. Imbalan kerja karyawan (lanjutan)

Imbalan jasa masa kerja karyawan (lanjutan)

Imbalan jangka panjang

Imbalan kerja jangka panjang Grup meliputi:

a. Imbalan dan iuran pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan iuran pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Entitas Anak menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat.

Grup juga mencatat penyisihan manfaat tambahan selain program dana pensiun tersebut di atas untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Cipta Kerja No. 2/2022 ("UU Cipta Kerja", (UUCK)). Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode "Projected Unit Credit".

Jika terdapat surplus pendanaan, aset diakui pada laporan keuangan konsolidasian apabila pemulihan surplus tersebut dapat dilakukan baik melalui pembayaran kembali atau pengurangan iuran masa datang.

Untuk program pensiun iuran pasti, kontribusi yang terutang diakui sebagai beban usaha pada periode berjalan.

b. Imbalan kerja jangka panjang lain

Grup juga memberikan imbalan kerja jangka panjang selain pensiun yang meliputi santunan hari tua, tunjangan masa persiapan pensiun, cuti berimbalan jangka panjang dan kesetiaan yang tidak didanai. Imbalan kerja jangka panjang tersebut dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* sesuai dengan PSAK 24.

c. Imbalan kesehatan pasca kerja

Perusahaan memberikan Program Iuran Pasti Imbalan Perawatan Kesehatan Pensiun kepada karyawannya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

u. Employment benefits (continued)

Employee service entitlements (continued)

Long-term employee benefits

Long-term employee benefits of the Group comprise of:

a. Defined benefit and contribution

The Company has defined benefit and defined contribution pension plan for all of its eligible permanent employees. The Subsidiaries have defined contribution pension plan for all of their eligible permanent employees.

The Group also provides additional provisions on top of the benefits provided under the above-mentioned defined contribution pension programs in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Collective Labor Agreement and Government Regulation in Lieu of Law No. 2/2022 (the "Cipta Kerja Law", (UUCK)). The said additional provisions are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

Where the funding status shows a surplus, an asset is recognized in the consolidated financial statements if that surplus can be recovered through refunds or reductions in future contributions.

For the defined contribution pension plan, contributions payable are charged to current period operations.

b. Other long-term employee benefits

The Group also provides long-term employment benefits other than pension which include post retirement benefits, allowance for preparation of pension, long-term compensation leave and service rewards which are unfunded. These long-term employee benefits are calculated using the *Projected Unit Credit* method in accordance with PSAK 24.

c. Post-retirement healthcare benefits

The Company provides defined contribution Post-retirement Healthcare Benefits plan to its pensioned employees.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

v. Pengukuran nilai wajar

v. Fair value measurement

Grup mengukur instrumen keuangan pada nilai wajar setiap tanggal pelaporan. Pengungkapan nilai wajar untuk instrumen keuangan disajikan pada Catatan 30.

The Group measure financial instruments at fair value at each reporting date. The fair value measurements of financial instruments is disclosed on Note 30.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

Fair value is the price to be received from selling an asset or a price to be paid to transfer a liability in a transaction between market participants on the date of measurement. Fair value measurement assumes that a transaction to sell an asset or transfer liability happens:

- i. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- ii. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

- i. in a main market of the asset or liability, or*
- ii. if there is no main market, in the most profitable market for the asset or liability.*

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Grup.

The main market or most profitable market must be accessible by the Group.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

The fair value of assets or liabilities is measured using the assumption that market participants will use when determining the price of the asset or liability, assuming that market participants act in their best economic interests.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, by maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

v. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

v. Fair value measurement (continued)

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hirarki nilai wajar berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- i) *Level 1* - Harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- ii) *Level 2* - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
- iii) *Level 3* - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*) baik secara langsung atau tidak langsung.

- i) *Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.*

- ii) *Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable, whether its directly or indirectly.*

- iii) *Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable, whether its directly or indirectly.*

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Grup menentukan apakah terdapat perpindahan antara *level* dalam hirarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan *level* masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by reassessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting year.

Komite penilai Grup menentukan kebijakan dan prosedur untuk menentukan pengukuran nilai wajar yang berulang.

The Group's valuation committee determines the policies and procedures for recurring fair value measurement.

Penilai eksternal terlibat dalam penilaian aset signifikan, terutama aset biologis. Keterlibatan penilai eksternal ditentukan setiap tahun setelah dibahas dan disetujui oleh Direksi Perusahaan. Kriteria pemilihan termasuk pengetahuan pasar, reputasi, independensi dan kemampuan mematuhi standar profesi. Metode penilaian dan input yang digunakan dibahas dan diputuskan bersama oleh Grup dan penilai eksternal.

External valuers are involved for valuation of significant assets, in particular, the biological assets. Involvement of external valuers is decided upon annually after discussion with and approval by the Company's Board of Directors. Selection criteria include market knowledge, reputation, independence and whether professional standards are maintained. Valuation techniques and inputs to use were discussed and decided by the Group and external valuers.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

w. Provisi

w. Provisions

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

x. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Pengakuan Beban

x. Revenue from Contracts with Customers and Recognition of Expenses

Kontrak-kontrak tertentu dengan pelanggan dalam segmen bisnis mensyaratkan akuntansi imbalan variabel. Grup mengestimasi imbalan variabel yang berupa penyesuaian harga sehubungan perubahan harga komoditas dan volume penjualan dengan menggunakan jumlah yang paling mungkin yang dikembangkan berdasarkan pengalaman historis dengan mempertimbangkan juga pola pembelian saat ini. Sedangkan pengakuan dilakukan saat kemungkinan besar penyesuaian harga akan diberikan.

Certain contracts with customers within the respective business segments give rise to variable considerations. The Group estimates the variable considerations such as price adjustments arising from changes of commodity price and sales volume using most likely amount developed based on historical experience taking into account also current purchasing patterns. While the recognition is made when it is probable price adjustments will be given.

Piutang usaha merupakan hak Grup atas sejumlah imbalan yang tidak bersyarat (yaitu, hanya berlalunya waktu yang diperlukan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo). Lihat kebijakan akuntansi aset keuangan di bagian Instrumen Keuangan mengenai pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya.

Trade receivables represent the Group's right to an amount of consideration that is unconditional (i.e., only the passage of time is required before payment of the consideration is due). Refer to accounting policies of financial assets in Financial Instruments section regarding initial recognition and subsequent measurement.

Jika pelanggan membayar imbalan sebelum Grup mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, liabilitas kontrak diakui pada saat pembayaran dilakukan atau pembayaran jatuh tempo (mana yang lebih awal). Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan pada saat Grup memenuhi pelaksanaan kontrak.

If a customer pays consideration before the Group transfers goods or services to the customer, a contract liability is recognized when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). Contract liabilities are recognized as revenue when the Group performs under the contract.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**x. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
dan Pengakuan Beban (lanjutan)**

(i) Penghasilan/Beban Bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penghasilan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif (SBE), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

(ii) Dividen

Pendapatan diakui pada saat hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

(iii) Penghasilan Sewa

Penghasilan sewa diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

(iv) Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

y. Biaya penelitian dan pengembangan

Biaya penelitian dibebankan saat terjadinya.

Aset takberwujud yang timbul dari biaya pengembangan proyek individual diakui hanya jika Grup dapat menunjukkan semua hal berikut ini: (i) kelayakan teknis penyelesaian aset takberwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan atau dijual, (ii) niat untuk menyelesaikan aset takberwujud tersebut dan menggunakannya atau menjualnya, (iii) cara aset takberwujud akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan, (iv) tersedianya kecukupan sumber-sumber daya untuk menyelesaikan pengembangan aset takberwujud, dan (v) kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset takberwujud selama pengembangannya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**x. Revenue from Contracts with Customers and
Recognition of Expenses (continued)**

(i) Interest Income/Expenses

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using Effective Interest Rate (EIR) method, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying value of the financial asset or liability.

(ii) Dividends

Revenue is recognized when the Group's right to receive the payment is established by General Shareholder Meeting (GSM).

(iii) Rental Income

Rental income is recognized on a straight-line basis over the lease terms.

(iv) Expenses

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

y. Research and development costs

Research and development costs are expensed as incurred.

An intangible asset arising from development expenditures on an individual project is recognized only when the Group can demonstrate, all of the following: (i) the technical feasibility of completing the intangible asset so that it will be available for use or sale, (ii) its intention to complete and its ability to use or sell the asset, (iii) how the asset will generate future economic benefits, (iv) the availability of resources to complete the development of intangible assets, and (v) the ability to measure reliably the expenditures related to intangible assets during its development.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

y. Biaya penelitian dan pengembangan (lanjutan)

Nilai tercatat biaya pengembangan diuji bagi penurunan nilai setiap tahun jika aset belum digunakan atau lebih sering bila terdapat indikasi penurunan nilai pada periode pelaporan.

Pada saat penyelesaian, biaya pengembangan diamortisasi selama estimasi masa manfaat ekonomis dari aset takberwujud terkait, dan diuji untuk penurunan nilai bila terdapat indikasi penurunan nilai dari aset takberwujud.

Keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan aset takberwujud diukur sebesar perbedaan antara nilai pelepasan neto dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

z. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Grup telah menerapkan sejumlah standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup:

Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Amandemen ini memberikan panduan untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan dalam mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas menjadi persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Amandemen tersebut berdampak pada pengungkapan kebijakan akuntansi Grup, namun tidak berdampak pada pengukuran, pengakuan atau penyajian item apa pun dalam laporan keuangan Grup.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

y. Research and development costs (continued)

The carrying value of development costs is reviewed for impairment annually when the asset is not yet in use or more frequently when an indication of impairment arises during the reporting period.

Upon completion, the development costs are amortized over the estimated useful life of the related intangible asset, and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.

Gain or loss arising from derecognition of an intangible asset is measured as the difference between the net disposal proceeds and the net carrying amount of the asset, and is recognized in the consolidated statement of comprehensive income when the asset is derecognized.

z. Change in Accounting Policies

The Group has applied a number of new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2023, including the following revised standards that have affected the consolidated financial statements of the Group:

Amendment of PSAK 1: Presentation of financial statement - Disclosure of accounting policies

This amendments provide guidance to help entities apply materiality judgements to accounting policy disclosures. The amendments aim to help entities provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities to disclose their 'significant' accounting policies with a requirement to disclose their 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

The amendments have had an impact on the Group's disclosures of accounting policies, but not on the measurement, recognition or presentation of any items in the Group's financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

z. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

z. Change in Accounting Policies (continued)

**Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil
sebelum Penggunaan yang Diintensikan**

**Amendment of PSAK 16: Fixed Assets -
Proceeds before Intended Use**

Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan item-item tersebut, dan biaya untuk memproduksi item-item tersebut, dalam laba rugi.

The amendments prohibit entities from deducting from the cost of an item of fixed assets, any proceeds from selling items produced while bringing that asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Instead, an entity recognizes the proceeds from selling such items, and the costs of producing those items, in the profit or loss.

Grup telah menerapkan sejumlah standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup: (lanjutan)

The Group has applied a number of new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2023, including the following revised standards that have affected the consolidated financial statements of the Group: (continued)

**Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil
sebelum Penggunaan yang Diintensikan
(lanjutan)**

**Amendment of PSAK 16: Fixed Assets -
Proceeds before Intended Use (continued)**

Grup menerapkan amendemen tersebut secara retrospektif hanya untuk aset tetap yang dibuat supaya aset siap digunakan pada atau setelah awal periode penyajian paling awal ketika entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.

The Group applies the amendments retrospectively only to items of fixed assets made available for use on or after the beginning of the earliest period presented when the entity first applies the amendment.

Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Grup karena tidak ada penjualan atas item-item yang dihasilkan aset tetap yang menjadi tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal periode sajian paling awal.

These amendments had no impact on the consolidated financial statements of the Group as there were no sales of such items produced by fixed assets made available for use on or after the beginning of the earliest period presented.

**Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
terkait Definisi Estimasi Akuntansi**

**Amendment of PSAK 25: Accounting
Policies, Changes in Accounting Estimates
and Errors - Definition of Accounting
Estimates**

Amandemen PSAK 25 memperjelas perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amendemen juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

The amendments to PSAK 25 clarify the distinction between changes in accounting estimates, changes in accounting policies and the correction of errors. They also clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.

Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

The amendments had no impact on the Group's consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

z. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

z. Changes in accounting principles (continued)

Grup telah menerapkan sejumlah standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup: (lanjutan)

The Group has applied a number of new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2023, including the following revised standards that have affected the consolidated financial statements of the Group: (continued)

Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal

Amendment of PSAK 46: Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction

Amandemen PSAK 46 Pajak Penghasilan mempersempit ruang lingkup pengecualian pengakuan awal, sehingga tidak lagi berlaku pada transaksi yang menimbulkan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama dan perbedaan temporer kena pajak dan seperti sewa dan liabilitas dekomisioning.

The amendments to PSAK 46 Income Taxes narrow the scope of the initial recognition exception, so that it no longer applies to transactions that give rise to equal taxable and deductible temporary differences such as leases and decommissioning liabilities.

Amandemen ini tidak mempunyai dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

The amendments had no impact on the Group's consolidated financial statements.

Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan Model Pilar Dua

Amendment of PSAK 46: Income Taxes - International Tax Reform - Pillar Two Model Rules

Amandemen PSAK 46 ini diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap aturan Model Pilar Dua yang diterbitkan oleh Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi atau *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, dan mencakup:

The amendments to PSAK 46 have been introduced in response to the Pillar Two Rules, issued by Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), and include:

- Pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua; dan
- Persyaratan pengungkapan bagi entitas yang terkena dampak untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami eksposur entitas terhadap pajak penghasilan Pilar Dua yang timbul dari undang-undang tersebut, terutama sebelum tanggal berlakunya undang-undang tersebut.

- *An exception to the recognition and disclosure of deferred taxes related to the Pillar Two income taxes; and*
- *Disclosure requirements for affected entities to help users of the financial statements better understand an entity's exposure to Pillar Two income taxes arising from that legislation, particularly before its effective date.*

Pengecualian tersebut - yang penggunaannya harus diungkapkan - segera berlaku saat penerbitan amandemen ini. Persyaratan pengungkapan lainnya berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, namun tidak untuk periode interim yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2023.

The exception - the use of which is required to be disclosed - applies immediately upon the issue of these amendments. The remaining disclosure requirements apply for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023, but not for any interim periods ending on or before December 31, 2023.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir tahun pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Pajak Penghasilan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Tagihan dan Keberatan atas Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan direstitusi oleh Otoritas Pajak.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting year. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying values of the assets and liabilities affected in future periods.

Judgements

The following judgements are made by the management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Income Tax

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgement is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Group recognizes liabilities for corporate income tax is based on estimation of whether there will be additional corporate income tax.

Claims for Tax Refund and Tax Assessments Under Appeal

Based on the tax regulations currently enacted, the management uses judgements if the amounts recorded under the above account are recoverable and refundable by the Tax Authority.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penyisihan Penurunan Nilai atas Kerugian Piutang Usaha

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan informasi dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan penurunan nilai piutang usaha.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan dibawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgements (continued)

Allowance for Impairment Losses on Trade Receivables

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgement, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customer's receivable amount to reduce the amount that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimates and Assumptions (continued)

Penyusutan Aset Tetap

Depreciation of Fixed Assets

Biaya perolehan aset tetap disusutkan/diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Hal tersebut merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian, perkembangan teknologi dan keterbatasan dan pembatasan lainnya dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset tetap, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

The costs of fixed assets are depreciated/amortized on a straight-line method over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets and mature plant, and therefore future depreciation/ amortization charges could be revised.

Instrumen Keuangan

Financial Instruments

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Walaupun komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Grup.

The Group carries certain financial assets and liabilities at fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Group utilized different valuation methodology. Any changes in fair values of these financial assets and liabilities would directly affect the Group's profit or loss.

Pensiun dan Imbalan Kerja

Pension and Employee Benefits

Pengukuran liabilitas dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui sebagai pendapatan komprehensif lain.

The measurement of the Group's obligations and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized as other comprehensive income.

Walaupun Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Provisi kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha dan aset kontrak

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) untuk piutang usaha dan aset kontrak. Tingkat provisi didasarkan pada hari lewat jatuh tempo untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian yang serupa (yaitu, berdasarkan wilayah geografis, jenis produk, jenis dan peringkat pelanggan, dan pertanggungan berdasarkan surat kredit dan bentuk asuransi kredit lainnya).

Matriks provisi pada awalnya didasarkan pada tingkat gagal bayar Grup yang diamati secara historis. Grup akan mengkalibrasi matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*). Misalnya, jika perkiraan kondisi ekonomi (yaitu, produk domestik bruto) diekspektasikan akan memburuk pada tahun berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar di sektor manufaktur, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi perkiraan masa depan dianalisis.

Penilaian korelasi antara tingkat default yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi, dan KKE adalah estimasi yang signifikan. Jumlah KKE sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili gagal bayar pelanggan yang sebenarnya di masa depan. Informasi tentang KKE pada piutang usaha Grup dan aset kontrak diungkapkan dalam Catatan 6.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Provision for expected credit losses of trade receivables and contract assets

The Group uses a provision matrix to calculate Estimated Credit Loss (ECL) for trade receivables and contract assets. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns (i.e., by geography, product type, customer type and rating, and coverage by letters of credit and other forms of credit insurance).

The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions (i.e., gross domestic product) are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the manufacturing sector, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future. The information about the ECLs on the Group's trade receivables and contract assets is disclosed in Note 6.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Evaluasi Individual

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup.

Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha. Rincian lebih lanjut atas piutang usaha diungkapkan dalam Catatan 6.

Penyisihan Nilai Realisasi Neto Persediaan

Penyisihan nilai realisasi neto persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan. Rincian lebih lanjut mengenai persediaan diungkapkan dalam Catatan 8.

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi nilai terpulihkannya, yaitu jumlah yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan saat pelepasan aset.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Allowance for Impairment of Trade Receivables

Individual Assessment

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgement, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect.

These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of trade receivables. Further details on trade receivables are disclosed in Note 6.

Allowance for Net Realisable Value of Inventories

Allowance for net realizable value of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The allowance is re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. Further details regarding inventories are disclosed in Note 8.

Impairment of Non-financial Assets

An impairment exists when the carrying value of an asset or a CGU exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Penghitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Proyeksi arus kas masa depan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum ada komitmennya atau investasi signifikan di masa depan yang akan meningkatkan kinerja dari UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan dan juga terhadap arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

Aset biologis

Grup mengadopsi pendekatan pendapatan menggunakan model arus kas yang didiskontokan untuk mengukur nilai wajar dari produksi tebu dan hutan tanaman. *Inputs* signifikan yang diterapkan untuk menentukan nilai wajar aset biologis ini termasuk harga jual yang diproyeksikan, tingkat produksi, tingkat diskonto, tingkat inflasi dan nilai tukar.

Jumlah perubahan dalam nilai wajar dari aset biologis ini akan berbeda jika ada perubahan pada *input* yang digunakan, dan akan mempengaruhi laba rugi Grup dan ekuitas. *Input* kunci yang diterapkan dalam penentuan nilai wajar aset biologis termasuk analisis sensitivitas, diungkapkan dan dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan 11.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Impairment of Non-financial Assets (continued)

The value in use calculation is based on a discounted cash flow model. The future cash flow projection does not include restructuring activities that the Group is not yet committed to or significant future investments that will enhance the asset's performance of the CGU being tested. The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flow model as well as the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes.

Biological assets

The Group adopts income approach using discounted cash flow models to measure the fair value of the cane produce and timber plant. Significant inputs applied to determine the fair value of these biological assets include the projected selling prices, production yields, discount rate, inflation rate and exchange rates.

The amount of changes in fair values of these biological assets would differ if there are changes to the inputs used, and would affect the Group's profit or loss and equity. The key inputs applied in the determination of fair value of biological assets including a sensitivity analysis, are disclosed and further explained in Note 11.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Kas - Rupiah	1.618	2.739	Cash on hand - Rupiah
Kas di bank			Cash in banks
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 28)			Government related entities (Note 28)
Rupiah:			Rupiah:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	91.157	218.243	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	60.530	72.155	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9.431	85.880	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4.225	1.202	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Raya Indonesia Tbk	1.521	2.085	PT Bank Raya Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Perseroda)	864	859	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Perseroda)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	138	83	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	36	93	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan	2	2	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan
PT Bank Syariah Indonesia	2	-	PT Bank Syariah Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Dolar Amerika Serikat:			United States Dollar:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	52.218	28.568	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	821	9.803	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	686	42.906	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	771	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah :			Rupiah:
PT Bank Central Asia Tbk	486	1.159	PT Bank Central Asia Tbk
Total kas di bank	222.888	463.043	Total cash in banks
Deposito berjangka			Time deposits
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 28)			Government related entities (Note 28)
Rupiah:			Rupiah:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	28.228	60.228	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	3.519	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara Syariah	2.900	2.450	PT Bank Tabungan Negara Syariah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	300	30.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total deposito berjangka	34.947	92.678	Total time deposits
Total	259.453	558.460	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank. Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka bank konvensional dalam mata uang Rupiah berkisar antara 3,50% sampai dengan 6,00% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (2022: antara 2,25% sampai dengan 4,00%). Selanjutnya, tingkat imbalan atau bagi hasil deposito mudharabah pada bank syariah dalam mata uang Rupiah berkisar antara 2,9% - 6,0%.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Accounts in banks earn interest at floating rates based on the offered rate from each bank. Time deposits placement in conventional bank that denominated in Rupiah earned interest at annual rates ranging from 3.50% to 6.00% for the year ended December 31, 2023 (2022: from 2.25% to 4.00%). Then, merit or sharings rate for mudharabah deposits in syariah bank that denominated in Rupiah is ranging from 2.9% - 6.0%.

5. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

5. RESTRICTED CASH

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Kas di bank			Cash in banks
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 28)			Government related entities (Note 28)
Rupiah:			Rupiah:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	50.000	51.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	5.680	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Dolar Amerika Serikat :			United States Dollar :
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9.586	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.877	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Deposito berjangka			Time deposits
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 28)			Government related entities (Note 28)
Rupiah:			Rupiah:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	31.000	10.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	50.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	101.143	111.000	Total

Penempatan kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya digunakan sebagai jaminan pinjaman bank untuk keperluan modal kerja dan untuk pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi yang masih berjalan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini (Catatan 16).

Placement of restricted cash in bank and time deposit in are used as collateral of borrowings for working capital and performance guarantee for rehabilitation service that is still in progress up to the completion date of these consolidated financial statements (Note 16).

Tingkat bunga per tahun atas kas di bank dan deposito yang dibatasi penggunaannya adalah berkisar antara 2,07% - 5,75% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (2022: 2,25% - 2,50%).

Annual interest rates on restricted cash in bank and time deposits is ranging from 2.07% - 5.75% for the year ended December 31, 2023 (2022: 2.25% - 2.50%).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**5. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA
(lanjutan)**

Kas di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. merupakan kas yang ditempatkan pada rekening khusus devisa hasil ekspor dari sumber daya alam sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36/2023.

5. RESTRICTED CASH (continued)

Cash in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. represent of cash placed in special foreign exchange accounts for export proceeds from natural resources in accordance with Government Regulation No. 36/2023.

6. PIUTANG USAHA

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Pihak ketiga	357.735	217.573
Penyisihan penurunan nilai	(135.862)	(127.635)
Pihak ketiga, neto	221.873	89.938
Pihak berelasi	12.012	17.923
Penyisihan penurunan nilai	(155)	(2.774)
Pihak berelasi (Catatan 28), neto	11.857	15.149
Total	233.730	105.087

6. TRADE RECEIVABLES

Third parties
Provision for impairment

Third parties, net

Related parties
Provision for impairment

Related parties (Note 28), net

Total

Umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging of trade receivables are as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Lancar	138.158	20.797	Current
Jatuh tempo:			Overdue:
1 - 30 hari	37.136	55.451	1 - 30 days
31 - 90 hari	25.247	26.977	31 - 90 days
Lebih dari 90 hari	169.206	132.271	Over 90 days
Subtotal	369.747	235.496	Subtotal
Penyisihan penurunan nilai	(136.017)	(130.409)	Provision for impairment
Piutang usaha	233.730	105.087	Trade receivables

Piutang usaha umumnya merupakan jumlah yang ditagihkan kepada pelanggan atas penjualan kayu olahan dan gondorukem. Jangka waktu rata-rata kredit penjualan berkisar antara 1 sampai dengan 90 hari.

Trade receivables mostly represent amounts billed to customer for sale of wood and gum rosin. The average period of credit sales ranging from 1 to 90 days.

Berdasarkan penelaahan terhadap status piutang usaha masing-masing pelanggan pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa nilai penyisihan penurunan nilai piutang tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Based on the review of the status of the trade receivable of each customers at the reporting date, management believes that the provision for impairment of receivables is adequate to cover possible losses from the uncollectible trade receivables.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Saldo awal	130.409	136.630
Penyisihan	5.795	6.670
Pemulihan	(187)	(12.891)
Saldo akhir	136.017	130.409

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

Movement in the provision for impairment of trade receivables are as follows:

	2023	2022
Beginning balance	136.630	136.630
Provision	5.795	6.670
Reversal	(187)	(12.891)
Ending balance	136.017	130.409

7. ASET LANCAR LAINNYA DAN ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

a. ASET LANCAR LAINNYA

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Aset keuangan lancar lainnya		
Piutang pegawai	81.171	85.522
Piutang kerjasama	10.000	31.574
Piutang sewa	9.402	11.961
Piutang lainnya	69.077	34.387
Total aset keuangan lancar lainnya	169.650	163.444
Penyisihan aset keuangan lancar lainnya	(101.295)	(114.255)
	68.355	49.189
Aset non-keuangan lancar lainnya		
Biaya dibayar dimuka	52.272	24.245
Aset lancar lainnya	120.627	73.434

Other current financial assets
Employee receivables
Cooperation receivables
Rent receivables
Other receivables

Total other current financial assets
Allowance for other current financial assets

Other current non-financial assets
Prepaid expenses

Other current assets

Piutang pegawai merupakan pinjaman yang diberikan Grup kepada pegawai yang umumnya terdiri atas pinjaman perumahan dan kendaraan.

Employee receivables represent loans provided by the Group to employees which generally consist of housing and vehicle loans.

Piutang kerjasama merupakan talangan biaya yang akan ditagihkan ke pihak ketiga sehubungan dengan perjanjian kerjasama di entitas anak tertentu.

Cooperation receivables represent bridging costs that will be billed to third parties in connection with cooperation agreements in certain subsidiaries.

Mutasi penyisihan penurunan adalah sebagai berikut:

Movement in the provision for impairment is as follows:

	2023	2022
Saldo awal	114.255	92.511
Penyisihan	4.441	34.041
Pemulihan	(17.401)	(12.297)
Saldo akhir	101.295	114.255

Beginning balance
Provision
Reversal

Ending balance

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**7. ASET LANCAR LAINNYA DAN ASET TIDAK
LANCAR LAINNYA (lanjutan)**

**7. OTHER CURRENT ASSETS AND OTHER NON
CURRENT ASSET (continued)**

a. ASET LANCAR LAINNYA (lanjutan)

a. OTHER CURRENT ASSETS (continued)

Berdasarkan penelaahan terhadap status piutang pegawai, tuntutan ganti rugi dan lainnya masing-masing pelanggan pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa nilai penyisihan penurunan nilai aset keuangan lancar lainnya telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya aset keuangan lancar lainnya.

Based on the review on the status of the employee, claim for compensation and other receivables of each customers at the reporting date, management believes that the provision for impairment of other current financial assets is adequate to cover possible losses from the uncollectible other current financial assets.

b. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

b. OTHER NON CURRENT ASSETS

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Aset keuangan tidak lancar lainnya			Other non current financial assets
Kas di bank			Cash in banks
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 28)			Government related entities (Note 28)
Rupiah:			Rupiah:
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	69.474	39.474	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Raya Indonesia Tbk	35.033	32.605	PT Bank Raya Indonesia Tbk
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah:			Rupiah:
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	117	915	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
Deposito berjangka			Time deposits
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 28)			Government related entities (Note 28)
Rupiah:			Rupiah:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.449	2.449	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	300	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Sub total	107.073	75.743	Sub total
Aset non keuangan tidak lancar lainnya	14.323	15.660	Other non current non-financial assets
Total	121.396	91.403	Total

Kas pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, merupakan kas yang dibatasi penggunaannya yang digunakan sebagai jaminan pinjaman bank jangka panjang (Catatan 16).

Cash in PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk represents restricted cash in bank, which used as collateral of long-term bank loans (Note 16).

Kas pada PT Bank Raya Indonesia Tbk, merupakan kas yang dibatasi penggunaannya, sebagai tabungan berhadiah dengan jangka waktu 3 tahun.

Cash in PT Bank Raya Indonesia Tbk, represents restricted cash in bank, as savings reward account with a maturity of 3 years.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**7. ASET LANCAR LAINNYA DAN ASET TIDAK
LANCAR LAINNYA (lanjutan)**

b. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Tingkat bunga per tahun atas kas di bank dan deposito yang dibatasi penggunaannya adalah berkisar antara 3,50% - 4,50% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (2022: 2,25% - 4,00%).

**7. OTHER CURRENT ASSETS AND OTHER NON
CURRENT ASSET (continued)**

b. OTHER NON CURRENT ASSETS (continued)

Annual interest rates on restricted cash in bank and time deposits are ranging from 3.50% - 4.50% for the year ended December 31, 2023 (2022: 2.25% - 4.00%).

8. PERSEDIAAN

Persediaan Grup, terdiri dari:

8. INVENTORIES

The Group inventories consist of:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Persediaan produk			Inventory products
Kayu bulat	233.447	105.057	Logs
Gondorukem	96.190	162.270	Gum rosin
Minyak kayu putih	72.605	49.701	Cajuput oil
Kayu olahan	51.633	37.279	Processed wood
Terpentin	48.969	47.376	Turpentine
Getah pinus dan karet	36.957	20.881	Pine and rubber sap
Lain-lain	20.035	8.941	Others
Suku cadang dan bahan pembantu	15.238	17.347	Spare parts and supplies
Total persediaan	575.074	448.852	Total inventories
Penyisihan penurunan nilai persediaan	(28.822)	(10.051)	Provision for impairment of inventory
Persediaan	546.252	438.801	Inventories

Persediaan tertentu digunakan sebagai jaminan atas pinjaman (Catatan 16).

Certain inventories are used as collateral for borrowings (Note 16).

Persediaan tertentu diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp146.107 dan Rp197.175 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang mungkin dialami Grup.

Certain inventories are covered by insurance against losses from fire and other risks under blanket policies amounting to Rp146,107 and Rp197,175 as of December 31, 2023 and 2022, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from such risk if the Group suffered losses from such risks.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas penurunan nilai persediaan.

Management believes that the provision for impairment is adequate to cover any possible losses from decline in value of inventory.

The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. PERPAJAKAN
9. TAXATION
a. Pajak dibayar dimuka
a. Prepaid taxes

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Perusahaan:		
Pajak Pertambahan Nilai	-	1.447
Entitas Anak:		
Pajak Pertambahan Nilai	166	173
Total	166	1.620

The Company:
Value Added Tax

Subsidiaries:
Value Added Tax

Total

b. Klaim pengembalian pajak
b. Claims for tax refund

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Perusahaan :		
Pajak Penghasilan Badan : Tahun 2023	23.845	-
Entitas Anak:		
Pajak Penghasilan Badan: Tahun 2023	4.178	-
Tahun 2022	8.818	8.818
Total	36.841	8.818

Subsidiaries:
Corporate Income Tax:
Year 2023
Year 2022

Total

c. Utang pajak
c. Taxes payables

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Perusahaan:		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 4 (2)	448	413
Pasal 21	7.402	7.936
Pasal 22	514	133
Pasal 23	632	750
Pasal 29	-	60.961
Pajak Pertambahan Nilai	6.727	9.639
Pajak Bumi dan Bangunan	220.818	34.313
Pajak lain-lain	29	41
Subtotal	236.570	114.186
Entitas Anak:		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 4 (2)	-	14
Pasal 21	2.543	1.770
Pasal 22	12	7
Pasal 23	1.492	746
Pasal 25	-	729
Pasal 29	6.128	1.164
Pajak Pertambahan Nilai	1.806	2.885
Pajak Bumi dan Bangunan	13.233	5.561
Pajak lain-lain	19	-
Subtotal	25.233	12.876
Total	261.803	127.062

The Company:
Income Tax :
Article 4 (2)
Article 21
Article 22
Article 23
Article 29
Value Added Tax
Land and Building Tax
Other taxes
Subtotal

Subsidiaries:
Income Tax :
Article 4 (2)
Article 21
Article 22
Article 23
Article 25
Article 29
Value Added Tax
Land and Building Tax
Other taxes
Subtotal

Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Utang pajak (lanjutan)

Perusahaan

2017

Pada tanggal 23 Desember 2022, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) masa pajak 2017 untuk:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp43.357. Perusahaan telah menyetujui sebagian SKPKB tersebut, sebesar Rp16.926, yang dicatat sebagai beban pajak penghasilan periode lalu sebagai bagian dari beban pajak penghasilan pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Selanjutnya, pada tanggal 17 Februari 2023, Perusahaan telah membayar sebagian tagihan atas SKPKB tersebut dengan total pembayaran sebesar Rp21.678. Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2023, Perusahaan telah mengajukan keberatan atas sebagian SKPKB PPh Badan sebesar Rp26.431. Pada tanggal 14 September 2023, Perusahaan melunasi pokok SKPKB sebesar Rp8.498. Selanjutnya, pada tanggal 14 September 2023, Perusahaan memutuskan untuk mencabut keberatan yang diajukan, dan pada tanggal yang sama Perusahaan mengajukan permohonan pengurangan atas sanksi administrasi sebesar Rp13.181. Perusahaan telah mencatat sanksi ini sebagai bagian dari beban pajak penghasilan periode lalu pada laporan keuangan konsolidasian yang berakhir pada 31 Desember 2023.
- 2) PPh pasal 4(2) sebesar Rp159, PPh pasal 21 sebesar Rp940, PPh pasal 23 sebesar Rp5, PPN sebesar Rp4.336, total sebesar Rp5.440. Perusahaan menyetujui SKPKB tersebut dan mencatatnya sebagai beban pajak sebagai bagian dari biaya lain-lain pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

9. TAXATION (continued)

c. Taxes payables (continued)

The Company

2017

On December 23, 2022, the Directorate General of Taxes issued several Underpayment Tax Assessment Letters (SKPKB) for the 2017 tax period for:

- 1) Corporate Income Tax ("CIT") of Rp43,357. The Company has partially approved the SKPKB, amounting to Rp16,926, which was recorded as income tax expense for the past period as part of income tax expense in the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2022. Furthermore, on February 17, 2023, the Company has paid partially the SKPKB with a total payment of Rp21,678. Furthermore, on February 20, 2023, the Company has filed objection to some corrections in the CIT SKPKB amounting to Rp26,431. On September 14, 2023, the Company has fully paid all tax payable of SKPKB excluding the penalty with total payments of Rp8,498. Then, on September 14, 2023, the Company revoked its objection, and at the date, the Company also filed reduction for the administrative sanction (tax penalty) with total amount of Rp13,181. The Company has recorded the penalty as part of prior period income tax expense in the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2023.
- 2) Article 4(2) WHT of Rp159, Article 21 WHT of Rp940, Article 23 WHT of Rp5, VAT of Rp4,336, a total of Rp5,440, which is recorded as a tax expense as part of other expenses in the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2022.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

9. TAXATION (continued)

d. Beban pajak penghasilan

d. Income tax expense

	2023	2022	
Perusahaan:			Company:
Beban pajak tangguhan	76.184	58.302	Deferred tax expense
Beban pajak kini			Tax expense
tahun berjalan	56.316	88.602	current year
Beban pajak penghasilan periode lalu	13.250	16.926	Prior period income tax expense
Subtotal	145.750	163.830	Subtotal
Entitas anak:			Subsidiaries:
Beban pajak kini			Tax expense
tahun berjalan	7.519	1.187	current year
Beban pajak tangguhan	7.354	50	Deferred tax expense
Beban pajak penghasilan periode lalu	-	165	Prior period income tax expense
Subtotal	14.873	1.402	Subtotal
Total	160.623	165.232	Total

e. Pajak kini

e. Current tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before income tax expense in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income with the estimated taxable income for the years ended December 31, 2023 and 2022, are as follows:

	2023	2022	
Laba sebelum beban pajak penghasilan	662.549	715.503	Income before income tax expense
Laba sebelum pajak Entitas Anak	84.588	41.885	Income before income tax of Subsidiaries
Laba sebelum pajak Perusahaan	577.961	673.618	Income before income tax of the Company
Beda waktu:			Temporary differences:
Nilai wajar persediaan	80.057	(22.904)	Fair value of inventory
Cadangan penurunan nilai piutang	24.281	(4.768)	Allowance for impairment of receivables
Aset hak guna	14.476	14.247	Right-of-Use assets
Cadangan penurunan persediaan	5.543	7.816	Allowance for impairment of inventories
Aset tetap	(8.299)	3.059	Fixed assets
Liabilitas sewa	(8.211)	(16.817)	Lease liabilities
Bonus	(48.779)	(4.075)	Bonus
Imbalan kerja karyawan	(127.860)	(157.875)	Employee benefits
Nilai wajar aset biologis	(277.498)	(96.190)	Fair value of biological assets
Total beda waktu	(346.290)	(277.507)	Total temporary differences

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2023	2022
Beda tetap:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	68.679	47.299
Pendapatan yang dikenai pajak final	(44.367)	(40.675)
Total beda tetap	24.312	6.624
Taksiran penghasilan kena pajak		
- Perusahaan	255.983	402.735
Taksiran beban pajak penghasilan		
- Perusahaan	56.316	88.602
Taksiran beban pajak penghasilan		
- Entitas Anak	7.519	1.187
Taksiran beban pajak penghasilan	63.835	89.789
- Grup		
Pajak dibayar dimuka - Perusahaan		
Pajak Penghasilan :		
Pasal 22	620	431
Pasal 23	347	1
Pasal 25	79.194	71.905
Pajak dibayar dimuka - Entitas Anak		
Pajak Penghasilan :		
Pasal 23	882	23
Pasal 25	4.687	-
Klaim (utang) pajak penghasilan :		
Perusahaan	23.845	16.265
Entitas Anak	(1.950)	1.164

9. TAXATION (continued)

e. Current tax (continued)

The reconciliation between income before income tax expense in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income with the estimated taxable income for the years ended December 31, 2023 and 2022, are as follows: (continued)

Permanent differences:
Non-deductible expenses
Income subject to final tax

Total permanent differences

Estimated taxable income - the Company

Estimated taxable income - the Company

Estimated taxable income - the Subsidiaries

Estimated income tax expense
- the Group

Prepaid taxes - the Company
Income tax
Article 22
Article 23
Article 25

Prepaid taxes - Subsidiary
Income tax
Article 23
Article 25

Claim for income tax refund (payable) :
The Company
Subsidiary

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Rekonsiliasi tarif pajak efektif

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak penghasilan sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	662.549	715.503	Consolidated profit before income tax
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	145.761	157.411	Tax calculated at applicable tax rates
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(10.825)	(20.139)	Income subject to final tax
Beban (pendapatan) yang tidak dapat dikurangkan	8.459	(5.946)	Non deductible (income) expenses
Perubahan penurunan nilai aset pajak tangguhan	6.136	9.175	Changes in allowance
Rugi fiskal yang tidak diakui	1.620	16.169	Impairment of deferred tax assets
Penyesuaian pajak penghasilan periode lalu	13.250	17.091	Unrecognised tax losses
Penyesuaian atas pajak tangguhan	(3.778)	(8.529)	Adjustment of prior period income tax
Beban pajak penghasilan	160.623	165.232	Adjustment in respect deferred tax
			Income tax expenses

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 yang menetapkan, antara lain, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari semua 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai tanggal 1 Januari 2025. Selain itu, membatalkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula turun ke 20% menjadi tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

9. TAXATION (Continued)

f. Reconciliation of effective tax rate

The reconciliation between income tax expense which is calculated at the tax rates from income before income tax expense as presented in the consolidated statements of comprehensive income for the years ended December 31, 2023 and 2022 is as follows:

On October 7, 2021, the Government ratified the Bill on the Harmonization of Tax Regulations (RUU HPP) into Law Number 7 of 2021 which stipulates, among other things, an increase in the rate of Value Added Tax (VAT) from all 10% to 11% starting April 1, 2022 and 12% starting January 1, 2025. In addition, canceling the reduction in the income tax rate for domestic corporate taxpayers and permanent establishments from the original 20% down to a fixed 22% which will take effect in the 2022 fiscal year.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

9. TAXATION (Continued)

g. Pajak tangguhan

g. Deferred tax

	1 Januari/ January 2023	Penyesuaian atas pajak tangguhan/ Adjustment in respect of deferred tax	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ (Charged)/ credited to profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya/ Credited to other comprehensive income	31 Desember/ December 2023	
Perusahaan						The Company
Imbalan karyawan	358.285	-	(28.129)	49.678	379.834	Employee benefits
Penurunan nilai piutang	16.531	-	5.342	-	21.873	Impairment of receivables
Cadangan bonus	21.995	-	(10.731)	-	11.264	Accrued bonus
Liabilitas sewa	1.908	-	10.968	-	12.876	Lease liability
Penurunan nilai persediaan	1.720	-	1.219	-	2.939	Impairment of inventories
Nilai wajar persediaan	(16.075)	-	17.613	-	1.538	Fair value of inventories
Beban penyusutan	(4.394)	-	(1.826)	-	(6.220)	Depreciation expenses
Aset hak guna	(1.664)	-	(9.590)	-	(11.254)	Right of use assets
Aset biologis	(2.640.425)	-	(61.049)	-	(2.701.474)	Biological assets
Liabilitas pajak tangguhan Perusahaan	(2.262.119)	-	(76.183)	49.678	(2.288.624)	Deferred tax liabilities of the Company
Entitas anak						Subsidiaries
Aset pajak tangguhan entitas anak	17.405	3.778	(11.132)	646	10.697	Deferred tax assets of the subsidiaries
	1 Januari/ January 2022	Penyesuaian atas pajak tangguhan/ Adjustment in respect of deferred tax	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ (Charged)/ credited to profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya/ Credited to other comprehensive income	31 Desember/ December 2022	
Perusahaan						The Company
Imbalan pascakerja	376.160	-	(34.733)	16.858	358.285	Post-employment benefits
Cadangan bonus	22.891	-	(896)	-	21.995	Accrued bonus
Penurunan nilai piutang	17.580	-	(1.049)	-	16.531	Impairment of receivables
Liabilitas sewa	4.592	-	(2.684)	-	1.908	Lease liability
Penurunan nilai persediaan	-	-	1.720	-	1.720	Impairment of inventories
Aset hak guna	(3.783)	-	2.119	-	(1.664)	Right of use assets
Beban penyusutan	(5.067)	-	673	-	(4.394)	Depreciation expenses
Nilai wajar persediaan	(13.785)	-	(2.290)	-	(16.075)	Fair value of inventories
Aset biologis	(2.619.263)	-	(21.162)	-	(2.640.425)	Biological assets
Liabilitas pajak tangguhan Perusahaan	(2.220.675)	-	(58.302)	16.858	(2.262.119)	Deferred tax liabilities of the Company
Entitas anak						Subsidiaries
Aset pajak tangguhan entitas anak	14.523	8.529	(8.579)	2.932	17.405	Deferred tax assets of the subsidiaries

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI
10. INVESTMENT IN ASSOCIATES

Nama Perusahaan/ Company	Lokasi/ Location	Tahun Penyertaan/ Year of Investment	Bidang Usaha/ Nature of Business	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nilai Penyertaan Awal/ Initial Investment Value	Nilai Tercatat 2023/ Carrying Value 2023	Nilai Tercatat 2022/ Carrying Value 2022
31 Desember 2023/ December 31, 2023							
Metode Nilai Wajar/Fair Value method							
1) PT ITCI Hutani Manunggal	Kalimantan Timur	1998	Industri Kayu	10%	10.246	10.246	-
Metode Ekuitas/Equity method							
Masih Beroperasi/Still Operating							
2) PT Sinar Belantara Indah	Pekanbaru	1992	Pengelolaan Industri	39%	2.493	-	-
3) PT Hutan Barumun			Pengelolaan Hutan				
Perkasa	Medan	1993	Tanaman Industri	40%	1.744	-	-
4) PT Gunung Gajah Abadi	Samarinda	1997	Hutan Alam	23%	1.323	16.186	18.779
5) PT Ratah Timber	Jakarta Selatan	1998	Hutan Alam	20%	510	25.238	25.835
6) PT Segara Indochem	Samarinda	1998	Hutan Alam	20%	170	3.259	4.515
7) PT Hutansanggam Berau	Berau	2003	Hutan Alam	30%	450	1.209	1.561
8) PT Gema Hutani Lestari	Jakarta Pusat	2008	Hutan Alam	20%	5.000	8.033	7.779
9) PT IDEC Abadi Wood Industries	Tarakan	2008	Industri Plywood	33%	1.348	24.196	18.698
10) PT ITCI Kayan Hutani	Jakarta Selatan	2008	Hutan Alam	31%	4.340	13.086	11.109
11) PT Roda Mas Timber Kalimantan	Jakarta Pusat	2008	Hutan Alam	20%	400	2.811	7.774
12) PT Intracawood Manufacturing	Kalimantan Utara	1988	Industri Kayu	25%	5.538	-	-
13) PT Bhineka Wana	Kalimantan Timur	1992	Hutan Tanaman	40%	1.900	-	-
14) PT Hutan Mahligai	Kalimantan Timur	1992	Hutan Tanaman	20%	3.930	-	-
15) PT Perintis Adiwana	Bandjarmasin	1992	Hutan Tanaman	40%	2.278	-	-
16) PT Tusam Hutani Lestari	Aceh	1993	Tanaman Industri	40%	7.947	-	-
			Pengelolaan Hutan				
Tidak Beroperasi/Dormant							
17) PT Surya Hutani Jaya	Kalimantan Timur	1992	Hutan Tanaman	40%	36.552	-	-
18) PT Anangga Pundi Nusa	Kalimantan Timur	1992	Hutan Tanaman	40%	4.276	-	-
19) PT Berkat Hutan Pusaka	Sulawesi Tengah	1992	Hutan Tanaman	40%	2.962	-	-
20) PT Hutan Kusuma	Kalimantan Timur	1992	Hutan Tanaman	40%	1.988	-	-
21) PT Taman Daulat Wananusa	Kalimantan Timur	1992	Hutan Tanaman	25%	2.886	-	-
22) PT Dirga Rimba	Kalimantan Timur	1992	Hutan Tanaman	40%	1.485	-	-
23) PT Estetika Rimba	Kalimantan Timur	1992	Hutan Tanaman	40%	1.485	-	-
24) PT Intan Hutani Lestari	Sulawesi Barat	1996	Hutan Tanaman	40%	371	-	-
25) PT Janggala Semesta	Kalimantan Selatan	1992	Hutan Tanaman	40%	1.910	-	-
26) PT Hutan Sembada	Kalimantan Selatan	1992	Hutan Tanaman	40%	2.410	-	-
27) PT Kirana Rimba	Kalimantan Selatan	1992	Hutan Tanaman	40%	315	-	-
28) PT Jati Cakrawala	Maluku	1992	Hutan Tanaman	40%	1.260	-	-
29) PT Wana Tani Lestari	Sulawesi Tengah	1998	Hutan Tanaman	40%	2.730	-	-
30) PT Hutan Trans Kencana	Kalimantan Timur	1992	Hutan Tanaman	40%	342	-	-
31) PT Eritani Lestari	Maluku	1992	Hutan Tanaman	40%	1.025	-	-
32) PT Kusuma Puspawarna	Kalimantan Tengah	1992	Hutan Tanaman	40%	2.400	-	-
33) PT Puspa Warna							
Cemerlang	Kalimantan Tengah	1992	Hutan Tanaman	40%	1.277	-	-
34) PT Rimba Wawasan							
Permai	Aceh	1992	Hutan Tanaman	40%	1.107	-	-
35) PT Aceh Suaka							
Wana Nusa Prima	Aceh	1992	Hutan Tanaman	40%	597	-	-
36) PT Rimba Penyangga Utama	Aceh Timur	1992	Hutan Tanaman	40%	1.649	-	-
37) PT Rimba Timur Sentosa	Aceh Timur	1992	Hutan Tanaman	40%	1.423	-	-
38) PT Rimba Rokan Hulu	Riau	1992	Hutan Tanaman	40%	2.488	-	-
39) PT Rimba Swasembada							
Semesta	Padang	1992	Hutan Tanaman	40%	1.504	-	-
40) PT Tanjung Redep Hutani	Kalimantan Timur	1993	Hutan Tanaman	40%	35.432	-	-
41) PT Gunung Medang Raya	Aceh Timur	1994	Hutan Tanaman	40%	1.375	-	-
42) PT Hutani Bhara Induk	Riau	1995	Hutan Tanaman	49%	1.886	-	-
43) PT Hutani Bhara Union Lestari	Pekanbaru	1995	Hutan Tanaman	49%	612	-	-
44) PT Hutani Nasional Lestari	Pekanbaru	1995	Hutan Tanaman	39%	663	-	-
45) PT Mandau Abadi	Riau	1997	Hutan Tanaman	49%	294	-	-
46) PT Hutani Olindo Lestari	Aceh Timur	1998	Hutan Tanaman	16%	245	-	-
47) PT Hutani Seraya Lestari	Pekanbaru	1999	Hutan Tanaman	25%	604	-	-
48) PT Taman Hutan Asri	Sulawesi Tengah	2009	Hutan Tanaman	40%	1.425	-	-
Total investasi saham/ Total investment in shares					166.595	104.264	96.050

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Masih beroperasi

- 1) Pada tahun 1998, IHT I melakukan investasi saham pada PT ITCI Hutani Manunggal ("IHM") sebanyak 10.246 lembar saham dengan total sebesar Rp10.246. IHM berkedudukan di Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman pengelolaan hutan. Pada tahun 2023, IHT I mencatat pemulihan atas cadangan penurunan nilai investasi pada IHM sebesar Rp10.246, dan pendapatan dividen tahun 2023 adalah sebesar Rp6.740 (2022: Nihil) dimana seluruhnya dicatat pada pendapatan operasi lain (Catatan 25).
- 2) Pada tahun 1992, IHT V (eks IHT IV) melakukan investasi saham pada PT Sinar Belantara Indah ("SBI") sebanyak 2.493 lembar saham dengan total sebesar Rp2.493. SBI berkedudukan di Kota Pekanbaru, Riau dan bergerak dalam bidang usaha Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Selanjutnya, Pada tanggal 29 Juli 2022, investasi tersebut telah dijual ke PT Sumatera Riang Lestari, dengan nilai transaksi Rp15.600. Selisih antara nilai tercatat sebesar Rp0 dan nilai penjualan investasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain pada laporan keuangan konsolidasian tahun 2022.
- 3) Pada tahun 1993, IHT V (eks IHT IV) melakukan investasi saham pada PT Hutan Barumun Perkasa ("HBP") sebanyak 1.744 lembar saham dengan total sebesar Rp1.744. HBP berkedudukan di Kota Medan, Sumatera Utara dan bergerak dalam bidang usaha Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Selanjutnya, Pada tanggal 29 Juli 2022, investasi tersebut telah dijual ke PT Putra Lika Perkasa, dengan nilai transaksi Rp5.750. Selisih antara nilai tercatat sebesar Rp2.363 dan nilai penjualan investasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain pada laporan keuangan konsolidasian tahun 2022.
- 4) Pada tahun 1997, IHT I (eks IHT II) melakukan investasi saham pada PT Gunung Gajah Abadi ("GGA") sebanyak 1.323 lembar saham dengan total sebesar Rp1.323. GGA berkedudukan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha Pengusahaan dan pengelolaan hutan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT II kedalam IHT I, kepemilikan IHT II pada GGA telah beralih kepada IHT I. Pada tahun 2023, bagian laba entitas asosiasi adalah sebesar Rp857 (2022: Rp4.756), dan dividen tahun 2023 adalah sebesar Rp3.450 (2022: Rp4.832).

10. INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)

Still Operating

- 1) In 1998, IHT I has an investment in PT ITCI Hutani Manunggal ("IHM") amounting to 10,246 shares with total amounting to Rp10,246. IHM is domiciled in East Kalimantan and engaged in forest plantations management. In 2023, IHT I recognize recovery of allowance for its investment in IHM totaled of Rp10,246, and received the 2023 dividend income of Rp6,740 (2022: Nil), that recorded as part of other operating income (Note 25).
- 2) In 1992, IHT V (ex IHT IV) has an investment in PT Sinar Belantara Indah ("SBI") amounting to 2,493 shares with total amounting to Rp2,493. SBI is domiciled in Pekanbaru, Riau and engaged in Industrial Plantation Forest Business. Furthermore, on July 29, 2022, the investment was sold to PT Sumatera Riang Lestari, with a transaction value of Rp15,600. The difference between the carrying amount, amounting to Rpnil and the selling price of the investment is recorded as part of other income in the 2022 consolidated financial statements.
- 3) In 1993, IHT V (ex IHT IV) has an investment in PT Hutan Barumun Perkasa ("HBP") amounting to 1,744 shares with total amounting to Rp1,744. HBP is domiciled in Medan, North Sumatera and engaged in Industrial Plantation Forest Business. Furthermore, on July 29, 2022, the investment was sold to PT Putra Lika Perkasa, with a transaction value of Rp5,750. The difference between the carrying amount amounting to Rp2,363 and the selling price of the investment is recorded as part of other income in the 2022 consolidated financial statements.
- 4) In 1997, IHT I (ex IHT II) has an investment in PT Gunung Gajah Abadi ("GGA") amounting to 1,323 shares with total amounting to Rp1,323. GGA is domiciled in Samarinda City, East Kalimantan and engaged in Business and forest management. Furthermore, in connection with the merger of IHT II into IHT I, the ownership of IHT II at GGA has been transferred to IHT I. In 2023, the gain from associates' share is Rp857 (2022: Rp4,756), and the 2023 dividend is Rp3,450 (2022: Rp4,832).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

10. INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)

Masih beroperasi (lanjutan)

Still Operating (continued)

- 5) Pada tahun 1998, IHT I (eks IHT II) melakukan investasi saham pada PT Ratah Timber ("RT") sebanyak 6.000 lembar saham dengan total sebesar Rp510. RT berkedudukan di Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha Pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT II kedalam IHT I, kepemilikan Inhutani II pada RT telah beralih kepada IHT I. Pada tahun 2023, bagian laba entitas asosiasi adalah sebesar Rp112 (2022: Rp1.446), dan dividen tahun 2023 adalah sebesar Rp709 (2022: 3.435).
- 6) Pada tahun 1998, IHT I (eks IHT II) melakukan investasi saham pada PT Segara Indochem ("SI") sebanyak 678 lembar saham dengan total sebesar Rp170. SI berkedudukan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha penguasaan hutan, industri kayu, perdagangan kayu. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT II kedalam IHT I, kepemilikan IHT II pada SI telah beralih kepada IHT I. Pada tahun 2023, bagian laba entitas asosiasi adalah sebesar Rp689 (2022: Rp3.890), dan dividen tahun 2023 adalah sebesar Rp1.945 (2022: Rp2.118).
- 7) Pada tahun 2003, IHT I melakukan investasi saham pada PT Hutansanggam Labanan Lestari ("HLL") sebanyak 450 lembar saham dengan total sebesar Rp450. HLL berkedudukan di Berau dan bergerak dalam bidang usaha pertanian, perindustrian, dan perdagangan umum. Pada tahun 2023, bagian laba entitas asosiasi adalah sebesar Rp17 (2022: Rp737), dan dividen tahun 2023 adalah sebesar Rp369 (2022: Rp50).
- 8) Pada tahun 2008, IHT I dan melakukan investasi saham pada PT Gema Hutani Lestari ("GHL") sebanyak 5.000 lembar saham dengan total sebesar Rp5.000. GHL berkedudukan di Maluku dan bergerak dalam bidang usaha pengembangan dan peningkatan industri hasil hutan dan produktivitas lahan serta kualitas lingkungan hidup. Pada tahun 2023, bagian laba entitas asosiasi adalah sebesar Rp642 (2022: bagian rugi entitas asosiasi sebesar Rp1.137), dan dividen tahun 2023 adalah sebesar Rp388 (2022: Rp135).

- 5) In 1998, IHT I (ex IHT II) has an investment in PT Ratah Timber ("RT") amounting to 6,000 shares with total amounting to Rp510. RT is domiciled in East Kalimantan and engaged in Agriculture and plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT II into IHT I, the ownership of Inhutani II at RT has been transferred to IHT I. In 2023, the gain from associates' share is Rp112 (2022: Rp1,446), and the 2023 dividend is Rp709 (2022: Rp3,435).
- 6) In 1998, IHT I (ex IHT II) has an investment in PT Segara Indochem ("SI") amounting to 678 shares with total amounting to Rp170. SI is domiciled in Samarinda City, East Kalimantan and engaged in forest control, timber industry, timber trade. Furthermore, in connection with the merger of IHT II into IHT I, the ownership of IHT II at SI has been transferred to IHT I. In 2023, the gain from associates' share is Rp689 (2022: Rp3,890), and the 2023 dividend is Rp1,945 (2022: Rp2,118).
- 7) In 2003, IHT I has an investment in PT Hutansanggam Labanan Lestari ("HLL") amounting to 450 shares with total amounting to Rp450. HLL is domiciled in Berau and engaged in agriculture, industry, and trading. In 2023, the gain from associates' share is Rp17 (2022: Rp737), and the 2023 dividend is Rp369 (2022: Rp50).
- 8) In 2008, IHT I has an investment in PT Gema Hutani Lestari ("GHL") amounting to 5,000 shares with total amounting to Rp5,000. GHL is domiciled in Maluku and engaged in development and improvement of forest industry products and land productivity as well as environmental quality. In 2023, the gain from associates' share is Rp642 (2022: loss from associates' share is Rp1,137), and the 2023 dividend is Rp388 (2022: Rp135).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Masih beroperasi (lanjutan)

- 9) Pada tahun 2008, IHT I melakukan investasi saham pada PT IDEC Abadi Wood Industries ("IWI") sebanyak 2.145 lembar saham dengan total sebesar Rp1.348. IWI berkedudukan di Kalimantan Utara dan bergerak dalam bidang usaha perindustrian. Pada tahun 2023, bagian laba entitas asosiasi adalah sebesar Rp6.227 (2022: Rp8.690), dan dividen tahun 2023 adalah sebesar Rp729 (2022: Rp456).
- 10) Pada tahun 2008, IHT I melakukan investasi saham pada PT ITCI Kayan Hutani ("IKH") sebanyak 4.340 lembar saham dengan total sebesar Rp4.340. IKH berkedudukan di Kalimantan Utara dan bergerak dalam bidang usaha pengembangan dan peningkatan industri hasil hutan dan produktivitas lahan serta kualitas lingkungan hidup. Pada tahun 2023, bagian laba entitas asosiasi adalah sebesar Rp3.124 (2022: Rp3.002), dan dividen tahun 2023 adalah sebesar Rp1.147 (2022: 855).
- 11) Pada tahun 2008, IHT I (eks IHT II) melakukan investasi saham pada PT Roda Mas Timber ("RMT") sebanyak 400 lembar saham dengan total sebesar Rp400. RMT berkedudukan di Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha Pertanian, perkebunan dan kehutanan, termasuk hutan tanam industri. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT II kedalam IHT I, kepemilikan IHT II pada RMT telah beralih kepada IHT I. Pada tahun 2023, : bagian rugi entitas asosiasi adalah sebesar Rp4.965 (2022: Rp219), dan pada tahun 2023 IHT I tidak menerima dividen dari RMT (2022: Rp1.450).
- 12) Pada tahun 1988, IHT I melakukan investasi saham pada PT Intracawood Manufacturing ("IM") sebanyak 5.538.500 lembar saham dengan total sebesar Rp5.538. IM berkedudukan di Kalimantan Utara dan bergerak dalam bidang usaha industri kayu.
- 13) Pada tahun 1992, IHT I melakukan investasi saham pada PT Bhineka Wana ("BHW") sebanyak 1.900 lembar saham dengan total sebesar Rp1.900. BHW berkedudukan di Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman.

10. INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)

Still Operating (continued)

- 9) In 2008, IHT I has an investment in PT IDEC Abadi Wood Industries ("IWI") amounting to 2,145 shares with total amounting to Rp1,348. IWI is domiciled in North Kalimantan and engaged in industry. In 2023, the gain from associates' share is Rp6,227 (2022: Rp8,690), and the 2023 dividend is Rp729 (2022: Rp456).
- 10) In 2008, IHT I has an investment in PT ITCI Kayan Hutani ("IKH") amounting to 4,340 shares with total amounting to Rp4,340. IKH is domiciled in North Kalimantan and engaged in development and improvement of forest product industry and land productivity as well as environmental quality. In 2023, the gain from associates' share is Rp3,124 (2022: Rp3,002), and the 2023 dividend is Rp1,147 (2022: Rp855).
- 11) In 2008, IHT II has an investment in PT Roda Mas Timber ("RMT") amounting to 400 shares with total amounting to Rp400. RMT is domiciled in East Kalimantan and engaged in Agriculture, plantations and forestry, including industrial plantation forests. Furthermore, in connection with the merger of IHT II into IHT I, the ownership of IHT II at RMT has been transferred to IHT I. In 2023, the loss from associates' share is Rp4,965 (2022: Rp219), and in 2023 IHT I did not receive dividends from RMT (2022: Rp1,450).
- 12) In 1988, IHT I has an investment in PT Intracawood Manufacturing ("IM") amounting to 5,538,500 shares with total amounting to Rp5,538. IM is domiciled in North Kalimantan and engaged in wood industry.
- 13) In 1992, IHT I has an investment in PT Bhineka Wana ("BHW") amounting to 1,900 shares with total amounting to Rp1,900. BHW is domiciled in East Kalimantan and engaged in forest plantations.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Masih beroperasi (lanjutan)

- 14) Pada tahun 1992, IHT I melakukan investasi saham pada PT Hutan Mahligai ("HMH") sebanyak 3.930 lembar saham dengan total sebesar Rp3.930. HMH berkedudukan di Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman.
- 15) Pada tahun 1992, IHT I (eks IHT III) melakukan investasi saham pada PT Perintis Adiwana ("PA") sebanyak 2.278 lembar saham dengan total sebesar Rp2.278. PA berkedudukan di Banjarmasin dan bergerak dalam bidang usaha Hutan Tanaman Industri. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT III kedalam IHT I, kepemilikan Inhutani III pada PA telah beralih kepada IHT I.
- 16) Pada tahun 1993, IHT V (eks IHT IV) melakukan investasi saham pada PT Tusam Hutani Lestari ("THL") sebanyak 7.947 lembar saham dengan total sebesar Rp7.947. THL berkedudukan di Aceh dan bergerak dalam bidang usaha tanaman industri pengelolaan hutan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV kedalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada THL telah beralih kepada IHT V.

Tidak beroperasi

- 17) Pada tahun 1992, IHT I dan melakukan investasi saham pada PT Surya Hutani Jaya ("SHJ") sebanyak 36.552 lembar saham dengan total sebesar Rp36.552. SHJ berkedudukan di Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha Pengembangan Hutan Industri. Selanjutnya, Pada tanggal 20 Desember 2022, investasi tersebut telah dijual ke PT Borneo Manggala Utama, dengan nilai transaksi Rp52.000.
- 18) Pada tahun 1992, IHT I melakukan investasi saham pada PT Anangga Pundi Nusa ("APN") sebanyak 4.276 lembar saham dengan total sebesar Rp4.276. APN berkedudukan di Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman.
- 19) Pada tahun 1992, IHT I melakukan investasi saham pada PT Berkat Hutan Pusaka ("BHP") sebanyak 2.962 lembar saham dengan total sebesar Rp2.962. BHP berkedudukan di Sulawesi Tengah dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman.

10. INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)

Still Operating(continued)

- 14) In 1992, IHT I has an investment in PT Hutan Mahligai ("HMH") amounting to 3,930 shares with total amounting to Rp3,930. HMH is domiciled in East Kalimantan and engaged in forest plantations.
- 15) In 1992, IHT I (ex IHT III) has an investment in PT Perintis Adiwana ("PA") amounting to 2,278 shares with total amounting to Rp2,278. PA is domiciled in Banjarmasin and engaged in industrial forest. Furthermore, in connection with the merger of IHT III into IHT I, the ownership of Inhutani III at PA has been transferred to IHT I.
- 16) In 1993, IHT V (ex IHT IV) has an investment in PT Tusam Hutani Lestari ("THL") amounting to 7,947 shares with total amounting to Rp7,947. THL is domiciled in Aceh and engaged in management of industrial forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at THL has been transferred to IHT V.

Dormant

- 17) In 1992, IHT I has an investment in shares in PT Surya Hutani Jaya ("SHJ") totaling 36,552,000 shares, amounting to Rp36,552. SHJ domiciled at East Kalimantan and is engaged in the business of Industrial Forest Development. Furthermore, on December 20, 2022, the investment was sold to PT Borneo Manggala Utama, with a transaction value of Rp52,000.
- 18) In 1992, IHT I has an investment in PT Anangga Pundi Nusa ("APN") amounting to 4,276 shares with total amounting to Rp4,276. APN is domiciled in East Kalimantan and engaged in forest plantations.
- 19) In 1992, IHT I has an investment in PT Berkat Hutan Pusaka ("BHP") amounting to 2,962 shares with total amounting to Rp2,962. BHP is domiciled in Central Sulawesi and engaged in forest plantations.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Tidak beroperasi (lanjutan)

- 20) Pada tahun 1992, IHT I melakukan investasi saham pada PT Hutan Kusuma ("HKS") sebanyak 1.988 lembar saham dengan total sebesar Rp1.988. HKS berkedudukan di Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman.
- 21) Pada tahun 1992, IHT I melakukan investasi saham pada PT Taman Daulat Wananusa ("TDW") sebanyak 2.886 lembar saham dengan total sebesar Rp2.886. TDW berkedudukan di Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman.
- 22) Pada tahun 1992, IHT I melakukan investasi saham pada PT Dirga Rimba ("DRI") sebanyak 1.485 lembar saham dengan total sebesar Rp1.485. DRI berkedudukan di Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman.
- 23) Pada tahun 1992, IHT I melakukan investasi saham pada PT Estetika Rimba ("ERI") sebanyak 1.485 lembar saham dengan total sebesar Rp1.485. ERI berkedudukan di Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman.
- 24) Pada tahun 1996, IHT I melakukan investasi saham pada PT Intan Hutani Lestari ("IHL") sebanyak 371 lembar saham dengan total sebesar Rp371. IHL berkedudukan di Sulawesi Barat dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman.
- 25) Pada tahun 1992, IHT I (eks IHT II) melakukan investasi saham pada PT Janggala Semesta ("JSM") sebanyak 1.910 lembar saham dengan total sebesar Rp1.910. JSM berkedudukan di Kalimantan Selatan dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT II kedalam IHT I, kepemilikan IHT II pada JSM telah beralih kepada IHT I. Pada tanggal 29 September 2023, Perusahaan telah melakukan divestasi atas seluruh kepemilikan saham di PT Janggala Semesta dengan nilai penjualan sebesar Rp2.648. Pendapatan atas divestasi tersebut dicatat sebagai bagian dari pendapatan operasi lain (Catatan 25).

10. INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)

Dormant (continued)

- 20) In 1992, IHT I has an investment in PT Hutan Kusuma ("HKS") amounting to 1,988 shares with total amounting to Rp1,988. HKS is domiciled in East Kalimantan and engaged in forest plantations.
- 21) In 1992, IHT I has an investment in PT Taman Daulat Wananusa ("TDW") amounting to 2,886 shares with total amounting to Rp2,886. TDW is domiciled in East Kalimantan and engaged in forest plantations.
- 22) In 1992, IHT I has an investment in PT Dirga Rimba ("DRI") amounting to 1,485 shares with total amounting to Rp1,485. DRI is domiciled in East Kalimantan and engaged in forest plantations.
- 23) In 1992, IHT I has an investment in PT Estetika Rimba ("ERI") amounting to 1,485 shares with total amounting to Rp1,485. ERI is domiciled in East Kalimantan and engaged in forest plantations.
- 24) In 1996, IHT I has an investment in PT Intan Hutani Lestari ("IHL") amounting to 371 shares with total amounting to Rp371. IHL is domiciled in West Sulawesi and engaged in forest plantations.
- 25) In 1992, IHT I (ex IHT II) has an investment in PT Janggala Semesta ("JSM") amounting to 1,910 shares with total amounting to Rp1,910. JSM is domiciled in South Kalimantan and engaged in forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT II into IHT I, the ownership of IHT II at JSM has been transferred to IHT I. On September 29 2023, the Company divested all share ownership in PT Janggala Semesta with a sales value of IDR 2,648. Income from divestment is recorded as part of other operating income (Note 25).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)
Tidak beroperasi (lanjutan)

- 26) Pada tahun 1992, IHT I (eks IHT II) melakukan investasi saham pada PT Hutan Sembada ("HSM") sebanyak 2.410 lembar saham dengan total sebesar Rp2.410. HSM berkedudukan di Kalimantan Selatan dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT II kedalam IHT I, kepemilikan IHT II pada HSM telah beralih kepada IHT I. Pada tanggal 29 Desember 2023, Perusahaan telah melakukan divestasi atas seluruh kepemilikan saham di PT Hutan Sembada dengan nilai penjualan sebesar Rp2.932. Pendapatan atas divestasi tersebut dicatat sebagai bagian dari pendapatan operasi lain (Catatan 25).
- 27) Pada tahun 1992, IHT I (eks IHT II) melakukan investasi saham pada PT Kirana Rimba ("KRI") sebanyak 314 lembar saham dengan total sebesar Rp315. KRI berkedudukan di Kalimantan Selatan dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT II kedalam IHT I, kepemilikan IHT II pada KRI telah beralih kepada IHT I.
- 28) Pada tahun 1992, IHT I (eks IHT II) melakukan investasi saham pada PT Jati Cakrawala ("JCK") sebanyak 1.260 lembar saham dengan total sebesar Rp1.260. JCK berkedudukan di Maluku dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT II kedalam IHT I, kepemilikan IHT II pada JCK telah beralih kepada IHT I.
- 29) Pada tahun 1998, IHT I (eks IHT II) melakukan investasi saham pada PT Wana Tani Lestari ("WTL") sebanyak 2.730 lembar saham dengan total sebesar Rp2.730. WTL berkedudukan di Sulawesi Tengah dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT II kedalam IHT I, kepemilikan IHT II pada WTL telah beralih kepada IHT I.

10. INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)
Dormant (continued)

- 26) In 1992, IHT I (ex IHT II) has an investment in PT Hutan Sembada ("HSM") amounting to 2,410 shares with total amounting to Rp2,410. HSM is domiciled in South Kalimantan and engaged in forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT II into IHT I, the ownership of IHT II at HSM has been transferred to IHT I. On December 29 2023, the Company divested all share ownership in PT Hutan Sembada with a sales value of IDR 2,932. Income from the divestment was recorded as part of other operating income (Note 25).
- 27) In 1992, IHT I (ex IHT II) has an investment in PT Kirana Rimba ("KRI") amounting to 314 shares with total amounting to Rp315. KRI is domiciled in South Kalimantan and engaged in forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT II into IHT I, the ownership of IHT II at KRI has been transferred to IHT I.
- 28) In 1992, IHT I (ex IHT II) has an investment in PT Jati Cakrawala ("JCK") amounting to 1,260 shares with total amounting to Rp1,260. JCK is domiciled in Maluku and engaged in forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT II into IHT I, the ownership of IHT II at JCK has been transferred to IHT I.
- 29) In 1998, IHT I (ex IHT II) has an investment in PT Wana Tani Lestari ("WTL") amounting to 2,730 shares with total amounting to Rp2,730. WTL is domiciled in Central Sulawesi and engaged in forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT II into IHT I, the ownership of IHT II at WTL has been transferred to IHT I.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Tidak beroperasi (lanjutan)

- 30) Pada tahun 1992, IHT I (eks IHT II) melakukan investasi saham pada PT Hutan Trans Kencana ("HTK") sebanyak 342 lembar saham dengan total sebesar Rp342. HTK berkedudukan di Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT II kedalam IHT I, kepemilikan IHT II pada HTK telah beralih kepada IHT I.
- 31) Pada tahun 1992, IHT I (eks IHT II) melakukan investasi saham pada PT Eritani Lestari ("ELE") sebanyak 1.025 lembar saham dengan total sebesar Rp1.025. ELE berkedudukan di Maluku dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT II kedalam IHT I, kepemilikan IHT II pada ELE telah beralih kepada IHT I.
- 32) Pada tahun 1992, IHT I (eks IHT III) melakukan investasi saham pada PT Kusuma Puspawarna ("KPS") sebanyak 2.400 lembar saham dengan total sebesar Rp2.400. KPS berkedudukan di Kalimantan Tengah dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT III kedalam IHT I, kepemilikan IHT III pada KPS telah beralih kepada IHT I.
- 33) Pada tahun 1992, IHT I (eks IHT III) melakukan investasi saham pada PT Puspa Warna Cemerlang ("PWC") sebanyak 1.277 lembar saham dengan total sebesar Rp1.277. PWC berkedudukan di Kalimantan Tengah dan bergerak dalam bidang usaha hutan tanaman. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT III kedalam IHT I, kepemilikan IHT III pada PWC telah beralih kepada IHT I.

10. INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)

Dormant (continued)

- 30) *In 1992, IHT I (ex IHT II) has an investment in PT Hutan Trans Kencana ("HTK") amounting to 342 shares with total amounting to Rp342. HTK is domiciled in East Kalimantan and engaged in forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT II into IHT I, the ownership of IHT II at HTK has been transferred to IHT I.*
- 31) *In 1992, IHT I (ex IHT II) has an investment in PT Eritani Lestari ("ELE") amounting to 1,025 shares with total amounting to Rp1,025. ELE is domiciled in Maluku and engaged in forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT II into IHT I, the ownership of IHT II at ELE has been transferred to IHT I.*
- 32) *In 1992, IHT I (ex IHT III) has an investment in PT Kusuma Puspawarna ("KPS") amounting to 2,400 shares with total amounting to Rp2,400. KPS is domiciled in Central Kalimantan and engaged in forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT III into IHT I, the ownership of IHT III at KPS has been transferred to IHT I.*
- 33) *In 1992, IHT I (ex IHT III) has an investment in PT Puspa Warna Cemerlang ("PWC") amounting to 1,277 shares with total amounting to Rp1,277. PWC is domiciled in Central Kalimantan and engaged in forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT III into IHT I, the ownership of IHT III at PWC has been transferred to IHT I.*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Tidak beroperasi (lanjutan)

- 34) Pada tahun 1992, IHT V (eks IHT IV) melakukan investasi saham pada PT Rimba Wawasan Permai ("RWP") sebanyak 1.107 lembar saham dengan total sebesar Rp1.107. RWP berkedudukan di Aceh dan bergerak dalam bidang usaha tanaman industri pengelolaan hutan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV kedalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada RWP telah beralih kepada IHT V.
- 35) Pada tahun 1992, IHT V (eks IHT IV) melakukan investasi saham pada PT Aceh Suaka Wana Nusa Prima ("ASW") sebanyak 597 lembar saham dengan total sebesar Rp597. ASW berkedudukan di Aceh dan bergerak dalam bidang usaha tanaman industri pengelolaan hutan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV kedalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada ASW telah beralih kepada IHT V.
- 36) Pada tahun 1992, IHT V (eks IHT IV) melakukan investasi saham pada PT Rimba Penyangga Utama ("RPU") sebanyak 1.649 lembar saham dengan total sebesar Rp1.649. RPU berkedudukan di Aceh dan bergerak dalam bidang usaha tanaman industri pengelolaan hutan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV kedalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada RPU telah beralih kepada IHT V.
- 37) Pada tahun 1992, IHT V (eks IHT IV) melakukan investasi saham pada PT Rimba Timur Sentosa ("RTS") sebanyak 1.423 lembar saham dengan total sebesar Rp1.423. RTS berkedudukan di Aceh dan bergerak dalam bidang usaha tanaman industri pengelolaan hutan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV kedalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada RTS telah beralih kepada IHT V.

10. INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)

Dormant (continued)

- 34) In 1992, IHT V (ex IHT IV) has an investment in PT Rimba Wawasan Permai ("RWP") amounting to 1,107 shares with total amounting to Rp1,107. RWP is domiciled in Aceh and engaged in management of industrial forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at RWP has been transferred to IHT V.
- 35) In 1992, IHT V (ex IHT IV) has an investment in PT Aceh Suaka Wana Nusa Prima ("ASW") amounting to 597 shares with total amounting to Rp597. ASW is domiciled in Aceh and engaged in management of industrial forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at ASW has been transferred to IHT V.
- 36) In 1992, IHT V (ex IHT IV) has an investment in PT Rimba Penyangga Utama ("RPU") amounting to 1,649 shares with total amounting to Rp1,649. RPU is domiciled in Aceh and engaged in management of industrial forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at RPU has been transferred to IHT V.
- 37) In 1992, IHT V (ex IHT IV) has an investment in PT Rimba Timur Sentosa ("RTS") amounting to 1,423 shares with total amounting to Rp1,423. RTS is domiciled in Aceh and engaged in management of industrial forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at RTS has been transferred to IHT V.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Tidak beroperasi (lanjutan)

- 38) Pada tahun 1992, IHT V (eks IHT IV) melakukan investasi saham pada PT Rimba Rokan Hulu ("RRH") sebanyak 2.487 lembar saham dengan total sebesar Rp2.488. RRH berkedudukan di Riau dan bergerak dalam bidang usaha tanaman industri pengelolaan hutan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV kedalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada RRH telah beralih kepada IHT V.
- 39) Pada tahun 1992, IHT V (eks IHT IV) melakukan investasi saham pada PT Rimba Swasembada Semesta ("RSS") sebanyak 1.504 lembar saham dengan total sebesar Rp1.504. RSS berkedudukan di Sumatera Barat dan bergerak dalam bidang usaha tanaman industri. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV kedalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada RSS telah beralih kepada IHT V.
- 40) Pada tahun 1993, IHT I dan melakukan investasi saham pada PT Tanjung Redeb Hutani ("TRH") sebanyak 35.432 lembar saham dengan total sebesar Rp35.432. TRH berkedudukan di Jl. H.A.R.M Ayoeb RT. XIII, Gunung Tabur, Kab. Berau Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri. Pada tanggal 9 Agustus 2022, investasi tersebut telah dijual ke PT Tanjung Redeb Hutan Tanaman Industri, dengan nilai transaksi Rp 38.000.
- 41) Pada tahun 1994, IHT V (eks IHT IV) melakukan investasi saham pada PT Gunung Medang Raya ("GMR") sebanyak 1.375 lembar saham dengan total sebesar Rp1.375. GMR berkedudukan di Aceh dan bergerak dalam bidang usaha tanaman industri pengusahaan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV kedalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada GMR telah beralih kepada IHT V.

10. INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)

Dormant (continued)

- 38) In 1992, IHT V (ex IHT IV) has an investment in PT Rimba Rokan Hulu ("RRH") amounting to 2,487 shares with total amounting to Rp2,488. RRH is domiciled in Riau and engaged in management of industrial forest plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at RRH has been transferred to IHT V.
- 39) In 1992, IHT V (ex IHT IV) has an investment in PT Rimba Swasembada Semesta ("RSS") amounting to 1,504 shares with total amounting to Rp1,504. RSS is domiciled in West Sumatera and engaged in industrial plantations. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at RSS has been transferred to IHT V.
- 40) In 1993, IHT I has an investment in PT Tanjung Redeb Hutani ("TRH") totaling 35.432 shares, amounting to Rp35,432. TRH is domiciled on Jl. H.A.R.M Ayoeb RT. XIII, Mount Tabur, Kab. Berau, East Kalimantan and is engaged in the business of Utilization of Timber Forest Products - Industrial Plantation Forests. On August 9, 2022, the investment was sold to PT Tanjung Redeb Industrial Plantation Forest, with a transaction value of Rp38,000.
- 41) In 1994, IHT V (ex IHT IV) has an investment in PT Gunung Medang Raya ("GMR") amounting to 1,375 shares with total amounting to Rp1,375. GMR is domiciled in Aceh and engaged in industrial forest exploitations. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at GMR has been transferred to IHT V.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Tidak beroperasi (lanjutan)

- 42) Pada tahun 1995, IHT V (eks IHT IV) melakukan investasi saham pada PT Hutani Bhara Induk ("HBI") sebanyak 1.886 lembar saham dengan total sebesar Rp1.886. HBI berkedudukan di Sumatera Utara dan bergerak dalam bidang usaha eksploitasi hutan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV kedalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada HBI telah beralih kepada IHT V.
- 43) Pada tahun 1995, IHT V (eks IHT IV) melakukan investasi saham pada PT Hutani Bhara Union Lestari ("HBU") sebanyak 612 lembar saham dengan total sebesar Rp612. HBU berkedudukan di Sumatera Barat dan bergerak dalam bidang usaha eksploitasi hutan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV kedalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada HBU telah beralih kepada IHT V.
- 44) Pada tahun 1995, IHT V (eks IHT IV) melakukan investasi saham pada PT Hutani Nasional Lestari ("HNL") sebanyak 663 lembar saham dengan total sebesar Rp663. HNL berkedudukan di Riau dan bergerak dalam bidang usaha eksploitasi hutan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV kedalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada HNL telah beralih kepada IHT V.
- 45) Pada tahun 1997, IHT V (eks IHT IV) melakukan investasi saham pada PT Mandau Abadi ("MAB") sebanyak 294 lembar saham dengan total sebesar Rp294. MAB berkedudukan di Riau dan bergerak dalam bidang usaha eksploitasi hutan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV kedalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada MAB telah beralih kepada IHT V.
- 46) Pada tahun 1998, IHT V (eks IHT IV) melakukan investasi saham pada PT Hutani Olindo Lestari ("HOL") sebanyak 245 lembar saham dengan total sebesar Rp245. HOL berkedudukan di Aceh dan bergerak dalam bidang usaha eksploitasi hutan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV kedalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada HOL telah beralih kepada IHT V.

10. INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)

Dormant (continued)

- 42) In 1995, IHT V (ex IHT IV) has an investment in PT Hutani Bhara Induk ("HBI") amounting to 1,886 shares with total amounting to Rp1,886. HBI is domiciled in North Sumatera and engaged in forest exploitations. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at HBI has been transferred to IHT V.
- 43) In 1995, IHT V (ex IHT IV) has an investment in PT Hutani Bhara Union Lestari ("HBU") amounting to 612 shares with total amounting to Rp612. HBU is domiciled in West Sumatera and engaged in forest exploitations. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at HBU has been transferred to IHT V.
- 44) In 1995, IHT V (ex IHT IV) has an investment in PT Hutani Nasional Lestari ("HNL") amounting to 663 shares with total amounting to Rp663. HNL is domiciled in Riau and engaged in forest exploitations. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at HNL has been transferred to IHT V.
- 45) In 1997, IHT V (ex IHT IV) has an investment in PT Mandau Abadi ("MAB") amounting to 294 shares with total amounting to Rp294. MAB is domiciled in Riau and engaged in forest exploitations. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at MAB has been transferred to IHT V.
- 46) In 1998, IHT V (ex IHT IV) has an investment in PT Hutani Olindo Lestari ("HOL") amounting to 245 shares with total amounting to Rp245. HOL is domiciled in Aceh and engaged in forest exploitations. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at HOL has been transferred to IHT V.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Tidak beroperasi (lanjutan)

- 47) Pada tahun 1995, IHT V (eks IHT IV) melakukan investasi saham pada PT Hutani Seraya Lestari ("HSL") sebanyak 604 lembar saham dengan total sebesar Rp604. HSL berkedudukan di Riau dan bergerak dalam bidang usaha kehutanan. Selanjutnya, sehubungan dengan penggabungan IHT IV kedalam IHT V, kepemilikan IHT IV pada HSL telah beralih kepada IHT V.
- 48) Pada tahun 2009, IHT I melakukan investasi pada PT Taman Hutan Asri ("THA") sebanyak 1.425 lembar saham dengan total sebesar Rp1.425. THA berkedudukan di Sulawesi Tengah dan bergerak di bidang usaha kehutanan. Pada tanggal 29 Desember 2023, Perusahaan telah melakukan divestasi atas seluruh kepemilikan saham di PT Taman Hutan Asri dengan nilai penjualan sebesar Rp4.000. Pendapatan atas divestasi tersebut dicatat sebagai bagian dari pendapatan operasi lain (Catatan 25).

10. INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)

Dormant (continued)

- 47) In 1995, IHT V (ex IHT IV) has an investment in PT Hutani Seraya Lestari ("HSL") amounting to 604 shares with total amounting to Rp604. HSL is domiciled in Riau and engaged in forestry. Furthermore, in connection with the merger of IHT IV into IHT V, the ownership of IHT IV at HSL has been transferred to IHT V.
- 48) In 2009, IHT I has an investment in PT Taman Hutan Asri ("THA") amounting to 1,425 shares with total amounting to Rp1,425. THA is domiciled in Central Sulawesi and engaged in forestry. On December 29, 2023, the Company divested all share ownership in PT Taman Hutan Asri with a sales value of IDR 4,000. Income from the divestment was recorded as part of other operating income (Note 25).

11. ASET BIOLOGIS

Aset biologis terdiri dari produk agrikultur (getah pinus, daun kayu putih dan tebu) dan kayu tegakan (tanaman jati dan pohon rimba lainnya).

11. BIOLOGICAL ASSETS

Biological assets comprise of agricultural product (pine sap, melaleuca cajuputi and sugar cane) and standing timber (teak wood and other forestry trees).

31 Desember 2023/December 31, 2023

	Produk agrikultur/ Agricultural product	Kayu tegakan/ Standing timber	Total/Total	
Saldo awal	18.372	13.541.762	13.560.134	Beginning balance
Perubahan nilai wajar	257.226	502.025	759.251	Changes in fair value
Pemindahan hasil panen				Transfer of harvested
ke persediaan	(249.612)	(277.905)	(527.517)	to inventories
Penanaman	-	135.252	135.252	Planting
Saldo akhir	25.986	13.901.134	13.927.120	Ending balance

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. ASET BIOLOGIS (lanjutan)

Aset biologis terdiri dari produk agrikultur (getah pinus, daun kayu putih dan tebu) dan kayu tegakan (tanaman jati dan pohon rimba lainnya). (lanjutan)

11. BIOLOGICAL ASSETS (continued)

Biological assets comprise of agricultural product (pine sap, melaleuca cajuputi and sugar cane) and standing timber (teak wood and other forestry trees). (continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023

	Produk agrikultur/ Agricultural product	Kayu tegakan/ Standing timber	Total/Total
Aset lancar:			
Kayu tegakan - siap panen	-	819.298	819.298
Daun kayu putih	11.633	-	11.633
Getah pinus	8.022	-	8.022
Tebu	6.331	-	6.331
Total aset lancar	25.986	819.298	845.284
Aset tidak lancar:			
Kayu tegakan	-	13.081.836	13.081.836
Total	25.986	13.901.134	13.927.120

Current assets:
Standing timber - ready to harvest
Melaleuca cajuputi
Pine sap
Sugarcane

Total current assets

Non-current assets:
Standing timber

Total

31 Desember 2022/December 31, 2022

	Produk agrikultur/ Agricultural product	Kayu tegakan/ Standing timber	Total/Total
Saldo awal	17.763	13.262.780	13.280.543
Perubahan nilai wajar	170.312	455.408	625.720
Pemindahan hasil panen ke persediaan	(169.703)	(393.889)	(563.592)
Penanaman	-	217.463	217.463
Saldo akhir	18.372	13.541.762	13.560.134

Beginning balance
Changes in fair value
Transfer of harvested
to inventories
Planting

Ending balance

31 Desember 2022/December 31, 2022

	Produk agrikultur/ Agricultural product	Kayu tegakan/ Standing timber	Total/Total
Aset lancar:			
Kayu tegakan - siap panen	-	1.054.016	1.054.016
Daun kayu putih	11.622	-	11.622
Getah pinus	6.750	-	6.750
Total aset lancar	18.372	1.054.016	1.072.388
Aset tidak lancar:			
Kayu tegakan	-	12.487.746	12.487.746
Total	18.372	13.541.762	13.560.134

Current assets:
Standing timber - ready to harvest
Melaleuca cajuputi
Pine sap

Total current assets

Non-current assets:
Standing timber

Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. ASET BIOLOGIS (lanjutan)

Per 31 Desember 2023, terdapat luas hutan produktif untuk kayu tegakan sebesar 907.898,6 Ha (2022: 923.675,6 Ha) (tidak diaudit).

Nilai Wajar Aset Biologis

Produk Agrikultur Getah Pinus dan Daun Kayu Putih

Nilai wajar atas produk agrikultur getah pinus dan daun kayu putih ditentukan pada *Level 2* berdasarkan harga pasar terkait yang diterapkan terhadap estimasi volume produk.

Kayu Tegakan

Nilai wajar atas kayu tegakan ditentukan pada *Level 3*, dengan menggunakan pendekatan pendapatan (*income approach*) berdasarkan teknik nilai kini (*present value*) dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan neto atas aset tanaman/produk.

Arus kas masa depan neto yang diharapkan atas kayu tegakan ditentukan menggunakan input utama sebagai berikut:

- Kayu tegakan siap untuk dipanen satu kali saja sekitar 25-60 tahun setelah penanaman awal.
- Tingkat diskonto yang digunakan merupakan tingkat spesifik aset untuk operasi kayu tegakan Grup yang diterapkan dalam perhitungan arus kas masa depan yang didiskontokan.
- Harga jual kayu bulat selama periode proyeksi ditentukan berdasarkan harga jual rata-rata produk agrikultur yang diekstrapolasikan berdasarkan pertumbuhan harga pasar kayu bulat.

Tebu

Nilai wajar atas produk agrikultur tebu ditentukan menggunakan pendekatan pendapatan (*income approach*) berdasarkan teknik nilai kini (*present value*) dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan neto atas aset tanaman/produk.

Perhitungan nilai wajar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 ditentukan berdasarkan laporan penilaian dari KJPP independen, KJPP Yufrizal, Deny Kamal & Rekan, yang dituangkan dalam laporannya tanggal 20 Maret 2024 (2022: 15 Maret 2023).

11. BIOLOGICAL ASSETS (continued)

As of December 31 2023, there were 907,898.6 Ha of productive forest for standing timber (2022: 923,675.6 Ha) (unaudited).

Fair Values of Biological Assets

Pine Sap and Melaleuca Cajuputi Agricultural Produce

The fair values of the pine sap and melaleuca cajuputi agricultural product are determined at Level 2 based on the applicable market price applied to the estimated volume of the product.

Standing Timber

The fair values of standing timber are determined at Level 3, using income approach based on the present value technique by discounting net future estimated cash flows of the underlying plantations/product.

The net expected future cash flows of standing timber are determined using the key inputs as follows:

- Timber plantations are available for one-time harvest about 25-60 years after initial planting.
- Discount rate used represents the asset specific rate for the Group's standing timber operations applied in the discounted future cash flows calculation.
- Selling price of logs over the projection period is determined based on the average selling price of the agricultural product which is extrapolated in accordance with the market price growth of logs.

Sugar Cane

The fair values of the agricultural produce of sugar cane are determined using income approach based on the present value technique by discounting net future estimated cash flows of the underlying plantations/produce.

The fair value calculation for the year ended December 31, 2023 was determined based on the valuation report from the independent KJPP, KJPP Yufrizal, Deny Kamal & Partners, as expressed in their report dated March 20, 2024 (2022: March 15, 2023).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. ASET BIOLOGIS (lanjutan)

Input Utama untuk Penilaian Aset Biologis

Kisaran input kuantitatif yang tidak dapat diamati (Level 2 dan 3) yang digunakan dalam menentukan nilai wajar dari produk agrikultur dan kayu tegakan adalah sebagai berikut:

11. BIOLOGICAL ASSETS (continued)

Key Inputs to Valuation on Biological Assets

Range of quantitative unobservable inputs (Level 2 and 3) used in determining the fair values of agricultural product and standing timber are as follows:

Deskripsi/ Description	Input yang tidak dapat diobservasi/ Unobservable inputs	Rentang input (probabilitas rata-rata tertimbang)/ Range of inputs (probability weighted average)		Hubungan input yang tidak dapat diobservasi dengan nilai wajar/Relationship of unobservable inputs to fair value
		31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Kayu tegakan/ Consumable plants	Estimasi volume tanaman tebang/Expected volume of consumable plants	24.489.121m ³	24.821.648m ³	Semakin tinggi volume, semakin tinggi nilai wajarnya/The higher the volume, the higher the fair value
	Harga nilai wajar (dalam ribuan Rupiah)/Fair value price (in thousand Rupiah)			Semakin tinggi harga, semakin tinggi nilai wajarnya/The higher the price, the higher the fair value
	- A I	284-1.757	182-1.537	
	- A II	354-4.869	239-4.151	
	- A III	497-12.887	392-12.739	
	Nilai diskonto rata-rata/ Average discount rate	11,68%-11,86%	12,43%-13,04%	Semakin tinggi nilai diskonto, semakin rendah nilai wajarnya/The higher the discount rate, the lower the fair value
Getah pinus/Pine sap	Estimasi volume hasil getah pinus/Expected volume of pine sap	858 ton	714 ton	Semakin tinggi volume, semakin tinggi nilai wajarnya/The higher the volume, the higher the fair value
	Harga nilai wajar dalam ribuan Rupiah/Fair value price in thousand Rupiah	9.450/ton	9.450/ton	Semakin tinggi harga, semakin tinggi nilai wajarnya/The higher the price, the higher the fair value
Daun kayu putih/ Melaleuca cajuputi	Estimasi volume daun kayu putih/Expected volume of Melaleuca cajuputi	16.431 ton	16.532 ton	Semakin tinggi volume, semakin tinggi nilai wajarnya/The higher the volume, the higher the fair value
	Harga nilai wajar (dalam ribuan Rupiah)/Fair value price (in thousand Rupiah)	703/ton	703/ton	Semakin tinggi harga, semakin tinggi nilai wajarnya/The higher the price, the higher the fair value
Tebu/ Sugar Cane	Estimasi volume tebu/Expected volume of sugar cane	4.550 ton	-	Semakin tinggi volume, semakin tinggi nilai wajarnya/The higher the volume, the higher the fair value
	Harga nilai wajar (dalam ribuan Rupiah)/Fair value price (in thousand Rupiah)	1.392/ton	-	Semakin tinggi harga, semakin tinggi nilai wajarnya/The higher the price, the higher the fair value

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. ASET BIOLOGIS (lanjutan)

Input utama *Level 3* yang digunakan oleh Grup didapatkan dan dievaluasi sebagai berikut:

- Volume tanaman tebangan ditentukan berdasarkan umur, hasil panen historis, faktor koreksi dan variasi yang disebabkan oleh iklim dan angka kerusakan hutan.
- Harga tanaman tebangan ditentukan berdasarkan harga rata-rata aktual penjualan Perusahaan dikurangi biaya pemanenan dan biaya untuk menjual.
- Nilai diskonto ditentukan menggunakan *capital asset pricing model* untuk menghitung nilai diskonto yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai waktu uang dan risiko spesifik untuk aset tersebut.

Analisis sensitivitas naratif dari input yang tidak dapat diamati (*Level 3*) yang digunakan dalam menentukan nilai wajar aset biologis adalah sebagai berikut:

Input	Sensitivitas Nilai Wajar terhadap Input
Tingkat diskonto	Kenaikan/(penurunan) tingkat diskonto akan menyebabkan (penurunan)/peningkatan nilai wajar aset biologis
Harga jual produk agrikultur olahan	Kenaikan/(penurunan) harga komoditas akan menyebabkan peningkatan/(penurunan) nilai wajar aset biologis
Tingkat produksi	Kenaikan/(penurunan) tingkat produksi akan menghasilkan peningkatan/(penurunan) nilai wajar aset biologis
Tingkat inflasi	Kenaikan/(penurunan) tingkat inflasi akan menghasilkan (penurunan)/ peningkatan nilai wajar aset biologis

11. BIOLOGICAL ASSETS (continued)

The main *Level 3* inputs used by the Group are derived and evaluated as follows:

- Expected volume of consumable plants are determined based on the age of the plantation, historical yields, correction factor and variations caused by severe weather events and deforestation.
- Consumable plants prices are determined based on average actual sales from the Company less harvest cost and cost to sell.
- Discount rates are determined using a *capital asset pricing model* to calculate discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risk specific to the asset.

The narrative sensitivity analysis of unobservable inputs (*Level 3*) used in determining the fair values of the biological assets are as follows:

Inputs	Sensitivity Fair Value to the Inputs
Discount rate	An increase/(decrease) in the discount rate will cause a (decrease)/increase in the fair value of biological assets
Selling price of processed agricultural product	An increase/(decrease) in the commodity prices would result in an increase/ (decrease) in the fair value of biological assets
Production yield	An increase/(decrease) in production yields would result in an increase/ (decrease) in the fair value of biological assets
Inflation rate	An increase/(decrease) in the inflation rate would result in a (decrease)/increase in the fair value of biological assets

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

*The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.*

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

12. SEWA

Grup memiliki kontrak sewa untuk berbagai aset tanah dan kendaraan yang digunakan dalam operasinya. Grup dibatasi untuk menyewakan kembali aset sewaan.

Sewa kendaraan memiliki jangka waktu sewa 3 tahun.

Grup memiliki sewa tertentu untuk peralatan kantor dengan masa sewa kurang dari 12 bulan atau dengan nilai rendah. Grup menerapkan pengecualian pengakuan untuk sewa-sewa ini dan mengakui biaya sewa berdasarkan garis lurus dalam laba rugi.

Di bawah ini adalah total tercatat dari aset hak guna yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian Grup dan pergerakannya selama tahun berjalan:

	2023	2022
Saldo awal	7.566	17.197
Penambahan	60.595	4.616
Pengurangan	(215)	-
Amortisasi	(14.886)	(14.247)
Total	53.060	7.566

*Beginning balance
Addition
Disposal
Amortization*

Mutasi jumlah tercatat liabilitas sewa:

	2023	2022
Saldo awal	8.669	20.870
Penambahan	60.622	4.616
Pengurangan	(261)	-
Penambahan bunga	3.033	1.095
Pembayaran	(11.721)	(17.912)
Sub-total	60.342	8.669
Dikurangi bagian lancar	(26.978)	(5.491)
Liabilitas sewa jangka panjang	33.364	3.178

*Beginning balance
Addition
Disposal
Accretion of interest
Payments*

Sub-total
Less current portion

Long-term lease liabilities

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

	2023	2022
Beban amortisasi aset hak guna (Catatan 24)	14.886	14.247
Beban bunga	3.033	1.095
Beban terkait sewa atas aset bernilai rendah dan jangka pendek	3.389	5.965
Total	21.308	21.307

*Amortization expense
right of use asset (Note 24)
Interest expense
Expense relating to low value
assets and short-term leases*

Total

12. LEASE

The Group has lease contracts for various assets of land and vehicle used in its operations. The Group is restricted from assigning and subleasing the leased assets.

Lease of vehicle generally has terms 3 years.

The Group has certain leases of office equipment with lease terms of less than 12 months or with low value. The Group applies recognition exemptions for these leases and recognize lease expenses on a straight-line basis in the profit or loss.

Set out below are the carrying amounts of right-of-use assets recognised on the Group's consolidated statement of financial position and the movements during the current year:

Movement of lease liabilities:

Amounts recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income:

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

12. SEWA (lanjutan)

Analisis jatuh tempo liabilitas sewa sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Dalam 1 tahun	26.978	5.491
Antara 2 - 3 tahun	33.364	3.178
Pembayaran sewa	60.342	8.669

12. LEASE (continued)

The analysis of the maturities of lease liabilities is as follows:

Within 1 year
Between 2 - 3 years
Lease payments

13. ASET TETAP

Biaya perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap adalah sebagai berikut:

13. FIXED ASSETS

Acquisition costs, accumulated depreciation and book value of the assets are as follows:

31 Desember 2023 / December 31, 2023						
Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclas- sifications	Saldo akhir/ Ending balance		Acquisition cost
Biaya perolehan						Bearer plant
Tanaman produktif						Mature plantation
Tanaman menghasilkan						Melaleuca Cajuputi
Kayu putih	226.808	-	-	87.981	314.789	Rubber
Karet	172.763	3.733	-	-	176.496	Sugarcane
Tebu	28.199	-	-	51.836	80.035	Others
Lainnya	4.930	-	-	-	4.930	Immature plantation
Belum menghasilkan						Pine
Pinus	345.840	83.028	-	-	428.868	Gliricidia Sepium
Gliricidia Sepium	380.955	17.316	-	-	398.271	Melaleuca Cajuputi
Kayu putih	219.253	34.807	(731)	(87.981)	165.348	Rubber
Karet	99.085	1.593	-	(1.368)	99.310	Sugarcane
Tebu	44.300	53.340	-	(51.836)	45.804	Others
Lainnya	5.608	978	-	1.368	7.954	Land
Tanah	144.662	237	-	37	144.936	Buildings
Bangunan	1.312.590	37.099	(531)	19.636	1.368.794	Roads and bridges
Jalan dan jembatan	583.512	788	-	13.266	597.566	Machinery and installations
Mesin dan instalasi	62.912	6.726	(1.331)	-	68.307	Wood landfills
Tempat penimbunan kayu	34.163	765	-	-	34.928	Heavy equipment and industrial machinery
Alat berat dan mesin industri	275.314	3.972	(683)	-	278.603	Vehicles
Kendaraan bermotor	67.781	23.883	(1.060)	-	90.604	Office equipment
Peralatan kantor	298.035	15.539	(63)	191	313.702	Construction in progress
Aset dalam penyelesaian	12.017	49.717	(225)	(33.130)	28.379	
Total biaya perolehan	4.318.727	333.521	(4.624)	-	4.647.624	Total Acquisition cost

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Biaya perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap adalah sebagai berikut: (lanjutan)

13. FIXED ASSETS (continued)

Acquisition costs, accumulated depreciation and book value of the assets are as follows: (continued)

31 Desember 2023 (lanjutan) / December 31, 2023 (continued)					
	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclas- sifications	Saldo akhir/ Ending balance
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Tanaman produktif					Bearer plant
Tanaman menghasilkan					Mature plantation
Kayu putih	30.422	14.472	-	-	Melaleuca Cajuputi
Tebu	7.050	19.634	-	-	Sugarcane
Karet	16.223	8.584	-	-	Rubber
Lainnya	4.895	34	-	-	Others
Bangunan	803.415	48.096	(531)	-	Buildings
Jalan dan jembatan	495.859	19.934	-	-	Roads and bridges
Mesin dan instalasi	58.771	1.917	(1.331)	-	Machinery and installations
Tempat penimbunan kayu	21.683	735	-	-	Wood landfills
Alat berat dan					Heavy equipment and
mesin industri	264.584	5.595	(683)	-	industrial machinery
Kendaraan bermotor	66.319	2.675	(1.060)	-	Vehicles
Peralatan kantor	206.081	7.129	-	-	Office equipment
Total akumulasi penyusutan	1.975.302	128.805	(3.605)	-	2.100.502
Total akumulasi penyusutan	1.975.302	128.805	(3.605)	-	2.100.502
Akumulasi penurunan nilai	93.300	6.959	(4.843)	-	95.416
Nilai buku	2.250.125				2.451.706

31 Desember 2022 / December 31, 2022					
	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclas- sifications	Saldo akhir/ Ending balance
Biaya perolehan					Acquisition cost
Tanaman produktif					Bearer plant
Tanaman menghasilkan					Mature plantation
Kayu putih	200.965	-	-	25.843	Melaleuca Cajuputi
Karet	172.763	-	-	-	Rubber
Tebu	-	-	-	28.199	Sugarcane
Lainnya	7.463	-	(2.533)	-	Others
Belum menghasilkan					Immature plantation
Pinus	305.946	39.894	-	-	Pine
Gliricidia Sepium	350.957	29.998	-	-	Gliricidia Sepium
Kayu putih	191.168	53.928	-	(25.843)	Melaleuca Cajuputi
Karet	90.607	8.478	-	-	Rubber
Tebu	26.635	45.864	-	(28.199)	Sugarcane
Lainnya	1.211	5.666	(1.269)	-	Others
Tanah	143.253	1.409	-	-	Land
Bangunan	1.277.897	27.621	-	7.072	Buildings
Jalan dan jembatan	571.352	12.160	-	-	Roads and bridges
Mesin dan instalasi	59.751	3.004	-	157	Machinery and installations
Tempat penimbunan kayu	24.257	1.084	-	8.822	Wood landfills
Alat berat dan					Heavy equipment and
mesin industri	266.883	5.951	-	2.480	industrial machinery
Kendaraan bermotor	67.781	-	-	-	Vehicles
Peralatan kantor	263.785	34.250	-	-	Office equipment
Aset dalam penyelesaian	23.988	6.560	-	(18.531)	Construction in progress
Total biaya perolehan	4.046.662	275.867	(3.802)	-	4.318.727

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Biaya perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap adalah sebagai berikut: (lanjutan)

13. FIXED ASSETS (continued)

Acquisition costs, accumulated depreciation and book value of the assets are as follows: (continued)

31 Desember 2022 (lanjutan) / December 31, 2022 (continued)					
	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclas- sifications	Saldo akhir/ Ending balance
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Tanaman produktif					Bearer plant
Tanaman menghasilkan					Mature plantation
Kayu putih	20.119	10.303	-	-	Melaleuca Cajuputi
Tebu	-	7.050	-	-	Sugarcane
Karet	11.598	4.625	-	-	Rubber
Lainnya	4.792	103	-	-	Others
Bangunan	758.349	45.066	-	-	Buildings
Jalan dan jembatan	477.544	18.315	-	-	Roads and bridges
Mesin dan instalasi	55.871	4.476	-	(1.576)	Machinery and installations
Tempat penimbunan kayu	21.732	760	-	(809)	Wood landfills
Alat berat dan mesin industri	251.425	4.605	-	8.554	Heavy equipment and industrial machinery
Kendaraan bermotor	64.629	7.367	-	(5.677)	Vehicles
Peralatan kantor	196.759	9.814	-	(492)	Office equipment
Total akumulasi penyusutan	1.862.818	112.484	-	-	Total accumulated depreciation
Akumulasi penurunan nilai	81.148	12.152	-	-	Accumulated impairment
Nilai buku	2.102.696				Book value

Luas total area tanaman produktif sebagai penghasil produk agrikultur adalah sebagai berikut:

Total area of bearer plants that produce agriculture products is as follows:

	2023 (Hektar/Hectares) (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2022 (Hektar/Hectares) (Tidak Diaudit/ Unaudited)	
Kayu putih	47.245	53.394	Melaleuca cajuputi
Pinus	43.888	28.182	Pine
Biomassa (Gliricidia dan Kaliandra)	44.642	43.073	Biomass (Gliricidia and Kaliandra)
Karet	3.932	8.183	Rubber plants
Lain-lain	3.579	13.514	Others
Total	143.286	146.346	Total

Penyusutan aset tetap dibebankan sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets was charged to the following:

	2023	2022	
Beban umum dan administrasi (Catatan 24)	66.805	68.201	General and administrative expenses (Note 24)
Beban pokok pendapatan (Catatan 22)	60.547	43.757	Cost of revenue (Note 22)
Beban pemasaran dan distribusi	1.453	526	Selling and distribution expense
Total	128.805	112.484	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tahun 2023, aset dalam penyelesaian terutama merupakan bangunan, mesin dan peralatan Grup yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2024.

Grup mempunyai beberapa bidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan. Manajemen meyakini bahwa tidak akan ada kesulitan dalam memperpanjang hak atas tanah ini karena semua tanah tersebut diperoleh secara legal dan dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang cukup.

Pada tanggal 31 Desember 2023, aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan jumlah nilai pertanggungan sekitar Rp574.929 (2022: Rp598.755), yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Tanah dan bangunan Perusahaan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman (Catatan 16).

Akumulasi penurunan nilai aset tetap pada tahun 2023 dan 2022, terutama merupakan akumulasi penurunan nilai pabrik sagu Perusahaan di Sorong masing-masing sebesar Rp69.019.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai perolehan aset tetap Grup yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp1.195.181 dan Rp1.157.002.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

14. UTANG USAHA

Utang ini terutama merupakan utang atas mekanisasi lahan agroforestri, pembelian bibit, pupuk, stimulan getah, perlengkapan lainnya.

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Pihak ketiga	229.694	130.648
Pihak berelasi (Catatan 28)	28.572	32.902
Total	258.266	163.550

13. FIXED ASSETS (continued)

In 2023, construction in progress mainly represent building, machinery and equipment of the Group, which is expected to be completed in 2024.

The Group owns several land with Hak Guna Bangunan ("Building Use Rights"). Management believes that there will be no difficulty in the extension of the land rights as all the land was legally acquired and supported by evidence of ownership.

As of December 31, 2023, the fixed assets are covered by insurance against losses from fire and other risks under a policy package with combined coverage amounting to about Rp574,929 (2022: Rp598,755) which in management's opinion, are adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

Land and buildings of the Company are used as collateral for borrowings (Note 16).

The accumulated impairment of property, plant and equipment in 2023 and 2022, mainly represents the accumulated impairment of the Company's sago mill in Sorong amounting to Rp69,019, respectively.

As of December 31, 2023 and 2022, the acquisition value of the Group's fixed assets which have been fully depreciated but are still in use amounted to Rp1,195,181 and Rp1,157,002, respectively.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses.

14. TRADE PAYABLES

These payable mainly represent payable from mechanization of agroforestry area, fertilizer, purchase of seeds, sap stimulants, other supplies.

Third party
Related parties (Note 28)

Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

15. BEBAN AKRUAL

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Bonus dan liabilitas imbalan kerja	88.732	143.021
Tuntutan hukum (Catatan 29b)	53.242	53.241
Tanaman dan operasional	11.729	10.460
Gaji dan tunjangan	8.805	9.446
Eksplorasi	-	73.706
Lain-lain	70.288	72.612
Total	232.796	362.486

Bonus and employee benefits liability
Legal claim (Note 29b)
Plantation and operational
Salary and allowances
Exploitation
Others

Total

16. PINJAMAN

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
a) Pinjaman bank jangka pendek	460.218	300.000
b) Pinjaman bank jangka panjang	162.368	121.667
c) Pinjaman jangka panjang lainnya	100.972	108.069
Total	263.340	229.736
Dikurangi bagian lancar	(52.368)	(52.489)
Bagian jangka panjang	210.972	177.247

a) Short-term bank loans

b) Long-term bank loans
c) Other long-term loans

Total
Less current portion

Long-term portion

Seluruh pinjaman pada tahun 2023 dan 2022 merupakan pinjaman dalam mata uang Rupiah.

All borrowings in 2023 and 2022 are denominated in Rupiah.

a. Pinjaman bank jangka pendek

a. Short-term bank loans

Kreditor	Fasilitas Facility	Jumlah Batas Pinjaman Maksimum/ Total Maximum Credit Limit	Batas Jangka Waktu Fasilitas/ End of Availability Period	Jumlah/ Amount		Creditors
				2023	2022	
Perusahaan						Company
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	KMK/KMK	200.000	Juli 2024/ July 2024	88.340	100.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
	Forex line/ Forex line	AS\$10.000.000				
	Bank Garansi/ Bank Guarantee	30.000				
PT Bank Raya Indonesia Tbk	KMKRK/KMKRK	200.000	November 2024/ November 2024	200.000	100.000	PT Bank Raya Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	KMK/KMK	75.000	Agustus 2024/ August 2024	75.000	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	CC/CC	69.878	September 2024/ September 2024	69.878	50.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	CC/CC	27.000	Oktober 2024/ October 2024	27.000	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	KASB/KASB	50.000	Maret 2023/ March 2023	-	50.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total				460.218	300.000	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. PINJAMAN (lanjutan)

a. Pinjaman bank jangka pendek (lanjutan)

Tujuan dari pinjaman-pinjaman di atas adalah untuk Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Modal Kerja Rekening Koran (KMKRK), Kredit Agunan Surat Berharga (KASB) dan *Cash Collateral* (CC).

Suku Bunga

Pinjaman dalam mata uang Rupiah dikenakan suku bunga tahunan yang berkisar antara 5,00% sampai dengan 8,75% (2022: antara 2,40% sampai dengan 9,00%) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Jaminan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua fasilitas pinjaman yang diperoleh oleh Perusahaan dijamin dengan kas yang dibatasi penggunaannya (Catatan 5), persediaan (Catatan 8) dan aset tetap tertentu (Catatan 13).

Pembatasan-pembatasan

Perusahaan

Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman-pinjaman tersebut, Perusahaan diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank sehubungan dengan, antara lain, pemberian pinjaman; penjualan aset jika melebihi batasan tertentu; dan penyertaan saham baru jika melebihi batasan tertentu.

Selain itu, Perusahaan juga diharuskan untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

Entitas Anak

Perjanjian-perjanjian pinjaman entitas anak tertentu mensyaratkan beberapa pembatasan, antara lain, persetujuan untuk mengubah anggaran dasar, memberi dan memperoleh pinjaman baru tanpa persetujuan awal, melakukan penggabungan usaha, penyertaan saham baru dalam perusahaan lain dan mengikatkan diri sebagai penjamin atau mengagunkan harta kekayaan.

Selain itu, entitas anak juga diharuskan untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

16. LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

The purpose of the above loans is for Working capital credit (KMK), working capital credit overdrafts (KMKRK), securities collateral loans (KASB) and cash collateral (CC).

Interest Rate

The loans denominated in Rupiah bear interest at annual rates ranging from 5.00% to 8.75% (2022: from 2.40% to 9.00) for the year ended December 31, 2023.

Collateral

As of December 31, 2023 and 2022, all loan facilities obtained by the Company are secured with restricted cash (Note 5), inventories (Note 8) and certain fixed assets (Note 13).

Covenants

The Company

Under the terms of the related loan agreements, the Company is required to obtain prior written consent from the banks in respect of, among others, granting of loans; disposal of assets in excess of certain threshold; and new share participant if exceed certain limits.

In addition, the Company are also required to maintain certain financial ratios.

Subsidiaries

The subsidiary loan agreements require several covenants, including approval to change the articles of association, granting of and obtain new loans, merge new share participants in other companies and engage as guarantor or pledge their assets.

In addition, the subsidiary is also required to maintain certain financial ratios.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. PINJAMAN (lanjutan)

a. Pinjaman bank jangka pendek (lanjutan)

Kepatuhan atas Syarat-syarat Pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman jangka pendek tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit terkait atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai ketentuan perjanjian kredit terkait.

b. Pinjaman bank jangka panjang

Kreditur/ Creditors	Jumlah Batas Pinjaman Maksimum/ Maximum Credit Limit
Perusahaan/ Company	
<u>Pinjaman untuk Investasi/ Loans for Investment</u>	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	160.000
PT Bank Raya Indonesia Tbk	100.000
PT Bank Raya Indonesia Tbk	100.000
Entitas Anak/ Subsidiaries	
<u>Pinjaman untuk Investasi/ Loans for Investment</u>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.442
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.970
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	30.000
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	
Sub-total/Sub-total	
Dikurangi bagian lancar/Less current portion	
Bagian Jangka Panjang/Long-term Portion	

Suku Bunga

Fasilitas pinjaman dalam mata uang Rupiah dikenakan tingkat suku bunga tahunan yang berkisar antara 4,40% sampai dengan 10,00% (2022: antara 4,50% sampai dengan 10,00%) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

16. LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

Compliance with Loan Covenants

As of December 31, 2023 and 2022, the Group has complied with all of the covenants of the above-mentioned short-term loans as stipulated in the respective loan agreements or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.

b. Long-term bank loans

Jadwal Pelunasan/ Schedule of Repayments	Jumlah/ Amount	
	2023	2022
April 2025/ April 2025	22.652	54.656
Oktober 2024/ October 2024	-	32.000
Oktober 2028/ October 2028	100.000	-
Juli 2024/ July 2024	2.526	5.011
Mei 2024/ May 2024	4.970	-
Juli 2024/ July 2024	30.000	30.000
	2.220	-
	162.368	121.667
	(52.368)	(52.489)
	110.000	69.178

Interest Rate

The credit facilities denominated in Rupiah bear interest at annual rates ranging from 4.40% to 10.00% (2022: from 4.50% to 10.00%) for the year ended December 31, 2023.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

*The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.*

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. PINJAMAN (lanjutan)

b. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

Jaminan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua fasilitas pinjaman yang diperoleh oleh Grup dijamin dengan kas yang dibatasi penggunaannya (Catatan 5), persediaan (Catatan 8) dan aset tetap tertentu (Catatan 13).

Pembatasan-pembatasan

Perusahaan

Perjanjian-perjanjian pinjaman yang diperoleh Perusahaan di atas mensyaratkan beberapa pembatasan, antara lain, untuk menjaminkan harta kekayaannya kepada pihak lain (kecuali untuk penjaminan yang telah dilakukan pada tanggal perjanjian kredit); meminjamkan uang kepada pihak ketiga; menggabungkan usaha atau konsolidasi dengan pihak lain kecuali Perusahaan menjadi entitas hukum yang bertahan; mengubah aktivitas usaha Perusahaan saat ini; melakukan pengurangan/penurunan modal saham; melakukan penyertaan saham baru dan pembiayaan belanja modal jika melebihi batasan tertentu; serta menjual bagian signifikan dari aset utama dalam menjalankan usaha jika melebihi batasan tertentu. Perusahaan juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

16. LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

Collateral

As of December 31, 2023 and 2022, all loan facilities obtained by Group are secured with restricted cash (Note 5), inventories (Note 8) and certain fixed assets (Note 13).

Covenants

The Company

The above-mentioned credit agreements obtained by the Company requires several covenants, such as, to pledge its assets to other parties (except for the existing assets already pledged at the credit agreement date); to lend money to unaffiliated parties; to merge or consolidate with other entity unless the Company will be the surviving legal entity; to change the current course of its businesses; to reduce its share capital; making new investments and capital expenditures in excess of certain threshold; to sell or dispose off significant portion of its assets used in the operations in excess of certain threshold. The Company is also required to maintain certain financial ratios.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. PINJAMAN (lanjutan)

b. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

Pembatasan-pembatasan

Entitas Anak

Perjanjian-perjanjian pinjaman yang diperoleh entitas anak di atas mensyaratkan beberapa pembatasan bagi entitas anak tersebut, antara lain, untuk mengagunkan harta kekayaannya kepada pihak lain (kecuali untuk penjaminan aset yang telah ada pada tanggal perjanjian kredit); meminjamkan uang kepada pihak ketiga; menggabungkan usaha atau konsolidasi dengan pihak lain kecuali entitas anak akan menjadi entitas hukum yang bertahan; mengubah aktivitas usaha entitas anak saat ini; melakukan pengurangan atau penurunan modal saham; melakukan penyertaan saham baru dan pembiayaan belanja modal jika melebihi batasan tertentu; menjual bagian signifikan dari aset utama dalam menjalankan usaha; mengubah status hukum; membayarkan dividen melebihi 50% dari laba entitas anak tahun sebelumnya; melunasi utang kepada para pemegang saham; serta memperoleh fasilitas kredit baru dari pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan entitas anak untuk membayar pinjaman. Entitas anak juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

Kepatuhan atas Syarat-syarat Pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman jangka panjang tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai ketentuan perjanjian kredit terkait.

c. Pinjaman jangka panjang lainnya

Merupakan pinjaman jangka panjang tanpa jaminan yang diperoleh IHT I, anak Perusahaan.

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Korea Indonesia Forestry Cooperative ("KIFC")	87.064	91.942
PT Citra Putra Kebun Asri ("CPKA")	2.244	2.244
<u>Pihak berelasi (Catatan 28)</u>		
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	11.664	13.883
Total	100.972	108.069

16. LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

Covenants

Subsidiaries

The above-mentioned credit agreements obtained by the subsidiaries requires several covenants, such as, to pledge their assets to other parties (except for the existing assets already pledged at the credit agreement date); to lend money to unaffiliated parties; to merge or consolidate with other entity unless the subsidiaries will be the surviving legal entity; to change the current course of their businesses; to reduce their share capital; making new investments and capital expenditures in excess of certain threshold; to sell or dispose off significant portion of their assets used in the operations; to change their legal status; to pay dividends exceeding 50% of the previous year profit; to pay their shareholders' loans; as well as to obtain credit facilities from other parties which would affect their ability to perform their obligation under the related credit agreements. The subsidiaries are also required to maintain certain financial ratios.

Compliance with Loan Covenants

As of December 31, 2023 and 2022, the Group has either complied with all of the covenants of the above-mentioned long-term loans as stipulated in the respective loan agreements or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.

c. Other long-term loans

It is long-term loans without guarantee from IHT I, the subsidiary.

<u>Third parties</u>
PT Korea Indonesia Forestry Cooperative ("KIFC")
PT Citra Putra Kebun Asri ("CPKA")
<u>Related party (Note 28)</u>
Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. PINJAMAN (lanjutan)

c. Pinjaman jangka panjang lainnya (lanjutan)

Informasi lain yang signifikan terkait dengan pinjaman pihak ketiga sebagai berikut:

Kreditor/Creditor	Jenis fasilitas/ Type of facilities	Total facilities	Total fasilitas/ Jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga per tahun/ Annual interest rate	Jaminan/Collaterals
PT Inhutani I (ex-IHT II)					
KIFC	Pinjaman modal kerja/Working capital loans	91.942	Oktober/ October 2039	3,00%	N/A
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Kredit investasi/ Investment credit	11.664	Oktober/ October 2028	2,00%	N/A
PT Inhutani I (ex-IHT III)					
PT CPKA	Pinjaman modal/ kerja/Working capital loans	2.244	Februari/ February 2034	3,00%	N/A
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Kredit investasi/ Investment credit	2.220	Oktober/ October 2023	2,00%	N/A

PT Korea Indonesia Forestry Cooperative (KIFC)

Pinjaman jangka panjang lainnya kepada KIFC merupakan fasilitas pinjaman IHT I (eks IHT II) untuk pembangunan, pengembangan dan pengelolaan hutan tanaman karet dan *Fast Growing Species* ("FGS") jenis akasia mangium.

IHT I (eks IHT II) dan KIFC menandatangani perjanjian pinjaman modal No. 1099/P/Banghut/2011 tanggal 27 Oktober 2011. Pinjaman tersebut digunakan untuk kerjasama atas lahan seluas 1.000 Ha dan ditetapkan selama 28 (dua puluh delapan) tahun. Pembayaran pinjaman dilakukan setelah proyek menghasilkan arus kas positif.

PT Citra Putra Kebun Asri (CPKA)

Pada bulan Februari 2016, IHT I (eks IHT III) memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja sebesar Rp83.350 untuk pembangunan tanaman karet di lahan seluas 1.000 Ha di wilayah Jorong, Kalimantan Selatan. Atas pinjaman modal kerja tersebut, IHT I (eks IHT III) telah melakukan penarikan sebesar Rp2.244. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 3% per tahun.

16. LOANS (continued)

c. Other long-term loans (continued)

Other significant information related to third party borrowings are as follows:

Kreditor/Creditor	Jenis fasilitas/ Type of facilities	Total facilities	Total fasilitas/ Jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga per tahun/ Annual interest rate	Jaminan/Collaterals
PT Korea Indonesia Forestry Cooperative (KIFC)					
KIFC	Pinjaman modal kerja/Working capital loans	91.942	Oktober/ October 2039	3,00%	N/A
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Kredit investasi/ Investment credit	11.664	Oktober/ October 2028	2,00%	N/A
PT Inhutani I (ex-IHT III)					
PT CPKA	Pinjaman modal/ kerja/Working capital loans	2.244	Februari/ February 2034	3,00%	N/A
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Kredit investasi/ Investment credit	2.220	Oktober/ October 2023	2,00%	N/A

PT Korea Indonesia Forestry Cooperative (KIFC)

Other long-term loans to KIFC are IHT I (ex IHT II) loan facilities for the development and management of rubber plantations and *Fast Growing Species* ("FGS") of the *Acacia mangium* type.

IHT I (ex IHT II) and KIFC entered into loan agreement No. 1099/P/Banghut/2011 dated October 27, 2011. The loan are used for cooperation upon development areas of 1,000 Ha for 28 years. Loan payment is due when the project generates positive cash flows.

PT Citra Putra Kebun Asri (CPKA)

In February 2016, IHT I (ex IHT III) obtained working capital loan facility of Rp83,350 for the development of a rubber plantation on an area of 1,000 Ha in the Jorong area, South Kalimantan. For the working capital loan, IHT I (ex IHT III) has withdrawn a total of Rp2,244. This loan bears interest at 3% per annum.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. PINJAMAN (lanjutan)

c. Pinjaman jangka panjang lainnya (lanjutan)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pinjaman jangka panjang lainnya kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan kredit investasi atas fasilitas pinjaman kepada IHT I (eks IHT II dan IHT III) terkait proyek pembangunan hutan tanaman industri berdasarkan surat Kementerian Keuangan No. SLA-522/DDI/1990 tanggal 29 Mei 1990.

Pinjaman ini berasal dari Perjanjian Pinjaman No.1000-INO tanggal 19 April 1990 dimana Asian Development Bank memberikan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam rangka membiayai Proyek Pembangunan Hutan Tanaman Industri. dengan jumlah yang tidak melebihi AS\$5.567.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp13.299.

Pinjaman ini akan dilunasi secara bertahap selama 28 tahun. Perjanjian ini telah mengalami perubahan dengan berdasarkan Perjanjian No. AMA-494/SLA-522/DSMI/2017 tanggal 25 Januari 2017 dimana bunga yang dikenakan menjadi sebesar 2% per tahun diatas tingkat bunga yang dikenakan oleh Asian Development Bank kepada Pemerintah dari pokok pinjaman.

Pada tanggal 27 Januari 2022, IHT I telah mengajukan permohonan restrukturisasi pinjaman kepada KKRI untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo pinjaman yang semula jatuh pada bulan Oktober 2023 menjadi Oktober 2031 dengan pembayaran pertama atas kewajiban pokok dan non-pokok pada bulan April 2024. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, proses restrukturisasi masih belum mendapatkan persetujuan dari KKRI, sehingga pada tanggal 31 Desember 2023, IHT I telah mereklasifikasi saldo pinjaman tersebut ke porsi jangka pendek.

16. LOANS (continued)

c. Other long-term loans (continued)

Ministry of Finance of the Republic of Indonesia

Other long-term loans to Ministry of Finance of the Republic of Indonesia are investment credit related to IHT I (ex IHT II and IHT III) loan facilities for industrial plantation forest development according to the letter of Ministry of Finance No. SLA-522/DDI/1990 dated May 29, 1990 .

This loan was derived from Loan Agreement No.1000-INO dated April 19, 1990 where the Asian Development Bank provided a loan to Government of Indonesia through Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in order to finance the Industrial Plantation Forest Development Project. with an amount not exceeding US\$5,567,000 (full amount) or equivalent to Rp13,299.

This loan will repaid over 28 years. This agreement has been amended based on Agreement No. AMA-494/SLA-522/DSMI/2017 dated January 25, 2017 where the interest charged is 2% per annum above the interest rate charged by the Asian Development Bank to the Government of the principal loan.

On January 27, 2022, IHT I filed a loan restructuring application to KKRI to extend the loan maturity date which was originally due in October 2023 becoming due in October 2031 with first payment of principal and non-principal obligations is in April 2024. Up to the completion date of the these consolidated financial statements, approval for restructuring process has not yet been received from the KKRI, therefore, on December 31 2023, IHT I has reclassified the loan to the short-term portion.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Liabilitas kontrak	94.203
Dana reboisasi	67.934
Liabilitas lancar lainnya	19.844
Total	181.981

Liabilitas kontrak merupakan uang muka penjualan kayu dan hasil hutan bukan kayu kepada pihak ketiga.

Dana reboisasi merupakan utang penyaluran dana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebelumnya Departemen Kehutanan) untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri ("HTI") yang disalurkan ke PT Inhutani V ("IHT V") berdasarkan surat Panitia Urusan Piutang Negara No. PJPNC-09.PUPNC.10.04/2012 tanggal 9 Maret 2012.

Liabilitas lancar lainnya terutama merupakan pendapatan diterima dimuka terkait uang muka kerjasama.

17. OTHER SHORT-TERM LIABILITIES

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	114.906	Contract liabilities
	69.280	Reforestation fund
	23.287	Other short-term liabilities
Total	207.473	Total

Contract liabilities represents an advance sale of wood and non wood forest products to third parties.

Reforestation fund is a distribution of funds from the Ministry of Environment and Forestry (formerly Department of Forestry) for construction of Hutan Tanaman Industri ("HTI") to PT Inhutani V ("IHT V") according to decision letter State Receivables Administration Committee No. PJPNC-09.PUPNC.10.04/2012 dated March 9, 2012.

Other current liabilities mainly represent unearned income related to advances for cooperation.

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA

	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Dana pensiun	582.322
Imbalan kerja jangka panjang	1.195.992
Total	1.778.314
Dikurangi bagian lancar	(179.492)
Bagian jangka panjang	1.598.822

Imbalan Pasca Kerja

Imbalan paska kerja Grup didanai melalui Dana Pensiun Perhutani ("DPPHT") dan Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK").

Selain mempunyai program pensiun iuran pasti untuk karyawan yang memenuhi syarat, Grup juga mencatat penyisihan imbalan kerja untuk memenuhi imbalan minimum yang diwajibkan untuk dibayar kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan UU Cipta Kerja ("UUCK").

Manajemen berkeyakinan bahwa saldo liabilitas imbalan kerja tersebut cukup untuk memenuhi imbalan minimum sesuai dengan UUCK.

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	468.227	Pension fund
	1.235.409	Long term employee benefit
Total	1.703.636	Total
Dikurangi bagian lancar	(172.534)	Less current portion
Bagian jangka panjang	1.531.102	Long term portion

Post-employment benefit

The Group post employment benefits are funded through Dana Pensiun Perhutani ("DPPHT") and Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK").

On top of the benefits provided under the above-mentioned defined contributions retirement plans, the Group has also made additional provisions for employee service entitlements in order to meet the minimum benefits required to be paid to qualified employees, as stipulated under the Cipta Kerja Law ("UUCK").

The management believes the balance of employee benefits liability is sufficient to cover the minimum benefits required under the UUCK.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

Dana Pensiun Perhutani ("DPPHT").

DPPHT diperuntukkan bagi karyawan tetap yang berstatus pegawai tetap (Program Pensiun Manfaat Pasti) berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani sebagai pendiri dana pensiun Perum Perhutani No. 446/Kpts/Dir/2011 tentang peraturan dana pensiun Perum Perhutani tanggal 9 Juli 2011, untuk pegawai aktif hingga 1 Januari 2009. Kontribusi pemberi kerja dan karyawan masing-masing sebesar 9,20% dan 5,00%.

a. Dana Pensiun

Nilai wajar aset dan liabilitas manfaat pensiun Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 didasarkan pada penilaian aktuaris independen KKA Azwir Arifin & Rekan dalam laporannya tanggal 27 Maret 2024 (2022: Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Agus Susanto dalam laporannya tanggal 23 Maret 2023), menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

	2023	2022	
Tingkat diskonto	6,37% - 7,10%	5.40% - 5.70%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji pokok rata-rata	2,50%	2.50%	Average salary increase rate
Usia pensiun normal	56 tahun	56 years	Normal pension age
Tingkat cacat	0,05% dari mortalitas	0.05% from mortality	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	5,00% di usia 20 tahun dan menurun linear sampai dengan usia pensiun normal	5.00% at age 20 and declining linearly until normal retirement age	Turnover rate
Tingkat mortalitas	GAM (1971)	GAM (1971)	Mortality rate

Rincian beban imbalan kerja

The details of employee benefit expenses

	2023	2022	
Biaya bunga	94.058	96.597	Interest Expense
Beban jasa kini	9.722	18.855	Current service cost
Total	103.780	115.452	Total

Rincian liabilitas imbalan kerja

The details of employee benefits liability

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Nilai kini liabilitas	1.509.107	1.397.237	Present value of liability
Nilai wajar dari aset program	(926.785)	(929.010)	Fair value of plan assets
Total	582.322	468.227	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

a. Dana Pensiun (lanjutan)

a. Pension Fund (continued)

Mutasi liabilitas imbalan kerja

Movements of employee benefits liability

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Saldo awal	1.397.237	1.804.753	Beginning balance
Beban imbalan kerja yang diakui pada tahun berjalan	103.780	115.452	Employee benefit expense recognized in current year
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	120.301	(372.736)	Remeasurement of employee benefits liability
Iuran yang dibayarkan	(112.211)	(150.232)	Contribution payment
Total	1.509.107	1.397.237	Total

Beban imbalan kerja karyawan dibebankan ke beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi.

The provision for employee benefits are charged to cost of revenue and general and administrative expense.

Mutasi nilai wajar dari aset program

Movements of fair value from asset program

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Saldo awal	929.010	797.420	Beginning balance
Iuran yang dibayarkan	131.680	123.074	Contribution paid
Pendapatan bunga	51.865	42.327	Interest income
Imbal hasil lainnya	(73.559)	116.421	Others benefit income
Pembayaran manfaat	(112.211)	(150.232)	Payment of the employee benefit
Total	926.785	929.010	Total

Program Pensiun yang dikelola oleh DPPHT adalah Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Besarnya Manfaat Pensiun sudah pasti dan sudah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) dengan formula tertentu. Pengembangan aset program dilakukan dalam rangka meningkatkan kekayaan pendanaan DPPHT. Surplus atau defisit pendanaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemberi kerja.

The Pension Program managed by the DPPHT is the Defined Benefit Pension Program (PPMP). The amount of the Pension Benefits is certain and has been stipulated in the Pension Fund Regulation (PDP) with a certain formula. The development of program assets is carried out in order to increase the wealth of DPPHT funding. Surplus or deficit funding is fully the responsibility of the employer..

Persentase penempatan aset program gabungan tersebut adalah sebagai berikut:

The percentage of placement of the combined plan assets is as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Obligasi	32,70 %	20,95 %	Bonds
Deposito	25,11 %	20,28 %	Deposits
Saham	19,61 %	25,86 %	Shares
Surat Berharga Negara	19,19 %	22,03 %	State Securities
Tanah dan bangunan	2,27 %	2,38 %	Land and buildings
Reksa dana	1,12 %	8,50 %	Mutual fund
Total	100,00 %	100,00 %	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan kerja lain meliputi program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), kompensasi masa kerja, masa persiapan pensiun, serta uang duka dan penguburan.

Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK")

DPLK adalah kepesertaan pegawai pada program pensiun DPLK diperuntukkan bagi pegawai yang diangkat mulai 1 Januari 2009 berdasarkan SK Direksi No. 482/Kpts/Dir/2010 tentang tunjangan iuran DPLK khusus pegawai Perusahaan yang diangkat mulai 1 Januari 2009. Kontribusi pemberi kerja dan karyawan masing-masing sebesar 9,20% dan 5,00%.

Beban imbalan kerja karyawan dibebankan ke beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi.

Liabilitas imbalan kerja Grup pada tanggal 31 Desember 2023 didasarkan pada penilaian aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Azwir Arifin dalam laporannya tanggal 27 Maret 2024 (2022: KKA Agus Susanto dalam laporannya tanggal 23 Maret 2023), menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

	2023	2022	
Tingkat diskonto	5,70% - 7,10%	5,18% - 7,43%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji pokok rata-rata	5,00%	5,00%	Average salary increase rate
Sisa rata-rata masa kerja	8 tahun	8 tahun	Average remaining years of services
Usia pensiun normal	56 tahun	56 years	Normal pension age
Tingkat cacat	10,00% dari mortalitas	10,00% from mortality	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	5,00% di usia 20 tahun dan menurun linear sampai dengan usia pensiun normal	5,00% at age 20 years and declining linearly until normal retirement age	Turnover rate
Tingkat mortalitas	GAM (1971)	GAM (1971)	Mortality rate

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

b. Other long-term employee benefits

The Group provides other employee benefits include Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"), compensation for work period, retirement preparation period, as well as funeral and burial allowances.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK")

DPLK is employee participation in the Pension Fund program which is intended for employees who were appointed from January 1, 2009 and based on Board of Directors Decree No. 482/Kpts/Dir/2010 on contribution allowances dues for DPLK of the Company specific for employees who were appointed from January 1, 2009. Employer and employee contribution are 9.20% and 5.00%, respectively.

The provision for employee benefits are charged to cost of revenue and general and administrative expense.

Employee benefits liabilities of the Group as of December 31, 2023 based on the valuation of an independent actuary, Actuarial Consulting Azwir Arifin, as presented in its report dated on March 27, 2024 (2022: KKA Agus Susanto as presented in its report dated on March 23, 2023), using the "Projected Unit Credit" method with main assumption as follows:

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

**b. Imbalan kerja jangka panjang lainnya
(lanjutan)**

**b. Other long-term employee benefits
(continued)**

Rincian beban imbalan kerja

The details of employee benefit expenses

	2023	2022	
Biaya bunga	69.244	49.396	Interest expense
Beban jasa kini	41.177	34.493	Current service cost
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	(198)	7.083	Remeasurement of employee benefits liability
Biaya jasa lalu	(11.363)	(17.068)	Past service cost
Total	98.860	73.904	Total

Mutasi liabilitas imbalan kerja

Movements of employee benefits liability

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Saldo awal	1.235.409	774.944	Beginning balance
Beban imbalan kerja yang diakui pada tahun berjalan	98.860	73.904	Employee benefit expense recognized in current year
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	34.885	579.112	Remeasurement of employee benefits liability
Pembayaran imbalan	(173.162)	(192.551)	Benefit payment
Saldo akhir tahun	1.195.992	1.235.409	Ending balance

Analisa sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Sensitivity analysis to the key assumptions used in determining employee benefits liability is as follows:

Asumsi utama	Persentase kenaikan/ (penurunan)/ Percentage increase/ (decrease)	Nilai kewajiban kini/ Present value of liability	Key assumptions
Tingkat diskonto tahunan	1%/(1%)	(2.506.021) / 2.891.085	Annual discount rate
Tingkat kenaikan gaji tahunan	1%/(1%)	2.775.402 / (2.602.333)	Future annual salary increase rate

Analisa sensitivitas di atas dihitung menggunakan metode ekstrapolasi atas pengaruh terhadap kewajiban imbalan kerja sebagai hasil dari perubahan yang beralasan atas asumsi utama yang mungkin terjadi pada tanggal pelaporan.

The sensitivity analysis above is calculated based on a method that extrapolates the impact on employee benefits liability as a result of reasonable changes in key assumptions occurring at the reporting date.

Jadwal jatuh tempo dari liabilitas imbalan kerja yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Maturity schedule for undiscounted employee benefits liabilities for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Dalam 12 bulan mendatang	179.492	172.534	In 12 months
Antara 1 sampai 5 tahun	771.104	755.386	Between 1 to 5 years
Di atas 5 tahun	1.695.719	1.621.262	Over 5 years
Total	2.646.315	2.549.182	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. MODAL NEGARA

19. STATE CAPITAL

2023 dan/and 2022

Pemilik modal	Modal Negara/ State Capital	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Total/Total	Capital owner
Pemerintah Indonesia	2.586.303	100%	2.586.303	The Government of Indonesia

Berdasarkan surat persetujuan S-356/MBU/06/2023, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sepakat menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp549.897 sebagai dividen dan cadangan wajib masing-masing sebesar Rp100.000 dan Rp449.897.

Based on the approval letter S-356/MBU/06/2023, the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN), determined the use of the Company's net profit for the 2022 financial year of Rp549,897 as dividends and general reserves of Rp100,000 and Rp449,897, respectively.

Berdasarkan surat persetujuan S-428/MBU/06/2022, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sepakat menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp427.873 sebagai dividen dan cadangan wajib masing-masing sebesar Rp50.000 dan Rp377.873.

Based on the approval letter S-428/MBU/06/2022, the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN), determined the use of the Company's net profit for the 2021 financial year of Rp427,873 as dividends and general reserves of Rp50,000 and Rp377,873, respectively.

Berdasarkan PP No. 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perhutani dinyatakan bahwa modal Perusahaan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham.

Based on PP No. 30 of 2003 relating to Perusahaan Umum (Perum) Perhutani it is stated that the Company's share capital represents the state's wealth, which was separated from the State Budget of Income and Expenditure and not divided by shares.

Nilai kekayaan negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan. Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2010 ditetapkan besarnya modal Perusahaan adalah sebesar seluruh nilai penyertaan modal negara dalam Perusahaan dengan jumlah sebesar Rp700.000. Selanjutnya, Keputusan Menteri Keuangan No. 619/KMK.06/2015 tanggal 25 Mei 2015, menetapkan nilai penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam modal Perusahaan sebesar Rp1.886.303. Sehingga, penyertaan modal negara menjadi sebesar Rp2.586.303.

The wealth of the state was determined by the Minister of Finance based on calculations performed by the Ministry of Finance and the Ministry of Forestry. Based on the PP No. 72 of 2010 it was set the amount of capital the Company is equal to the entire value of its investment in the Company amounting to Rp700,000. Furthermore, the Decree of the Minister of Finance No. 619/KMK.06/2015 dated May 25, 2015 determined that the definitive value of additional capital investment in relation to the process of establishment of the forestry holding company referred above amounting to Rp1,886,303. Therefore, National Capital Participation becomes Rp2,586,303.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. MODAL NEGARA (lanjutan)

Cadangan tujuan khusus

Pada tanggal 10 April 2014, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sesuai dengan Surat No.S-241/MBU/2014, menetapkan cadangan khusus sebesar Rp205.476. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2014, Dewan Pengawas, menyetujui sebesar Rp202.790 digunakan sebagai cadangan sebagaimana yang tertuang dalam usulan Rancangan Penggunaan Dana Cadangan Rencana Operasi sesuai dengan surat No.66/023.4/Keu/Dwas/2014, dengan jumlah sebesar Rp202.790, yang akan digunakan untuk tiga program khusus, golden shakehand, sertifikasi tanah Perusahaan dan percepatan reboisasi. Selisih antara cadangan khusus yang ditetapkan oleh Menteri BUMN dan yang disetujui oleh Dewan Pengawas sebesar Rp2.686 dicatat pada Cadangan Umum. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, cadangan khusus tersebut telah direalisasi masing-masing untuk program reboisasi tanaman Rp48.936, sertifikasi tanah Rp112 dan golden shake hand Rp50.597. Sehingga cadangan khusus menjadi sebesar Rp103.145.

20. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Pada tanggal 1 Oktober 2014, SK Menteri Keuangan No. 469/KMK.06/2014, menetapkan nilai penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam modal Perusahaan sebesar Rp1.182.448. Nilai ini merupakan nilai sementara yang berasal dari pengalihan seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV dan PT Inhutani V dalam rangka pembentukan induk perusahaan kehutanan.

19. STATE CAPITAL (continued)

Special purpose reserves

On April 10, 2014, the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN), in accordance with Letter No. S-241/MBU/2014, stipulates a special reserve of Rp205,476. Subsequently on August 11, 2014, the Supervisory Board, approved Rp202,790 to be used as a reserve as stated in the proposed Operational Plan for the Use of Reserve Funds in accordance with letter No. 66/023.4/Keu/Dwas/2014, with an amount of Rp202,790, which will be used for three special programs, golden shakehand, the Company land certification and accelerated reforestation. The difference between the special reserve determined by the Minister of BUMN and that approved by the Supervisory Board of Rp2,686 is recorded in the General Reserve. Through December 31, 2023, these special reserve have been realized for the reforestation program of Rp48,936, land certification of Rp112 and golden shake hand of Rp50,597. So that the special reserve becomes Rp103,145.

20. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

On October 1, 2014, Decree No. 469/KMK.06/2014, Minister of Finance stipulated the value of the Additional Capital Investment into the Company amounting to Rp1,182,448. The additional capital is recognised as temporary value of capital from Republic Indonesia in PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV and PT Inhutani V for the purpose of establishing a forestry holding company.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Selanjutnya, Keputusan Menteri Keuangan No. 619/KMK.06/2015 tanggal 25 Mei 2015 menetapkan bahwa nilai tetap penambahan modal negara sehubungan dengan proses pembentukan induk perusahaan kehutanan di atas menjadi sebesar Rp1.886.303. Dengan adanya penambahan nilai setoran modal negara ini menyebabkan tambahan nilai investasi sebesar Rp703.855. Sehingga, total tambahan modal disetor yang dihasilkan dari kombinasi bisnis di bawah entitas pengendali adalah sebesar Rp1.334.148. Rinciannya sebagai berikut:

	Modal Negara/ State Capital	Aset Neto/ Net Assets	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid in Capital	
Inhutani I	1.211.262	205.935	1.005.327	Inhutani I
Inhutani II	225.707	111.112	114.595	Inhutani II
Inhutani III	308.509	54.667	253.842	Inhutani III
Inhutani IV	64.920	61.758	3.162	Inhutani IV
Inhutani V	75.905	118.683	(42.778)	Inhutani V
Total	1.886.303	552.155	1.334.148	Total

Selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus 2022, Inhutani II dan Inhutani III telah efektif bergabung ke Inhutani I, dan Inhutani IV telah efektif bergabung ke Inhutani V Catatan (1c), sehingga komposisi tambahan modal disetor menjadi sebagai berikut:

	Modal Negara/ State Capital	Aset Neto/ Net Assets	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid in Capital	
Inhutani I	1.745.478	371.714	1.373.764	Inhutani I
Inhutani V	140.825	180.441	(39.616)	Inhutani V
Total	1.886.303	552.155	1.334.148	Total

Karena transaksi diatas merupakan antara entitas sepengendali dan tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka transaksi ini dicatat dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 38, "Akuntansi untuk Restrukturisasi Entitas Sepengendali", dimana, selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor.

20. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Furthermore, the Decree of the Minister of Finance No. 619/KMK.06/2015 dated May 25, 2015 determined that the definitive value of additional capital investment in relation to the process of establishment of the forestry holding company referred above amounting to Rp1,886,303. With the additional capital investment resulted in the increase of additional investment value of Rp703,855. Therefore, total additional paid-in capital resulted from business combination under common control amounting to Rp1,334,148. The details are as follows:

Furthermore, on August 1 2022, Inhutani II and Inhutani III have effectively merged into Inhutani I, and Inhutani IV have effectively merged into Inhutani V (Note 1c), therefore the composition of the additional paid-in capital is as follows:

Since the above transaction are between entities under common control and does not result in change in the economic substance of the ownership of assets, liabilities, ownership transfer shares or other instrument of ownership which are exchanged, then this transaction is recorded by implementing Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 38, "Accounting for Restructuring Entities Under Common Control". The difference between the transfer value and the carrying value of the net assets, are recorded as the difference in value from the combined business transaction of entities under common control as part of the additional paid-in capital account.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. PENDAPATAN

a. Rincian pendapatan berdasarkan komoditi adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Kayu		
Pihak berelasi (Catatan 28)		
Kayu olahan	29.970	29.679
Pihak ketiga		
Kayu gelondongan	2.123.431	2.069.800
Kayu olahan	128.763	121.394
Sub-total kayu	2.282.164	2.220.873
Non-kayu		
Pihak berelasi (Catatan 28)		
Turunan dari gondorukem dan terpentin*)	-	6.834
Lainnya	-	3.005
Pihak ketiga		
Gondorukem dan terpentin	1.760.926	1.755.917
Getah pinus	82.231	67.078
Turunan dari gondorukem dan terpentin*)	21.122	125.658
Lainnya	36.225	40.061
Sub-total non-kayu	1.900.504	1.998.553
Lainnya		
Pihak berelasi (Catatan 28)		
Jasa rehabilitasi	12.745	20.764
Wisata dan agribisnis	20.823	36.762
Pihak ketiga		
Wisata dan agribisnis	487.072	433.994
Trading	67.958	94.810
Jasa rehabilitasi	5.550	6.595
Sub-total lainnya	594.148	592.925
Total	4.776.816	4.812.351

*) Turunan dari gondorukem dan terpentin merupakan alpha pinene, delta carene, rosin ester, cineol, terpineol, dan pine oil.

a. Rincian pendapatan menurut daerah geografis adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Dalam negeri	3.120.571	2.995.154
Luar negeri	1.656.245	1.817.197
Total	4.776.816	4.812.351

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat pendapatan dari pelanggan yang melebihi 10% dari total pendapatan.

21. REVENUE

a. The details of revenue based on commodity are as follows:

Wood
Related parties (Note 28)
Processed wood
Third party
Logs
Processed wood
Sub-total wood
Non-wood
Related parties (Note 28)
Derivatives of gum rosin and turpentine*)
Others
Third party
Gum rosin and turpentine
Pine sap
Derivatives of gum rosin and turpentine*)
Others
Sub-total non-wood
Others
Related parties (Note 28)
Rehabilitation service
Tourism and agribusiness
Third party
Tourism and agribusiness
Trading
Rehabilitation service
Sub-total others
Total

*) Derivatives of gum rosin and turpentine are alpha pinene, delta carene, rosin ester, cineol, terpineol, dan pine oil.

a. The details of revenue based on geographical areas are as follows:

Domestic
Overseas
Total

As of December 31, 2023 and 2022, there is no revenue from customers that exceeds 10% of the total revenue.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

22. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Biaya eksploitasi	1.809.279	1.680.184
Gaji dan kesejahteraan karyawan	992.983	1.065.425
Perubahan nilai wajar aset biologis	667.072	563.591
Penggunaan bahan baku dan bahan pembantu	276.016	367.682
Beban penyusutan (Catatan 13)	60.547	43.757
Biaya pemeliharaan	19.979	36.747
Subtotal	3.825.876	3.757.386
Barang jadi (Catatan 8):		
Persediaan awal	431.505	267.966
Persediaan akhir	(559.836)	(431.505)
Beban pokok produksi	3.697.545	3.593.847
Biaya agrowisata	89.634	67.800
Lain-lain	30.379	57.635
Total	3.817.558	3.719.282

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat pembelian dari pemasok yang melebihi 10% dari total pendapatan.

22. COST OF REVENUE

The details of cost of revenue are as follows:

Exploitation expenses
Salary and employee benefits
Changes in fair value of biological assets
Raw materials used and supporting material
Depreciation expense (Note 13)
Maintenance expenses
Subtotal
Finished goods (Note 8):
Beginning of the year
End of the year
Beban pokok produksi
Agrotourism expenses
Others
Total

As of December 31, 2023 and 2022, there is no purchase from suppliers that exceeds 10% of the total revenue.

23. BEBAN PEMASARAN DAN DISTRIBUSI

	2023	2022
Beban penjualan	37.999	38.617
Beban komisi agen (Catatan 29e)	28.635	34.202
Beban lain-lain	7.650	12.577
Total	74.284	85.396

Selling expenses
Agent commission fees (Note 29e)
Other expenses
Total

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2023	2022
Beban pegawai	736.039	852.503
Beban kantor	107.428	109.442
Beban penyusutan (Catatan 13)	66.805	68.201
Beban pemeliharaan	35.959	42.409
Beban pengaturan hasil hutan	16.318	18.516
Beban amortisasi aset hak guna (catatan 12)	14.886	14.247
Beban lain-lain	51.809	16.808
Total	1.029.244	1.122.126

Employee expenses
Office expenses
Depreciation expenses (Note 13)
Maintenance expenses
Forest product handling expenses
Amortization expense of right-of-use assets (note 12)
Other expenses
Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

25. PENDAPATAN LAIN-LAIN

	2023	2022
Penerimaan ganti rugi	20.050	99.172
Laba atas divestasi saham	9.616	108.987
Pendapatan selisih kurs	8.463	15.242
Pendapatan tata kelola	1.782	11.899
Pemulihan nilai piutang dan aset keuangan	130	25.188
Pendapatan lain-lain	150.808	86.620
Total	190.849	347.108

Penerimaan ganti rugi merupakan penggantian atas tanaman dan investasi kawasan hutan yang akan digunakan untuk kepentingan umum, yakni kegiatan pembangunan waduk dan pembangkit listrik.

25. OTHER INCOME

Compensation income
Gain on divestation of
associates
Gain from foreign exchange
Revenue from managing services
Recoverable amount of
account receivables
Others

Total

Compensation income represents compensation for standing timber and investment in forest areas, which will be used in public interest for the construction of reservoirs and power plants.

26. BEBAN LAIN-LAIN

	2023	2022
Penurunan nilai persediaan	24.270	10.116
Penurunan nilai piutang dan aset keuangan	5.000	42.482
Penghapusan aset tidak lancar lainnya	4.538	10.918
Beban penurunan nilai tanaman	-	11.435
Beban lain-lain	78.066	83.294
Total	111.874	158.245

Impairment of inventories
Impairment of account receivable
and financial asset
Write off other non current asset
Impairment of plantation
Others

Total

26. OTHER EXPENSES

27. BEBAN KEUANGAN

	2023	2022
Beban bunga (Catatan 28)	47.849	21.330
Biaya administrasi bank	4.106	2.872
Total	51.955	24.202

Interest expenses (Note 28)
Bank administration fees

Total

27. FINANCE COSTS

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**28. TRANSAKSI DAN SALDO YANG SIGNIFIKAN
DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Rincian transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

**28. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES
WITH RELATED PARTIES**

The Group entered into transactions with related parties. The details of significant transactions and outstanding balances with related parties are as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Kas dan setara kas (Catatan 4)			Cash and cash equivalents (Note 4)
<u>Kas pada bank</u>			<u>Cash in banks</u>
Entitas berelasi dengan Pemerintah	222.402	461.884	Government related entities
<u>Deposito berjangka</u>			<u>Time deposits</u>
Entitas berelasi dengan Pemerintah	34.947	92.678	Government related entities
	257.349	554.562	
Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo kas dan setara kas yang ditempatkan pada entitas berelasi dengan Pemerintah masing-masing sebesar 99,18% dan 99,30% dari total kas dan setara kas konsolidasian.			
As of December 31, 2023 and 2022, cash and cash equivalents balances placed on entities related to the Government represent 99,18% and 99,30% of the total consolidated cash and cash equivalents, respectively.			
Kas yang dibatasi penggunaannya (Catatan 5)			Restricted cash (Note 5)
<u>Kas pada bank</u>			<u>Cash in banks</u>
Entitas berelasi dengan Pemerintah	70.143	51.000	Government related entities
<u>Deposito berjangka</u>			<u>Time deposits</u>
Entitas berelasi dengan Pemerintah	31.000	60.000	Government related entities
	101.143	111.000	
Piutang usaha (Catatan 6)			Trade receivables (Note 6)
PT Finnet Indonesia	8.375	10.490	PT Finnet Indonesia
PT IDEC Abadi Wood Industries	1.443	-	PT IDEC Abadi Wood Industries
PT Timah (Persero) Tbk	1.404	920	PT Timah (Persero) Tbk
PT Hutan Kintap	-	2.204	PT Hutan Kintap
Perum Jasa Tirta I	-	2.080	Perum Jasa Tirta I
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	-	953	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
PT Perkebunan Nusantara X	-	732	PT Perkebunan Nusantara X
Lainnya	790	544	Others
	12.012	17.923	
Penyisihan penurunan nilai	155	2.774	Provision for impairment
	11.857	15.149	
Aset keuangan tidak lancar lainnya (Catatan 7b)			Other non current financial assets (Note 7b)
<u>Kas pada bank</u>			<u>Cash in banks</u>
Entitas berelasi dengan Pemerintah	104.507	72.079	Government related entities
<u>Deposito berjangka</u>			<u>Time deposits</u>
Entitas berelasi dengan Pemerintah	2.449	2.749	Government related entities
	106.956	74.828	

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**28. TRANSAKSI DAN SALDO YANG SIGNIFIKAN
DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Rincian transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**28. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES
WITH RELATED PARTIES (continued)**

The Group entered into transactions with related parties. The details of significant transactions and outstanding balances with related parties are as follows: (continued)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Utang usaha (Catatan 14)			Trade Payable (Note 14)
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	20.638	14.323	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Petrosida Gresik	7.576	12.518	PT Petrosida Gresik
PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha	-	1.697	PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha
PT Pertamina Niaga	-	3.644	PT Pertamina Niaga
Lainnya	358	720	Others
	28.572	32.902	
Pinjaman (Catatan 16)			Loans (Note 16)
Pinjaman bank jangka pendek (catatan 16a)			Short-term bank loans (Note 16a)
PT Bank Raya Indonesia Tbk	200.000	100.000	PT Bank Raya Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	158.218	150.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	102.000	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	50.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	460.218	300.000	
Pinjaman bank jangka panjang (catatan 16b)			Long-term bank loans (Note 16b)
PT Bank Raya Indonesia Tbk	100.000	32.000	PT Bank Raya Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	30.000	30.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	27.622	54.656	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.526	5.011	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	2.220	-	Ministry of Finance of the Republic Indonesia
	162.368	121.667	
Pinjaman jangka panjang lainnya (catatan 16c)			Other long-term loans (Note 16c)
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	11.664	13.883	Ministry of Finance of the Republic Indonesia

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**28. TRANSAKSI DAN SALDO YANG SIGNIFIKAN
DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Rincian transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**28. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES
WITH RELATED PARTIES (continued)**

The Group entered into transactions with related parties. The details of significant transactions and outstanding balances with related parties are as follows: (continued)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Pendapatan (Catatan 21)			Revenue (Note 21)
PT IDEC Abadi Wood Industries	29.970	29.679	PT IDEC Abadi Wood Industries
Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	8.646	12.705	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
PT Pertamina EP	6.123	630	PT Pertamina EP
PT Perkebunan Nusantara XI	5.820	762	PT Perkebunan Nusantara XI
PT Timah (Persero) Tbk	3.564	3.120	PT Timah (Persero) Tbk
PT PG Rajawali I	2.533	-	PT PG Rajawali I
PT Perkebunan Nusantara X	1.123	16.100	PT Perkebunan Nusantara X
PT Pertamina Gas Negara Tbk	952	-	PT Pertamina Gas Negara Tbk
PT Pertamina (Persero)	711	10.573	PT Pertamina (Persero)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rumah (PUPR)	661	8.183	Ministry of Public Works and Public Housing
Perum Jasa Tirta I	-	3.373	Perum Jasa Tirta I
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-	6.484	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Lainnya	3.435	5.435	Others
	63.538	97.044	
Pendapatan Lainnya (Catatan 25)			Other Income (Note 25)
PT Pertamina (Persero) Tbk	3.072	2.074	PT Pertamina (Persero) Tbk
Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk	2.335	397	Local Government of Nganjuk District
PT Aneka Tambang Tbk	1.371	-	PT Aneka Tambang Tbk
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	1.315	19.809	PT Semen Gresik (Persero) Tbk
Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rumah (PUPR)	1.075	-	Ministry of Public Works and Public Housing
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	914	18.534	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal	-	8.927	Local Government of Kendal District
Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo	-	1.633	Local Government of Ponorogo District
Balai Besar Wilayah Sungai	-	1.349	Balai Besar Wilayah Sungai
Lainnya	1.331	805	Others
	11.413	53.528	

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**28. TRANSAKSI DAN SALDO YANG SIGNIFIKAN
DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Rincian transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Beban Keuangan (Catatan 27)

PT Bank Raya Indonesia Tbk	17.285	10.046
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	15.478	7.726
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4.473	272
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	378	1.490
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	24
	37.614	19.558

**28. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES
WITH RELATED PARTIES (continued)**

The Group entered into transactions with related parties. The details of significant transactions and outstanding balances with related parties are as follows: (continued)

Beban Keuangan (Note 27)

PT Bank Raya Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Rincian pihak berelasi, sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The details of related party, nature of relationship and type of significant transactions with related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi / Related parties	Sifat hubungan / Nature of relationship	Jenis transaksi / Nature of transactions
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penempatan dana pada bank tahun 2023 dan 2022, serta kas yang dibatasi penggunaannya tahun 2023/ Placement on bank and restricted cash in 2023.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penempatan dana pada bank, deposito berjangka, kas dan deposito yang dibatasi penggunaannya, dan pinjaman/ Placement on bank, time deposits, restricted cash and deposits, and loans.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penempatan dana pada bank dan pinjaman tahun 2023 dan 2022, serta kas yang dibatasi penggunaannya dan deposito berjangka tahun 2023/ Placement on bank and loans in 2023 and 2022, and restricted cash and time deposits in 2023.
PT Bank Tabungan Negara Syariah	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penempatan deposito berjangka/ Placement on time deposits
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penempatan dana pada bank, deposito berjangka, deposito yang dibatasi penggunaannya tahun 2022, dan pinjaman / Placement on bank, time deposits, restricted deposits in 2022, and loans
PT Bank Raya Indonesia Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penempatan dana pada bank dan pinjaman/ Placement on bank and loans

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**28. TRANSAKSI DAN SALDO YANG SIGNIFIKAN
DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Rincian transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**28. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES
WITH RELATED PARTIES (continued)**

The Group entered into transactions with related parties. The details of significant transactions and outstanding balances with related parties are as follows: (continued)

Pihak-pihak berelasi / Related parties	Sifat hubungan / Nature of relationship	Jenis transaksi/ Nature of transactions
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah/ Controlled by the Local Government of Central Java Province	Penempatan dana pada bank/Placement on bank
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Banten/ Controlled by the Local Government of West Java and Banten Province	Penempatan dana pada bank tahun 2022 /Placement on bank in 2022
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur/ Controlled by the Local Government of East Java Province	Penempatan dana pada bank/Placement on bank
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Perseroda)	Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara/ Controlled by the Local Government of East Borneo and North Borneo Province	Penempatan dana pada bank/Placement on bank
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat/ Controlled by the Local Government of South Celebes and West Celebes Province	Penempatan dana pada bank/Placement on bank
PT Bank Syariah Indonesia	Dikendalikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/ Controlled by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan dana pada bank tahun 2023/ Placement on bank in 2023
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit investasi/Investment credit
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan penjualan derivatif gondorukem tahun 2022, ganti rugi, dan lain-lain/ Revenue from gum rosin, derivatives sales in 2022, compensation and other income
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan jasa rehabilitasi tahun 2022, sewa, dan lain-lain/Rehabilitation service in 2022, rent, and other income

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**28. TRANSAKSI DAN SALDO YANG SIGNIFIKAN
DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**28. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Rincian transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The Group entered into transactions with related parties. The details of significant transactions and outstanding balances with related parties are as follows: (continued)

Pihak-pihak berelasi / Related parties	Sifat hubungan / Nature of relationship	Jenis transaksi / Nature of transactions
PT Timah (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan jasa rehabilitasi/ Rehabilitation service income
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government	Pendapatan jasa rehabilitasi tahun 2022/ Rehabilitation service income in 2022
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Pengadaan perangkat lunak dan beban jasa telekomunikasi/ Procurement of software and Telecommunication service expense
Perum Jasa Tirta I	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan jasa rehabilitasi tahun 2022/ Rehabilitation service income in 2022
PT Pertamina (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan jasa rehabilitasi tahun 2022, sewa, ganti rugi, dan lainnya/ Rehabilitation service in 2022, rent, and other income
PT PG Rajawali I	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penjualan tebu tahun 2023/Sugarcane sales
PT Aneka Tambang Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan pemanfaatan kawasan hutan tahun 2023/Revenue from utilization of forest areas in 2023
Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Dikendalikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Controlled by The Ministry of Environment and Forestry	Pendapatan jasa rehabilitasi/ Rehabilitation service income
Balai Besar Wilayah Sungai	Dikendalikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Controlled by The Ministry of Environment and Forestry	Pendapatan ganti rugi tahun 2022/ Compensation income in 2022
Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk	Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur/ Controlled by the Local Government of East Java Province	Pendapatan lain-lain/Other Income
Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo	Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur/ Controlled by Local Government of East Java Province	Pendapatan ganti rugi tahun 2022/ Compensation income in 2022
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal	Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah/ Controlled by Local Government of Central Java Province	Pendapatan ganti rugi tahun 2022/ Compensation income in 2022

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**28. TRANSAKSI DAN SALDO YANG SIGNIFIKAN
DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Rincian pihak berelasi, sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**28. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES
WITH RELATED PARTIES (continued)**

The details of related party, nature of relationship and type of significant transactions with related parties are as follows: (continued)

Pihak-pihak berelasi / Related parties	Sifat hubungan / Nature of relationship	Jenis transaksi/ Nature of transactions
PT Perkebunan Nusantara X	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ Controlled by PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Pembelian bibit tebu tahun 2022 dan penjualan tebu/ Purchase of sugarcane seeds in 2022 and sugarcane sales
PT Perkebunan Nusantara XI	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ Controlled by PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Pembelian bibit tebu tahun 2022 dan penjualan tebu/ Purchase of sugarcane seeds and sugarcane sales in 2022
PT Petrosida Gresik	Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero)/ Controlled by PT Pupuk Indonesia (Persero) Tbk	Pembelian pupuk/ Purchase of fertilizer
PT Pertagas Niaga	Dikendalikan oleh PT Pertamina (Persero)/ Controlled by PT Pertamina (Persero)	Pembelian bahan bakar gas tahun 2022/ Purchase of compressed natural gas in 2022
PT Pertamina Gas Negara Tbk	Dikendalikan oleh PT Pertamina (Persero)/ Controlled by PT Pertamina (Persero)	Pendapatan sewa tahun 2023/ Rent income in 2023
PT Pertamina EP	Dikendalikan oleh PT Pertamina (Persero) Tbk/ Controlled by PT Pertamina (Persero) Tbk	Pendapatan sewa dan lain-lain/ Rent and other Income
PT Finnet Indonesia	Dikendalikan oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk/ Controlled by PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Jasa atas penyediaan layanan penjualan kayu/ Online service of log sales
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk/ Controlled by PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Pendapatan ganti rugi tahun 2022 dan pemanfaatan kawasan hutan tahun 2023/ Compensation income in 2022 and Revenue from utilization of forest areas in 2023
PT IDEC Abadi Wood Industries	Entitas asosiasi/ Associates entity	Pendapatan penjualan kayu/ Revenue of industrial wood
PT Hutan Kintap	Entitas asosiasi/ Associates entity	Pendapatan penjualan kayu tahun 2022/ Revenue from log sales
PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha	Entitas asosiasi/ Associates entity	Penyedia jasa asuransi jiwa/ Life insurance service provider

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN KOMITMEN

a. Gugatan PT Visi Investama Properti

Pada tanggal 6 September 2021, PT Visi Investama Properti menggugat Perusahaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan petitem ganti rugi sebesar Rp82.000 dengan register perkara No. 735/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., terkait dengan wanprestasi atas keterlambatan pelunasan pokok utang pembelian Gedung Perhutani. Selanjutnya, pada tanggal 15 November 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan atas perkara tersebut, yang isi putusannya menghukum Perusahaan untuk membayar sisa denda, kompensasi pembayaran yang tertunda dan biaya perkara, dengan total sebesar Rp8.832. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tertuang dalam Putusan Perkara No. 266/PDT/2023/PT DKI tanggal 5 Juni 2023. Selanjutnya, Perusahaan mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 15 Agustus 2023. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, proses hukum masih berlangsung.

b. Sanksi Denda oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Pada tanggal 21 Mei 2019, IHT I (Eks IHT II) mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Samarinda dengan nomor perkara No. 40/G/2019/PTUN-SMD, untuk membatalkan SK Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Utara No. 915/38/Kpts-DPEH/II.1/V/2019 tentang sanksi Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH) kepada IHT I (Eks IHT II) Semamu, Kabupaten Malinau sebesar Rp35.000 karena dianggap melakukan penebangan pada kawasan lindung dan penebangan di luar blok tebangan yang diizinkan.

IHT I (Eks IHT II) telah mengirimkan korespondensi berupa upaya keberatan pada tanggal 31 Mei 2019 dengan surat No. 017/P.UMHA-SM/2019 kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara namun ditolak dan dirujuk untuk melakukan keberatan melalui PTUN. IHT I (Eks IHT II) kemudian didampingi oleh Dr. Sadino & Partners sebagai pengacara untuk mewakili IHT I (Eks IHT II) dalam proses hukum ke PTUN Samarinda.

29. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS

a. PT Visi Investama Property Lawsuit

On September 6, 2021, PT Visi Investama Properti sued the Company to the South Jakarta District Court with a petition for compensation of Rp82,000 with case register No. 735/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., related to the default for the delay in paying off the principal for the purchase of the Perhutani Building. Furthermore, on November 15, 2022, the South Jakarta District Court has issued a decision on the case, the contents of the verdict have punished the Company to pay the remaining fines, compensation for delayed payments and court fees, totaling Rp8,832. In Appeal level, Jakarta High Court strengthen the holding from South Jakarta District Court as stated in Verdict No.266/PDT/2023/PT DKI June 5 2023. Furthermore, Company filed petition for casation on August 15 2023. Up to the completion date of these consolidated financial statements, the legal process is still ongoing.

b. Sanction by North Borneo Provincial Government

On May 21, 2019, IHT I (Ex IHT II) file a lawsuit to Samarinda State Administrative Court ("PTUN") through letter No. 40/G/2019/PTUN-SMD, to terminate the Forestry Office of North Borneo Provincial Government Decree No. 915/38/Kpts-DPEH/II.1/V/2019 related to sanction Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH) to IHT I (Ex IHT II) in Semamu area, Malinau District with claim value of Rp35,000 with accusation of logging in protected areas and logging outside the permitted cutting block.

IHT I (Ex IHT II) has sent correspondence by filing an objection on May 31, 2019 with letter No. 017/P.UMHA-SM/2019 to the Head of the North Kalimantan Provincial Forestry Office but it was rejected and referred to the objection through PTUN. IHT I (Ex IHT II), appointed Dr. Sadino & Partners as a lawyer to represent the IHT I (Ex IHT II) in the legal process at Samarinda PTUN Court.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**29. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

**29. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS
(continued)**

**b. Sanksi Denda oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara (lanjutan)**

**b. Sanction by North Borneo Provincial
Government (continued)**

Pada tanggal 9 September 2019 berdasarkan surat No. 915/60/Kpts-DPEH/II.1/IX.2019, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara mencabut surat No. 915/38/Kpts-DPEH/II.1/V/2019 yang dinilai tidak sesuai kriteria tata cara administrasi hukum yang kemudian direvisi menjadi SK No. 915/61/Kpts-DPEH/II.1/IX.2019 pada tanggal 30 September 2019 dengan nilai gugatan yang kurang lebih sama.

On September 9, 2019, based on Decree No. 915/60/Kpts-DPEH/II.1/IX.2019, the Head of the North Kalimantan Provincial Forestry Office revoked letter No. 915/38/Kpts-DPEH/II.1/V/2019 which was not in accordance with the criteria for legal administration procedures, which were revised to Decree No. 915/61/Kpts-DPEH/II.1/IX.2019 on September 30, 2019 with a similar claim value.

Mengingat objek perkara berubah dari SK Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Utara No. 915/38/Kpts-DPEH/II.1/V/2019, menjadi SK No. 915/61/Kpts-DPEH/II.1/IX.2019, maka IHT I (Eks IHT II) mencabut gugatan pada perkara No. 40/G/2019/PTUN-SMD tanggal 21 Mei 2019 dan mengajukan gugatan baru pada PTUN Samarinda dengan nomor perkara No. 71/G/2019/PTUN.SMD tanggal 19 Desember 2019.

Considering the object of the case changed from the Forestry Office of North Borneo Provincial Government Decree No. 915/38/KptsDPEH/II.V/2019, to Decree No. 915/61/Kpts-DPEH/II.1/IX.2019, IHT I (Ex IHT II) revoke the lawsuit No. 40/G/2019/PTUN-SMD dated May 21, 2019 and filed a new lawsuit at Samarinda PTUN through letter No. 71/G/2019/PTUN.SMD dated December 19, 2019.

Pada tanggal 28 April 2020, PTUN Samarinda menolak permohonan banding IHT I (Eks IHT II). Atas putusan tersebut, IHT I (Eks IHT II) mengajukan banding kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Jakarta No. 199/B/2020/PT.TUN.JKT. Pada tanggal 10 Agustus 2020, PTUN Jakarta menolak permohonan banding IHT I (Eks IHT II).

On April 28, 2020, Samarinda PTUN rejected the IHT I (Ex IHT II) lawsuit. Based on the decision, IHT I (Ex IHT II) filed an appeal to Jakarta PTUN with No. 199/B/2020/PT.TUN.JKT. On August 10, 2020 Jakarta PTUN rejected the IHT I (Ex IHT II) appeal.

Pada tanggal 7 Januari 2021, IHT I (Eks IHT II) telah mengajukan kasasi atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung ("MA") dengan No. 51K/TUN/2021 namun pada tanggal 3 Maret 2021 MA menolak permohonan kasasi IHT I (Eks IHT II).

On January 7, 2021, IHT I (Ex IHT II) filed a cassation based on the decision to the Supreme Court with No. 51K/TUN/2021 however, on March 3, 2021, the Supreme Court rejected IHT I (Ex IHT II)'s appeal for cassation.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**29. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

**b. Sanksi Denda oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara (lanjutan)**

Pada tanggal 30 Agustus 2021, IHT I (Eks IHT II) mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung yang telah teregister dengan perkara No. 26/PK/TUN/2022. Pada tanggal 24 Februari 2022, MA menolak permohonan peninjauan kembali IHT I (Eks IHT II).

Berdasarkan surat No. 522/298/II.3/Dishut tanggal 12 Juli 2022 perihal tindak lanjut pengenaan denda DPEH, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara kembali menegaskan IHT I (Eks IHT II) untuk melakukan pembayaran atas denda DPEH sebesar Rp18.000 melalui Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP).

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, permohonan peninjauan kembali masih dalam proses di Mahkamah Agung, namun mempertimbangkan adanya keraguan signifikan bahwa IHT I (Eks IHT II) tidak memiliki basis yang kuat untuk dapat membela posisinya sehingga provisi atas kasus legal ini telah dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian ini (Catatan 15).

c. Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Untuk tujuan tertentu kawasan hutan dapat ditetapkan salah satunya sebagai Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Penetapan KHDPK adalah sehubungan dengan: Perhutanan Sosial; Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan; Penggunaan Kawasan Hutan; rehabilitasi Hutan; Perlindungan Hutan; atau Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

Penetapan KHDPK dilakukan pada areal yang tidak dilimpahkan pengelolaannya kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan pada sebagian Hutan Negara yang berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**29. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS
(continued)**

**b. Sanction by North Borneo Provincial
Government (continued)**

On August 30, 2021, IHT I (Ex IHT II) filed a judicial review based on its decision to the Supreme Court which has been registered with case No. 26/PK/TUN/2022. On February 24, 2022, the Supreme Court rejected IHT I (Ex IHT II)'s appeal for judicial review.

Based on letter No. 522/298/II.3/Dishut dated July 12, 2022 regarding the follow-up to the imposition of DPEH fines, Forestry Office of North Borneo Provincial Government, reiterated IHT I (Ex IHT II) to paid DPEH fines of Rp18,000 through Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP).

Up to the completion date of these consolidated financial statements, the application for judicial review is still in process at the Supreme Court, but considering there is significant doubt that IHT I (Ex IHT II) does not have a strong basis to defend its position so the provisions for this legal case have been recorded in these consolidated financial statements (Note 15).

c. Forest Areas with Special Management

On February 2, 2021, the Government has stipulated Government Regulation Number 23 of 2021 concerning Forestry Management. For certain purposes a forest area can be designated as a Forest Area with Special Management (KHDPK). The establishment of KHDPK is connection with: Social Forestry; Arrangement of Forest Areas in the framework of Forest Area Confirmation; Use of Forest Areas; Forest rehabilitation; Forest Protection; or Utilization of Environmental Services.

The establishment of KHDPK is carried out in areas where management has not been delegated to state-owned enterprises in the forestry sector in parts of State Forests located in Production Forest Areas and Preserved Forests in Central Java Province, East Java Province, West Java Province and Banten Province.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**29. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

**c. Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
(lanjutan)**

Selanjutnya, berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.311/MENLHK/SETJEN/KUM.0/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 perihal Tindak Lanjut Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, yang mana Direktur Utama Perum Perhutani memperoleh tembusannya, telah disampaikan:

- 1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tanggal 5 April 2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Pada Sebagian Hutan Negara Yang Berada Pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten;
- 2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus;
- 3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1013/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Penetapan wilayah Pengelolaan Hutan Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Pada Sebagian Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

**29. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS
(continued)**

**c. Forest Areas with Special Management
(continued)**

Furthermore, based on the Letter of the Minister of Environment and Forestry No. S.311/MENLHK/SETJEN/KUM.0/10/2022 dated October 28, 2022 concerning Follow-up to the Revision of Government Regulation Number 72 of 2010 concerning State Forestry Public Companies (Perum) of which the Main Director of Perum Perhutani obtained a copy, it has been submitted:

- 1) *Decree of the Minister of Environment and Forestry No. SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 dated April 5, 2022 concerning Designation of Forest Areas with Special Management in Part of State Forests Located in Production Forest Areas and Preserved Forests in Central Java Province, East Java Province, West Java Province and Banten Province.*
- 2) *Decree of the Minister of Environment and Forestry No. SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 dated May 18, 2022 concerning Policy for Management of Forest Areas with Special Management;*
- 3) *Decree of the Minister of Environment and Forestry No. SK.1013/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2022 dated September, 2022 concerning Stipulation of State Forestry Public Company (Perum) Forest Management Areas in Parts of Production Forest and Preserved Forest Areas in Central Java Province, East Java Province, West Java Province and Banten Province.*

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**29. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

**c. Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
(lanjutan)**

Berdasarkan keputusan-keputusan Menteri tersebut di atas, Pemerintah telah menetapkan KHDPK pada sebagian hutan negara yang berada pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten seluas ±1.103.941 Ha, dan telah menetapkan areal kerja Perum Perhutani pada sebagian hutan negara yang berada pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten seluas ± 1.380.682 Ha. Sedangkan pengaturan terhadap aset tanaman dan aset lainnya Perum Perhutani yang berada pada areal yang ditetapkan pada KHDPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Surat Menteri LHK No. S.311/MENLHK/SETJEN/KUM.0/10/2022 tersebut, terhadap aset tanaman dan aset lain Perum Perhutani di areal KHDPK tetap dapat dimanfaatkan oleh Perum Perhutani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diintegrasikan pengaturannya dalam draft Rancangan Peraturan Pemerintah.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Rancangan Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara belum ditetapkan oleh Pemerintah namun telah mencapai tahap harmonisasi.

d. Perjanjian dengan PT Paramitra Mulia Langgeng ("PML")

Pada tanggal 2 April 2009 IHT V dan PML menandatangani perjanjian kerjasama No. 52/IHT-V/PKS/II-I/2009 (32/PML/IV/2009) atas pemanfaatan lahan Register 42, 44 and 46 di Lampung untuk penanaman karet dan akasia. Pada praktiknya, kegiatan penanaman berjalan namun pemanenan belum terlaksana karena nilai bagi hasil yang belum disepakati. Di lain pihak, lahan tersebut diokupasi oleh masyarakat dan dikerjasamakan dengan PT Pemukasakti Manisindah ("PSMI") sehingga PML tidak dapat melakukan kegiatan secara optimal.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**29. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS
(continued)**

**c. Forest Areas with Special Management
(continued)**

Based on the Ministerial decisions mentioned above, the Government has established KHDPK in some state forests located in production forest areas and preserved forests in Central Java Province, East Java Province, West Java Province and Banten Province with an area of ±1,103,941 Ha, and has stipulates that the working area of Perum Perhutani is part of state forests located in production forest areas and preserved forests in Central Java Province, East Java Province, West Java Province and Banten Province with an area of ± 1,380,682 Ha. Meanwhile, the regulation of plantation assets and other assets of Perum Perhutani located in the area specified in the KHDPK is in accordance with statutory provisions.

Furthermore, in the Minister of Environment and Forestry Letter No. S.311/MENLHK/SETJEN/KUM.0/10/2022, the plantation assets and other assets of Perum Perhutani in the KHDPK area can still be utilized by Perum Perhutani in accordance with statutory provisions and the arrangements are integrated in the draft Government Regulation Draft.

Up to the completion date of these consolidated financial statement, the Draft of Government Regulation in lieu of 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara have not been designed by the Government however, the draft have reached the harmonization stage.

d. Agreement with PT Paramitra Mulia Langgeng ("PML")

On April 2, 2009 IHT V and PML signed a cooperation agreement No. 52/IHT-V/PKS/II-I/2009 (32/PML/IV/2009) on the use of land with Registers 42, 44 and 46 in Lampung for rubber and acacia cultivation. In practice, planting activities are implemented but harvesting activities have not been carried out because the profit sharing value has not been agreed upon. On the other hand, the land was occupied by the community and cooperated with PT Pemukasakti Manisindah ("PSMI") therefore PML could not carry out activities optimally.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**29. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

**d. Perjanjian dengan PT Paramitra Mulia
Langgeng ("PML") (lanjutan)**

Atas hal tersebut, PML mengajukan kasus ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") dengan nomor 624/X/ARB-BANI/2014 pada Oktober 2015 yang mewajibkan IHT V membayar kompensasi dan biaya administrasi sebesar Rp15, serta denda keterlambatan Rp5 per hari. Atas putusan tersebut IHT V mengajukan banding ke Pengadilan Negeri ("PN") dengan No. 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST dan memenangkan banding tersebut.

PML mengajukan banding atas putusan PN ke Mahkamah Agung ("MA") dengan nomor 8077 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 dan mengeluarkan keputusan inkrah untuk menguatkan keputusan BANI dan memerintahkan Pengadilan Negeri ("PN") untuk melakukan penyitaan atas aset PT IHT V. Per 31 Desember 2017, penyitaan belum dapat dieksekusi mempertimbangkan permohonan penundaan dari IHT V.

Pada tanggal 19 Januari 2018, kedua belah pihak memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian kerjasama tahun 2009 dan mencabut seluruh tuntutan pada periode sebelumnya. Pada tanggal 1 November 2018, IHT V dan PML menandatangani perjanjian damai serta menandatangani addendum perjanjian kerjasama masing-masing dengan No. 617/IHT-V/PKS/11/2018 dan No. 105/PML/XI/2018.

Pada tanggal 14 Oktober 2019, IHT V, PML dan Radjiman Billitea & Partners ("RBP") selaku kuasa hukum IHT V melakukan pertemuan untuk merekonstruksi perjanjian kerjasama No. 617/IHT-V/PKS/11/2018 dan No. 105/PML/IX/2018 tanggal 1 November 2018, akan tetapi kedua belah pihak belum menemukan kesepakatan.

Pada tahun 2020, IHT V telah mengundang PML untuk merekonstruksi perjanjian kerjasama, akan tetapi PML tidak hadir. Pada tanggal 8 Maret 2021, IHT V mengirimkan korespondensi kepada Kepala Kejaksaan Agung RI cq Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) dengan surat No. 83/IHT-V/Sekper/3/2021 sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan.

**29. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS
(continued)**

**d. Agreement with PT Paramitra Mulia Langgeng
("PML") (continued)**

Therefore, PML submitted the case to the Indonesian National Arbitration Agency ("BANI") with number 624/X/ARB-BANI/2014 in October 2015 which obliged IHT V to pay compensation and administration fees of Rp15, and a late fine of Rp5 per day. Based on the decision, IHT V filed an appeal to the District Court ("PN") with No. 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST and won the appeal.

PML appealed the PN's decision to the Supreme Court ("MA") with number 8077 B/Pdt.Sus-Arbt / 2016 and issued a decision to strengthen the decision BANI and ordered District Court ("PN") to confiscate IHT V assets. As of December 31, 2017, confiscation cannot be executed considering delay request from IHT V.

On January 19, 2018, both parties decided to make an addendum to the 2009 cooperation agreement and revoke all claims in the previous period. On November 1, 2018, IHT V and PML signed a peace agreement and an addendum to their respective cooperation agreements with No. 617/IHT-V/PKS/11/2018 and No. 105/PML/XI/2018.

On October 14, 2019, IHT V, PML and Radjiman Billitea & Partners ("RBP") as the attorney of IHT V held a meeting to reconstruct the agreements No. 617/IHT-V/PKS/11/2018 and No. 105/PML/IX/2018 dated November 1, 2018, however both parties have not yet reached a conclusion.

In 2020, IHT V has invited PML to reconstruct the agreement, however PML was absent. On March 8, 2021, IHT V sent a correspondence letter to the Head of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia cq Junior Attorney General for Special Crimes (Jampidsus) with No. 83/IHT-V/Sekper/3/2021 in relation to embezzlement accusation.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**29. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

**d. Perjanjian dengan PT Paramitra Mulia
Langgeng ("PML") (lanjutan)**

Pada tanggal 26 April 2021, IHT V dan Sun Rich.Co melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus dengan nomor surat 173/IHT-V/SKK/4/2021 sehubungan dengan pengakhiran perjanjian karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, pada tanggal 21 Februari 2022 IHT V menerima putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor surat 264/PDT.G/2021/PN.Jkt.Pst yang menyatakan gugatan penggugat dalam konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Pada tanggal 21 April 2022, IHT V dan Rihat Herijon Simanullang & Partners (Sunrich & Co) mengajukan Kontra Memori banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Pada tanggal 18 Agustus 2022, IHT V menerima putusan Pengadilan Tinggi Jakarta atas perkara nomor 439/PDT/2022/PTDKI dengan hasil putusan yaitu mengabulkan sebagian gugatan IHT V, yang menyatakan perjanjian kerja sama pengelolaan Hutan Tanaman antara IHT V dengan PT Paramitra Mulia Langgeng (Tergugat) nomor 52/IHT-V/PKS/II-1/2009 dan Nomor 32/PML/IV/2009 tertanggal 1 April 2009 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan menghukum tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi sejumlah Rp3.421 dan denda 6%.

Pada 19 September 2022, IHT V dan Sunrich & Co mengajukan memori kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 439/PDT/2022/PT DKI Jo Nomor 264/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tanggal 08 Juni 2023, IHT V menerima putusan Mahkamah Agung atas putusan nomor 1200 K/Pdt/2023 dengan hasil putusan yaitu menolak permohonan Kasasi PT INHUTANI V menimbang putusan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Sehingga perkara kembali ke putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 439/PDT/2022/PTDKI.

Pada 8 Juni 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan hasil putusan 1.200 K/Pdt/2023 bahwa Putusan Pengadilan Tinggi menolak gugatan IHT V.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**29. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS
(continued)**

**d. Agreement with PT Paramitra Mulia Langgeng
("PML") (continued)**

*On April 26, 2021, IHT V and Sun Rich.Co filed a lawsuit with the Central Jakarta District Court, Class IA with letter number 173/IHT-V/SKK/4/2021 in connection with the termination of the agreement due to default and unlawful acts. Furthermore, on February 21, 2022, IHT V received a decision from the Central Jakarta District Court with letter number 264/PDT.G/2021/PN.Jkt.Pst which stated that the plaintiff's claim in the convention was unacceptable (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).*

On April 21, 2022, IHT V and Rihat Herijon Simanullang & Partners (Sunrich & Co) filed a Contra Memorandum of Appeal to the Jakarta High Court through the Central Jakarta District Court, and on August 18, 2022, IHT V accepted the decision of the Jakarta High Court in case number 439/ PDT/2022/PTDKI with the result of the decision that is granting part of IHT V's lawsuit, which stated the cooperation agreement in the management of Plantation Forest between IHT V and PT Paramitra Mulia Langgeng (Defendant) number 52/IHT-V/PKS/II-1/2009 and Number 32/PML/IV/2009 dated April 1, 2009 was null and void and did not have binding legal force, and ordered the Defendant to pay the Plaintiff compensation in the amount of Rp. 3,421 and 6% fine.

*On September 19, 2022, IHT V and Sunrich & Co have been filed a memorandum of cassation for the decision of the Jakarta High Court Number 439/PDT/2022/PT DKI Jo Number 264/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst to Supreme Court of the Republic of Indonesia. On June 08, 2023, IHT V accepted the Supreme Court's decision on decision number 1200 K/Pdt/2023, with the decision being to reject the appeal of Cassation by PT INHUTANI V, considering that the decision of the *judex facti*/ High Court of DKI Jakarta in this case is not contrary to the law and/or regulations. Thus, the case is returned to the decision of the Jakarta High Court number 439/PDT/2022/PTDKI.*

As of June 8 2023, Supreme Court stated in verdict 1,200K/Pdt/2023, Supreme Court reject lawsuit from IHT V.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**29. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

**29. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS
(continued)**

**e. Perjanjian Keagenan Produk Hasil Hutan
Bukan Kayu**

**e. Agency Agreements Non Wood Forest
Products**

Perusahaan mengadakan perjanjian keagenan dengan beberapa agen, dimana Perusahaan akan menjual produk hasil hutan bukan kayu melalui beberapa agen. Imbal jasa atas penjualan produk hasil hutan bukan kayu adalah 1,50% dari nilai harga jual dasar. Imbal jasa atas penjualan produk hasil hutan bukan kayu pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp28.635 (2022: Rp34.202) (Catatan 23).

The Company entered into agency agreements with several agents, whereby the Company will sell non wood forest products through several agents. Fees for sales of non wood forest products are 1.50% of the basic selling price. The fee for the sale of non wood forest products on December 31, 2023 amounted to Rp28,635 (2022: Rp34,202) (Note 23).

30. PENGUKURAN NILAI WAJAR

30. FAIR VALUE MEASUREMENT

- a) Nilai tercatat instrumen keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan kurang lebih sebesar nilai wajarnya. Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan lain-lain, utang usaha dan lain-lain dan biaya masih harus dibayar, mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek. Nilai tercatat dari liabilitas jangka panjang dengan suku bunga mengambang kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena dinilai ulang secara berkala.
- b) Nilai wajar aset biologis atas kayu tegakan ditentukan pada level 3, dengan menggunakan pendekatan pendapatan, sedangkan produk agrikultur (getah pinus dan daun kayu putih) ditentukan pada Level 2 berdasarkan harga pasar terkait yang diterapkan terhadap estimasi volume produk.

- a) *The carrying values of financial instruments presented in the statements of financial position approximate their fair values. Management believes that the carrying values of cash and cash equivalents, restricted cash, trade and other receivables, trade and other payables and accrued expenses approximate their fair values due to their short-term maturity. The carrying amounts of long-term liabilities with floating interest rates approximate their fair values as they are reassessed frequently.*
- b) *The fair values of standing timber are determined at Level 3 based on income approach, while the agricultural product (pine sap and eucalyptus leave) are determined at Level 2 based on the applicable market price applied to the estimated volume of the product.*

**31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN**

**31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES**

Grup menghadapi risiko keuangan yang timbul dari kegiatan operasional dan penggunaan instrumen keuangan. Risiko keuangan utama meliputi risiko suku bunga, risiko pasar (termasuk risiko mata uang dan risiko harga komoditas), risiko kredit dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan dan prosedur untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

The Group is exposed to financial risks arising from its operations and the use of financial instruments. The key financial risks include interest rate risk, market risk (including foreign currency risk and commodity price risk), credit risk and liquidity risk. The Board of Director reviews and agrees policies and procedures for the management of these risks, which are described in more detail as follows:

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan instrumen keuangan Grup akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar.

Grup menghadapi risiko keuangan yang timbul dari kegiatan operasional dan penggunaan instrumen keuangan. Risiko keuangan utama meliputi risiko suku bunga, risiko pasar (termasuk risiko mata uang dan risiko harga komoditas), risiko kredit dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan dan prosedur untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut: (lanjutan)

Risiko tingkat suku bunga Grup terutama timbul dari utang jangka panjang. Pinjaman pada berbagai suku bunga menimbulkan risiko suku bunga atas nilai wajar kepada Grup. Tidak terdapat pinjaman Grup yang dikenakan suku bunga tetap.

Saat ini, Grup tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga.

Analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga

Pada tanggal 31 Desember 2023, jika tingkat suku bunga Grup sebesar 10% lebih rendah/tinggi, dengan semua variabel lain konstan, laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebesar Rp373 lebih tinggi/rendah.

Risiko Mata Uang

Risiko mata uang merupakan risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar mata uang. Risiko Grup atas fluktuasi nilai tukar mata uang terutama timbul dari penempatan kas dan setara kas dalam mata uang asing.

Saat ini, Grup tidak memiliki kebijakan lindung nilai yang formal untuk mengelola risiko mata uang.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Interest Rate Risks

Interest rate risk is the risks that the fair value or future cash flows of the Group's financial instruments will fluctuate because of changes in market interest rates.

The Group is exposed to financial risks arising from its operations and the use of financial instruments. The key financial risks include interest rate risk, market risk (including foreign currency risk and commodity price risk), credit risk and liquidity risk. The Board of Director reviews and agrees policies and procedures for the management of these risks, which are described in more detail as follows: (continued)

The Group's exposure to interest rate risk mainly arises from bank loan. Loan with various interest rate inflict interest rate risk on the fair value to the Group. There is no loan at fixed rates.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures.

Sensitivity analysis for rate risk

As of December 31, 2023, if the interest rate of the Group amounted to 10% lower/higher, with all other variables constant, the income before income tax expense for the year ended on that date amounted to Rp373 higher/lower.

Currency Risk

Currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in currency exchange rates. Risk of the Group against fluctuations in currency values arises mainly from placement of cash and cash equivalent in foreign currency.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy to manage currency risk.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Analisis sensitivitas untuk risiko nilai mata uang asing

Pada tanggal 31 Desember 2023, jika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS melemah/menguat sebanyak 10% dengan semua variabel konstan, laba sebelum beban pajak untuk tahun tersebut sebesar Rp19.525 lebih tinggi/rendah, terutama sebagai akibat kerugian/keuntungan translasi kas dan setara kas, piutang usaha dan uang muka pelanggan dalam Dolar AS, yang secara kolektif dalam posisi aset moneter neto.

Grup menghadapi risiko keuangan yang timbul dari kegiatan operasional dan penggunaan instrumen keuangan. Risiko keuangan utama meliputi risiko suku bunga, risiko pasar (termasuk risiko mata uang dan risiko harga komoditas), risiko kredit dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan dan prosedur untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut: (lanjutan)

Risiko Harga Komoditas

Risiko harga komoditas adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi dikarenakan perubahan harga komoditas (selain yang timbul dari risiko tingkat suku bunga atau risiko mata uang asing), apakah perubahan ini disebabkan oleh faktor-faktor khusus untuk instrumen keuangan secara individu atau faktor yang mempengaruhi semua instrumen keuangan yang sama yang diperdagangkan di pasar.

Risiko harga komoditas Grup timbul dari penjualan kayu dan non kayu (gondorukem, terpetin, minyak kayu putih dan getah pinus). Harga barang jadi dapat berfluktuasi secara signifikan tergantung pada situasi pasar dan faktor-faktor lain seperti cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran di pasar dan lingkungan ekonomi global.

Pada saat ini, Grup tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko harga komoditas.

Risiko Kredit

Risiko kredit yang dihadapi oleh Grup berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan dan penempatan rekening koran dan deposito pada bank.

Selain dari pengungkapan di bawah ini, Grup tidak memiliki konsentrasi risiko kredit.

**31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Sensitivity analysis for foreign currency risk

As of December 31, 2023, if the Rupiah exchange rate against the US Dollar weakened / strengthened by 10% with all variables constant, profit before tax expense for the year amounted to Rp19,525 higher/lower, mainly as a result of cash translation losses/gains and cash equivalents, trade receivables and customer advances in US Dollars, which are collectively in a position of net monetary assets.

The Group is exposed to financial risks arising from its operations and the use of financial instruments. The key financial risks include interest rate risk, market risk (including foreign currency risk and commodity price risk), credit risk and liquidity risk. The Board of Director reviews and agrees policies and procedures for the management of these risks, which are described in more detail as follows: (continued)

Commodity Price Risk

Commodity price risk is the risk that fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in commodity prices (other than those arising from interest rate risk or foreign currency risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument or factors affecting all similar financial instruments traded in the market.

The Group's exposure to commodity price risk arises from its sales of wood and non wood (gum rosin, turpentine, eucalyptus oil and pine sap). Prices of raw material and end products may fluctuate significantly depending on the market situation and factors such as weather, government policy, level of demand and supply in the market and the global economic environment.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for commodity price exposures.

Credit Risk

The Group has credit risk arising from the credits granted to the customers and placement of current accounts and deposits in the banks.

Other than as disclosed below, the Group has no concentration of credit risk.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Grup menghadapi risiko keuangan yang timbul dari kegiatan operasional dan penggunaan instrumen keuangan. Risiko keuangan utama meliputi risiko suku bunga, risiko pasar (termasuk risiko mata uang dan risiko harga komoditas), risiko kredit dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan dan prosedur untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut: (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Kas dan Setara Kas

Risiko kredit atas penempatan rekening koran dan deposito dikelola oleh manajemen sesuai dengan kebijakan Grup. Investasi atas kelebihan dana dibatasi untuk tiap-tiap bank dan kebijakan ini dievaluasi setiap tahun oleh dewan direksi. Batas tersebut ditetapkan untuk meminimalkan risiko konsentrasi kredit sehingga mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank-bank tersebut.

Piutang Usaha

Terdapat kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya dilakukan kepada pelanggan yang dapat dipercaya dengan rekam jejak atau sejarah kredit yang baik. Merupakan kebijakan Grup bahwa semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Untuk penjualan ekspor, Grup mensyaratkan pembayaran saat penyerahan dokumen penjualan. Grup memiliki kebijakan yang membatasi jumlah kredit untuk tiap-tiap pelanggan dan saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang tak tertagih.

Ketika pelanggan gagal melakukan pelunasan sesuai dengan syarat pembayaran, Grup akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Grup akan menempuh jalur hukum. Sesuai dengan evaluasi oleh Grup, penyisihan spesifik dapat dibuat jika utang dianggap tidak tertagih. Untuk menekan risiko kredit, Grup akan menghentikan penyaluran semua produk kepada pelanggan yang terlambat dan/atau gagal bayar.

**31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

The Group is exposed to financial risks arising from its operations and the use of financial instruments. The key financial risks include interest rate risk, market risk (including foreign currency risk and commodity price risk), credit risk and liquidity risk. The Board of Director reviews and agrees policies and procedures for the management of these risks, which are described in more detail as follows: (continued)

Credit Risk (continued)

Cash and Cash Equivalents

Credit risk arising from placements of current accounts and deposits is managed in accordance with the Group's policy. Investments of surplus funds are limited for each banks and reviewed annually by the board of directors. Such limits are set to minimize the concentration of credit risk and therefore mitigate financial loss through potential failure of the banks.

Trade Receivables

The Group has policies in place to ensure that sales of products are made only to creditworthy customers with proven track records or good credit history. It is the Group's policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. For export sales, the Group requires cash against the presentation of documents of title. The Group has policies that limit the amount of credit exposure to any particular customer and receivable balances are monitored on an ongoing basis to reduce the Group's exposure to bad debts.

When a customer fails to make payment within the granted credit terms, the Group will contact the customer to act on overdue receivable. If the customer does not settle the overdue receivable within a reasonable time, the Group will proceed with legal actions. Depending on the Group's assessment, specific provisions may be made if the debt is deemed uncollectible. To mitigate its credit risk, the Group will cease the supply of all products to customers in the event of late payment and/or default.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Grup menghadapi risiko keuangan yang timbul dari kegiatan operasional dan penggunaan instrumen keuangan. Risiko keuangan utama meliputi risiko suku bunga, risiko pasar (termasuk risiko mata uang dan risiko harga komoditas), risiko kredit dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan dan prosedur untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut: (lanjutan)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Grup akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan oleh karena keterbatasan dana.

Grup mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi utang yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan bank.

Grup secara teratur mengevaluasi proyeksi arus kas proyeksi dan aktual dan terus menerus memantau tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel dibawah ini merupakan daftar jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskontokan:

**31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

The Group is exposed to financial risks arising from its operations and the use of financial instruments. The key financial risks include interest rate risk, market risk (including foreign currency risk and commodity price risk), credit risk and liquidity risk. The Board of Director reviews and agrees policies and procedures for the management of these risks, which are described in more detail as follows: (continued)

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Group will have difficulty in fulfilling its financial obligation due to limited availability of funds.

The Group manages its liquidity profile to be able to finance its capital expenditures and service its maturing debts by maintaining sufficient cash and bank.

The Group regularly evaluates its projected and actual cash flow information and continuously assesses the maturity date of financial assets and liabilities.

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities, based on contractual undiscounted payments:

31 Desember 2023/December 31, 2023

	Kurang dari 1 Tahun/ Less Than 1 Year	1 - 5 Tahun/ 1 - 5 Year	Di atas 5 Tahun/ More Than 5 Years	Total/ Total	
Pinjaman bank jangka pendek	496.975	-	-	496.975	Short-term bank loans
Beban akrual	232.796	-	-	232.796	Accrued expenses
Utang usaha	258.266	-	-	258.266	Trade payables
					Other
Liabilitas jangka pendek lainnya	182.235	-	-	182.235	short-term liabilities
Pinjaman bank jangka panjang	87.713	80.000	-	167.713	Long-term bank loans
Pinjaman jangka panjang lainnya	2.264	11.898	91.987	106.149	Other long-term loans
Liabilitas sewa	28.334	35.040	-	63.374	Lease liabilities
					Other
Liabilitas jangka panjang lainnya	36.441	-	-	36.441	long-term liabilities
Total	1.325.024	126.938	91.987	1.543.949	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Grup menghadapi risiko keuangan yang timbul dari kegiatan operasional dan penggunaan instrumen keuangan. Risiko keuangan utama meliputi risiko suku bunga, risiko pasar (termasuk risiko mata uang dan risiko harga komoditas), risiko kredit dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan dan prosedur untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut: (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

**31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

The Group is exposed to financial risks arising from its operations and the use of financial instruments. The key financial risks include interest rate risk, market risk (including foreign currency risk and commodity price risk), credit risk and liquidity risk. The Board of Director reviews and agrees policies and procedures for the management of these risks, which are described in more detail as follows: (continued)

Liquidity Risk (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022

	Kurang dari 1 Tahun/ Less Than 1 Year	1 - 5 Tahun/ 1 - 5 Year	Di atas 5 Tahun/ More Than 5 Years	Total/ Total	
Beban akrual	362.486	-	-	362.486	Accrued expenses
Pinjaman bank jangka pendek	320.700	-	-	320.700	Short-term bank loans
Utang usaha	163.550	-	-	163.550	Trade payables
Pinjaman bank jangka panjang	57.083	70.528	-	127.611	Long-term bank loans
Pinjaman jangka panjang lainnya	3.103	111.172	-	114.275	Other long-term loans
Liabilitas jangka pendek lainnya	92.567	-	-	92.567	Other short-term liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	34.347	-	34.347	Other long-term liabilities
Liabilitas sewa	6.184	3.580	-	9.764	Lease liabilities
Total	1.005.673	219.627	-	1.225.300	Total

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas Perusahaan adalah sebagai berikut:

Changes in liabilities arising from financing activities in the consolidated statement of cash flows are as follows:

	1 Januari/ January 1	Arus Kas/ Cash Flow	Lain-Lain/ Others	31 Desember/ December 31	
2023					2023
Pinjaman bank jangka pendek	300.000	158.886	1.332	460.218	Short-term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	121.667	38.481	(50.148)	110.000	Long-term bank loans
Pinjaman jangka Panjang lainnya dan Dana Reboisasi	108.069	(7.097)	-	100.972	Other long-term loans and reforestation fund
Liabilitas sewa	8.669	(11.721)	63.394	60.342	Lease liabilities
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	538.405	178.549	14.578	731.532	Total liabilities from financing activities
2022					2022
Pinjaman bank jangka pendek	277.130	22.870	-	300.000	Short-term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	152.109	(30.442)	-	121.667	Long-term bank loans
Pinjaman jangka Panjang lainnya dan Dana Reboisasi	107.988	-	81	108.069	Other long-term loans and reforestation fund
Liabilitas sewa	20.870	(16.817)	4.616	8.669	Lease liabilities
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	558.097	(24.389)	4.697	538.405	Total liabilities from financing activities

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

32. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

	2023	2022	
Transaksi non-kas			Non-cash transaction
Penambahan aset hak guna melalui liabilitas sewa	63.394	4.616	Additions of right-of-use assets through lease liabilities
Beban bunga pinjaman bank jangka pendek	1.332	-	Interest expense of short-term bank loans
Beban bunga pinjaman jangka panjang lainnya	-	81	Interest expense other long-term loans
Beban bunga pinjaman bank jangka panjang	(50.148)	-	Interest expense of long-term bank loans
Total	14.578	4.697	Total

33. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2024.

33. RESPONSIBILITY OF MANAGEMENT AND APPROVALS OF PREPARATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Group is responsible for the preparation and presentation of consolidated financial statements that were authorized to be issued by the Directors on March 30, 2024.

34. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK"), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini:

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024

Pilar Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini memberikan persyaratan dan pedoman bagi entitas untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang benar dalam menyusun laporan keuangan bertujuan umum. Akan ada 4 (empat) standar akuntansi keuangan yang saat ini diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional,
2. Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK),
3. Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Swasta/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan
4. Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah.

34. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board ("DSAK"), but not yet effective for current year financial statements are disclosed below:

Effective beginning on or after January 1, 2024

Financial Accounting Standards Pillars

These standards provides requirements and guidelines for entities to apply the correct financial accounting standards in preparing general purpose financial statements. There will be 4 (four) financial accounting standards that are currently applied in Indonesia, namely:

1. Pillar 1 International Financial Accounting Standards,
2. Pillar 2 Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK),
3. Pillar 3 Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities/Indonesian Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability, and
4. Pillar 4 Indonesian Financial Accounting Standards for Micro Small and Medium Entities.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

*The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.*

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN
NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)**

**34. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

Standar Akuntansi Keuangan Internasional

International Financial Accounting Standard

Standar ini merupakan adopsi penuh dari *International Financial Reporting Standards* ("IFRS") yang diterjemahkan kata demi kata dan tidak ada modifikasi dari Standar IFRS, termasuk tanggal efektifnya. Entitas yang memenuhi persyaratan dapat menerapkan standar ini, sejak tanggal efektif.

This standard is a full-adoption of International Financial Reporting Standards ("IFRS") which is translated in a word-for-word basis and there is no modifications from IFRS Standards, including the effective date. Entities that meet the requirements can apply this standard, from the effective date.

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Financial Accounting Standards Nomenclature

Standar ini mengatur penomoran baru untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh DSAK IAI.

This standard regulates the new numbering for financial accounting standards applicable in Indonesia issued by DSAK IAI.

Amandemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amendment of PSAK 1: Non-current Liabilities with Covenants

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- 1) hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan,
- 2) hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- 3) klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan liabilitas, dan
- 4) hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

- 1) *what is meant by a right to defer settlement,*
- 2) *the right to defer must exist at the end of the reporting period,*
- 3) *classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and*
- 4) *only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.*

Selain itu, persyaratan telah diperkenalkan untuk mewajibkan pengungkapan ketika suatu kewajiban timbul dari pinjaman perjanjian diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan di masa depan dalam waktu dua belas bulan.

In addition, a requirement has been introduced to require disclosure when a liability arising from a loan agreement is classified as non-current and the entity's right to defer settlement is contingent on compliance with future covenants within twelve months.

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 secara retrospektif dengan penerapan dini diperkenankan.

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024 retrospectively with early adoption permitted.

Grup saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Grup.

The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN
NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)**

Amandemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam Jual
Beli dan Sewa-balik

Amandemen PSAK 73 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

Amandemen berlaku secara retrospektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan. Grup saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Grup.

Amandemen PSAK 2 dan PSAK 60: Pengaturan
Pembiayaan Pemasok

Amandemen PSAK 2 dan PSAK 60 mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amandemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

Amandemen ini akan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan, namun perlu diungkapkan. Amandemen tersebut diperkirakan tidak mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

**34. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

Amendment of PSAK 73: Lease liability in a Sale and
Leaseback

The amendment to PSAK 73 Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.

The amendment applies retrospectively to annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024. Earlier application is permitted. The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

Amendment of PSAK 2 and PSAK 60: Supplier
Finance Arrangements

The amendments to PSAK 2 and PSAK 60 clarify the characteristics of supplier finance arrangements and require additional disclosure of such arrangements. The disclosure requirements in the amendments are intended to assist users of financial statements in understanding the effects of supplier finance arrangements on an entity's liabilities, cash flows and exposure to liquidity risk.

The amendments will be effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024. Early adoption is permitted, but will need to be disclosed. The amendments are not expected to have a material impact on the Group's financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN
NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari
2025**

PSAK 74: Kontrak Asuransi

Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, pada saat berlaku efektif PSAK 74 akan menggantikan PSAK 62: *Kontrak Asuransi*. PSAK 74 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 74 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.

PSAK 74 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025, dengan mensyaratkan angka komparatif. Penerapan dini diperkenankan bila entitas juga menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72 pada atau sebelum tanggal penerapan awal PSAK 74. Standar ini tidak diharapkan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Grup pada saat diadopsi untuk pertama kali.

**34. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

Effective beginning on or after January 1, 2025

PSAK 74: Insurance Contracts

A comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure, upon its effective date, PSAK 74 will replace PSAK 62: Insurance Contracts. PSAK 74 applies to all types of insurance contracts, life, non-life, direct insurance and re-insurance, regardless of the entities issuing them, as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features, while a few scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 74 is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers.

PSAK 74 is effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2025, with comparative figures required. Early application is permitted, provided the entity also applies PSAK 71 and PSAK 72 on or before the date of initial application of PSAK 74. This standard is not expected to have any impact to the financial reporting of the Group upon first-time adoption.

FUNCTIONAL VALUE CHAIN

PENGUATAN END TO END BUSINESS



2023
LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT